



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2045



RPJP

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA**



BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025-2045

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 akan segera berakhir dan untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang tahapan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa RPJP Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah/Qanun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu memebntuk Qanun tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
18. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
Dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN RAYA TAHUN 2025-2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya dapat disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan kabupaten yang menjadi kewenangan kabupaten.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka waktu 20 Tahun ke depan terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut RPJM Kabupaten Nagan Raya adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten (RKPK) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II

PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NAGAN RAYA

Pasal 2

RPJP Kabupaten Nagan Raya merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yang akan digunakan oleh Bupati sebagai pedoman untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 3

- (1) RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disusun dengan sitematika sebagai berikut :
 - BAB I. Pendahuluan
 - BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah
 - BAB IV. Visi dan Misi
 - BAB V. Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok
 - BAB VI. Penutup
- (2) RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 4

RPJP Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 serta menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahunan.

BAB III

PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025-2045

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
- (2) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya; dan
 - b. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya
- (3) RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan perubahan apabila :
 - a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi eksisting; dan
 - b. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kesenjangan yang terjadi perubahan yang mendasar.
- (4) RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat dilakukan perubahan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

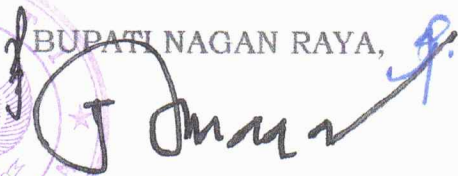
BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada Tanggal 1 Oktober 2025 M
9 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI NAGAN RAYA,

TR. KEUMANGAN

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 2 Oktober 2025 M
10 Jumadil Awal 1447 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 2
NOREG. QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH : (2/92/2025)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Untuk tingkat Nasional Pemerintah wajib menyusun RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah pemerintah daerah wajib menyusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional, sementara RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah.

Bupati bersama DPRK menyusun RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJP Nasional Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah dan harus ditetapkan dalam bentuk Qanun paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2024 dan bagi Kepala daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah harus melakukan pembahasan Qanun tentang RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 dengan DPRK selaras dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 menitikberatkan pada tiga proses transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana juga diatur dalam RPJP Nasional.

Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 serta menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 (lima) tahunan setiap priodenya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2025 NOMOR: 59



	Halaman
DAFTAR ISI	i-1
DAFTAR GAMBAR	i-7
DAFTAR TABEL	i-10
 BAB I PENDAHULUAN	 I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-8
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	I-10
1.4. Maksud dan Tujuan	I-13
1.5. Sistematika Penulisan	I-13
 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI	
KABUPATEN NAGAN RAYA	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi.....	II-1
2.1.1. Aspek Geografis	II-2
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah.....	II-8
2.1.1.3. Potensi Sumber Daya Alam	II-10
2.1.1.4. Potensi Air, Pangan dan Energi.....	II-16
2.1.1.5. Wilayah Rawan Bencana	II-18
2.1.2. Demografi	II-20
2.1.2.1. Jumlah Penduduk	II-20
2.1.2.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok	
Umur	II-22
2.1.2.3. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-23
2.1.2.4. Kepadatan Penduduk	II-23
2.1.2.5. Rasio Jenis Kelamin	II-25
2.1.2.6. Jumlah Angkatan Kerja	II-26
2.1.2.7. Struktur dan Indeks Ketergantungan	
Penduduk	II-26
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-27
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan	
Ekonomi	II-27
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB	II-27
2.2.1.2. Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita).....	II-31
2.2.1.3. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini).....	II-32
2.2.1.4. Tingkat Pengangguran Terbuka	II-33
2.2.1.5. Kemiskinan	II-35
2.2.1.6. Laju Inflasi	II-39
2.2.1.7. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	II-40
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	II-42
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh	II-42
2.3.1.1. Penyelenggaraan Syariat Islam dan Ibadah	II-42
2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib	II-48



2.3.2.1.	Layanan Urusan Wajib Dasar	II-48
2.3.2.1.1.	Pendidikan	II-48
2.3.2.1.2.	Kesehatan	II-56
2.3.2.1.3.	Pekerjaan Umum, Pengairan dan Penataan Ruang	II-65
2.3.2.1.4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	II-71
2.3.2.1.5.	Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat	II-78
2.3.2.1.6.	Kebencanaan	II-80
2.3.2.1.7	Sosial	II-86
2.3.2.2.	Layanan Urusan wajib Non Dasar	II-89
2.3.2.2.1.	Ketenagakerjaan	II-89
2.3.2.2.2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-92
2.3.2.2.3.	Pangan	II-96
2.3.2.2.4.	Pertanahan	II-97
2.3.2.2.5.	Lingkungan Hidup	II-103
2.3.2.2.6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-104
2.3.2.2.7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong	II-106
2.3.2.2.8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-106
2.3.2.2.9.	Perhubungan	II-109
2.3.2.2.10.	Komunikasi dan Informatika dan Statistik	II-110
2.3.2.2.11.	Usaha Mikro Kecil dan Menengah	II-113
2.3.2.2.12.	Penanaman Modal	II-116
2.3.2.2.13.	Kepemudaan dan Olah Raga	II-118
2.3.2.2.14.	Kebudayaan	II-119
2.3.2.2.15.	Perpustakaan	II-121
2.3.2.2.16.	Kearsipan	II-121
2.3.3.	Fokus Layanan Urusan Pilihan	II-122
2.3.3.1.	Pariwisata	II-122
2.3.3.2.	Pertanian	II-125
2.3.3.3.	Perkebunan	II-129
2.3.3.4.	Peternakan	II-131
2.3.3.5.	Perdagangan	II-131
2.3.3.6.	Perindustrian	II-132
2.3.3.7.	Transmigrasi	II-133
2.3.3.8.	Kelautan dan Perikanan	II-135
2.3.4.	Fokus Layanan Penunjang Urusan	II-144
2.3.4.1.	Perencanaan Pembangunan	II-144
2.3.4.2.	Keuangan	II-147
2.3.4.3.	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan	II-149
2.3.4.4.	Penelitian dan Pengembangan	II-152
2.3.4.5.	Pengawasan	II-153
2.3.4.6.	Sekretariat DPRK	II-153
2.3.4.7.	Perkembangan Reformasi Birokrasi	II-153
2.3.4.8.	Indeks Pelayanan Publik	II-154
2.3.4.9.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-155
2.4.	Aspek Daya Saing Daerah	II-155
2.4.1.	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-155
2.4.1.1.	Pengeluaran dan Konsumsi Rumah tangga Per	

	Kapita	II-155
2.4.1.2.	Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non Pangan Per Kapita	II-156
2.4.1.3.	Iklim Berinvestasi	II-159
2.4.2.	Fokus fasilitas Wilayah / Infrastruktur	II-161
2.4.2.1.	Persentase Penduduk Menggunakan air Bersih ..	II-161
2.4.2.2.	Rasio ketersediaan daya Listrik	II-162
2.4.2.3.	Persentase Rumah tangga yang Menggunakan ... Listrik.....	II-162
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025	II-163
2.5.1.	Pertumbuhan Ekonomi	II-165
2.5.2.	Pendapatan Per kapita/ PDRB Perkapita	II-167
2.5.3.	Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)	II-169
2.5.4.	Tingkat Pengangguran Terbuka	II-170
2.5.5.	Tingkat Kemiskinan	II-173
2.5.6.	Laju Inflasi.....	II-178
2.5.7.	Indeks Pembangunan Manusia.....	II-180
2.6.	Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik.....	II-187
2.6.1.	Kependudukan.....	II-187
2.6.1.1.	Proyeksi Jumlah Total Penduduk	II-187
2.6.1.2.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-188
2.6.1.3.	Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-189
2.6.1.4.	Analisis Kependudukan.....	II-191
2.6.1.4.1.	Kepadatan penduduk	II-191
2.6.1.4.2.	Pertumbuhan Penduduk	II-192
2.6.1.4.3.	Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi	II-192
2.6.1.4.4.	Angka Ketergantungan	II-193
2.6.1.4.5.	Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2045	II-194
2.6.2.	Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar.....	II-195
2.6.2.1.	Rumah / Tempat Tinggal	II-195
2.6.2.2.	Permukiman	II-196
2.6.2.3.	Air Bersih	II-196
2.6.2.4.	Sanitasi	II-197
2.6.2.5.	Energi/Listrik	II-197
2.6.2.6.	Persampahan	II-198
2.6.2.7.	Infrastruktur kesehatan	II-198
2.6.2.8.	Infrastruktur Pendidikan	II-200
2.6.2.9.	Infrastruktur Jalan dan Jembatan.....	II-203
2.6.2.10.	Infrastruktur Pengairan	II-210
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-210
2.7.1.	Indikasi Kinerja Pembangunan berdasarkan RTRW.....	II-210
2.7.1.1.	Perwujudan Struktur Ruang.....	II-211
2.7.1.2.	Perwujudan Pola Ruang	II-212
2.7.1.2.1.	Kawasan Peruntukan Lindung	II-213
2.7.1.2.2.	Kawasan Peruntukan Budidaya	II-214



2.7.1.2.3.	Kawasan Pertambangan dan Energi.....	II-215
2.7.1.2.4.	Kawasan Peruntukan Industri	II-215
2.7.1.2.5.	Kawasan Industri Pariwisata Berkelanjutan	II-215
2.7.1.3.	Kawasan Strategis Berkelanjutan	II-216
2.7.2.	Perencanaan Sektorial	II-218
2.7.2.1.	GDPK Kabupaten Nagan Raya 2017-2035	II-218
2.7.2.1.1.	Kuantitas penduduk	II-220
2.7.2.1.2.	Pengaturan Fertilitas	II-222
2.7.2.1.3.	Penurunan Mortalitas	II-223
2.7.2.1.4.	Kualitas Penduduk	II-225
2.7.2.1.5.	Kondisi keluarga	II-230
2.7.2.1.6.	Penataan Persebaran dan mobilitas penduduk...	II-230
2.7.2.1.7.	Pembangunan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan	II-231
2.7.2.2.	Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)	II-231
2.7.2.3.	Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan	II-239
2.7.2.3.1.	Pendekatan Proses Perencanaan Komprensensif	II-239
2.7.2.3.2.	Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan	II-240
2.7.2.3.3.	pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat	II-240
2.7.2.3.4.	Pendekatan Pengembangan Destinasi	II-241
2.7.2.3.5.	Pendekatan Pendorong dan Penarik Wisatawan	II-241
2.7.2.4.	Sistem Inovasi daerah	II-243
2.7.2.5.	Kawasan Industri Terpadu	II-247
2.8.	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	II-250
2.8.1.	Daya Dukung	II-250
2.8.1.1.	Daya Dukung Sumber Daya Air.....	II-250
2.8.1.2.	Daya Dukung Penduduk Optimum.....	II-252
2.8.1.3.	Daya Dukung Penutupan lahan Optimum	II-253
2.8.2.	Perubahan Iklim	II-253
2.8.3.	Sumber Daya Hutan dan Keanekaragaman Hayati	II-254
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	III-1
3.1.	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	III-2
3.1.1.	Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih Rendah	III-2
3.1.2.	Produktivitas, Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal	III-3
3.1.3.	Permasalahan Implementasi Syariat Islam dan Kearifan Budaya	III-4
3.1.4.	Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi	III-5
3.1.5.	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan .	III-5
3.1.6.	Pengelolaan Lingkungan Belum Optimal Serta Rendahnya Ketahanan Kebencanaan	III-6
3.1.7.	Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar dan	



	Konektivitas Antar Wilayah	III-6
4.1.	Isu-Isu Strategis.....	III-7
BAB IV VISI DAN MISI KABUPATEN NAGAN RAYA		
	TAHUN 2025-2045	IV-1
4.1.	Visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	IV-1
4.2.	Misi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	IV-2
4.3.	Penyelarasan Visi dan Misi Nagan Raya, Aceh Dan Nasional	IV-3
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		
	KABUPATEN NAGAN RAYA.....	V-1
5.1.	Arah Kebijakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	V-1
5.1.1.	Arah Kebijakan Periode 2025-2029	V-1
5.1.2.	Arah Kebijakan Periode 2030-2034	V-3
5.1.3.	Arah Kebijakan Periode 2035-2039	V-5
5.1.4.	Arah Kebijakan Periode 2040-2045	V-6
5.2.	Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Nagan Raya	V-14
5.2.1.	Arah Kebijakan Transformasi Sosial	V-14
5.2.1.1.	Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	V-15
5.2.1.2.	Sasaran Pokok 2 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Yang Merata	V-22
5.2.1.3.	Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya Kesejahteraan Dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	V-30
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi	V-35
5.2.2.1.	Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Iptek, Inovasi Dan Produktivitas Ekonomi	V-35
5.2.2.2.	Sasaran Pokok 5: Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau	V-47
5.2.2.3.	Sasaran Pokok 6 : Meningkatnya Transformasi Digital.....	V-49
5.2.2.4.	Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global.....	V-53
5.2.2.5.	Sasaran Pokok 8 : Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	V-56
5.2.3.	Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berintegritas dan Profesional .	V-62
5.2.3.1.	Sasaran Pokok 9 : Meningkatnya Reformasi Tata Kelola.....	V-62
5.2.4	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya Yang Islami, Damai Dan Demokratis	V-67
5.2.4.1.	Sasaran Pokok 10 : Memperkuat Perdamaian Dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban Dan Ketentraman Yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial.....	V-67
5.2.4.2.	Sasaran Pokok 11 : Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro.....	V-72



5.2.4.3.	Sasaran Pokok 12 : Meningkatnya Implementasi Syariat Islam	V-76
5.2.5.	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	V-79
5.2.6.	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.....	V-82
5.2.6.1.	Sasaran Pokok 13 : Meningkatnya Kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju	V-83
5.2.6.2.	Sasaran Pokok 14 : Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	V-87
5.2.6.3.	Sasaran Pokok 15 : Meningkatnya Lingkungan Hidup Berkualitas	V-91
5.2.6.4.	Sasaran Pokok 16 : Meningkatnya Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	V-95
5.2.7.	Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.....	V-100
5.2.7.1	Sasaran Pokok 17 : Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	V-100
5.2.8.	Mewujudkan Kesiambungan dan Keberlanjutan Pembangunan	V-104
BAB VI	PENUTUP	VI-1
6.1	Kaidah pelaksanaan.....	VI-1
6.2	Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan	VI-1
6.2.1.	Keterkaitan RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 dengan Perencanaan Turunannya...	VI-2
6.2.2.	Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan.....	VI-3
6.2.2.1.	Skema Pendanaan dan Penganggaran	VI-4
6.2.2.2.	Kerangka Pengendalian	VI-5
6.2.3.	Sistem Insentif.....	VI-7
6.2.4.	Mekanisme Perubahan	VI-7
6.2.5.	Komunikasi Publik.....	VI-8
6.2.6.	Analisis Manajemen Risiko	VI-9
6.3.	Pembiayaan Pembangunan	VI-10
6.4	Kerangka Regulasi	VI-11



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya	II-3
Gambar 2.2 Peta Hidrologi Kabupaten Nagan Raya.....	II-6
Gambar 2.3 Peta Klimatologi Kabupaten Nagan Raya.....	II-7
Gambar 2.4 Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Nagan Raya	II-15
Gambar 2.5 Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya	II-19
Gambar 2.6 PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (triliyun).....	II-28
Gambar 2.7 PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (triliyun).....	II-30
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (persen)	II-31
Gambar 2.9 PDRB riil perkapita Kabupaten Nagan Raya (jutaan rupiah) Tahun 2014-2024	II-32
Gambar 2.10 Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-33
Gambar 2.11 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-34
Gambar 2.12 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (ribuan)	II-35
Gambar 2.13 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-36
Gambar 2.14 Perkembangan Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-37
Gambar 2.15 Perkembangan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-38
Gambar 2.16 Perkembangan Inflasi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2022	II-39
Gambar 2.17 Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024.....	II-40



Gambar 2.18 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2024 II-42

Gambar 2.19 Jumlah ZIS yang Terhimpun dan yang Tersalurkan Tahun 2017-2024 II-47

Gambar 2.20 APM jenjang SD/MI Kabupaten Nagan Raya Selama Kurun Waktu Tahun 2014 – 2024 II-51

Gambar 2.21 Angka Partisipasi Murni SMP/MTsN Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 II-52

Gambar 2.22 Angka Partisipasi Murni SMA/MA di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 – 2024..... II-52

Gambar 2.23 Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 II-53

Gambar 2.24 Prevalensi Stunting Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional Tahun 2021 – 2023 II-65

Gambar 2.25 Peta Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya 2015-2035.. II-68

Gambar 2.26 Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2014-2024 II-73

Gambar 2.27 Grafik Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024II-77

Gambar 2.28 Rasio Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Nagan Raya II-78

Gambar 2.29 Prioritas Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya... II-84

Gambar 2.30 Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2024 II-93

Gambar 2.31 Indek Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2017-2023.. II-94

Gambar 2.32 Nilai Komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB (Juta Rupiah) II-156

Gambar 2.33 Nilai PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (triliyun) II-165

Gambar 2.34 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya Tahun 2014-2024 II-167

Gambar 2.35 PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nagan Raya



(juta rupiah) Tahun 2014-2024	II-168
Gambar 2.36 PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (triliyun) Tahun 2014-2024	II-169
Gambar 2.37 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024	II-174
Gambar 2.38 Persentase Penduduk Miskin Nasional, Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-175
Gambar 2.39 Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Aceh, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024	II-176
Gambar 2.40 Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-177
Gambar 2.41 Posisi Relatif Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024.....	II-181
Gambar 2.42 Perkembangan Indek Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024.....	II-182
Gambar 2.43 Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2024	II-183
Gambar 2.44 Perbandingan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Saat Lahir Tahun 2017-2024	II-184
Gambar 2.45 Capaian Indikator Pengeluaran Ril Perkapita Tahun 2017-2024	II-185
Gambar 2.46 Perbandingan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2017-2024	II-186
Gambar 2.47 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2045	II-188
Gambar 2.48 Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020-2045 (Ribu).....	II-189
Gambar 2.49 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia (%) Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	II-193
Gambar 2.50 Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya	II-211
Gambar 2.51 Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya.....	II-213
Gambar 6.1 Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Nasional..... Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah	VI-3



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 2.1	Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	II-1
Tabel 2.2	Jumlah Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nagan Raya.....	II-2
Tabel 2.3	Geologi Di Kabupaten Nagan Raya.....	II-5
Tabel 2.4	Hidrologi Kabupaten Nagan Raya	II-6
Tabel 2.5	Klimatologi Di Kabupaten Nagan Raya.....	II-7
Tabel 2.6	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya	II-9
Tabel 2.7	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya	II-10
Tabel 2.8	Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya	II-17
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-21
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-22
Tabel 2.11	Laju Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-23
Tabel 2.12	Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-24
Tabel 2.13	Jumlah penduduk Berdasarkan Kelamin di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-25
Tabel 2.14	Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-25
Tabel 2.15	Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 – 2024	II-26
Tabel 2.16	Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-27



Tabel 2.17	Peranan PDRB Lima Kategori Lapangan Usaha Terbesar Tahun 2014-2024 (Persen)	II-29
Tabel 2.18	Perkembangan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tetangga tahun 2014-2024	II-41
Tabel 2.19	Kasus Pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2024	II-43
Tabel 2.20	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam Tahun 2014-2024	II-44
Tabel 2.21	Jumlah Kader Ulama yang Mendapatkan Pelatihan Tahun 2014-2024	II-45
Tabel 2.22	Tipe Dayah dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya ...	II-46
Tabel 2.23	Pendidikan yang Ditamatkan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-48
Tabel 2.24	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan NASIONAL Tahun 2014-2024	II-49
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-50
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024	II-50
Tabel 2.27	Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-55
Tabel 2.28	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-56
Tabel 2.29	Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-57
Tabel 2.30	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024	II-57
Tabel 2.31	Kasus TBC di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 – 2024.....	II-58
Tabel 2.32	Rasio Dokter Persatuan Penduduk Tahun 2014 – 2024	II-59
Tabel 2.33	Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk Tahun 2014 – 2024.....	II-60



Tabel 2.34	Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024.....	II-62
Tabel 2.35	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014 – 2024.....	II-63
Tabel 2.36	Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024.....	II-63
Tabel 2.37	Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Nagan Raya dalam kondisi mantap Tahun 2014-2024	II-65
Tabel 2.38	Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Tahun 2014-2024	II-66
Tabel 2.39	Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015-2035	II-67
Tabel 2.40	Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Nagan Raya.....	II-69
Tabel 2.41	Kondisi Saluran Irigasi Permukaan berdasarkan Kewenangan di Kabupaten Nagan Raya 2015-2035 ...	II-70
Tabel 2.42	Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten Nagan Raya dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024	II-71
Tabel 2.43	Rasio Rumah Layak Huni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-72
Tabel 2.44	Persentase Luas kawasan Kumuh Tahun 2015-2024.	II-75
Tabel 2.45	Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-76
Tabel 2.46	Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-76
Tabel 2.47	Jumlah Personil Linmas Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024	II-79
Tabel 2.48	Jumlah Kasus Kejahatan yang Dilaporkan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024.....	II-79
Tabel 2.49	Tingkat Risiko di Kabupaten Nagan Raya	II-80
Tabel 2.50	Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten	



	Nagan Raya 2019 – 2023.....	II-82
Tabel 2.51	Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya.....	II-83
Tabel 2.52	Permasalahan Sosial di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-88
Tabel 2.53	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-89
Tabel 2.54	Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024.....	II-91
Tabel 2.55	Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024.....	II-91
Tabel 2.56	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2024	II-92
Tabel 2.57	Rasio KDRT Tahun 2018-2024	II-93
Tabel 2.58	Perkembangan Predikat KLA Tahun 2018-2024.....	II-95
Tabel 2.59	Produksi Padi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-96
Tabel 2.60	Produksi Jagung Di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014-2024	II-97
Tabel 2.61	Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-99
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024.....	II-100
Tabel 2.63	Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang sudah Sertifikat dan Belum Sertifikat Sampai Tahun 2024	II-100
Tabel 2.64	Luas Lahan Bersertifikat dalam Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Jenis Hak Tahun 2024	II-101
Tabel 2.65	Realisasi Penetapan Calon Lokasi Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum Tahun 2024.....	II-102
Tabel 2.66	Usulan Pelepasan Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023-2026	II-102



Tabel 2.67	Timbulan Sampah yang Ditangani Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-103
Tabel 2.68	Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan Oleh Limbah Industri Tahun 2018-2024.....	II-104
Tabel 2.69	Jumlah kepemilikan Akte Kelahiran, KTP, KK dan KIA Tahun 2014-2024	II-105
Tabel 2.70	Rasio Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-105
Tabel 2.71	Daftar Status Indeks Desa Membangun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2024.....	II-106
Tabel 2.72	Data Indikator Pengendallian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2024.....	II-107
Tabel 2.73	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024.....	II-109
Tabel 2.74	Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024	II-111
Tabel 2.75	Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika dan Statistik Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2024 (persen)	II-112
Tabel 2.76	Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-113
Tabel 2.77	Jumlah Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Omset/Bulan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-115
Tabel 2.78	Investor Berskala Nasional (PMA/PMDA) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024.....	II-116
Tabel 2.79	Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2014-2024	II-117
Tabel 2.80	Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya 2014-2024	II-118
Tabel 2.81	Jumlah Daftar Berkas Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis	II-122
Tabel 2.82	Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-123



Tabel 2.83	Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-124
Tabel 2.84	Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-126
Tabel 2.85	Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2024	II-128
Tabel 2.86	Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-129
Tabel 2.87	Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Perkebunan di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014 – 2024.....	II-130
Tabel 2.88	Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (Ekor)	II-131
Tabel 2.89	Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (persen)....	II-132
Tabel 2.90	Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2014-2024	II-132
Tabel 2.91	Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-133
Tabel 2.92	Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024.....	II-134
Tabel 2.93	Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut di Kabupaten Nagan Raya, 2014-2024.....	II-135
Tabel 2.94	Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-136
Tabel 2.95	Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024.....	II-137
Tabel 2.96	Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-139
Tabel 2.97	Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-141
Tabel 2.98	Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024	II-142



Tabel 2.99	Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-143
Tabel 2.100	Predikat Opini Audit BPK Tahun 2008-2024.....	II-148
Tabel 2.101	Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan.....	II-151
Tabel 2.102	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2024.....	II-155
Tabel 2.103	Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang Tahun 2014 – 2024.....	II-158
Tabel 2.104	Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen) dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya	II-159
Tabel 2.105	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nagan Raya....	II-160
Tabel 2.106	Akses Air Minum layak di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024	II-161
Tabel 2.107	Rasio Ketersediaan Daya Listrik	II-162
Tabel 2.108	Persentase Rumah tangga yang menggunakan listrik.	II-162
Tabel 2.109	Analisis Perkembangan Kinerja Terhadap Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya	II-164
Tabel 2.110	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2023.....	II-165
Tabel 2.111	Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-166
Tabel 2.112	Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.....	II-170
Tabel 2.113	TPT dan TPAK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024	II-171
Tabel 2.114	TPT Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Perbatasan Tahun 2014-2024	II-172
Tabel 2.115	TPT Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional Tahun 2014-2024	II-173
Tabel 2.116	Inflasi Nagan Raya dan Provinsi Aceh Tahun 2014-2025	II-179



Tabel 2.117	Perkembangan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2024	II-183
Tabel 2.118	Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2045	II-187
Tabel 2.119	Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2045 (Ribu)	II-188
Tabel 2.120	Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur Laki-Laki dan Perempuan 2020–2045 (Ribu).....	II-190
Tabel 2.121	Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Laki-Laki 2020–2045 (Ribu).....	II-190
Tabel 2.122	Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin Perempuan 2020–2045 (Ribu).....	II-191
Tabel 2.123	Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2025	II-191
Tabel 2.124	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	II-192
Tabel 2.125	Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045	II-192
Tabel 2.126	Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan Kabupaten Nagan Raya.....	II-194
Tabel 2.127	Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020–2045.....	II-194
Tabel 2.128	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal.....	II-195
Tabel 2.129	Proyeksi Kebutuhan Permukiman	II-196
Tabel 2.130	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih.....	II-196
Tabel 2.131	Proyeksi Kebutuhan Sanitasi.....	II-197
Tabel 2.132	Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik	II-197
Tabel 2.133	Proyeksi Kebutuhan Persampahan	II-198
Tabel 2.134	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	II-199



Tabel 2.135	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	II-200
Tabel 2.136	Proyeksi Kebutuhan Infratraktur	II-203
Tabel 2.137	Proyeksi Kebutuhan Infratraktur	II-210
Tabel 2.138	Target Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW.....	II-217
Tabel 2.139	Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut ecoregion, 2019	II-251
Tabel 2.140	Daya Dukung Jasa Penyedia Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut tutupan lahan, 2019	II-251
Tabel 2.141	Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Kecamatan, 2019	II-252
Tabel 2.142	Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya	II-254
Tabel 4.1	Perbandingan Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya	IV-3
Tabel 4.2	Perbandingan Capaian Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya	IV-7
Tabel 4.3	Perbandingan Misi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya	IV-9
Tabel 5.1	Arah Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Berdasrkan Misi dan Periode Pembangunan.....	V-8
Tabel 5.2	Arah Kebijakan transformasi Sosial Sasaran Pokok 1: Kesehatan Untuk Semua.....	V-15
Tabel 5.3	Indikator Capaian Transformasi Sosial Bidang Kesehatan	V-20
Tabel 5.4	Arah Kebijakan Transformasi Sosial Pendidikan Berkualitas dan Merata.....	V-22
Tabel 5.5	Idikator Capaian Tranformasi Bidang Pendidikan	V-26
Tabel 5.6	Arah Kebijakan Transformasi Sosial: Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif.	V-30
Tabel 5.7	Indikator Capaian Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif	V-34
Tabel 5.8	Arah Kebijakan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas	



	Ekonomi	V-36
Tabel 5.9	Indikator Capaian Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	V-44
Tabel 5.10	Arah Kebijakan Penerapan Ekonomi Hijau	V-47
Tabel 5.11	Indikator Capaian Penerapan Ekonomi Hijau	V-48
Tabel 5.12	Arah Kebijakan Transformasi Digital	V-49
Tabel 5.13	Indikator Capaian Transformasi Digital	V-52
Tabel 5.14	Arah Kebijakan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	V-53
Tabel 5.15	Indikator Capaian Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	V-55
Tabel 5.16	Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan	V-56
Tabel 5.17	Indikator Capaian Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan	V-60
Tabel 5.18	Arah Kebijakan Reformasi Tata Kelola	V-63
Tabel 5.19	Indikator Capaian Reformasi Tata Kelola	V-66
Tabel 5.20	Arah Kebijakan Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertibanm dan Ketentrman yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial.....	V-68
Tabel 5.21	Indikator Capaian Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertibanm dan Ketentrman yang Tangguh, Dan Demokrasi Substansial.....	V-70
Tabel 5.22	Arah Kebijakan Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro	V-72
Tabel 5.23	Indikator Capaian Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro	V-74
Tabel 5.24	Arah Kebijakan Peningkatan Implementasi Syariat Islam.....	V-76
Tabel 5.25	Indikator Capaian Peningkatan Implementasi Syariat Islam.....	V-78
Tabel 5.26	Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang	



	Merata Dan Berkeadilan.....	V-79
Tabel 5.27	Arah Kebijakan Beragama dan Berkebudayaan Maju.	V-83
Tabel 5.28	Indikator Capaian Beragama dan Berkebudayaan Maju	V-86
Tabel 5.29	Arah Kebijakan Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	V-87
Tabel 5.30	Indikator Capaian Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	V-90
Tabel 5.31	Arah Kebijakan Lingkungan Hidup yang Berkualitas .	V-91
Tabel 5.32	Indikator Capaian Lingkungan Hidup yang Berkualitas	V-94
Tabel 5.33	Arah Kebijakan Ketahanan Energi, dan Kemandirian Pangan.....	V-95
Tabel 5.34	Indikator Capaian Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan.....	V-98
Tabel 5.35	Arah Kebijakan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	V-100
Tabel 5.36	Indikator Capaian Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim.....	V-103
Tabel 5.37	Arah Kebijakan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan.....	V-104

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam hari ini telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam kurun waktu tersebut telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun demikian masih banyak juga permasalahan pembangunan yang masih harus diselesaikan. Periode pembangunan jangka panjang Tahun 2025-2045 merupakan periode ke-2 pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya dimana periode pertama RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 akan segera berakhir, dan untuk menyediakan pedoman perencanaan pembangunan jangka panjang tahapan berikutnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Tahun 2025-2045.

Berdasarkan pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, yang selanjutnya disingkat RPJP, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. Untuk tingkat Nasional Pemerintah wajib menyusun RPJP Nasional yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan Nasional, sedangkan untuk tingkat daerah pemerintah daerah wajib menyusun RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. RPJP Nasional menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Nasional, sementara RPJP Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM daerah.

Berdasarkan pasal 12 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Sesuai dengan Inmendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 dimana untuk seluruh Bupati/ Walikota bersama DPRD kabupaten/kota untuk segera menyusun RPJPD kabupaten/kota Tahun 2025-2045 yang selaras dan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan Rencana Tata Ruang Wilayah

dan harus ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah paling lambat minggu keempat bulan Agustus 2024 dan bagi Kepala daerah yang dipimpin oleh Penjabat Kepala Daerah harus melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD Tahun 2025-2045 dengan DPRD.

Selaras dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, pembangunan jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 juga menitikberatkan pada tiga proses transformasi, yaitu transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola pemerintahan sebagaimana juga diatur dalam RPJPN.

Pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang telah dilakukan selama periode Tahun 2005-2025 telah membawa banyak perubahan yang positif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sejumlah indikator kinerja pembangunan yang berkontribusi positif dalam periode tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014 tercatat sebesar 3,43 persen, terus meningkat pada Tahun 2016 menjadi sebesar 3,99 persen dan Tahun 2019 menjadi sebesar 6,77 persen. Demikian juga pada Tahun 2021 dimana Covid-19 masih mewabah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya tetap tumbuh positif dengan angka sebesar 5,34 persen dan pada Tahun 2023 mencapai pertumbuhan tertinggi selama 20 tahun terakhir yaitu sebesar 7,57 persen yang juga merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi kabupaten/kota di Aceh, pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya sebesar 4,38 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya cukup berfluktuatif selama tahun 2014-2024. Tahun 2014, yaitu 3,43 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 yaitu 3,97 persen, Hal ini disebabkan pada tahun tersebut masih rendah terbukanya lapangan kerja sehingga angka pengangguran meningkat, pada kurun waktu 2016-2020 cenderung meningkat, dimana pada tahun 2020 angka TPT mencapai 5,11 persen hal ini disebabkan lapangan kerja sesuai dengan distribusi PDRB yang berpengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkurang dan sangat berpengaruh pada angka pengangguran, lapangan kerja sektor pertanian dengan adanya teknologi sangat mempengaruhi tenaga kerja dan pengangguran. Pada tahun 2021 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya kembali mengalami penurunan menjadi 4,99 persen dari tahun sebelumnya. Dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2024 menjadi 5,22 persen.

Angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya juga menurun dari Tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. walaupun dalam rentang waktu periode tersebut Angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif tetapi Angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya menurun dari tahun 2014 s.d 2024, dimana pada Tahun 2014 tercatat sebesar 20,85 % dan menurun menjadi 16,94 % pada Tahun 2024.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah mengalami banyak perkembangan, dimana tercatat pada awal masa RPJP Tahun 2005 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya hanya sebesar 66,30 dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2024 telah mencapai 73,10. Namun demikian IPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 masih dibawah IPM Aceh (sebesar 75,36) dan juga masih dibawah IPM Nasional (sebesar 75,02) sehingga diperlukan upaya-upaya yang lebih keras lagi untuk meningkatkan kinerja pembangunan bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang perekonomian.

Rasio Gini Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014-2024 berfluktuatif, terlihat pada Tahun 2014 sebesar 0.278 dan meningkat pada 2018 sebesar 0.284 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 0.252. Walaupun mengalami fluktuasi dari tahun 2014-2024 namun rasio gini Kabupaten Nagan Raya masih tergolong kesenjangan rendah sampai Tahun 2024 yang tercatat sebesar 0.159.

Pelaksanaan penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dilakukan berdasarkan pasal 16 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan yang terdiri dari :
 - Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD
 - Orientasi mengenai RPJPD
 - Penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD
 - Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah
- b. Penyusunan rancangan awal yang terdiri dari :
 - Analisis gambaran umum kondisi daerah
 - Analisis permasalahan pembangunan daerah
 - Penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya
 - Analisis isu strategis pembangunan jangka panjang
 - Perumusan visi dan misi daerah
 - Perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok daerah
 - Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
 - Pembahasan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan SKPK Nagan Raya
 - Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik
 - Konsultasi Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Aceh.
- c. Penyusunan Rancangan
 - Penyempurnaan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 berdasarkan saran penyempurnaan hasil konsultasi dengan Gubernur Aceh.
 - Pengajuan Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Bupati Nagan Raya untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

- d. Pelaksanaan Musrenbang
 - Pelaksanaan Musrenbang Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan pemangku kepentingan
 - Perumusan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
- e. Perumusan rancangan akhir
 - Penyempurnaan Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 menjadi Rancangan Akhir RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang.
 - Penyampaian Rancangan Akhir RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yang dimuat dalam Rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Sekretaris Daerah melalui Bagian Hukum pada Setdakab .
 - Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 oleh Bagian Hukum Setdakab Nagan Raya.
 - Penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan Qanun RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Kepala Bappeda Kabupaten Nagan Raya untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman rancangan Qanun.
 - Penyampaian dan pemaparan rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Bupati Nagan Raya.
- f. Reviu APIP terhadap Rancangan Akhir RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045
 - Rancangan Akhir RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 direviu oleh APIP sebelum disampaikan ke DPRK Nagan Raya untuk dibahas dan diberi persetujuan.
- g. Penyampaian Rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada DPRK Nagan Raya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama .
- h. Penyempurnaan rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 sesuai dengan persetujuan bersama DPRK Nagan Raya dan Bupati Nagan Raya.
- i. Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 oleh Gubernur Aceh, jika telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka diberikan nomor registrasi.
- j. Penetapan.
 - Penetapan Rancangan Qanun tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yang telah diregistrasi menjadi Qanun kabupaten tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 oleh Bupati Nagan Raya paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 berakhir.

- Penyampaian Qanun Kabupaten tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 kepada Gubernur Aceh .

Sejumlah kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka penyusunan Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yaitu:

1. Penyusunan SK Bupati Nagan Raya Nomor: 000.7.2 /203 /Kpts/2023, Tanggal 24 Mei 2023, tentang Penetapan Tim Koordinasi Kegiatan Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 Tahun Anggaran 2023.
2. Penyusunan SK Bupati Nagan Raya Nomor: 000.7.2/249/ Kpts/2023, Tanggal 12 Juli 2023, tentang Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045 Pada Tahun Anggaran 2023.
3. Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 s.d 2045 di Ruang Pusdatin Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 10 Agustus 2023.
4. Koordinasi dengan Bappeda Aceh terkait Perumusan Masalah dan Isu Strategis Rancangan Awal RPJP Tahun 2025 – 2045 pada tanggal 22 Agustus 2023.
5. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan RPJPD Kabupaten/ Kota Tahun 2025-2045 dan FGD Ranwal RPJPA Tahun 2025-2045, tanggal 29-30 Agustus 2023.
6. Mengikuti Forum Konsultasi Publik Ranwal RPJPA Tahun 2025-2045, tanggal 31 Agustus 2023, di Banda Aceh.
7. Koordinasi dengan Bappeda Aceh dalam rangka integrasi dokumen RTRW Nagan Raya ke dalam dokumen Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025 – 2045, tanggal 8 september 2023.
8. Rapat Tim Koordinasi Penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 s.d 2045 di Aula I Lt. I Bappeda Kabupaten Nagan Raya pada Tanggal 19 September 2023.
9. Melakukan pembahasan terkait permasalahan dan isu – isu strategis dengan Tim Ahli Penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 di Universitas Teuku Umar, tanggal 9 Oktober 2023.
10. Pertemuan Tim Koordinasi, Tim Ahli dengan Tim Asistensi Penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 terkait Perumusan dan Penajaman Permasalahan Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Nagan Raya di Ruang Pusdatin Bappeda Nagan Raya, tanggal 13 Oktober 2023.
11. Koordinasi dengan Bappeda Aceh dalam rangka penyelarasan dari isu strategis pembangunan Kabupaten Nagan Raya dan isu strategis Aceh sebagai bahan penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045, tanggal 16 Oktober 2023.
12. Melakukan Asistensi dengan Dinas Pendidikan Aceh dalam rangka Pemetaan Indeks Literasi Kabupaten Nagan Raya sebagai bahan

- penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045, tanggal 2 November 2023.
13. Koordinasi dengan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah I dalam rangka Sinkronisasi Ranwal RPJPD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2035, tanggal 8 November 2023.
 14. FGD Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 dengan Inspektorat, BAPPEDA, BPKD, RSUD, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR di Ruang Pusdatin Lt. II Bappeda Kabupaten Nagan Raya serta dengan Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Peternakan, Dinas Syariat Islam, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, BKPSDM, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM dan DISBUDPARPORA di Ruang Rapat I Lt. I Bappeda Kabupaten Nagan Raya, tanggal 22 November 2023
 15. FGD Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan dan Dinas Informatika dan Statistik di Ruang Pusdatin Lt. II Bappeda Kabupaten Nagan Raya serta dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanahan, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, SATPOL PP & WH dan Sekretariat DPRK di Ruang Rapat I Lt. I Bappeda Kabupaten Nagan Raya, tanggal 23 November 2023.
 16. FGD Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 dengan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, dan Sekretariat MPD di Ruang Pusdatin Lt. II Bappeda Kabupaten Nagan Raya serta dengan Sekretariat Baitul Mal, UPTD Pendidikan Seunagan, UPTD Pendidikan Kuala, UPTD Pendidikan Darul Makmur dan SPNF SKB Dinas Pendidikan di Ruang Rapat I, Lt. I Bappeda Kabupaten Nagan Raya, tanggal 24 November 2023.
 17. Melakukan pembahasan dengan Bappeda Aceh terkait arah kebijakan dan sasaran pokok 4 tahapan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045.
 18. **Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik (FKP)** Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan unsur pemangku kepentingan dalam Kabupaten Nagan Raya, tanggal 27 Desember 2023.
 19. FGD Penyempurnaan Rancangan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045 dengan agenda penajaman arah kebijakan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 berbasis wilayah dengan OPD Kabupaten Nagan Raya tanggal 18 Maret 2024.

20. **Musrenbang RPJP Kabupaten Nagan Raya** Tahun 2025-2045, Tanggal 28 Maret 2024.
21. Rapat Dengar Pendapat dengan Tim Pansus DPRK Nagan Raya dan OPD Kabupaten Nagan Raya terkait dalam rangka pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045, Tanggal 10 Maret 2025.
22. Rapat pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan Tim Pansus DPRK Nagan Raya, Tanggal 16 Mei 2025.
23. Rapat pembahasan/pemaparan OPD terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan Tim Pansus DPRK Nagan Raya, Tanggal 20 - 21 Mei 2025.

Untuk menghasilkan RPJP Nagan Raya tahun 2025 – 2045 yang berkualitas serta konsisten untuk membangun perencanaan yang lebih baik untuk Nagan Raya 20 tahun kedepan, maka pendekatan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut:

1. **Pendekatan RPJPN Tahun 2025 – 2045**

Kementerian PPN/Bappenas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dalam mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan". RPJPN menjadi acuan dan arah Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas.

2. **Analisis Kondisi dan Permasalahan Daerah**

RPJP Kabupaten Nagan Raya dibangun dengan melakukan analisis gambaran umum kondisi daerah dan permasalahan serta isu strategis, penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya, merumuskan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok serta sinkronisasi dengan RPJP Nasional, RPJP Aceh, RTRW dan KLHS Kabupaten Nagan Raya.

3. **Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif.**

RPJP Kabupaten Nagan Raya disusun dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif deskriptif yang secara objektif menggambarkan kondisi Kabupaten Nagan Raya selama RPJP tahun 2005 – 2025 dan menetapkan target pembangunan Nagan Raya 20 tahun kedepan.

4. **Scenario Planning**

RPJP Kabupaten Nagan Raya disusun menggunakan pendekatan scenario planning untuk melihat gambaran kondisi daerah dan memproyeksikan keadaan serta target Nagan Raya 20 tahun kedepan dengan mengidentifikasi dan merencanakan strategi untuk mencapai Nagan Raya Unggul pada tahun 2045.

5. **Partisipatif**

Melaksanakan FGD serta Forum Konsultasi Publik terkait Penyusunan Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 dengan pemangku kepentingan serta *stakeholder* yang ada di Kabupaten Nagan Raya.

1.2. **Dasar Hukum**

Sejumlah ketentuan perundang-undangan yang memiliki kaitan yang erat dengan penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pengarusutamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan;
20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
24. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 6)
25. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 – 2033, (Lembaran Aceh tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
26. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
27. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Qanun Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 6);
28. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045 (Lembaran Aceh tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 151);
29. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 Nomor 28).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 memiliki hubungan dengan dokumen perencanaan lainnya. Untuk melihat keterkaitan/ hubungan antara Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya maka pelaksanaan evaluasi RPJP Kabupaten Nagan Raya juga dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut :

1. Hubungan dengan RPJPN 2025-2045 yaitu:
 - a. Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJPN 2025-2045;
 - b. Periodesasi RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 sesuai dengan periodesasi RPJPN Tahun 2025-204;
 - c. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan berpedoman pada Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPN Tahun 2025-2045.
2. Hubungan dengan RTRW Nasional Tahun 2025-2045 yaitu:
 - a. Penataan ruang wilayah nasional, penataan ruang wilayah provinsi, dan penataan ruang wilayah kabupaten/kota dilakukan secara berjenjang dan dan komplementer.
 - b. Dalam penyelenggaraan penataan ruang, Pemerintah memiliki kewenangan yang meliputi:
 - pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional, provinsi, dan kabupaten/kota
 - pelaksanaan penataan ruang wilayah nasional
 - pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis nasional
 - kerja sama penataan ruang antarnegara dan pemfasilitasan kerja sama penataan ruang antarprovinsi
 - c. Dalam pelaksanaan penataan ruang nasional, Pemerintah memiliki kewenangan yang meliputi:
 - penetapan kawasan strategis nasional
 - perencanaan tata ruang kawasan strategis nasional
 - pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
 - pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional
 - d. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional dengan :
 - terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan
 - terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia
 - terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang
3. Hubungan dengan RPJP Aceh Tahun 2025-2045 yaitu :
 - a. Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 mengacu pada RPJP Aceh 2025-2045;
 - b. Periodesasi RPJP Kabupaten Tahun 2025-2045 sesuai dengan periodesasi RPJP Aceh Tahun 2025-204;

- c. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan berpedoman pada Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Aceh Tahun 2025-2045.
4. Hubungan dengan RTRW Aceh Tahun 2013-2033 yaitu :
 - a. Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 mengacu pada RTRW Aceh 2013-2033;
 - b. Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dirumuskan dengan berpedoman pada RTRW Aceh Tahun 2013-2033.
5. Hubungan dengan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035 yaitu:
 - a. Tujuan RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015 – 2035 dituangkan dalam Visi Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045
 - b. Kebijakan dan Strategi RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015 – 2035 menjadi pedoman dalam penyusunan Arah Kebijakan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045
 - c. Indikasi Program Utama RTRW Kabupaten Nagan Raya 2015 – 2035 dituangkan dalam penyusunan Sasaran Pokok RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
6. Hubungan dengan KLHS RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yaitu :
 - a. KLHS merupakan bagian dari Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045
 - b. KLHS disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perumusan kebijakan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.
7. Hubungan dengan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) Kabupaten Nagan Raya, yaitu :

Keterkaitan antara RPJP dan dokumen perlindungan lingkungan seperti RPPLH dan KLHS memastikan bahwa pembangunan jangka panjang di Kabupaten Nagan Raya berlangsung dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan. Sinergi antar dokumen ini merupakan wujud konkret dari komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta regulasi turunannya.
8. Hubungan dengan RPJM Kabupaten Nagan Raya, yaitu :

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 menjadi pedoman untuk penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya selama periode 2025 – 2045 (4 tahapan RPJM), terutama dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan 5 tahunan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2025-2045 yaitu untuk menyediakan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan visi dan mencapai misi jangka panjang pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 serta menjadi acuan utama bagi seluruh pemangku kepentingan baik tingkat Kabupaten Nagan Raya, Aceh maupun Nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan data dan informasi konprehensif kondisi Kabupaten Nagan Raya dalam bentuk gambaran umum kondisi Kabupaten Nagan Raya sampai Tahun 2023, permasalahan dan isu strategis yang saat ini sedang atau telah berkembang, visi yang ingin diwujudkan dan misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang ingin dicapai pada periode Tahun 2025-2045.
2. Memastikan Integrasi, sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan secara berjenjang sesuai kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam rangka mendukung tercapainya Indonesia Unggul Tahun 2045.
3. Mewujudkan tujuan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yaitu Kabupaten Nagan Raya yang Islami, Maju, Inovatif dan Berkelanjutan melalui peningkatan koodinasi dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan.
4. Memastikan adanya sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan Sasaran Pokok dan mewujudkan Arah Kebijakan pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005 - 2025 terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Umum Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis, Visi dan Misi, Tujuan dan sasaran Pokok, Arah Kebijakan dan Penutup, dengan rincian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelaskan pengertian RPJP, proses penyusunan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Nagan Raya bersama dengan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun Rancangan Awal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

1.2 Dasar Hukum

Menjelaskan dasar hukum perencanaan pembangunan daerah terkait penyusunan Ranwal RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Menjelaskan hubungan dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya dengan dokumen perencanaan lainnya yaitu RPJPN, RTRW Nasional, RPJPA, RTRW Aceh, RTRW Nagan Raya, KLHS RPJP Nagan Raya, RPPLH, dan RPJM Nagan Raya.

1.4 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

1.5 Sistematika Penulisan

Menjelaskan penataan dan garis besar penyusunan setiap bab RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana yang dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budaya yang dimiliki daerah.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat yang meliputi capaian indikator kinerja urusan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olahraga yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.3. Aspek Daya Saing Daerah

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/ infrastruktur, iklim investasi dan sumber daya manusia yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.4. Aspek Pelayanan Umum

Mengemukakan pengantar analisis dan menjelaskan capaian indikator kinerja urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, urusan pelayanan wajib dan urusan layanan pilihan yang dilengkapi dengan tabel dan grafik.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Menguraikan secara singkat hasil evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana

Menjelaskan dinamika kependudukan yang harus diperhatikan untuk dilayani dan dipenuhi kebutuhan sarana prasarana oleh pemerintah daerah. Penjelasan ini setidaknya memuat:

2.6.1. Kependudukan

Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun

2045 yang meliputi perkembangan jumlah penduduk, distribusi penduduk, bonus demografi, dan penduduk usia tua

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah);

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Menjelaskan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah. Penjelasan ini memuat:

2.7.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Menguraikan indikasi output dan indikasi outcome sebagai tindak lanjut atas rekomendasi dari struktur ruang dan pola ruang dan rencana sektoral.

2.7.2. Perencanaan Sektoral

Menjelaskan arah kebijakan dan sasaran pembangunan sektoral yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya seperti Rencana Penanggulangan Kemiskinan, Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan, dan lainnya.

2.8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Menjelaskan tentang Daya Dukung Lingkungan (termasuk Daya dukung sumber daya air, Daya dukung Penduduk Optimum, Daya dukung Penutupan Lahan Optimum), Perubahan Iklim, Sumberdaya Hutan dan Keanekaragaman Hayati dan pemenuhan prinsip-prinsip Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

3.1. Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Menjelaskan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang relevan dan menjadi dasar dalam perumusan visi dan misi pembangunan jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya.

3.2. Isu Strategis Kabupaten Nagan Raya

Mengemukakan isu-isu strategis yang terpenting yang harus menjadi perhatian dan memberikan manfaat dan dampak di masa datang terhadap kemajuan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

BAB IV VISI DAN MISI

4.1. Visi

Menguraikan secara jelas perumusan visi yang ingin diwujudkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

4.2. Misi

Menguraikan secara jelas dan sistematis misi yang telah dirumuskan untuk pencapaian visi dan merumuskan sasaran pokok.

4.3. Penyelarasan Visi dan Misi Kabupaten Nagan Raya dan Aceh

Menguraikan penyelarasan Visi RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dengan Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045.

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Nagan Raya

Menjelaskan arah kebijakan pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPD. Arah kebijakan pembangunan menguraikan keterhubungan antara sasaran dengan sasaran pokok.

5.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke I (2025-2029)

5.1.2. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke II (2030-2034)

5.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke III (2035-2039)

5.1.4. Arah Kebijakan Pembangunan Lima Tahunan Ke IV (2040-2045)

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Menjelaskan sasaran pokok pembangunan lima tahunan selama 4 (empat) periode RPJPD. Sasaran pokok pembangunan harus menguraikan keterhubungan dengan visi/misi dan mencakup target capaian indikator kinerja pembangunan. Sasaran pokok RPJPD Tahun 2025-2045 merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD Tahun 2025-2045 pada setiap tahapan dan diukur dengan menggunakan indikator yang bersifat progresif.

BAB VI PENUTUP

Memuat beberapa hal penting tentang kaidah pelaksanaan, konsistensi perencanaan pembangunan (konsistensi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 dengan perencanaan turunannya, penerapan prinsip kerangka kerja logis dalam perencanaan pembangunan, sistem insentif, mekanisme perubahan, dan komunikasi publik), dan pembiayaan pembangunan serta kerangka regulasi untuk mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Unggul Tahun 2045 melalui perwujudan Visi Kabupaten Nagan Raya yang “**Islami, Maju dan Berkelanjutan**”.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI
KABUPATEN NAGAN RAYA

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

Kabupaten Nagan Raya dengan Ibukota Suka Makmue dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Kabupaten Nagan Raya merupakan kabupaten baru sebagai hasil pemekaran Kabupaten Aceh Barat. Saat ini, secara administratif Kabupaten Nagan Raya dibagi menjadi 10 (sepuluh) kecamatan, 30 (tiga puluh) kemukiman dan 222 (dua ratus dua puluh dua) desa/gampong. Wilayah administrasi kecamatan di lingkup Kabupaten Nagan Raya adalah: Darul Makmur, Kuala, Kuala Pesisir, Tadu Raya, Beutong, Seunagan, Suka Makmue, Seunagan Timur, Beutong Ateuh Banggalang dan Tripa Makmur.

Secara rinci luas wilayah setiap kecamatan dan jumlah desa/gampong di Kabupaten Nagan Raya tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Administrasi Menurut Kecamatan
di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Ibu Kota	Luas Total Area (Ha)	Persentase Luas Wilayah
1	Darul Makmur	Alue Bilie	142.074,32	40,28
2	Tripa makmur	Kabu	14.787,10	4,19
3	Kuala	Ujong Fatihah	10.142,64	2,88
4	Kuala Pesisir	Padang Rubek	7.773,75	2,20
5	Tadu Raya	Alue Bata	34.016,10	9,64
6	Beutong	Keude Seumot	67.409,90	19,11
7	Beutong Ateuh Benggalang	Kuta Teungoh	43.093,65	12,22
8	Seunagan	Jeuram	5.798,44	1,64
9	Suka Makmue	Lueng Baro	6.783,65	1,92
10	Seunagan Timur	Keude Linteung	20.880,06	5,92
	Nagan Raya	Suka Makmue	352.759,61	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



Tabel 2.2
Jumlah Gampong dan Kemukiman Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kemukiman	Gampong/Desa
1	Kuala Pesisir	3	16
2	Darul Makmur	5	40
3	Tripa Makmur	2	40
4	Kuala	2	17
5	Tadu Raya	2	22
6	Beutong	4	24
7	Beutong Ateuh Benggalang	1	4
8	Seunagan	5	35
9	Suka Makmue	2	19
10	Seunagan Timur	4	34
	Jumlah Total	30	222

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Dari 10 (sepuluh) wilayah administrasi kecamatan jumlah gampong terbanyak berada di Kecamatan Darul Makmur yaitu sebanyak 40 (empat puluh) gampong dan paling sedikit berada di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu sebanyak 4 (empat) gampong.

2.1.1. Aspek Geografis

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

A. Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kabupaten Nagan Raya terletak pada lokasi 03° 43’ 50” – 04° 37’ 55” Lintang Utara (LU) dan 96° 11’ 23” – 96° 47’ 58” Bujur Timur (BT) dan memiliki luas wilayah 352.759,61 Ha atau sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh. Batas-batas wilayah administratif Kabupaten Nagan Raya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Samudera Indonesia;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Gayo Lues, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berdasarkan batas – batas wilayah administratif diatas, Kabupaten Nagan Raya memiliki posisi yang sangat strategis karena dilintasi oleh jalan nasional yang merupakan jalur pantai Barat Sumatera yang menghubungkan Ibukota Provinsi Aceh dengan wilayah kabupaten di pesisir barat selatan.

Selain itu wilayah ini juga dilintasi oleh jalan strategis Nasional yang menghubungkan wilayah Pantai Barat – wilayah Pantai Timur dan Tenggara melalui Kabupaten Aceh Tengah. Selain itu, posisi Kabupaten Nagan Raya yang dikelilingi Samudera Indonesia, tepatnya dibagian selatan, memungkinkan terbukanya peluang yang sangat besar untuk arus perputaran orang, barang, dan jasa melalui jalur laut, baik wilayah pantai barat-selatan maupun dengan pusat pemerintahan provinsi Aceh (Banda Aceh) dan Kabupaten Aceh Besar/sabang atau pun ke Sumatera Utara.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Bila dilihat dari struktur dan jenis,tanah di Kabupaten Nagan Raya terdiri dari jenis tanah podzolit coklat, Alluvial, Podzolit merah kuning, Andosol, Rock Out Croups, Renzina, Litosol, Mediterandan beberapa jenis tanah lainnya. Jenis tanah yang ada diwilayah ini berpengaruh besar terhadap pengembangan sektor pertanian dan perkebunan serta jenis tanaman yang cocok dikembangkan.

Jenis tanah tersebut pada umumnya relatif subur dan pada tanah tersebut sesuai untuk pengembangan pertanian dan perkebunan. Beberapa jenis tanah yang mempunyai sifat yang mempunyai resiko erosi yang tinggi dan mempunyai kedalaman efektif yang dangkal sehingga perlu dilindungi.

B. Topografi

Wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki Kemiringan lereng bervariasi antara 0–8% sampai dengan lebih dari 40% serta ketinggian antara 0 – 2775 meter di atas permukaan laut (mdpl), dengan ketinggian wilayah pemukiman 0 - 600 mdpl. Berdasarkan ketinggian, Kabupaten Nagan Raya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Wilayah dengan ketinggian 0-25 m dpl, tersebar dengan luas ± 64.636 Ha atau 65,31% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
2. Wilayah dengan ketinggian 25-50 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 1.525,20$ Ha atau 10,65% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya. Wilayah dengan ketinggian 50-100 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 10.196,40$ Ha atau 10,30% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
3. Wilayah dengan ketinggian 100-200 m dpl, tersebar dengan luas ± 61.150 Ha atau 6,21% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
4. Wilayah dengan ketinggian 200-300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 4.275,55$ Ha atau 4,32% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.
5. Wilayah dengan ketinggian 300 m dpl, tersebar dengan luas $\pm 2.180,20$ Ha atau 2,20% dari luas wilayah Kabupaten Nagan Raya.

C. Geologi

Kabupaten Nagan Raya terletak pada bagian Selatan dari Pegunungan Bukit Barisan (Sumatran Volcanic Arc) sampai kelautan Samudera Hindia. Daratan ini terbentuk akibat pertemuan Lempeng Indo-Australia dengan Lempeng Daratan Sunda sebagai bagian dari Lempeng Benua Asia-Eurasia. Zona Benioff sepanjang tepi dari Lempeng Sunda membentuk Cekungan/Paritan Sunda (Sunda Trench) sepanjang pantai Barat Sumatera. Generasi magma berasosiasi dengan hasil tumbukan tersebut, menyebabkan terbentuknya tinggian (*Sumatran Volcanic Arc*) berarah Barat Laut – Tenggara berumur Tersier sampai Sekarang yang mempengaruhi geologi pulau Sumatera. Pertemuan dua lempeng tersebut menyebabkan juga adanya tekanan miring (oblique) yang mengakibatkan pensesaran mendatar kekanan (dextral parallel fault) disebut sebagai Sistim Sesar Sumatra (Sumatra Fault System/SFS) yang memanjang sepanjang Pulau Sumatra sejajar dengan Pegunungan Barisan.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa struktur geologi daerah ini sangat dipengaruhi oleh sistem sesar sumatera (Sumatera Fault Sistem) yang berarah Barat Laut-Tenggara, yang menjadi salah satu penyebab utama terbentuknya struktur geologi. Berdasarkan hasil analisis peta geologi dan ditemukannya gejala-gejala geologi, diantaranya berupa Aluvium Muda, Anggota Batu gamping Reungeuet dan Formasi Bale. Untuk lebih jelasnya mengenai detil geologis Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Tabel 2.3



Tabel 2.3
Geologi Di Kabupaten Nagan Raya

No	Jenis Geologi	Hektar	Persentase
1	Aluvium Muda	30,066.66	8.47
2	Anggota Batugamping Reueng eu et	114.62	0.03
3	Batu Gamping Tak Terpisahkan	3,371.77	0.95
4	Formasi Bale	8,080.08	2.28
5	Formasi Batugamping Si Toptop	1,433.66	0.40
6	Formasi Geumpang	7,692.79	2.17
7	Formasi Gume	1,266.11	0.36
8	Formasi Gunung Api Si Api	11,991.66	3.38
9	Formasi Kiema	843.33	0.24
10	Formasi Loser	1,154.72	0.33
11	Formasi Maonai	852.31	0.24
12	Formasi Meurah Buya	1,125.06	0.32
13	Formasi Penarum	4,474.72	1.26
14	Formasi Simellit	3.29	0.00
15	Formasi Tutut	98.94	0.03
16	Gabro Jamur Pisang	89.70	0.03
17	Granodiorit Tak Bernama	1,785.11	0.50
18	Intrusi Bas0	233.84	0.07
19	Kelompok Woyla Tak Terpisahkan	80,517.12	20.70
20	Komplek Seumayam	842.19	0.24
21	Komplek Ultramafik Beatang	4,897.03	1.38
22	Meulaboh Formation	119,116.97	33.58
23	Pusat Gunung Api Telago	1,745.47	0.49
24	Serpentinit	1,583.75	0.45
25	Taloeng On-Calang	71,394.99	20.12
	Total	354,775.90	100.00

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

D. Hidrologi

Hidrologi adalah cabang ilmu Geografi yang mempelajari pergerakan, distribusi,dan kualitas air di seluruh Bumi, termasuk siklus hidrologi dan sumber daya air. Air merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi setiap elemen kehidupan yang berada di muka bumi dan sangat berperan besar bagi semua makhluk hidup. Tidak hanya berperan besar bagi manusia, tetapi juga bagi para binatang, dan bahkan bagi hutan yang berisi berbagai macam pepohonan dan tumbuhan yang juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidup seperti minum, melakukan proses fotosintesis dan banyak kepentingan lainnya. Hidrologi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel 2.4 dan gambar 2.2.

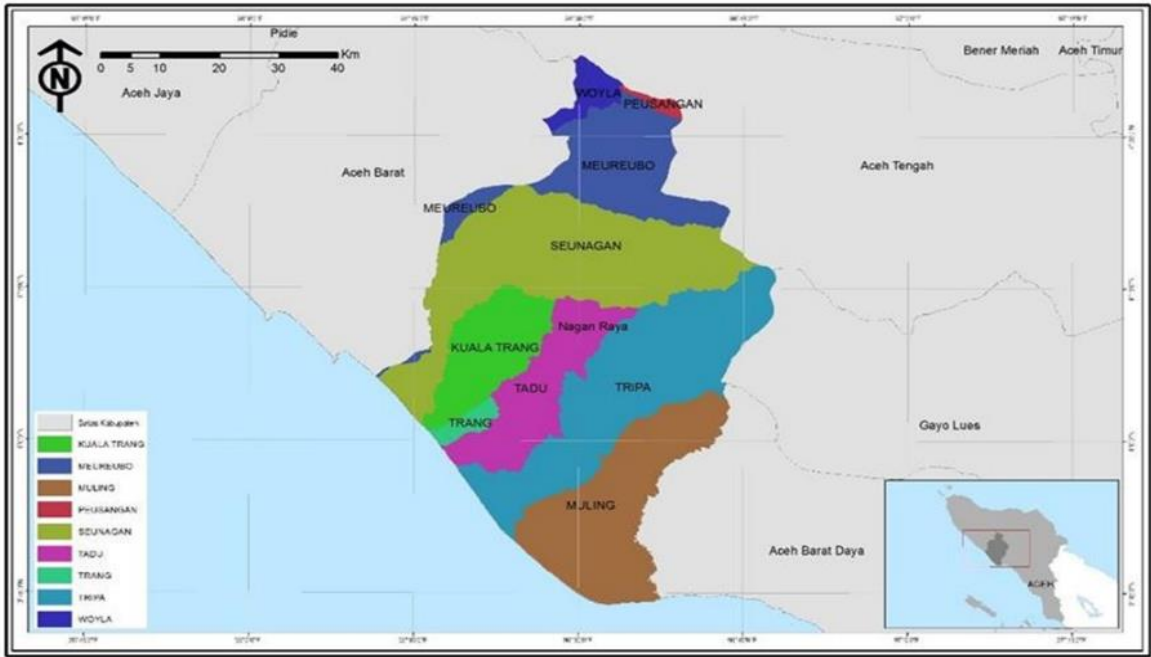


Tabel 2.4
Hidrologi Kabupaten Nagan Raya

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Persentase
1	Kuala Trang	29,639.53	8.35
2	Meureubo	44,843.76	12.64
3	Muling	59,628.67	16.81
4	Peusangan	1,894.05	0.53
5	Seunagan	91,956.31	25.92
6	Tadu	34,907.12	9.84
7	Trang	4,277.62	1.21
8	Tripa	80,398.99	22.66
9	Woyla	7,229.84	2.04
Jumlah		354,775.90	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Gambar 2.2
Peta Hidrologi Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

E. Klimatologi

Secara umum iklim di Indonesia dipengaruhi iklim tropis yang memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juli, dan musim hujan berlangsung dari bulan Agustus sampai bulan Desember. Kabupaten Nagan Raya terletak didaerah khatulistiwa, dimana sinar matahari hampir selalu penuh, sehingga wilayah ini termasuk dalam iklim tropis (panas). Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim A dan B menurut Schimidt Ferguson.

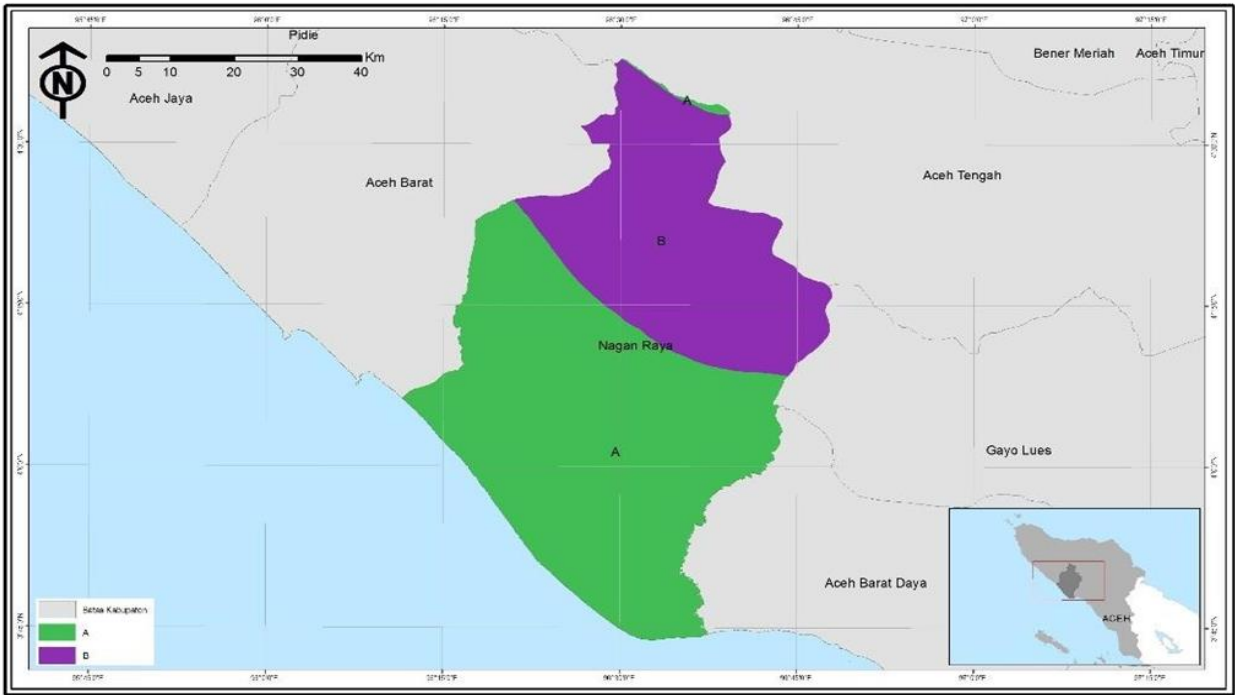


Tabel 2.5
Klimatologi Di Kabupaten Nagan Raya

No	Tipe Iklim	Luas (Ha)	Persentase
1	A	223,837.69	63.09
2	B	130,938.21	36.91
Jumlah		354,775.90	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Gambar 2.3
Peta Klimatologi Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi iklim suatu daerah, yaitu: temperatur udara, kelembaban udara, penyinaran matahari dan kecepatan angin. Faktor iklim ini menjadi salah satu pertimbangan pengambil kebijakan dalam membuat perencanaan, terutama pembangunan dalam bidang pertanian. Berdasarkan data faktor-faktor iklim yang telah disebutkan diatas, maka dilakukan analisis untuk membuat zonasi iklim wilayah tersebut. Pembagian zona iklim ini mencerminkan kondisi dan frekuensi curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut.

Kriteria zona iklim menurut Schmidt-Ferguson digolongkan dalam 9 zona, mulai dari tipe A hingga H, dengan dasar perhitungan nilai Q. Nilai Q adalah perhitungan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang diperoleh di wilayah studi per tahunnya. Persyaratan minimal untuk menentukan tipe iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson adalah adanya data curah hujan yang terekam dalam 13 (tiga belas tahun) secara berturut-turut.



2.1.1.2 Potensi Pengembangan wilayah

A. Pengelolaan Kawasan Lindung

Sebagian Wilayah Kabupaten Nagan Raya merupakan Kawasan Lindung, sehingga dalam pemanfaatan kawasan harus mengacu pada pola pemanfaatan ruang kawasan lindung yang bertujuan untuk mewujudkan kelestarian lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antara wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan Kawasan Lindung di Kabupaten Nagan Raya bertujuan untuk:

- a) Mengarahkan fungsi kawasan lindung yang meliputi rencana pemanfaatan ruang kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan di bawahnya, kawasan suaka alam, kawasan perlindungan setempat dan kawasan bencana;
- b) Mempertahankan kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber air;
- c) Mengendalikan pemanfaatan ruang di luar kawasan hutan sehingga tetap berfungsi lindung.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, rencana pemanfaatan kawasan lindung di Kabupaten Nagan Raya seluas 126.108,96 Ha adalah:

- a) Kawasan lindung
Kawasan hutan lindung di Kabupaten Nagan Raya terdapat wilayah Kecamatan Seunagan Timur seluas 2.446,702 Ha berada di Gampong Pulo Teungoh; Kecamatan Beutong seluas 75.149,446 Ha berada di Gampong Blang Neang, Pante Ara, Pante Bayam, dan Ujong Blang; Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 30.026,599 Ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk dan Kuta Teungoh; dan Kecamatan Darul Makmur seluas 21.486,159 Ha berada di Gampong Alue Rambot, Alue Waki, Krueng Alem dan Krueng Seumanyam.
- b) Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat di wilayah Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam tiga jenis yaitu kawasan sempadan pantai seluas 497,45 Ha, kawasan sempadan sungai seluas 8.961,28 Ha dan kawasan sekitar danau 156,71 Ha.

B. Pengelolaan Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.6.



Tabel 2.6
Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Luas Areal Kawasan Lindung(Ha)
Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung	129.108,96
Kawasan Yang Memberi PerlindunganKawasan Bawahnya		
1	Kawasan Rawa gambut	11.380,71
Kawasan Perlindungan Setempat		
1	Kawasan Sempadan Pantai	497,45
2	Kawasan Sempadan Sungai	8.961,28
3	Kawasan Sempadan Danau	156,71
Kawasan Hutan Produksi		
1	Hutan Produksi	16.348.253
2	Hutan Produksi Terbatas	6.637.598
3	Hutan Produksi Koversi	4.658,14
Kawasan Rawan Bencana Alam		
1	Kawasan Rawan Longsor	12.705,72
2	Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi	15.702,08
3	Kawasan Rawan Kebakaran	1.363,60
4	Kawasan Rawan Banjir	92.352,28
Kawasan Pertanian		
1	Kawasan Lahan Basah	12.777,64
2	Kawasan Lahan Kering	64.520,71
Kawasan Perkebunan		
1	Perkebunan Besar	54.417,29
2	Perkebunan Rakyat	2.064,40
Kawasan Peternakan		
1	Peternakan Besar	112,17

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Tabel di atas memperlihatkan perbandingan lahan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya, Status Penguasaan Lahan Budidaya di wilayah Kabupaten Nagan Raya saat ini yang teridentifikasi dapat digolongkan menjadi dua yaitu: Hak Guna tanah (HGU) dan Hak Milik. Penggunaan lahan yang termasuk status HGU diantaranya Hak Penguasaan Hutan (HPH). Perkebunan Besar dan Hutan Tanaman Industri (HTI). Pemanfaatan lahan juga untuk berbagai kegiatan pemukiman, pertanian, perkebunan, perdagangan dan jasa serta perkantoran.



Tabel 2.7
Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya Menurut
Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Kawasan Hutan Lindung		Kawasan Budidaya	
		(HA)	(%)	(HA)	(%)
1	Darul Makmur	21.486.159	16,6	4.608,15	29,69
2	Kuala	-	-	-	-
3	Kuala Pesisir	-	-	-	-
4	Tadu Raya	-	-	-	-
5	Beutong	75.149.446	58,2	5.986,29	37,79
6	Seunagan	-	-	-	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2.446.702	1,9	5.246,36	33,12
9	Beutong Ateuh Banggalang	30.026.599	23,3	5.246,36	33,12
10	Tripa Makmur	-	-	-	-
Jumlah		129.108,96	100	1.584.080	100

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.1.1.3. Potensi Sumber Daya Alam

Sumberdaya alam merupakan potensi wilayah yang dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah yang ada ataupun digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Kabupaten Nagan Raya mempunyai karakteristik wilayah khas dengan sumber daya alam sebagai potensi wilayah yang sangat tinggi, yaitu:

A. Sumber Daya Air

Kabupaten Nagan Raya masuk ke dalam lintasan Wilayah Sungai (WS) Woyla – Batee yang meliputi Daerah Aliran Sungai (DAS) Seunagan, Trang, Tripa dan Seumayam. Selain itu terdapat dua DAS yang menjadi kewenangan kabupaten yaitu DAS Tadu dan Seuneuam. Kabupaten Nagan Raya dialiri beberapa sungai yang tergolong besar seperti Krueng Beutong, Krueng Seunagan, Krueng Trang, Krueng Tripa, Krueng Tadu, dan Krueng Seumayam. Sehingga Kabupaten ini mempunyai sumber air yang melimpah.

Pemanfaatan Daerah Irigasi (DI) berupa Jaringan Daerah Irigasi (DI), meliputi:

- a. Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat;
- b. Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi; dan
- c. Daerah Irigasi kewenangan kabupaten.

Daerah Irigasi (DI) kewenangan pemerintah pusat, berupa Daerah Irigasi Jeuram seluas 5.347,65 ha, meliputi:

- 1. Kecamatan Seunagan Timur seluas 1.491,33 ha berada di Gampong Blang Ara Gampong, Blang Ara Keude, Blang Bayu, Blang Geudong, Blang

Panyang, Blang Preh, Cot Dirui, Cot Gud, Cot Manyang, Cot Punti, Cot Teuku Dek, Ie Beudoh, Kabu Baroh, Kabu Teunong, Kandeh, Keude Linteung, Keude Neulop, Krueng Kulu, Lhok Mesjid, Lhok Pange, Meugat Meh, Meurandeh Suak, Mon Bateung, Paya, Peuleukung, Pulo Teungoh, Sapeng, Suak Perbong, dan Uteun Pulo;

2. Kecamatan Beutong seluas 521,41 ha berada di Gampong Babah Krueng, Blang Seumot, Keude Seumot, Kulam Jeurneh, Kuta Jeumpa, Lhok Seumot, Meunasah Pante, dan Tuwi Bunta;
3. Kecamatan Seunagan seluas 1.176,51 ha berada di Gampong Alue Dodok, Alue Tho, Bantan, Blang Baro, Blang Murong, Blang Pateuk, Blang Puuk Kulu, Blang Puuk Nigan, Cot Kumbang, Cot Lhe Lhe, Gampong Cot, Jeuram, Krueng Ceh, Krueng Ceuko, Kulu, Kuta Aceh, Kuta Baro Jeuram, Kuta Kumbang, Kuta Paya, Kuta Sayeh, Latong, Lhok Padang, Lhok Parom, Meugat Meh, Nigan, Padang, Pante Cermen, Parom, Paya Udeung, Paya Undan, Peureulak, Rambong Cut, Rambong Rayeuk dan Sapek;
4. Kecamatan Suka Makmue seluas 1.171,12 ha berada di Gampong Alue Gajah, Alue Kambuk, Alue Peusaja, Blang Mulieng, Blang Sapek, Cot Kuta, Cot Peuradi, Gampong Teungoh, Kabu Blang Sapek, Krak Tampai, Kuta Baro BM, Kuta Padang, Lhok Beutong, Lhok Rameuan, Lueng Baro, Meureubo, dan Suak Bilie;
5. Kecamatan Kuala seluas 967,20 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh, Blang Baro, Blang Bintang, Blang Muko, Blang Teungoh, Cot Kumbang, Jogja, Pulo Ie, Purworejo, Simpang Peut, Ujong Fatihah, Ujong Padang, Ujong Pasi, dan Ujong Sikuneng; dan
6. Kecamatan Kuala Pesisir seluas 20,08 ha berada di Gampong Lueng Teuku Ben dan Purwodadi.

Daerah Irigasi (DI) kewenangan provinsi berupa Daerah Irigasi Kayee Unoe terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 1.998,54 ha berada di Gampong Alue Jampak, Alue Raya, Blang Baro, Kayee Unou, Kuta Trieng, Lamie, Serba Guna, Serba Jadi, Seulanggang Gajah, Simpang Dua, Suka Jadi, Suka Mulia, dan Ujong Krueng;

Daerah Irigasi (DI) kewenangan kabupaten seluas 5.707,56 ha, meliputi:

1. DI Suka Mulia terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 818,07 ha berada di Gampong Alue Jampak, Alue Raya, Panton Bayu, Simpang Dua, Suka Mulia, Sumber Makmur, dan Ujong Tanjong;
2. DI Krueng Seumayam terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 607,56 ha berada di Gampong Alue Bateng Brok, Ladang Baro, Simpang Deli kampong, dan Suka Ramai;
3. DI Alue Geureugah terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 478,99 ha berada di Gampong Alue Geutah, Alue Waki, dan Suak Palembang;

4. DI Alue Seupeung terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 447,83 ha berada di Gampong Alue Seupeung, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
5. DI Bungong Taloe terletak di Kecamatan Beutong seluas 389,17 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Dalam, Kulam Jeurneh, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, dan Ujong Blang;
6. DI Simpang Dua terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 281,99 ha berada di Gampong Alue Jampak, Panton Bayu, Simpang Deli Kilang, Simpang Dua, Suka Ramai, dan Ujong Tanjong;
7. DI Babah Dua terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 228,51 ha berada di Gampong Babah Dua, Simpang Jaya, dan Sumber Daya;
8. DI Blang Puuk terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 213,03 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
9. DI Langkak terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 168,37 ha berada di Gampong Arongan, Kuala Tuha, Langkak, dan Lueng Teuku Ben;
10. DI Neubok Yee PK terletak di Kecamatan Tripa Makmur seluas 144,26 ha berada di Gampong Mon Dua, Neubok Yee. PP, dan Ujong Krueng;
11. DI Pante Ara terletak di Kecamatan Beutong seluas 133,48 ha berada di Gampong Blang Baro, Blang Mesjid, Pante Ara, dan Tuwi Bunta;
12. DI Kuala Trang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 121,72 ha berada di Gampong Cot Rambong, Kuala Trang, dan Padang Panjang;
13. DI Gunong Reubo terletak di Kecamatan Kuala seluas 108,66 ha berada di Gampong Gunong Reubo dan Kuta Makmur;
14. DI Karang Anyer terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 115,21 ha berada di Gampong Karang Anyer dan Pulo Teungoh;
15. DI Pulo Raga seluas 113,45 ha, meliputi:
 - Kecamatan Seunagan Timur seluas 2,52 ha berada di Gampong Krueng Cut;
 - Kecamatan Beutong seluas 110,93 ha berada di Gampong Pulo Teungoh.
16. DI Rambong terletak di Kecamatan Beutong seluas 91,45 ha berada di Gampong Blang Baro Rambong, Buan Sari, Meunasah Dayah, Meunasah Krueng, dan Ujong Blang;
17. DI Blang Tengku terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 87,53 ha berada di Gampong Blang Panyang dan Blang Tengku;
18. DI Gunong Kupok terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 73,68 ha berada di Gampong Alue Bata;

19. DI Blang Seunong terletak di Kecamatan Beutong seluas 73,66 ha berada di Gampong Blang Mesjid, Gn. Nagan, Krueng Cut, Pulo Raga, dan Tuwi Bunta;
20. DI Kuala Tripa Tripa terletak di Kecamatan Makmur seluas 73,37 ha berada di Gampong Babah Lueng dan Drien Tujoh;
21. DI Alue Bata terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 72,98 ha berada di Gampong Alue Bata dan Rantau Seulamat;
22. DI Alue Labu terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 71,66 ha berada di Gampong Alue Labu, Gapa Baru, dan Krueng Ie Tam;
23. DI Ujong Fatihah terletak di Kecamatan Kuala seluas 68,80 ha berada di Gampong Alue Ie Mameh dan Ujong Fatihah;
24. DI Macah terletak di Kecamatan Suka Makmue seluas 64,23 ha berada di Gampong Macah;
25. DI Alue We terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 62,22 ha berada di Gampong Alue Bata, Gunong Gulugo, dan Gunong Pungkie;
26. DI Blang Meurandeh terletak di Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang seluas 56,04 ha berada di Gampong Babah Suak, Blang Meurandeh, Blang Puuk, dan Kuta Teungoh;
27. DI Blang Baro terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 50,92 ha berada di Gampong Blang Baro, Seulanggang Gajah, dan Suka Jadi;
28. DI Tuwi Meleusong terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 48,52 ha berada di Gampong Blang Panyang dan Sawang Mane;
29. DI Blang Neuang terletak di Kecamatan Beutong seluas 47,02 ha berada di Gampong Blang Seunang dan Gn. Nagan;
30. DI Alue Rambot terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 49,24 ha berada di Gampong Alue Rambot dan Krueng Alem;
31. DI Pulo Ie terletak di Kecamatan Kuala seluas 44,42 ha berada di Gampong Pulo Ie dan Purworejo;
32. DI Cot Mee terletak di Kecamatan Tadu Raya seluas 41,83 ha berada di Gampong Alue Sireun, Cot Mee, Cot Mu, dan Kuala Tadu;
33. DI Kila terletak di Kecamatan Seunagan Timur seluas 40,70 ha berada di Gampong Kandeh, Kila, dan Uteun Pulo;
34. DI Dwi Pongoh seluas 32,56 ha, meliputi:
 - Kecamatan Seunagan Timur seluas 19,97 ha berada di Gampong Babah Leumak dan Pulo Teungoh; dan
 - Kecamatan Beutong seluas 12,59 ha berada di Gampong Babah Leumak dan Krueng Cut.
35. DI Seumambek terletak di Kecamatan Suka Makmue seluas 32,13 ha berada di Gampong Seumambek;

36. DI Kr. Seuneuam terletak di Kecamatan Darul Makmur seluas 30,03 ha berada di Gampong Alue Kuyun dan Alue Raya;
37. DI Padang Rubek terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 29,80 ha berada di Gampong Lueng Teuku Ben, Padang Rubek, dan Pulo;
38. DI Karian seluas 23,16 ha, meliputi:
 - Kecamatan Seunagan Timur seluas 21,25 ha berada di Gampong Pulo Teungoh; dan
 - Kecamatan Beutong seluas 1,91 ha berada di Gampong Babah Leumak.
39. DI Padang Panjang terletak di Kecamatan Kuala Pesisir seluas 21,99 ha berada di Gampong Padang Panjang;
40. DI Blang Aman Tadu terletak di Kecamatan Beutong seluas 16,78 ha berada di Gampong Ujong Blang;
41. DI Blang Lango terletak di Kecamatan Seunagan seluas 15,87 ha berada di Gampong Alue Buloh;
42. DI Gunong Nagan terletak di Kecamatan Beutong seluas 9,11 ha berada di Gampong Blang Mesjid, Gn. Nagan, dan Tuwi Bunta; dan
43. DI Alue Buloh terletak di Kecamatan Seunagan seluas 7,57 ha berada di Gampong Alue Buloh.

B. Sumber Daya Pertambangan

Bahan tambang mineral logam, non logam dan batuan menyebar hampir di seluruh wilayah Nagan Raya. Potensi ini dapat menjadi sumber bagi kesejahteraan masyarakat dan sumber pendapatan daerah. Untuk mewujudkan maksud tersebut diperlukan pengelolaan yang baik sejak eksplorasi hingga eksploitasi serta harus mengikuti kaidah-kaidah konservasi dan kelestarian lingkungan.

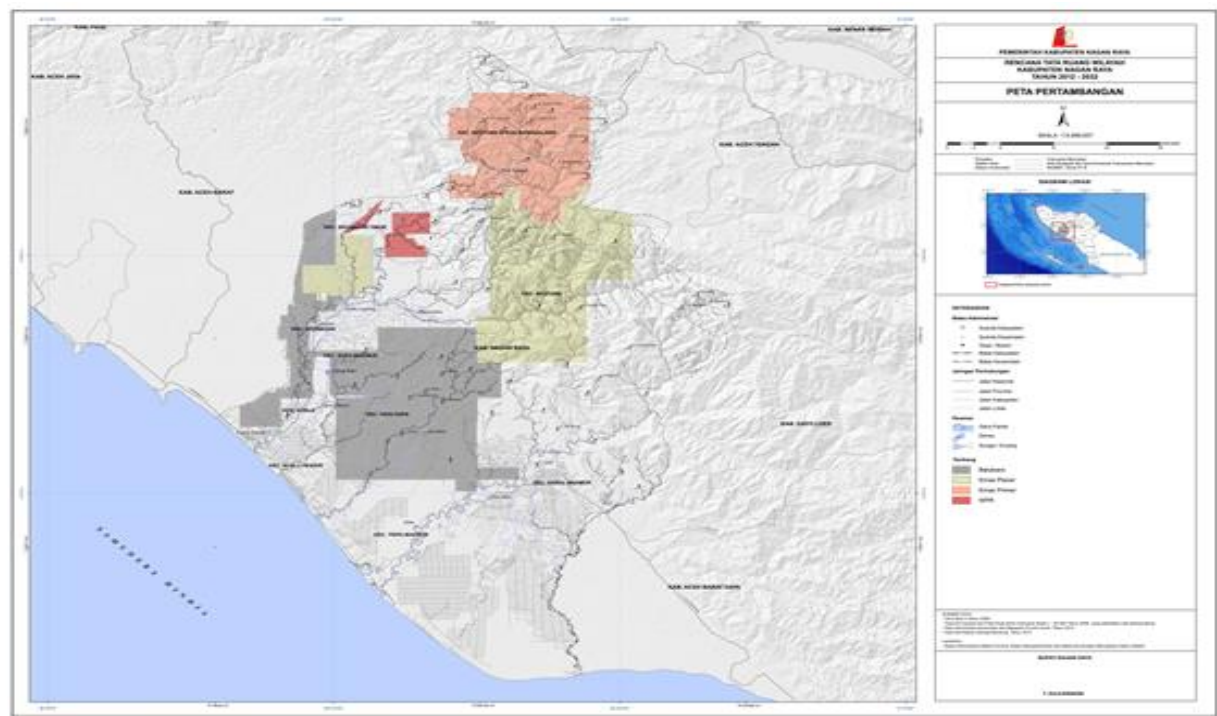
Berdasarkan pemetaan potensi bahan pertambangan di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2007, Kabupaten Nagan Raya memiliki beberapa sumber potensi pertambangan sebagai berikut:

1. Batu Bara, potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kecamatan Seunagan, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Kuala, Kecamatan Tadu Raya dan Kecamatan Darul Makmur.
2. Emas, potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, Kecamatan Seunagan dan Kecamatan Seungan Timur.
3. Tembaga potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong.
4. Bijih Besi potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, dan Kecamatan Darul Makmur.

- 5. Pasir dan Batu potensi tersebut terdapat di semua sungai wilayah Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya.
- 6. Lempung potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Kuala dan Kecamatan Darul Makmur.
- 7. Marmer/Batu Gamping/Meta Dolomitan potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong.
- 8. Serpentinit potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong dan Kecamatan Darul Makmur.
- 9. Bentonit potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Darul Makmur.
- 10. Batu Permata potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong.
- 11. Granit-Granodiorit-Diorit potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur.
- 12. Batu Sabak (Slate-Pillit) potensi tersebut terdapat di wilayah Kecamatan Beutong, Kecamatan Darul Makmur dan Kecamatan Tripa Makmur.

Sebaran secara spasial mengenai potensi pertambangan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Nagan Raya pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.4
Peta Kawasan Pertambangan Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti pertambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam (SDA) adalah segala



sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidupnya.

2.1.1.4. Potensi Air, Pangan dan Energi

A. Potensi Air

Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi sumber daya air sangat besar yang berasal dari air permukaan seperti air sungai dan rawa, serta air tanah yang bersumber dari mata air. Berdasarkan sumber airnya, kondisi air tanah di kabupaten ini dapat dikategorikan dengan payau dan tawar. Air payau dapat dijumpai dibagian pesisir sedangkan air tawar dapat dijumpai bagian yang jauh dari pesisir pantai. Potensi air yang besar telah menyebabkan daerah ini sangat pesat perkembangannya dalam bidang perkebunan dan pertanian, hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkebunan yang ada di Kabupaten Nagan Raya, baik perkebunan swasta maupun perkebunan masyarakat. Berdasarkan data hasil analisis peta Daerah Aliran Sungai (DAS) yang dikeluarkan oleh BP DAS, wilayah administrasi Kabupaten Nagan Raya termasuk dalam sembilan kawasan. Kawasan DAS yang paling luas adalah DAS Seunagan dengan luas areanya 91,956.31 Ha atau 25.92 persen dari total luasan Kabupaten.

Selain sungai, potensi air di Kabupaten ini juga berasal dari danau, danau yang tersebar di dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya mempunyai luas total 210,01 Ha yang terdiri atas danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha. Sebaran luas dan lokasi danau adalah sebagai berikut:

- Kecamatan Seunagan Timur seluas 57,91 ha terdiri dari danau seluas 13,15 Ha dan sempadan danau seluas 44,76 ha;
- Kecamatan Beutong seluas 47,90 ha terdiri dari danau seluas 22,99 ha dan sempadan danau seluas 24,91 ha;
- Kecamatan Tadu Raya seluas 357,09 ha terdiri dari danau seluas 68,44 ha dan sempadan danau seluas 288,65 ha; dan
- Kecamatan Tripa Makmur seluas 35,46 ha terdiri dari danau seluas 10,98 ha dan sempadan danau seluas 24,48 ha.

Sumber daya ini digunakan untuk memenuhi air baku untuk air bersih dan air minum, juga untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata serta pengembangan pembangkit listrik tenaga air.

Ada beberapa potensi Sumber Air Baku yang dapat dijadikan sebagai sumber air minum dengan memperhatikan aspek kualitas, kuantitas dan kontinuitas di Kabupaten Nagan Raya yang berasal dari sungai, rawa, danau, mata air dan embung. Sebaran lokasi dari sumber air baku tersebut menurut Kecamatan dapat dilihat pada Tabel 2.8



Tabel 2.8
Sebaran Sumber Air Baku di Kabupaten Nagan Raya

No	Kecamatan	Titik Lokasi Sumber Air Baku					
		Sungai	Rawa	Danau	Air Terjun	Mata Air	Embung
1	Darul Makmur	10	-	-	1	2	-
2	Kuala	2	-	-	-	1	-
3	Kuala Pesisir	4	2	-	-	-	1
4	Tadu Raya	8	-	1	-	-	-
5	Beutong	9	-	-	1	-	-
6	Seunagan	3	-	-	-	1	-
7	Suka Makmue	-	-	-	-	-	-
8	Seunagan Timur	2	-	-	-	2	-
9	Tripa Makmur	4	-	-	-	-	-
10	Beutong Ateuh Banggalang	1	-	-	1	1	-

Sumber: Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Umumnya penduduk Nagan Raya memanfaatkan air tanah untuk meenuhi keperluan sehari-hari yang berasal dari Sumur Gali/Bor (dalam) dan Sumur Pantek (dangkal), kebutuhan akan air selama ini cukup memadai baik pada air tanah dangkal dan dalam. Potensi air tanah tinggi berkisar (Debit Pompa > 10 liter per detik), Sedang berkisar (5-10 liter per detik) dan Kecil berkisar (< 5 liter per detik). Potensi air sumur dangkal diperkirakan lebih besar dari pada air sumur dalam, umumnya air tanah dangkal bersifat tawar, di saat musim penghujan kedalaman air tanah mencapai 2 hingga 5 meter dari permukaan tanah. Prasarana air bersih di Kabupaten Nagan Raya dilayani oleh PDAM Tirta Nagan, tetapi status nama tersebut belum di SK Bupati-kan karena belum beroperasinya unit pengelolaan air tersebut.

B. Pangan

Peran pangan bukan hanya penting untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan, namun lebih jauh dari itu peran pangan dengan kandungan gizi di dalamnya bagi kecerdasan bangsa dan peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia yang sehat, cerdas, aktif dan produktif seperti disebutkan dalam definisi ketahanan pangan. Kecukupan pemenuhan pangan dalam jumlah dan mutunya berkorelasi dengan produktivitas kerja dan pertumbuhan otak serta kecerdasan dan pada akhirnya berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dari segi kualitas, kuantitas, keragaman dan keamanan. Sektor pertanian merupakan salah satu prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya, sektor ini memiliki peran penting terhadap perekonomian Kabupaten Nagan



Raya, karena memberikan kontribusi terbesar sektor PDRB yaitu mencapai 50,29 persen pada Tahun 2024.

Padi merupakan tanaman pokok nasional dan tanaman utama yang dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, serta diproduksi dengan berbagai upaya ekstensifikasi dan intensifikasi upaya peningkatan produksi padi di berbagai daerah umumnya difokuskan pada area atau lahan dengan fasilitas irigasi yaitu padi sawah dimana air selalu tersedia sepanjang musim. Dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah melaksanakan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, yaitu pemanfaatan teknologi pertanian, SDM pertanian dan sarana produksi yang memadai.

C. Energi

Pelayanan listrik di Kabupaten Nagan Raya dikelola PT. PLN (Persero). Produksi listrik oleh PT. PLN (Persero) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Nagan Raya terus meningkat. Dalam upaya mendukung stabilisasi distribusi kelistrikan di wilayah pantai timur, tengah, dan pantai barat, serta wilayah selatan Aceh, pemerintah pusat telah membangun PLTU di Suak Puntong, Kecamatan Kuala Pesisir, Kabupaten Nagan Raya. PLTU tersebut merupakan bagian integral dari rencana pemerintah pusat untuk pengembangan listrik 10.000 MW di seluruh Indonesia. PLTU tersebut memiliki kapasitas listrik 2x110 Megawatt (MW). Luas area PLTU Nagan Raya mencapai 70 hektar, dengan total investasi senilai Rp.2,36 triliun. Adanya pembangkit listrik tersebut diharapkan masalah kelistrikan di Kabupaten Nagan Raya, termasuk wilayah pantai barat-selatan Aceh dapat teratasi secara berkelanjutan serta berdampak positif terhadap percepatan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.1.1.5 Wilayah Rawan Bencana

Dalam beberapa tahun terakhir, bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya antara lain: banjir genangan, abrasi pantai, longsor, erosi, dan kebakaran lahan. Banjir genangan merupakan bencana tahunan yang melanda beberapa kawasan yaitu Kecamatan Tripa Makmur, Tadu Raya, Kuala Pesisir dan Darul Makmur. Bencana tanah longsor juga sering terjadi di jalan Lintas Tengah Aceh yaitu di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang merupakan wilayah perbukitan yang curam (Singgah Mata). Selain itu, bencana kebakaran lahan yang diakibatkan baik oleh faktor alam yaitu cuaca ekstrim pada musim kemarau maupun faktor kesadaran manusia yang rendah akan kepeduliannya terhadap lingkungan.

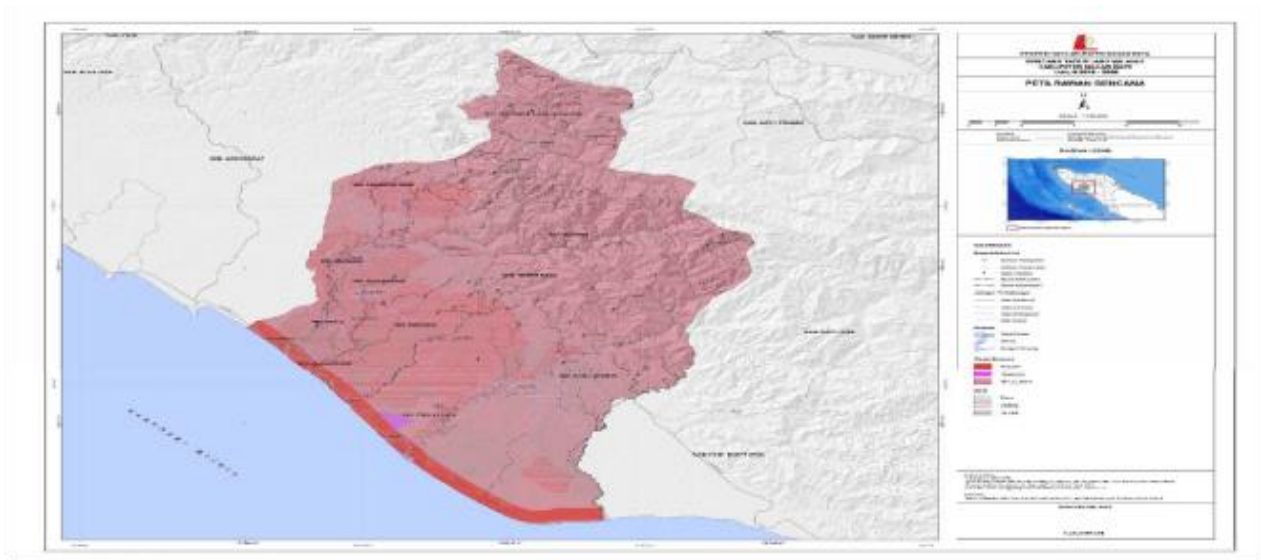
Berdasarkan potensi rawan bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat diklasifikasikan dalam beberapa kondisi yaitu :

- 1. Kawasan rawan longsor meliputi Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang;

2. Kawasan rawan gelombang pasang meliputi Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Tripa Makmur;
3. Kawasan rawan banjir meliputi Kecamatan Tadu Raya, Tripa Makmur, Kuala, Kuala Pesisir dan Darul Makmur;
4. Kawasan rawan kebakaran lahan meliputi Kacamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, dan Kuala.
5. Kawasan rawan tsunami ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki resiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi daerah seluruh wilayah pesisir Kabupaten Nagan Raya.
6. Kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

Permasalahan utama dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya terutama untuk bencana dengan skala menengah keatas antara lain belum terpadunya koordinasi antara unsur pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil lainnya. Hal lain yang membuat kurang optimalnya penyelenggaraan layanan penanggulangan bencana adalah partisipasi masyarakat dalam pengurangan resiko bencana masih terbatas hanya pada saat terjadinya bencana (fase tanggap darurat), serta sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai. Bencana lainnya yang berpotensi terjadi di kabupaten Nagan Raya adalah bersumber dari perilaku manusia atau aktifitas yang ditekuni oleh masyarakat itu sendiri. Bencana tersebut terjadi akibat faktor kelalaian, pengetahuan masyarakat yang rendah, ketidaktahuan dan lainnya. Bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia seperti kebakaran, konflik sosial dan pencemaran lingkungan (polusi udara dan limbah industri). Eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Alam seperti penambangan yang tidak dikelola dengan baik diperkirakan akan menimbulkan masalah baru terhadap kualitas lingkungan hidup.

Gambar 2.5
Peta Rawan Bencana Kabupaten Nagan Raya



Sumber : BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.1.2 Demografi

Perkembangan demografi dalam konteks pembangunan pada saat ini adalah sangat penting untuk diselesaikan dengan bijak. Penduduk yang diterjemahkan sebagai kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu memiliki tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Sebagai salah satu modal dasar pembangunan, penduduk perlu dioptimalkan dan dikelola dengan baik agar memiliki daya saing tinggi guna mencapai kesejahteraan. Pembangunan di suatu wilayah akan berhasil apabila penduduk sebagai modal dasar pembangunan kondisinya kondusif, tidak hanya sisi jumlahnya yang mencukupi, struktur dan persebarannya yang menguntungkan, tetapi kualitasnya pun harus memadai.

2.1.2.1 Jumlah Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di suatu wilayah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya, mengalami kondisi fluktuatif. Distribusi penduduk tidak merata di setiap kecamatan, hal ini disamping terkonsentrasi penduduk pada kecamatan-kecamatan yang lebih luas juga akibat kondisi alam yang berbeda. Jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014 sebanyak 162.448 jiwa, Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Darul Makmur yakni sebanyak 45.409 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yakni 1.964 jiwa. Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 sebanyak 181.103 jiwa, Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Darul Makmur yakni sebanyak 53.232 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yakni 2.226 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.9 berikut:



Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Jumlah Penduduk (Jiwa)											
Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darul Makmur	45.409	43.311	44.237	45.107	45.990	46.776	49.414	50.281	51.336	51.655	53.232
Tripa Makmur	9.190	8.763	8.955	9.130	9.309	9.468	9.038	9.108	9.208	9.695	9.950
Kuala	21.559	20.593	21.004	21.416	21.835	22.208	22.350	22.637	23.004	23.237	23.689
Kuala Pesisir	16.406	15.670	15.985	16.299	16.618	16.902	17.338	17.594	17.912	18.251	18.587
Tadu Raya	13.005	12.430	12.670	12.920	13.172	13.398	14.731	15.049	15.424	15.592	16.107
Beutong	14.585	13.916	14.203	14.482	14.765	15.017	13.701	13.746	13.837	14.592	14.771
Beutong Ateuh Banggalang	1.964	1.863	1.916	1.953	1.992	2.026	1.990	2.011	2.039	2.070	2.226
Seunagan	16.836	16.089	16.387	16.708	17.034	17.326	15.924	15.988	16.105	16.449	16.811
Suka Makmue	9.334	8.914	9.089	9.267	9.448	9.609	9.931	10.085	10.274	10.330	10.527
Seunagan Timur	14.160	13.521	13.777	1.407	14.320	14.564	13.997	14.092	14.254	14.800	15.023
Nagan Raya	162.448	155.070	158.223	148.689	164.483	167.294	168.414	170.591	173.393	176.461	181.103

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.1.2.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur . Jumlah Penduduk menurut kelompok umur Penyebutan satuan tahun pada umur penduduk dilakukan dengan pembulatan ke bawah. Contoh, seseorang dengan umur 4 tahun 10 bulan 25 hari dinyatakan dalam umur 4 tahun. Demikian juga untuk kelompok umur selanjutnya. Komposisi penduduk berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia produktif. Pada tahun 2014 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi adalah kelompok usia 10 – 14 tahun yaitu mencapai 16.572 Jiwa, sedangkan terendah adalah kelompok usia 60-64 tahun yaitu 3.716 jiwa, Pada tahun 2024 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi adalah kelompok usia 10 – 14 tahun yaitu mencapai 15.851 Jiwa, sedangkan terendah adalah kelompok usia 60-64 tahun yaitu 6.412 jiwa dari jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan. Untuk lebih jelasnya Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.10

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur (Jiwa)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	16.553	16.815	16.353	16.391	16.407	16.361	14.154	14.163	14.673	15.202	14.870
05-09	15.605	14.823	15.342	15.586	15.882	15.950	14.281	14.259	16.097	14.401	17.331
10-14	16.572	14.617	14.711	15.024	15.358	15.730	14.274	14.253	15.698	14.431	15.851
15-19	14.129	13.180	12.643	1.272	12.853	12.998	13.881	13.887	13.563	14.190	14.787
20-24	14.347	13.708	13.112	13.076	13.033	12.972	1.475	14.752	14.321	14.311	14.295
25-29	15.698	14.653	14.847	15.014	15.107	15.111	14.264	14.351	13.841	14.778	14.549
30-34	14.690	14.144	14.419	14.707	15.005	15.280	13.640	13.754	13.410	14.035	13.601
35-39	13.945	12.083	12.627	12.979	13.341	13.607	13.335	13.513	14.001	13.556	13.856
40-44	10.477	10.247	10.721	10.981	11.248	11.558	13.049	13.268	13.376	13.377	13.829
45-49	8.842	8.532	9.149	9.491	9.831	10.129	11.121	11.424	11.722	12.438	12.460
50-54	7.121	6.968	7.486	7.761	8.058	8.353	8.909	9.213	9.469	10.148	10.559
55-59	4.791	4.977	5.523	5.762	5.993	6.219	7.134	7.398	7.058	7.991	7.798
60-64	3.716	3.739	4.282	4.545	4.819	5.070	5.919	6.189	6.075	6.461	6.412
65+	6.963	6.584	7.008	7.290	7.608	7.956	9.686	10.167	9.523	10.417	10.905

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.1.2.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Metode penghitungan laju pertumbuhan penduduk yang digunakan oleh BPS adalah metode geometrik. Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya. Kegunaannya adalah memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang.

Laju pertumbuhan penduduk menurut kecamatan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 2014-2024 cukup bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif. Laju Pertumbuhan penduduk yang rendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 0,66 persen Sebaliknya pertumbuhan penduduk yang tinggi terjadi pada tahun 2015, yaitu 4,54 persen. Untuk lebih jelasnya Laju pertumbuhan pertumbuhan penduduk 10 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut 2.11 berikut:

Tabel 2.11
Laju Pertumbuhan penduduk
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Kecamatan	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darul Makmur	2,05	-4,62	1,96	1,97	1,96	1,71	2,3	1,76	2,1	3,11	3,05
Tripa Makmur	1,73	-4,65	1,59	1,54	1,96	1,71	1,31	0,77	1,1	2,80	2,63
Kuala	5,41	-4,48	1,83	1,96	1,96	1,71	1,83	1,28	1,62	1,73	1,95
Kuala Pesisir	4,49	-4,49	1,84	1,96	1,96	1,71	2,01	1,48	1,81	1,77	1,84
Tadu Raya	-7,16	-4,42	1,92	1,97	1,95	1,72	2,7	2,16	2,49	2,00	3,30
Beutong	6,03	-4,59	2,11	1,96	1,95	1,71	0,86	0,33	0,66	1,67	3,01
Beutong Ateuh Banggalang	-11,9	-5,14	1,4	1,93	2	1,71	1,59	1,06	1,39	2,03	5,40
Seunagan	5,82	-4,44	2,44	1,96	1,95	1,71	0,93	0,4	0,73	0,43	2,20
Suka Makmue	4,16	-4,5	2,18	1,96	1,95	1,7	2,09	1,55	1,87	1,12	1,91
Seunagan Timur	1,67	-4,51	2,54	1,96	1,94	1,7	1,36	0,82	1,15	1,67	1,51
Nagan Raya	2,2	4,54	2,03	1,96	1,96	1,71	0,66	1,31	1,64	1,81	2,63

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.1.2.4 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah ukuran persebaran penduduk yang menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah. Kepadatan penduduk terkait dengan perbandingan rata-rata jumlah penduduk di dalam satuan luas wilayah (jiwa/km²). Kepadatan kotor jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang termasuk di dalamnya kawasan lindung dan budidaya, sedangkan kepadatan bersih jumlah penduduk dalam suatu wilayah efektif



untuk kawasan budidaya saja. Adapun kriteria kepadatan penduduk dapat dilihat dalam tiga kategori:

- kepadatan tinggi : jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih besar dari angka kepadatan wilayah kabupaten;
- kepadatan sedang: jika angka kepadatan suatu kecamatan sama besar dengan angka kepadatan wilayah kabupaten;
- kepadatan rendah: jika angka kepadatan suatu kecamatan lebih kecil dari angka kepadatan wilayah kabupaten.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya diuraikan dalam dua jenis yaitu:

- Kepadatan Kotor adalah perbandingan jumlah penduduk per kecamatan dibagi luas wilayah kecamatan tersebut.
- Kepadatan Bersih adalah perbandingan jumlah penduduk per kecamatan dibagi luas lahan yang dimanfaatkan untuk permukiman.

Kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.12 berikut.

Tabel 2.12
Kepadatan penduduk Menurut Kecamatan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk (km2)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darul Makmur	44	42	43	43	45	46	48	48,91	50,24	50	52
Tripa Makmur	49	46	47	47	49	50	48	48,09	48,9	51	82
Kuala	178	170	174	174	181	184	185	187,3	191,4	192	310
Kuala Pesisir	215	205	209	209	218	221	227	230,5	236	239	54
Tadu Raya	37	36	36	36	38	39	42	43,35	44,69	45	16
Beutong	14	14	14	14	15	15	13	13,51	13,68	14	260
Beutong Ateuh Banggalang	5	5	5	5	5	5	5	4,95	5,05	5	43
Seunagan	297	284	289	289	300	205	281	281,8	285,6	290	67
Suka Makmue	181	173	176	176	183	186	193	195,6	200,4	200	56
Seunagan Timur	56	54	55	55	57	58	56	56,01	56,99	59	37
Nagan Raya	46	44	45	45	46	47	48	48,12	49,2	50	51,09

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir kepadatan penduduk di Kabupaten Nagan Raya, mengalami kondisi fluktuatif . Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014 mencapai 46 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Kecamatan Seunagan mencapai 297 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yaitu 5 Jiwa/Km².

Kepadatan penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 mencapai 51,09 Jiwa/Km². Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi



yaitu Kecamatan Kuala mencapai 310 Jiwa/Km². Dan Kecamatan dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu Kecamatan Tadu Raya yaitu 16 Jiwa/Km².

2.1.2.5 Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 perempuan. Jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2014 sebesar 99 ribu. jumlah rasio jenis kelamin penduduk perkecamatan tahun 2024 sebesar 103,41. Untuk lebih jelasnya data penduduk berdasarkan jenis kelamin dan data rasio jenis kelamin di kabupaten Nagan Raya 10 tahun terakhir dapat di lihat pada tabel 2.13 di bawah ini:

Tabel 2.13
Jumlah penduduk berdasarkan Kelamin
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Tahun	Jumlah penduduk berdasarkan Jenis Kelamin (ribu)	
	Perempuan	Laki-Laki
2014	81.430	81.017
2015	76.781	78.289
2016	78.435	79.788
2017	79.822	81.507
2018	81.272	83.211
2019	82.717	84.577
2020	83.353	85.039
2021	84.425	86.166
2022	85.880	86.947
2023	87.589	88.872
2024	89.782	91.321

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Tabel 2.14
Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (ribu)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Darul Makmur	102	105	105	105	105	105	103,6	102,7	103,6	103,13	103,41



Kecamatan	Rasio Jenis Kelamin (ribu)										
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tripa Makmur	97	99	99	99	100	99	101	102,1	101	100,52	101,25
Kuala	100	103	102	103	103	103	102,3	102,4	102,3	102,4	101,93
Kuala Pesisir	101	103	103	103	103	103	105,1	104,8	105,1	103,76 102,44	103,91 102,27
Tadu Raya	104	106	106	107	107	107	103,5	101,8	103,5	99,72	100,52
Beutong	98	100	100	101	101	101	101	103,1	101,5	101,53	105,92
Beutong Ateuh Banggalang	103	105	105	105	106	105	103,5	104	103,5	99,26	99,04
Seunagan	96	98	98	98	99	98	98,83	100,7	98,83	96,02	96,43
Seunagan Tmur	98	101	100	101	101	101	98,3	97,86	98,3	99,17	99,8
Suka Makmue	93	95	95	95	95	95	98,73	99,72	98,73	101,46	101,71
Nagan Raya	99	102	102	102	102	102	102	102,1	102	103,13	103,41

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.1.2.6 Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat selama 10 tahun terakhir, hanya pada tahun 2015 dan tahun 2023 mengalami sedikit penurunan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 berjumlah 68.505 jiwa sedangkan pada tahun 2024 berjumlah 85.020 jiwa. Untuk lebih jelasnya jumlah angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15
Jumlah Angkatan Kerja
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024

	Uraian	Tahun										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Penduduk (Jiwa)	162.448	155.070	158.223	161.329	164.483	167.294	168.392	No	173.392	176.461	181.103
2	Jumlah Angkatan Kerja (Jiwa)	68.505	65.303	NA	70.079	72.102	74.669	81.989	81.535	85.038	83.480	85.020

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.1.2.7 Struktur dan Indeks Ketergantungan Penduduk

Dari tabel 2.16 menunjukkan bahwa Angka ketergantungan bisa didapat dari penjumlahan kelompok umur < 0-14 tahun + < 15-64 tahun / 65 tahun+,



Angka ketergantungan Kabupaten Nagan Raya bervariasi untuk tahun 2014 adalah 51,68 % dan untuk tahun 2024 adalah 48,27 %. Meningkatnya proporsi penduduk produktif dibandingkan proporsi penduduk tua serta penurunan penduduk usia remaja, berimplikasi positif terhadap perubahan angka ketergantungan secara keseluruhan. Dengan kata lain, struktur umur penduduk Kabupaten Nagan Raya berada pada tahap transisi antara penduduk muda menjadi penduduk tua.

Tabel 2.16
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Tahun	0-14 tahun	15-64 tahun	65 + tahun	Jumlah penduduk	Angka ketergantungan (%)
2014	48.730	107.756	6.963	162.448	51,68
2015	46.255	102.231	6.584	155.070	51,68
2016	46.406	104.811	7.008	158.223	50,96
2017	47.001	107.038	7.290	161.329	50,72
2018	47.587	109.288	7.608	164.483	50,50
2019	48.041	111.297	7.956	167.294	50,31
2020	42.709	115.997	9.686	168.392	45,17
2021	42.675	117.749	10.167	170.591	44,88
2022	46.468	116.836	9.523	172.827	47,9
2023	47.687	118.357	10.417	176.461	49,09
2024	48.052	122.146	10.905	181.103	48,27

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

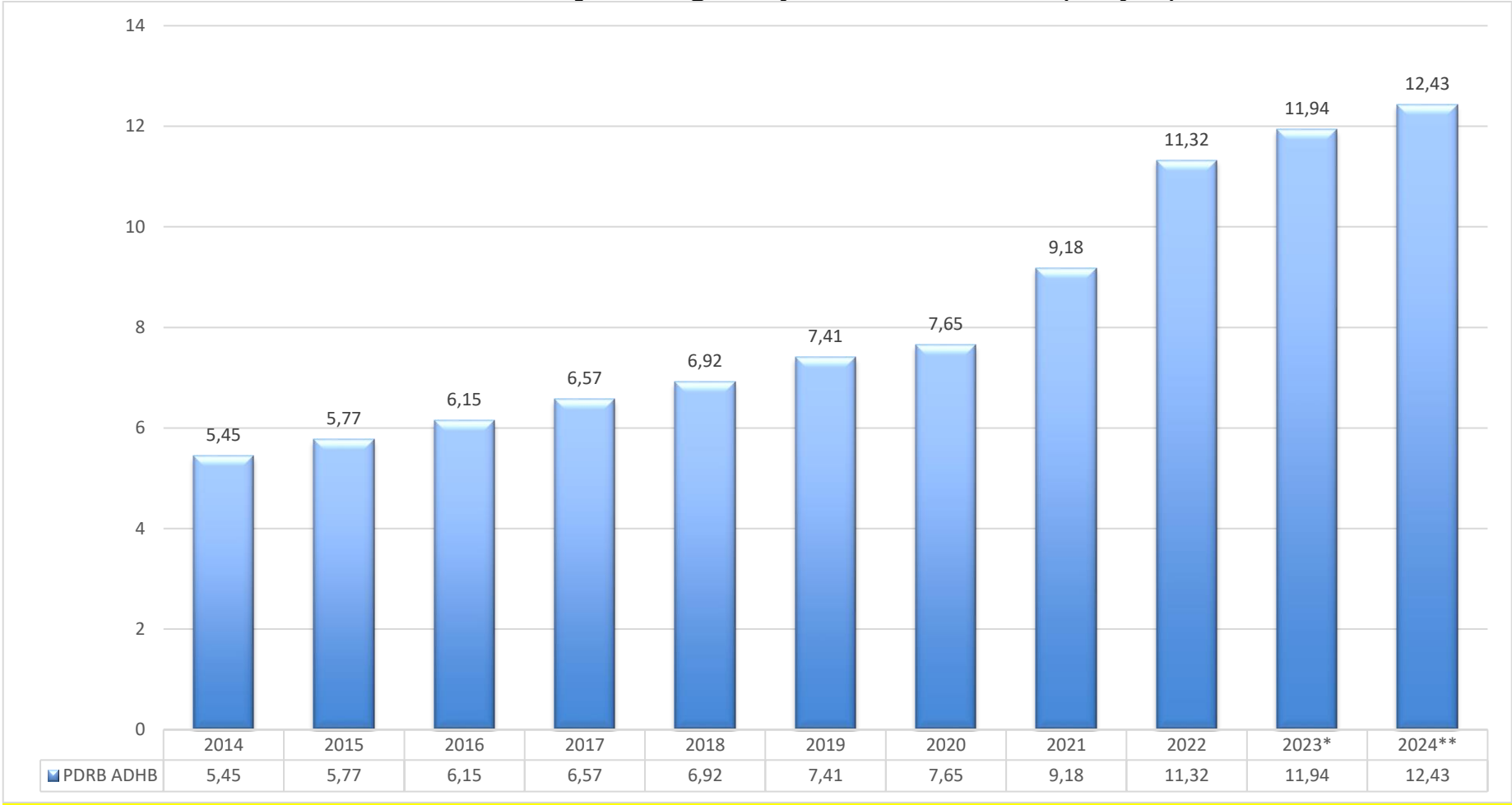
2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

2.2.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pada tahun 2014 nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,45 triliun, kemudian meningkat menjadi 7,41 triliun pada tahun 2019. Peningkatan kembali terjadi hingga tahun 2024 nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya mencapai 12,43 triliun. Untuk mengetahui perkembangan nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir secara lebih rinci dapat di lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.6
PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (triliyun)



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara nominal nilai PDRB ADHB Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Peningkatan ini selain disebabkan oleh peningkatan output perekonomian juga di sebabkan oleh peningkatan faktor harga yang kemudian berkontribusi dalam menentukan besaran nilai PDRB ADHB. Peningkatan besaran nilai PDRB ini dapat menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan pembangunan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya.

Jika dilihat dari sisi produksi, peningkatan nilai PDRB tersebut dikontribusikan oleh berbagai lapangan usaha. Ada lima sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam pembentukan nilai PDRB Kabupaten Nagan Raya selama satu dekade terakhir. sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor kontruksi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Sementara ada 13 sektor lainnya memiliki kontribusi yang tidak terlalu besar. Untuk lebih jelasnya perkembangan kontribusi sektor perekonomian yang menyumbang kontribusi terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.17
Peranan PDRB Lima Kategori Lapangan Usaha Terbesar
Tahun 2014-2024 (Persen)

SEKTOR		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	Pertanian Kehutanan dan Perikanan	40,75	42,62	45,63	45,89	45,85	45,38	45,84	44,98	44,38	48,24	50,29
B	Pertambangan dan Penggalian	18,41	14,77	9,85	8,29	8,16	8,35	7,88	12,60	16,07	13,67	11,66
C	Perdagangan Besar dan Enceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,90	11,31	11,73	11,76	11,76	11,44	10,80	9,59	8,98	8,64	8,69
D	Konstruksi	8,48	8,96	9,43	9,68	9,87	10,55	11,74	10,00	9,09	8,66	8,13
E	Industri Pengolahan	2,73	3,09	3,58	3,97	3,87	3,71	3,54	4,45	4,49	4,52	4,69

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

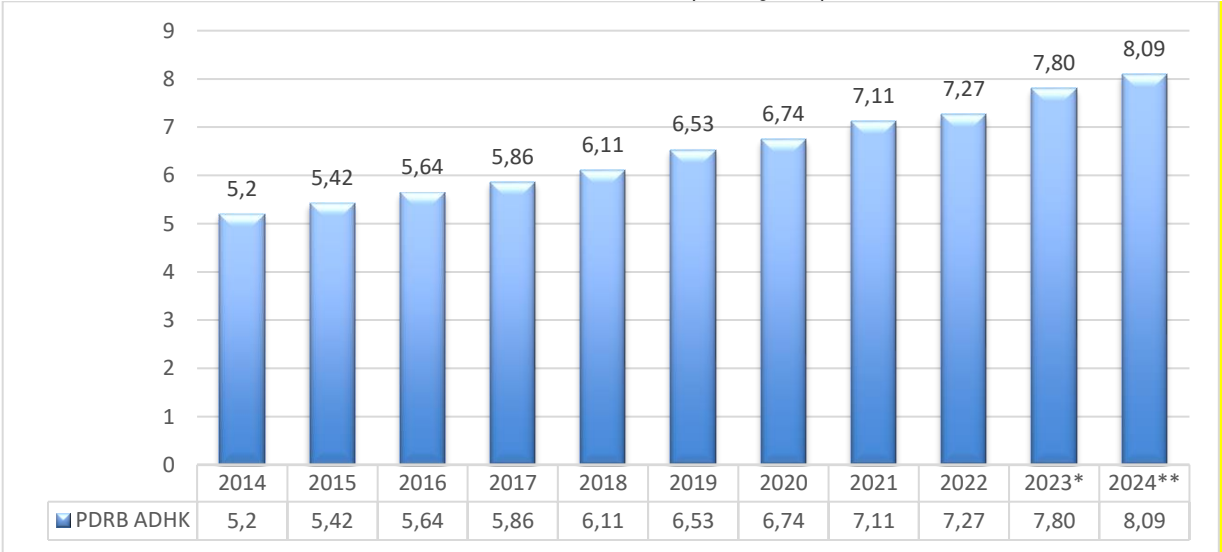
Berdasarkan tabel di atas kita dapat melihat bawa hingga tahun 2024 kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan teradap PDRB kabupaten Nagan Raya sebesar 50,29 persen. Selama satu dekade terakhir kontribusi sektor ini dalam PDRB secara rata-rata di atas 40 persen setiap tahunnya. Sementara



itu sektor yang memiliki kontribusi terbesar kedua adalah sektor pertambangan dan penggalan, Pada tahun 2014 sektor ini memberikan kontribusi sebesar 18,41 persen kemudian secara konsisten mengalami penurunan hingga tahun 2020 yang hanya memberikan kontribusi sebesar 7,88 persen dan berfluktuatif hingga tahun 2024. Sementara sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor menjadi sektor terbesar ketiga yang memberikan kontribusi terhadap PDRB, sektor kontruksi menjadi sektor penyumbang keempat terbesar dalam pembentukan PDRB dan sektor industri pengolahan menjadi sektor penyumbang kelima dalam pembentukan PDRB Kabupaten Nagan Raya. Secara keseluruhan selama satu dekade terkahir perekonomian di Kabupaten Nagan Raya masih sangat bergantung pada sektor primer utamanya yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Oleh karena itu pembangunan sektor ini harus menjadi prioritas dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya.

Sementara itu pola peningkatan yang serupa juga terjadi pada nilai PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2014 PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,2 triliyun kemudian meningkat hingga mencapai 8,09 triliyun pada tahun 2024. Untuk melihat gambaran lebih rinci tentang perkembangan PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.7
PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024 (triliyun)



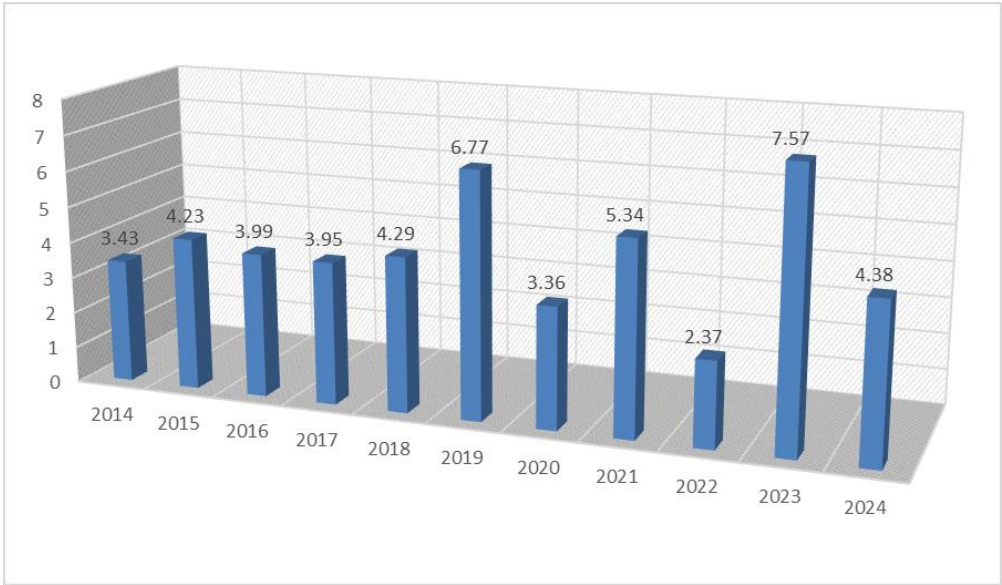
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Jika kita bandingkan dengan peningkatan PDRB ADHB yang besarnya jauh melebihi peningkatan PDRB ADHK ini mengindikasikan peningkatan harga menjadi faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan peningkatan produksi



di Kabupaten Nagan Raya. Sementara itu jika kita melihat pertumbuhan PDRB atau pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir tercatat tumbuh secara positif tetapi berfluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya pada tahun tersebut mencapai 7,57 persen. Sementara pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya tumbuh sebesar 2,37 persen. Untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.8
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024 (persen)



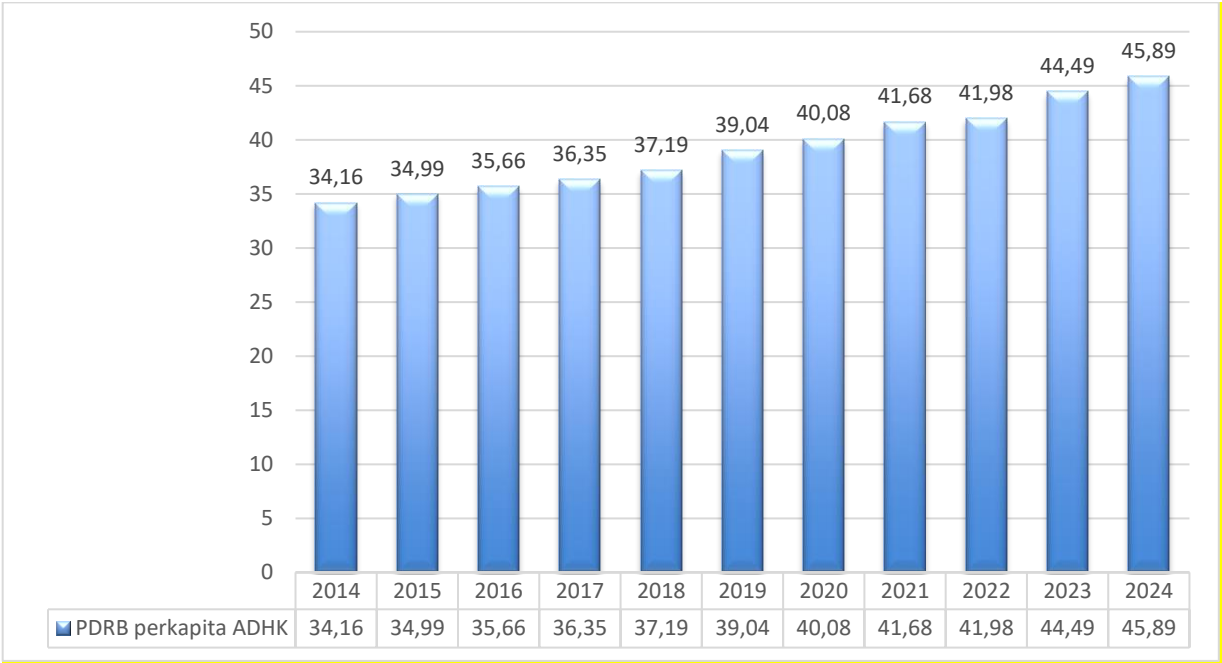
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.2.1.2 Pendapatan Perkapita (PDRB Perkapita)

Produk Domestik Regional Bruto perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. PDRB perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk dalam tahun yang bersangkutan. Berdasarkan data yang di publikasikan oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa selama satu dekade terakhir PDRB per kapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan baik dalam ukural riil maupun nominal. Pada tahun 2014 PDRB riil perkapita tercatat sebesar 34,16 juta rupiah, jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 45,89 juta rupiah pada tahun 2024. Untuk melihat pekembangan PDRB rill per kapita Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.9
PDRB riil perkapita Kabupaten Nagan Raya (jutaan rupiah)
Tahun 2014 – 2024



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

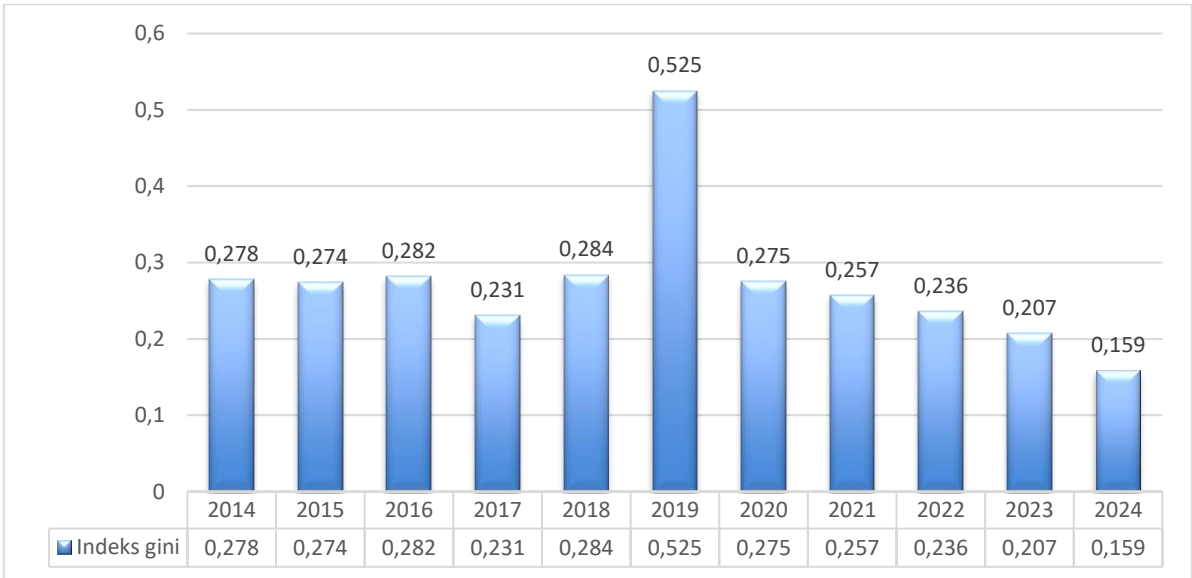
Berdasarkan gambar di atas, kita dapat melihat bahwa pendapatan perkapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dimana terjadi peningkatan sekitar 2,51 juta rupiah dari tahun sebelumnya. Sementara peningkatan terendah terjadi pada tahun 2022 yang hanya sekitar 0,3 juta rupiah.

2.2.1.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks Gini Kabupaten Nagan Raya selama satu dekade terakhir cenderung berfluktuatif. Untuk melihat perkembangan indeks gini Kabupaten Nagan Raya selama sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.10
Perkembangan Indeks Gini
Kabupaten Nagan Raya tahun 2014-2024



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

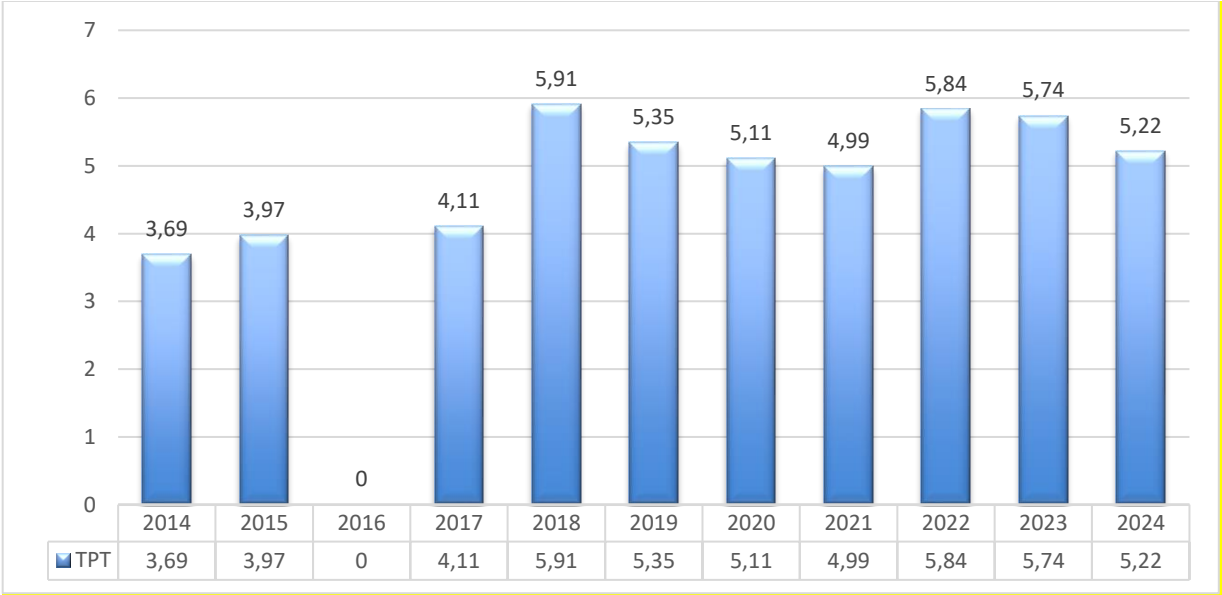
Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa dalam satu dekade terakhir indeks gini Kabupaten Nagan Raya berfluktuasi. Misalnya Pada tahun 2014 indeks gini Kabupaten Nagan Raya sebesar 0,278 sebelum mengalami penurunan pada tahun 2015 menjadi 0,274, Kemudian pada tahun 2016 nilai indeks gini kemudian meningkat kembali menjadi 0,282 dan terus berfluktuatif hingga tahun 2020, selanjutnya dalam empat tahun terakhir indeks gini Kabupaten Nagan Raya secara konsisten terjadi penurunan, hal ini mengindikasikan bahwa jurang ketimpangan antar penduduk di Kabupaten Nagan Raya semakin menyempit. Secara umum selama satu dekade terakhir indeks gini Kabupaten Nagan Raya dikategorikan kedalam tingkat ketimpangan rendah dan berada dibawah indeks gini Aceh dan Nasional.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Selama satu dekade terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuatif, yang disebabkan oleh berbagai faktor struktural dan eksternal. Salah satu penyebab utamanya adalah dominasi sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja, yang sangat bergantung pada musim dan kondisi cuaca. Karakteristik pekerjaan di sektor ini cenderung musiman, sehingga berdampak langsung pada naik-turunnya jumlah pengangguran terbuka pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Selain itu, pertumbuhan ekonomi daerah yang belum merata, terutama keterbatasan

kontribusi sektor industri dan jasa terhadap penciptaan lapangan kerja, turut memengaruhi dinamika TPT. Pekerjaan informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan di Nagan Raya juga memberikan andil besar terhadap ketidakstabilan kondisi ketenagakerjaan, mengingat sektor ini kurang memberikan jaminan pendapatan dan keberlanjutan kerja. Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 juga turut memperburuk situasi, dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), penurunan jam kerja, serta keterbatasan kesempatan kerja formal, yang semuanya berdampak terhadap peningkatan jumlah pengangguran terbuka. Di sisi lain, perubahan metode survei dan pencatatan data oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun juga menjadi penyumbang variasi data TPT yang terlihat fluktuatif. Oleh karena itu, untuk menurunkan dan menstabilkan angka pengangguran secara berkelanjutan, perlu dilakukan diversifikasi ekonomi daerah, penguatan sektor formal, peningkatan kualitas tenaga kerja, serta pengembangan sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan kondisi ekonomi. Untuk melihat perkembangan tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.11
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa selama satu dekade terakhir TPT Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuatif. Pada tahun 2014 TPT di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,69 persen. namun sayangnya TPT kemudian

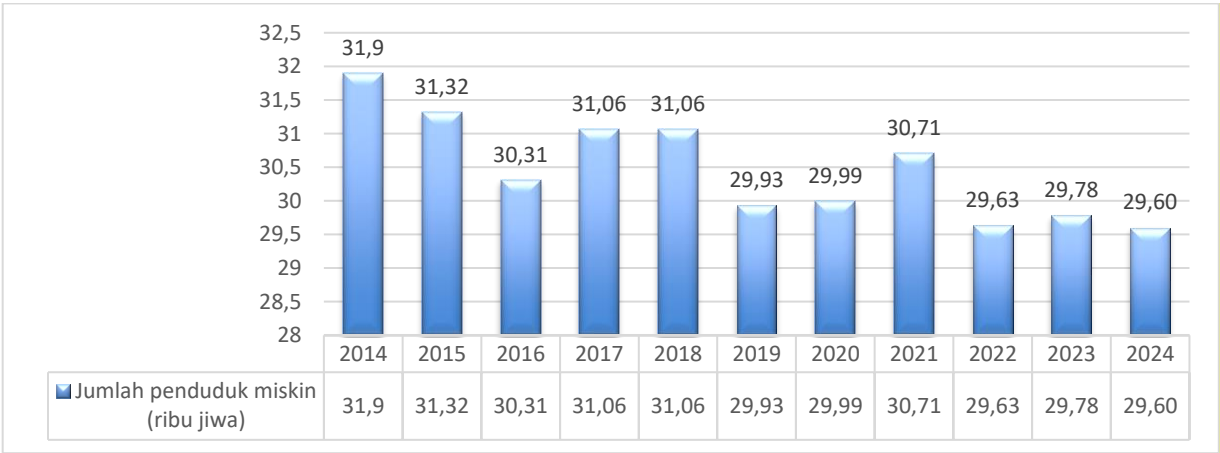


bergerak naik kembali hingga tahun 2018 mencapai 5,91 persen, pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nagan Raya kembali turun mencapai 5,22 persen. Melalui kinerja perekonomian yang kuat dan stabil, kesejahteraan masyarakat mengalami peningkatan. Ekspansi berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil menekan tingkat pengangguran. sementara pada tahun 2016 tidak dapat dikeluarkan data TPT karena pada tahun tersebut pendataan Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) tidak dilaksanakan.

2.2.1.5 Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya selama satu dekade terakhir terus menunjukkan penurunan. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya mencapai 31,9 ribu jiwa hingga tahun 2019 sebelum wabah covid-19 melanda dunia pada umumnya dan juga Indonesia pada khususnya, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya turun menjadi 29,93 ribu jiwa . Namun akibat wabah Covid-19 yang melanda Indonesia jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya meningkat hingga menembus angka 30,71 ribu jiwa pada tahun 2021 sebelum kemudian terjadi penurunan kembali pada tahun 2022 hingga Tahun 2024, dimana jumlah orang miskin di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 sebanyak 29.60 jiwa. Perkembangan jumlah orang miskin di Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terkahir dapat di lihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.12
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024 (ribuan)

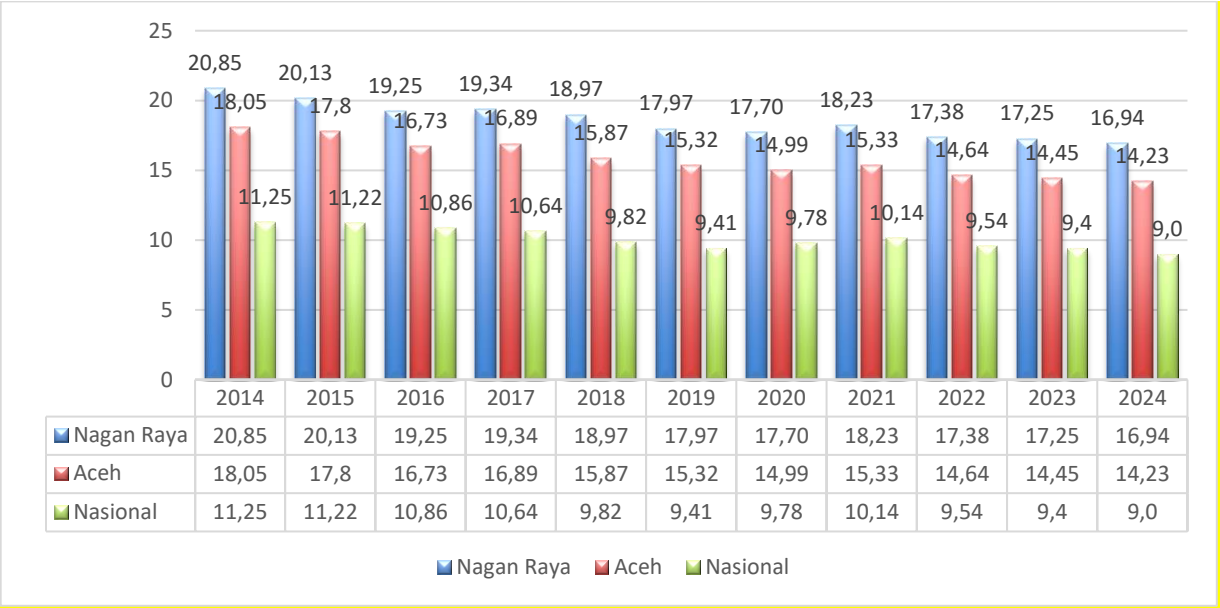


Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Jika kita melihat dari sisi persentase, tingkat kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya juga mengalami penurunan dalam satu dekade terkahir. Pada tahun 2014 ada sekitar 20,85 persen penduduk di Kabupaten Nagan Raya hidup dalam

kemiskinan. Persentase ini kemudian terus menurun hingga mencapai angka 17,70 persen pada tahun 2020. Namun sayang nya akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 18,23 persen sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali hingga tahun 2024 mencapai 16,94 persen. Meski demikian hingga tahun 2024 pesentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya masih lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata persentase penduduk miskin Provinsi Aceh dan Nasional. Untuk melihat perkembangan persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir serta perbandingannya dengan persentase kemiskinan Aceh dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.13
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

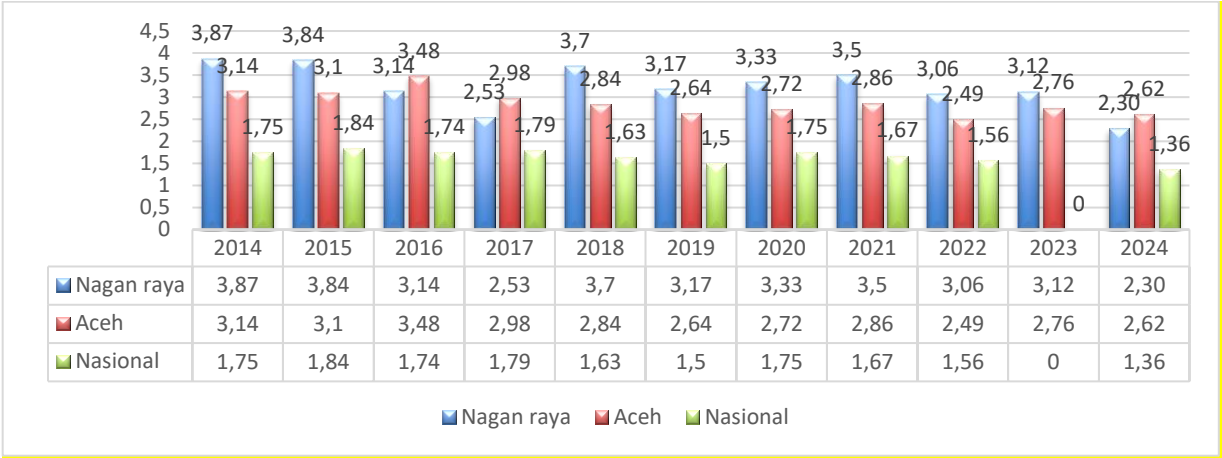


Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Selain jumlah dan persentase penduduk miskin, beberapa indikator lain dari ukuran kemiskinan lainnya juga dapat kita lihat seperti indeks kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap index* (P1). Selama satu dekade terakhir indek kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya sangat berfluktuasi. Pada tahun 2014 indek kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,87 , hingga tahun 2024 Indek kedalaman kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sebesar 2,30 . Untuk melihat Perkembangan indek kedalaman kemiskinan atau *Poverty Gap index* (P1) Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir dapat di lihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.14
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024



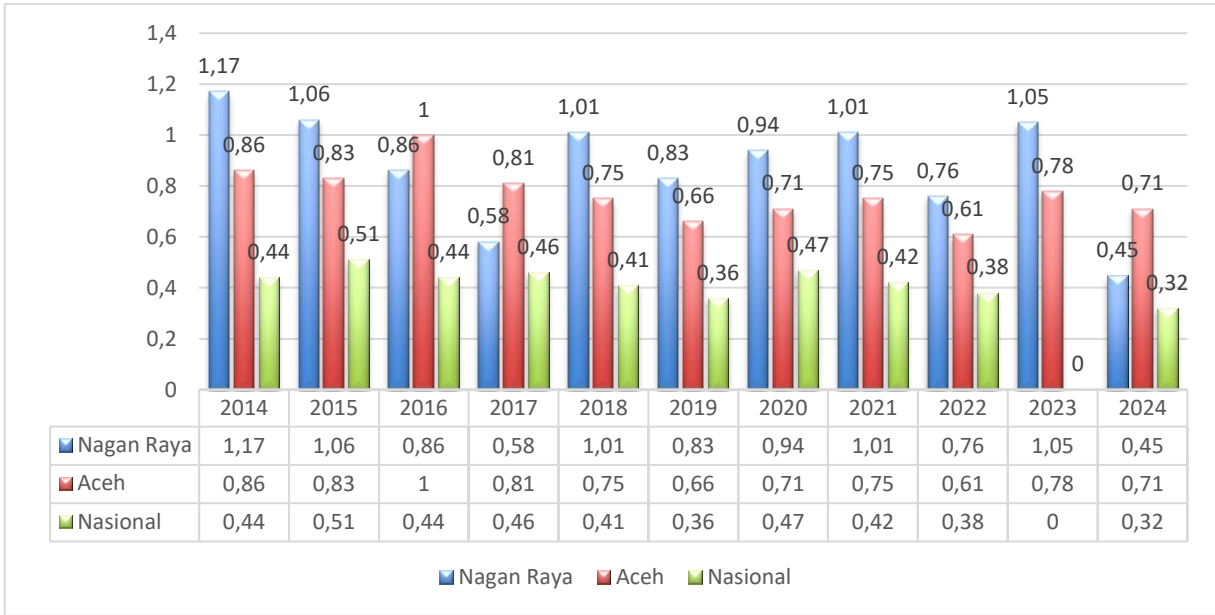
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan hingga tahun 2024 angka indeks kedalaman kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten masih di atas rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Hanya pada tahun 2016, 2017 dan 2018 Kabupaten Nagan Raya sedikit dibawah provinsi Aceh. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Nagan Raya jauh lebih lebar di dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional atau dengan kata lain kedalaman kemiskinan penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya jauh melebihi rata-rata penduduk Provinsi Aceh dan Nasional.

Selain indeks kedalaman kemiskinan, indikator lain yang sering digunakan dalam menganalisis kemiskinan adalah indeks keparahan kemiskinan (P2). Perkembangan Indeks ini di Kabupaten Nagan Raya menyerupai pola indeks kedalaman kemiskinan (P1). Misalnya pada tahun 2018 ketika indeks kedalaman kemiskinan naik, maka indeks keparahan kemiskinan juga ikut naik. Demikian juga untuk tahun 2019 ketika indeks kedalaman kemiskinan turun indeks keparahan kemiskinan juga ikut menurun. Secara umum perkembangan indeks keparahan kemiskinan (P2) di Kabupaten Nagan Raya dalam satu dekade terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.15
Perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat menyaksikan bahwa indeks keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya sangat fluktuatif. Pada tahun 2014 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya sebesar 1,17. Angka indeks kemudian turun secara terus menerus hingga tahun 2017 menjadi 0,58 kemudian kembali berfluktuatif hingga tahun 2024 indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Nagan Raya mencapai 0,45. Begitu juga dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) Provinsi Aceh dan Nasional selama satu dekade terakhir sangat berfluktuatif. Secara matematis angka indeks keparahan kemiskinan akan lebih cepat dapat di turunkan ketika prioritas penanggulangan kemiskinan harus diarahkan pada mereka yang berada di lapisan kerak kemiskinan.

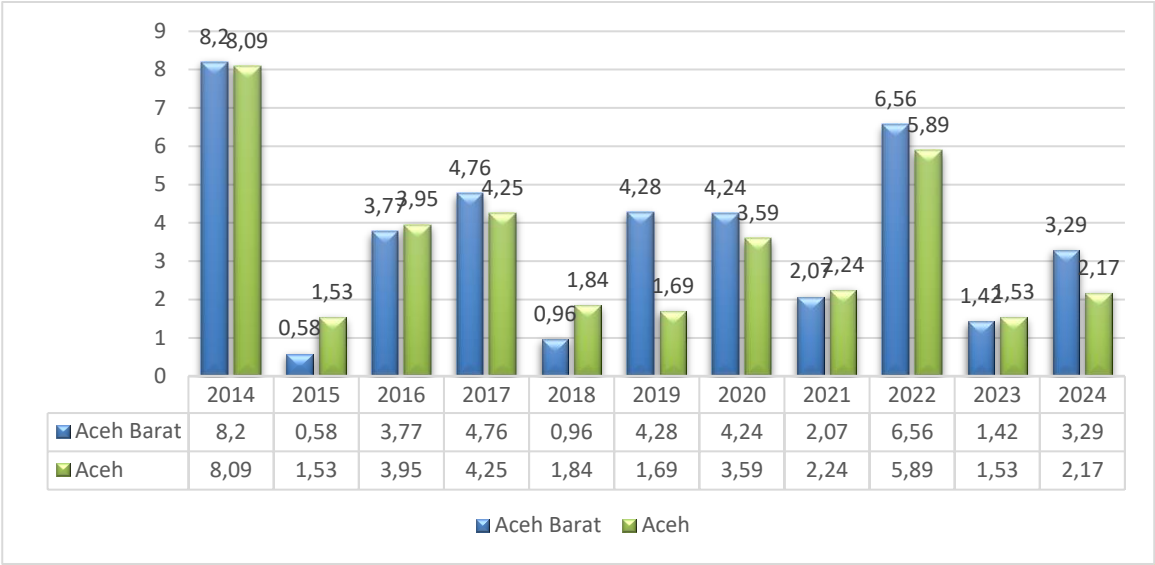
Pandemi covid-19 memang telah berkontribusi pada peningkatan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di level Nasional, Provinsi dan bahkan di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini dapat di amati dengan peningkatan indeks dari tahun 2019 sampai dengan 2021. Akan tetapi harus diingat bahwa jauh sebelum wabah covid-19 melanda Indonesia, Indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten berada di atas angka Indeks Nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa pengggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya membutuhkan effort yang lebih kuat agar orang-orang miskin yang kemiskinan mereka lebih dalam dan parah tersebut dapat diangkat keluar dari kubangan kemiskinan nya.



2.2.1.6 Laju Inflasi

Laju inflasi Kabupaten Nagan Raya mengacu kepada nilai inflasi yang terjadi di Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat). Inflasi yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir cenderung berfluktuasi dan kurang terkendali. Untuk melihat perkembangan laju inflasi Kabupaten Nagan Raya selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut ini.

Gambar 2.16
Perkembangan Inflasi
Kabupaten Nagan Raya tahun 2014-2022



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

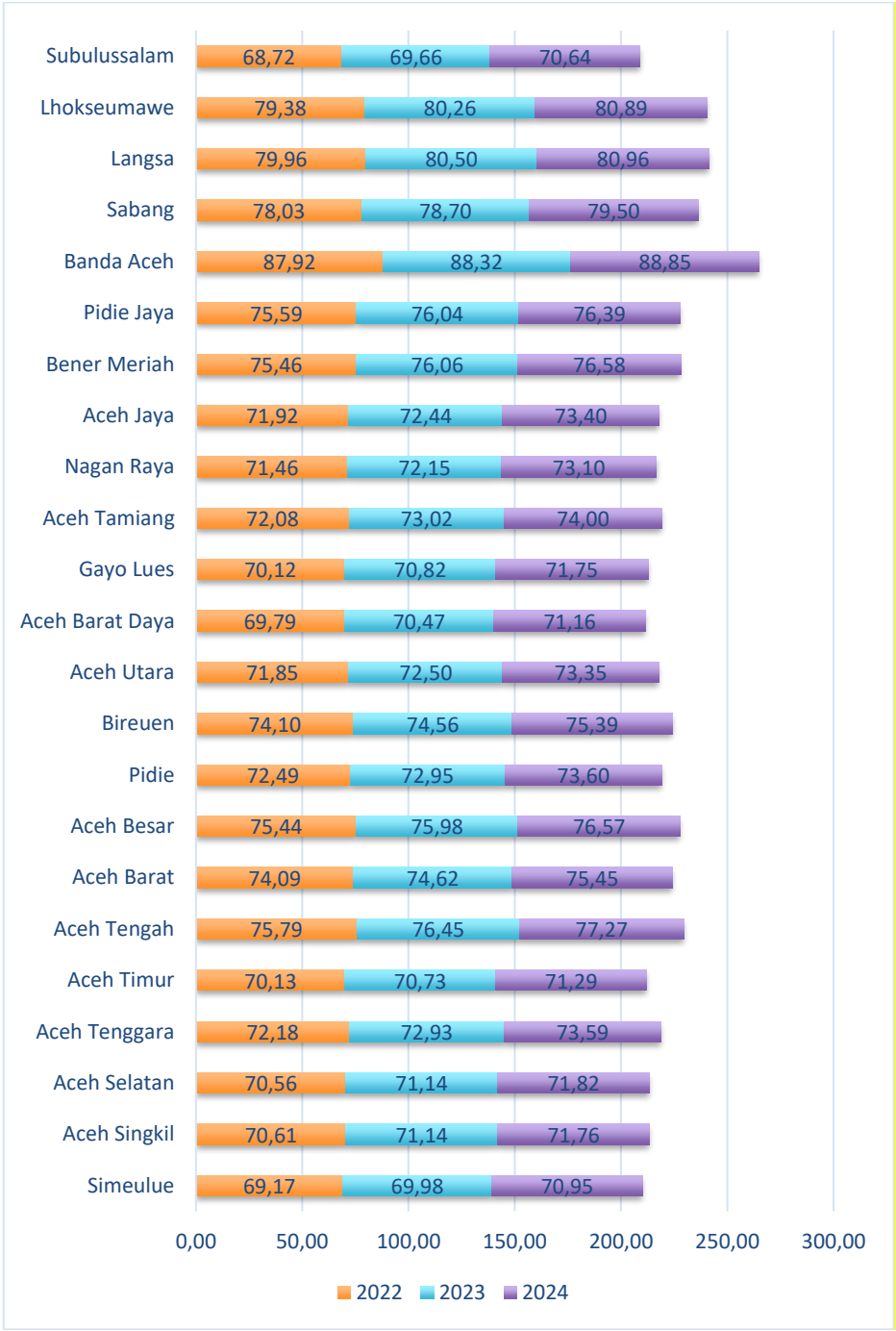
Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa tingkat inflasi di kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu tahun 2014-2024 cenderung kurang terkendali. Pada tahun 2014 tingkat inflasi di Kabupaten Nagan Raya 8,20 persen lebih tinggi dari inflasi Aceh yang hanya sekitar 8,09 persen, begitu juga pada tahun 2017, 2019 dan 2020 inflasi di Kabupaten Nagan Raya masih di atas 4 persen kemudian terjadi penurunan ditahun 2021 menjadi 2,07 persen. Pada tahun 2022 inflasi di Kabupaten Nagan Raya kembali meningkat menjadi 6,56 persen masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi Aceh. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui peningkatan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nagan Raya, pengadaan pasar murah, pemenuhan ketersediaan dan dsitribusi pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, perluasan akses informasi dan pemantauan lonjakan harga. Pada tahun 2024 inflasi di Kabupaten Nagan Raya kembali terjadi penurunan mencapai 3,29 persen.



2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya memiliki nilai IPM sebesar 73,10 masih jauh dari rata-rata IPM Provinsi Aceh dan Nasional. Untuk melihat posisi relatif IPM Kabupaten Nagan Raya satu tahun terakhir ini, kita dapat melihat informasi dalam gambar berikut ini.

Gambar 2.17
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024



Sumber: BPS Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya menempati posisi yang relatif rendah dalam capaian IPM dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh, dimana Kabupaten Nagan masih berada di bawah perolehan nilai IPM Kabupaten tetangga seperti Aceh Barat dengan nilai IPM sebesar 75,45, Aceh Jaya dengan nilai IPM sebesar 73,40. Namun posisi Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki nilai IPM hanya sebesar 71,16. Sebenarnya capaian nilai IPM Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami banyak perkembangan, tercatat pada awal masa RPJP tahun 2005 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya hanya sebesar 66,30 dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2024 telah mencapai 73,10.

Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dapat juga dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang berdekatan secara geografis yang dianggap memiliki banyak kesamaan sebagaimana terlihat pada informasi yang disajikan dalam tabel di bawah ini. Pada awal periode RPJP, Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya masih berada di bawah capaian semua Kabupaten tetangga. Namun seiring perkembangan waktu selama dua dekade terakhir capaian IPM Kabupaten Nagan Raya telah berada di atas capaian Kabupaten Aceh Barat Daya. Untuk informasi lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.18
Perkembangan Capain IPM Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Tetangga Tahun 2014-2024

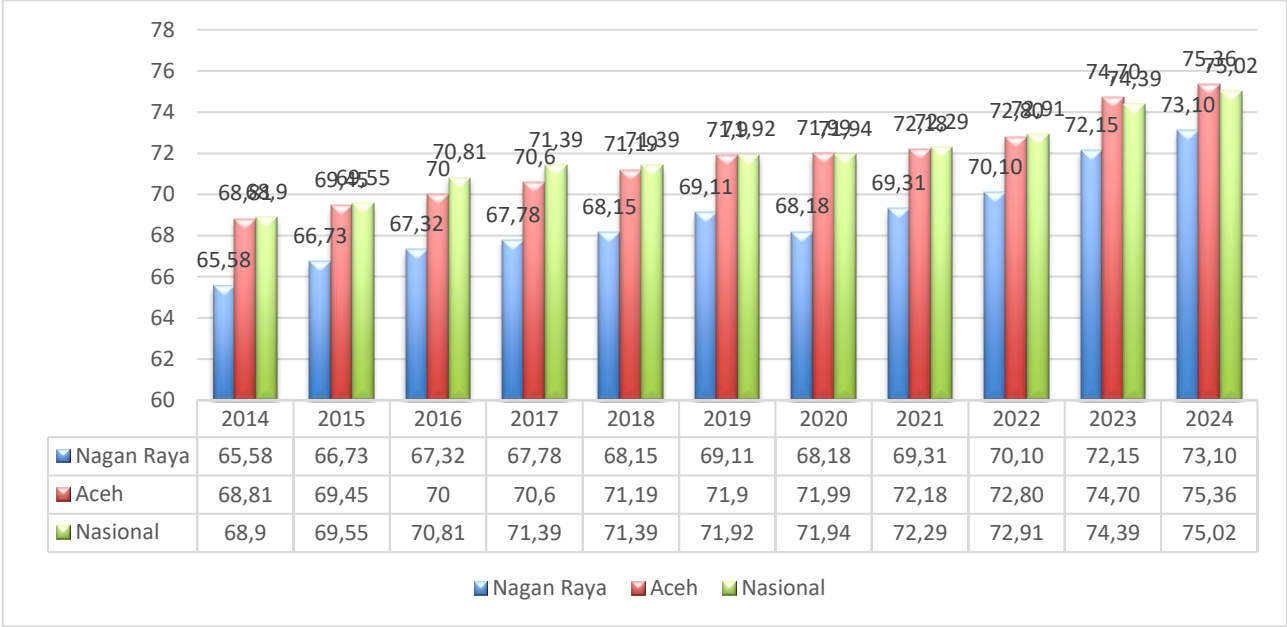
Nama Kabupaten	Kondisi Awal 2005	Perkembangan Capaian IPM										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nagan Raya	66,3	66,3	67,64	64,91	67,78	68,15	69,11	69,18	69,31	70,1	72.15	73.1
Aceh Barat	67,4	67,4	69,28	66,66	70,2	70,47	71,22	71,38	71,67	72,34	74.62	75.45
Aceh Barat Daya	66,9	66,9	68,37	62,15	65,09	65,67	66,56	66,75	66,99	67,41	70.47	71.16
Aceh Tengah	70,8	70,8	72,11	70,18	72,19	72,64	73,14	73,24	73,37	73,95	76.45	77.27

Sumber: BPS Aceh Tahun 2025

Selain itu, kita juga dapat melakukan analisis relevansi untuk membandingkan capaian Nilai IPM Kabupaten Nagan Raya dengan rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Jika kita amati gambar di bawah, terlihat bahwa selama dalam kurun waktu pelaksanaan RPJP 2005-2025 capaian IPM Kabupaten Nagan Raya secara konsisten berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 2.18
Perbandingan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya,
Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2024



Sumber: BPS Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa meskipun capaian IPM Kabupaten Nagan Raya ini berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional, namun laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nagan Raya lebih cepat dibandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional. Kondisi ini telah mendorong terjadinya konvergensi terhadap capaian IPM Kabupaten Nagan terhadap rata-rata Provinsi dan Nasional.

2.3. Aspek pelayanan Umum
2.3.1. Fokus Layanan Urusan Keistimewaan Aceh
2.3.1.1. Penyelenggaraan Syariat Islam dan Ibadah

Pelaksanaan Syari’at Islam diatur dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Adapun aspek-aspek pelaksanaan Syariat Islam adalah seperti terdapat dalam Peraturan Daerah Istimewa Aceh nomor 5 tahun 2000 tentang pelaksanaan Syariat Islam, Bab IV pasal 2 yaitu Aqidah, Ibadah, Muamalah, Akhlak, Pendidikan dan Dakwah Islamiyah/amar makrufnahi munkar, Baitulmal, Kemasyarakatan, Syiar Islam, Pembelaan Islam, Qadha, Jinayat, Munakahat, dan Mawaris. Dasar hukum dan pengakuan Pemerintah untuk pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh, didasarkan atas UU Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18



tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Sesuai dengan Dokumen Perencanaan pembangunan daerah Indikator pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya diantaranya Penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam, Jumlah kader ulama yang mendapatkan pelatihan, Persentase Dayah yang memenuhi standarisasi, Jumlah ZIS yang terkumpul dan Jumlah ZIS yang disalurkan. Indikator tersebut diatas telah dilaksanakan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, khusus untuk indikator Jumlah ZIS yang terkumpul dan jumlah ZIS yang disalurkan merupakan tugas daripada Baitulmal Kabupaten Nagan Raya.

A. Kasus Pelanggaran Syariat Islam

Pelanggaran Syariat Islam yang dominan yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya yaitu kasus khalwat dan kasus maisir. Dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 terjadi sebanyak 21 kasus khalwat (21 pasangan) dan 70 orang yang terlibat kasus maisir, sedangkan untuk kasus khamar tidak tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya kasus serupa pada masa yang akan datang. Data kasus pelanggaran syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.19
Kasus Pelanggaran Syariat Islam
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2024

NO	TAHUN	KHALWAT	KHAMAR	MAISIR
1.	*2018	3 Pasangan	-	4 Orang
2.	2019	2 Pasangan	-	13 Orang
3.	2020	3 Pasangan	-	24 Orang
4.	2021	10 Pasangan	-	6 Orang
5.	2022	-	-	3 Orang
6.	2023	1 Pasangan	-	-
7.	2024	2 Pasangan	-	20 Orang

Sumber : *data awal 2018, Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya,
Tahun 2025

Penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2014 sampai tahun 2024 berfluktuatif, pada tahun 2024 penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam mencapai 80 persen, untuk lebih jelasnya hal ini dapat dilihat pada Tabel berikut :



Tabel 2.20
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Syariat Islam
Tahun 2014-2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase penyelesaian kasus pelanggaran syariat Islam	40	42	50	51	40	40	70	80	NA	80	80

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Penyelesain kasus pelanggaran Syariat Islam pada tahun 2024 mencapai 80 persen menunjukkan kinerja Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya yang sangat baik, sesuai target RPK Nagan Raya Tahun 2023-2026 pada Tahun 2025 ditargetkan penyelesaian kasus pelanggaran Syariat Islam sebesar 81 persen, penetapan target capaian kinerja yang demikian telah mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang lainnya yang masih terbatas. Pelanggaran Syariat Islam yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya adalah pelanggaran hukum jinayat atau hukum pidana Islam. Beberapa pelanggaran yang diatur menurut hukum pidana Islam meliputi produksi, distribusi dan konsumsi minuman beralkohol, perjudian, perzinahan, bermesraan diluar hubungan nikah, dan seks sesama jenis. Setiap pelaku pelanggaran yang ditindak berdasarkan hukum ini diganjar hukuman cambuk, denda atau kurungan.

B. Penyelenggaraan Ibadah

Hampir 98 persen penduduk Kabupaten Nagan Raya memeluk Agama Islam, sisanya beragama Kristen dan Budha. Pelaksanaan ibadah secara umum berjalan dengan baik, ditandai dengan terlaksanya shalat fardhu di masjid, meunasah maupun mushalla. Demikian juga dengan pelaksanaan Ibadah Puasa pada Bulan Ramadhan, pelunasan zakat baik zakat fitrah maupun zakat mal, serta pelaksanaan ibadah Haji bagi yang mampu. Namun demikian, khusus untuk pelaksanaan Shalat Fardhu terdapat kondisi yang masih perlu ditingkatkan dimana pelaksanaan Shlat lima waktu secara berjamaah hanya terlaksana di Masjid Kabupaten dan Masjid Kecamatan, serta beberapa Masjid Gampong. Sejumlah Masjid Gampong lainnya hanya melaksanakan shalat berjamaah untuk waktu-waktu tertentu saja, sehingga antusiasme untuk melaksanakan ibadah shalat secara berjamaah yang merupakan cerminan dari masyarakat islami tidak terlihat (secara umum jumlah jamaah shalat lima waktu tidak sebanding dengan jumlah penduduk).



C. Jumlah Kader Ulama Yang Mendapatkan Pelatihan

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Syariat Islam telah melaksanakan kegiatan Pelatihan terhadap Kader ulama, tahun 2014 dengan jumlah peserta sebanyak 144 orang dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2021 sebanyak 210 orang, namun untuk tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan yaitu sebanyak 85 Orang untuk masing-masing tahun, hal ini dikarenakan ada beberapa kendala yang terjadi, salah satunya karena covid 19. Untuk lebih rincinya bisa dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.21
Jumlah Kader Ulama yang Mendapatkan Pelatihan
Tahun 2014-2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kader ulama yang mendapatkan pelatihan	144	150	155	158	160	164	200	210	NA	85	85

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Bila dibandingkan dengan jumlah gampong di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 222 gampong, jumlah kader ulama yang telah mendapatkan pelatihan yang dilakukan sudah memadai. Sesuai kemajuan teknologi dan perkembangan zaman saat ini diperlukan ulama yang berwawasan kemasa depan menghadapi masyarakat yang makin terbuka dan maju, berkepribadian, independen dan menjadi panutan masyarakat. Oleh karena itu Pelatihan terhadap Kader ulama merupakan salah satu indikator kinerja pemerintah untuk menjawab kebutuhan ulama saat ini dan masa yang akan datang.

D. Dayah Yang Memenuhi Standarisasi

Untuk meningkatkan kulalitas dayah dalam berbagai aspek, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berusaha untuk meningkatkan jumlah dayah yang berstandar dan terakreditasi. Pelaksanaan akreditasi dayah dilakukan oleh Majelis Akreditasi Dayah yang dibentuk oleh Gubernur Aceh pada Tahun 2021 yang bertugas memimpin pelaksanan akreditasi dayah, menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengembangan sistem akreditasi dayah serta menetapkan prosedur, mekanisme dan tahapan pelaksanaan akreditasi dayah.



Tabel 2.22
Tipe Dayah dalam Wilayah Kabupaten Nagan Raya

NO	NAMA DAYAH	KECAMATAN	TIPE DAYAH
1	Nurul Fata	Darul Makmur	B
2	Hidayatul Mustafid	Darul Makmur	B
3	Nurul Ikhwah	Kuala Pesisir	B
4	Istiqamatul Khairat	Kuala Pesisir	C
5	Nahrul Ulum Diniyah Islamiyah (NUDI)	Beutong	C
6	Nurul Jannah Al Aziziyah	Darul Makmur	C
7	Bustanul Jannah	Kuala	C
8	Babul Hidayatil Muslim (BHM)	Suka Makmue	C
9	Daruss'adah	Seunagan	C
10	Babul Fata	Darul Makmur	D
11	Yayasan Dayah Pesantren Darul Hikmah	Darul Makmur	Non Tipe
12	Babul Muarif	Darul Makmur	Non Tipe
13	Hidayatul Fata	Darul Makmur	Non Tipe
14	Al-Munawar Hidayatullah	Darul Makmur	Non Tipe
15	Babul Ilmi	Darul Makmur	Non Tipe
16	Darul Hikmah	Darul Makmur	Non Tipe
17	Tgk. Chik Kali Alue	Beutong Ateuh Banggalang	Non Tipe
18	Babul Ilmi	Beutong	Non Tipe
19	Pesantren Tgk. Chik Abdul Qahar	Beutong	Non Tipe
20	Syarif Shalihiyah	Beutong	Non Tipe
21	Dayah Ma'hadul Ulum Islami	Seunagan Timur	Non Tipe
22	Misbahul Jannah	Seunagan Timur	Non Tipe
23	Nur Darissalam	Seunagan Timur	Non Tipe
24	Babul Khairat	Seunagan Timur	Non Tipe
25	Bustanul Jannah	Seunagan Timur	Non Tipe
26	Babub Najah	Seunagan Timur	Non Tipe
27	Darul Mauta'alimin	Seunagan	Non Tipe
28	Misbahul arsyi	Seunagan	Non Tipe
29	Miftahul Abidin	Seunagan	Non Tipe
30	Bustanul Arifin	Seunagan	Non Tipe
31	Safinatussalamah	Suka Makmue	Non Tipe
32	Yayasan Safinatun Naja	Kuala	Non Tipe
33	Miftahul Ulum	Tadu Raya	Non Tipe
34	Yayasan Pesantren Raudhatul Ulum	Tadu Raya	Non Tipe
35	Baitul Mukminin	Tadu Raya	Non Tipe
36	Raudhatul Sibyan	Tripa Makmur	Non Tipe
37	Darul Istiqamah	Tripa Makmur	Non Tipe
38	Nurul Huda Ilham	Tripa Makmur	Non Tipe

Sumber : Dinas Syariat Islam Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

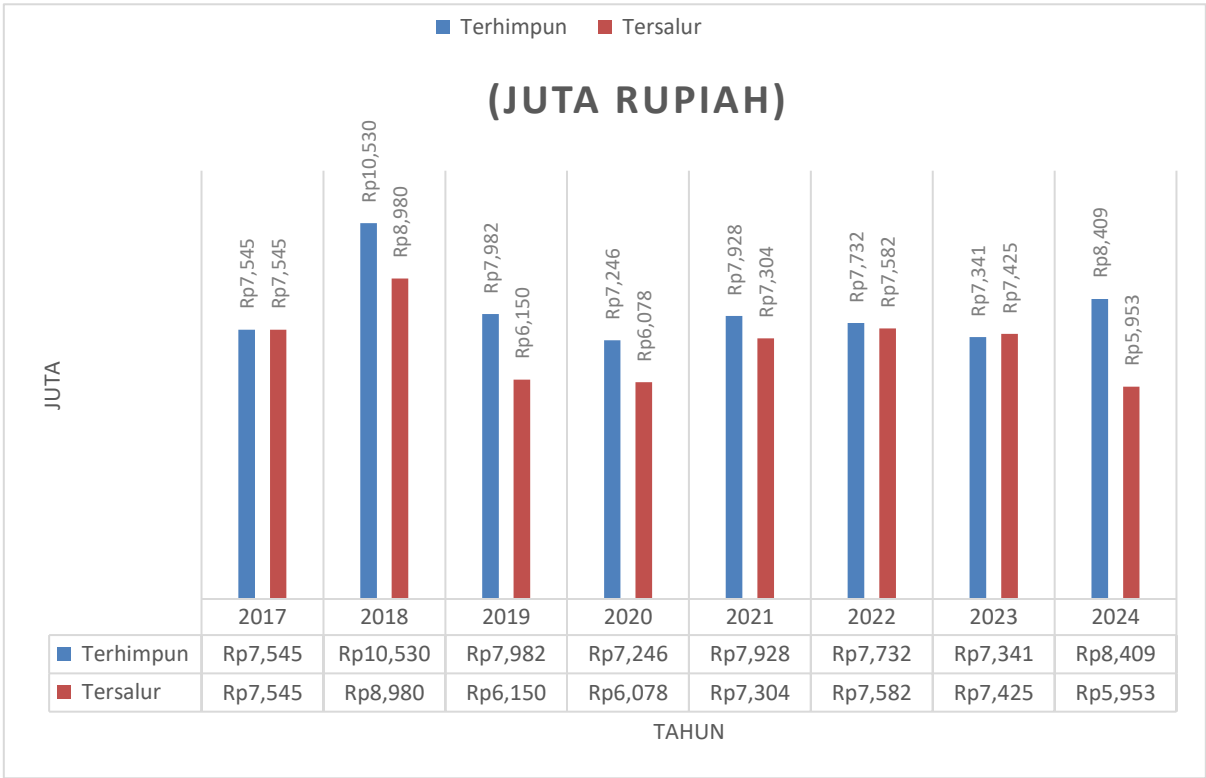


E. Jumlah ZIS yang Dikelola

Pengelolaan distribusi zakat yang diterapkan di Nagan Raya saat ini masih bersifat konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat langsung diberikan pada mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mungkin hanya cukup untuk beberapa hari saja dan bantuan pembangunan perumahan untuk kaum duafa. Sedangkan pendistribusian secara produktif belum dilakukan, pendistribusian secara produktif ini artinya bahwa zakat yang disalurkan oleh amil zakat itu tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para mustahiq, pendistribusian zakat dengan model ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya bisa dari pengelola zakat maupun dari para mustahiq hasil yang diperoleh dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi oleh para mustahiq.

ZIS yang terhimpun pada Baitulmal Nagan Raya Tahun 2017 sebesar Rp.7.545 (juta), selanjutnya berfluktuatif tiap tahunnya hingga tahun 2024 menjadi sebesar Rp. 8.409 (juta) pada tahun 2024. Jumlah ZIS yang terhimpun pada Baitulmal Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 – 2024 dapat di lihat pada gambar berikut:

Gambar 2.19
Jumlah ZIS yang Terhimpun dan yang Tersalurkan
Tahun 2017-2024



Sumber : Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib
2.3.2.1. Layanan Urusan Wajib Dasar
2.3.2.1.1 Pendidikan

A. Pendidikan yang Ditamatkan

Tingkat pendidikan yang ditamatkan seseorang dapat diukur berdasarkan jenjang pendidikan yang sudah ditempuh, seperti SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Penduduk 15 tahun ke atas menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2024 di Kabupaten Nagan Raya dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.23
Pendidikan Yang Ditamatkan Penduduk
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	Bekerja	pengangguran	Jumlah angkatan kerja	Persentase bekerja terhadap angkatan kerja
Tamat SD Dan belum pernah sekolah atau tidak tamat SD	24.480	166	24646	99
SMP	15.507	280	15.787	98
SMA umum	29.580	2584	32.164	92
SMA kejuruan	632	0	632	100
Diploma I/II/III	2.450	113	2.563	96
Universitas	7.935	1293	9.228	86

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya 2025

B. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Perkembangan APK pada pendidikan dasar di Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional pada rentang waktu 2014 - 2024 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah. APK jenjang pendidikan SD di Kabupaten Nagan Raya Pada tahun 2024 sebesar 102,15, Hal ini menandakan bahwa terdapat penduduk yang sekolah pada jenjang pendidikan SD yang belum cukup umur atau melebihi umur yang seharusnya. Dikarenakan nilai APK tidak memperhatikan ketepatan usia sekolah pada jenjang pendidikannya. Angka partisipasi kasar sekolah SD/MI setiap tahun menunjukkan angka di atas 100%. Begitupun dengan Provinsi Aceh dan Nasional, hanya di tahun 2022 untuk provinsi Aceh yang Angka partisipasi kasar sekolah SD/MI nya di bawah 100 % yaitu 99.66 %. Angka partisipasi kasar bisa mencapai lebih dari 100% menunjukkan bahwa jumlah murid pada jenjang



SD/MI dan jenjang SMP/MTs lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI dan penduduk usia SMP/MTs. Hal tersebut dapat terjadi, antara lain karena adanya penduduk usia prasekolah SD sudah menjadi murid SD karena masih terdapat daya tampung sekolah; adanya penduduk usia di atas 12 tahun yang masih bersekolah jenjang SD/MI karena terlambat masuk SD/MI atau karena pernah tinggal kelas; serta adanya murid bukan penduduk Kabupaten Nagan Raya yang bersekolah di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI
Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan NASIONAL Tahun 2014-2024

TAHUN	NAGAN RAYA	ACEH	NASIONAL
2014	105.64	111.66	108.87
2015	110.00	113.36	110.5
2016	109.91	104.40	109.31
2017	104.50	104.40	108.5
2018	105.10	104.60	108.61
2019	104.27	109.39	107.46
2020	104.71	103.51	106.32
2021	104.87	100.46	106.2
2022	103.74	99.66	106.27
2023	104.71	100.32	105.28
2024	102.15	108.57	104.79

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Pada tingkat SLTP/ sederajat, APK Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 adalah sebesar 105.85 %, angka ini masih di bawah Provinsi Aceh yaitu sebesar 95,87 % dan Nasional sebesar 88,43 %. Pada tahun 2024 APK Kabupaten Nagan Raya sebesar 104,39 %, angka ini juga masih di bawah Provinsi Aceh yaitu sebesar 94,30 % dan Nasional sebesar 90,67 %. APK SLTP/ sederajat di Kabupaten Nagan Raya besar disebabkan banyaknya anak SLTP/ sederajat yang bersekolah keluar dari Kabupaten Nagan Raya, tetapi tetap tercatat sebagai penduduk Nagan Raya usia SLTP. Angka Partisipasi Kasar SMP/ Sederajat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat diliohat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nagan Raya	105.85	103	107.35	107.9	105	104.17	104.95	104.87	108.53	107.29	104.39
2	Aceh	95.87	97.88	99.15	104.1	103.7	102.11	102.75	102.81	109.61	108.52	94.30
3	Nasional	88.43	91.17	90.12	82.84	91.52	90.57	92.06	92.8	92.11	91.25	90.67

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Selanjutnya Perkembangan APK tingkat SLTA/Sederajat selama 2014 – 2024 berkisar antara 93,55% – 101,77 %. Pada tahun 2024 tingkat SLTA/ sederajat, APK Kabupaten Nagan Raya mencapai 101,77%. angka ini juga masih di bawah Provinsi Aceh yaitu sebesar 96,60 % dan Nasional sebesar 84,40 %. Angka Partisipasi Kasar SLTA/Sederajat Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.26
Angka Partisipasi Kasar SMA/MA di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 – 2024

No	Tahun	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nagan Raya	93.55	89.00	85.48	91.40	92.40	92.83	95.49	93.88	100.15	98.15	101.77
2	Aceh	81.53	83.33	87.47	86.00	89.10	89.17	90.21	92.87	94.11	95.35	96.60
3	Nasional	73.95	78.02	80.89	90.23	80.68	83.89	84.53	85.23	85.49	81.68	84.40

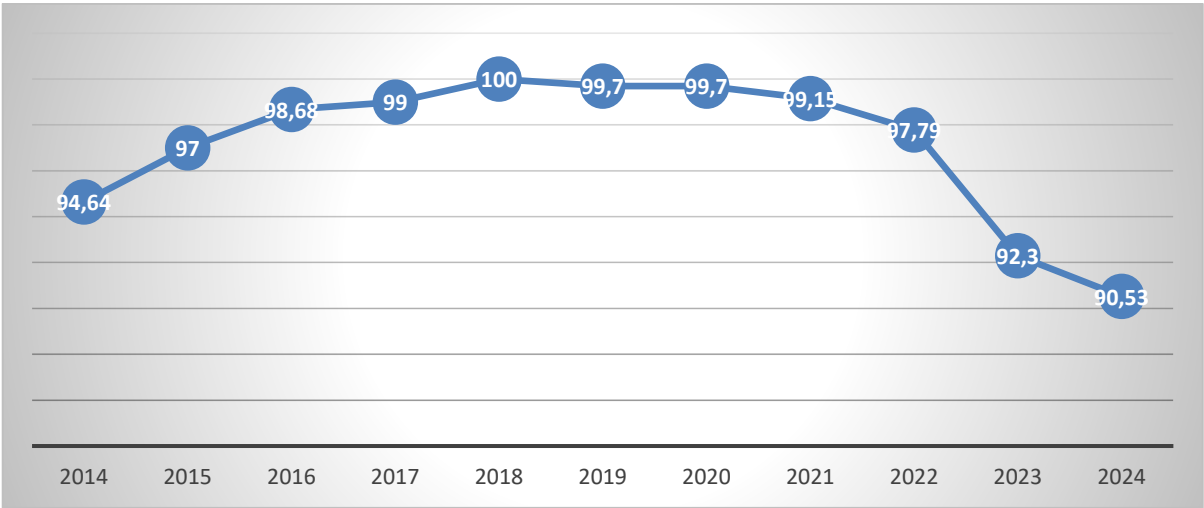
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



C. Angka Partisipasi Murni (APM)

APM Jenjang SD/MI Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu tahun 2014 – 2024 berkisar antara 90 persen sampai dengan 100 persen. Dalam 5 tahun terakhir (2020-2024) APM Jenjang SD/MI cenderung menurun dari 99,7 persen menjadi 90,53 persen . Angka partisipasi murni jenjang SD/MI sempat menyentuh angka 100% pada tahun 2018, angka itu menunjukkan bahwa kapasitas atau daya tampung sekolah SD di Kabupaten Nagan Raya telah dapat mencukupi kebutuhan. Selain itu, angka tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia SD/MI yang bersekolah lebih banyak daripada jumlah penduduk usia SD/MI. Angka APM kurang dari 100%, berarti terdapat anak usia SD yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Nagan Raya atau ada anak usia SD yang tidak bersekolah. Anak usia SD yang tidak bersekolah bisa dimungkinkan karena: anak yang difabel, yang tidak bisa sekolah melalui sekolah formal; anak usia sekolah bersekolahnya dengan cara, anak *drop out* sekolah.

Gambar 2.20
APM Jenjang SD/MI Kabupaten Nagan Raya Selama Kurun Waktu
Tahun 2014 – 2024

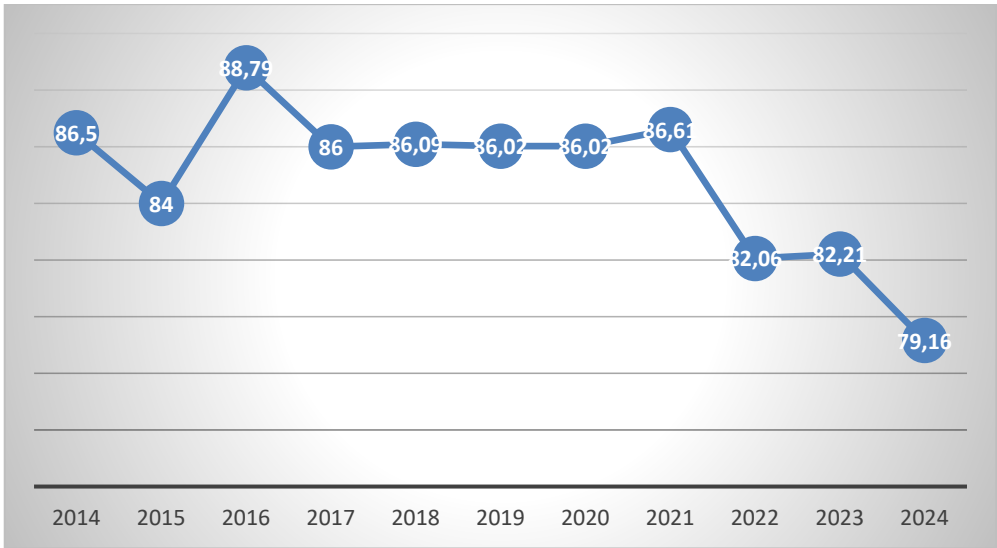


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Selama kurun waktu tahun 2014-2024, APM SMP/MTs Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 79,16 persen sampai dengan 88,79 persen. APM SMP/MTs tidak setinggi angka APM SD/MI dan belum mencapai 100% dikarenakan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Nagan raya dan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang menempuh pendidikan menengah atau tidak melanjutkan sekolah. Angka partisipasi murni kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 sebesar (79,16%). Turunnya APM SMP/MTs bisa disebabkan karena adanya anak yang putus sekolah, sekolah di luar wilayah Nagan Raya tetapi tetap tercatat sebagai penduduk Kabupaten Nagan Raya atau bertambahnya usia penduduk usia penduduk usia 13-15 tahun.

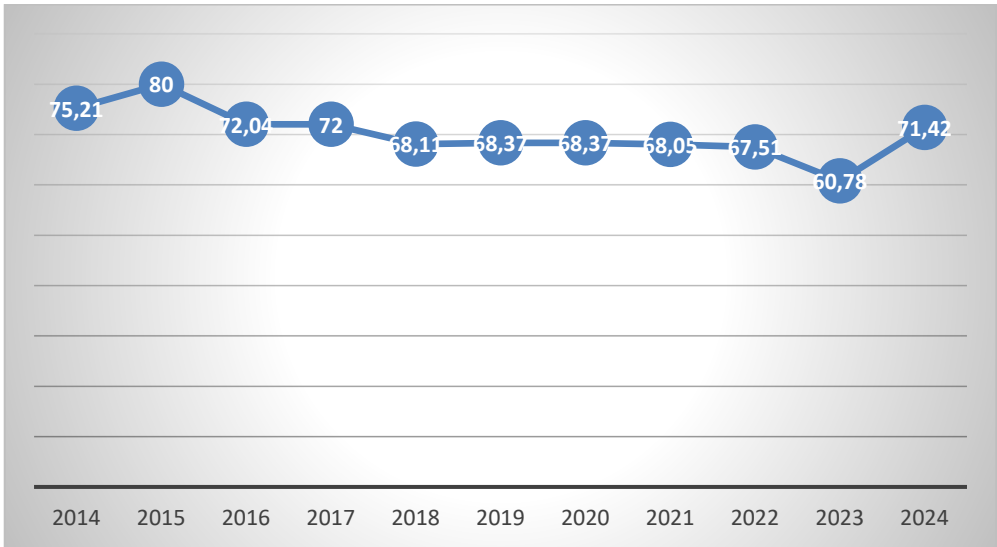


Gambar 2.21
Angka Partisipasi Murni SMP/MTsN
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Gambar 2.22
Angka Partisipasi Murni SMA/MA
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Selama kurun waktu tahun 2014-2024, APM SMA/MA Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 60,78 persen sampai dengan 80 persen. Pada Tahun 2024 APM SMA/MA Kabupaten Nagan Raya sebesar 71.42 persen. APM SMA/MA tidak setinggi angka APM SD/MI dan belum mencapai 100% dikarenakan terdapat penduduk usia SMA yang bersekolah di luar wilayah Kabupaten Nagan raya dan terdapat penduduk usia SMP/MTs yang menempuh pendidikan menengah atau tidak melanjutkan sekolah.

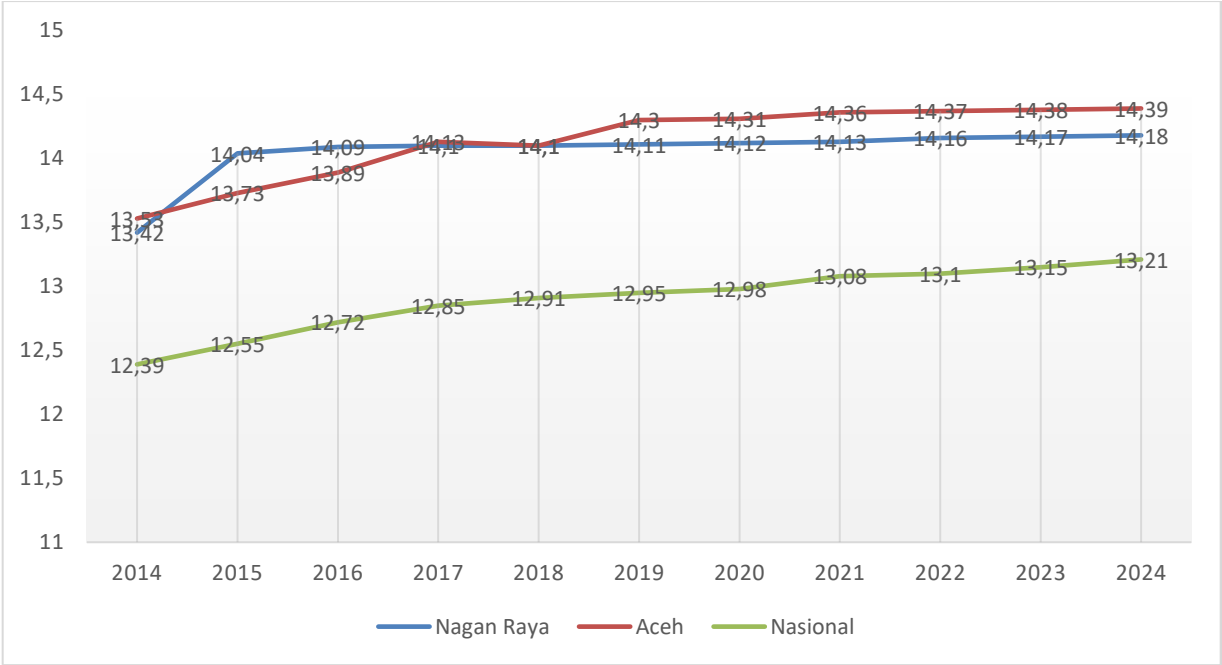


D. Harapan Lama Sekolah

Salah satu tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tujuan keempat adalah menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua. Pada target 4b, dinyatakan bahwa memastikan semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang setara, perawatan, dan pendidikan anak usia dini sehingga mereka siap untuk Pendidikan dasar. Pada target ini, diharapkan angka kelulusan baik SD, SMP, maupun SMA ditingkatkan. Secara langsung, ketika target ini dicapai maka angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang merupakan dua indikator penghitungan IPM akan ikut meningkat.

HLS merupakan salah satu output yang dapat digunakan untuk memotret pemerataan pembangunan pendidikan di Indonesia. Karena HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t.

Gambar 2.23
Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024



Sumber:
BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025
BPS Aceh, Tahun 2025
Statistik Indonesia 2025

Badan Pusat Statistik menyatakan angka harapan lama sekolah (HLS) adalah sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Pentingnya angka harapan lama sekolah untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan diberbagai jenjang yang ditujukan dalam bentuk lamanya pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Angka harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun keatas.

HLS Kabupaten Nagan Raya selama rentang waktu tahun 2014 - 2024 berkisar antara 13,22 – 14,18 tahun, dengan rata-rata kenaikan kurang dari 0,1 tahun per tahunnya. HLS Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas Nasional namun masih berada di bawah HLS Provinsi Aceh. HLS Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 sebesar 14,17 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,17 tahun atau setara dengan Diploma II. Jika dibandingkan dengan tahun 2014 HLS penduduk Kabupaten Nagan Raya pada 2024 mengalami peningkatan 0,95 tahun. Beberapa kebijakan untuk meningkatkan HLS yaitu (a) pemerataan kuantitas tenaga pendidik, (b) beasiswa kurang mampu, (c) rehabilitasi ruang kelas.

E. Rata-Rata Lama Sekolah

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, Kesehatan dan perbaikan gizi. Salah satu konsep pembangunan manusia pengembangan pengetahuan penduduk melalui peningkatan angka rata- rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata- rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih mencerminkan kondisi sebenarnya, mengingat penduduk yang berusia kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah sehingga belum pantas untuk diperhitungkan rata-rata lama sekolahnya. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :



Tabel 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

TAHUN	NAGAN RAYA	ACEH	NASIONAL
2014	7,93	8,77	7,73
2015	8,22	8,86	7,84
2016	8,24	8,98	7,95
2017	8,25	9,09	8,1
2018	8,26	9,09	8,17
2019	8,5	9,18	8,34
2020	8,68	9,33	8,48
2021	8,69	9,37	8,54
2022	8,95	9,44	8,69
2023	8,96	9,55	9,13
2024	9,25	9,64	9,22

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2025

Rata-rata lama sekolah Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014 di angka 7,93 tahun, nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh sebesar 8,77 tahun, tetapi lebih tinggi dibandingkan Rata-rata Lama Sekolah secara nasional, yakni 7,73 tahun. Pada Tahun 2024 Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya 9,25 lebih rendah dari Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Aceh sebesar 9,64 namun sedikit lebih tinggi dari Angka Rata-rata Lama Sekolah Nasional sebesar 9,22.

RLS dipengaruhi tingkat kemiskinan, beban ketergantungan dan tempat tinggal. Tingkat kemiskinan menunjukkan perbandingan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan dan dinyatakan dalam persentase. Beban ketergantungan adalah perbandingan penduduk yang berusia tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 64 tahun) terhadap penduduk yang berusia produktif (antara 15 – 64 tahun) di Kabupaten Nagan Raya dan dinyatakan dalam satuan orang. Sedangkan tempat tinggal berarti seberapa jauh jarak tempuh dari rumah ke sekolah dan begitu sebaliknya. RLS juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Indonesia.



2.3.2.1.2 Kesehatan

A. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah bayi yang meninggal sebelum mencapai usia tepat 1 tahun yang dinyatakan per 1000 kelahiran hidup. AKB digunakan untuk mencerminkan tingkat pembangunan kesehatan dari suatu negara serta kualitas hidup dari masyarakat.

Tabel 2.28
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 Tahun)	33	27	17	33	39	22	52	52	20	15	39
2	Jumlah Kelahiran Hidup	3.060	3.065	3.011	2.926	3.088	3.021	2.828	2.734	2.714	2.693	2.586
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup		10,78	8,81	5,65	11,28	12,63	7,28	18,39	19,02	7,37	5,57	15,08

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Data kematian bayi per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel diatas, pada tahun 2014 angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup sebesar 10,78 dan terus mengalami penurunan secara fluktuatif sampai dengan tahun 2016 dan pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan menjadi 11,28 dan 12,63. Terjadinya peningkatan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2020 dan 2021 diduga ada kaitnya dengan kasus Covid 19 , pada tahun tersebut merupakan puncak terjadi wabah Covid 19 dan pada tahun 2022 terjadi lagi penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup yaitu hanya sebesar 7,37. Pada Tahun 2024 kembali terjadi kenaikan menjadi 15,08.

B. Angka Kematian Neonatal (AKN)

Angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 cukup fluktuatif, pada 2014 angka kematian neonatal sebesar 16,34 jiwa dan pada tahun 2023 angka kematian neonatal mencapai sebesar 18,57 jiwa, ini merupakan angka kematian neonatal tertinggi dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir. Terjadinya peningkatan angka kematian neonatal dalam kurun waktu lima tahun terakhir



mengindikasikan adanya permasalahan dalam pelayanan pasca bersalin di Kabupaten Nagan Raya, untuk itu perlu dilakukan peningkatan pelayanan pasca bersalin baik terhadap bayi maupun terhadap ibu, dan mencari tahu penyebab lainnya yang mengakibatkan terus meningkatnya angka kematian neonatal di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.29
Angka Kematian Neonatal per 1000 Kelahiran Hidup
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 bulan)	50	35	43	23	31	30	37	38	48	50	29
2	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3.060	3.065	3.011	2.947	3.121	2.256	2.828	2.734	2.714	2.693	2.586
Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup		16,34	11,42	14,28	7,80	9,93	13,30	13,08	13,90	17,68	18,57	11,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

C. Angka Kematian Ibu

Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 sampai dengan tahun 2024 mengalami mengalami fluktuasi, pada Tahun 2015 AKI Kabupaten Nagan Raya sebesar 97,88 per 100.000 kelahiran hidup dan pada Tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 77,34 per 100.000 kelahiran hidup, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup	NA	97,88	132,85	NA	31,9	227,57	106,08	329,19	147,31	110,58	77,34

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



D. Tuberkulosis (TBC)

TBC adalah singkatan dari Tuberkulosis, yaitu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh bakteri *Mycobacterium tuberculosis*. Penyakit ini paling sering menyerang paru-paru, tetapi juga dapat menyerang organ lain seperti tulang, ginjal, otak, dan kelenjar getah bening. TBC menular melalui udara, terutama ketika penderita batuk, bersin, atau berbicara, sehingga orang di sekitarnya dapat menghirup bakteri tersebut. Gejala umum TBC antara lain batuk terus-menerus selama lebih dari dua minggu, batuk berdahak (kadang bercampur darah), demam yang biasanya terjadi di malam hari, berat badan menurun, keringat dingin, lemas, dan nafsu makan berkurang.

Meskipun merupakan penyakit yang serius, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pengobatan TBC biasanya berlangsung selama minimal enam bulan dan menggunakan kombinasi antibiotik khusus. Di banyak negara, termasuk Indonesia, pengobatan TBC disediakan secara gratis oleh pemerintah. Pencegahan penularan TBC dapat dilakukan dengan cara menutup mulut saat batuk, menjaga kebersihan lingkungan, serta memastikan penderita TBC mendapatkan pengobatan sampai tuntas. Berikut jumlah kasus TBC di kabupaten Nagan Raya

Tabel 2.31
Kasus TBC di Kabupaten Nagan Raya
tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kasus TBC	284	156	179	179	351	423

Sumber : *data awal 2019, Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2025

E. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Rasio dokter umum persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi yang sangat rendah yaitu berkisar pada angka 0.20 sampai dengan 0.50 per 1000 penduduk (sesuai standar WHO), artinya rasio dokter persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya hanya sedikit mengalami peningkatan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir, rendahnya peningkatan jumlah dokter persatuan penduduk menjadi tantangan bagi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di sektor kesehatan.



Tabel 2.32
Rasio Dokter Persatuan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 – 2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Dokter Spesialis	8	7	5	8	12	15	17	19	20	21	21
2	Jumlah Dokter Umum	47	62	37	53	47	52	59	40	90	53	81
3	Jumlah Dokter Spesialis Gigi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Jumlah Dokter Gigi	5	5	3	5	5	9	10	10	21	23	26
5	Jumlah Penduduk	149.596	155.070	158.223	161.328	164.483	167.294	168.392	168.392	171.047	173.151	176.461
6	Rasio Dokter Spesialis per satuan Penduduk	0.05	0.05	0.03	0.05	0.07	0.09	0.10	0.11	0.12	0.12	0.12
7	Rasio Dokter Umum per satuan Penduduk	0.31	0.40	0.23	0.33	0.29	0.31	0.35	0.24	0.53	0.31	0.46
8	Rasio Dokter Spesialis Gigi per satuan Penduduk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rasio Dokter Gigi per satuan Penduduk	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03	0.05	0.06	0.06	0.12	0.13	0.15

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



F. Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk

Rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah. Secara umum rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 mengalami peningkatan. Bila memperhatikan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat nomor 54 tahun 2013, tentang target rasio kebutuhan sumber daya manusia kesehatan tahun 2025 secara nasional, rasio tenaga kesehatan persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya telah memenuhi standar tersebut.

Tabel 2.33
Rasio Tenaga Kesehatan Persatuan Penduduk Tahun 2014 – 2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Perawat	310	328	160	165	169	163	172	239	570	563	614
2	Jumlah Bidan	404	435	213	298	309	372	406	503	763	764	792
3	Jumlah Perawat Gigi	12	12	23	9	9	14	14	16	34	41	54
4	Jumlah Teknis Kefarmasian	23	25	18	22	22	22	22	34	53	99	122
5	Jumlah Apoteker	6	6	7	3	2	8	9	16	27	24	27
6	Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat	49	76	38	39	37	34	34	92	148	157	165
7	Jumlah Kesehatan Lingkungan	9	16	13	5	9	10	11	16	30	37	44
8	Jumlah Nutrisisionis	22	18	20	24	24	17	17	23	47	51	54
9	Jumlah Dietisien	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Jumlah Fisioterapis	10	11	4	12	12	9	9	1	13	13	13
11	Jumlah Okupasi terapis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Jumlah Terapis Wicara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Jumlah Akupuntur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Jumlah Radiografer	7	7	3	3	3	3	3	0	12	16	16
15	Jumlah Radiotrapis	9	9	0	11	11	11	11	0	0	5	0
16	Jumlah Elektromedis	6	6	5	6	6	6	6	0	4	5	6
17	Jumlah Teknisi Gigi	8	8	0	18	18	13	13	0	12	6	3
18	Jumlah Analis Kesehatan	7	7	4	5	7	9	9	9	33	44	0



No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
19	Jumlah Rekam Medis dan Informasi Kesehatan	4	4	5	0	0	0	0	0	15	8	24
20	Jumlah penduduk	149.596	155.070	155.070	161.328	164.483	167.294	168.392	168.392	171.047	173.157	176.461
21	Rasio Perawat Per Satuan Penduduk	2.07	2.12	1.01	1.02	1.03	0.97	1.02	1.42	3.33	3.25	3.48
22	Rasio Bidan Per Satuan Penduduk	2.70	2.81	1.35	1.85	1.88	2.22	2.41	2.99	4.46	4.41	4.49
23	Rasio Perawat Gigi Per Satuan Penduduk	0.08	0.08	0.15	0.06	0.05	0.08	0.08	0.10	0.20	0.24	0.31
24	Rasio Teknis Kefarmasian Per Satuan Penduduk	0.15	0.16	0.11	0.14	0.13	0.13	0.13	0.20	0.31	0.57	0.69
25	Rasio Apoteker Per Satuan Penduduk	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	0.05	0.05	0.10	0.16	0.14	0.15
26	Rasio Tenaga Kesehatan Masyarakat Per Satuan Penduduk	0.33	0.49	0.24	0.24	0.22	0.20	0.20	0.55	0.87	0.91	0.94
27	Rasio Kesehatan Lingkungan Per Satuan Penduduk	0.06	0.10	0.08	0.03	0.05	0.06	0.07	0.10	0.18	0.21	0.25
28	Rasio Nutrisionis Per Satuan Penduduk	0.15	0.12	0.13	0.15	0.15	0.10	0.10	0.14	0.27	0.29	0.31
29	Rasio Fisioterapis Per Satuan Penduduk	0.07	0.07	0.03	0.07	0.07	0.05	0.05	0.01	0.08	0.08	0.07
30	Rasio Radiografer Per Satuan Penduduk	0.05	0.05	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.07	0.09	0.09
31	Rasio Elektromedis Per Satuan Penduduk	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.00	0.02	0.03	0.03
32	Rasio Analisis Kesehatan Per Satuan Penduduk	0.05	0.05	0.03	0.03	0.04	0.05	0.05	0.05	0.19	0.25	0.00
33	Rasio Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Per Satuan Penduduk	0.03	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	0.14

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



G. Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Di Tangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2017 masih rendah, yaitu berada pada angka dibawah 65 persen rendahnya cakupan komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan di Kabupaten Nagan Raya disebabkan karena masih rendahnya kesadaran ibu hamil untuk melakukan pemeriksaan kehamilan selama masa hamil yaitu sekurangnya 4 sampai dengan 6 kali selama masa hamil. Oleh karena itu perlu ditingkat kegiatan promosi kesehatan dan KIE untuk ibu hamil.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2020 terjadi peningkatan cakupan komplikasi kebidanan yang mendapatkan penanganan yaitu mencapai angka ideal 100 persen, selanjutnya turun kembali pada angka 42.79 persen pada tahun 2021 dan meningkat lagi pada tahun 2022 mencapai angka ideal 100 persen. Namun demikian pada Tahun 2024 kembali terjadi penurunan menjadi hanya 77,69 persen.

Tabel 2.34
Cakupan Komplikasi Kebidanan di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 – 2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan difinitif.	469	293	352	355	325	561	530	258	279	429	505
Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan	725	674	674	788	325	561	530	603	279	657	650
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	64.69	43.47	52.23	45.05	100	100	100	42.79	100	65,25	77,69

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

H. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Bila diperhatikan tabel dibawah ini, cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 sampai dengan 2024 berada pada angka di bawah 95 persen, angka ini sudah tergolong baik dan perlu peningkatan agar cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan berkompentesi kebidanan dapat mencapai angka diatas 96 - 100 persen.



Tabel 2.35
Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Tahun 2014 – 2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah ibu salin yang di tolong	2955	3047	2993	3528	3063	2977	2817	2731	2721	2713	2669
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	3456	3216	3216	3890	3516	3511	3541	3016	3128	3138	3179
Cakupan pertolongan persalinan	85.50	94.75	93.07	90.69	87.12	84.79	79.55	90.55	86.98	86,45	83,96

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

I. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan

Sesuai tabel dibawah kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 fluktuatif meningkat, pada tahun 2014 sebanyak 11 kasus dan terus mengalami penurunan menjadi 4 kasus pada tahun 2017, selanjutnya pada tahun 2018 dan 2019 meningkat kembali menjadi 16 dan 18 kasus. Pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan kembali, dan meningkat kembali pada tahun 2024 menjadi 75 kasus. Seluruh kasus balita gizi buruk yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2024 mendapat perawatan, naik dan turunnya kasus balita gizi buruk di Kabupaten Nagan Raya disebabkan oleh perilaku hidup sehat pada masyarakat masih rendah dan faktor keterbatasan dari segi ekonomi.

Tabel 2.36
Cakupan Kasus Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Balita Gizi Buruk Yang Mendapat Perawatan	11	12	9	4	16	18	5	10	23	65	75
Jumlah Seluruh Balita Gizi Buruk	11	12	9	4	16	18	5	10	23	65	75
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

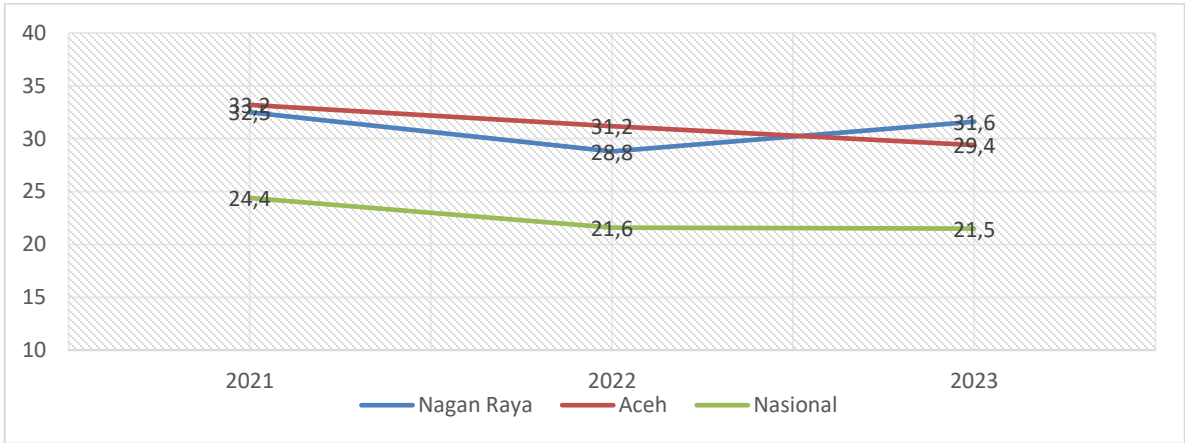
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

J. Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (sumber : Perpres 72 Tahun 2021). Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak, dengan dampak jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, hingga obesitas pada saat dewasa. Secara umum stunting disebabkan oleh banyak faktor diantaranya asupan gizi yang tidak seimbang, hal ini di pengaruhi oleh ketersediaan dan keterjangkauan pangan serta cara pengolahan pangan, Norma lingkungan bagaimana seharusnya memberikan makanan yang sehat terhadap anak, tempat kerja dan pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadi stunting. Selain itu lingkungan yang bersih dan sehat juga berpengaruh terhadap terjadi nya stunting seperti air minum dan sanitasi serta akses terhadap fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 prevalensi stunting Kabupaten Nagan Raya sebesar 32.5 persen dan mengalami penurunan menjadi 28.8 persen pada tahun 2022. Sementara itu prevalensi stunting Provinsi Aceh pada Tahun 2021 sebesar 33.2 persen mengalami penurunan menjadi 31.2 persen pada tahun 2022. Prevalensi Stunting nasional pada tahun 2021 sebesar 24.4 persen dan mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 21.6 persen. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 yaitu suatu survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI) yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan angka stunting Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar 31,6% lebih tinggi dari angka stunting Aceh yang hanya sebesar 29,4% dan lebih tinggi dari angka stunting Nasional sebesar 21,6%. Berikut Prevalensi Stunting Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 – 2023 (data tahun 2024 sampai Bulan Maret 2025, belum dirilis oleh Kementerian Kesehatan) sbb :

Gambar 2.24
Prevalensi Stunting Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional Tahun 2021-2023



Sumber : Kementerian Kesehatan, Tahun 2024

2.3.2.1.3 Pekerjaan Umum, Pengairan dan Penataan Ruang

A. Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Proporsi Panjang jalan dalam kondisi mantap mampu memberikan dampak yang luas terhadap kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas sosial, kemudahan akses terhadap sarana transportasi lainnya seperti bandara dan Pelabuhan maupun kemudahan akses terhadap sarana prasarana Pendidikan maupun Kesehatan yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Kesehatan, Pendidikan, terciptanya konektivitas wilayah serta pertumbuhan ekonomi masyarakat. Proporsi Panjang dalam kondisi mantap untuk jalan kabupaten disajikan pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.37
Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Nagan Raya
Dalam Kondisi Mantap Tahun 2014-2024

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Baik (Km)	Sedang (Km)	Rusak Ringan (Km)	Rusak Berat (Km)	Proporsi
2014	420.740	188.2	113.5	108.7	10.34	0.72
2015	924.421	224.99	173.01	186.14	340.28	0.43
2016	924.421	243.538	171.646	180.548	328.689	0.45
2017	924.421	92.212	59.611	53.459	719.139	0.16
2018	924.421	118.906	60.316	52.443	692.756	0.19
2019	924.421	274.609	409.037	213.183	27.592	0.74
2020	924.421	274.609	409.037	213.183	27.592	0.74
2021	924.421	586.103	11.46	10.99	315.868	0.65
2022	924.421	584.471	9.526	18.119	312.305	0.64
2023	924.421	498.498	9.026	15.773	401.124	0.54
2024	924.421	514.911	8.376	9.678	391.456	0.56

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Secara garis besar total proporsi Panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap sudah menunjukkan kinerja yang membanggakan walaupun belum memuaskan. proporsi jalan mantap sempat terjadi penurunan dari tahun 2015 sampai dengan 2018, kemudian terjadi kenaikan sampai dengan tahun 2020. Tetapi di tahun 2021 sampai dengan 2024 terjadi penurunan proporsi jalan mantap menjadi 0,56. Hal ini terjadi karena mulai tahun 2021 jalan dengan permukaan kerikil yang memiliki Panjang jalan yang dominan tidak boleh lagi masuk ke dalam kondisi jalan sedang, tetapi harus dianggap rusak berat, sehingga kondisi jalan rusak berat naik drastis. Begitu juga dengan jalan yang tidak tembus dianggap dalam kondisi baik.

B. Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap

Persentase jalan kabupaten dalam kondisi mantap hampir setiap tahun terus mengalami perubahan. Pada Tahun 2024 jalan dengan kondisi mantap adalah sebesar 56,60 % atau 507.524 Km dari Panjang total jalan 924,421 Km, meningkat dibandingkan pada tahun 2014 yaitu sebesar 35,85% atau 150,85 Km dari Panjang total 420,740 Km. Jalan Kondisi mantap diperlukan untuk meningkatkan aksesibilitas jalan dan transportasi serta adanya pergerakan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Tabel 2.38
Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap
Tahun 2014-2024

Tahun	Panjang Jalan (Km)	Kondisi				Mantap	
		Baik (Km)	% Baik	Sedang (Km)	% Sedang	Km	%
2014	420.740	188.20	44.73	113.50	26.98	150.85	35.85
2015	924.420	224.99	24.34	173.01	18.72	199.00	21.53
2016	924.421	243.54	26.34	171.65	18.57	207.59	22.46
2017	924.421	92.21	9.98	59.61	6.45	75.91	8.21
2018	924.421	118.91	12.86	60.32	6.52	89.61	9.69
2019	924.421	274.61	29.71	409.04	44.25	341.82	36.98
2020	924.421	274.61	29.71	409.04	44.25	341.82	36.98
2021	924.421	586.10	63.40	11.46	1.24	298.78	32.32
2022	924.421	584.47	63.23	9.53	1.03	297.00	32.13
2023	924,421	498.498	53.925	9.026	0.976	507.524	54.90
2024	924,421	514.911	55.701	8.376	0.906	523.287	56.60

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



C. Penataan Ruang

Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya secara umum terbagi ke dalam kawasan lindung, Kawasan budidaya, dan Kawasan laut. Berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035, luas Kawasan lindung sebesar 276.047,01 Ha (54,74%), Kawasan budidaya sebesar 176.063,17 Ha (34,91%) dan Kawasan Laut sebesar 52.207,92 Ha (10,35%). Luas pola ruang secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut

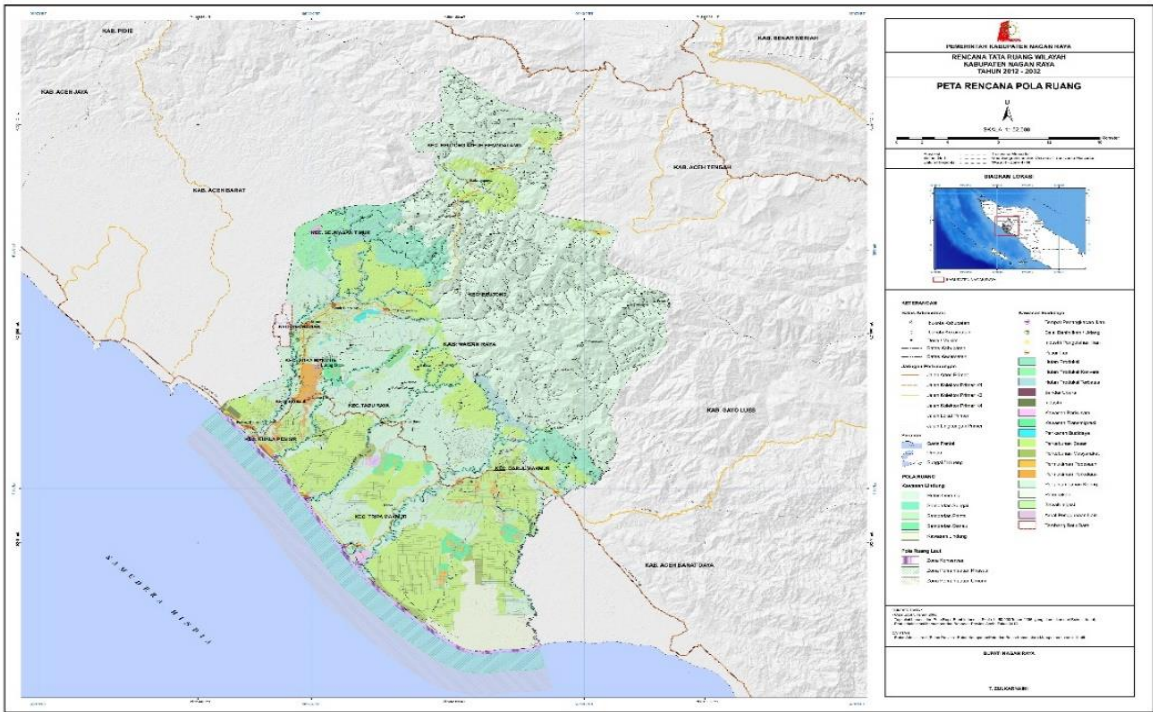
Tabel 2.39
Pola Ruang Berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2035

Kawasan Lindung	Luas (Ha)	Kawasan Budidaya	Luas (Ha)	Kawasan Laut	Luas (Ha)
Kawasan Lindung	129.108,96	Kawasan Hutan Produksi	22.985,851	Zona Konservasi	3.412,54
Kawasan Perlindungan Utk Kawasan Bawahannya (Kawasan Lindung Gambut)	11.380,71	Kawasan Pertanian	133.892,21	Zona Pemanfaatan Umum	48.795,38
Kawasan Perlindungan Setempat	9.615,44	Kawasan Perikanan	871.86	Zona Pemanfaatan Khusus	
Kawasan Rawan Bencana Alam	125.941,9	Kawasan Peruntukan Pertambangan	5.446,64		
Tanah Longsor	16.523,94	Kawasan Industri	762,29		
Gelombang Pasang	15.702,08	Kawasan Pariwisata	598,13		
Rawan Banjir	92.352,28	Kawasan Permukiman	11.506,19		
Rawan Kebakaran	1.363,6	Kawasan Peruntukan Lainnya			
	276.047,01		176.063,17		52.207,92

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Pola ruang yang diuraikan di dalam Tabel di atas Menjadi acuan dalam pemanfaatan ruang. Ketaatan terhadap tata ruang di evaluasi berdasarkan sejauh mana pelaksanaan penataan ruang dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya yang di ukur dengan membandingkan antara tahap kegiatan penyelenggaraan penataan ruang yang sudah dilakukan dengan penyelesaian kegiatan penyelenggaraan penataan ruang kabupaten Nagan Raya. Tujuan nya adalah untuk memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang sesuai struktur dan pola ruang. Peta Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya dapat di lihat pada Gambar di bawah ini.

Gambar 2.25
Peta Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya 2015-2035



Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang terhadap RTRW Kabupaten Nagan Raya. Hasil peninjauan Kembali terhadap RTRW Kabupaten Nagan Raya yang dituangkan kedalam rumusan rekomendasi pada Tahun 2019 berdasarkan tingkat kualitas RTRW Kabupaten Nagan Raya, tingkat kesesuaian dengan peraturan perundang dan tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, maka RTRW Kabupaten Nagan Raya mendapatkan nilai sebesar 71,33% dan dinyatakan buruk Hal ini dibandingkan dengan *passing grade* senilai 85% sebagai RTRW yang dinyatakan baik. Penilaian ini tentunya berdampak kepada harus direvisinya RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035.

D. Pengairan

Status Daerah Irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015 Tanggal 21 April 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. Luas Daerah Irigasi di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan kewenangan pengelolaannya terdiri dari Daerah irigasi (DI) Kewenangan Pusat yaitu DI Jeuram dengan luas 5972 Ha dan 26 Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Kabupaten dengan rincian lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.40
Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten Nagan Raya

No.	Daerah Irigasi	Kode DI	Luas (Ha)		Panj Saluran (m)		Bangunan (bh)	
			Permen 14/201	IGT	Primer	Sekunder	Pengatur	Pelengkap
1	DI. Alue Buloh	11150003	150	105.68	670	-	10	5
2	DI. Alue We	11150005	200	72.91	1280	200	3	2
3	DI. Blang Meurandeh	11150007	80	79.14	730	1240	3	3
4	DI. Blang Seunong	11150008	141	81.27	4800	4320	26	34
5	DI. Blang Teungku	11150009	75	61.33	1040	960	7	6
6	DI. Bungong Talo	11150010	485	402.38	11800	10850	111	107
7	DI. Gunong Kupok	11150012	100	91.57	835	1422	2	2
8	DI. Gunong Nagan	11150013	102	71.77	771	1920	2	2
9	DI. Gunong Reubo	11150014	198	144.02	6450	3590	35	30
10	DI. Karian	11150015	100	87.56	2120	690	3	6
11	DI. Kila	11150016	100	82.13	1700	1950	6	6
12	DI. Krueng Alem	11150017	200	64.14	1700	1950	6	6
13	DI. Puloe Raga	11150018	300	143.31	2870	3580	22	22
14	DI. Rambong	11150019	330	164.45	10260	1940	31	20
15	DI. Seumambek	11150020	200	105.63	3426	1846	5	7
16	DI. Twi Meuleusong	11150022	200	40.90	2747	1275	7	5
17	DI. Twi Pongoh	11150023	100	115.49	4110	90	8	10
18	DI. Alue Rambot	11150026	70	47.77	739	938	3	3
19	DI. Blang Aman Tadu	11150027	200	37.31	4657	3276	5	5
20	DI. Blang Neuang	11150028	85	53.84	3759	2650	7	4
21	DI. Blang Puuk	11150029	200	180.57	1567	2545	3	3
22	DI. Gunong Langoe	11150030	175	119.56	3890	2544	5	3
23	DI. Krueng Mangkom	11150031	120	30.06	845	1822	3	3
24	DI. Padang Rubek	11150034	65	60.26	475	2756	4	2
25	DI. Pante Ara	11150035	431	301.24	3744	5321	10	8
26	DI. Teuminyeu (Alue Seupeung)	11150037	350	147.98	1180	2760	17	10
Jumlah			4,757	2,892.26	78,165	62,435	344	314

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Keberhasilan pembangunan jaringan irigasi bukan hanya menghadirkan jaringan irigasi secara fisik, tetapi bagaimana kemampuan jaringan irigasi tersebut bisa membawa air lebih efisien sampai ke areal persawahan yang menjadi daerah pelayanannya sehingga dapat terjaga kelestariannya dan berkesinambungan. Pada beberapa daerah irigasi khususnya daerah irigasi permukaan. Kondisi jaringan irigasi sangat memprihatinkan karena kemampuan pelayanan air irigasi telah mengalami penurunan fungsi, yang disebabkan oleh kondisi saluran pembawa, pintu-pintu air dan bangunan ukur tidak berfungsi dan beroperasi dengan baik. Kondisi jaringan irigasi daerah irigasi permukaan dan bangunan-bangunan yang ada pada daerah irigasi disajikan pada Tabel berikut ini.



Tabel 2.41
Kondisi Saluran Irigasi Permukaan Berdasarkan Kewenangan
di Kabupaten Nagan Raya 2015-2035

No.	Daerah Irigasi	Status Irigasi	Luas (Ha)		Kondisi (%)		
			Permen 14/2015	Pemetaan IGT	Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	DI. Alue Buloh	Semi Teknis	150	18	34.00	22.85	43.15
2	DI. Alue We	Semi Teknis	200	37	41.86	28.14	30.00
3	DI. Blang Meurandeh	Semi Teknis	80	22	41.68	24.54	33.78
4	DI. Blang Seunong	Semi Teknis	141	66	49.14	9.86	41.00
5	DI. Blang Teungku	Semi Teknis	75	19	53.24	15.76	31.00
6	DI. Bungong Talo	Teknis	485	402	35.35	22.35	42.30
7	DI. Gunong Kupok	Tdk berfungsi	100	15	56.67	29.33	14.00
8	DI. Gunong Nagan	Tdk berfungsi	102	16	41.1	20.15	38.75
9	DI. Gunong Reubo	Semi Teknis	198	113	36.63	24.62	38.75
10	DI. Karian	Semi Teknis	100	23	44.86	13.44	41.70
11	DI. Kila	Semi Teknis	100	17	40.92	10.78	48.30
12	DI. Krueng Alem	Semi Teknis	200	32	38.93	26.17	34.90
13	DI. Puloe Raga	Semi Teknis	300	109	37.58	24.00	38.42
14	DI. Rambong	Semi Teknis	330	129	33.85	22.05	44.10
15	DI. Seumambek	Semi Teknis	200	23	34.85	23.43	41.72
16	DI. Twi Meuleusong	Semi Teknis	200	34	32.61	21.92	45.47
17	DI. Twi Pongoh	Semi Teknis	100	51	26.31	17.69	56.00
18	DI. Alue Rambot	Tdk berfungsi	70	18	16.4	65.71	17.89
19	DI. Blang Aman Tadu	Semi Teknis	200	37	34.41	23.14	42.45
20	DI. Blang Neuang	Semi Teknis	85	37	43.95	23.27	32.78
21	DI. Blang Puuk	Semi Teknis	200	155	36.42	15.28	48.30
22	DI. Gunong Langoe	Semi Teknis	175	39	43.21	29.04	27.75
23	DI. Krueng Mangkom	Tdk berfungsi	120	4	22.08	18.30	59.62
24	DI. Padang Rubek	Semi Teknis	65	37	19.96	13.42	66.62
25	DI. Pante Ara	Semi Teknis	431	82	37.85	25.45	36.70
26	DI. Teuminyeu (Alue Seupeung)	Semi Teknis	350	67	31.5	21.18	47.32
Jumlah			4757	1602			

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Tabel diatas menjelaskan bahwa setiap daerah irigasi memiliki luas layanan, fungsi dari saluran dan bangunan yang telah dibangun berdasarkan kewenangan masing-masing. Daerah Irigasi (DI) Jeuram memiliki jumlah jaringan dan bangunan irigasi terbesar dengan Panjang jaringan primer sepanjang 540 m, jaringan sekunder sekitar 67.513 m, dan jumlah bangunan besar 3 Unit, bangunan pintu bagi dan sadap sekitar 36 unit, bangunan terjun sekitar 15 unit dan 4 unit talang air, selanjutnya Daerah Irigasi (DI) kewenangan Kabupaten Nagan Raya dengan Panjang jaringan sepanjang 235,25 km, jumlah bangunan 658 unit dengan luas layanan fungsional 1602 Ha. Sedangkan Daerah Irigasi (DI) Kewenangan Provinsi tidak terdapat di Kabupaten Nagan Raya.

E. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi dalam Kondisi Baik

Berdasarkan data dari Dinas PUPR Tahun 2017-2024 total Panjang jaringan irigasi mengalami kenaikan. Panjang jaringan irigasi tahun 2017 sebesar 72,712 meter mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 140,600 meter,



sedangkan luas lahan budidaya pada tahun 2017 sampai dengan 2023 tidak mengalami perubahan yaitu seluas 1.602 Ha, sedangkan Tahun 2024 aLuas lahan Budidaya menurun menjadi 1.587 Ha, sehingga Rasio Panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya pada tahun 2017 adalah 45.39 persen meningkat menjadi 88,59 persen pada tahun 2024. Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten Nagan Raya dalam kondisi baik Tahun 2017-2024 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini

Tabel 2.42
Rasio Jaringan Irigasi dan Persentase Irigasi Kabupaten Nagan Raya dalam Kondisi Baik Tahun 2017-2024

No	Jaringan Irigasi	Tahun							
		*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Total Panjang Jaringan Irigasi (m)	72,712	72,712	73,212	73,212	73,212	73,212	73,212	140,600
2	Luas Lahan Budidaya Pertanian (Ha)	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,602	1,587
Rasio Jaringan Irigasi		45.39	45.39	45.39	45.70	45.70	45.70	45.70	88.59

Sumber : *data awal 2017, Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.3.2.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

A. Rumah Layak Huni yang Dibangun

Permasalahan utama yang terjadi di masyarakat Kabupaten Nagan Raya masih ada masyarakat yang memiliki rumah tidak layak huni. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menjalankan Program rumah layak huni dengan pembiayaan APBD, teknisnya adalah hanya melakukan renovasi rumah warga yang dinilai kurang layak untuk ditingkatkan menjadi rumah layak huni, dengan anggaran berkisar Rp 25 juta per rumah. Sementara itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menghimbau dan mengarahkan untuk Program CSR dari perusahaan-perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Nagan Raya untuk dapat mengalokasikan dana CSR untuk pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang tinggal disekitaran perusahaan tersebut. Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk, perkembangan rumah layak huni mulai tahun 2014 sampai 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.43
Rasio Rumah Layak Huni yang Dibangun di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

No	Uraian	Tahun										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Layak Huni	206	255	205	647	50	749	360	44	45	35	0
2	Jumlah Penduduk	162,682	155,070	158,070	158,223	161,329	164,483	168,392	170,591	173,393	176,461	181,103
Rasio Rumah Layak Huni		0.13	0.16	0.13	0.41	0.03	0.46	0.21	0.03	0.03	0.02	-

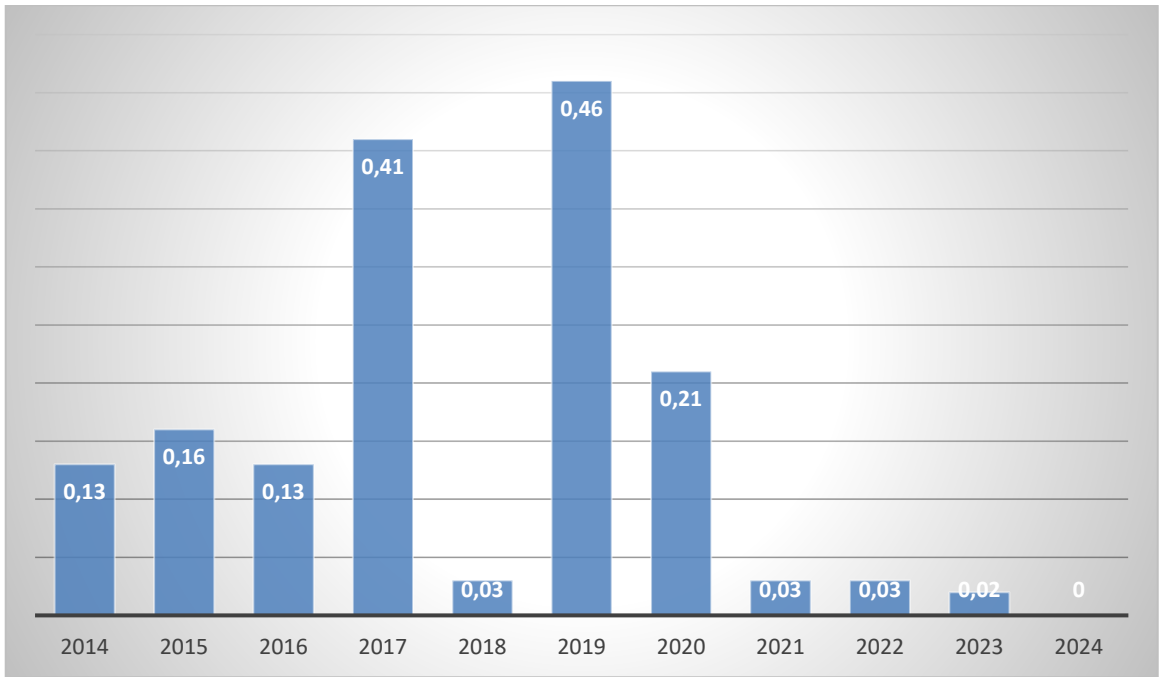
Sumber: Dinas Perkim dan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa program Rumah Layak Huni tidak mengalami peningkatan yang signifikan disebabkan karena beberapa faktor salah satunya masih kurangnya pendataan yang jelas untuk masyarakat penerima bantuan *by name by address* dan masih minimnya Dana APBD dan dana CSR yang disalurkan untuk program rumah layak huni di Kabupaten Nagan Raya.



Pada Tahun 2022, Dinas Perkim telah merencanakan program Rumah Layak Huni sekitar 100 unit dengan alokasi anggaran dari APBD, namun realisasinya hanya ada 45 unit rumah layak huni yang terbangun dan tidak menutup kemungkinan bahwa program rumah layak huni tersebut bisa didapatkan dari anggaran APBA untuk tahun berikutnya karena program tersebut telah menjadi program prioritas dari Pemerintah Provinsi Aceh. Selanjutnya pada Tahun 2023 Baitul Mal membangun 35 Unit Rumah Layak Huni, sedangkan pada Tahun 2024 tidak ada rumah layak hini yang dibangun. Sesuai dengan target yang direncanakan bahwa Program rumah Layak Huni ini akan tercapai. Untuk lebih jelas terkait dengan jumlah keseluruhan rumah layak huni yang telah dibangun/rehab dari tahun 2014 sampai 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.26
Rasio Rumah Layak Huni Tahun 2014-2024



Sumber: Dinas Perkim dan Baitul Mal Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) sesuai dengan kriterianya.

B. Rehab Rumah Tidak Layak Huni

Sesuai dengan data dari RPJM 2017-2022 bahwa pada tahun 2016 setelah dilakukan survey lapangan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman bahwa terdapat sekitar 1.415 unit rumah tidak layak yang perlu dilakaukan rehabilitasi. Dan pada Tahun 2016 ada sejumlah rumah tidak layak huni direhab sebanyak 29 unit. Hingga tahun 2022 tercatat bahwa rumah tidak layak huni sudah direhab sebanyak 331 unit yang tersebar di 10 Kecamatan Kabupaten Nagan Raya

Sesuai dengan capaian target yang direncanakan dalam 5 tahun terakhir bahwasanya rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah tercapai hingga tahun 2022. Namun jika dilihat dari total rumah tidak layak huni maka Kabupaten Nagan Raya tetap menfokuskan prioritas kepada program rehabilitasi rumah tidak layak huni ini karena akan menurunkan kemiskinan ekstrim yang menjadi salah satu tujuan pembangunan pemerintahan Kabupaten Nagan Raya.

C. Kawasan Kumuh

Kondisi perumahan dan kawasan permukiman yang tidak layak huni berpotensi menurunkan kualitas hidup, menghambat perkembangan dan pertumbuhan masyarakat. Pada tabel dibawah ini bisa dilihat luasan kawasan kumuh di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 sampai 2021 ada pengurangan kawasan luasan disebabkan sudah ada penanganannya seluas 2,6 ha dan pada tahun 2024 terjadi penambahan luasan kumuh menjadi 260,93 Ha.

Tabel 2.44
Persentase Luas Kawasan Kumuh
Tahun 2015 – 2024

No	Uraian	Tahun									
		*2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Kawasan Kumuh (ha)	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	108,33	105,73	105,73	105,73	260,93
2	Luas wilayah (ha)	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491	354.491
Persentase areal kawasan kumuh		0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031	0,030	0,030	0,030	0,07

Sumber : *data awal 2015, Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya 2025



Tabel 2.45
Persentase Luas Kawasan Kumuh Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2024

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan (ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Keude Seumot	14,36	240	0,06
Jeuram	8,87	5	1,77
Simpang peut	8,60	408	0,02
Alue Bilie	8,50	1	0,01
Lueng Baro	35,98	384	0,09
Langkak	51,34	750	0,07

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa luas kawasan kumuh berada di desa Kabupaten Nagan Raya namun setelah dilakukan pendataan ke lapangan bahwa masih banyak kawasan kumuh yang tersebar di Kabupaten Nagan Raya sehingga dinyatakan sebanyak 10 Desa yang tersebar di beberapa Kecamatan kabupaten Nagan Raya termasuk Kawasan Kumuh seperti yang ditunjukkan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.46
Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2024

Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh (Ha)	Luas Wilayah (Km)	Persentase
Serba Guna	24,80	353	7,02
Pulo Teungoh	54,96	193	28,47
Serba Jadi	28,93	538	5,37
Alue Ie Mameh	14,41	282	5,11
Blang teungoh	27,27	126	21,64
Langkak	27,86	204	13,65
Jeuram	8,87	50	17,74
Keudee Seumot	14,36	240	5,98
Lung Baro	35,98	384	9,55
Padang Panyang	23,48	546	4,30

Sumber : Dinas Perkim Kab. Nagan Raya, 2025

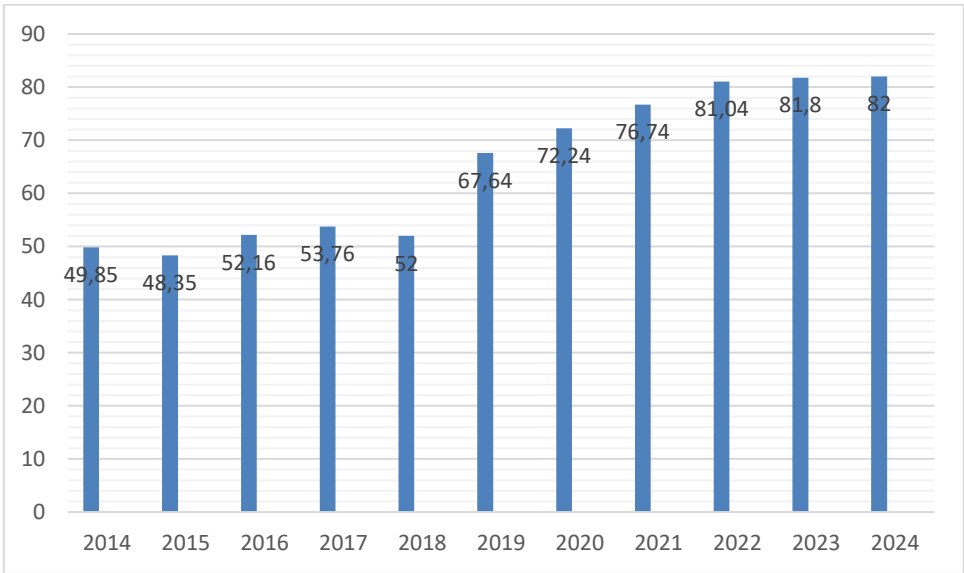
D. Air Minum Layak

Pembangunan air minum merupakan salah satu agenda nasional terkait juga dengan agenda global yang di rancang melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan, penyediaan dan pemenuhan kebutuhan air minum yang layak bagi masyarakat. Dari tabel



dibawah ini biasa dilihat perkembangan air minum layak di Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2014 -2024 Proporsi Rumah Tangga dengan Air Minum Layak.

Gambar 2.27
Grafik Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024



Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Persentase rumah tangga berakses air minum layak mengalami peningkatan. Hal ini terlepas dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya Air Minum layak. Akses air minum layak pada tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 82 % di bandingkan pada tahun 2014 hanya 49,85%.

Adapun kriteria yang digunakan untuk menghitung pencapaian akses air minum layak terdiri dari Jaringan Perpipaan dan jaringan bukan perpipaan. Jaringan perpipaan yaitu sistem jaringan penyediaan air bersih dilakukan melalui pengelolaan air dari sumbernya samapai ke wilayah pelayanan (pelanggan) yang biasanya dilakukan oleh PDAM atau SPAM, sedangkan jaringan bukan perpipaan adalah penyediaan air yang dapat diperoleh secara alamiah baik langsung maupun tidak langsung seperti air sumur, air danau, air sungai, air hujan, ataupun sumber-sumber air permukaan lainnya atau bahkan membeli dari pedagang keliling.

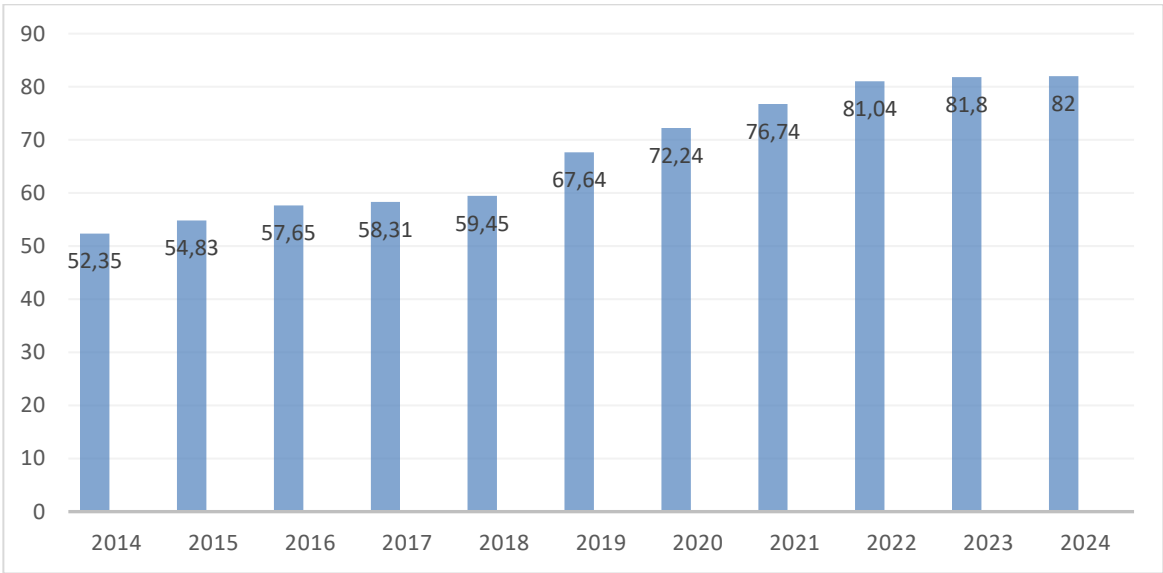
E. Sanitasi Layak

Untuk pelayanan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya, rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak pada tahun 2014 sebesar 52,35 %. Pada tahun 2024 rasio rumah tinggal berakses sanitasi layak meningkat menjadi sebesar 82 %. Perkembangan akses sanitasi di Kabupaten Nagan Raya meningkat pesat



dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan akses sanitasi kepada masyarakat seperti : Adanya upaya penurunan kasus stunting, peningkatan sanitasi perdesaan, peningkatan promosi kesehatan. Namun demikian masih terdapat permasalahan masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam perilaku hidup bersih sehat, masih kurangnya pemicuan terhadap kesehatan masyarakat, masih terdapat desa yang belum bebas dari buang air besar sembarangan (BABS). Secara rinci akses sanitasi Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.28
Rasio Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak
di Kabupaten Nagan Raya



Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, 2025

2.3.2.1.5 Ketentraman, ketertiban umum, dan Perlindungan Masyarakat

Stabilitas kondisi politik dan keamanan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keadaan yang kondusif tersebut akan menciptakan suasana aman, tertib, tentram dan damai guna mewujudkan keberhasilan pelaksanaan tujuan pembangunan untuk mendukung terselenggaranya pembangunan daerah secara dinamis. Berikut jumlah personil Linmas yang ada di Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2024.



Tabel 2.47
Jumlah Personil Linmas Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2024

NO	TAHUN	JUMLAH LINMAS (ORANG)
1	*2015	905
2	2016	985
3	2017	1.000
4	2018	1.286
5	2019	1.286
6	2020	1.286
7	2021	1.286
8	2022	1.286
9	2023	1.222
10	2024	1.222

Sumber : *data awal 2015, Satpol PP WH dan Linmas Kab. Nagan Raya,
Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas jumlah personal Linmas Di Kabupaten Nagan Raya selama 8 tahun, mulai dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2022 terus bertambah. Pada Tahun 2015 jumlah personil Linmas di Kabupaten Nagan Raya berjumlah 905 orang. Kemudian pada Tahun 2017 bertambah menjadi 1.000 orang, kemudian Tahun 2018 bertambah sebanyak 286 orang personil Linmas. Penambahan jumlah personil Linmas di Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan penambahan jumlah TPS. Kemudian pada tahun 2023 sampai dengan 2024 tidak ada penambahan berjumlah linmas yaitu 1.222 orang. Selain jumlah personil Linmas di Kabupaten Nagan Raya untuk melihat penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan data jumlah kejahatan yang dilaporkan di Masyarakat. Berikut jumlah kejahatan yang dilaporkan sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2024:

Tabel 2.48
Jumlah Kasus Kejahatan yang Dilaporkan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024

No	Kabupaten	Jumlah Kasus Kejahatan yang Dilaporkan									
		*2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Nagan Raya	100	150	200	281	204	188	98	65	70	80

Sumber : *data awal 2015, Satpol PP dan WH Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah kasus kejahatan selama sepuluh terakhir sangat fluktuatif, dari tahun 2015 jumlah kejahatan yang dilaporkan sebanyak 100 kejahatan semudian meningkat sampai tahun 2018 menjadi 281 kasus kejahatan yang dilaporkan. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 204 kasus kejahatan yang dilaporkan dan setiap tahun terus menurun, pada tahun 2024 tercatat hanya 80 kasus kejahatan yang dilaporkan.

2.3.2.1.6. Kebencanaan

Kabupaten Nagan Raya memiliki kondisi topografi berbukit dan dataran rendah. Kabupaten Nagan Raya berada di wilayah pesisir barat Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Wilayah ini dialiri oleh lima sungai besar dan 10 anak sungai, serta memiliki lima DAS (Daerah Aliran Sungai) utama. Penggunaan lahan didominasi oleh hutan dan perkebunan dan pada beberapa wilayah terdapat lahan gambut. Sebagian wilayah ini berupa dataran rendah dan memiliki tutupan lahan terbuka seperti perkebunan dan pertanian lahan kering. Selain itu, wilayah ini juga berada pada zona sesar Sumatera dan terdapat segmen sesar Aceh-Seulimeum. Kondisi inilah yang menyebabkan wilayah Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi terjadinya banjir, tanah longsor, banjir bandang, tsunami, gelombang ekstim dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, cuaca ekstim, dan gempabumi.

A. Resiko Bencana Kabupaten Nagan Raya

Tingkat risiko diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan dan tingkat kapasitas untuk seluruh jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya. Adapun rekapitulasi tingkat risiko bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.49
Tingkat Risiko di Kabupaten Nagan Raya

NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	LAHAN TERPAPAR (ha)	KERUGIAN (juta rupiah)
1	Banjir	Tinggi	130,038	50.414	30.851.310
2	Banjir Bandang	Tinggi	12,703	160.227	89.936
3	Cuaca Ekstim	Tinggi	154,932	-	4.533.305
4	Gelombang Ekstim dan Abrasi	Sedang	236	9.067	19.850
5	Gempabumi	Tinggi	158,223	-	5.255.618
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Tinggi	-	193.413	2.390.449
7	Kekeringan	Tinggi	158,223	184.346	2.065.318
8	Tanah Longsor	Tinggi	3,048	184.044	445.382



NO	JENIS BENCANA	TINGKAT RISIKO	PENDUDUK TERPAPAR (jiwa)	LAHAN TERPAPAR (ha)	KERUGIAN (juta rupiah)
9	Tsunami	Tinggi	10,854	-	11.119.934

BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan perhitungan dan analisis kelas bahaya, kerentanan dan kapasitas, didapatkan bahwa tingkat risiko di Kabupaten Nagan Raya adalah tinggi di sebagian besar jenis bencana. Tingkat risiko sedang hanya berpotensi terjadi pada bencana gelombang ekstrim dan abrasi.

Jumlah penduduk terpapar bahaya terbanyak berpotensi terjadi pada bencana cuaca ekstrim, gempabumi, dan kekeringan. Hal tersebut terjadi karena bencana tersebut rawan terjadi di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Nagan Raya. Bencana kekeringan dan tanah longsor paling tinggi berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan. Sementara bencana banjir dan tsunami berpotensi menyebabkan kerugian secara ekonomi paling tinggi. Hasil dari penilaian tingkat risiko bencana tersebut dapat dijadikan sebagai bahan acuan daerah dalam pengambilan keputusan terkait penanggulangan bencana. Selain hasil tingkat risiko, penilaian juga disajikan ke dalam peta risiko untuk setiap jenis bahaya dan peta risiko multi bahaya. Adapun Peta Risiko Bencana untuk setiap jenis bencana di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada Lampiran 1 Peta Risiko Bencana.

B. Analisis Kecenderungan Bencana

Setiap bencana mengalami perubahan-perubahan dengan frekuensi kejadian berbeda setiap tahunnya. Kecenderungan perubahan-perubahan tersebut dapat dilihat berdasarkan catatan kejadian bencana 10 (sepuluh) tahun terakhir di Kabupaten Nagan Raya. Dari analisis kecenderungan tersebut dapat ditentukan pula prioritas risiko bencana di Kabupaten Nagan Raya dengan menghubungkannya pada tingkat risiko bencana daerah. Catatan kebencanaan mengacu pada kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Nagan Raya. Catatan kejadian bencana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menentukan potensi bencana. Kejadian bencana yang pernah terjadi di suatu daerah tercatat pada Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) yang dikeluarkan oleh BNPB.

Data dan Informasi Bencana BNPB telah mencatat kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2002. Data menunjukkan terdapat 50 kejadian bencana yang pernah terjadi, meliputi bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, tanah longsor, cuaca ekstrim (puting beliung), dan tsunami. Catatan kejadian bencana yang digunakan sebagai data pendukung dalam penyusunan RPB berdasarkan pencatatan Data dan Informasi Bencana



Indonesia (DIBI). Bencana-bencana yang tercatat dalam informasi DIBI dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.50
Rekapitulasi Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2019 – 2023

JENIS BENCANA	JUMLAH KEJADIAN	KORBAN (jiwa)			RUMAH (unit)				LAHAN (HA)	
		MENINGGAL & HILANG	LUKA - LUKA	MENDERITA & MENGUNGSI	RUSAK BERAT	RUSAK SEDANG	RUSAK RINGAN	TERENDAM	SAWAH	HUTAN
Banjir	29	1	0	130.087	3	0	253	13.681	357	0
Tanah Longsor	1	0	7	10.675	0	0	0	0	0	0
Puting Beliung	7	0	0	10	12	2	1	0	0	0
Karhutla	8	0	0	0	0	0	0	0	200	10
Gempa bumi	1	0	0	18	21	0	142	0	0	0
TOTAL	47	1	7	140.790	36	2	396	13.681	557	10

Sumber: Data dan Informasi Bencana Indonesia_BNPB, Tahun 2023

Menurut Data dan Informasi Bencana yang dikeluarkan oleh BNPB, terdapat 47 kejadian bencana yang terjadi antara kurun waktu 2009 hingga Juni 2019. Banjir menyebabkan kerusakan yang paling besar. Bencana dengan dampak terparah adalah banjir yang terjadi pada tahun 2015 dan tsunami Aceh yang terjadi pada 2004. Besarnya kerusakan dan korban jiwa yang terjadi akibat tsunami Aceh 2004 menjadikan peristiwa ini sebagai *wake up call* bagi bangsa Indonesia untuk mengerti arti penting bencana. Gempabumi juga pernah terjadi di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2012 dengan kekuatan magnitude 6.6 SR yang menyebabkan kerusakan rumah dan fasilitas umum.

Kecenderungan kejadian bencana Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada rentang waktu tahun 2009 sampai Juni 2019 berdasarkan data kajian 10 (sepuluh) tahun terakhir dari DIBI BNPB. Data tersebut telah disepakati bersama oleh perwakilan OPD Pemerintah Kabupaten Nagan Raya pada saat kegiatan Diskusi Publik 2 Penyusunan Dokumen RPB tahun anggaran 2019 Kabupaten Nagan Raya. Kecenderungan yang dimaksud berupa arah kecenderungan kejadian bencana (meningkat, tetap, menurun), pola kejadian (tetap/berulang), dan kecenderungan terhadap dampak yang ditimbulkan dalam rekapan tahun tersebut.

Tabel 2.51
Kecenderungan Kejadian Bencana Kabupaten Nagan Raya

NO	JENIS BENCANA	KECENDERUNGAN	
1	Banjir	Tetap	Intensitas kejadian tinggi dan berulang, dampak besar dan luas
2	Banjir Bandang	Tetap	-
3	Cuaca Ekstrem	Meningkat	Intensitas kejadian berulang, dampak luas
4	Gempabumi	Tetap	Banyak jalur sesar aktif
5	Gelombang Ekstrem Dan Abrasi	Tetap	-
6	Kebakaran Hutan Dan Lahan	Meningkat	Intensitas kejadian tinggi dan berulang, dampak luas
7	Kekeringan	Tetap	-
8	Tanah Longsor	Tetap	-
9	Tsunami	Tetap	Jalur sesar aktif, ada garis pantai

Sumber: Hasil Analisis Data Bencana Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

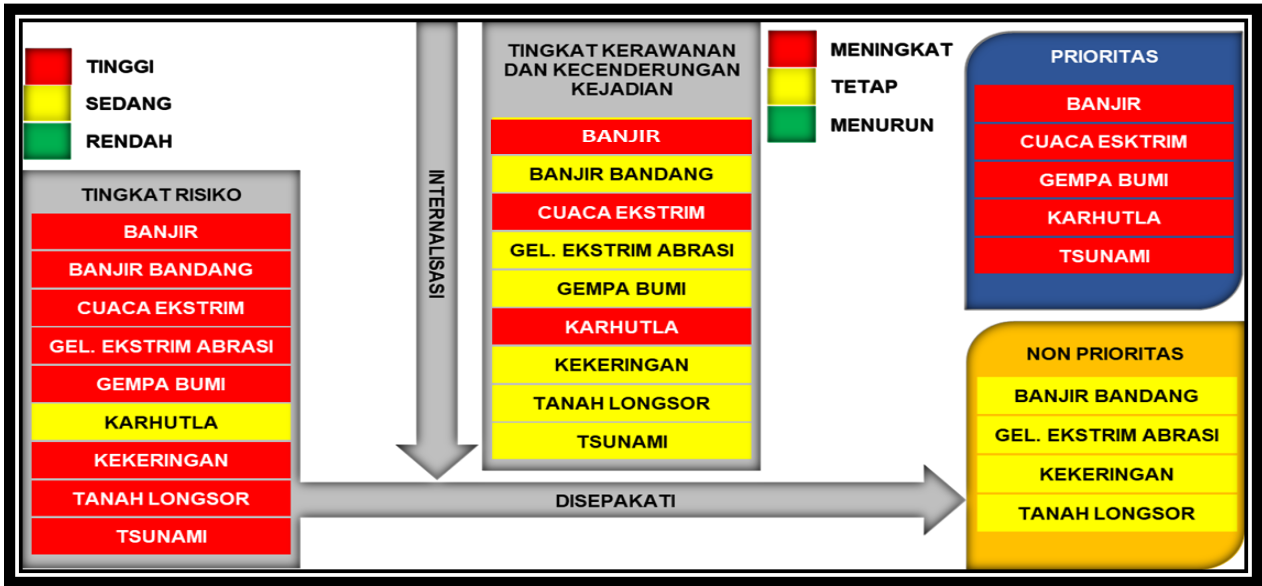
Berdasarkan hasil analisis kecenderungan pada grafik dan tabel di atas, menunjukkan bahwa bencana banjir, cuaca ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan memiliki kecenderungan kejadian yang relatif meningkat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

C. Prioritas Resiko Bencana yang Ditangani

Berdasarkan hasil Kajian Risiko Bencana Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018, hampir seluruh potensi bencana di Kabupaten Nagan Raya memiliki tingkat risiko tinggi. Meskipun demikian, dalam penanganannya perlu ditentukan jenis bencana yang menjadi prioritas utama dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya. Rekapitulasi parameter tingkat risiko bencana dan kecenderungan kejadian bencana di Kabupaten Nagan Raya dituangkan dalam Gambar di bawah ini.



Gambar 2.29
Prioritas Risiko Bencana di Kabupaten Nagan Raya



Sumber: BPBD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan hasil kesepakatan dalam kegiatan Diskusi Publik 2 Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019, telah disepakati terdapat 5 (lima) bahaya bencana yang menjadi prioritas untuk ditangani, yaitu banjir, cuaca ekstim, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami. Penentuan bahaya dari prioritas risiko bencana tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya yang diwakilkan oleh Tim Teknis Penyusunan RPB Kabupaten Nagan Raya dari berbagai badan/dinas terkait yang didasarkan pada kajian risiko, intensitas kejadian dan dampak yang ditimbulkan. Pemilihan bahaya bencana cuaca ekstim dan kebakaran hutan dan lahan menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada kecenderungan kejadian bencana yang relatif meningkat. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana Kabupaten Nagan Raya, pemilihan bahaya bencana banjir dan tsunami menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada tingginya pada potensi kerugian rupiah. Sedangkan, pemilihan bahaya bencana gempabumi menjadi prioritas risiko bencana yang akan ditangani di Kabupaten Nagan Raya didasarkan pada tingginya potensi jumlah terpapar.

Potensi banjir di Kabupaten Nagan Raya terjadi merupakan limpasan dari sungai-sungai besar yang mengalir di wilayah Kabupaten Nagan Raya, terutama Krueng Tadu (mengaliri Kecamatan Tadu Raya), Krueng Lamie (mengaliri Kecamatan Darul Makmur), dan Krueng Tripa (mengaliri Kecamatan Tripa Makmur) yang sebagian besar memiliki morfologi sungai berkelok atau *meandering*. Secara umum, banjir dan genangan air di Kabupaten Nagan Raya dapat digolongkan sebagai banjir kiriman, banjir lokal dan banjir pasang, khususnya kawasan yang berada sepanjang garis pantai.

Sesar Sumatera merupakan sesar yang bergerak menganan dan memanjang sepanjang ± 1.900 km, mulai dari Aceh hingga Selat Sunda. Sesar Sumatera tersegmentasi menjadi 19 segmen utama dan beberapa segment utama tersebut terbagi lagi menjadi beberapa segmen kecil. Berdasarkan PusGeN 2017, terdapat pembaharuan jumlah segmen dalam Sesar Sumatera, dari yang semula 19 menjadi 43 segmen termasuk di dalamnya jumlah sesar di wilayah perairan lepas pantai. Segmen paling utara Pulau Sumatera, yaitu Segmen Seulimeum-Aceh-Tripa membentang di Provinsi Aceh dan salah satu segmen lokalnya melewati wilayah Kabupaten Nagan Raya. Hal tersebut yang menyebabkan Kabupaten Nagan Raya berpotensi tinggi terhadap bahaya bencana gempa bumi.

Sebagian wilayah Kabupaten Nagan Raya didominasi oleh penggunaan lahan berupa hutan (41%), serta terdapat ekosistem gambut yang tersebar di beberapa kecamatan. Tutupan lahan merupakan koefisien penting dalam penentuan kelas kebakaran hutan dan lahan. Semakin luas hutan, diasumsikan pembukaan lahan untuk usaha akan semakin besar pula. Selain itu, potensi kebakaran hutan dan lahan terjadi pada hutan-hutan yang dilewati jaringan jalan utama sebagai akibat perilaku manusia, terutama pada kawasan hutan pinus dan lahan gambut yang cenderung mudah terbakar pada musim kemarau.

Berdasarkan catatan bencana geologis, tsunami pernah terjadi pada tahun 1797, 1891, 1907, dan catatan kejadian ekstrim terakhir dengan korban jiwa dan harta pada tanggal 26 Desember 2004. Bencana geologis tsunami juga dapat menyebabkan terjadinya bencana susulan, yaitu banjir bandang dan banjir jika hantaman langsung air laut memasuki alur-alur sungai di daerah muara. Istilah tsunami juga dikenal dalam bahasa daerah sebagai *Ie Beuna* yang artinya air laut yang sampai ke darat. Bencana-bencana yang menjadi prioritas tersebut perlu segera ditangani secara menyeluruh. Oleh karena itu, seluruh pendekatan secara spesifik untuk merespon gempabumi di tahun 2019 masih perlu menyelesaikan pekerjaan rehabilitas pasca bencana. Pilihan tindakan baik pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan maupun pengalihan risiko perlu dilakukan untuk menanggulangi risiko bencana tersebut. Sementara untuk bencana non-prioritas, seperti banjir bandang, cuaca ekstrim, dan kebakaran hutan dan lahan, pendekatan dan pilihan tindakannya hanya melingkupi pencegahan dan mitigasi saja.

Berdasarkan pengkajian risiko bencana dan rekomendasi kebijakan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya beserta pihak terkait perlu melakukan upaya pengurangan risiko bencana berdasarkan hasil kajian ini. Dokumen KRB ini dapat digunakan sebagai acuan pemerintah daerah dalam melakukan rencana penanggulangan bencana di Kabupaten Nagan Raya. Dokumen ini memiliki posisi sebagai dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana (RPB), yang kemudian dapat diturunkan menjadi Rencana Mitigasi, Rencana Kontinjensi, dan Rencana Operasi pada masing-masing bencana dalam penanggulangan bencana.

2.3.2.1.7. Sosial

Salah satu permasalahan mendasar dalam bidang sosial yaitu berkaitan dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

Dalam dua tahun terakhir (2023–2025), Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kemajuan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang sosial bagi penyandang disabilitas. Langkah awal yang signifikan ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Regulasi ini memperkuat landasan hukum daerah dalam memberikan layanan yang lebih inklusif dan adil. Selain itu, sejak 2024, aspirasi kelompok rentan termasuk penyandang disabilitas juga mulai diakomodir melalui Musrenbang dan Musrena sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah.

Dari sisi pelayanan langsung, Pemerintah Kabupaten melalui kolaborasi dengan pihak swasta telah menyalurkan bantuan alat bantu berupa kursi roda, tongkat kaki tiga, dan tongkat ketiak. Misalnya, pada Januari 2024, sebanyak 20 unit kursi roda diberikan kepada penyandang disabilitas di Gampong Paya Udeng. Bantuan serupa kembali disalurkan pada Desember 2024 di Gampong Alue Ie Mameh dengan jumlah yang lebih besar, menunjukkan komitmen terhadap pelayanan dasar bagi kelompok difabel.

Pemerintah daerah juga melaksanakan berbagai program pemberdayaan, seperti penyaluran santunan kepada lebih dari 2.000 penyandang disabilitas pada Maret 2025, serta penyelenggaraan sosialisasi Unit Layanan Disabilitas (ULD) oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi guna mendorong rekrutmen kerja yang inklusif oleh perusahaan. Namun, tidak semua program berjalan mulus. Salah satu proyek pemberdayaan, yaitu pembangunan kolam ikan lele untuk penyandang disabilitas, menuai kritik tajam dari komunitas difabel karena dianggap tidak sesuai spesifikasi dan minim pelibatan kelompok sasaran.

Secara umum, capaian Kabupaten Nagan Raya mencakup kemajuan dalam aspek peraturan, penyediaan alat bantu, perlindungan sosial, dan akses ketenagakerjaan. Meski demikian, tantangan seperti implementasi program yang kurang partisipatif dan potensi penyalahgunaan anggaran masih perlu mendapat perhatian. Ke depan, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas penyandang disabilitas, serta penguatan evaluasi terhadap unit layanan dan efektivitas program inklusi sosial agar pemenuhan SPM benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Adapun jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdasarkan jenis permasalahan kesejahteraan sosial di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.52
Permasalahan Sosial di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

NO	JENIS PERMASALAHAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	TAHUN / JUMLAH JIWA										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Anak dengan kecatatan	40	42	41	44	43	44	49	55	958	343	342
2	Anak Yatim, Piatu, Yatim Piatu	634	657	681	691	708	710	750	678	695	2167	2170
3	Anak Terlantar	0	2	5	1	2	7	7	3	0	11	10
4	Anak Berhadapan dengan Hukum	2	5	1	3	5	11	16	8	13	8	20
5	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	234	345	398	405	468	354	472	421	305	2086	2101
6	Korban Tindak Kekerasan	1	3	2	1	0	1	3	5	13	7	5
7	Lanjut Usia Terlantar	1	1	2	1	0	1	1	1	3	188	180
8	Penyandang Disabilitas	189	211	268	301	321	389	457	2592	2132	1820	1818
9	Tuna Susila	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Pengemis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Bekas Warga Binan lembaga Kemasyarakatan	0	0	0	0	0	0	0	3	0	84	80
12	Fakir Miskin	5,098	5465	5,698	5,987	6243	6,692	6067	6,014	6,212	8665	8660
13	Rumah Tidak Layak Huni	196	203	216	219	209	223	197	190	203	250	250
14	Keluarga Rentan	0	0	210	0	0	943	0	0	120	1242	1246
15	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	7	7	9	11	2	13	1	0	21	33	25
16	Korban Bencana Alam	75	78	91	109	0	81	0	0	1,899	314	311

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat jumlah kelompok rentan di Kabupaten Nagan Raya tahun 2014-2024. Dari 16 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Nagan Raya tidak terdapat tuna Susila dan pengemis. Sedangkat PMKS lainnya ada di Kabupaten Nagan Raya dengan jumlah yang sangat bervariasi. Kelompok yang paling banyak adalah fakir miskin, anak yatim piatu, wanita rawan sosial dan penyandang disabilitas.

Tabel 2.53
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

NO	JENIS PSKS	JUMLAH / ORANG										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja Sosial Profesional	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Pekerja Sosial Masyarakat	48	48	48	48	50	50	50	50	50	45	37
3	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	25	25	25	25	28	28	28	25	25	27	28
4	Karang Taruna	50	50	50	50	50	50	50	50	50	10	10
5	TKSK	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Jumlah PSKS yang ada di Kabupaten Nagan Raya tetap sama karena dari awal data Tahun 2013 tidak ada penambahan. Hal tersebut karena belum tersedia anggaran dari kementerian maupun dari Pemerintah Daerah. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang belum ada di Kabupaten Nagan Raya adalah Pekerja Sosial Reaksi Cepat. Pekerja Sosial Profesional yang dibutuhkan sebanyak 3 orang lagi yaitu pekerja sosial professional pendamping ABH di UPTD 1 (satu) orang,1 (satu) orang pedamping lansia, dan 1 (satu) orang pendamping disabilitas. Dari 5 kelompok PSKS hanya Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) dan TAGANA yang bertambah sejak tahun 2018. Untuk PSM bertambah 2 orang dari tahun 2017 dari 48 orang menjadi 50 orang. Kemudian TAGANA bertambah 3 orang pada Tahun 2014 dari 25 orang menjadi 28 orang.

2.3.2.2 Layanan Urusan wajib Non Dasar

2.3.2.2.1 Ketenagakerjaan

Secara umum, tingkat Pendidikan Angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Angkatan kerja menurut tingkat Pendidikan tercatat 85.038 persen Tahun 2022, berdasarkan komposisi usaha yang paling banyak penduduk bekerja di sektor pertanian sebesar 50 persen. Kemudian penduduk yang bekerja pada sektor jasa sebesar 20,02 persen dan sektor manufaktur sebesar 17 persen.

Untuk itu, harus disiapkan infrastruktur dan suprastruktur agar kegiatan ekspor dapat dilakukan melalui kepabeuan dalam wilayah aceh dan tidak lagi melalui provinsi lain. Dalam hal ini Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang cukup baik dalam pengembangan Kawasan industri terpadu (KIT) berbasis ketersediaan bahan baku yang tersedia di daerah, seperti dari sektor perkebunan yang relatif besar sehingga menghasilkan produk turunan misalnya, proses penciptaan *added value* dengan merubah Tanda Buah Segar (TBS) menjadi *Crude Palm Oil* (CPO) yang sudah dimulai oleh 11 unit Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS) di Kabupaten Nagan Raya Serta Kawasan Peternakan Terpadu. pendayagunaan tenaga kerja melalui pengendalian tambahan angkatan kerja baru, penciptaan kesempatan kerja sektoral, perencanaan pelatihan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial dan Jamsostek Ketenagakerjaan. Selain itu, optimalisasi peran koperasi, usaha/kelompok usaha kecil dan menengah perlu juga dilakukan dengan dukungan perdampingan dan dana yang memadai. Selanjutnya, pemerintah daerah dapat mengundang investor dengan melakukan promosi dan memberikan kemudahan dalam berinvestasi serta mengusahakan agar keamanan daerah tetap kondusif.

Semakin tinggi dan beragamnya lulusan pendididkan, baik Pendidikan menengah kejuruan maupun Pendidikan tinggi (Universitas, Politeknik, Poltekkes dan lainnya) membutuhkan penyediaan lapangan kerja yang memadai. Untuk itu, diperlukan peningkatan kopetensi keahlian lulusan melalui magang industri dan pelatihan/training pada Lembaga asosiasi profesi yang sesuai dengan pasar kerja. Pemerintah dan pengusaha menciptakan dan memperluas lapangan kerja/usaha baru, serta mengoptimalkan keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sebelumnya kurang berfungsi. Pengiriman tenaga kerja professional Magang ke luar negeri, mengundang investor untuk berinvestas, mengusahakan keamanan yang kondusif, dan melaksanakan kerja sama investasi baik dengan investor lokal maupun investor asing juga perlu di upayakan ke depan. Selain itu, perlu mengaktifkan dan mengoptimalkan sentra sentra industri yang telah ada dan mempromosikan Kawasan Industri Terpadu (KIT) sebagai Kawasan Investasi serta upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam Pembangunan Refenery CPO dan PKO pada Tahun 2024 dan menjalin kerjasama dengan pihak swasta dalam menciptakan lapangan kerja serta pemenuhan tenaga kerja lokal sehingga Sasaran yang ingin dicapai adalah menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan dari 17,70 persen tahun 2021 menjadi minimal 14%-16% pada tahun 2023-2026.



Tabel 2.54
Penduduk Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024

Tingkat Pendidikan	*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
SD ke bawah	39.166	39.345	39.870	40.242	41.728	40.895	40.030	37.171
SMP	28.929	29.553	30.307	25.317	25.980	31.741	31.175	30.190
SMA Umum	32.549	32.998	30.745	42.025	40.595	43.726	43.950	50.654
SMA Kejuruan	2.989	3.301	4.000	2.777	3.514	253	1.553	880
Diploma I/II/III	3.216	3.975	3.687	3.930	3.928	2.700	2.538	3.064
Universitas	8.015	9.756	12.725	8.802	9.718	8.289	11.905	11.063
Jumlah	114.864	118.928	121.334	123.093	125.463	127.604	141.151	133.022

Sumber : *data awal 2017, BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Penduduk usia kerja menurut tingkat Pendidikan pada tahun 2017 didominasi pada tingkat Pendidikan rendah SD ke bawah yaitu 39.166 orang dan terus meningkat dari tahun ke tahun sampai 40.895 orang pada tahun 2022, untuk tingkat Pendidikan tahun selanjutnya didominasi pada tingkat Pendidikan SMA Umum sebanyak 43.726 orang pada tahun 2022 dan penduduk usia kerja tingkat SMA kejuruan menjadi tingkat paling rendah yaitu sebanyak 253 orang pada tahun 2022.

Tabel 2.55
Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kelamin
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2024

JENIS KELAMIN	*2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Laki-laki	55.043	N.A	75.723	60.001	61.327	62.192	63.295	64.384	65.924	66.827
Perempuan	54.697	N.A	57.147	58.927	60.007	60.901	62.168	63.220	65.227	66.195
Jumlah	109.740	N.A	114.864	118.928	121.334	123.093	125.463	127.604	131.151	133.022

Sumber : *data awal 2015, BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Penduduk usia kerja menurut jenis kelamin berjumlah laki-laki dan perempuan pada Tahun 2015 yaitu 109.740 orang dan terus mengalami peningkatan pada tahun selanjutnya yaitu 133.022 di Tahun 2024, adapun



penduduk usia kerja laki-laki sebanyak 55.043 orang pada tahun 2015 dan terus meningkat yaitu 66.827 pada tahun 2024, sedangkan penduduk usia kerja jenis kelamin perempuan sejumlah 54.697 orang pada tahun 2015 dan terus meningkat 66.195 orang pada tahun 2024.

2.3.2.2.2. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak**

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan urusan wajib yang mengurus urusan pemerintah bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Pemberdayaan perempuan adalah proses di mana perempuan memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan akses yang sama dengan laki-laki untuk mencapai kesetaraan gender dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Indikator pemberdayaan perempuan dapat mencakup akses perempuan terhadap pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, partisipasi dalam kegiatan publik, dan perlindungan hukum terhadap perempuan.

Indikator keberhasilan lainnya yang dapat dilihat adalah tingkat partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah. Di Kabupaten Nagan Raya, Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2024 jumlah keterwakilan Perempuan yang bekerja di Lembaga pemerintah terus meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa sudah meningkat partisipasi perempuan di pemerintahan walaupun peserta serta tersebut masih harus ditingkatkan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah perempuan yang menjadi ASN di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu jumlah Perempuan yang bekerja di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan makin terbukanya kesempatan yang sama bagi Perempuan untuk bekerja di lembaga pemerintahan maupun di sektor swasta. Selain itu jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat ada peningkatan dari Tahun 2018 sebanyak 3 orang dan Tahun 2024 menjadi 4 orang dari 25 anggota dewan di Kabupaten Nagan Raya, dengan peresentase 12 persen di Tahun 2018 menjadi 16 persen di Tahun 2024.

Tabel 2.56
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK
Tahun 2018-2024

No	Uraian	*2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kursi DPRK yang diduduki perempuan	3	4	4	4	4	4	4
2	Jumlah total kursi di anggota DPRK	25	25	25	25	25	25	25
Presentase Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRK		12%	16%	16%	16%	16%	16%	16%

Sumber : *data awal 2018, Bagian Pemerintahan Setdakab Nagan Raya, 2025

Kasus kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Nagan Raya yang dilaporkan juga sedikit. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sudah menyediakan Lembaga Layanan khusus perempaun dan anak yang mengalami kekerasan dengan membentuk UPT Perlindungan Perempuan dan Perlindungan anak.

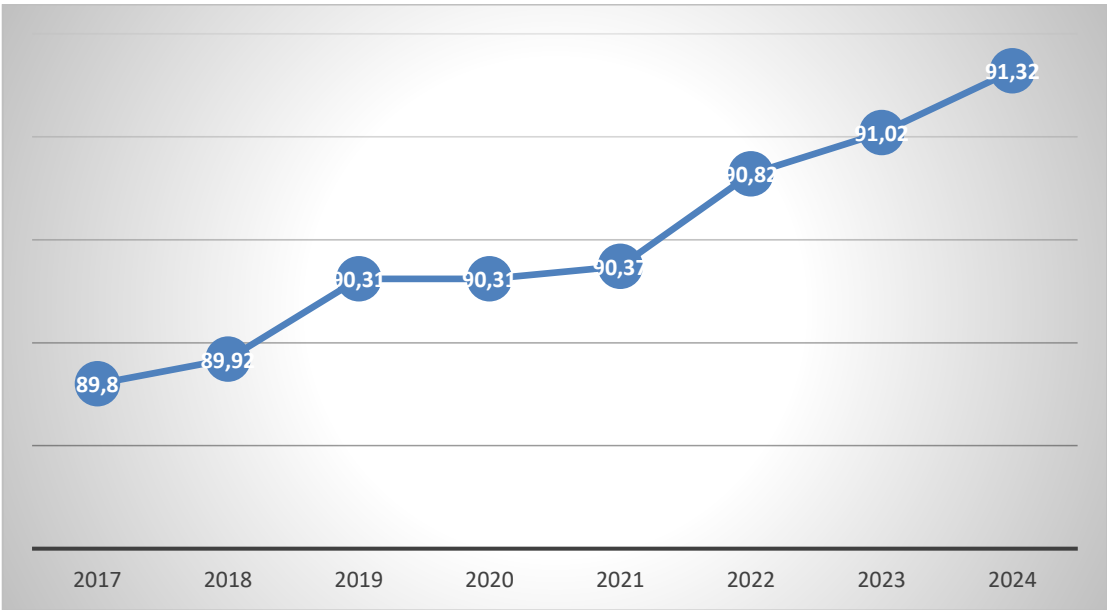
Tabel 2.57
Rasio KDRT Tahun 2018 - 2024

No	Uraian	Tahun						
		*2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah KDRT	2	3	0	3	2	8	9
2	Jumlah Rumah Tangga	42.019	42.737	46.464	39.351	44.831	56.950	58.255
Rasio KDRT		0.005	0.007	0.000	0.007	0.004	0.014	0.154

Sumber : *data awal 2018, DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya menunjukkan persentasi berfluktuatif dimana kondisi pada tahun 2024 lebih baik dari kurun waktu delapan tahun terakhir, oleh karenanya perlu dilakukan perencanaan pembangunan yang pro gender serta mengintegrasikan program-program pembangunan di SKPK dengan Pengarusutamaan Gender. Adapun IPG Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2017 berkisar sebesar 89.8 persen dan meningkat pada Tahun 2024 menjadi sebesar 91.32 persen. Kondisi Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 – 2024 dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

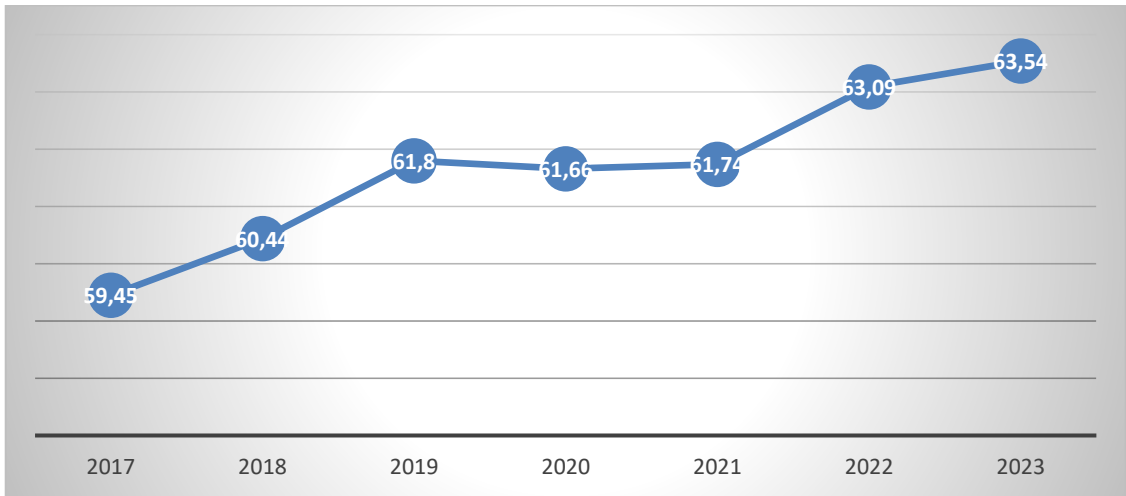
Gambar 2.30
Indeks Pembangunan Gender Kab. Nagan Raya Tahun 2017-2024



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi. Berdasarkan data BPS Tahun 2023 terjadi peningkatan IDG di Kabupaten Nagan Raya. Pada Tahun 2017 IDG Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 59.45 kemudian naik menjadi 60.44 pada Tahun 2018. Kemudian Tahun 2019 IDG Kabupaten Nagan Raya kembali meningkat menjadi 61.8. Sedangkan pada Tahun 2020-2021 IDG Kabupaten Nagan Raya sedikit mengalami penurunan menjadi 61.66 dan 61.74. Pada Tahun 2022 IDG Kabupaten Nagan Raya naik Kembali menjadi 63.09. Seharusnya IDG setiap tahun itu menunjukkan tren kenaikan. Nilai indeks ini menggambarkan semakin tinggi IDG menunjukkan pemberdayaan gender di daerah tersebut semakin baik. Berikut perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2023 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.31
Indek Pemberdayan Gender (IPG) Tahun 2017-2023



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, 2025

Untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dengan mengikuti evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak Tahun 2018. Evaluasi ini bertujuan untuk mempeoleh gambaran bagi daerah sejauh mana tingkat pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di derah. Namun pada tahun tersebut Kabupaten Nagan Raya belum berhasil mendapatkan peringkat. Tahun 2019 Kabupaten Nagan Raya kembali mengikuti evaluasi untuk kedua kalinya, namun masih juga belum berhasil mendapatkan peringkat. Pada evaluasi Tahun 2020/2021 Kabupaten Nagan Raya pertama kali mendapat predikat KLA bersama 7 Kabupaten kota lain yang ada di Aceh. Kemudian pada Tahun 2022 Kabupaten Nagan Raya mengikuti evaluasi pelaksanaan KLA di dearah Kabupaten Nagan Raya naik peringkat



menjadi Madya bersama 5 Kabupaten/kota lainnya. Berikut data perkembangan predikat penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2018-2024.

Tabel 2.58
Perkembangan Predikat KLA Tahun 2018-2024

Kabupaten	Tahun					
	*2018	2019/2020	2020/2021	2022	2023	2024
Nagan Raya	-	-	Pratama	Madya	Madya	*_dalam proses evaluasi

Sumber: *data awal 2018, Dinas PMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Nagan Raya menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Sejak tahun 2020/2021, pemerintah daerah berhasil meraih penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dengan predikat Pratama, yang kemudian meningkat menjadi Madya pada tahun 2022 dan tahun 2023. Kemajuan ini didukung oleh berbagai kebijakan strategis, termasuk penyusunan Rencana Aksi Daerah KLA 2023–2027 sebagai pedoman jangka menengah dan panjang dalam mewujudkan lingkungan yang aman, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan anak. Pemerintah juga menginisiasi kajian pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sebagai langkah konkret dalam menyediakan layanan terpadu bagi korban kekerasan, khususnya anak dan perempuan, sesuai amanat Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU No. 12 Tahun 2022). Selain itu, partisipasi anak turut diperkuat melalui pengukuhan Forum Anak Nagan Raya (Fonara), yang menjadi ruang dialog antara anak dan pembuat kebijakan di daerah. Lingkungan pendidikan pun menjadi perhatian, ditandai dengan keberhasilan MIN 3 Nagan Raya memperoleh predikat Sekolah Ramah Anak dari Kementerian PPPA pada tahun 2022. Dengan perolehan skor evaluasi mandiri yang tinggi pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menargetkan peningkatan predikat menjadi Nindya pada penilaian KLA nasional berikutnya. Keseluruhan capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan anak yang berkelanjutan dan berbasis hak.



2.3.2.2.3. Pangan

Tanaman pangan merupakan salah satu subsektor dalam sektor pertanian yang mencakup tanaman padi dan palawija. Produksi padi sepanjang tahun 2018 mencapai 180.279 ton. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mempromosikan produksi pertanian dan telah mengadopsi beberapa tindakan perlindungan bagi petani. Pertanian (termasuk peternakan, kehutanan, dan perikanan) telah memberikan kontribusi sebesar 5,59% dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 dan memberikan peluang yang signifikan untuk berkontribusi dalam meningkatkan ketahanan pangan, penanggulangan kemiskinan, dan dinamika pertumbuhan ekonomi. Padi dan jagung merupakan bahan pokok di Kabupaten Nagan Raya yang menyumbang hampir keseluruhan dari total produksi sereal kabupaten.

➤ Padi

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah yang menjadi sentra produksi berbagai jenis komoditi pertanian, baik jenis tanaman pangan seperti padi, palawija, buah-buahan, dan sayuran, maupun jenis tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, kelapa dalam dan karet. Pada tahun 2014, produksi padi tercatat sebesar 153.875 ton. Angka ini terus mengalami peningkatan sampai Tahun 2018 yaitu mencapai sebesar 180.279 ton. Dari Tahun 2019 sd Tahun 2024 produksi padi Kabupaten Nagan Raya fluktuatif menurun yang salah satunya disebabkan oleh menurunnya luas area tanam. Tahun 2014, areal lahan yang ditanami padi sebanyak 33.242 Ha dan meningkat menjadi 34.527 Ha pada Tahun 2016. Namun demikian sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 luas area tanam fluiktuatif dan cenderung menurun. Tahun 2018, produksi padi di Kabupaten Nagan Raya mencapai 180.279 ton, tertinggi selama sepuluh tahun terakhir.

Tabel 2.59
Produksi Padi Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (ton)	153,875	166,202	170,151	164,408	180,279	130,582	144,685	107,023	94,223	60,838.1	65,459
Luas Area Tanaman (ha)	33,242	25,965	34,527	26,241	25,111	29,199	27,569	23,226	13,689	11,751	11,751
Luas Area Panen (ha)	31,403	25,969	26,177	23,156	24,866	17,888	19,685	14,561	12,563	10,731	10,731
Produktivitas Padi (ton/ha)	4.9	6.4	6.5	7.1	7.25	7.3	7.35	7.35	7.5	6	6.1

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya, Tahun 2025



➤ **Jagung**

Jenis tanaman jagung di Kabupaten Nagan Raya yang ditanam pada umumnya adalah jenis jagung manis, masyarakat Nagan Raya lebih suka menanam jagung jenis ini karena mudah pemasarannya. Jagung manis dapat ditanam di daerah dataran rendah dan dataran tinggi sampai ketinggian 900 meter dpl. Suhu ideal untuk pertumbuhan Jagung Manis adalah 21-30 derajat Celcius. Jagung manis membutuhkan sinar matahari yang cukup banyak dan lahan tidak boleh tergenang air. Pada musim kemarau baik ditanam di sawah tadah hujan yang ada air sedikit dan musim hujan ditanam di lahan kering atau tegalan, sangat cocok dengan karakteristik wilayah Kabupaten Nagan Raya. Sedang jenis jagung hibrida jarang ditanami oleh petani karena sulit pemasarannya dan harganya tidak sesuai dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Pada tahun 2014, produksi jagung mencapai 1.728 ton dan terus meningkat menjadi 5.600 ton pada Tahun 2019. Peningkatan produksi jagung ini tidak terlepas dari meningkatnya luas area tanam dari Tahun 2014 seluas 245 Ha menjadi 755 Ha pad Tahun 2019. Sedangkan sejak Tahun 2020 produksi jagung Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 5.268 ton dan Tahun 2024 kembali menurun menjadi 1.319,5 ton. Rincian produksi jagung Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel 2.60
Produksi Jagung Di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Produksi (ton)	1,728	1,696	2,108	1,602	5,363	5,600	5,268	3,223.9	1,652	1,218	1,319.5
Luas Area Tanaman (ha)	245	284	330	221	755	745	669	470	250	204	204
Luas Area Panen (ha)	240	212	281	208	650	640	602	399	236	203	203
Produktivitas (ton/ha)	7.2	8	7.5	7.7	8.25	8.75	8.75	8.08	7	6	6.5

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Nagan Raya, Tahun 2025

2.3.2.2.4. Pertanian

A. Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian

Secara Kelembagaan Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya telah terbentuk pada tahun 2019 berdasarkan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Nagan Raya. Urusan Pertanian pada Periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022 menjadi kewenangan dari Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya. Namun dalam pelaksanaannya, sehubungan dengan terbentuknya Dinas Pertanian pada Tahun 2019, maka sebagian periode Rencana Strategis tersebut

dilimpahkan pelaksanaan program dan kegiatan kepada Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya. Selama kurun periode 2020-2021 atau tepatnya 2 tahun Dinas Pertanahan berdiri secara otonom, pelaksanaan kebijakan dan sasaran pembangunan dibidang pertanahan telah dapat dilaksanakan dengan baik. Program pengurusan hak-hak atas tanah aset pemerintah telah dapat direalisasikan sertifikat sebanyak 48 persil yang tersebar di 10 Kecamatan. Selain itu juga telah dilaksanakan inventarisasi dan identifikasi tanah asset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang belum masuk dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.61
Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya sampai Tahun 2024

NO	INDIKATOR	KINERJA STANDAR (SATUAN)	KONDISI AWAL	TARGET							REALISASI						
			*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	66,2	70.23	75.44	80.32	85.14	61.34	67.63	71.01	83.25	89.58	90.02	98.45	69.86	64.80	68.28
2	Penyelesaian Kasus Tanah Negara	%	0	30	40	50	60	60	66	69	0	0	14,3	14,3	62	62.75	63

Sumber : *data awal 2017, BAPPEDA Kabupaten Nagan Raya tahun 2025



Capaian target yang didapatkan oleh Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya tidak terlalu maksimal, walaupun dalam jangka waktu 2 tahun terakhir luas lahan bersertifikat mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini berikut dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Pertanahan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2022	TARGET RPD		TARGET RRPD	TARGET 2024 HASIL RAKORTEK BANG	SKPK	SUMBER DATA
				2023	2024				
1	Persentase Luas Lahan Bersertifikat	%	69,86	67,63	71,01	71,01	71,01	Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan
2	Penyelesaian Kasus Tanah Nagara	%	62	66	69	69	69	Dinas Pertanahan	Dinas Pertanahan

Sumber: Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

B. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang telah dilakukan pengsertifikatan sampai saat ini sebanyak 242 persil baik tanah yang telah masuk dalam KIB maupun yang belum. Sedangkan tanah asset yang belum dilakukan pengsertifikatan sampai saat ini sebanyak 200 persil tanah yang telah masuk dalam KIB dan juga tanah yang teridentifikasi aset Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang belum masuk dalam KIB yang tersebar di semua kecamatan. Data asset Tanah pemerintah Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.63
Daftar Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang sudah
Sertifikat dan Belum Sertifikat Sampai Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah	Ket
1	Sertifikat	327 Persil	
2	Belum Sertifikat	461 Persil	
Total		788 Persil	

Sumber: Dinas Pertanahan Tahun 2025



Tabel 2.64
Luas Lahan Bersertifikat dalam Kabupaten Nagan Raya
Berdasarkan Jenis Hak Tahun 2024

No	Jenis Hak	Jumlah Hak	Luas Ha(Ha)
1	Hak Milik	4.268	1.493,07
2	Hak Guna Usaha (HGU)	48	71,04
3	Hak Guna Bangunan	32	2,56
4	Hak Pakai	224	74,27
5	Hak Waqaf	4	0,38
Jumlah		4,576	1,641.32

Sumber: Dinas Pertanahan Tahun 2025

Berdasarkan data dalam tabel di atas dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2024 jumlah sertifikat yang telah di keluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebanyak 4.528 buah dengan luas lahan yang telah disertifikasi seluas 4.576 Ha. Berdasarkan dari realisasi sertifikasi tersebut dibandingkan dengan luas wilayah Kabupaten Nagan Raya yang seharusnya bersertifikat yaitu seluas 170.309,03 Ha, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk melakukan sertifikasi secara bertahap oleh instansi terkait baik melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, IP4T dan Program pengurusan hak atas tanah pemerintah maupun tanah masyarakat miskin.

C. Penyelesaian Kasus Tanah Negara

Konflik pertanahan di Kabupaten Nagan Raya dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan seiring dengan meningkatnya kebutuhan tanah baik bagi masyarakat, pemerintah maupun swasta. Hal ini menjadi permasalahan yang sangat besar yang harus diselesaikan secara bertahap. Konflik agraria yang terjadi pada umumnya di Kabupaten Nagan Raya adalah masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha, Pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah dengan TNI/Polri dan juga antara masyarakat dengan TNI/Polri serta konflik antar masyarakat dengan masyarakat. Secara luasan lahan yang menjadi objek sengketa/konflik sejumlah 16.499 Ha. Koordinasi dan Pembentukan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan Penetapan lahan untuk eks Kombatan, korban konflik seluas 1.000 (ha) di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bupati Nagan Raya serta koordinasi penyediaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum lainnya. Selain itu pelaksanaan kegiatan dinas pertanahan yang telah dilaksanakan adalah pengadaan tanah untuk pembangunan bagi infrastruktur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah. Beberapa kebutuhan pengadaan tanah yang telah dilaksanakan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya adalah sebagaimana terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.65
Realisasi Penetapan Calon Lokasi Tanah untuk Pembangunan
Kepentingan Umum sampai Tahun 2024

No	Rencana Penggunaan	Luas	Lokasi	Keterangan
1	Pengadaan/Pengalokasian Tanah untuk Pusat Riset Perikanan Universitas Teuku Umar (UTU)	3 Ha	Blang Muling	Bekas Hak PT. USJ
2	Pengalokasian Tanah untuk pembangunan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Aceh	3 Ha	Suka Makmue	Ibukota Suka Makmue
3	Pembangunan GOR Mini Alue Bilie	-	Alue Bilie	Pelepasan HGU PT. Socfindo
4	Pembangunan Lembaga Pemasyarakatan(LAPAS)	5 Ha	Blang Sapek	Pelepasan HGU PT. USJ
5	Pembangunan Kantor ICMi ORDA Nagan Raya	0,1 Ha	Suka Makmue	Ibukota Suka Makmue
6	Pembangunan BBI Sentral	2 Ha	Blang Muling	Bekas Hak PT. USJ
7	Pengadaan Tanah Jalan Simpang Peut	0,0193 Ha	Simpang Peut	-
8	Pengadaan Tanah Jalan Ujong Pasie	0,236 Ha	Ujong Pasi	-

Sumber: Dinas Pertanahan, Tahun 2025

Tabel 2.66
Usulan Pelepasan Kawasan Hutan dan Hak Guna Usaha Raya Berdasarkan
Renstra Dinas Pertanahan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2023-2026

No	Usulan Pelepasan	Luas (Ha)	Lokasi	Ket
1	Hutan Produksi dan HPK	6.703,25	Kila	Tanah Objek TORA
2	Hutan Produksi Terbatas	909,11	Gunong Kong	Tanah Objek TORA
3	Hutan Produksi	2.249,72	Krueng Seumayam	Tanah Objek TORA
4	Kawasan Lindung Gambut	1.054,34	Kuala Seumayam	Tanah Objek TORA
5	Kawasan Lindung Gambut	1.379,46	Kuala Seumayam	Tanah Objek TORA
6	Kawasan Lindung Gambut	566,58	Kuala Seumayam	Tanah Objek TORA
7	Lahan HGU. PT. Socfindo Seumayam	421	Alue Bilie, Gunong Cut, Suka Raja	Kota Satelit
Jumlah		13,274.46		

Sumber: Dinas Pertanahan, Tahun 2025

Berdasarkan data di atas dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari dibentuknya Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) oleh pemerintah yaitu memberikan asset dan akses tanah kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengusulkan kepada Kementerian terkait untuk dilakukan pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat sebagai objek Tanah Reforma Agraria (TORA). Selain itu dalam rangka pengembangan Kota Alue Bilie untuk dimasa yang akan datang, mengingat saat ini lahan yang tersedia untuk pengembangan tidak ada, maka Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah mengusulkan kepada PT. Socfindo dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia untuk dilepaskan sebahagian Lahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Socfindo Seumayam sebagai lahan untuk pembangunan Kota Satelit Alue Bilie seluas 421 Ha

2.3.2.2.5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan di Kabupaten Nagan Raya dilakukan dengan peningkatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan penerapan teknologi tepat guna bagi SKPK pengelola persampahan. Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbulan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 sebesar 16,92 persen dan terus meningkat menjadi 51,43 persen pada tahun 2024. Untuk lebih jelas bisa dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.67
Timbulan Sampah yang Ditangani Di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

No	Indikator	Tahun										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Volume Timbulan Sampah yang ditangani (m3)	6.561	7.415	6.554	7.952	16.559	9.565	16.310	11.469	6.207	40.100	40.150
2	Total Timbulan Sampah (m3)	38.758	38.331	48.650	40.654	41.449	42.158	42.434	43.488	25.232	78.020	78.070
Timbunan sampah yang ditangani (%)		16,92	19,34	17,581	19,56	39,95	22,69	38,44	26,37	24,59	51,38	51,43

Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



Disamping pelayanan persampahan, Kinerja pelayanan bidang lingkungan hidup juga menangani tindak lanjut terhadap pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pelaku usaha/industri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini.

Tabel 2.68
Kasus Pencemaran Air yang di Akibatkan oleh Limbah Industri
Tahun 2018-2024

No	Uraian	Tahun						
		*2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Pencemaran Air dari Limbah Perusahaan	1 kasus	4 kasus	10 kasus	4 kasus	2 kasus	1 Kasus	0
2	Kasus Pencemaran Air dari Limbah Perusahaan yang Tertangani	1 kasus	4 kasus	10 kasus	4 kasus	2 kasus	1 kasus	0
Persentase Penyelesaian Pencemaran Air		100	100	100	100	100	100	-

Sumber : *data awal 2018, DLH Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Disadari bersama bahwa dalam pengelolaan sampah tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Optimalisasi Ruang Terbuka Hijau yang masih rendah sebesar 7,80% dari 30 % dari luas kawasan perkotaan sebesar 743.97 Ha. Dari segi Lingkungan Hidup banyak rencana target yang tidak tercapai sesuai yang telah direncanakan seperti yang dijelaskan dibawah ini yaitu:

- 1. Tidak tercapainya penyusunan RPPLH Kabupaten Nagan Raya
- 2. Tidak tercapainya intergrasi RPPLH dalam rencana pembangunan Kabupaten Nagan Raya
- 3. Tidak tercapainya penyelenggaraan KLHS untuk K/R/P tingkat daerah Kabupaten Nagan Raya
- 4. Tidak tercapainya Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah.

2.3.2.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Dokumen Kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Kartu Tanda Penduduk elektronik, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil. Data kepemilikan Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 sampai dengan 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.69
Jumlah Kepemilikan Akte Kelahiran, KTP, KK dan KIA
Tahun 2014 – 2024

No	URAIAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Akta Kelahiran	25.212	43.953	57.541	59.390	56.360	70.009	76.048	80.821	87.655	92.054	98.493
2	Kartu Tanda Penduduk	103.648	97.286	100.374	101.842	109.252	114.508	114.508	115.557	118.790	121.839	124.722
3	Kartu Keluarga	36.905	41.503	43.207	43.699	46.398	41.303	46.464	34.097	55.563	56.837	57.956
4	Kartun Identitas Anak	-	-	-	-	0	11	6.409	6.941	17.785	20.352	22.175

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Tabel 2.70
Rasio Kepemilikan KTP, Akte Kelahiran Persatuan Penduduk
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	URAIAN	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Kepemilikan KTP per Satuan Penduduk	84,36	81,89	84,12	85,21	90,77	94,44	94,16	95,13	96,87	99,54	98,45
2	Rasio Bayi ber Akte Kelahiran	54,62	66,52	84,89	77,96	77,28	76,51	82,25	81,68	87,03	73,24	74,77

Sumber : Disdukcapil Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan 2024 seiring dengan semakin meningkatnya sarana dan prasarana serta peralatan administrasi kependudukan di Kabupaten Nagan Raya, jumlah kepemilikan akte kelahiran, KTP, KK dan KIA terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hal ini dapat dilihat pada tabel 2.71 diatas. Selain faktor pelayanan yang terus meningkat faktor pertumbuhan penduduk juga berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kepemilikan akte kelahiran, KTP, KK dan KIA di Kabupaten Nagan Raya.

Demikian juga dengan rasio kepemilikan KTP persatuan penduduk dan Rasio Bayi ber Akte Kelahiran terus meningkat. Pada Tahun 2014 rasio kepemilikan KTP persatuan penduduk di Kabupaten Nagan Raya sudah berada diatas 80 persen dan terus mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2024 menjadi 98,45 persen. Artinya tinggal 1.55 persen penduduk Kabupaten persatuan penduduk Nagan Raya yang belum memiliki KTP.

2.3.2.2.7. Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong

Indeks Desa Membangun Kabupaten Nagan Raya baru keluar dari Tahun 2019. Pada tahun tersebut jumlah desa sangat tertinggal ada 18 desa dan desa mandiri tidak ada. Kemudian pada tahun 2022 desa sangat tertinggal tinggal 1 desa dan desa mandiri menjadi 10 desa. Sementara pada Tahun 2023 dan 2024 desa sangat tertinggal tidak ada. Hal ini disebabkan karena terus membaiknya Pembangunan ekonomi, ketahanan pangan dan tipologi sosial pada Masyarakat desa di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.71
Daftar Status Indeks Desa Membangun
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019-2024

NO	STATUS IDM	JUMLAH DESA					
		*2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	SANGAT TERTINGGAL	18	7	6	1	0	0
2	TERTINGGAL	117	92	76	30	20	20
3	BERKEMBANG	71	107	119	127	119	119
4	MAJU	16	16	21	54	66	66
5	MANDIRI	0	0	0	10	17	17
TOTAL		222	222	222	222	222	222

Sumber: *data awal 2019, DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya,Tahun 2025

2.3.2.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk serta membentuk keluarga yang berkualitas. Berikut adalah Indikator dalam urusan pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2024.



Tabel 2.72
Data Indikator Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018-2024

NO	Indikator	*2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	2.15	2.17	2.77	2,77	2.63	1.83	1.81
2.	Total Fertility Rate	2	2,5	2.1	2,1	0	2.26	2.2
3.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3	3	3	3	3	2.21	3.97
4.	Rasio Aseptor KB	86	83	69	69	56,02	65.33	66.55
5.	Angka Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi Perempuan menikah usia 15 - 49 tahun	86,0	83.0	69,0	69,0	57,46	63.33	66.55
6.	Angka kelahiran remaja (Perempuan usia 15-19)per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	0,87	0,80	0,87	0,87	1.45	21.6	21.4
7.	Rasio petugas pembantu Pembina KB desa (PPKBD) setiap desa	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: *data awal 2018, DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, Kabupaten Nagan Raya menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga melalui berbagai program strategis yang mendukung pencapaian Indeks Pembangunan Keluarga (IBANGGA). IBANGGA sendiri merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari berbagai aspek, seperti ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Pada tahun-tahun awal, yaitu 2021 dan 2022, meskipun data angka IBANGGA secara spesifik belum dipublikasikan secara luas, berbagai inisiatif penting telah dilaksanakan. Salah satu upaya utama adalah pelaksanaan Program Bangga Kencana dan pembentukan Forum GenRe (Generasi Berencana) di kalangan remaja. Program ini bertujuan memperkuat peran keluarga dalam membimbing generasi muda agar menjauhi pernikahan dini, penyalahgunaan narkoba, serta seks bebas. Program tersebut secara langsung mendukung peningkatan ketahanan keluarga sebagai salah satu indikator dalam penilaian IBANGGA.

Memasuki tahun 2023, capaian IBANGGA Kabupaten Nagan Raya menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan nilai mencapai 63,94. Angka ini mencerminkan bahwa berbagai program yang dijalankan oleh pemerintah daerah telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan keluarga. Tidak hanya itu, pendekatan lintas sektor juga mulai diperkuat melalui

keterlibatan berbagai pihak seperti organisasi masyarakat, akademisi, dan tokoh agama dalam mendukung kebijakan yang berorientasi pada penguatan fungsi keluarga.

Seiring berjalannya waktu, fokus pemerintah daerah juga diarahkan pada isu-isu yang sangat relevan dengan kesejahteraan keluarga, seperti penurunan angka stunting dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Upaya ini ditandai dengan pelaksanaan rapat koordinasi lintas sektor serta penerimaan insentif fiskal dari pemerintah pusat sebesar Rp11,64 miliar, yang menjadi bukti nyata keberhasilan daerah dalam menangani isu-isu tersebut.

Selain itu, pada tahun 2024 hingga 2025, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga mulai memperluas intervensi melalui sektor pendidikan dan literasi keluarga. Pengukuhan "Bunda Literasi" serta penyusunan Peraturan Bupati tentang Perpustakaan Gampong menunjukkan langkah konkret dalam mendekatkan akses literasi ke tingkat keluarga dan desa. Hal ini dipandang penting dalam membentuk keluarga yang tangguh secara sosial dan intelektual, serta mendukung tercapainya indikator kebahagiaan dalam pengukuran IBANGGA.

Pemerintah daerah juga melakukan optimalisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) agar lebih efektif dalam mendanai program-program yang berorientasi pada pembangunan keluarga. Sinergi antara eksekutif dan legislatif terus diperkuat agar pengambilan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, perkembangan IBANGGA di Kabupaten Nagan Raya selama tiga tahun terakhir menunjukkan arah yang positif. Meskipun data tahunan secara rinci belum seluruhnya tersedia, berbagai inisiatif yang dijalankan, baik dari sisi advokasi remaja, peningkatan literasi keluarga, penanggulangan stunting, hingga pengentasan kemiskinan ekstrem, telah memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan keluarga. Pencapaian nilai IBANGGA sebesar 63,94 pada tahun 2023 menjadi indikator awal dari keberhasilan tersebut, yang diharapkan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.



2.3.2.2.9. Perhubungan

Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas daerah tercermin dari rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan. Rasio Panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Selama Tahun 2017-2024, rasio Panjang jalan Kabupaten Nagan Raya terhadap kendaraan penumpang mengalami penurunan. Hal tersebut juga sangat dipengaruhi dari pertumbuhan pertumbuhan pembangunan jalan dan pertumbuhan jumlah kendaraan penumpang. Masih minimnya sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara serta belum optimalnya pemanfaatan angkutan umum untuk mobilitas masyarakat.

Tabel 2.73
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024

No	Uraian	Tahun							
		*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jalan Kabupaten	924,42	924,42	924,42	924,42	924,42	924.421	924.421	924.421
2	Jumlah Kendaraan Penumpang	202	205	216	-	-	257	274	296
Rasio		4,58	4,51	4,28	-	-	3.60	3.38	3.13

Sumber : *data awal 2017, Dinas Perhubungan Kabupaten Nagan Raya,
Tahun 2025

Disamping itu, keberadaan Bandara Cut Nyak Dhien di Kabupaten Nagan Raya menjadi wakil bagi Kawasan barat selatan dalam memberikan pelayanan akses transportasi udara dengan Panjang landasan pacu yang dimiliki sepanjang 1.800 meter. Sesuai dengan kondisi geografis lokasi bandara sangat sesuai karena berada pada posisi membentang sepanjang pinggir pantai Kecamatan Kuala Pesisir. Kemudian bandara juga berada pada posisi strategis yang diapit oleh beberapa kabupaten antara lain: Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Simeulue dan Gayo Lues.

Mengingat dalam rangka pengembangan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya menjadi Bandara Embarkasi Haji dan Umrah wilayah pantai Barat Selatan Aceh di masa yang akan datang, maka perlu mendapatkan pertimbangan dalam rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) tentang perpanjangan lanjutan seluas 150m x 800m posisi pada ujung R/W 33 dari 1.800 meter menjadi 2.600 meter agar bisa di darati jenis Boing 737 Series.

Adapun permasalahan dan kendala yang mungkin ada salah satunya harga untuk pembebasan tanah. Perkiraan nilai harga tanah untuk pembangunan perpanjangan kandasn pacu Cut Nyak Dhien Nagan Raya bisa



mencapai Rp.300.000 per meter atau lebih, ditambah dengan nilai ganti rugi tanaman pper batang sekitar Rp. 1.000.000.-

2.3.2.2.10. Komunikasi dan Informatika dan Statistik

Komunikasi dan Informatika Perkembangan teknologi informasi semakin menunjukkan kemajuan yang lebih baik di Kabupaten Nagan Raya. Layanan internet sebagai kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi yang aktual dan cepat telah berkembang di Kabupaten Nagan Raya. Dukungan infrastruktur teknologi informasi dari berbagai investasi dunia usaha/swasta dan BUMN, merupakan pendorong semakin teraksesnya layanan internet dan informasi bagi masyarakat Layanan komunikasi berupa telepon seluler/ handphone sudah menjangkau seluruh kecamatan di Kabupaten Nagan Raya. Penggunaan handphone merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari saat ini. Kondisi ini menyebabkan penggunaan telepon rumah sebagai sarana komunikasi semakin berkurang. Ketercapaian dari hal ini dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 2.74
Indikator Kinerja Utama (IKU) Urusan Komunikasi dan Informatika dan Statistik
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL TAHUN 2020	TARGET RPD		TARGET RKPD	TARGET 2024 HASIL RAKORTEK BANG	SKPK
				2023	2024			
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	69,86	67,63	71,01	71,01	71,01	DISKOMIN FOTIK
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	85	86	87	87	85	DISKOMIN FOTIK
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	%	85	86	87	87	85	DISKOMIN FOTIK
4	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada/tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	BPS
5	Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada/tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	BPS
6	Buku "PDRB"	Ada/tidak ada	Ada	ada	ada	ada	ada	BPS

Sumber: Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



Tabel 2.75
Capaian Indikator Kinerja Utama Urusan Komunikasi dan Informatika
dan Statistik Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2018-2024 (persen)

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL	TARGET					REALISASI						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0,4	N/A	N/A	0,44	0,44	0,51	N/A	N/A	0,51	0,51	0.51	0.61	1.00
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	80	85	85	85	85	95	85	85	85	85	85	86	87
3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon	74	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	86	87

Sumber: Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.3.2.2.11. Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Kabupaten Nagan Raya memiliki Potensi Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) yang cukup menggembirakan, untuk pengembangan UMKM di Kabupaten Nagan Raya baik segi Sumber Daya Manusia maupun Sarana dan Prasarana UMKM jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah, perlu adanya pelatihan dan pendampingan membantu membuka pasar agar UMKM di Kabupaten Nagan Raya bisa lebih berkembang.

Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat Kecamatan dan Gampong. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan Desa/Gampong. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota. Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.76
Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

No	Tahun	Uraian				
		Jumlah Koperasi (Unit)	Jumlah Koperasi Aktif (Unit)	Jumlah Koperasi Tidak Aktif (Unit)	Jumlah Koperasi Yang Dibina (Unit)	Jumlah Anggota Koperasi (Orang)
1	2014	201	83	113	20	6.330
2	2015	201	83	113	20	6.370
3	2016	190	83	113	20	6.400
4	2017	194	85	109	20	9.519
5	2018	170	85	85	20	8.964
6	2019	141	87	54	25	5.859
7	2020	138	90	48	25	7.084
8	2021	143	95	48	30	7.213
9	2022	147	99	48	35	10.109
10	2023	207	146	61	55	10.070
11	2024	231	174	57	63	10.299

Sumber : Disperindagkop & UKM Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Pada Tahun 2014 Jumlah Koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 201 unit, angka tersebut menurun pada Tahun 2016 sebanyak 190 unit. Pada tahun 2017, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 194 unit koperasi, Angka tersebut menurun menjadi 143 unit pada tahun 2021 dan meningkat pada tahun 2024 sebanyak 231 unit, jumlah koperasi aktif pada tahun 2014 sebanyak 83 unit dan terus meningkat dari tahun ke tahun kurun waktu sepuluh tahun terakhir koperasi yang aktif sebanyak 174 unit, dengan

jumlah anggota koperasi pada tahun 2024 sebanyak 10,299 orang, Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi

masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan dengan lahirnya Undang-Undang tentang Desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan Desa/Gampong.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota.



Tabel 2.77
Jumlah Industri Usaha Mikro Kecil Menengah Tenaga Kerja dan Omset/Bulan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Uraian	TAHUN										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Industri Kecil (unit)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	1.183	3.332	3.834	1.080	1.884
2	Jumlah Usaha Mikro (unit)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	7.130	7.130	7.629	0	0
3	Jumlah Tenaga Kerja pada Industri (Orang)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	2.740	7.826	8.713	1.928	3.007
4	Jumlah Tenaga Kerja pada UMKM (orang)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	4.950	4.961	4.291	0	0
5	Jumlah Omset UMKM/bulan (Rp/Juta)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	20	21	62	0	0

Sumber : Disperindagkop & UKM Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



Kondisi sektor industri tahun 2020 didominasi usaha kecil dan mikro, dengan jumlah industry kecil pada tahun 2020 sebanyak 1.183 unit, Tahun 2021 sebanyak 3.332, Tahun 2022 sejumlah 3.834, Tahun 2023 1.080 dan pada Tahun 2024 sebanyak 1.884 unit. Sedangkan jumlah usaha mikro sebanyak 7.130 pada Tahun 2020, pada Tahun 2021 sebanyak 7.130 unit. Kemudian pada tahun 2022 sebanyak 7.629 unit. Jumlah pekerja pada industry kecil Tahun 2020 sebanyak 2.740 orang, pada Tahun 2021 sebanyak 7.826 Tahun 2022 sebanyak 8.713 kemudian tahun 2023 sebanyak 1.928 dan jumlah pekerja Tahun 2024 sebanyak 3.007 orang.

2.3.2.2.12 Penanaman Modal

Pertumbuhan ekonomi identik dengan berapa besar investasi yang masuk dan berapa banyak jumlah investor baik dari PMDN maupun PMA yang ikut menanamkan modalnya disuatu daerah Jumlah Investor di Kabupaten Nagan Raya, baik Investor Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing Investasi di sektor Kelistrikan merupakan Investasi yang paling dominan di Kabupaten Nagan Raya, Investasi sektor kelistrikan seperti Pembangunan PLTU di Suak Puntong, PLTA di Kecamatan Beutong. Serapan tenaga kerja lokal dan asing selama 10 (Sepuluh) tahun terakhir berfluktuatif tiap tahunnya, tahun 2015 terdapat 19 investor dikabupaten Nagan Raya, meskipun berfluktuatif dalam 10 tahun terakhir , tetapi pada tahun 2024 jumlah investor di Kabupaten Nagan Raya mengalami kenaikan pesat yaitu mencapai 1173 investor . Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78
Investor Berskala Nasional (PMA/ PMDA) Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2024

No	Uraian	Tahun									
		*2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	PMA	6	5	11	11	11	11	0	0	0	0
2.	PMDN	13	6	36	38	36	36	7	35	860	1173
	JUMLAH	19	11	47	49	47	47	7	35	860	1173

Sumber : *data awal 2015, DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Nilai investasi Berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya selama 11 (Sebelas) tahun terakhir bersifat fluktuatif. Pada tahun 2014, nilai investasi berskala Nasional di Kabupaten Nagan Raya sejumlah Rp. 2.272.901.719.455,-. Pada tahun 2020 Nilai Investasi Berskala Nasional Di Kabupaten Nagan Raya menurun sejumlah Rp. 106.597.693.096 dan terus meningkat pada tahun 2024 sebesar Rp. 999.357.601.352,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.79
Pertumbuhan Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Kabupaten Nagan Raya 2014-2024

NO	Tahun	Uraian		
		PMA	PMDN	Nilai Investasi (PMA+PMDN)
1	2014	2.550.941.000	2.251.350.778.455	2.272.901.719.455
2	2015	177.149.935.170	83.170.758.724	260.320.693.894
3	2016	89.792.941.000	406.269.228.604	490.062.170.374
4	2017	8.689.110.204	248.269.228.604	257.156.203.571
5	2018	18.980.967.123	196.385.619.728	215.366.586.851
6	2019	25.731266.739	182.220.790.505	207.952.057.244
7	2020	28.654.645.200	77.943.047.896	106.597.693.096
8	2021	2.028.896.955.000	107.935.867.235	2.136.832.822.235
9	2022	1.547.772.544.069	1.042.858.005.684	2.590.630.549.753
10	2023	3.198.857.247.185	515.348.416.862	3.714.205.664.047
11	2024	428.306.974.337	517.050.627.015	999.357.601.352

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Adalah Jumlah Tenaga Kerja PMA ditambah dengan Jumlah Tenaga Kerja PMDN. Jumlah penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014 sampai dengan 2024 sangat berfluktuatif. Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan dengan jumlah seluruh perusahaan (PMA/PMDN). Rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2014 sampai dengan 2024 juga sangat berfluktuatif, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 2.80
Tenaga Kerja Perusahaan (PMDN/PMA) Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

NO	Tahun	Uraian				
		Tenaga Kerja PMA	Tenaga Kerja PMDN	Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja	Jumlah PMA/PMDN	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja
1	2014	1.958	393	2.351	50	47,02
2	2015	24	2.697	2.721	19	143,21
3	2016	65	3.087	3.152	11	286,54
4	2017	1.831	6.905	8.737	43	203,18
5	2018	1.793	6.873	8.666	49	176,86
6	2019	1.761	5.704	7.465	47	158,83
7	2020	2.164	6.147	8.311	47	176,83
8	2021	190	58	248	7	35,43
19	2022	1.044	155	1.199	35	34,26
10	2023	1.584	736	2.320	35	66,29
11	2024	396	332	728	35	20,08

Sumber : DPMTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.3.2.2.13. Kepemudaan dan Olah Raga

Dalam upaya meningkatkan pembangunan, pemuda berinisiatif untuk mengambil peran guna untuk mengoptimalkan dan membantu pemerintah dalam memajukan Kabupaten Nagan Raya. Hal ini ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi kepemudaan sebagai wujud dari eksistensi dan sebagai salah satu wadah yang menjadi perwakilan dari pemuda di Kabupaten Nagan Raya.

Olahraga merupakan suatu fenomena yang mendunia dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Olahraga menjadi sarana strategis untuk membangun kepercayaan diri, identitas bangsa, dan kebanggaan nasional. Berbagai kemajuan pembangunan di bidang keolahragaan yang bermuara pada meningkatnya budaya dan prestasi olahraga. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah membangun dan mengembangkan berbagai sarana olahraga yang tersebar di kecamatan dan ibukota Kabupaten Nagan Raya.

2.3.2.2.14. Kebudayaan

Kabupaten Nagan Raya memiliki kekayaan berupa keragaman adat, Adat istiadat, Kesenian dan Budaya dengan penduduknya yang multi etnis (hetero etnis). Adapun penduduk Kabupaten Nagan Raya terdiri dari suku Aceh (Penduduk pribumi Nagan Raya), suku Jawa, suku Gayo dan suku Batak. Kesenian Tradisional Daerah tercatat sebanyak 235 group kesenian dan 110 sanggar. Adapun group dan sanggar kesenian tersebut terdiri dari Kesenian Tradisional, Kesenian Kreasi Baru dan Kesenian bernuansa Islami. Berdasarkan data dari tahun 2012 s/d 2016 hanya terdapat 3 cagar budaya yang dikelola secara terpadu yaitu Mesjid Jamik Syaikhuna Gudang Buloh, Mesjid Peuleukung dan Museum Alquran. Untuk tahun 2017 s/d 2020 bahkan sudah tidak ada lagi cagar budaya yang dikelola secara terpadu. Untuk benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan ditahun 2017 dan 2018 berjumlah 3 dan bertambah menjadi 4 benda, situs dan kawasan benda, situs dan kawasan yang dilestarikan ditahun 2019. Cagar budaya merupakan warisan budaya yang bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah ilmu pengetahuan, Pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Jenis-jenis dari cagar budaya tersebut diantaranya adalah Makam Bernilai Historis seperti Makam Tgk. Chik Di Kila yang berlokasi di Gampong Kila, Makam Tgk. Dek Nyak Dhien yang berlokasi di Gampong Cot Teuku Dek dan Cagar Budaya Kawasan seperti Mesjid Syaikhuna Gudang Buloh yang berlokasi di Gampong Ujung Pasie.

Berdasarkan hasil survey dan pendataan kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim fasilitas, bahkan museum tempat menyimpan barang kebudayaan tidak ada di Kabupaten Nagan Raya. Sehingga banyak barang kebudayaan berupa Manuskrip, benda budaya lainnya tidak tersimpan dengan benar, karena masih disimpan di rumah pemilik atau pewaris benda tersebut. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kondisi barang tersebut karena perawatan benda budaya sangat khusus. Kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya membutuhkan fasilitas tambahan yang mendukung seperti Taman Budaya dan Rumah Adat. Dengan adanya fasilitas Taman Budaya dalam hal ini dapat menciptakan kompetisi rutin antar sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Nagan Raya khususnya sekolah-sekolah penggerak yang menggunakan kurikulum merdeka belajar dimana pelajaran intinya diutamakan pelajaran seni budaya yang menonjolkan seni tradisional daerah setempat. Selain itu Rumah Adat juga menjadi prioritas utama sebagai simbol ikon budaya tradisional di Kabupaten Nagan Raya.

Pengembangan sektor kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya masih belum optimal. Gedung kesenian yang ada di Kabupaten Nagan Raya hanya tersedia 1 unit. Begitu juga dengan organisasi yang berkiprah di bidang seni di Kabupaten

Nagan Raya hanya 1 organisasi, sementara Group Kesenian di Kabupaten Nagan Raya semakin meningkat. Pemerintah perlu memberikan perhatian terhadap pengembangan dan pelestarian kebudayaan karena sektor kebudayaan akan dapat menunjang sektor pariwisata di Kabupaten Nagan Raya. Hal ini disebabkan karena pilar pariwisata bertumpu pada wisata budaya dan wisata alam. Potensi bidang kebudayaan di Kabupaten Nagan Raya akan terjaga kelestariannya bila adanya lembaga budaya yang terus menerus melaksanakan peran pelestarian.

Namun demikian terjadi juga degradasi nilai-nilai kearifan budaya lokal dimana generasi muda dipengaruhi oleh budaya asing. Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu daerah di Aceh yang kaya akan kearifan budaya lokal, seperti seni tari tradisional (Rapai, Seudati, Bineuh), tradisi Reuhab dan Meugang, serta warisan arsitektur religius seperti Masjid Jamik Abu Habib Muda. Namun demikian, pelestarian budaya lokal di daerah ini menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya minat generasi muda terhadap seni dan budaya tradisional. Banyak anak muda yang cenderung lebih tertarik pada budaya modern atau asing, sehingga sanggar-sanggar seni tradisional kesulitan meregenerasi pelaku seni.

Selain itu, terbatasnya sarana dan prasarana juga menjadi kendala dalam mengembangkan kesenian lokal. Banyak pelaku seni mengeluhkan kurangnya fasilitas untuk pelatihan maupun pertunjukan. Arus modernisasi dan globalisasi turut memperburuk keadaan, karena budaya asing yang masuk melalui media sosial dan hiburan digital secara perlahan mengikis nilai-nilai lokal yang sebelumnya dijunjung tinggi. Meskipun lembaga-lembaga budaya seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan Dewan Kesenian Daerah telah dibentuk, peran mereka dalam menyosialisasikan dan menghidupkan kembali tradisi di tingkat gampong (desa) dinilai masih belum optimal.

Permasalahan lainnya adalah belum maksimalnya pengembangan pariwisata berbasis budaya lokal. Padahal, Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi besar untuk memadukan budaya dan pariwisata sebagai daya tarik bagi wisatawan. Namun, hambatan seperti infrastruktur yang belum memadai, kurangnya promosi, serta keterbatasan kapasitas masyarakat lokal sebagai pelaku wisata membuat sektor ini belum berkembang sebagaimana mestinya. Terakhir, terdapat juga tantangan dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dengan konteks sosial dan keagamaan saat ini, seperti menjaga orisinalitas arsitektur masjid kuno namun tetap relevan dengan kebutuhan ibadah dan masyarakat modern. Semua persoalan ini menunjukkan bahwa tanpa strategi pelestarian yang terarah dan kolaboratif, budaya lokal di Nagan Raya berisiko semakin terpinggirkan.

2.3.2.2.15. Perpustakaan

Kabupaten Nagan Raya telah memiliki perpustakaan umum, sekolah, perguruan tinggi dan khusus. Perpustakaan umum terdiri dari perpustakaan kabupaten, kecamatan dan desa. Perpustakaan sekolah terdapat di sekolah SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/K/MA sedangkan perpustakaan perguruan tinggi terletak di STIAPEN Nagan Raya. Perpustakaan khusus adalah Perpustakaan Khusus Kejaksaan Negeri Suka Makmue, Perpustakaan Khusus Mahkamah Syariah Suka Makmue, dan Perpustakaan Khusus Statistik Nagan Raya.

Pengukuran Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan salah satunya yaitu Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat atau IPLM. IPLM merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu:

1. Pemerataan layanan perpustakaan
2. Ketercukupan koleksi
3. Ketercukupan tenaga perpustakaan
4. Tingkat kunjungan masyarakat per hari
5. Jumlah perpustakaan ber-SNP
6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/ promosi
7. Anggota perpustakaan

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Nagan Raya didapatkan dengan mengukur unsur IPLM. Berdasarkan data IPLM Kabupaten/kota di Provinsi Aceh sampai dengan tanggal 26 februari 2024 Nilai IPLM Kabupaten Nagan Raya Sebesar 52,02 , masih lebih rendah jika dibandingkan dengan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Aceh yang sudah mencapai 66,23.

2.3.2.2.16. Kearsipan

Bidang kearsipan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nagan Raya mempunyai tugas untuk menyimpan arsip berupa rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Selain itu, arsip yang disimpan oleh bidang kearsipan menjadi sumber informasi yang terpercaya dan terjamin. Dengan adanya arsip yang kolektif dapat menjamin keselamatan suatu kegiatan ataupun peristiwa sebagai barang bukti tertulis baik itu dalam bentuk tulisan, gambar dan sebagainya. Bentuk arsip yang disimpan berupa arsip aktif, inaktif serta statis dan dinamis.



Tabel 2.81
Jumlah Daftar Berkas Arsip Aktif, Arsip Inaktif dan Arsip Statis

NO	ARSIP	JUMLAH	KET
1	Arsip Aktif	336	
2	Arsip Inaktif	254	
3	Arsip Statis	110	
4	Arsip yang dimasukkan dalm SIKN melalaui JIKN	16	

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tahun 2025

Dari data diatas dapat diukur tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja.

2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.3.3.1 Pariwisata

Kabupaten Nagan Raya memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik serta tersebar di seluruh kecamatan. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya belum dikelola dengan baik. Hal ini terlihat dari beberapa kawasan wisata yang sudah dijadikan tujuan wisata, belum didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai yang dapat menunjang sektor pariwisata. Begitu juga dengan promosi wisata belum dikemas dengan baik oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Jika sektor pariwisata dikembangkan dengan baik maka akan memberikan dampak yang cukup besar bagi pengembangan ekonomi daerah serta dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya kedepan akan mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu antara wisata sungai, pantai, dan danau serta wisata religi. Pemerintah juga perlu mengupayakan kerja sama lintas sektor dalam mengemas sektor wisata baik promosi, pemasaran serta kerjasama pengembangan atau pengelolaan sektor wisata dengan pihak swasta. Sebaran obyek dan daya tarik wisata di Kabupaten Nagan Raya untuk lebih jelas dapat dilihat sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.82
Objek Wisata Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

NO.	KECAMATAN	JENIS OBJEK WISATA	JUMLAH OBJEK WISATA
1	Beutong	Wisata Alam Krueng Isep	4
		Bendungan Irigasi Jeuram	
		Pemandian Alue Gantung	
		Situs Masjid Dayah	
2	Kuala Pesisir	Pantai Indah Naga Permai	7
		Pantai Lhok Raja	
		Pantai Kampung Pulo	
		Pantai Kuala Tadu	
		Pantai Seunagan	
		Pantai Nagaya	
		Kolam Pemandian Kuala Baro	
3	Tripa Makmur	Pantai Kuala Tripa	8
		Pantai Kuala Sikandang (Suak Dama)	
		Pantai Ujong Raja	
		Situs Ujong Raja	
		Sungai (Krueng) Suak Raya	
		Kuburan Keramat Kuala Tripa	
		Guci Kuno Masjid Nurul Taqwa	
		Sungai (Krueng) Tripa	
4	Tadu Raya	Danau Laot Tadu	4
		Alue Jok	
		Alue Maneh	
		Danau Krueng Itam	
5	Seunagan Timur	Waduk Kandeh	3
		Makam & Masjid Habib Muda Seunagan	
		Situs Masjid Teungku Chik Di Kila	
6	Kuala	Situs Masjid Jami' Syaikhuna (Gudang Buloh)	2
		Makam Habib Muda Di Pulo Ie	
7	Suka Makmue	Masjid Baitul A'la (Masjid Giok)	6
		Taman Ratu Balqis	
		Monumen Gelora Tani	
		Museum Al-Quran	
		Taman Makam Pahlawan	
		Taman Hutan Kota Suka Makmue	
8	Darul Makmur	Situs Kerajaan Seuneu'am	3
		Alue Batee Puteh	
		Alue Waki	



9	Beutong Ateuh Banggalang	Panorama Gunung Singgah Mata	6
		Situs Makam Tgk Baharuddin	
		Makam Tengku Bantaqiah	
		Sungai (Krueng) Beutong	
		Situs Persinggahan Cut Nyak	
		Situs Kerajaan Beutong	
		Banggalang	
10	Seunagan	Bendungan Irigasi Jeuram	8
		Situs Rumah Raja Seunagan	
		Makam Said Abdurrahim Rahmani	
		Makam Nek Endatu Kuta Aceh	
		Situs Pengibaran Bendera Merah Putih	
		Situs Masjid Tuha Parom	
		Situs Masjid Tuha Nigan	
		Sungai (Krueng) Inong	
Jumlah			51

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025

Untuk objek wisata di Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 di Kecamatan Beutong terdapat 4 objek wisata. Kecamatan Kuala Pesisir terdapat 7 objek wisata. Kecamatan Tripa Makmur terdapat 8 objek wisata. Kecamatan Tadu Raya terdapat 4. Kecamatan Seunagan Timur terdapat 3 objek wisata. Kecamatan Kuala terdapat 2 objek wisata. Kecamatan Suka Makmue terdapat 6 objek wisata. Kecamatan Darul Makmur terdapat 3 objek wisata. Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang terdapat 6 objek wisata. Kecamatan Seunagan terdapat 8 objek wisata.

Tabel 2.83
Jumlah Sarana/Fasilitas Pariwisata (unit)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Hotel/Wisma /Losmen	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5
2	Rumah Makan /Restoran	25	26	27	116	116	116	116	116	116	116	117
3	Warung Kopi/Café	27	28	30	23	23	23	23	23	23	25	25
4	Mushalla	n.a	n.a	n.a	3	3	3	4	4	2	2	2
5	MCK	n.a	n.a	n.a	2	2	2	3	3	7	4	4

Sumber : Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, Tahun 2025



Tabel diatas menggambarkan bahwa jumlah ketersediaan sarana akomodasi berupa hotel/wisma/losmen sebagai salah satu pendukung pariwisata di Kabupaten Nagan Raya masih sangat minim. Terdapat 5 unit hotel/wisma/losmen yang dapat dimanfaatkan oleh wisatawan dengan fasilitas memadai. Untuk meningkatkan minat kunjungan wisatawan bukan hanya fasilitas akomodasi yang sangat diperlukan tapi juga sangat didukung dengan sarana pendukung di kawasan wisata yang memadai.

2.3.3.2 Pertanian

Pertanian adalah kegiatan memanfaatkan sumber daya hayati, seperti tumbuhan, hewan, jamur, alga, dan bakteri, untuk menghasilkan bahan pangan, bahan industri, dan energi. Pertanian merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia karena menyediakan bahan makanan bagi populasi dunia. Pertanian juga memberikan kesempatan kerja dan pendapatan bagi masyarakat. Berikut merupakan data Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024.



Tabel 2.84
Produksi dan Produktivitas Padi dan Palawija Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi											
	Produksi (ton)	153,458	168,594	170,151	164,408	180,278	130,582	144,685	107,023	94.223	60,838.1	65,459
	Luas areal tanam(ha)	33,242	25,969	34,527	26,241	25,111	29,199	27,569	13,226	13.689	11,751	11,751
	Luas areal panen (ha)	31,403	25,969	26,177	23,156	24,866	17,888	19,685	14,561	12.563	10,731	10,731
	Produktivitas padi (ton/ha)	48.9	64.9	65.0	7.1	7.25	7.3	7.35	7,35	7.5	6	6.1
2	Jagung											
	Produksi(ton)	240	223	309	1,602	5,363	5,6	5,268	3,223,9	1.652	1,218	1,319.5
	Luas areal tanam (ha)	245	284	730	221	755	745	669	471	100	204	204
	Luas areal panen (ha)	240	212	281	208	650	640	602	399	236	203	203
	Produktivitas jagung(ton/ha)	33.50	35.00	64.50	7.7	8.25	8.75	8.75	8,08	7	6	6.5
3	Kedelai											
	Produksi (ton)	170.00	136.00	154.00	165.6	1,119	782.9	576	42	19	271.2	277.5
	Luas areal tanam (ha)	85	57	637	78	637	450	412	11	16	113	113
	Luas areal panen (ha)	85	68	407	72	589	412	320	21	11	111	111
	Produktivitas kedelai(ton/ha)	12.30	17.60	23.10	2.3	1.9	1.9	1.8	2	1.7	2.4	2.5
4	Kacang Tanah											
	Produksi (ton)	684	460	567	385	756	1,5	388	319,5	71	101.1	125.4



No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Luas areal tanam (ha)	171	94	94	162	155	450	97	60	50	62	62
	Luas areal panen (ha)	171	115	162	154	189	375	97	71	47	57	57
	Produktivitas Kacang Tanah (ton/ha)	19.30	20.00	34.00	2.5	4	4	4	4,5	1.6	2	2.2
5	Kacang Hijau											
	Produksi (ton)	15.00	63.00	49.50	33.6	37.5	30	26.6	33	3	3.25	4.5
	Luas areal tanam (ha)	21	41	42	29	30	32	31	12	3	4	4
	Luas areal panen (ha)	10	31	31	24	25	20	19	22	2	2.5	3
	Produktivitas Kacang Hijau (ton/ha)	0.71	12.00	15.00	1.4	1.5	1.5	1.4	1,5	1.3	1.3	1.5
6	Ubi Kayu											
	Produksi (ton)	870	222	1,241	1,080	2,403	2,547	1,251	288	285	260	250
	Luas areal tanam (ha)	305	69	152	132	276	309	60	17	21	32	32
	Luas areal panen (ha)	290	74	104	127	267	283	139	32	19	26	25
	Produktivitas ubi kayu (ton/ha)	33.50	35.00	64.50	8.5	9	9	9	9	15	10	10
7	Ubi Jalar											
	Produksi (ton)	250	170	1,088	266.6	351	695.5	156	208	180	95.2	75.6
	Luas areal tanam (ha)	113	52	84	51	77	126	25	22	16	15	15
	Luas areal panen (ha)	100	68	83	43	54	107	24	32	18	13	12
	Produktivitas ubi jalar (ton/ha)	98.40	101.00	250.00	6.2	6.5	6.5	6.5	6,5	10	6.5	6.3

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



Tabel di atas menggambarkan jenis komoditas tanaman pangan unggulan di Kabupaten Nagan Raya, meliputi padi, jagung, kacang tanah, kedele, dan ubi kayu. Di wilayah barat-selatan Aceh, Kabupaten Nagan Raya termasuk penghasil padi terbesar. Cakupan pembinaan kelompok tani diukur dengan jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari jumlah seluruh kelompok tani tahun 2014-2024 sebagai berikut :

Tabel 2.85
Pembinaan Kelompok Tani Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan (APBA, OTSUS dan APBN)	1,292	1,107	1,107	516	406	446	119	481	321	140
2	Jumlah kelompok tani	503	786	959	1.230	1.235	1.481	1.242	1.242	854	854
	Cakupan bina kelompok tani (%)	38.93	71.00	86.63	86.70	32.87	30.11	9.58	38.7	65.9	82.4

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Nagan Raya, meliputi kelompok tani sebanyak 854 kelompok, UPJA tidak ada, kios pertanian 67 unit, KTNA 1 unit , koperasi tani tidak ada unit, BPP 10 unit, dan BBU tidak ada, seperti terlihat pada tabel berikut.



Tabel 2.86
Jenis Kelembagaan Pertanian di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

NO	JENIS KELEMBAGAAN	SATUAN	JUMLAH
1	BBU	Unit	0
2	Koperasi Tani	Unit	0
3	UPJA	Unit	0
4	Badan Penyuluh Pertanian (BPP)	Unit	10
5	Kios Pertanian	Unit	67
6	Kelompok Tani	Unit	854
7	Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA)	Unit	1
Jumlah			932

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya, Tahun 2025

2.3.3.3 Perkebunan

Sektor perkebunan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti terhadap perekonomian Kabupaten Nagan Raya, termasuk sumber pendapatan masyarakat. Dari sisi aspek sosial, usaha perkebunan telah mampu memberikan lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat dimana secara langsung ikut mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya mempunyai potensi areal yang luas, berdasarkan data terakhir tahun 2024 untuk pengembangan perkebunan sawit luas areal mencapai 53.151,18 Ha dengan produksi 556.764,67 ton. Perkebunan Karet luas areal 6.509,55 Ha dan jumlah produksi 4.138,28 ton. Kemudian Perkebunan Kakao dengan luas areal 1.725,00 Ha dengan jumlah produksi 497.42. Perkebunan Kelapa Dalam dengan luas areal 2.640,90 Ha dengan jumlah produksi 250,88. Sektor ini masih dapat dikembangkan oleh Masyarakat untuk meningkat pendapat Masyarakat Kabupaten Nagan Raya. Untuk data lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.



Tabel 2.87
Perkembangan Luas Areal, Produksi, dan Produktivitas Komoditi Perkebunan
di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014 – 2024

NO	Komoditi/ Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit											
	Luas areal	ha	40,556	42,349	49,400	51.566	51.321	51.198	52.228	53.151,18	53.151,18	53.151,18
	Produksi	ton	195,827	224,453	316,164	108.354	529.137	520.272	547.888	100.217,64	556.764,67	556.764,67
	Produktivitas	ton/ha	4.83	5.50	6.40	2,976	14,312	14,312	14,750	2.655	14.750,00	14.750,00
2	Perkembangan Perkebunan Karet											
	Luas areal	ha	12,698	79,040	14,052	19.22	8.834	8.835	6.725	5.509	6.509,55	6.509,55
	Produksi	ton	3,314	5,073	18,387	4.515	4.078	4.078	4,276.8 9	4.138	4.138,28	4.138,28
	Produktivitas	ton/ha	0.26	0.06	1.30	0,235	0,462	0,751	0,820	0,820	820,00	820,00
3	Perkembangan Perkebunan Kakao											
	Luas areal	ha	5,268	5,277	5,311	4700	2820	2820	1725	1725	1.725,00	1.725,00
	Produksi	ton	1,245	125	2,821	643	575	576	108,55	66,39	66.39	66.39
	Produktivitas	ton/ha	0.24	0.02	0.53	0,14	0,20	0,20	0,35	497,42	497.42	497.42
4	Perkembangan Perkebunan Kelapa											
	Luas areal	ha	658.00	-	1,375	1.487,60	2.785,98	2.785,98	2.750	2.640,90	2.640,90	2.640,90
	Produksi	ton	1,405	1,450	1,486	1108,15	560,22	560,22	287.50	271.01	271,01	271,01
	Produktivitas	ton/ha	0.47	0.04	0.93	0,74	0,20	0,20	0,25	250.88	250,88	250,88

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Nagan Raya, 2025



2.3.3.4 **Peternakan**

Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang besar dalam peternakan, terutama ternak besar sapi dan kerbau. Potensinya juga sangat memungkinkan untuk ditingkatkan mengingat masih tersedianya bahan baku sebagai sumber pakan ternak. Sampai tahun 2024, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Nagan Raya cenderung berluktuatif. Adapun jumlah kerbau tahun 2024 sebanyak 11.200 ekor, sapi 15.194 ekor, kambing 17.401 ekor dan domba 2.745 ekor.

Sentra pemeliharaan sapi terbesar di Kabupaten Nagan Raya terdapat di Kecamatan Tadu Raya. Beberapa kecamatan lainnya yang merupakan juga sentra pemeliharaan sapi meliputi Darul Makmur, Tripa Makmur, Kuala Pesisir, Seunagan, dan Kuala. Untuk peternakan kerbau, sentra pemeliharaannya terdapat di Kecamatan Suka Makmue, disamping itu juga Kecamatan Seunagan, Seunagan Timur dan Beutong.

Tabel 2.88
Perkembangan Populasi Ternak di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024 (Ekor)

Jenis Ternak	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Domba	375	470	749	995	1,245	1,113	1,213	2.137	2.719	2,557	2,745
Kambing	2,935	9,844	10,940	12,002	12,407	5,867	7,054	15.473	16.526	17,126	17,401
Kerbau	9,446	9,844	9,808	10,069	10,028	8,368	8,505	9.527	10.086	10,729	11,200
Sapi	8,475	10,159	10,463	11,074	11,182	10,890	11,183	12.816	13.742	14,694	15,194

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Nagan Raya Tahun 2025

2.3.3.5 **Perdagangan**

Posisi Kabupaten Nagan Raya yang berada pada jalur lintas nasional di wilayah barat selatan Aceh, terbuka peluang yang sangat besar untuk pengembangan perdagangan. Ketersediaan infrastruktur jalan serta didukung transportasi darat dan udara yang memadai merupakan pendorong untuk berkembangnya aktivitas perdagangan di Kabupaten Nagan Raya. Saat ini, pusat perdagangan terbesar terdapat di Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Alue Bilie, Kecamatan Darul Makmur, dan Jeuram, Kecamatan Seunagan. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor menyumbang kontribusi yang cukup mendominasi dalam perekonomian Kabupaten Nagan Raya. Secara umum Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami tren yang naik turun sejak tahun 2014-2024, dapat dilihat pada table dibawah ini.



Tabel 2.89
Kontribusi Kategori Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 (persen)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	594,932.86	653,442.90	722,306.12	772,933.98	814.519,4	847.865,3
PDRB Total	5,456,757.63	5,779,350.27	6,159,448.90	6,571,136.5	6.931.120	7.380.600
Kontribusi	10.90	11.31	11.73	11.76	11.08	11.48
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	827.080,7	871.363,3	954.719,2	1.015.765,8	1.080.710	
PDRB Total	7,674,146.01	9,185,404.46	11,322,456.81	11.871.333	12.431.710	
Kontribusi	10.78	9.49	8.43	11.68	11.50	

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.3.3.6 Perindustrian

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian . Sektor industri yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya hanya subsektor industri nonmigas. Kontribusinya sector industri berfluktuatif dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Pada tahun 2014, industri pengolahan memiliki kontribusi sebesar 2,73 persen dan pada tahun 2024 berkontribusi sebesar 4,91 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.90
Kontribusi dan Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan Tahun 2014-2024

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Industri Pengolahan	149,152.63	177,286.66	220,391.18	260,898.27	567.353	536.503
PDRB Total	5,456,757.63	5,779,350.27	6,159,448.90	6,571,136.50	6.931.120	7.380.600
Kontribusi	2.73	3.07	3.58	3.97	8.00	7.00
Lapangan Usaha	2020	2021	2022	2023	2024	
Industri Pengolahan	271,274.29	404,699.46	463,357.22	536.500	582.580	
PDRB Total	7,674,146.01	9,185,404.46	11,322,456.81	11.871.333	11.871.333	
Kontribusi	3.53	4.41	4.09	4.50	4.91	

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



2.3.3.7 Transmigrasi

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menetapkan 5 lokasi transmigrasi dari tahun 2014-2024. Tahun 2014, penempatan jumlah KK pada 5 lokasi transmigrasi tersebut sebanyak 553 KK. Dan meningkat pada tahun 2024 sebanyak 852 kepala keluarga dari 5 kolasi tersebut. Untuk lebih jelas lokasi transmigrasi dan jumlah kepala keluarga di Kabupaten Nagan Raya sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Lokasi Transmigrasi dan Jumlah Kepala Keluarga
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Lokasi	Jumlah Kepala Keluarga									
		2014	2015	2016	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	UPT.IV. Seneuam Gampong Sumber Bakti	100	100	100	330	330	352	339	495	612	612
2	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	80	100	100	30	30	30	30	31	31	31
3	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	30	33	53	85	85	90	85	81	81	81
4	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	30	80	120	68	86	90	90	89	93	93
5	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	313	313	364	25	25	25	27	26	35	35
Jumlah		553	626	737	538	556	587	571	722	852	852

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya, Tahun 2025

Selanjutnya untuk Transmigrasi lokal Kabupaten Nagan Raya hingga tahun 2024 ada 4 (empat) transmigrasi . Namun untuk fasilitas sarana dan prasarana dilokasi transmigrasi tersebut belum memadai, masih banyak sarana dan prasarana yang kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.



Tabel 2.92
Fasilitas Sarana dan Prasarana Transmigrasi Lokal
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

No	Nama Transmigrasi Lokal	Kondisi Jalan	Jembatan	Gorong-Gorong	Listrik	Sarana Air Bersih	Ket
1	UPT. Beutong Ateuh Blang Puuk	Baik	-	-	Baik	Rusak Berat	
2	UPT Pante Ara Gampong Krueng Isep	Baik	Rusak Berat	Rusak Berat	Baik	Rusak Berat	
3	UPT Ujong Lamie Gampong Ujong Lamie	Baik	Rusak Berat	Rusak Berat	Baik	Rusak Berat	25 KK Belum Ada Listrik
4	UPT Keutubong Tunong Gampong Blang Lango	Baik	Rusak Berat	Rusak Berat	Baik	Tidak Ada	

Sumber : Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kab. Nagan Raya Tahun 2025



2.3.3.8 Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu 6 (enam) tahun terakhir cenderung meningkat . Pada tahun 2014, produksi perikanan laut sebanyak 107.00 ton. Namun pada tahun 2021, produksi perikanan laut menurun drastis menjadi 549,76 ton. Dan pada tahun 2022 kembali mengalami peningkatan hingga Tahun 2024 menjadi 2,231.19 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.93
Perkembangan Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Laut
di Kabupaten Nagan Raya, 2014-2024

No	Tahun	Nilai Produksi (Rp.)	Produksi (Ton)	Keterangan
1	2014	2,228,000,000	107.00	
2	2015	19,913,000,000	1,039.30	
3	2016	14,837,000,000	1,753.65	
4	2017	32,329,836,072	1,796.10	
5	2018	45,493,425,215	2,401.57	
6	2019	47,478,519,000	2,865.29	
7	2020	36,277,598,000	2,570.52	
8	2021	9,345,920,000	549.76	
9	2022	48,757,894,006	1,541.97	
10	2023	69,285,261,500	2,151.21	
11	2024	78,091,650,000	2,231.19	

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya, 2025

Potensi dan pemanfaatan sumber daya perikanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih didominasi melalui perikanan tangkap. Produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 sebesar 1.070.25 ton dan pada tahun 2021 jumlah perikanan tangkap meningkat menjadi 1,095.30 ton. Pada tahun 2024 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 3,340.05 ton. Sementara untuk jumlah produksi ikan pada tahun 2014 sebesar 2,310.38 ton. Kemudian pada tahun 2024 terjadi peningkatan menjadi 4,350.45 ton. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.94
Produksi Perikanan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Produksi Ikan (ton)	2,310.38	2,424.15	2,537.77	3,257.29	4,498.03	4,804.49	4,641.87	2,036.14	3,737.81	4,417.64	4,350.45
2	Budidaya	1,240.13	1,328.65	669.72	640.21	1,245.49	1,056.50	1,211.30	1,095.30	1,181.30	1,201.50	1,010.40
3	Perikanan Tangkap	1,070.25	1,095.50	1,863.05	2,617.08	3,252.54	3,747.99	3,430.57	940.84	2556.51	3,216.14	3,340.05
4	Target Daerah (ton)	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	3,420.15	3,591.16	3,769.00	4,032.00	3,340.13	4,344.57	4,316.79
5	Capaian Produksi Ikan (%)	88.86	93.23	97.40	125.28	31.51	133.89	123.15	50.50	88.30	101.68	100.78

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025



Beberapa kendala yang dihadapi dalam bidang kelautan dan perikanan sebagian besar masih merupakan usaha sambilan dan belum berorientasi bisnis, keterbatasan kemampuan sumberdaya nelayan dan aparaturnya dinas. Upaya meningkatkan produksi tangkap laut terkendala sarana prasarana, iklim/ cuaca yang cenderung tidak bersahabat, sehingga frekuensi (*trip*) nelayan melaut berkurang, keterbatasan permodalan usaha, dan belum berkembangnya pasca panen dan pengolahan produk.

Tabel 2.95
Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tangkap
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020-2024

No	Jenis	Jumlah				
		*2020	2021	2022	2023	2024
1	Panjang garis pantai	74,4 km	74,4 km	74,4 km	74,4 km	74,4 km
2	Luas laut	446,4 km ²	446,4 km ²	446,4 km ²	446,4 km ²	446,4 km ²
3	Luas perairan umum	814 km ²	814 km ²	814 km ²	814 km ²	814 km ²
4	Jumlah pangkalan pendaratan ikan (PPI)	2 unit	2 unit	2 unit	1 Unit	1 Unit
5	Jumlah tempat pendaratan ikan (TPI)	2 unit	2 unit	2 unit	3 Unit	3 Unit
6	Jumlah kapal motor	125 unit	111 unit	114 Unit	125 unit	110 unit
7	Jumlah perahu motor	146 unit	146 unit	146 Unit	103 unit	71 unit
8	Jumlah nelayan tetap	538 Orang	536 Orang	585 Orang	581 orang	472 orang
9	Jumlah nelayan tidak tetap	2016 Orang	2248 Orang	2.248 Orang	2.248 orang	2.248 orang
10	Jumlah pemasar ikan	900 Orang	900 Orang	900 Orang	900 orang	900 orang
11	Jumlah kelompok pengolahan ikan	46 Orang	46 Orang	46 Orang	46 orang	46 orang
12	Jumlah unit pengolahan	46 unit	46 unit	46 unit	46 unit	46 unit
13	Jumlah produksi ikan olahan	229.9	229.9	229.9	229.9	229.9
14	Jumlah pasar ikan / depo	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit	7 unit

Sumber : *data awal 2020, Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan, Tahun 2025

Jumlah rumah tangga yang mengusahakan perikanan Budidaya sampai dengan tahun 2024, mencapai 2.233 rumah tangga. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir, peningkatan masyarakat dalam berusaha di bidang budidaya perikanan cukup tinggi. Wilayah-wilayah dengan jumlah rumah tangga perikanan besar di Kecamatan Beutong, Seunagan, Seunagan Timur dan Darul Makmur.

Tabel 2.96
Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024

No	Kecamatan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Darul Makmur	115	119	121	76	84	94	131	125	251	251	251
2	Tripa Makmur	31	35	35	38	41	41	49	49	152	152	152
3	Kuala	58	65	65	68	71	73	83	80	191	191	191
4	Kuala Pesisir	41	46	46	49	52	55	59	53	58	58	58
5	Tadu Raya	49	57	58	60	63	65	71	67	179	179	179
6	Beutong	141	150	152	155	157	161	161	148	422	422	422
7	Beutong Ateuh Banggalang	37	39	39	37	44	44	50	52	110	110	110
8	Seunagan	75	80	81	82	86	89	89	87	252	257	252
9	Suka Makmue	83	89	91	95	98	100	103	98	251	251	196
10	Seunagan Timur	151	159	163	167	171	173	181	186	413	422	422
	Jumlah	781	839	851	827	867	895	977	945	2.279	2293	2,233

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025

Dalam beberapa tahun terakhir, terjadi penurunan yang sangat drastis nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Nagan Raya. Nilai produksi tersebut terjadi di semua jenis budidaya perikanan, meliputi perairan umum, air tawar, dan air payau. Pola budidaya perikanan yang masih bersifat tradisional dan belum menggunakan teknologi yang modern turut menjadi pemicu belum berkembangnya aktivitas ekonomi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Oleh karena itu, peran dunia usaha/swasta yang bergerak di bidang perikanan dan kelautan sangat diperlukan. Hal tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong peningkatan produksi perikanan dan kelautan di Kabupaten Nagan Raya. Selain itu, ditujukan juga untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak serta berkontribusi signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sektor perikanan dan kelautan berkontribusi positif dalam mendorong penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Nagan Raya. Tahun 2024, tercatat nelayan tetap di Kabupaten Nagan Raya mencapai 472 orang jumlah nelayan. Sedangkan rumah tangga yang bermata pencaharian sebagai petani budidaya ikan di kolam mengalami peningkatan , dari 1,058 rumah tangga tahun 2020 menjadi 2,273 rumah tangga tahun 2024. Dalam jangka menengah ke depan, pembinaan terhadap nelayan, petani ikan, petani tambak, dan pelaku pengolah ikan, diupayakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berlanjut. Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 2.97
Jumlah Nelayan, Kelompok dan Pembinaan Nelayan
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

Uraian	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nelayan Tetap	Orang	1.05	1.03	594	538	538	538	538	536	585	581	472
Nelayan Tidak Tetap	Orang	-	110	458	1.31	1.31	1.31	2016	2248	2,248	2,248	2,248
Jumlah Petambak	RT	-	69	181	183	185	185	185	185	-	185	-
Jumlah Petani Ikan Kolam	RT	-	592	663	827	867	895	1.058	1.075	2.279	2,293	2,293
Jumlah Petani Ikan Perairan Umum	RT	294	294	732	-	140	155	170	200	1,103	1,103	1,103
Kelompok Nelayan	Kelompok	-	37	49	22	28	36	46	50	16	18	15
Jumlah Nelayan yang dibina	Orang	-	7	7	20	28	36	46	46	160	200	189
Jumlah Petambak yang dibina	Orang	-	287	98	-	15	18	20	20	-	-	-
Jumlah petani ikan yang dibina	Orang	-	762	761	905	930	1.05	550	551	342	-	-
Jumlah kelompok Budidaya Ikan	Kelompok	-	98	367	67	75	86	91	93	25	43	43
Jumlah kelompok pengolahan Ikan	Kelompok	-	12	13	40	41	46	46	46	4	2	2
Jumlah Kelompok pengolahan ikan yang dibina	Kelompok	-	12	12	19	19	19	46	46	2	2	2

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nagan Raya Tahun 2025



Tabel 2.98
Kondisi PPI, TPI, dan Pasar Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024

Kecamatan	Nama PPI	Nama Pasar	Lokasi
Darul Makmur	-	- Pasar Alue Bilie - Pasar Pekan - Pasar Seumayam	-Desa Alue Bilie - Desa Lamie - Desa Serbajadi
Tripa Makmur	- TPI Babah Lueng - TPI Kuala Tripa	- Pasar Kamis	- Desa Kabu
Kuala	-	- Pasar Simpang Peut	- Desa Simpang Peut
Kuala Pesisir	PPI Kuala Tuha	- Pasar Langkak - Pasar Kamis	- Desa Langkak - Desa Arongan
Tadu Raya	PPI Kuala Tadu	- Pasar Sabtu - Pasar Minggu	- Desa Kuala Tadu - Desa Krueng Itam
Beutong	-	- Pasar Beutong	- Desa Ulee Jalan
Beutong Ateuh Banggalang	-	-	-
Seunagan	-	Pasar Jeuram	- Desa Cot Meugat
Suka Makmue	-	Pasar Lueng Baro	- Desa Lueng Baro
Seunagan Timur	-	Pasar Uteun Pulo	- Desa Uteun Pulo

Sumber : Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan, Tahun 2025

Selanjutnya jumlah pembinaan kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemerintah yang telah diberikan sejak tahun 2014 s/d 2024 dengan capaian mengalami fluktuatif. Pada tahun 2024 jumlah kelompok nelayan yang ada 15 kelompok. Namun, jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan hanya 2 kelompok saja. Untuk lebih jelasnya cakupan bina kelompok nelayan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.99
Cakupan Bina Kelompok Nelayan Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

No	Uraian	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan	52	46	22	20	28	36	46	50	11	3	2
2	Jumlah Kelompok Nelayan	55	47	25	22	28	36	46	50	16	18	15
3	Cakupan Pembinaan Kelompok Nelayan (%)	94.55	97.87	88.00	90.91	100.00	100.00	100.00	100.00	68.75	16.67	13.33

Sumber: Dinas Kelautan Perikanan dan Pangan Tahun 2025

2.3.4 Fokus layanan Penunjang Urusan

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Sebagaimana kabupaten/ kota lainnya di Indonesia, Kabupaten Nagan Raya juga telah menyusun Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. Pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMK Nagan Raya I Tahun 2007- 2012, RPJMK Nagan Raya II Tahun 2012-2017, RPJMK Nagan Raya III Tahun 2017-2022, RPK Nagan Raya IV Tahun 2023-2026 (sebagai pengganti RPJMK Nagan Raya 2022-2027 berhubung adanya kebijakan Nasional tentang Penundaaan Pilkada Tahun 2022).

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 08 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. Visi daerah yang diusung dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 yaitu Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Islami, Maju, Sejahtera dan Aman. Visi dimaksud merupakan ekspektasi terhadap kondisi masyarakat Kabupaten Nagan Raya pada akhir tahun 2025 yang lebih Islami, Maju, Sejahtera, dan Aman selaras dengan Visi RPJPA Tahun 2005-2025 dan RPJPN Tahun 2005-2025.

Tujuan dan sasaran pembangunan yang ingin dicapai di Kabupaten Nagan Raya tetap mengacu pada pencapaian visi dan misi daerah yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025. Tahapan perencanaan pembangunan Nagan Raya telah memasuki tahap yang keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya. Tahapan pembangunan keempat ini merupakan rangkaian akhir dari tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten ini. Pada akhir periode ini diharapkan dapat dicapai, “TERWUJUDNYA KABUPATEN NAGAN RAYA YANG ISLAMI, MAJU, SEJAHTERA, DAN DAMAI PADA TAHUN 2025”, sebagai sebuah kondisi ideal yang ingin dicapai oleh masyarakat Nagan Raya. Kondisi ideal ini dinilai sangat relevan jika dikaitkan dengan amanah yang tertuang didalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya 2005-2025 telah ditentukan 7 (tujuh) sasaran pokok dari prioritas pembangunan pada periode keempat tersebut, yakni: (1) Terwujudnya pembangunan masyarakat yang berkualitas dan islami; (2). Terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang produktif; (3). Terciptanya tata pemerintahan yang baik; (4). Terwujudnya pembangunan wilayah dan infrastruktur yang berkelanjutan; (5). Terwujudnya peningkatan pendapatan

masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah; (6). Terwujudnya Pengembangan kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan; dan (7). Terwujudnya penanggulangan dan pengurangan masyarakat miskin. Untuk saat ini telah dilaksanakan proses penyusunan rancangan awal RPJP tahun 2025-2045.

Disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak juga menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah, terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Mengingat RPJMD merupakan jabaran dari visi, misi dan program kepala daerah, maka dengan berakhirnya periode jabatan kepala daerah tentu berakibat pada berakhirnya pula periodisasi RPJMD sebagai acuan dan pedoman pembangunan, sehingga pejabat kepala daerah yang diangkat tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah selama tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Inmendagri Nomor 70 Tahun 2021, maka disusun dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah tahun 2023-2026.

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten disusun berdasarkan pendekatan partisipatif, teknokratis, politis serta top down dan bottom-up. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RKPK disusun melalui persiapan penyusunan RKPK, penyusunan rancangan awal, penyusunan Rancangan RKPK, pelaksanaan Musrenbang RKPK, perumusan rancangan akhir RKPK dan penetapan RKPK

Penyusunan RKPK Tahun 2023 merupakan Perencanaan tahun pertama dalam pelaksanaan dokumen rencana Pembangunan kabupaten (RPK) Nagan Raya Tahun 2023-2026. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPK mempunyai kedudukan yang strategis sebagai berikut :

1. RKPK merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya Tahun 2023-2026 ke dalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPK memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (Renja-SKPK);
3. RKPK merupakan acuan Pejabat Bupati Nagan Raya dan DPRK Nagan Raya dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas

serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK);

4. RKPK merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan kabupaten hingga tahun berkenaan.

Penyusunan RKPK Tahun 2024 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya Tahun 2023-2026. Disamping itu, perumusan RKPK Nagan Raya Tahun 2024 juga memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Keterkaitan antara sasaran dan prioritas Nagan Raya dalam RKPK Nagan Raya Tahun 2024 dengan sasaran dan Prioritas Aceh dan Prioritas Nasional;
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 mengacu kepada Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Nagan Raya Tahun 2023-2026 yaitu Menyukkseskan pesta demokrasi dan meningkatkan kualitas dan daya saing SDM dalam pengentasan kemiskinan;
3. Konsistensi antara Prioritas Nagan Raya dengan permasalahan, isu strategis, program prioritas serta pagu anggaran;
4. Tersedianya dukungan program daerah terhadap kegiatan prioritas nasional.

Proses perencanaan pembangunan ini dilaksanakan melalui tahapan perencanaan yang dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi. Proses penyusunan RKPK Nagan Raya Tahun 2024 dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, terdiri dari:
 - a. Penyusunan Rancangan Awal Renja SKPK Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 27 Januari 2023 sesuai dengan Surat Edaran Bupati Nagan Raya Nomor: 050/10/SE/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
 - b. Identifikasi Usulan Paket Kegiatan Prioritas Perangkat Daerah Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 20 Januari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/06/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
 - c. Penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRK Nagan Raya Tahun Perencanaan 2024, dilaksanakan pada tanggal 10 Januari s.d. 8

- Februari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/07/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
- d. Sosialisasi Inputan Aplikasi Perencanaan Tahun 2024 Pada SIPD-RI Kemendagri dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/107/2023 Tanggal 20 Februari 2023.
 - e. Verifikasi Usulan Aspirasi Masyarakat dan Pokir Untuk Perencanaan Tahun 2024 Pada SIPD-RI Kemendagri dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/144/2023 Tanggal 10 Maret 2023.
2. Pelaksanaan Musrenbang Gampong/ Desa Tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 10 s.d. 31 Januari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/09/2023 Tanggal 10 Januari 2023.
 3. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan Tahun 2023, dilaksanakan pada tanggal 13 s.d. 16 Februari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/45/2023 Tanggal 30 Januari 2023.
 4. Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik (Rancangan Awal RKPD Tahun 2024), dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 005/50/2023 Tanggal 7 Februari 2023;
 5. Penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024, dengan Penyelenggaraan Forum OPD Rancangan RKPD Tahun 2024, dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 9 Maret 2023 sesuai Surat Bupati Nagan Raya Nomor 050/105/2023 tanggal 01 Maret 2023 Perihal Forum SKPK/ Pra Musrenbang RKPK Nagan Raya Tahun 2024.
 6. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Tahun 2024, terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Pembukaan Musrenbang RKPK Nagan Raya Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 sesuai Surat Undangan Bupati Nagan Raya Nomor 005/132/2023 Tanggal 21 Maret 2023.
 - b. Pelaksanaan Pembahasan/ Desk Musrenbang RKPK Nagan Raya Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 29 Maret s.d. 13 April 2023 sesuai Surat Undangan Bupati Nagan Raya Nomor 005/133/2023 Tanggal 20 Maret 2023.
 7. Penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024;
 8. Fasilitasi Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Oleh Bappeda Aceh, Provinsi Aceh dilaksanakan pada tanggal 03 Juli 2023;
 9. Penetapan RKPD Tahun 2024.

2.3.4.2. Keuangan

Pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sejak tahun 2008-2024 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan. Keberhasilan



membaiknya pengelolaan keuangan daerah ditandai dengan pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Penghargaan WTP yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sejak tahun 2008-2024, dicapai berkat kerja keras semua pihak, baik unsur pemerintah maupun masyarakat.

Capaian indikator pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah Seperti Opini BPK terhadap laporan keuangan, persentase belanja langsung dengan belanja tidak langsung dan persentase belanja pendidikan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban tersebut juga sebagai salah satu instrumen untuk kepentingan evaluasi kinerja, serta menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat kemajuan Rencana, Program dan Kegiatan Pembangunan dalam rangka pencapaian Visi Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Hasil Pemeriksaan BPK memberikan beberapa koreksi dalam hal pertanggungjawaban penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Opini Audit BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2008 – 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.100
Predikat Opini Audit BPK Tahun 2008-2024

NOMOR	TAHUN	PREDIKAT	KETERANGAN
1	2008	WTP	
2	2009	WTP	
3	2010	WTP	
4	2011	WTP	
5	2012	WTP	
6	2013	WTP	
7	2014	WTP	
8	2015	WTP	
9	2016	WTP	
10	2017	WTP	
11	2018	WTP	
12	2019	WTP	
13	2020	WTP	
14	2021	WTP	
15	2022	WTP	
16	2023	WTP	
17	2024	WTP	

Sumber : BPKD, Tahun 2025

Opini Audit BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang terus membaik dalam kurun 2008-2024 belum diikuti dengan kemandirian fiskal daerah. Kemandirian fiskal daerah merujuk pada kemampuan daerah untuk mengelola dan mengatur keuangan sendiri tanpa terlalu bergantung pada pemerintah pusat. Kondisi ini mencakup kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan sendiri melalui pajak, pungutan, atau sumber-sumber keuangan lokal lainnya, serta kemampuan untuk mengelola dan menggunakan anggaran mereka sendiri sesuai dengan kebutuhan dan prioritas lokal. Kemandirian fiskal daerah sangat penting dalam konteks desentralisasi atau otonomi daerah, di mana keputusan dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan daerah didelegasikan kepada pemerintah daerah. Dengan kemandirian fiskal yang memadai, daerah dapat lebih fleksibel dalam merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal mereka, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Nagan Raya masih tergolong rendah yang ditandai dengan masih rendahnya PAD dan penerimaan pendapatan lainnya serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat. Dilain sisi berkurangnya dana OTSUS dan berakhirnya Dana OTSUS Aceh pada Tahun 2028 juga akan berpengaruh pada kemampuan Kabupaten Nagan Raya untuk membiayai pembangunan.

2.3.4.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Pembinaan dan peningkatan kinerja aparatur memerlukan suatu mekanisme pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Tatacara pemberian penghargaan dilakukan secara selektif dan terukur sesuai dengan kinerja dan produktivitas aparatur dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Disisi lain, pemberian sanksi yang tegas kepada aparatur pemerintah yang tidak disiplin dalam menjalankan tugasnya sehingga memberi efek jera kepada aparatur yang bersangkutan sekaligus menjadi pembelajaran bagi aparatur lainnya. Tatacara pemberian penghargaan dan sanksi kepada aparatur diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati. Kualitas pelayanan publik belum maksimal. Hal ini terlihat masih banyaknya berbagai gerakan reformasi publik (public reform) yang dilakukan oleh masyarakat dalam rangkan menuntut haknya masyarakat yang merupakan kewajiban pemerintah untuk memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, seperti diantaranya; kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, pangan, perumahan, dan perlindungan. Salah satu wujud dari upaya pemenuhan hak masyarakat dalam pelayanan publik adalah terpenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang telah ditetapkan pada masingmasing bidang yang merupakan target yang harus dicapai oleh Nasional dan Pemerintah Daerah.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis bidang kepegawaian;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan, pendidikan dan pelatihan pegawai, mutasi, dan bidang umum kepegawaian;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian;
5. Pelaksanaan kesekretariatan badan; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan tabel di bawah ini diketahui bahwa capaian indikator kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan sudah cukup baik. Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 dan 2024 adalah sebanyak 120 jam. Capaian Indikator Kinerja Fungsi Penunjang urusan kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan dapat dilihat dalam Tabel berikut:



Tabel 2.101
Indikator Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

INDIKATOR	SATUAN	TAHUN						2023	2024
		*2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	persen	16,79	16,87	17,3	18,25	18,52	18,61	N.A	N.A
Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	persen	40,2	40.,4	41,41	43,69	44,34	44,57	N.A	N.A
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instasi pemerintah	org	35	35	36	38	38	38	34	35
Jumlah jabatan administrator pada instasi pemerintah	org	526	529	542	572	581	583	149	155
Rata – rata lama pegawai mendapatkan Pendidikan dan pelatihan	Jam	120	120	120	120	120	120	120	120
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	org	3.152	3.168	3.247	3.425	3.477	3.494	2.360	2.220

Sumber: *data awal 2017, BKPSDM, Tahun 2025

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan (litbang) memiliki peranan penting dalam perencanaan pembangunan serta dapat dijadikan indikator kemajuan dari suatu daerah. Peran fungsi litbang dari suatu daerah dapat diukur dengan persentase implementasi rencana kelitbangan; persentase pemanfaatan hasil kelitbangan; dan penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang diukur dengan persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, dan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum dilaksanakan secara maksimal di Kabupaten Nagan Raya terutama penelitian dan pengembangan yang bersifat mendukung perencanaan pembangunan daerah. Dengan kekayaan alamnya yang meliputi lahan pertanian yang subur, keanekaragaman hayati, dan sumber daya mineral yang melimpah, Kabupaten Nagan Raya menawarkan beragam peluang untuk inovasi dan penemuan.

Di bidang pertanian, penelitian dan pengembangan dapat difokuskan pada peningkatan produktivitas tanaman lokal seperti sawit, padi, dan karet. Perbaikan teknik pertanian, pengenalan varietas unggul, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan dapat menjadi bagian integral dari upaya penelitian dan pengembangan ini, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mengoptimalkan penggunaan lahan.

Tidak hanya itu, sumber daya mineral yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya, seperti batu giok dan mineral lainnya, juga dapat menjadi subjek utama dalam penelitian teknologi pengolahan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pengembangan metode penambangan yang lebih efisien dan bertanggung jawab secara lingkungan akan menjadi langkah penting dalam mengoptimalkan potensi sumber daya mineral tersebut. Selain sektor primer, sektor industri dan pariwisata di Nagan Raya juga dapat mendapatkan manfaat dari penelitian dan pengembangan yang terfokus. Pengembangan produk-produk lokal dengan nilai tambah tinggi, penggunaan teknologi informasi untuk mempromosikan destinasi pariwisata, dan inovasi dalam manajemen limbah industri adalah beberapa area di mana penelitian dan pengembangan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

Dalam rangka mewujudkan potensi tersebut, kolaborasi antara pemerintah daerah, institusi pendidikan dan penelitian, serta sektor swasta akan menjadi kunci. Dukungan finansial, akses terhadap infrastruktur penelitian, dan pembentukan jejaring kerja sama yang kuat akan membantu mempercepat kemajuan dalam bidang R&D di Kabupaten Nagan Raya, mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

2.3.4.5. Pengawasan

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan, melalui pengawasan terciptanya suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.

Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan dan ketidakcocokan dan menemukan penyebab ketidakcocokan yang muncul. Dalam konteks membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance* (tata kelola pemerintahan yang baik), pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Dalam konteks ini, pengawasan menjadi sama pentingnya dengan penerapan *good governance*. Dalam kaitannya dengan akuntabilitas publik, pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga legitimasi warga masyarakat terhadap kinerja pemerintahan dengan menciptakan suatu sistem pengawasan yang efektif, baik pengawasan internal (*internal control*) maupun pengawasan eksternal (*external control*). Di samping mendorong adanya pengawasan masyarakat.

2.3.4.6. Sekretariat DPRK

Sekretariat DPRK merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK. Sekretariat DPRK dipimpin oleh sekretariat DPRK yang berkedudukan secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRK dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRK mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRK, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh anggota DPRK dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Sekretariat DPRK dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi yang diantaranya : a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRK, b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRK, c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRK, dan d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRK.

2.3.4.7. Perkembangan Reformasi Birokrasi

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 menjadi dasar hukum pelaksanaan reformasi birokrasi. Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk meningkatkan efisiensi,

transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik. Dengan melakukan reformasi birokrasi, pemerintah berupaya untuk mengurangi birokrasi yang berlebihan, memperbaiki sistem pengawasan dan kontrol, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan salah satu Indikator pendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih disamping Opini Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Lakip/ Sakip, Nilai LPPD, Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Indeks Pelayanan Publik, dan indeks Profesionalitas ASN. Indeks reformasi birokrasi pada periode 2017-2022 sebesar 42.33/C dan diharapkan pada akhir tahun 2025 dapat mencapai target 67/B. Opini Pengelolaan Keuangan Daerah sejak tahap pembangunan pertama sampai tahap pembangunan ketiga tergolong WTP (wajar tanpa pengecualian), hal ini disebabkan semakin membaiknya tata kelola aset dan pengelolaan keuangan daerah.

2.3.4.8. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik adalah sebuah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas layanan yang diberikan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana pelayanan yang diselenggarakan telah sesuai dengan standar yang ditetapkan, seperti kepastian waktu layanan, transparansi biaya, prosedur yang jelas, serta sikap dan kompetensi petugas. Indeks ini juga mencakup aspek ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelayanan, serta inovasi yang dilakukan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Di Indonesia, pengukuran indeks pelayanan publik dilakukan oleh berbagai lembaga, seperti Ombudsman Republik Indonesia yang menilai kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Kementerian PAN-RB dan Kementerian Dalam Negeri melalui survei dan evaluasi kinerja pelayanan. Tujuan dari pengukuran ini adalah untuk mendorong peningkatan mutu pelayanan, menciptakan birokrasi yang responsif dan akuntabel, serta memberikan informasi objektif kepada masyarakat terkait kualitas layanan yang mereka terima.

Kabupaten Nagan Raya terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini dibuktikan dengan capaian membanggakan pada tahun 2023 Nagan Raya meraih skor 2,82/C dan terus meningkat menjadi 3,76/C pada tahun 2024.



2.3.4.9. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, dan berbasis teknologi informasi melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) secara aktif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada seluruh perangkat daerah untuk memahami dan mengimplementasikan SPBE secara menyeluruh.

Pada Evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Kementerian PANRB, Tahun 2021 Kabupaten Nagan Raya meraih Indeks 1,76 dengan predikat kurang, pada tahun 2022 Kabupaten Nagan Raya berhasil meraih Indeks 2,2 dengan predikat cukup, pada tahun 2023 Kabupaten Nagan Raya berhasil meraih Indeks 2,62 dengan predikat Baik dan pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya berhasil meraih Indeks 2,94 dengan predikat Baik , Hal ini menjadi bukti nyata bahwa transformasi digital di lingkungan pemerintahan daerah terus mengalami peningkatan. Untuk lebih Jelasnya dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2.102
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Nagan Raya tahun 2021-2024

NO	URAIAN	*2021	2022	2023	2024
1	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	1,76 (Kurang)	2,2 (Cukup)	2,62 (Baik)	2,94 (Baik)

Sumber : *data awal 2021, Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik tahun 2025

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah berada pada suatu daerah untuk menciptakan *multiflier effect* bagi peningkatan daya saing daerah. Dalam subbab ini akan diuraikan tentang Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Per kapita, Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non-Pangan Per kapita, Iklim Berinvestasi di Kabupaten Nagan Raya.

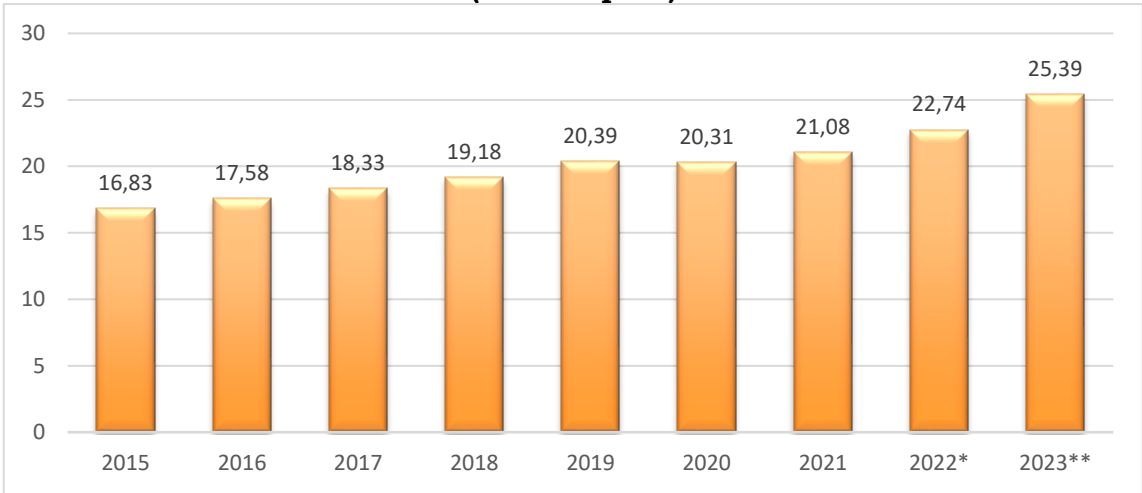
2.4.1.1. Pengeluaran dan Konsumsi Rumah Tangga Per kapita

Nilai Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2015 sampai 2023 terus meningkat. Nilai Konsumsi Rumah Tangga



perkapita tahun 2023 telah mencapai 25.39 juta rupiah. Nilai ini meningkat dari tahun 2015 yang hanya mencapai 16.83 juta rupiah.

Gambar 2.32
Nilai komponen Konsumsi Rumah Tangga Perkapita ADHB
(Juta Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Pangan dan Non-Pangan Per kapita

Pengeluaran perkapita menurut kelompok makanan dan non-makanan dihitung selama sebulan dari konsumsi setiap rumah tangga dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang ada di Indonesia (BPS). Menurut dengan teori Hukum Engel yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi pengeluaran non-makanan maka semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Namun sebaliknya, semakin kecil proporsi pengeluaran non-makanan merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun. Jumlah penduduk miskin cenderung mengalami perubahan berdasarkan pengeluaran perkapita. Salah satu metode statistika yang dapat menggambarkan hubungan fungsional antara variabel respon dan variabel prediktor adalah metode regresi. Dalam metode regresi, ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengestimasi fungsi regresi yaitu pendekatan parametrik (model global) dan pendekatan nonparametrik (model lokal). Salah satu estimator dalam model regresi nonparametrik adalah estimator spline yang dapat memberikan fleksibilitas yang lebih baik untuk menangani sifat kelokalan /karakteristik suatu data karena terdiri dari potongan-potongan polinomial berbeda yang digabungkan bersama titik knot dengan tetap menjamin sifat kekontinuan. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengeluaran non-makanan terhadap persentase kemiskinan di Indonesia dibangun model regresi. Dengan pendekatan model linier global (parametrik) diperoleh estimasi model dengan nilai *mean square error* (MSE)

sebesar 10,248. Sedangkan dengan pendekatan model linier lokal berdasarkan estimator spline diperoleh nilai MSE sebesar 4,133. Berdasarkan kriteria *goodness of fit* yaitu MSE disimpulkan bahwa dengan pendekatan model linier lokal berdasarkan estimator spline lebih baik daripada pendekatan linier global (parametrik).

Berdasarkan hasil estimasi model dapat menjelaskan bahwa jika variabel pengeluaran perkapita kurang dari 0,47 juta rupiah, maka setiap kenaikan satu juta rupiah pengeluaran perkapita non-makanan akan menurunkan presentase kemiskinan sebesar 68,71 persen. Jika variabel pengeluaran perkapita lebih dari sama dengan 0,47, maka setiap kenaikan satu juta rupiah pengeluaran perkapita non-makanan akan menurunkan presentase kemiskinan sebesar 5,96 persen. Jadi pengaruh peningkatan pengeluaran perkapita non-makanan terhadap penurunan persentase kemiskinan terbesar jika pengeluaran perkapita non-makanan kurang dari 0,47 juta rupiahlah . Berikut adalah Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) di kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Barang Tahun 2014 – 2022



Tabel 2.103
Rata – Rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan (Rupiah) Menurut Kelompok Barang Tahun 2014 – 2024

No	Jenis Kelompok Barang	Tahun										
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
A	MAKANAN											
1	Padi-Padian	78,346	89,424	80,513	83,881	76,894	80,091	70,407	85,314	96,552	103,091	104.741
2	Umbi-umbian	2,491	89,424	4,305	4,45	3,35	4,287	5,094	8,952	15,016	20,429	18.397
3	Ikan / Udang / Cumi / Kerang	59,033	89,424	44,199	69,395	60,224	69,951	70,913	92,546	113,375	206,753	135,052
4	Daging	10,866	89,424	14,463	22,752	13,936	12,754	23,359	28,525	32,551	126,858	60,896
5	Telur dan Susu	15,477	89,424	17,643	23,648	20,346	18,975	26,7	29,202	29,602	48,712	38,050
6	Sayur- sayuran	35,995	89,424	44,423	50,501	50,249	42,056	50,841	68,454	86,692	99,221	93,976
7	Kacang-kacangan	6,544	89,424	6,351	10,398	7,988	8,618	10,235	11,205	11,371	19,052	17,530
8	Buah-buahan	16,959	89,424	16,057	27,309	18,638	19,426	24,447	31,752	38,700	73,849	54,524
9	Minyak dan Kelapa	16,136	89,424	15,492	20,18	18,101	15,294	17,299	21,49	24,977	31,357	30,162
10	Bahan Minuman	15,302	89,424	15,424	18,489	16,99	15,961	19,076	22,74	25,289	27,971	25,778
11	Bumbu-bumbuan	16,003	89,424	9,277	9,258	11,609	10,42	13,758	17,939	21,955	27,878	24,206
12	Konsumsi Lainnya	6,671	89,424	5,43	9,184	5,76	5,533	7,747	10,355	13,013	19,657	15,878
13	Makanan dan Minuman Jadi	43,551	89,424	96,233	146,398	136,521	130,481	183,921	251,712	324,353	382,381	381,954
14	Rokok	65,322	89,424	80,864	107,937	86,151	100,564	105,819	141,145	141,727	169,798	118,978
Jumlah Makanan		378,666	89,424	450,675	603,78	526,757	534,41	629,616	821,33	1.010.418	1.357.005	1.120.123
B	BUKAN MAKANAN											
1	Perumahan dan fasilitas rumah tangga	108,534	160,589	164,41	170,542	191,217	204,937	263,718	245,322	233,116	331,047	361,799
2	Aneka Barang dan Jasa	78,539	58,579	76,994	63,525	80,019	74,255	113,369	109,663	108,271	150,083	127,796
3	Pakaian, Alas Kaki dan tutup Kepala	39,139	35,014	27,344	47,748	48,881	49,402	61,578	66,743	66,334	80,624	76,040
4	Barang-barang yang tahan lama	23,655	19,003	28,422	34,76	21,134	27,56	34,459	48,584	64,126	29,843	47,883

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



2.4.1.3. Iklim Berinvestasi

Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Pembentukan daya saing investasi berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor terkait potensi dan peluang investasi yang dimiliki daerah serta kemudahan perizinan.

Kemudahan perijinan dalam proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Adapun jenis-jenis perijinan yang dilayani antara lain: a) SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan); b) TDP (Tanda Daftar Perusahaan); c) IUI (Izin Usaha Industri); d) TDI (Tanda Daftar Industri); e) IMB (Izin Mendirikan Bangunan); dan e) HO (Izin Gangguan).

Saat ini pelayanan perijinan di Kabupaten Nagan Raya sudah berada pada satu atap layanan proses administrasi pelayanan perizinan dilakukan dengan menggunakan Sistim Informasi Manajemen (SIM) Perizinan. Waktu proses pelayanan sebagaimana tertuang dalam SOP yang telah ditetapkan pada peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 065/252/2015 tanggal 1 November 2015.

Tabel 2.104
Lama Proses Pelayanan, Jumlah Persyaratan (Dokumen), dan Biaya Perijinan Kabupaten Nagan Raya

No.	Jenis Perizinan	Jenis Data	Keterangan
1	SIUP	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	1
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
2	TDP	Waktu proses pelayanan (hari)	2
		Jumlah persyaratan (berkas)	4
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
3.	IUI	Waktu proses pelayanan (hari)	3
		Jumlah persyaratan (berkas)	9
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
4.	TDI	Waktu proses pelayanan (hari)	12
		Jumlah persyaratan (berkas)	6
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya
5.	IMB	Waktu proses pelayanan (hari)	14
		Jumlah persyaratan (berkas)	14
		Biaya mengurus persyaratan	225.000xkoefesien(sesuai Qanun)
6.	HO	Waktu proses pelayanan (hari)	7
		Jumlah persyaratan (berkas)	7
		Biaya mengurus persyaratan	Tidak dipungut biaya

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



Untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini, dalam rangka pelayanan perizinan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya juga telah menerapkan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang dikenal dengan OSS (*One Single Submission*) yang merupakan platform yang diciptakan oleh Pemerintah untuk memfasilitasi proses perizinan usaha secara terintegrasi dan elektronik. Tujuan utama OSS adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dengan menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, IDSD menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi. Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing daerah, sebuah alat ukur yang dikembangkan untuk menilai kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan berbagai sumber daya secara efektif dan efisien. Indeks ini digunakan sebagai tolok ukur bagi pemerintah daerah untuk memahami posisi daya saingnya dibandingkan dengan daerah lain, serta untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam aspek pembangunan. IDSD terdiri atas empat komponen pembentuk daya saing yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi yang diterjemahkan ke dalam 12 pilar daya saing yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, Stabilitas ekonomi makro, Kesehatan, ketrampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, system keuangan, ukuran pasar, dinamika bisnis, kapabilitas inovasi. pada tahun 2021 Indeks daya saing daerah kabupaten Nagan Raya adalah 2,3 kemudian pada tahun 2022 Indeks daya saing daerah kabupaten Nagan Raya tidak dapat diukur dikarenakan belum lengkapnya data Kabupaten Nagan Raya pada pilar 1, Selanjutnya untuk tahun 2023 dan 2024 Indeks daya saing daerah kabupaten Nagan Raya adalah 2,90 dan 3,15 . Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.105
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nagan Raya

No	Tahun	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nagan Raya
1	*2021	2,3
2	2022	-
3	2023	2,90
4	2024	3,15

Sumber : *data awal 2021, Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Hasil dari indeks ini tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi kinerja pemerintah daerah, tetapi juga sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran. Dengan demikian, IDSD menjadi instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan tantangan pembangunan jangka panjang.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur

2.4.2.1. Persentase Penduduk Menggunakan Air Bersih

Penduduk yang berakses air minum layak pada Tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 82,00%. Adapun kriteria yang digunakan untuk menghitung pencapaian akses air minum layak terdiri dari sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindungi, dan penampungan air hujan serta depot air minum. Untuk jaringan perpipaan, akses air minum tahun 2021 sampai 2024 mengalami peningkatan sebesar 1,02 %. Peningkatan penduduk Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk membangun sarana dan prasarana air minum berbasis jaringan perpipaan serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat terhadap pentingnya air minum layak.

Capaian target air minum telah diraih oleh Pemda Nagan Raya walaupun masih banyak yang harus dilakukan terkait dengan pembangunan infrastruktur air minum dimana 4 SPAM yang ada di Kabupaten Nagan Raya belum beroperasi secara optimal. Saat ini Kabupaten Nagan Raya telah melakukan proses pembentukan Perumda sehingga salah satu SPAM di Nagan Raya dapat dioperasikan lebih efektif dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat Nagan Raya. Realisasi target capaian air minum di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada table dibawah ini.

Tabel 2.106
Akses Air Minum layak
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2024

No	Uraian	Sat	Tahun							
			*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Berakses Air Minum	%	42	52	67.64	72.24	76.74	81.04	81.80	82.00
2	Persentase Akses Air Minum non Perpipaan	%	0	0	10	10	10	10	10	10

Sumber : *data awal 2017, Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, 2025



2.4.2.2. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Target pencapaian terhadap ketersediaan energi sudah cukup baik perencapaiannya, Pada tahun 2018 rasio ketersediaan daya listrik adalah sebesar 98% dan meningkat menjadi 100% Pada Tahun 2024. Demikian pula dengan perkembangan daya terpasang, produksi, dan listrik terjual pada PT. PLN (Persero) cabang Kabupaten Nagan Raya, bahwa terjadi surplus produksi terhadap penjualan.

Tabel 2.107
Rasio Ketersediaan Daya Listrik

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	*2018	98	98
2	2019	98.5	98.5
3	2020	100	98.7
4	2021	100	99.52
5	2022	100	Selesai
6	2023	100	Selesai
7	2024	100	Selesai

Sumber : *data awal 2018, Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.4.2.3. Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik

Listrik merupakan salah satu energi yang sangat dibutuhkan oleh manusia khususnya dalam memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya sehari hari. Karena merupakan sebuah hal yang sangat penting, maka ketersediaan dan pemakaian listrik oleh masyarakat selalu meningkat. Dari data statistik pada Tahun 2018 persentase realisasi rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 95,78%, kemudian pada Tahun 2021 meningkat menjadi 99,08 persen. Pada tahun 2022 sampai 2024 realisasi rumah tangga yang menggunakan listrik sudah 100 persen dikarenakan di Kabupaten Nagan Raya sudah terbangunnya PLTU dan stok listrik sudah terpenuhi keseluruhan pelosok di Kabupaten Nagan Raya.

Tabel 2.108
Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)
1	*2018	95.78	95.78
2	2019	96.99	96.99
3	2020	98.57	98.57
4	2021	99.02	99.08
5	2022	100	100
6	2023	100	100
7	2024	100	100

Sumber : *data awal 2018, Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025

Indikator kinerja yang terdapat di dalam Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 lebih bersifat kualitatif sehingga tidak memuat indikator kinerja yang terukur. Selain hal tersebut, juga tidak terdapat target yang terukur (kuantitatif) yang ingin dicapai pada akhir periode RPJP. Evaluasi Capaian Kinerja Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya Tahun 2005-2025 dilakukan terhadap 7 (tujuh) indikator makro dengan menganalisis capaian kinerja sampai dengan Tahun 2022 dibandingkan dengan kondisi awal Tahun 2005 atau data tahun terakhir yang tersedia (jika data Tahun 2005 tidak tersedia).

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap capaian 7 (tujuh) Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Nagan Raya menunjukkan tren sbb:

- a. Sebanyak 4 (empat) indikator menunjukkan kecenderungan **Meningkat On The Track** yang diindikasikan oleh meningkatnya capaian kinerja Indeks Pembangunan Manusia, Persentase Penduduk Miskin, PDRB Perkapita, dan Indek Gini.
- b. Sebanyak 1 (satu) indikator menunjukkan kecenderungan **Meningkat Moderat** yang diindikasikan oleh meningkatnya capaian kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka.
- c. Sebanyak 2 (dua) indikator menunjukkan kecenderungan **Menurun** yang diindikasikan oleh menurunnya capaian kinerja Pertumbuhan PDRB dan Inflasi Daerah.

Analisis perkembangan kinerja terhadap pencapaian 7 (tujuh) indikator Makro Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel di bawah ini



Tabel 2.109
Analisis Perkembangan Kinerja Terhadap Pencapaian Indikator Makro Kabupaten Nagan Raya

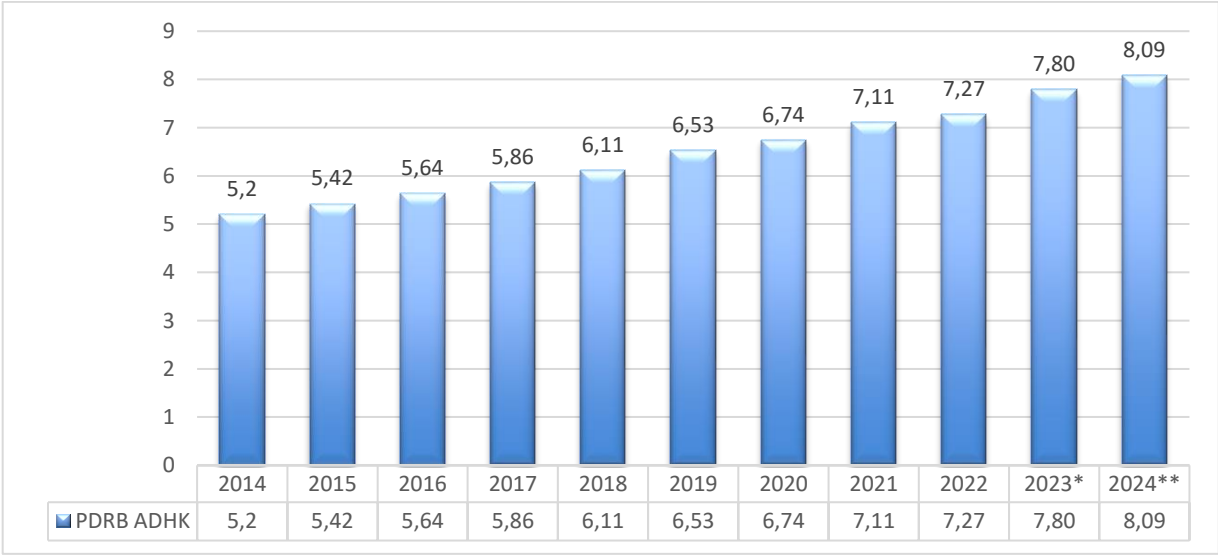
NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN						*HASIL YANG DIHARAPKAN (TAHUN 2025)	KONDISI SECARA KESELURUHAN (Hingga Tahun 2022)
			2013	2017	2018	2022	2023	2024		
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Index	64,24	67,78	68,15	71,46	72,15	73,10	71,53	Meningkat <i>On the Track</i>
2	Persentase Penduduk Miskin	%	21,75	19,34	18,97	17,38	17,25	16,94	15,50	Meningkat <i>On The Track</i>
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,77	4,11	5,91	5,84	4,08	3,92	3,78	Meningkat Moderat
4	Pertumbuhan PDRB	%	2,62	3,95	4,29	2,37	6,83	4,38	4,4	Menurun
5	PDRB per Kapita (ADHK)	Rp (Juta)	31,66	36,35	37,19	41,98	44,49	45,89	45,75	Meningkat <i>On the Track</i>
6	Indeks Gini	%	0,228	0,231	0,284	0,236	0,207	0,159	0,265	Meningkat <i>On the track</i>
7	Inflasi	%	n.a.	3,3	2,44	7,38	5,28	3,29	3,29	Menurun

Sumber :- BPS Kabupaten Nagan Raya - Hasil yang diharapkan (Tahun 2025) berdasarkan RPK Nagan Raya Tahun 2023-2026

2.5.1 Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Kabupaten Nagan Raya mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga tahun 2024. Pada tahun 2014 nilai PDRB ADHK sebesar 5,2 triliun rupiah dan terus meningkat hingga tahun 2024 sebesar 8,09 triliun Rupiah. Pada tahun 2023 nilai PDRB ADHK mengalami kenaikan yang sangat drastis sebesar 0,53% menjadi 7,80 triliun rupiah dan pada tahun 2024 terus mengalami kenaikan sebesar 8,09 triliun rupiah. Kondisi nilai PDRB ADHK Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.33
Nilai PDRB ADHK Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 – 2024 (triliyun)



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Unsur utama yang mempengaruhi pembentukan PDRB ADHK di Kabupaten Nagan Raya adalah konsumsi rumah tangga, konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRRT), konsumsi pemerintah dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB). Berikut tabel laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut pengeluaran tahun 2014-2023 :

Tabel 2.110
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Pengeluaran
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2023

No	KOMPONEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kons. RT	3,47	3,45	4,36	3,11	3,53	3,79	0,84	1,92	2,79	5,72
2	Kons. LNPRRT	15,74	-2,6	6,11	4,11	7,4	14,75	-1,27	-2,33	5,5	9,84
3	Kons. Pemerintah	4,4	4,57	0,52	1,01	0,88	7	-8,67	2,46	-6,71	7,32
4	PMTB	6,64	5,45	2,29	0,72	2,64	5,14	5,83	1,28	-2,52	6,04

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, 2025

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat pada tahun 2020, 2021 dan 2022 ekonomi Kabupaten Nagan Raya tumbuh melambat akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini menyebabkan laju pertumbuhan melambat di beberapa komponen konsumsi rumah tangga, konsumsi LNPRt, konsumsi pemerintah dan PMTB. Penurunan tersebut terjadi juga karena meningkatnya risiko stagflasi, ketidakpastian pasar keuangan global, tekanan inflasi, dan situasi geopolitik yang menyebabkan terjadinya resesi global. Namun demikian, secara umum Kinerja pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya mencerminkan kondisi yang cukup baik, seperti yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

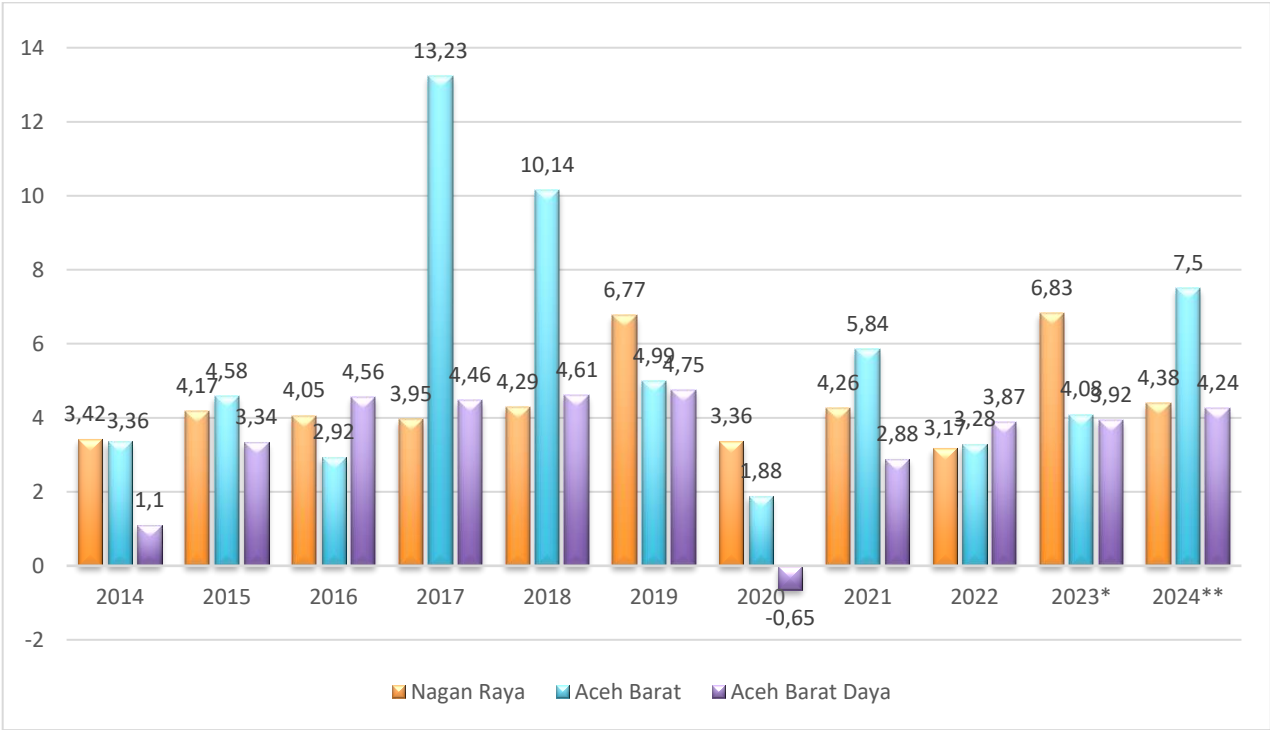
Tabel 2.111
Target dan Realisasi Pertumbuhan Ekonomi
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
TARGET	5,5	6,0	6,5	3,95	4,29	6,77	3,54	4,05	4,48	4,20	4,30
REALISASI	3,42	4,17	4,95	3,95	4,29	6,77	3,36	5,37	2,37	4,20	4,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, 2025

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Nagan Raya cenderung fluktuatif. Namun demikian pada periode 2017-2019 mengalami peningkatan selama 3 tahun berturut-turut. Pada Tahun 2020 kembali menurun pada angka 3,36% dan meningkat kembali pada tahun 2021 yang mencapai 5,37 persen. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali sebesar 2,37% dan kenaikan kembali di tahun 2024 sebesar 4,30%. Kenaikan ini diperkirakan karena harga TBS pada tingkat petani meningkat cukup signifikan. Berikut disajikan gambar perbandingan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Aceh Barat Daya dari tahun 2011 sampai tahun 2022.

Gambar 2.34
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nagan Raya,
Aceh Barat dan Aceh Barat Daya Tahun 2014-2024



Sumber : BPS Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya masih fluktuatif. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Barat Daya, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagan Raya cenderung lebih stabil walaupun ada penurunan di tahun 2020 dan 2022 tetapi tidak signifikan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya menurun akibat adanya pandemi COVID-19 dan kembali meningkat di tahun 2021.

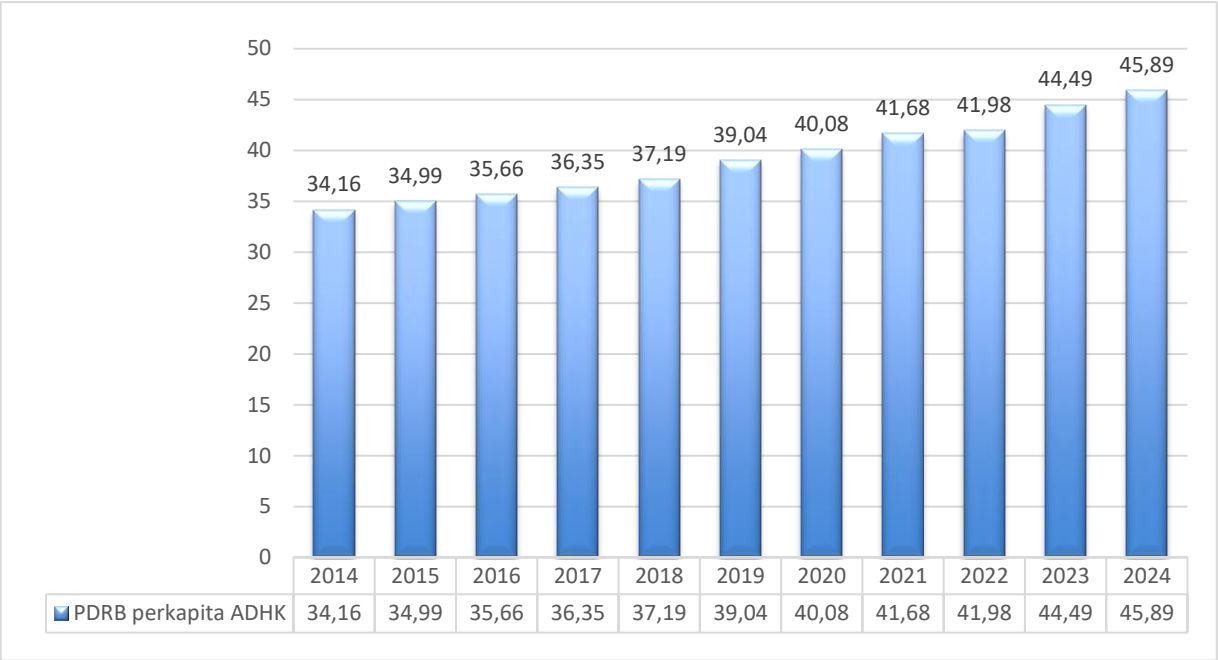
2.5.2 Pendapatan Per Kapita/ PDRB Perkapita

Pendapatan perkapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. Pendapatan perkapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat disuat daerah. PDRB per kapita Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, baik PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB).

PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nagan Raya menunjukkan peningkatan yang cukup pesat pada kurun waktu Tahun 2014-2024. Pada Tahun 2014 PDRB Perkapita ADHK tercatat sebesar 34,16 juta Rupiah, Tahun 2020 meningkat menjadi 40,08 juta Rupiah, Tahun 2023 meningkat lagi menjadi 44,49 juta

Rupiah dan peningkatan tertinggi PDRB Perkapita ADHK tercatat pada Tahun 2024 yaitu sebesar 45,89 juta Rupiah. Perkembangan PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.35
PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nagan Raya (juta rupiah)
Tahun 2014-2024

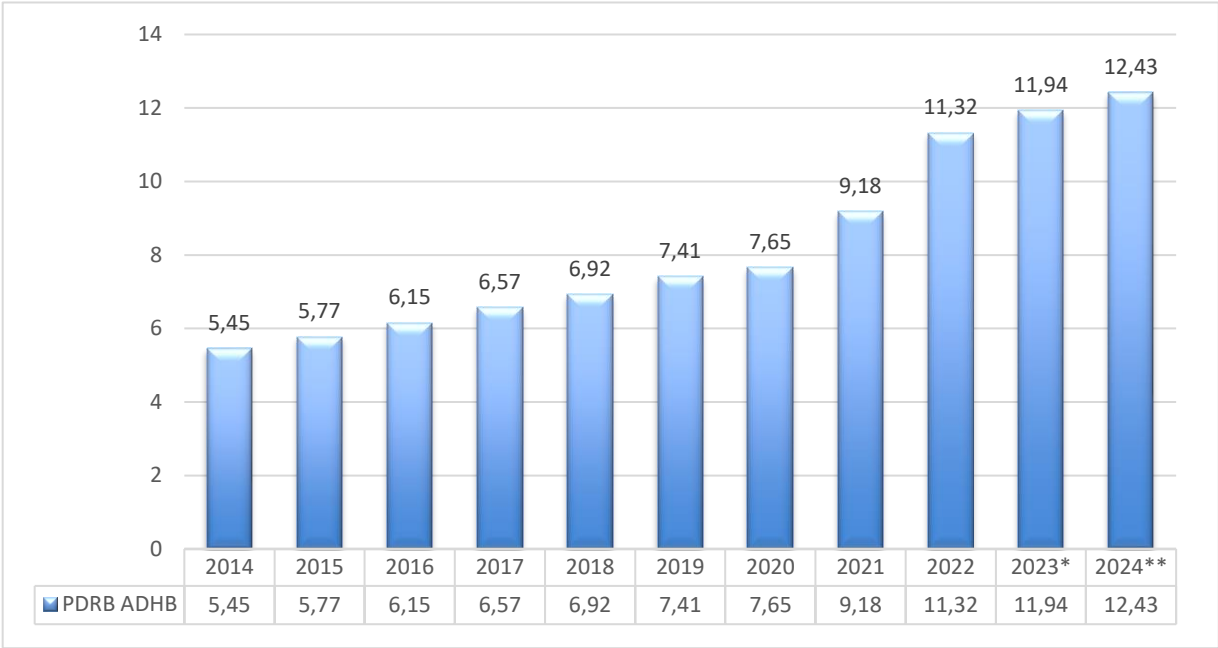


Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa PDRB Perkapita ADHK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 mengalami peningkatan.

PDRB ADHB digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi, menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi suatu daerah, dan menunjukkan pendapatan yang memungkinkan untuk dinikmati oleh penduduk suatu daerah. Sebagaimana PDRB Perkapita ADHK, PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu Tahun 2014-2024 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2014 PDRB per kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 5,45 triliyun rupiah dan pada Tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi sebesar 7,65 triliyun rupiah. Pertumbuhan PDRB per kapita ADHB tertinggi terjadi Tahun 2024, dimana pada Tahun 2024, PDRB per kapita ADHB Kabupaten Nagan Raya mencapai 12,43 triliyun rupiah. Perkembangan PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 2.36
PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nagan Raya (triliyun)
Tahun 2014-2024



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa PDRB Perkapita ADHB Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 mengalami peningkatan.

2.5.3 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini)

Indeks Gini atau Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran secara menyeluruh yang dapat dinilai dengan indeks kisaran 0 sampai 1. Jadi, semakin mendekati angka 0 maka pemerataan pendapatan atau tingkat ketimpangan masyarakat semakin baik yang artinya setiap orang memiliki jumlah penghasilan atau kekayaan yang hampir sama persis, dan semakin mendekati angka 1 maka pemerataan pendapatan atau tingkat ketimpangan masyarakat semakin buruk, dapat diartikan dalam populasi tersebut beberapa orang memiliki segalanya dan yang lainnya tidak memiliki apa-apa. Indeks gini lebih kecil dari 0,4 menunjukkan tingkat ketimpangan rendah, nilai 0,4-0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan sedang dan nilai lebih besar dari 0,5 menunjukkan tingkat ketimpangan tinggi.

Walaupun dalam kenyataannya masih terdapat banyak pertimbangan untuk menyatakan pemerataan tingkat pendapatan masyarakat, Indeks Gini menjadi salah satu ukuran yang memenuhi empat kriteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Berdasarkan

penjabaran tersebut, maka Indeks Gini valid untuk digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan. Perkembangan indeks gini Kabupaten Nagan Raya tahun 20014-2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.112
Ketimpangan Pendapatan/ Indeks Gini
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024

No	Tahun	Indeks Gini	Rata-rata nilai indeks gini
1	2014	0,278	0,25
2	2015	0,274	0,25
3	2016	0,282	0,25
4	2017	0,231	0,25
5	2018	0,284	0,25
6	2019	0,525	0,25
7	2020	0,275	0,25
8	2021	0,257	0,25
9	2022	0,236	0,25
10	2023	0,207	0,25
11	2024	0,157	0,25

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, 2025

2.5.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Masalah Pengangguran bagian yang terpenting dalam mengukur pertumbuhan ekonomi, dengan naiknya angka pengangguran terbuka maka akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah dimana tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan sebagai landasan pengukuran bagi tingkat pengangguran terbuka di daerah.

Kabupaten Nagan Raya menghadapi berbagai tantangan dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka, meskipun beberapa upaya positif telah dilakukan. Salah satu tantangan utama adalah adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhan dunia industri atau pasar kerja (skill mismatch). Meskipun pemerintah daerah telah menyelenggarakan berbagai pelatihan vokasi seperti menjahit, las, servis elektronik, hingga pelatihan konten kreator, keterampilan yang diberikan sering kali belum sepenuhnya sesuai dengan permintaan tenaga kerja saat ini. Selain itu, struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor tradisional seperti pertanian dan perkebunan, tanpa adanya diversifikasi yang signifikan ke sektor industri, pariwisata, atau ekonomi kreatif, membuat penyerapan tenaga kerja menjadi terbatas. Tantangan lain yang turut memperburuk situasi adalah terbatasnya infrastruktur pendukung dan akses terhadap permodalan,

khususnya bagi pelaku UMKM dan wirausahawan muda yang ingin menciptakan lapangan kerja baru. Kurangnya investasi di sektor-sektor produktif juga memperlambat penciptaan lapangan kerja berkualitas. Di sisi lain, meskipun pelatihan ekonomi digital mulai diperkenalkan, akses terhadap teknologi, jaringan pendampingan, serta ekosistem monetisasi masih belum memadai.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif selama dari tahun 2014-2024. pada tahun 2014 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya sebesar 3,69 persen dan pada tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Nagan Raya sebesar 5,22 persen.

Lapangan kerja sesuai dengan distribusi PDRB yang berpengaruh adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, jika berkurang sangat berpengaruh pada angka pengangguran, lapangan kerja sektor pertanian dengan adanya teknologi sangat mempengaruhi tenaga kerja dan pengangguran. Lapangan usaha Sektor kontruksi sangat berkurang

Pemerintah diharapkan menciptakan lapangan kerja Percepatan Pembangunan Refenery CPO dan PKO pada Tahun 2024 dan menjalin kerja sama dengan pihak swasta perekrutan tenaga kerja lokal sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Nagan Raya akan menurun. TPT dan TPAK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.113
TPT dan TPAK Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014-2024

TAHUN	URAIAN	
	TPT	TPAK
2014	3.69	63.74
2015	3.97	59.51
2016	4.03	61.13
2017	4.11	62.75
2018	5.91	60.83
2019	5.35	61.63
2020	5.11	66.61
2021	4.99	64.99
2022	5.84	66.64
2023	5.74	66.64
2024	5.22	63.65

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, 2025

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami

perubahan. selanjutnya jika dibandingkan dengan 3 Kabupaten perbatasan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagan Raya dan 3 Kabupaten perbatasan Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.114
TPT Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Perbatasan
Tahun 2014-2024

URAIAN	TAHUN	KABUPATEN			
		NAGAN RAYA	ACEH BARAT	ACEH BARAT DAYA	ACEH TENGAH
TPT	2014	3.69	5.86	6.7	3.32
	2015	3.97	6.77	11.6	3.13
	2016	4.03	n.a	n.a	n.a
	2017	4.11	6.20	3.16	3.91
	2018	5.91	8.67	3.95	2.13
	2019	5.35	7.45	4.30	2.65
	2020	5.11	7.30	3.93	3.05
	2021	4.99	7.09	4.04	2.61
	2022	5.84	6.09	4.12	4.44
	2023	5.74	6.07	4.08	4.42
	2024	5.22	5.58	3.8	4.41

Sumber : BPS Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas Angka Pengangguran Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Barat dan lebih tinggi dibandingkan dengan Kabupaten Aceh Barat Daya dan Aceh Tengah, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya tahun 2024 sebesar 5,22 % sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat sebesar 5,58 %, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Barat Daya sebesar 3,83 %, serta Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Aceh Tengah sebesar 4,41 %. Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.115
TPT Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional
Tahun 2014-2024

TAHUN	TPT (%)		
	NAGAN RAYA	ACEH	NASIONAL
2014	3.69	9.02	5.94
2015	3.97	9.93	6.18
2016	4.03	7.57	5.61
2017	4.11	6.57	5.5
2018	5.91	6.34	5.3
2019	5.35	6.17	5.23
2020	5.11	6.59	7.07
2021	4.99	6.30	6.49
2022	5.84	6.17	5.46
2023	5.74	6.03	5.32
2024	5.22	5.75	4.91

Sumber : BPS , Tahun 2025

Dari Tabel diatas Pencapaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 sebesar 5,22% lebih rendah dibandingkan dengan Aceh 5,75% dan masih lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional dengan TPT sebesar 4,91%.

2.5.5 Tingkat Kemiskinan

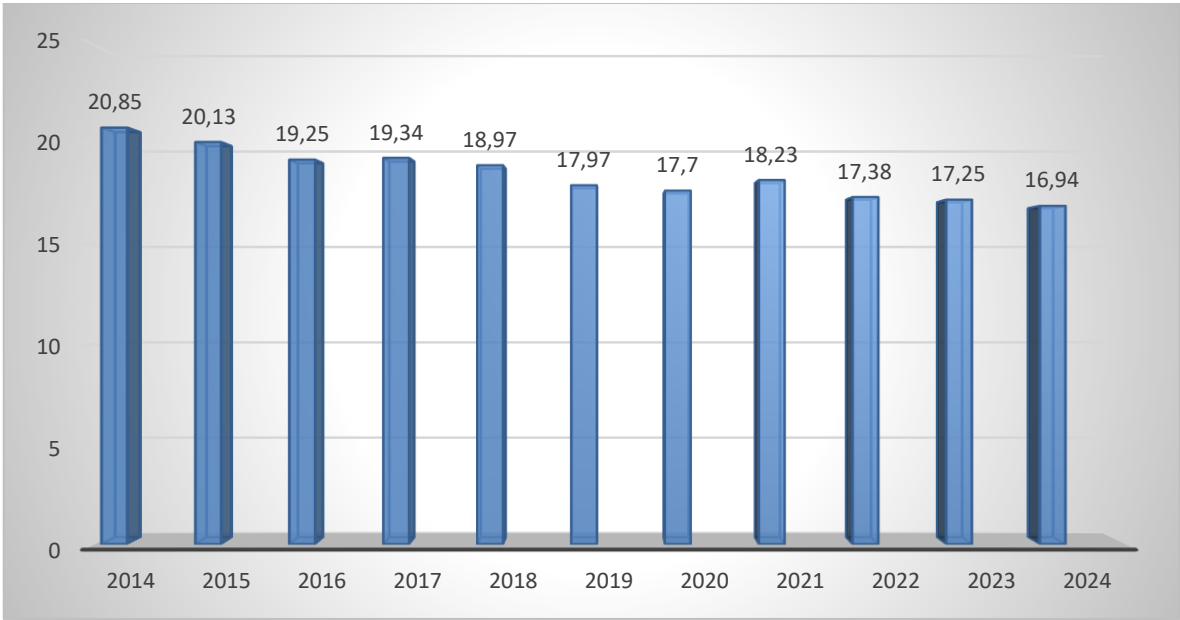
Tantangan sekaligus sasaran utama program Pembangunan Kabupaten Nagan Raya sejak 2014 hingga 2025 adalah Penanggulangan Kemiskinan. Data BPS menunjukkan persentase penduduk miskin Nagan Raya pada tahun 2014 adalah sebesar 20,85 % dan terus menurun menjadi 16,94 % pada Tahun 2024. Pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya adalah pelaksanaan penanggulangan pemiskinan yang ditandai dengan turunnya Angka Kemiskinan setiap tahunnya melalui 6 sasaran program; (1) peningkatan sarana dan prasarana di kantong-kantong kemiskinan; (2) peningkatan akses kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat miskin; (3) terbukanya kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat kurang mampu; (4) tersedianya asuransi kesehatan bagi masyarakat miskin; tersedianya beasiswa untuk anak-anak golongan miskin; (5) adanya pembangunan rumah layak huni; dan (6) tersedianya modal berusaha bagi kaum miskin.

Setelah berjalan 18 tahun, kajian evaluatif pencapaian target RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 205-2025 dilakukan berdasarkan data statistik BPS meliputi; (1) Persentase Penduduk Miskin 2014-2024; (2) Keadaan Garis Kemiskinan Nagan Raya, dibandingkan dengan Nasional, Aceh dan 2 Kabupaten

terdekat; (3) Tingkat Kedalaman (P1) dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2); dan (4) Tingkat Pengangguran Terbuka.

Jika kita tinjau lebih lanjut tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sejak 2014 sampai dengan 2024 mengalami penurunan rata-rata 0,4 %, ini masuk katagori sangat lambat. Sedangkan pada tahun 2023 sampai 2024 turun rata-rata sebesar 0,31%. Penurunan persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023 dari sebesar 17,25 persen menjadi 16,94 persen pada 2024 merupakan hasil pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang didukung oleh Program Pemerintah dan pememrinmtah Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Perkembangan Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

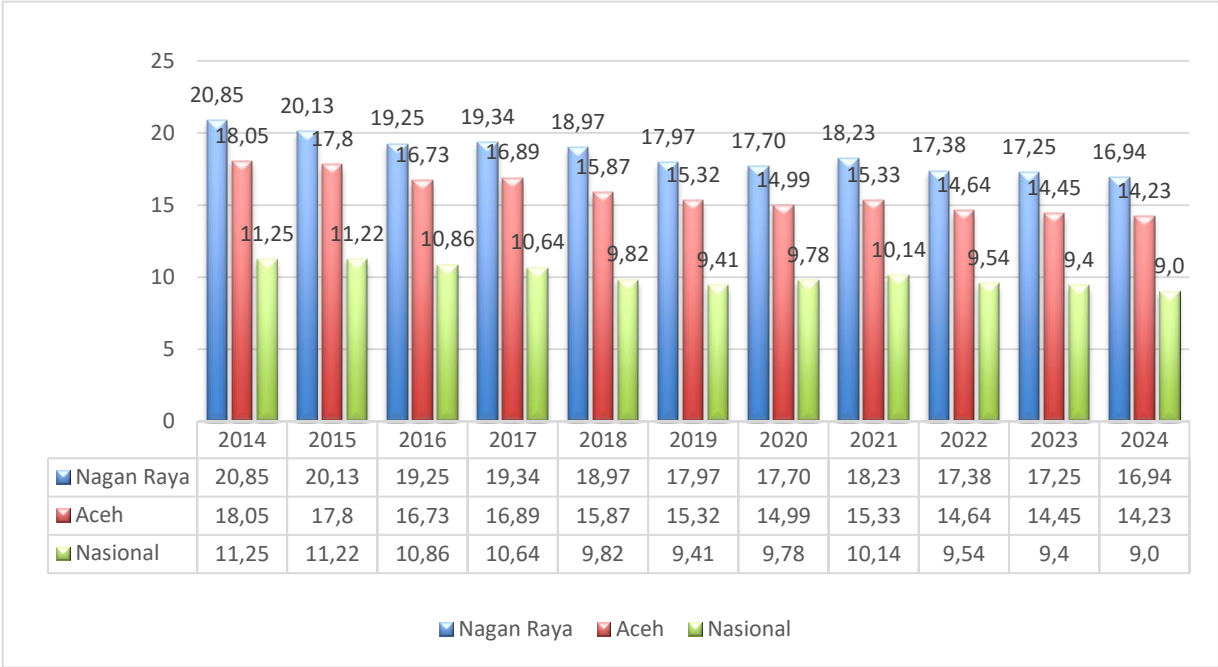
Gambar 2.37
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 – 2024



Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, 2025

Secara umum persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya masih di atas persentase penduduk miskin provinsi Aceh dan Nasional. Tahun 2014 persentase penduduk miskin Nagan Raya sebesar 20,85 % lebih tinggi dari Provinsi Aceh yaitu sebesar 18,05 % dan Nasional sebesar 11,25 %. Perbandingan persentase penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan Nasional Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2.38
Persentase Penduduk Miskin Nasional, Aceh,
dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024



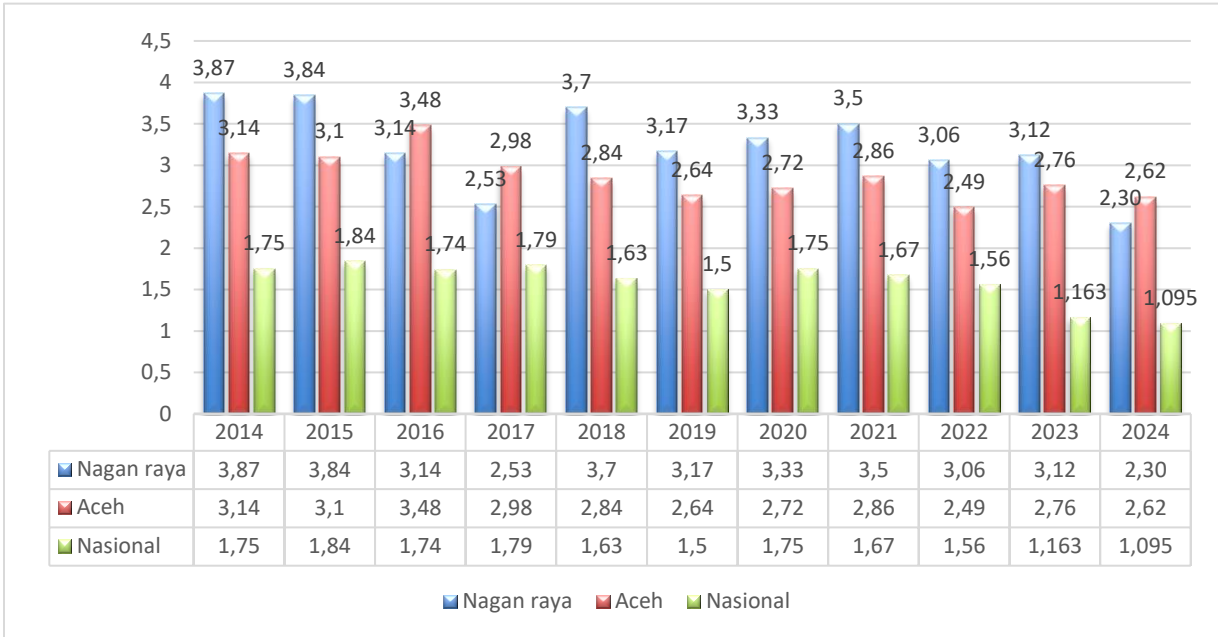
Sumber : BPS, Tahun 2025

Salah satu penyebab lambatnya penurunan penduduk miskin dan lahirnya kemiskinan ekstrem dikarenakan naiknya Garis Kemiskinan secara reguler setiap 2 tahun sekali yang belum koheren dengan keadaan sesungguhnya kehidupan masyarakat khusus masyarakat miskin. Kenaikan GK ini adalah karena naiknya harga komoditas makanan yang menjadi konsumsi utama rakyat antara lain; beras, lauk-pauk, gula, dan rokok. Itu artinya, Garis Kemiskinan Makanan menjadi salah satu pemicu naiknya Garis Kemiskinan Nagan Raya. Sementara Garis Kemiskinan Bukan Makanan tidak terlalu besar pengaruhnya.

Jika dilihat dari Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Semakin kecil nilai *poverty gap index*, semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan kemiskinan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin dan juga untuk target sasaran bantuan dan program. Dalam pandangan BPS, Penurunan nilai indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit.

Pada gambar berikut ini terlihat jelas bahwa tingkat kedalaman kemiskinan (P1) Nagan Raya berada diatas tingkat kedalaman kemiskinan Nasional dan Aceh.

Gambar 2.39
Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1) Nasional, Aceh, Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024

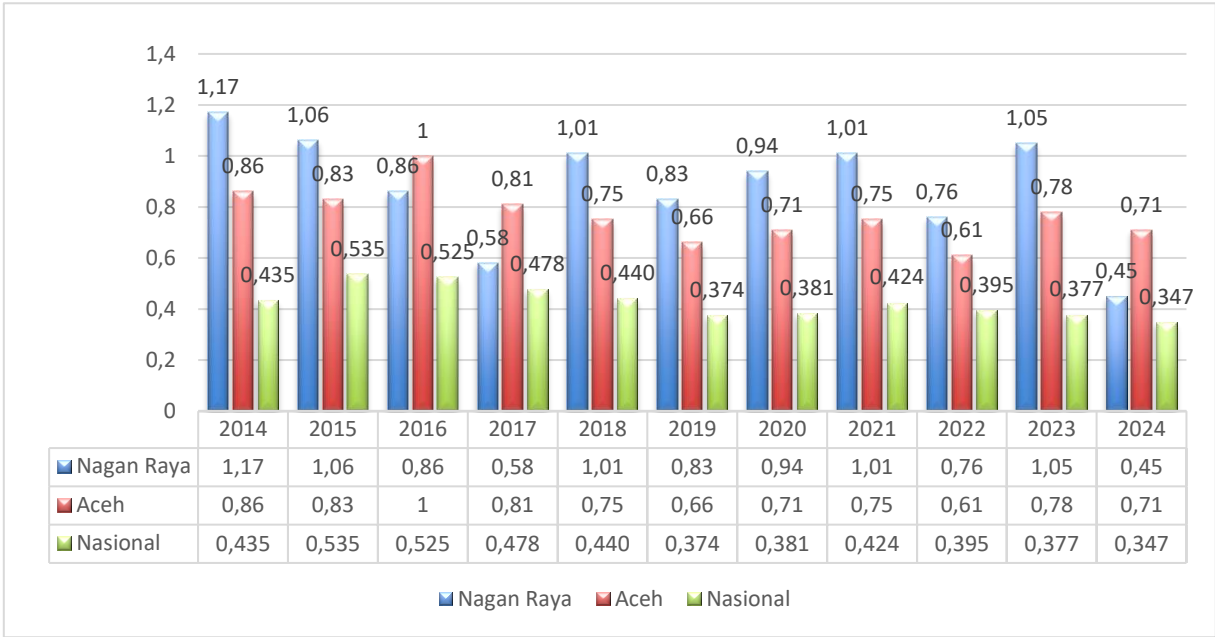


Sumber : BPS, Tahun 2025

Itu artinya, kesenjangan dan atau ketimpangan pengeluaran masyarakat khususnya masyarakat miskin semakin melebar dari garis kemiskinan. Indikator ini menunjukkan program penanggulangan kemiskinan belum dapat menurunkan kesejangan sosial dan atau ketimpangan pendapatan dan pengeluaran masyarakat miskin.

Jika kita telaah atau dilakukan pengkajian terhadap pencapaian target RPJP Nagan Raya dari aspek Indeks Keparahan Kemiskinan (*poverty severity index-P2*), sebagai gambaran bagaimana penyebaran pengeluaran diantara masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Semakin tinggi ketimpangan pengeluaran antar masyarakat miskin, bermakna semakin tinggi tingkat keparahannya (indeksnya). Gambar dibawah ini menunjukkan indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam 10 tahun terakhir di Nagan Raya berada di atas indeks keparahan nasional dan Aceh. Itu artinya tingkat keparahan kemiskinan di Nagan Raya, memerlukan perhatian khusus dengan alokasi dana yang terukur untuk mengeluarkan daerah tersebut dari kemiskinan ekstrem.

Gambar 2.40
Indeks Keparahan Kemiskinan Nasional,
Aceh, dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014 – 2024



Sumber : BPS, Tahun 2025

Saat Indonesia ditetapkan sebagai kawasan Pandemi Covid-19, Nagan Raya menjadi salah daerah berdampak atas status Pandemi Covid-19 tersebut. Secara statistik sampai tanggal 13 May 2023, Jumlah korban Terkonfirmasi Covid-19 di Nagan Raya mencapai 641 orang yang terdiri dari; sembuh 573 orang, dalam perawatan 2 orang, dan yang meninggal 66 orang. Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak meningkatnya jumlah penduduk miskin di Nagan Raya, dari 29,93 ribu jiwa (tahun 2019) menjadi 29,99 ribu jiwa pada (tahun 2020), dan terus meningkat ditahun 2021 mencapai 30,71 ribu jiwa.

Pandemi Covid-19 Menjadi salah satu penyebab tingkat P1 dan P2 Kabupaten Nagan Raya tinggi dari Garis Kemiskinan. Hal ini menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 berdampak pada kedalaman dan keparahan kemiskinan. Perubahan perilaku (new culture) dan aktivitas ekonomi (new ecosystem economic) telah mendorong peningkatan jumlah dan angka kemiskinan ditingkat Kabupaten sampai dengan Gampong/Desa. Artinya, pandemi Covid-19, telah memberikan dampak pada pendapatan dan garis kemiskinan.

Dalam 3 tahun (2020 - 2022) masa Pandemi Covid-19, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) telah pula berdampak pada terbatasnya serapan angkatan kerja produktif dan atau meningkatnya pengangguran (Lihat Gambar 5 dibawah), berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor, pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, ketahanan masyarakat terhadap penyakit, dan riskan akan perubahan kondisi ekonomi.



Sekalipun di Kabupaten Nagan Raya tidak sepenuhnya menjalankan PPKM, namun Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian.

Dengan aksi cepat tanggap Pemerintah Aceh dan Pemerintah Nagan Raya bersama dukungan partisipasi Masyarakat atas pandemi covid-19, jumlah penduduk miskin tahun 2022 turun menjadi 29,63 ribu jiwa, namun karena kondisi Indeks P1 dan Indeks P2 tetap tinggi dari GK dan keadaan sosial dan ekonomi rakyat semakin “kurang sehat”, keadaan ini menjadikan Nagan masuk dalam katagori 10 daerah Kemiskinan Ekstrem di Aceh. Kemiskinan Ekstrem dalam pandangan PBB (United Nations) adalah kondisi ketidak-mampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan, tapi juga akses pada layanan sosial. Sementara dalam batasan yang pahami oleh Bank Dunia, penduduk miskin ekstrem adalah penduduk yang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari tidak lebih dari USD 1,9 PPP (*Purchasing Power Parity*).

Jika dilihat dari sisi pendapatan perkapita berdasarkan padangan Bank Dunia, sesungguhnya penduduk Nagan Raya tidak berada pada kelompok garis kemiskinan ekstrem yakni Rp 32,745/hari melainkan berada pada golongan menengah kebawah yakni Rp 55.590/hari.

2.5.6 Laju Inflasi

Inflasi merupakan tingkat kenaikan harga-harga yang terjadi secara umum pada suatu tahun tertentu. Seberapa besar tingkat inflasi yang terjadi selama ini di Kabupaten Nagan Raya yang dihitung oleh BPS Meulaboh. Mengutip publikasi data BPS, pada tahun 2021, data yang ada menunjukkan, tingkat inflasi di daerah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2017 dan tahun 2021 berada di atas rata-rata nasional, dan bahkan berada di atas Provinsi Aceh.

Perkembangan kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa di Kabupaten Nagan Raya yang tergambar dari laju inflasi dari Tahun 2014 sampai dengan 2024 cenderung meningkat. Rata rata inflasi di Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2024 berada di atas angka inflasi Provinsi Aceh. Hal tersebut merupakan suatu bentuk kemajuan yang perlu tetap dipertahankan, agar daya beli masyarakat tetap dapat menjangkau upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam kehidupan sehari hari, terutama bagi kelompok masyarakat miskin. Tingkat Inflasi Aceh dan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.116
Inflasi Nagan Raya dan Provinsi Aceh
Tahun 2014 - 2025

Daerah	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Meulaboh	8,2	0,58	3,77	4,76	2,44	0,96	4,24	2,07	6,56	1,42	3,29
Aceh	8,09	1,53	3,95	4,25	1,84	1,69	3,59	2,24	5,89	1,53	2,17

Sumber : BPS Aceh, 2025
(Ket. Inflasi Kabupaten Nagan Raya merujuk pada Inflasi Regional Meulaboh)

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya ikut berperan dalam menjaga serta mendorong terciptanya stabilitas harga-harga secara umum agar dimasa mendatang tidak menyebabkan inflasi yang tinggi. Inflasi yang tinggi dapat menyulitkan kehidupan anggota masyarakat yang berpenghasilan tetap dan rendah. Salah satu upaya penting yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah menjamin distribusi barang-barang dan jasa dengan lancar, dan membuka peluang peningkatan produksi lokal, terutama barang-barang kebutuhan pokok yang mampu dihasilkan oleh daerah serta peningkatan peran dan fungsi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Nagan Raya.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sangat mendukung Program Pemerintah Pusat dengan Penyaluran dana BLT untuk Masyarakat Prasejahtera di Kabupaten Nagan Raya, penyaluran dana BLT sangat berpengaruh dalam pengendalian dampak Inflasi, BLT telah disalurkan kepada Keluarga prasejahtera di kabupaten Nagan Raya sejak Tahun 2020 -2022 saat pandemi Covid 19 dan Pasca Covid 19. Upaya lain yang dilakukan untuk menjaga stabilitas harga yaitu dengan Kerja Sama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Barat dalam Bidang Perdagangan Komoditi dalam mendukung kemajuan Daerah dan untuk menekan Inflasi. Kesepakatan kerjasama ini merupakan wujud sinergitas dan kolaborasi dalam menyelaraskan program pembangunan daerah, khususnya dalam lingkup sektor pangan, perikanan dan pertanian Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat, serta turut menjadi upaya bersama dalam pengendalian inflasi daerah, sesuai dengan arahan dari Pemerintah Aceh dan pemerintah pusat.

Gerakan Pemanfaatan Lahan Perkarangan dapat menurunkan angka inflasi. Biasanya penyumbang angka inflasi dari komponen hasil pertanian adalah bawang dan Cabe. Dengan masyarakat menanam cabe dan bawah di perkarangan dapat menurunkan angka permintaan cabe dan bawah di pasar.

2.5.7 Indeks Pembangunan Manusia

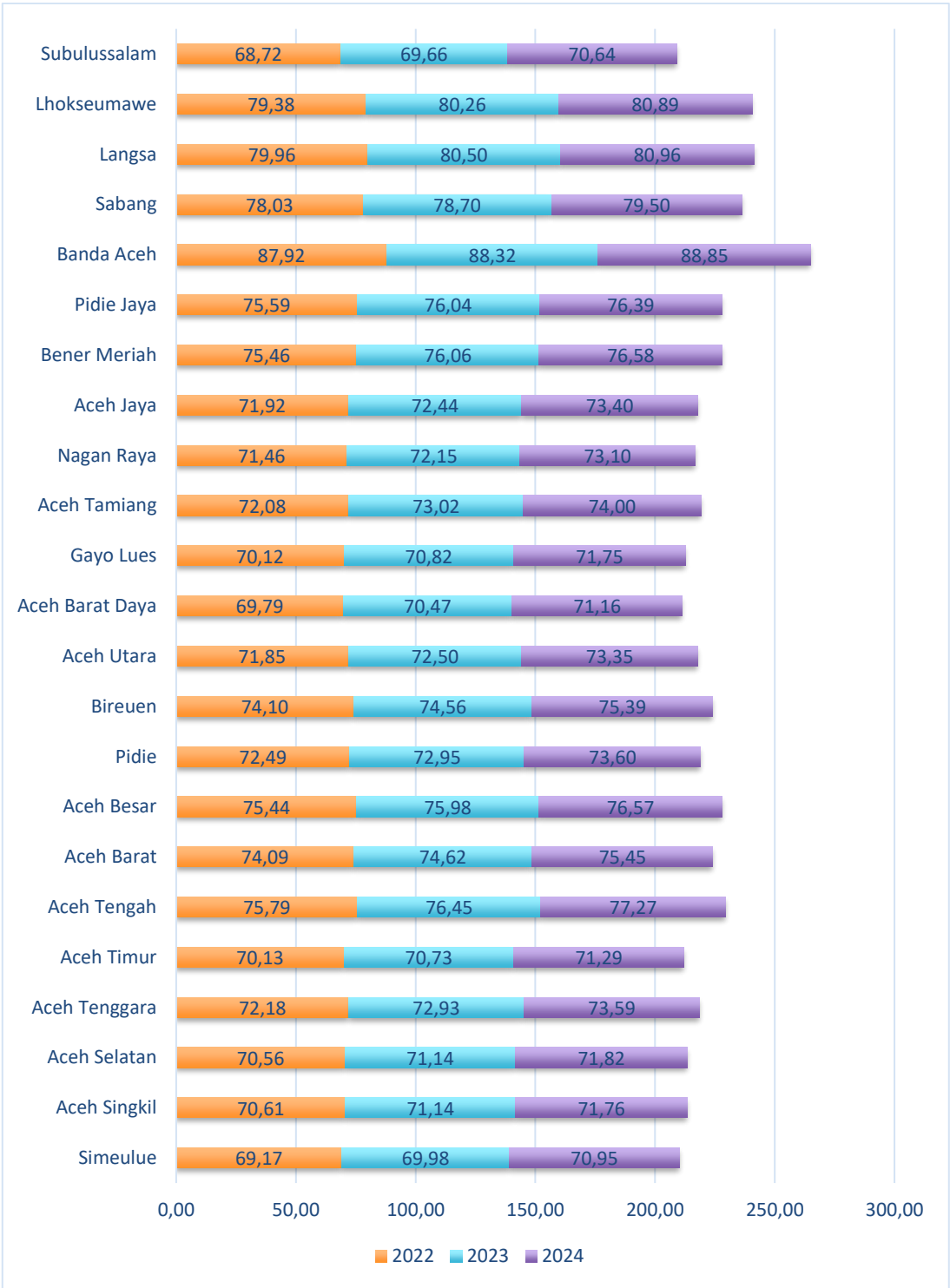
Paradigma pembangunan yang berfokus pada aspek pembangunan manusia pertama kali diperkenalkan secara resmi oleh *United nation development program* (UNDP) pada tahun 1990, yang menempatkan manusia sebagai tujuan akhir (*the ultimate end*) dari proses pembangunan sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana (*principle means*) untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut pradigma ini, manusia adalah kekayaan sebuah negara yang sesungguhnya, sehingga ukuran keberhasilan pembangunan kemudian dilihat dari seberapa mampu negara tersebut meningkatkan kesejahteraan penduduknya, menciptakan lingkungan yang memungkinkan penduduknya untuk menikmati umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup yang layak (*decent standard of living*). Ketiga dimensi ini kemudian diukur dengan sejumlah indikator oleh UNDP menjadi indeks komposit yang kemudian dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sampai saat ini IPM telah digunakan secara massif sebagai ukuran keberhasilan pembangunan di banyak negara termasuk Indonesia.

Dalam menghitung nilai IPM, Indonesia menggunakan konsep yang sama seperti halnya UNDP yaitu menggunakan tiga dimensi utama dengan sejumlah indikator terpilih. Pertama adalah dimensi kesehatan yaitu umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan Usia Harapan Hidup saat Lahir (UHH) dalam tahun, dimensi kedua adalah pendidikan yaitu pengetahuan yang diukur dengan Rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS) dalam tahun, dan dimensi ketiga adalah pengeluaran yaitu standar hidup yang layak yang diukur dengan pengeluaran riil perkapita pertahun yang disesuaikan dalam rupiah. Indikator inilah yang menjadi faktor-faktor yang akan mempengaruhi pembentukan nilai IPM. Penggunaan indikator-indikator dalam setiap dimensi penghitungan IPM telah mengalami banyak perubahan, seperti indikator seperti angka melek huruf tidak lagi digunakan sebagai indikator dimensi pendidikan karena dianggap tidak dapat mengukur dimensi pendidikan secara utuh.

Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu Kabupaten di Aceh. Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya memiliki nilai IPM sebesar 73,10 Untuk melihat posisi relatif IPM Kabupaten Nagan Raya tiga tahun terakhir ini jika dibandingkan kabupaten kota yang lain yang ada di aceh, dapat kita lihat pada gambar berikut ini:



Gambar 2.41
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022 - 2024



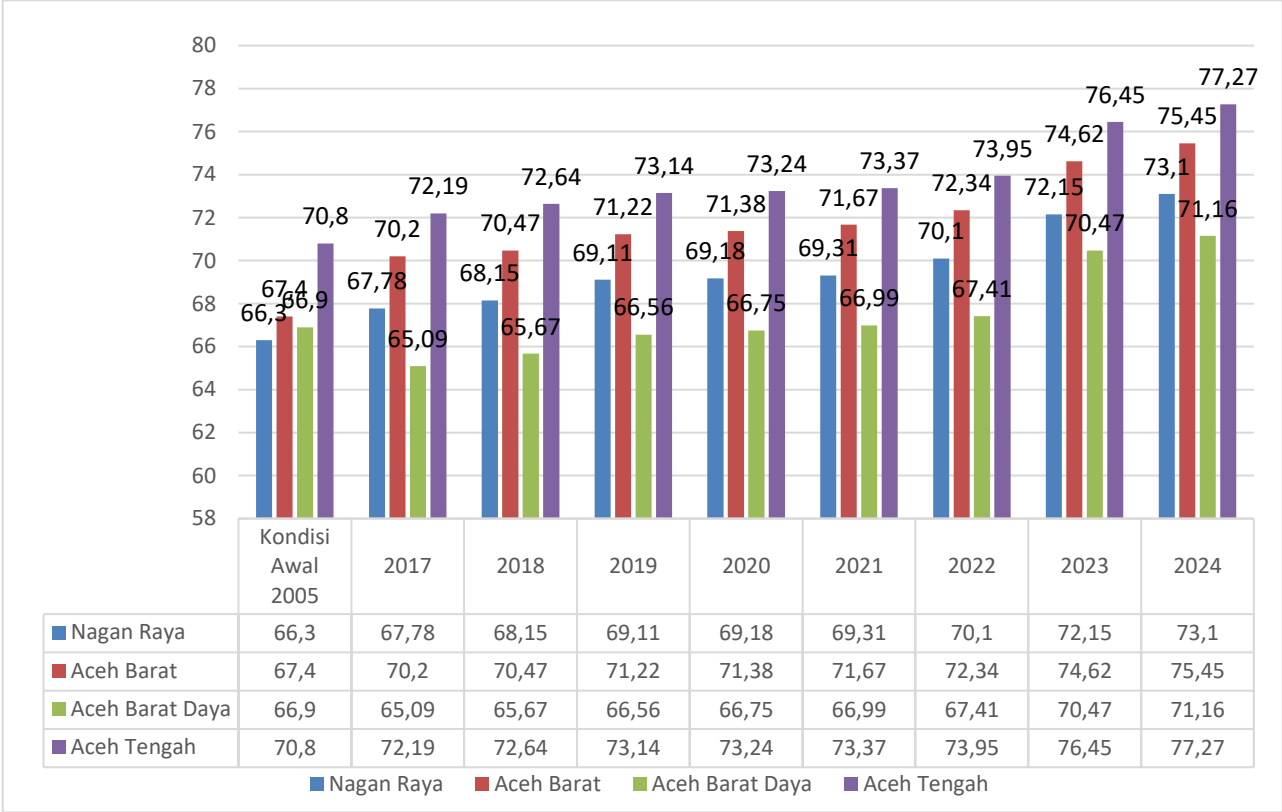
Sumber: BPS Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2024 capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Aceh berada sangat rendah, dimana Kabupaten Nagan Raya masih berada di bawah perolehan nilai IPM Kabupaten tetangga seperti Aceh Barat dengan nilai IPM sebesar 75,45, Aceh Jaya dengan nilai IPM sebesar 73,40. Namun posisi Kabupaten Nagan Raya masih berada di atas Kabupaten Aceh Barat Daya



yang memiliki nilai IPM hanya sebesar 71,16. Sebenarnya capaian nilai IPM Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu 20 tahun terakhir telah mengalami banyak perkembangan, tercatat pada awal masa RPJP tahun 2005 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya hanya sebesar 66,3 dan terus mengalami perkembangan hingga tahun 2024 telah mencapai 73,10. Untuk memperoleh gambaran lebih rinci tentang perkembangan nilai IPM Kabupaten Nagan Raya, dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.42
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2024



Sumber: BPS Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa capaian nilai IPM Kabupaten Nagan Raya terus mengalami perkembangan yang positif sepanjang tahun pengamatan. Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dapat juga dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang berdekatan secara geografis yang dianggap memiliki banyak kesamaan sebagaimana terlihat pada informasi yang disajikan dalam tabel di bawah ini.



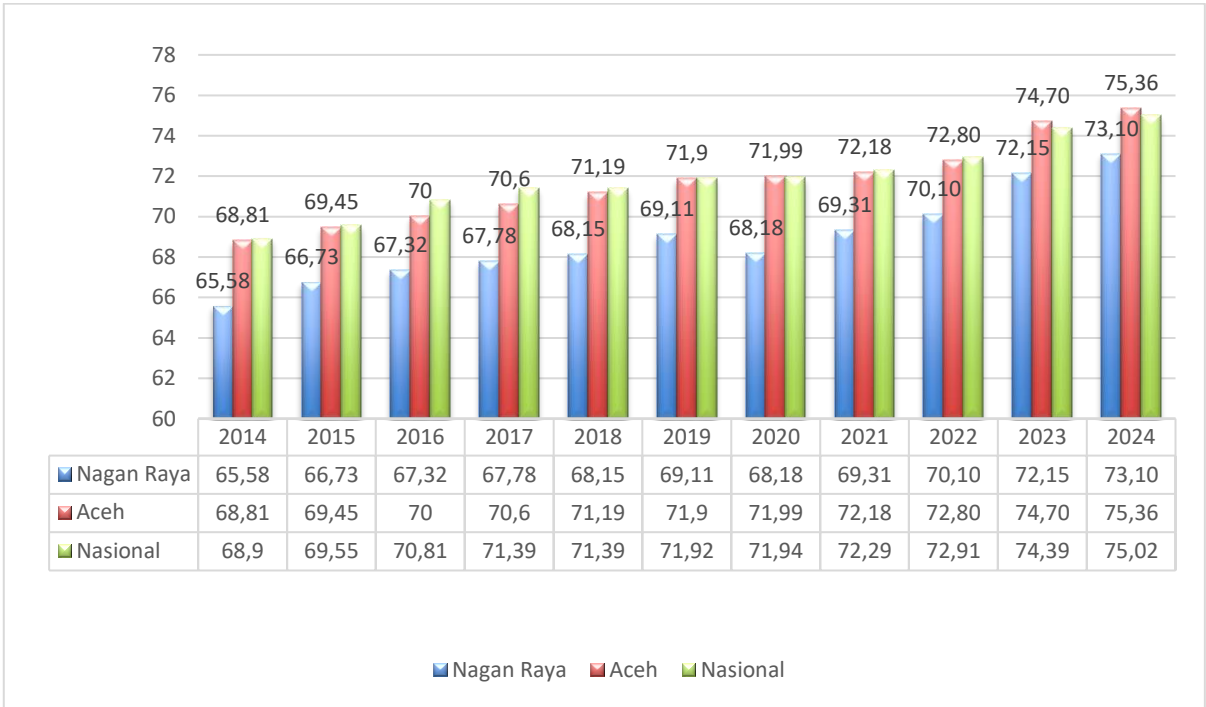
Tabel 2.117
Perkembangan Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya dan
Kabupaten Tetangga Tahun 2017-2024

Nama Kabupaten	Perkembangan Capaian IPM							
	*2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nagan Raya	64,91	68,15	69,11	69,18	69,31	70,10	72,15	73,1
Aceh Barat	66,66	70,47	71,22	71,38	71,67	72,34	74,62	75,45
Aceh Barat Daya	62,15	65,67	66,56	66,75	66,99	67,41	70,47	71,16
Aceh Tengah	70,18	72,64	73,14	73,24	73,37	73,95	76,45	77,27

Sumber: *data awal 2017, BPS Aceh, Tahun 2025

Selain itu, kita juga dapat melakukan analisis relevansi untuk membandingkan capaian Nilai IPM Kabupaten Nagan Raya dengan rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Jika kita amati gambar di bawah, terlihat bahwa selama dalam kurun waktu 2014-2024 capaian IPM Kabupaten Nagan Raya secara konsisten berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional. Pada tahun 2024 IPM Kabupaten Nagan Raya sebesar 73,10 masih berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Informasi lebih rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.43
Perbandingan capaian IPM Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh dan
Nasional Tahun 2014-2024



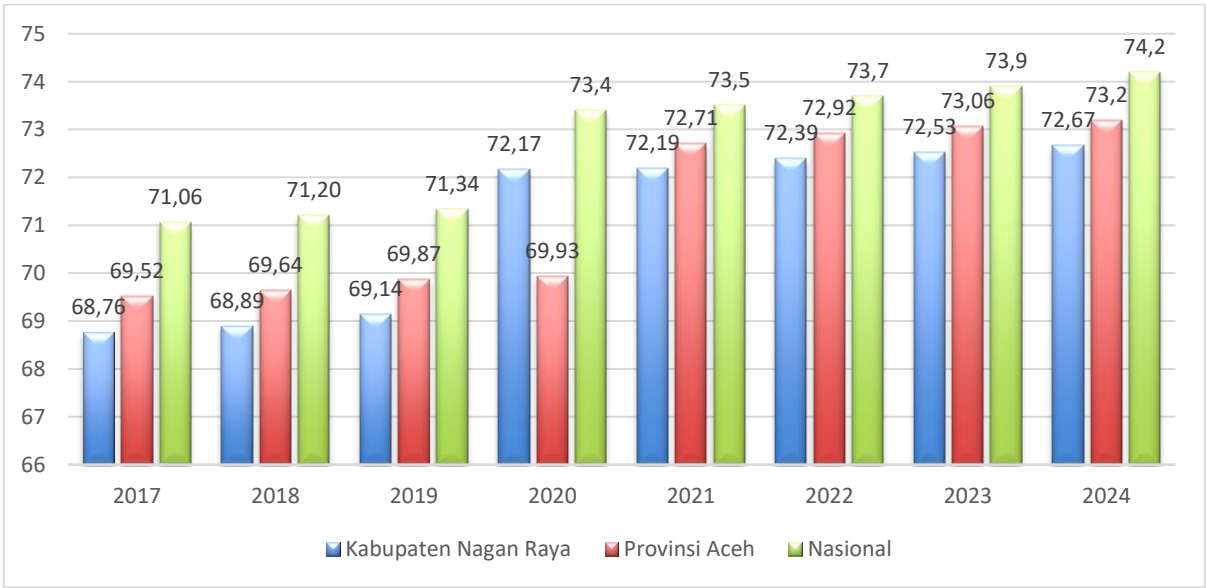
Sumber: BPS Aceh, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa meskipun capaian IPM Kabupaten Nagan Raya ini berada di bawah rata-rata capaian Provinsi Aceh dan Nasional, namun laju pertumbuhan IPM Kabupaten Nagan Raya lebih cepat di bandingkan dengan Provinsi Aceh dan Nasional. Kondisi ini telah mendorong terjadinya konvergensi terhadap capaian IPM Kabupaten Nagan terhadap rata-rata Provinsi dan Nasional. Untuk mengetahui masalah yang menjadi penyebab kenapa capaian IPM Kabupaten Nagan Raya masih rendah, langkah pertama kita lihat dari capaian indikator pada setiap dimensi pembentukan IPM. Berdasarkan data yang ada terdapat beberapa capaian indikator pembentukan IPM Kabupaten Nagan Raya masih rendah diantaranya adalah

- 1. Angka harapan hidup saat lahir (AHH) masih rendah.

Angka harapan hidup adalah ukuran rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak dia lahir. Sampai dengan empat tahun terakhir capaian indikator AHH Kabupaten Nagan Raya masih jauh berada di bawah capaian rata-rata Provinsi dan Nasional, sehingga berkontribusi pada rendahnya nilai IPM. Gambar berikut akan menyajikan informasi lebih rinci tentang perkembangan indikator dimaksud dalam beberapa tahun terakhir.

Gambar 2.44
Perbandingan Capaian Indikator Angka Harapan Hidup Saat Lahir
Tahun 2017-2024



Sumber: BPS, Tahun 2025

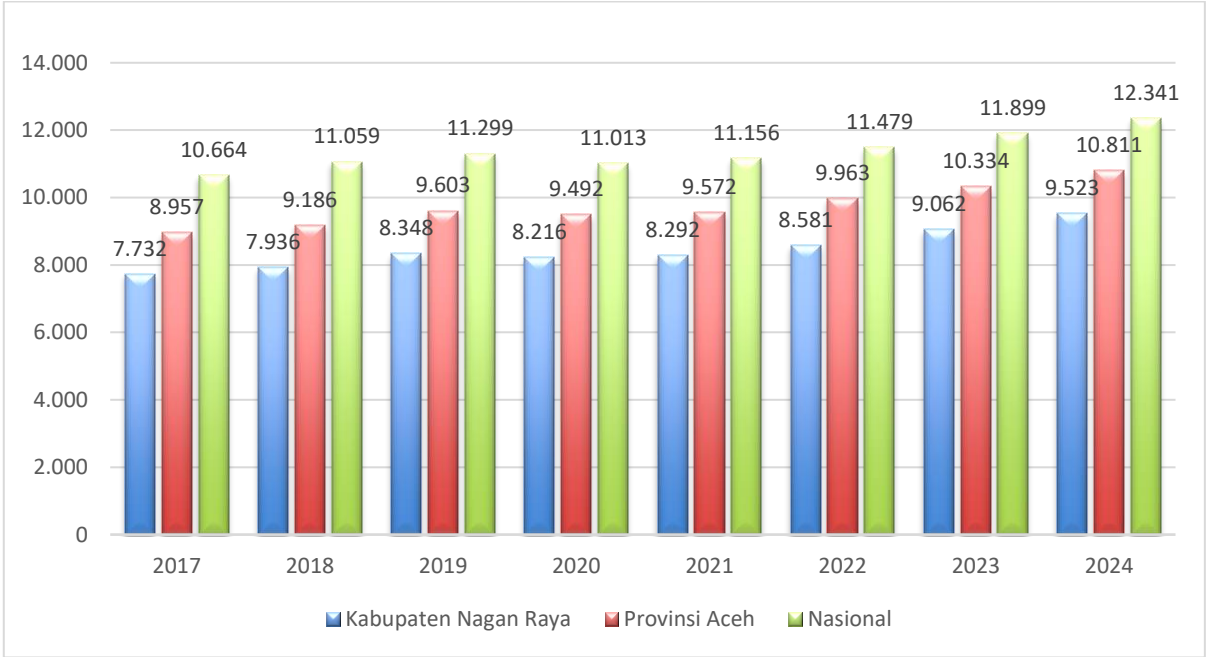
Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat pada tahun 2017 AHH penduduk Kabupaten Nagan Raya sekitar 68,76 tahun, sementara rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional telah mencapai 69,52 dan 71, 06 tahun. Sampai dengan tahun 2024 AHH Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan hingga mancapai 72,67 tahun dan masih berada di bahawa rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Meskipun demikian laju pertumbuhan UHH Kabupaten Nagan Raya lebih cepat dari laju pertumbuhan AHH Provinsi dan Nasional.



2. Pengeluaran riil perkapita masih rendah.

Pengeluaran riil perkapita adalah ukuran biaya untuk konsumsi setiap penduduk Indonesia yang telah disesuaikan dengan paritas daya beli. Data menunjukkan bahwa pendapatan riil perkapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya masih rendah dan berada di bawah rata-rata Provinsi Aceh dan Nasional. Hal ini dapat diamati dari gambar berikut ini

Gambar 2.45
Capaian Indikator Pengeluaran Ril Perkapita
Tahun 2017-2024



Sumber: BPS, Tahun 2025

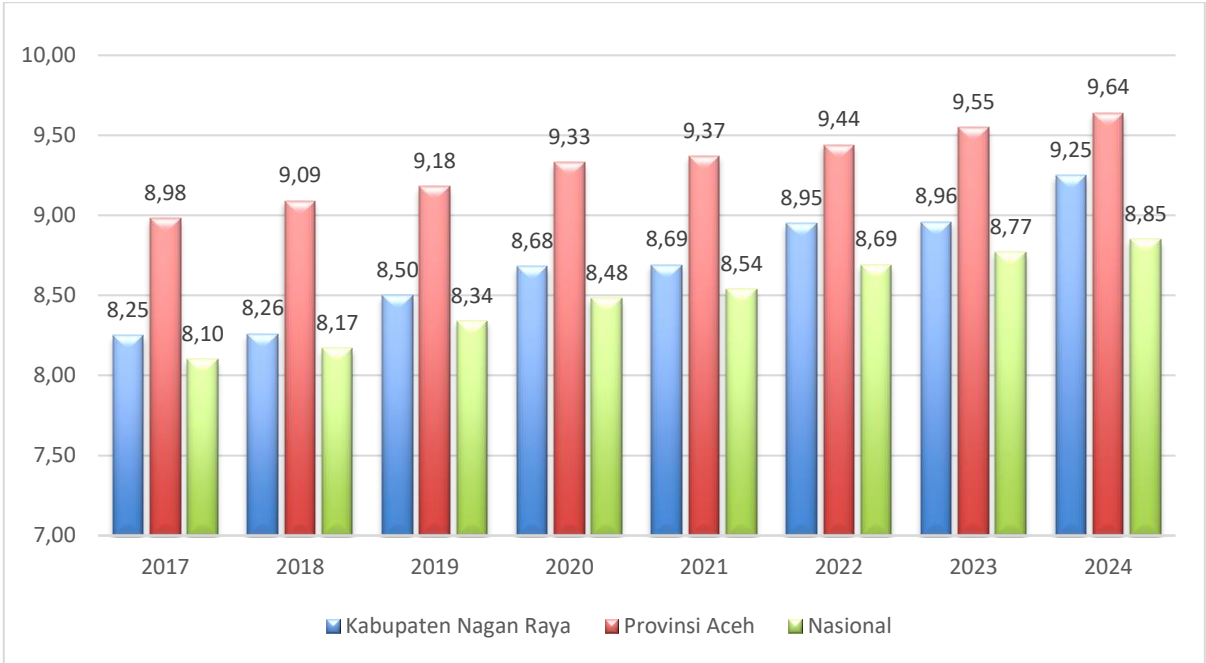
Berdasarkan gambar di atas kita dapat melihat bahwa secara rata-rata pengeluaran riil perkapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya masih rendah dibandingkan dengan rata-rata provinsi dan nasional. Pada tahun 2017 pengeluaran riil perkapita penduduk di Kabupaten Nagan Raya sebesar 7,7 juta pertahun jumlah ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 9,5 juta per tahun pada tahun 2024. Angka ini masih jauh lebih rendah dari rata-rata pengeluaran riil perkapita Provinsi Aceh dan Nasional .

3. Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk masih rendah.

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenjang Pendidikan. RLS penduduk di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten berada di atas Nasional, namun masih berada di bawah rata-rata RLS Provinsi Aceh. Perkembangan RLS Kabupaten Nagan Raya dalam beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat pada gambar berikut ini



Gambar 2.46
Perbandingan Capaian Indikator Rata-Rata Lama Sekolah
Tahun 2017-2024



Sumber: BPS, Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas secara umum RLS Kabupaten Nagan Raya terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017 telah mencapai angka 8,25 tahun, kemudian meningkat menjadi 9,25 tahun pada tahun 2024. Jumlah ini lebih tinggi dari RLS Nasional yang hanya mencapai 8,85 tahun pada tahun 2024, dan lebih rendah dari RLS provinsi Aceh yang telah mencapai 9,64 tahun pada tahun 2024. Meskipun RLS Kabupaten Nagan Raya lebih tinggi dari rata-rata Nasional, namun angka 9,25 tahun tersebut masih berada dibawah rata-rata RLS Provinsi Aceh. Sementara itu untuk indikator Angka harapan lama sekolah (AHLS) penduduk di Kabupaten Nagan Raya sudah lebih tinggi dari AHLS Provinsi Aceh dan Nasional.

Dengan demikian, ada tiga masalah utama yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya terkait masih rendahnya capaian nilai IPM selama pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya tahun 2005-2025. Persoalan pertama adalah masalah pada dimensi kesehatan yaitu Usia harapan hidup saat lahir (UHH) masih rendah. masalah pada dimensi pengeluaran yaitu pengeluaran riil parkapita masih rendah dan masalah pada dimensi pendidikan yaitu Rata-rata lama sekolah (RLS) penduduk masih rendah. Pembangunan pada dimensi pembentukan IPM selama ini oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menghasilkan perbaikan dan peningkatan yang nyata pada semua indikator yang digunakan. Hal ini dapat kita lihat pada capaian setiap indikator yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. Bahkan Kabupaten Nagan Raya mengalami laju peningkatan capaian indikator pembentukan IPM yang lebih tinggi dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Akan tetapi upaya tersebut belum cukup untuk menciptakan akselerasi pembangunan di setiap indikator. Buktinya ukuran keberhasilan pembangunan



setiap dimensi pembentukan IPM di Kabupaten Nagan Raya secara konsisten masih tertinggal jauh dari Provinsi Aceh dan Nasional.

Secara umum program pembangunan pada setiap dimensi pembentukan IPM yang akan datang di Kabupaten Nagan Raya harus dapat dilakukan secara terpadu dengan program pembangunan lainnya seperti misalnya program penanggulangan kemiskinan dan program pencegahan stunting.

kelompok penduduk miskin bisa menjadi fokus utama perbaikan dimensi pembangunan IPM. Karena kekurangan pada setiap indikator pembentukan dimensi IPM seringkali menjadi karakteristik mereka yang masih miskin. Oleh karena itu kebijakan peningkatan IPM dapat dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dengan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan sehingga akan berdampak lebih optimal pada pencapaian tujuan pembangunan.

2.6. Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1. Kependudukan

2.6.1.1. Proyeksi Jumlah Total Penduduk

Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2020 sebanyak 167.836 jiwa, diproyeksikan akan meningkat pada tahun 2025 yaitu sebanyak 178.460 jiwa, tahun 2030 sebanyak 187.837 jiwa, kemudian tahun 2035 sebanyak 195.984 jiwa, pada tahun 2040 diproyeksi makin meningkat sebanyak 202.965 jiwa, dan pada tahun 2045 sebanyak 208.788 jiwa.

Tabel 2.118
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2020-2045

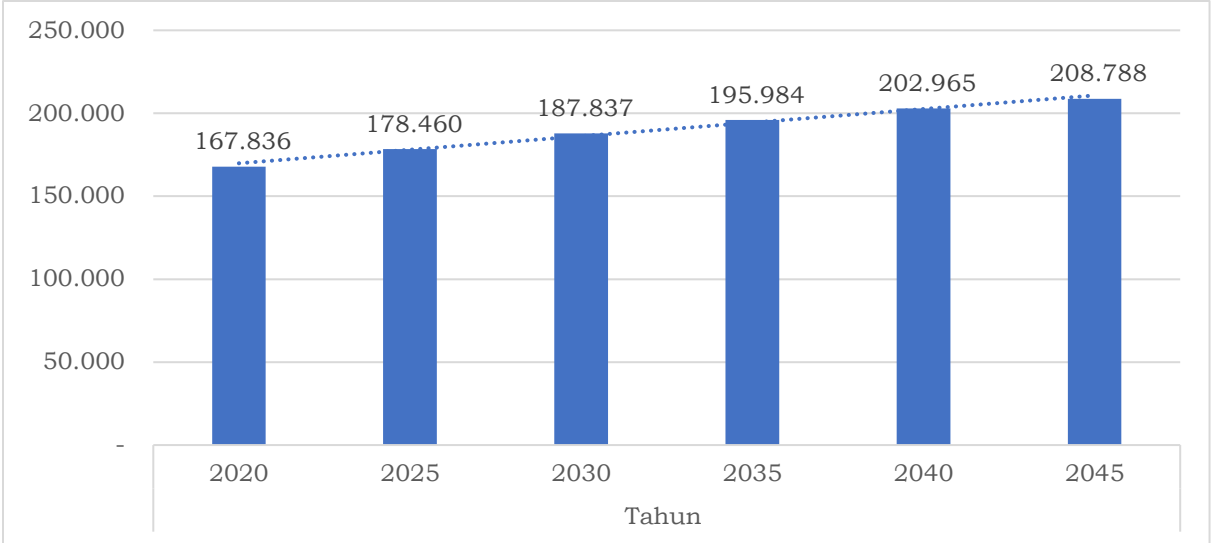
Uraian Jumlah Penduduk (jiwa)	Kondisi Tahun 2020	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Proyeksi Jumlah Penduduk	167.836	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2023

Jumlah Penduduk Kabupaten Nagan Raya diproyeksikan akan meningkat dari tahun ke tahun, hal dapat dilihat dalam gambar berikut ini :



Gambar 2.47
Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2020-2045



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.2. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2025 sebanyak 89.883 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 88.577 dari total jumlah penduduk sebanyak 178.460, tahun 2030 penduduk laki-laki sebanyak 94.338 jiwa, penduduk perempuan sebanyak 93.499 jiwa dengan total penduduk sejumlah 187.837 jiwa, jumlah penduduk laki-laki pada tahun 2035 sebanyak 98.109 jiwa sementara penduduk perempuan sebanyak 97.875 jiwa dari total 195.984 jiwa, kemudian pada tahun 2040 jumlah penduduk laki-laki terjadi pertambahan sebanyak 101.244 jiwa, penduduk perempuan terjadi penambahan lebih besar daripada penduduk laki-laki yaitu sebanyak 101.721 jiwa, dari total 202.965 jiwa, dan terakhir tahun 2045 penduduk Perempuan lebih dominan dari laki-laki yaitu sebanyak 105.002 jiwa, sementara penduduk laki-laki sebanyak 103.786 jiwa dari total penduduk sebanyak 208.788 jiwa, lebih rinci dapat dilihat data tabel di bawah ini

Tabel 2.119
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2020–2045 (Ribu)

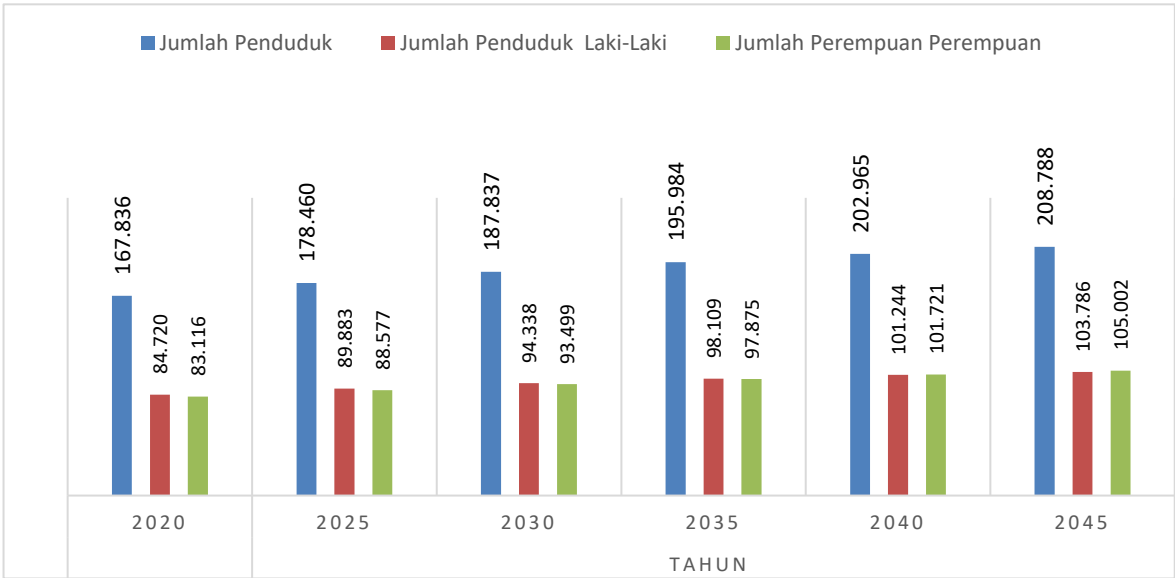
Jenis Kelamin	Kondisi Tahun 2020	Tahun				
		2025	2030	2035	2040	2045
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Penduduk	167.836	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
Jumlah Penduduk Laki-Laki	84.720	89.883	94.338	98.109	101.244	103.786
Jumlah Perempuan	83.116	88.577	93.499	97.875	101.721	105.002

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



Perbandingan jumlah Pendudukan jenis kelamin laki-laki dengan Jenis kelamin perempuan sangat fluktuatif, Pada Tahun 2025-2035 jumlah penduduk laki-laki di proyeksi lebih banyak kemudian terjadi perubahan pada tahun 2040-2045, dimana penduduk perempuan lebih banyak atau dominan lihat gambar berikut ini.

Gambar 2.48
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Jenis Kelamin Tahun 2020–2045 (Ribu)



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.3. Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Penduduk berdasarkan kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur tertentu. Komposisi penduduk berdasarkan umur digunakan untuk mengelompokkan penduduk suatu daerah berdasarkan rentang usia tertentu. Pengelompokan ini biasanya ditunjukkan untuk menentukan jumlah penduduk dalam usia produktif dan usia nonproduktif. Pada tahun 2025-2045 jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jumlah penduduk tertinggi adalah kelompok usia produktif dan dewasa yaitu usia 20-24, jumlah penduduk usia 20-24 pada tahun 2025 sebanyak 13.815 jiwa, kemudian tahun 2030 sebanyak 1.197 jiwa, tahun 2035 sebanyak 14.187 jiwa, tahun 2040 sebanyak 14.127 jiwa, kemudian pada tahun 2045 sebanyak 15.560 jiwa. Kelompok umur berikutnya yang dominan juga umur 25-29, pada tahun sebanyak 14.631, tahun 2030 sebanyak 13.743 jiwa, pada tahun 2035 sebanyak 14.114 jiwa, tahun 2040 sebanyak 14.110 jiwa dan pada tahun 2045 sebanyak 14.052 jiwa. Untuk lebih rinci Proyeksi Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Nagan Raya tahun 2020-2045 dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.120
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur
Laki-Laki dan Perempuan 2020–2045 (Ribuan)

Jenis Kelamin	Laki - Laki Dan Perempuan					
Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	14183	15607	15062	14677	14534	14559
5-9	14194	14141	15563	15025	14640	14497
10-14	14223	14203	14149	15579	15036	14649
15-19	13844	14233	14220	14159	15595	15052
20-24	14705	13815	14197	14187	14127	15560
25-29	14229	14631	13743	14114	14110	14052
30-34	13602	14094	14496	13615	13981	13976
35-39	13298	13505	13993	14397	13524	13881
40-44	13013	13206	13412	13901	14306	13437
45-49	11091	12837	13029	13237	13725	14127
50-54	8884	10831	12544	12741	12951	13434
55-59	7114	8546	10431	12098	12299	12516
60-64	5903	6696	8058	9854	11453	11656
65-69	3843	5344	6081	7344	9008	10496
70-74	2560	3243	4534	5198	6310	7767
75+	3150	3528	4325	5858	7366	9129
Total	167836	178460	187837	195984	202965	208788

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Tabel 2.121
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur
Jenis Kelamin Laki-Laki 2020–2045 (Ribuan)

Jenis Kelamin	Laki-Laki					
Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	7220	7972	7689	7493	7419	7431
5-9	7179	7199	7949	7670	7474	7400
10-14	7293	7187	7205	7960	7679	7482
15-19	7145	7294	7194	7206	7964	7684
20-24	7489	7127	7274	7174	7189	7943
25-29	7202	7416	7058	7200	7103	7118
30-34	6736	7114	7328	6973	7111	7015
35-39	6598	6688	7060	7273	6921	7058
40-44	6441	6529	6615	6985	7199	6847
45-49	5653	6332	6418	6505	6868	7082
50-54	4571	5499	6159	6245	6334	6691
55-59	3547	4365	5253	5890	5976	6066
60-64	3039	3290	4055	4888	5487	5572
65-69	1961	2699	2925	3614	4366	4907
70-74	1184	1611	2222	2419	3005	3634
75+	1462	1561	1934	2614	3149	3856
Total	84720	89883	94338	98109	101244	103786

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



Tabel 2.122
Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya Menurut Kelompok Umur
Jenis Kelamin Perempuan 2020–2045 (Ribuan)

Jenis Kelamin	Perempuan					
Kelompok Umur	2020	2025	2030	2035	2040	2045
0-4	6963	7635	7373	7184	7115	7128
5-9	7015	6942	7614	7355	7166	7097
10-14	6930	7016	6944	7619	7357	7167
15-19	6699	6939	7026	6953	7631	7368
20-24	7216	6688	6923	7013	6938	7617
25-29	7027	7215	6685	6914	7007	6934
30-34	6866	6980	7168	6642	6870	6961
35-39	6700	6817	6933	7124	6603	6823
40-44	6572	6677	6797	6916	7107	6590
45-49	5438	6505	6611	6732	6857	7045
50-54	4313	5332	6385	6496	6617	6743
55-59	3567	4181	5178	6208	6323	6450
60-64	2864	3406	4003	4966	5966	6084
65-69	1882	2645	3156	3730	4642	5589
70-74	1376	1632	2312	2779	3305	4133
75+	1688	1967	2391	3244	4217	5273
Total	83116	88577	93499	97875	101721	105002

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.4. Analisis Kependudukan

2.6.1.4.1. Kepadatan penduduk

Dengan Luas wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 3544.9 Km2, proyeksi kepadatan pendudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

Tabel 2.123
Kepadatan Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2020-2045

Parameter Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	168.414	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
Kepadatan Penduduk (Jiwa/km2)	48	50,34	52,99	55,29	57,26	58,90

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Jika dilihat dari kondisi kepadatan pendudukan tidak naik signifikan, diperkirakan dalam 20 tahun ke depan pemerintah Kabupaten Nagan Raya masih dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk.



2.6.1.4.2. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nagan Raya selama kurun waktu Tahun 2020-2045 cukup bervariasi. Laju pertumbuhan penduduk berfluktuatif dan dari tahun ke tahun terjadi penekanan dan semakin menurun.

Tabel 2.124
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2025-2045

Parameter Pertumbuhan Penduduk	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Total Jumlah Penduduk (Jiwa)	168.414	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
Pertumbuhan Penduduk (%)	0,66	1,15	0,95	0,79	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Tabel 2.125
Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2025-2045

Parameter Pertumbuhan Penduduk	Tahun				
	2025	2030	2035	2040	2045
Total Jumlah Penduduk	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
Jumlah Penduduk Laki-Laki	89.883	94.338	98.109	101.244	103.786
Jumlah Penduduk Perempuan	88.577	93.499	97.875	101.721	105.002
Pertumbuhan Laki-Laki	5.163	4.455	3.771	3.135	2.542
Pertumbuhan Perempuan	5.461	4.922	4.376	3.846	3.281

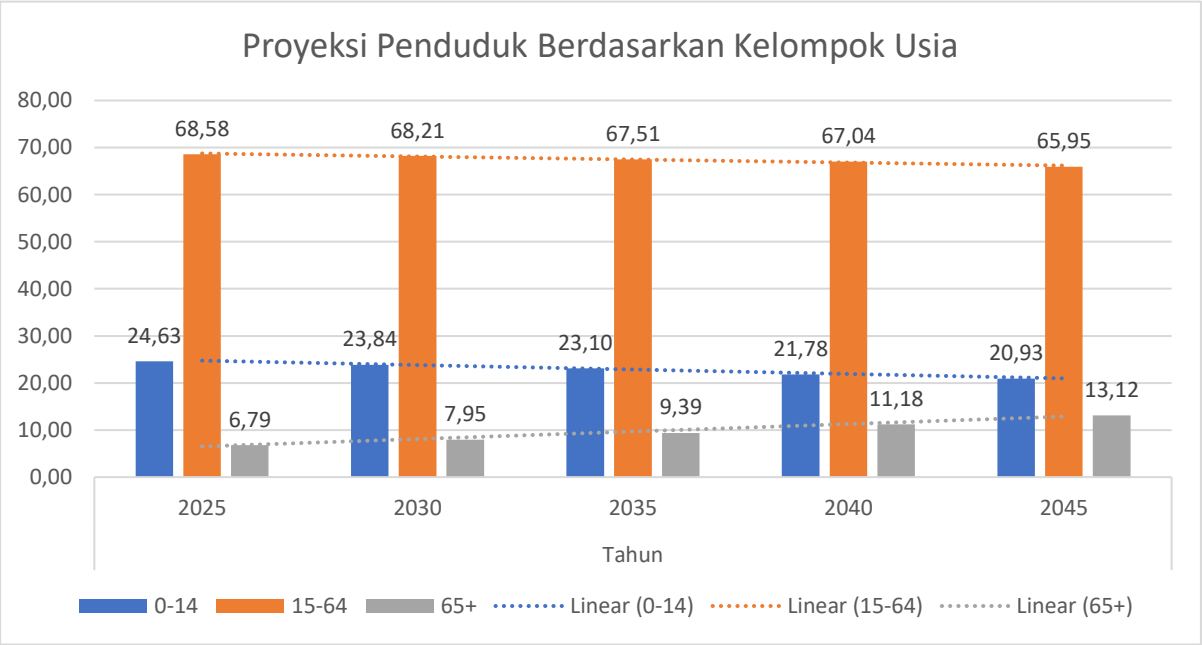
Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.4.3. Penduduk Usia Produktif dan Bonus Demografi

Berdasarkan struktur penduduk di Kabupaten Nagan Raya, Penduduk usia produktif memiliki proporsi yang dominan yaitu tercatat pada usia 15-64. Jika melihat angka penduduk, Nagan Raya termasuk dalam wilayah Aceh bahagian dari Indonesia saat ini menuju puncak bonus demografi yang diperkirakan akan mencapai tingkat tertinggi pada tahun 2025 hingga tahun 2040. Komposisi penduduk usia produktif lebih dominan dibandingkan kelompok umur 0-14 Tahun dan kelompok umur usia 65 tahun ke atas, pada tahun 2025, penduduk usia produktif yaitu usia 15-64 tahun mencapai 68,58%, dan pada tahun 2030 mencapai 68,21%, kemudian pada tahun 2035 usia

produktif sebanyak 67,51%, dan pada Tahun 2035 berada pada 67,04%. Bonus demografi terjadi ketika penduduk usia produktif, yaitu 15-64 tahun mendominasi total keseluruhan penduduk, atau dibandingkan dengan jumlah penduduk usia tidak produktif yaitu di atas usia 65 Tahun. Pada kondisi ini angka ketergantungan penduduk diperkirakan akan menurun, disebabkan proporsi jumlah usia tidak produktif yang lebih rendah.

Gambar 2.49
Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia (%)
di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045



Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.4.4. Angka ketergantungan

Angka ketergantungan penduduk adalah rasio antara jumlah orang yang tidak bekerja (biasanya kelompok usia yang terlalu muda atau terlalu tua untuk bekerja) dengan jumlah orang yang bekerja (biasanya kelompok usia produktif). Angka ini sering kali digunakan untuk mengukur tingkat beban ekonomi yang ditanggung oleh populasi yang bekerja terhadap populasi yang tidak bekerja, seperti anak-anak dan lanjut usia. Angka ketergantungan penduduk yang tinggi, di mana jumlah orang yang tidak bekerja relatif lebih besar dari jumlah orang yang bekerja, dapat menempatkan tekanan ekonomi pada masyarakat, terutama dalam sistem pensiun dan kesejahteraan sosial. Kondisi ini juga dapat mempengaruhi kebijakan publik terkait dengan pendidikan, perawatan kesehatan, dan pembangunan ekonomi. Angka ketergantungan penduduk Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 2.126
Komposisi Penduduk dan Angka Ketergantungan
Kabupaten Nagan Raya

Tahun	0-14 tahun	15-64	65 + tahun	Jumlah penduduk	Angka ketergantungan (%)
2020	42.709	115.997	9.686	168.392	45,17
2025	43.951	122.394	12.115	178.460	45,81
2030	44.774	128.123	14.940	187.837	46,61
2035	45.281	132.303	18.400	195.984	48,13
2040	44.210	136.071	22.684	202.965	49,16
2045	43.705	137.691	27.392	208.788	51,64

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.1.4.5. Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2020-2045

Proyeksi penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 sebesar 178.460 jiwa dan terus bertumbuh menjadi 187.840 jiwa pada Tahun 230, dan diproyeksikan menjadi 208.780 jiwa pada Tahun 2045. Hasil proyeksdi penduduk secara lengkap dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.127
Parameter Hasil Proyeksi Penduduk Kabupaten Nagan Raya,
Tahun 2020–2045

Parameter	Tahun					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
PENDUDUK						
Laki -Laki (000)	84,72	89,88	94,34	98,11	101.24	103.78
Perempuan (000)	83,12	88,58	93,5	97,88	101.72	105.00
Total (000)	167,84	178,46	187,84	195,98	202.96	208.78
Sex Ratio (%)	101,93	101,47	100,9	100,24	99,53	98,84
Komposisi Umur (%)						
0–14	25,38	24,63	23,84	23,1	21,78	20,93
15–64	68,93	68,58	68,21	67,51	67,04	65,95
65+	5,69	6,79	7,95	9,39	11,18	13,12
Dependency Ratio (%)	45,08	45,81	46,61	48,13	49,16	51,64
FERTILITAS						
Total Fertility Rate (TFR) ¹	2,34	2,24	2,18	2,14	2,11	2,10
MORTALITAS						
Infant Mortality Rate (IMR) ¹	21,22	17,31	15,84	13,41	12,10	11,12

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Catatan : ¹ data tahun 2020 berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 dan data Tahun 2025-2035 berdasarkan hasil proyeksi penduduk berdasarkan BPS, 2040-2045 berdasarkan data dari Bappeda.



Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa proyeksi penduduk di Kabupaten Nagan Raya yaitu Total Penduduk Tahun 2020 sebanyak 167,84 ribu penduduk (Laki-laki 84,72 ribu dan Perempuan sebanyak 83,12 ribu). Pada Tahun 2025 sebanyak 178,46 ribu (Laki-laki 89,88 ribu dan Perempuan 88,58 ribu), kemudian pada Tahun 2030 sebanyak 187,84 (Laki-laki 94,34 ribu dan Perempuan 93,5 ribu, dan tahun 2035 sebanyak 195,98 ribu (Laki -Laki 98,11 ribu dan Perempuan 97,88 ribu). Jika melihat data ini maka ada peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Kemudian dilihat dari Komposisi umur pada Tahun 2020 yaitu 0-14 Tahun sebanyak 25,38%, tahun 2025 sebanyak 24,6%, Pada tahun 2025 sebanyak 23,84%, dan pada tahun 2035 sebanyak 23,1%. Sementara usia 15-64 Tahun, pada Tahun 2020 sebanyak 68,93%, tahun 2025 sebanyak 68,58%, Tahun 2030 sebanyak 68,21% dan pada tahun 2035 sebanyak 67,51%, Kelompok usia 14-64 sangat dominan jumlahnya dan merupakan masa usia produktif. Komposisi umur dari usia 65+ pada tahun 2020 sebanyak 5,69%, Tahun 2025 sebanyak 6,79%, tahun 2030 sebanyak 7,95 % dan pada tahun 2035 diproyeksikan meningkat menjadi 9,39%. Perkiraan Total Fertility Rate (TFR)1 tahun 2020 sebesar 2,34, Tahun 2025 sebesar 2,24, tahun 2030 sebesar 2,18 dan menurun lagi pada tahun 2035 menjadi 2,14, Tahun 2040 menurun ke 2,11 kemudian Tahun 2040 menurun 2,10. sementara Infant Mortality Rate (IMR) 1 pada tahun 2020 sebanyak 21,22, tahun 2025 diperkirakan menurun17,31, Tahun 2030 juga makin menurun menjadi15,84, dan tahun 2035 diproyeksikan menurun lagi menjadi 13,41, Tahun 2040 menurun jauh ke angka 12,10 dan Tahun 2045 menurun menjadi11,12.

2.6.2. Kebutuhan Sarana dan Prasarana Dasar

2.6.2.1. Rumah/tempat tinggal

Proyeksi Kebutuhan rumah difokuskan untuk masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal atau yang tidak layak huni dalam Kabupaten Nagan Raya, proyeksi kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.128
Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Rumah Tempat Tinggal (Layak Huni)				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	172.827	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
2	Proyeksi Kebutuhan Rumah	73,48	78,78	84,09	89,39	94,70	100,00

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025



2.6.2.2. Permukiman

Sehubungan dengan adanya penambahan Kawasan, maka akan berpengaruh terhadap kebutuhan permukiman dan sarana lain yang diperlukan dengan Proyeksi Kebutuhan yaitu Rumah Layak Huni, Jalan Lingkungan, Persampahan, Drainase, Jaringan Air Bersih Aceh, Rumah Ibadah, Pembangunan Gedung Strategis, Pembangunan SPALD dan kebutuhan SPAM dalam Kabupaten Nagan Raya, proyeksi kebutuhan dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.129
Proyeksi Kebutuhan Permukiman

No	Pembangunan kawasan permukiman	Lokasi	Jumlah Kawasan	Proyeksi Kebutuhan Permukiman			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Kawasan Pemukiman	Kecamatan	10 Kawasan	2	2	3	3
2	Rumah Layak Huni	Nagan Raya	Unit	100	100	100	100
3	Jalan Lingkungan	Nagan Raya	Km	1000	1000	1000	1000
4	Persampahan	Nagan Raya	Unit	1	1	1	1
5	Drainase	Nagan Raya	Km	2500	2500	2500	2500
6	Jaringan Air Bersih Nagan Raya	Nagan Raya	Km	0	0	0	0
7	Rumah Ibadah	Nagan Raya	Unit				
8	Pembangunan Gedung Strategis	Nagan Raya	Unit	2	2	2	2
9	Pembangunan SPALD	Nagan Raya	Unit	2000	2000	2000	2000
10	SPAM	Nagan Raya	Unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, 2025

2.6.2.3. Air bersih

Seiring dengan bertumbuhan penduduk, maka juga pada kebutuhan akan air bersih, Proyeksi Kebutuhan Air Bersih dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.130
Proyeksi Kebutuhan Air Bersih

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Air Bersih				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	172.827	jiwa	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
2	Penduduk Berakses Air Minum	6,4	%	8,41	18,46	26,87	35,28	43,69

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, 2025



2.6.2.4. Sanitasi

Sanitasi sangat penting dalam kehidupan, yang memiliki beberapa tujuan lain yaitu memperbaiki, mempertahankan serta mengembalikan kesehatan pada manusia, memaksimalkan efisiensi produksi serta menghasilkan produk-produk yang sehat dan aman dari berbagai pengaruh yang bisa menyebabkan penyakit pada manusia. Proyeksi Kebutuhan Sanitasi dalam Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.131
Proyeksi Kebutuhan Sanitasi

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Satuan	Proyeksi Kebutuhan Sanitasi				
				2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	172.827	jiwa	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
2	Penduduk Berakses Sanitasi	73,98	%	74,98	79,98	84,98	89,98	94,98

Sumber : Dinas Perkim Kabupaten Nagan Raya, 2025

2.6.2.5. Energi/listrik

Kebutuhan tenaga listrik dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri, dan tingkat konsumsi energi per kapita, jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan industri dan komersial, pola konsumsi energip, dan program pembangunan infrastruktur. Proyeksi kebutuhan tenaga listrik Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.132
Proyeksi Kebutuhan Energi/Listrik

No	Uraian	Kondisi Tahun 2022	Proyeksi Kebutuhan Listrik Untuk Rumah Tangga				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	172.827	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
2	Jumlah Rumah	45.037	47.137	49.937	52.737	55.537	58.337
3	Proyeksi Kebutuhan Listrik	9.011	8.381	7.226	6.542	6.106	5.833
4	Persentase RT Pengguna Listrik	5	6	6,9	8	9,09	10

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.6.2.6. Persampahan

Proyeksi Kebutuhan Persampahan diproyeksikan dalam timbulan sampah (ton) 6,28 Kg/perhari/perorang dan persentase timbulan sampah yang ditangani sebagaimana dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.133
Proyeksi Kebutuhan Persampahan

No	Proyeksi Volume Timbulan Sampah	Kondisi 2022	Proyeksi Timbulan Sampah				
			2025	2030	2035	2040	2045
1	Jumlah Penduduk	172.827	178.460	187.837	195.984	202.965	208.788
2	Proyeksi Timbulan Sampah (ton) 6,28 Kg/Perhari/Perorang	25.232	1.120.729	1.179.616	1.230.780	1.274.620	1.311.189
3	Timbulan Sampah yang ditangani (%)	34,07	35,54	42,01	48,48	54,95	61,42

Sumber : DLH Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.6.2.7. Infrastruktur Kesehatan

Proyeksi Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan Tahun 2025-2045 adalah prioritas untuk Pengembangan Pembangunan dan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Sultan Iskandar Muda, Pengembangan Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Puskesmas, Pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi NAPZA dan pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi Psikososial, Pembangunan Gedung dan Pengembangan Infrastruktur pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pelayanan Yang Terpadu, Pembangunan Instalasi Limbah Rumah Sakit dan Puskesmas, Pembangunan untuk Peningkatan Akreditasi Puskesmas, Pembangunan Rumah Sakit Pratama, Pemenuhan Sarana Prasarana Puskesmas Pustu/Polindes, Labkesda dan Pengembangan Infrastruktur Bangunan Poned Puskesmas sebagaimana tabel di bawah ini:



Tabel 2.134
Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Kesehatan	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Pengembangan Pembangunan RSUD Sultan Iskandar Muda	Nagan Raya	Gedung	3	3	3	3
2	Pengadaan Alat Kesehatan Pembangunan RSUD Sultan Iskandar Muda	Nagan Raya	Paket	1	1	1	1
3	Pengembangan Pembangunan Puskesmas	Seluruh Kecamatan	Paket	1	1	1	1
4	Pengembangan Infrastruktur Puskesmas	Seluruh Puskesmas	Unit	3	3	3	3
5	Pembangunan Gedung Pusat rehabilitasi NAPZA	Nagan Raya	Gedung	1			
6	Pembangunan Gedung Pusat Rehabilitasi Psikososial	Nagan Raya	Gedung	1			
7	Pembangunan Gedung Rumah Sakit Ibu dan Anak Pelayanan Yang Terpadu	Nagan Raya	Gedung		1		
8	Pengembangan Infrastruktur pelayanan Rumah Sakit Ibu dan Anak Pelayanan Yang Terpadu	Nagan Raya	Unit			1	1
9	Pembangunan Instalasi Limbah Rumah Sakit	Nagan Raya	Unit	1	1	1	
10	Pembangunan Instalasi Limbah Puskesmas	Seluruh Puskesmas	Unit	5	5	5	5
11	Pembangunan untuk Peningkatan Akreditasi Puskesmas	Seluruh Puskesmas	Unit	5	5	5	5
12	Pembangunan Rumah Sakit Pratama	Nagan Raya	Unit	1			
13	Pemenuhan Sarana Prasarana Puskesmas	Seluruh Puskesmas	Unit	5	5	5	5
14	Pemenuhan Sarana Prasarana Pustu/Polindes	Seluruh Puskesmas	Unit	30	30	30	30
15	Pemenuhan Sarana Prasarana Labkesda	Nagan Raya	Unit	1	1	1	1
16	Pengembangan Infrastruktur Bangunan Poned Puskesmas	Seluruh Puskesmas	Unit	5	5	5	5

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.6.2.8. Infrastruktur Pendidikan

Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia difokuskan untuk PAUD/TK, SD dan SMP sebagaimana tabel di bawah ini

Tabel 2.135
Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
A	PAUD/TK						
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah PAUD/TK	Nagan Raya	Ruang	18	60	150	168
2	Peningkatan Sarana PAUD/TK	Nagan Raya	paket	50	80	130	168
3	Rehabilitasi Sekolah PAUD	Nagan Raya	paket	45	90	130	168
4	Pemenuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Nagan Raya	unit	40	80	120	168
5	Modernisasi Alat Praktik dan Peraga untuk Siswa PAUD	Nagan Raya	unit	25	55	97	155
6	Pemenuhan Perlengkapan Sekolah	Nagan Raya	exampler	8000	12000	18000	40000
7	Pemenuhan Sarana untuk Akreditasi PAUD/TK	Nagan Raya	unit	150	175	180	260
8	Pengadaan Alat Pembelajaran Untuk Anak Inklusif	Nagan Raya	unit	50	100	120	168
9	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) luar bagi paud	Nagan Raya	unit	50	150	200	250
10	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE)dalam bagi paud	Nagan Raya	unit	80	150	210	300
11	Pengadaan Mobiler paud	Nagan Raya	unit	1500	2500	3542	5000
12	Pengadaan Alat Pembelajaran Digital	Nagan Raya	unit	100	150	200	300
B	SD						
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Dasar (SD)	Nagan Raya	Unit	20	25	60	100
2	Peningkatan Sarana SD	Nagan Raya	Unit	80	120	150	237
3	Rehabilitasi Sekolah SD	Nagan Raya	Unit	90	120	180	237
4	Pemenuhan Alat Praktik dan Peraga Siswa SD	Nagan Raya	unit	50	100	137	237
5	Modernisasi Alat Praktik dan Peraga untuk Siswa SD	Nagan Raya	unit	50	100	137	237



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
6	Pemenuhan Perlengkapan Sekolah	Nagan Raya	unit	50	100	137	237
7	Pemenuhan Ruang Praktik Sekolah SD	Nagan Raya	unit	30	70	150	237
8	Pengadaan Buku Bermutu	Nagan Raya	exemplar	10.000	20.000	50.000	80.000
9	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SD	Nagan Raya	Unit	50	90	180	237
10	Pengadaan Alat Pembelajaran Digital	Nagan Raya	Unit	80	160	190	237
11	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SD	Nagan Raya	Ruang	30	150	200	237
12	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SD	Nagan Raya	Ruang	30	150	200	237
13	Pengadaan Alat Pembelajaran Untuk Anak Inklusif	Nagan Raya	Unit	30	150	200	237
13	Pengadaan Mobiler	Nagan Raya	Unit	3000	6000	8000	10000
C	SMP						
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Nagan Raya	Unit	10	28	41	60
2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas SMP	Nagan Raya	Unit	15	30	50	60
3	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula SMP	Nagan Raya	Ruang	5	15	30	60
4	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP	Nagan Raya	Ruang	10	35	45	60
5	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan SMP	Nagan Raya	Ruang	15	35	35	60
6	Pembangunan Ruang Laboratorium SMP	Nagan Raya	Ruang	12	35	50	60
7	Pembangunan Perpustakaan SMP	Nagan Raya	Ruang	15	35	50	60
8	Pembangunan Fasilitas Parkir SMP	Nagan Raya	Unit	15	35	50	60
9	Pembangunan Kantin Sekolah SMP	Nagan Raya	Unit	16	38	52	60
10	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas SMP	Nagan Raya	Unit	15	28	49	60
11	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU SMP	Nagan Raya	Ruang	20	35	50	60
12	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium SMP	Nagan Raya	Ruang	20	35	50	60
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan SMP	Nagan Raya	Ruang	20	35	50	60
14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula SMP	Nagan Raya	Ruang	15	25	45	60
15	Pengadaan Mebel SMP	Nagan Raya	unit	1000	1500	5000	10000
16	Pengadaan Perlengkapan Sekolah SMP	Nagan Raya	unit	25	35	45	60



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur Pendidikan	Cakupan Layanan	Kuantitas	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Kesehatan			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
17	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa SMP	Nagan Raya	unit	25	35	45	60
18	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah SMP	Nagan Raya	unit	6	20	25	60
19	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP	Nagan Raya	unit	20	35	50	60
20	Pengadaan Alat Pembelajaran Digital	Nagan Raya	unit	15	35	50	60
21	Pengadaan Alat Pembelajaran Untuk Anak Inklusif	Nagan Raya	unit	15	36	45	60
D	Pendidikan Khusus/Pendidikan Masyarakat						
1	Pembangunan Ruang kelas	Nagan Raya	Ruang	5	8	10	12
2	Pengadaan Meubelair	Nagan Raya	unit	100	150	200	325
3	Pembangunan Ruang Praktik Siswa	Nagan Raya	Ruang	5	8	10	12
4	Pembangunan Ruang Laboratorium	Nagan Raya	Ruang	2	4	8	12
5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Nagan Raya		2	4	8	12
6	Pembangunan AULA	Nagan Raya	unit	1	1	1	1
7	Pengadaan Buku Paket/Mapel Kesetaraan	Nagan Raya	paket	25	50	60	100
7	Pengadaan Mobiler	Nagan Raya	Unit	30	80	150	320
E	Gedung Dinas Pendidikan						
1	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	ruang	5	6	6	6
2	Pengadaan Meubelair	Dinas Pendidikan	unit	10	20	20	20

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.6.2.9. Infrastruktur Jalan dan jembatan

Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan dan jembatan difokuskan untuk pembangunan jalan, jembatan dan pemeliharaan untuk meningkatkan akses dan konektivitas dalam Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.136
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur

No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
A	Pembangunan Jalan						
1	Pembangunan Jalan Poros Jeuram - Suka Makmue	Kec. Seunagan - Suka Makue	10,2	2,55	2,55	2,55	2,55
2	Pembangunan Jalan Suka Makmue - Babah Dua	Kec. Suka Makmue - Tadu Raya	10,5	2,63	2,63	2,64	2,6
3	Pembangunan Jalan Poros Simpang Peut - Padang Rubek	Kec. Kuala - Kuala Pesisir	14,24	2	4	4	4,24
4	Pembangunan Jalan Blang Baroe Rambong - Alue Bata	Kec. Beutong - Tadu Raya	24,755		8,25	8,25	8,255
5	Peningkatan Jl. Lingkar Ibukota Kec. Beutong Banggalang	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	0,7	0,7			
6	Peningkatan Jl. Blang Puuk - Babah Suak	Kec. Beutong Ateuh Banggalang	0,4	0,4			
7	Peningkatan Jl. Bumi Sari - Alue Seupeunng	Kec. Beuutong	1				1
8	Peningkatan Jl. Blang Aman Tadu - Sumber Daya	Kec. Beuutong	14,9	7,45	7,45		
9	Peningkatan Jl. Simpang Blang Baro Rambong - Padang Siali	Kec. Beuutong	2,615	2,615			
10	Peningkatan Jl. Cot Jawi - Ujong Blang	Kec. Beuutong	0,31			0,31	
11	Peningkatan Jl. Meunasah Pante - Karian Agoi	Kec. Beuutong	2	2			
12	Peningkatan Jl. Lhok Seumot - Bumi Sari	Kec. Beuutong	7,5		3,75	3,75	
13	Peningkatan Jl. Bumi Sari - Blang Baro Rambong	Kec. Beuutong	2,4		2,4		
14	Peningkatan Jl. Blang Baro Rambong - Blang Aman Tadu	Kec. Beuutong	6,115	3,06	3,055		



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
15	Peningkatan Jl. Meunasah Dayah - Krueng Isep	Kec. Beutong	1,9			1,9	
16	Peningkatan Jl. Blang Seumot - Blang Mesjid	Kec. Beutong	1,17		1,17		
17	Peningkatan Jl. Krueng Isep - Blang Neuang	Kec. Beutong	2,7		2,7		
18	Peningkatan Jl. Kuta Batee - Blang Seunong	Kec. Beutong	2,6		2,6		
19	Peningkatan Jl. Cot Gud - Cot Manyang	Kec. Seunagan Timur	0,287		0,287		
20	Peningkatan Jl. Krueng Kulu - Blang Ara	Kec. Seunagan Timur	0,43	0,43			
21	Peningkatan Jl. Alue Kala - Meugat Meh	Kec. Seunagan Timur	0,641	0,641			
22	Peningkatan Jl. Keude Neulop - Paya Peuleukung	Kec. Seunagan Timur	1,35		1,35		
23	Peningkatan Jl. Keude Neulop - Blang Panyang	Kec. Seunagan Timur	0,74		0,74		
24	Peningkatan Jl. Keude Linteung - Cot Teuku Dek	Kec. Seunagan Timur	1,3	1,3			
25	Peningkatan Jl. Lhok Mesjid - Teuku Dek	Kec. Seunagan Timur	0,948	0,948			
26	Peningkatan Jl. Suak Peureubong - Ie Beudoh	Kec. Seunagan Timur	0,3		0,3		
27	Peningkatan Jl. Sawang Mane - Blang Geudong	Kec. Seunagan Timur	0,726		0,726		
28	Peningkatan Jl. Cot Punti - Lhok Mesjid	Kec. Seunagan Timur	0,4	0,4			
29	Peningkatan Jl. Cot Punti - Sapeng	Kec. Seunagan Timur	1,1		1,1		
30	Peningkatan Jl. Jeuram - Alue Peusaja	Kec. Seunagan	0,5	0,5			
31	Peningkatan Jl. Paya Undan - Gampong Teungoh	Kec. Seunagan	0,912	0,912			
32	Peningkatan Jl. Kuta Paya - Kuta Baro	Kec. Seunagan	0,8	0,8			
33	Peningkatan Jl. Kuta Paya - Krueng Ceuko	Kec. Seunagan	0,7	0,7			
34	Peningkatan Jl. Kulu - Rambong	Kec. Seunagan	0,36	0,36			
35	Peningkatan Jl. Blang Puuk Kulu - Rambong Cut	Kec. Seunagan	0,61	0,61			
36	Peningkatan Jl. Latong - Krueng Ceuko	Kec. Seunagan	0,6	0,6			
37	Peningkatan Jl. Sapek - Blang Patek	Kec. Seunagan	0,56	0,56			



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
38	Peningkatan Jl. Lingkar Nigan	Kec. Seunagan	0,75	0,75			
39	Peningkatan Jl. Blang Baro - Alue Tho	Kec. Seunagan	0,789	0,789			
40	Peningkatan Jl. Parom - Cot Lele	Kec. Seunagan	0,2	0,2			
41	Peningkatan Jl, Peurelak - Blang Baro	Kec. Seunagan	1,02	1,02			
42	Peningkatan Jl. Ulee Umeng - Meugat Meh	Kec. Seunagan	1,6	1,6			
43	Peningkatan Jl. Kuta Sayeh - Nigan	Kec. Seunagan	1,3	1,3			
44	Peningkatan Jl. Kuta Aceh - Blang Murong	Kec. Seunagan	1,6		1,6		
45	Peningkatan Jl. Latong Alue Buloh - Batas Aceh Barat	Kec. Seunagan	3,6		3,6		
46	Peningkatan Jl. Kuta Paya - Rambong	Kec. Seunagan	1		1		
47	Peningkatan Jl. Paya Undan - Blang Murong	Kec. Seunagan	0,71		0,71		
48	Peningkatan Jl. Sapek - Kreung Ceh	Kec. Seunagan	0,85	0,85			
49	Peningkatan Jl. Kuta Kumbang - Krueng Ceh	Kec. Seunagan	0,958	0,958			
50	Peningkatan Jl. Blang Puuk Nigan- Nigan	Kec. Seunagan	1			1	
51	Peningkatan Jl. Gampong Teungoh - Lhok Beutong	Kec. Suka Makmue	1			1	
52	Peningkatan Jl. Lhok Beutong - Alue Gajah	Kec. Suka Makmue	0,2			0,2	
53	Peningkatan Jl. Gampong Teungoh - Meureubo	Kec. Suka Makmue	0,31			0,31	
54	Peningkatan Jl. Kuta Baro - Blang Mulieng	Kec. Suka Makmue	1			1	
55	Peningkatan Jl. Blang Muling - Krak Tampai	Kec. Suka Makmue	1,35				1,35
56	Peningkatan Jl. Alue Peusaja - Paya Malem	Kec. Suka Makmue	9,59				9,59
57	Peningkatan Jl. Alue Peusaja - Krak Tampai	Kec. Suka Makmue	1,8				1,8
58	Peningkatan Jl. Alue Peusaja - Blang Muling	Kec. Suka Makmue	1,8				1,8
59	Peningkatan Jl. Alue Peusaja - Alue Gajah	Kec. Suka Makmue	1,77				1,77
60	Peningkatan Jl. Cot Peuradi - Lhok Beutong	Kec. Suka Makmue	0,6		0,6		



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
61	Peningkatan Jl. Cot Peuradi - Blang Sapek	Kec. Suka Makmue	2,13	1,07	1,06		
62	Peningkatan Jl. Lhok Rameuan - Blang Murong	Kec. Suka Makmue	1,4		1,4		
63	Peningkatan Jl. Kabu Blang Sapek - Kabu Teungoh	Kec. Suka Makmue	1,3				1,3
64	Peningkatan Jl. Blang Sapek - Lueng Baro	Kec. Suka Makmue	0,6			0,6	
65	Peningkatan Jl. Lingkar Blang Sapek	Kec. Suka Makmue	0,4			0,4	
66	Peningkatan Jl. Lueng Baro - Suak Bilie	Kec. Suka Makmue	0,2			0,2	
67	Peningkatan Jl. Lingkar Alue Kambuk	Kec. Suka Makmue	1,28			1,28	
68	Peningkatan Jl. Kuta Padang - Macah	Kec. Suka Makmue	1		1		
69	Peningkatan Jl. Macah - Batas Aceh Barat	Kec. Suka Makmue	0,6			0,6	
70	Peningkatan Jl. Seumambek - Batas Aceh Barat	Kec. Suka Makmue	1,4		1,4		
71	Peningkatan Jl. Cot Kuta - Paya Ubong	Kec. Suka Makmue	0,12	0,12			
72	Peningkatan Jl. Lueng Baro - Suak Bilie	Kec. Suka Makmue	0,2	0,2			
73	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Suak Bilie	Kec. Suka Makmue	1,4		1,4		
74	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Kuta Padang	Kec. Suka Makmue	0,6		0,6		
75	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Alue Ie Mameh	Kec. Suka Makmue	2,074	2,074			
76	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Alue Kambuk	Kec. Suka Makmue	2,4		2,4		
77	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Alue Peusaja	Kec. Suka Makmue	1,13			1,13	
78	Peningkatan Jl. Suka Makmue - Cot Kuta	Kec. Suka Makmue	1,6				1,6
79	Peningkatan Jl. Inspeksi Barat Suka Makmue	Kec. Suka Makmue	0,8				0,8
80	Peningkatan Jl. Ujong Patihah - Ujong Pasie	Kec. Kuala	0,2				0,2
81	Peningkatan Jl. Ujong Patihah - Cot Kumbang	Kec. Kuala	0,96			0,96	
85	Peningkatan Jl. Ujong Pasie - Alue Ie Mameh	Kec. Kuala	0,6			0,6	
86	Peningkatan Jl. Lingkar Alue - Ie Mameh	Kec. Kuala	0,13		0,13		



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
87	Peningkatan Jl. Lingkar Sp. Peut - Ujong Rambong	Kec. Kuala	0,92				0,92
88	Peningkatan Jl. Lawa Batu - Padang Panyang	Kec. Kuala	1,2				1,2
89	Peningkatan Jl. Jogya - Purwosari	Kec. Kuala	4,9				4,9
90	Peningkatan Jl. Blang Muko - Blang Baro	Kec. Kuala	1				1
91	Peningkatan Jl. Kuta Makmue - Batas Aceh Barat	Kec. Kuala	1,46			1,46	
92	Peningkatan Jl. Kuta Makmue - Alue Buloh	Kec. Kuala	12,559		4,19	4,19	4,179
93	Peningkatan Jl. Blang Baro - Blang Bintang	Kec. Kuala	1,7		1,7		
94	Peningkatan Jl. Ujong Fatihah - Alue Ie Mameh	Kec. Kuala	1,9		1,9		
95	Peningkatan Jl. Pulo Ie - Pulo Ie Meulaboh II	Kec. Kuala	1,4				1,4
96	Peningkatan Jl. Lueng Teuke Ben - Purwodadi	Kec. Kuala Pesisir	0,4		0,4		
97	Peningkatan Jl. Lueng T. Ben - Arongan	Kec. Kuala Pesisir	0,27		0,27		
98	Peningkatan Jl. Lueng T. Ben - Purwosari	Kec. Kuala Pesisir	1,38		1,38		
99	Peningkatan Jl. Langkak - Suak Layang	Kec. Kuala Pesisir	1,36				1,36
100	Peningkatan Jl. Kubang Gajah - Kuala Trang	Kec. Kuala Pesisir	1,1		1,1		
101	Peningkatan Jl. Langkak - Kubang Gajah	Kec. Kuala Pesisir	1,3	1,3			
102	Peningkatan Jl. Padang Rubek - Gampong Lhok	Kec. Kuala Pesisir	0,9	0,9			
103	Peningkatan Jl. Lingkar Padang Rubek	Kec. Kuala Pesisir	1,4	1,4			
104	Peningkatan Jl. Pulo - Padang Rubek	Kec. Kuala Pesisir	2,1				2,1
105	Peningkatan Jl. Lingkar Gampong Pulo Baru	Kec. Kuala Pesisir	1,4				1,4
106	Peningkatan Jl. Padang Rubek - Trans Meulaboh II	Kec. Kuala Pesisir	4,4		4,4		
107	Peningkatan Jl. Lingkar Suak Puntong	Kec. Kuala Pesisir	0,6				0,6
108	Peningkatan Jl. Suak Puntong - Pulo Ie	Kec. Kuala Pesisir	3,8				3,8
109	Peningkatan Jl. Suak Puntong - Gampong Lhok	Kec. Kuala Pesisir	0,2	0,2			



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
110	Peningkatan Jl. Padang Turi - Padang Panyang	Kec. Kuala Pesisir	0,9				0,9
111	Peningkatan Jl. Alue Bata - Babah Rot	Kec. Tadu Raya	4,627	4,627			
112	Peningkatan Jl. Rantau Seulamat - Alue Gajah	Kec. Tadu Raya	2,006	2,006			
113	Peningkatan Jl. Simpang Dua - Batu Raja	Kec. Tadu Raya	3,99	3,99			
114	Peningkatan Jl. Simpang Jaya - Sumber Daya	Kec. Tadu Raya	0,3	0,3			
115	Peningkatan Jl. Batu Raja - Sp. 1	Kec. Tadu Raya	3,36		3,36		
116	Peningkatan Jl. Simpang Dua - Alue Seupeung	Kec. Tadu Raya	3,3	3,3			
117	Peningkatan Jl. Babah Dua - Reului Mangat	Kec. Tadu Raya	1	1			
118	Peningkatan Jl. Lingkar Simpang Dua	Kec. Tadu Raya	0,6			0,6	
119	Peningkatan Jl. Babah Dua - Alue Ie Itam	Kec. Tadu Raya	0,9			0,9	
120	Peningkatan Jl. Babah Roet - Sumber Daya	Kec. Tadu Raya	3,3		3,3		
121	Peningkatan Jl. Alue Bata - Gunong Geuleugo	Kec. Tadu Raya	0,59		0,59		
122	Peningkatan Jl. Kuala Tadu - Cot Mee	Kec. Tadu Raya	0,9	0,9			
123	Peningkatan Jl. Cot Mu - Alue Siron	Kec. Tadu Raya	2,2				2,2
124	Peningkatan Jl. Lingkar Gampong Cot Mee	Kec. Tadu Raya	1	1			
125	Peningkatan Jl. Krueng Itam - Gagak	Kec. Tadu Raya	6,2			3,1	3,1
126	Peningkatan Jl. Pasie Keubeu Dom - Gagak	Kec. Tripa Makmur	4,7			4,7	
127	Peningkatan Jl. Neubok Ye PP - Krueng Itam	Kec. Tripa Makmur	3,6			1,8	1,8
128	Peningkatan Jl. Gagak - Ujong Lamie	Kec. Darul Makmur	0,4		0,4		
129	Peningkatan Jl. Teungah Lamie	Kec. Darul Makmur	1,05				1,05
130	Peningkatan Jl. Lingkar Ibukota Seuneu'am	Kec. Darul Makmur	0,2	0,2			
131	Peningkatan Jl. Alue Bilie - Pulo Kruet	Kec. Darul Makmur	1,6				1,6
132	Peningkatan Jl. Lamie - Ujong Lamie	Kec. Darul Makmur	0,35				0,35



No.	Kebutuhan Penyelesaian Infrastruktur	Lokasi	Panjang/ jumlah	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Jalan Dan Jembatan			
				2025- 2030	2030- 2035	2035- 2040	2040- 2045
133	Peningkatan Jl. Kuta Trieng - Kaye Uno/Poeloe Rime	Kec. Darul Makmur	9,4	2,35	2,35	2,35	2,35
134	Peningkatan Jl. Simpang Gunong Kong - Alue Waki	Kec. Darul Makmur	0,6		0,6		
135	Peningkatan Jl. Simpang Geudong - Kuala Seumayam	Kec. Darul Makmur	0,8	0,80			
136	Peningkatan Jl. Suka Mulia - Serba Jadi	Kec. Darul Makmur	0,3	0,3			
137	Peningkatan Jl. Alue Raya - Serba Jadi	Kec. Darul Makmur	1,6				1,6
138	Peningkatan Jl. Alue Rambot - Krueng Alem	Kec. Darul Makmur	1,7		1,7		
139	Peningkatan Jl. Lingkar Blang Baro	Kec. Darul Makmur	0,7	0,7			
140	Peningkatan Jl. Kuta Trieng - Blang Baro	Kec. Darul Makmur	0,4	0,4			
B	Pembangunan Jembatan	Lokasi	Unit				
1	Pembangunan Jembatan Kila	Kec. Seunagan Timur	1	0,5	0,5		
2	Pembangunan Jembatan Jalan Blang Baro Rambong - Alue Bata	Kec. Beutong - Tadu Raya	5	1	2	2	
3	Pembangunan Jembatan Kabu - Pasie Keubeu Dom	Kec. Tripa Makmur	1	1			
4	Pembangunan Jembatan Jl. Krueng Isep - Blang Neuang	Kec. Beutong	1	1			
5	Pembangunan Jembatan Gantung Beutong Ateuh Banggalang	Beutong Ateuh Banggalang	1		1		
6	Pembangunan Jembatan Puloe Ie	Kec. Kuala	1	1			
7	Lanjutan Pembangunan Jembatan Alue Buloh	Kec. Seunagan	1	1			
8	Lanjutan Pembangunan Jembatan Alue Bata	Kec. Tadu Raya	1	1			
C	Pemeliharaan Jalan	Lokasi	Panjang				
1	Pemeliharaan Jalan Kabupaten	Kab. Nagan Raya	350,682	88	88	88	86,682

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025



2.6.2.10. Infrastruktur Pengairan

Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur Pengairan difokuskan untuk pembangunan Retarding basin (Kolam Retensi) Gunong Reubo, dapat dilihat dalam tabel berikut ini;

Tabel 2.137
Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur

No	Kebutuhan Pembangunan/ Pengembangan Pengairan	Lokasi	Volume	Proyeksi Kebutuhan Infrastruktur			
				2025-2030	2030-2035	2035-2040	2040-2045
1	Pembangunan jaringan Irigasi	1602	Ha	0	0	0	0
2	Retarding basin (Kolam Retensi)	Gunong Reubo	Unit	1	1	0	0

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

2.7.1. Indikasi Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Rencana Jangka Panjang Pembangunan Nagan Raya berorientasi pada *Green Economic* (Ekonomi Hujau) transisi pembangunan ekonomi menuju Pembangunan Berkelanjutan. Pilihan paradigma Green Ekonomi adalah sebagai bentuk pembangunan ekonomi yang lebih ramah lingkungan dan atau inklusif. Hal ini sejalan dengan Strategi Transformasi Ekonomi Indonesia yang ditetapkan oleh Bappenas untuk mencapai visi Indonesia 2045. Sejalan dengan itu, Pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi dan arah kebijakan pembangunan wilayah berbasiskan pada Rencana Tata Ruang dan Wilayah 2025 - 2045 Nagan Raya dan RTRW Aceh berbasiskan nilai-nilai Pembangunan Berkelanjutan. Itu artinya, Pembangunan yang dijalankan oleh Pemerintah dan atau Pemangku Kepentingan yang berbasiskan Kebijakan RTRW diukur dengan indikasi outcome dan indikasi output atas pencapaian perwujudan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang telah ditetapkan berbasis indikator Ekonomi Hijau sebagai transisi pembangunan ekonomi menuju Pembangunan Berkelanjutan.

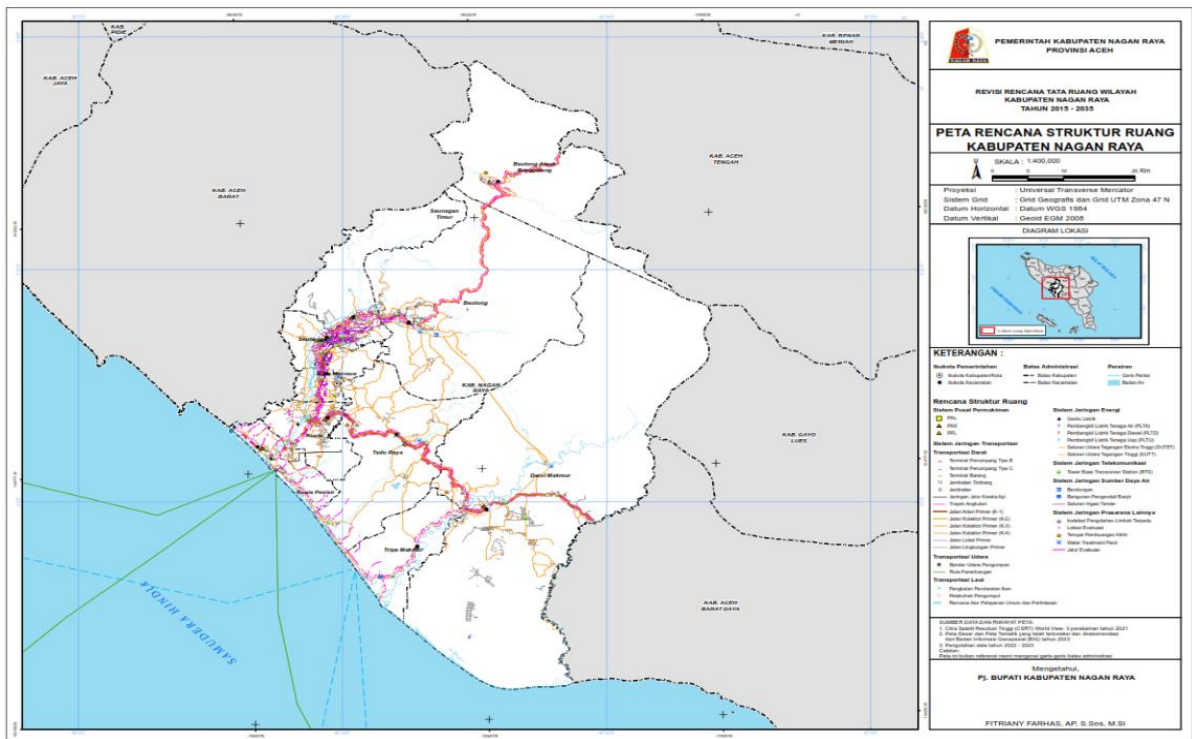
Pembangunan berbasis Ekonomi Hijau adalah merupakan transisi Pembangunan Ekonomi Nagan Raya dalam jangka panjang yang menempatkan tiga pilar Pembangunan Ekonomi berjalan secara seimbang menuju Pembangunan Berkelanjutan. Tiga Pilar dimaksud adalah; (1) Pilar Ekonomi dengan enam indikator antara lain, intensitas emisi, intensitas energi, dan pendapatan nasional bruto (PNB) per kapita; (2) Pilar Sosial dengan empat indikator, yakni tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, angka harapan hidup, dan rata-rata lama sekolah; dan (3) Pilar Lingkungan dengan lima

indikator, yaitu tutupan lahan, lahan gambut terdegradasi, penurunan emisi, sampah terkelola, dan energi baru terbarukan.

2.7.1.1. Perwujudan Struktur Ruang

Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional dan berkelanjutan. Peta berikut ini menggambarkan struktur ruang dalam jangka panjang 2025 - 2045.

Gambar 2.50
Struktur Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Dalam Kebijakan Tata Ruang Nasional dan Aceh, secara struktur ruang, Kabupaten Nagan Raya menjadi Pusat Kegiatan Lokal (PKL), Pusat Kegiatan Kawasan (PKK), dan Pusat Pelayanan Sosial (PPS) dengan target jangka panjang adalah tumbuh dan berkembangnya simpul pelayanan sosial, simpul pengembangan budaya, pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, dan simpul pelayanan terpadu administrasi masyarakat. Dan tumbunya pusat-pusat permukiman dan pusat-pusat kota berjenjang yang dibentuk berdasarkan sistem perkotaan dan pusat pelayanan berbasiskan ekosistem berkelanjutan dan kearifan lokal. Untuk memastikan Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya berbasis Green Ekonomi dan atau Pembangunan Berkelanjutan dapat dilihat dengan *Indikasi Outcome* dari aspek struktur ruangnya tergambar sebagai berikut:

1. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) berada di Lueng Baro ibukota Kecamatan Suka Makmue berbasis Indikator Pembangunan Berkelanjutan;
2. Pusat Kegiatan Kawasan (PKK) berbasis Pembangunan Berkelanjutan, berada di:
 - a. Alue Bilie ibukota Kecamatan Darul Makmur;
 - b. Padang Rubek ibukota Kecamatan Kuala Pesisir; dan
 - c. Babussalam ibukota Kecamatan Beutong.
3. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) berada di:
 - a. Ujong Fatimah ibukota Kecamatan Kuala;
 - b. Alue Bata ibukota Kecamatan Tadu Raya;
 - c. Jeuram ibukota Kecamatan Seunagan;
 - d. Keude Linteung ibukota Kecamatan Seunagan Timur;
 - e. Kabu ibukota Kecamatan Tripa Makmur; dan
 - f. Kuta Teungoh ibukota Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang.

Dari aspek Indikasi Output, struktur ruang dapat dilihat dengan tumbuh dan berkembangnya sistem jaringan prasarana eksisting dan pengembangan usulan rencana pembangunan yang berbasiskan Pembangunan Berkelanjutan:

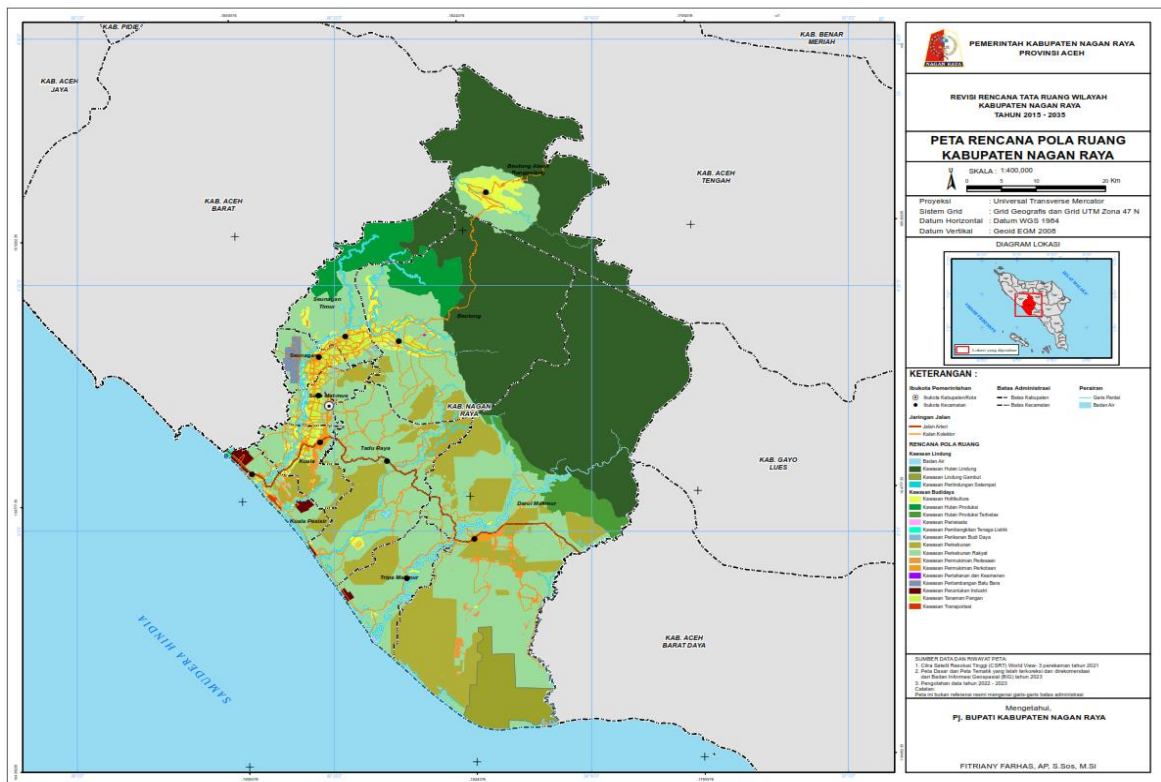
- a. Adanya Sistem jaringan transportasi yang terintegrasi dan ramah lingkungan.
- b. Ada sistem jaringan energi yang ramah lingkungan.
- c. Ada sistem jaringan telekomunikasi yang menjadi konektiviti seluruh perpangkalan hidup masyarakat dari pusat kota pemerintahan sampai pelosok perpangkalan hidup masyarakat.
- d. Ada sistem jaringan sumber daya air yang bersih, ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- e. Ada sistem jaringan prasarana lainnya yang dapat menurunkan ketimpangan dan ramah lingkungan.

2.7.1.2. Perwujudan Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya berbasis pada Indikator Pembangunan Berkelanjutan. Dan mendasari pada kebijakan pola ruang nasional, provinsi, kebijakan pembangunan daerah, kondisi objektif wilayah, daya dukung dan kebutuhan ruang dalam jangka panjang, pola ruang Kabupaten Nagan Raya dalam jangka panjang terdiri dari (1) Kawasan Peruntukan Lindung, (2) Kawasan Peruntukan Budi Daya berbasis Pembangunan Berkelanjutan, dan (3) Kawasan Peruntukan Pengembangan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) berbasis Pembangunan Berkelanjutan.

Peta berikut ini menggambarkan Peruntukan Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya dalam jangka 20 tahun ke depan (2025 - 2045):

Gambar 2.51
Pola Ruang Kabupaten Nagan Raya



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

2.7.1.2.1. Kawasan Peruntukan Lindung

Kawasan Peruntukan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Dalam mewujudkan Nagan Raya sebagai Daerah *Green Ekonomi*, indikasi outcome pola ruang Kawasan Peruntukan Lindung yang sudah ditetapkan harus terjaga dan dikelola secara berkelanjutan adalah;

- 1) Kawasan Badan air dengan luas total badan air mencapai 2.638,60 ha, sesuai dengan keputusan menteri lingkungan hidup dan kehutanan republik Indonesia nomor SK. 580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018 tentang perubahan ketiga atas keputusan menteri kehutanan nomor SK.865/MENHUT-II/2014 tanggal 29 september 2014 tentang kawasan hutan dan konservasi perairan Provinsi Aceh;
- 2) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, meliputi;
 - a. Kawasan hutan lindung Nagan Raya seluas 130.322,42 ha, yang berada Kecamatan Seunagan Timur, Kecamatan Beutong, Kecamatan Beutong Ateuh Benggalang dan Kecamatan Darul Makmur;
 - b. Kawasan Lindung Gambut sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor SK 296/Menlhk/Set.jen/KUM.1/4/2019 tentang penetapan peta fungsi

ekosistem gambut, kawasan gambut berada di 2 Kecamatan yakni Darul Makmur dan Tripa Makmur dengan kedalaman 0 sampai 950 cm dan luas total mencapai 38.573 ha. Dilihat dari fungsinya, ekosistem gambut dikawasan ini terdiri dari fungsi lindung dengan luas 19.615 ha dan fungsi budidaya dengan luas 18.958 ha;

- 3) Kawasan Perlindungan Setempat, adalah Kawasan yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya terdiri dari; (a) sempadan sungai dengan luas mencapai 9.429,23 ha, adalah bentangan sungai dalam wilayah kabupaten Nagan Raya yang membutuhkan pemeliharaan dan penanganan khusus agar kawasan ini dapat terpelihara/dipulihkan dari kerusakan; (b) sempadan pantai, adalah Pesisir pantai Kabupaten Nagan Raya sebagai buffer hijau seluas 202,03 ha; (c) sempadan danau, adalah Danau yang ada dalam wilayah Kabupaten Nagan Raya seluas 210,01 Ha yang terdiri dari danau seluas 115,56 ha dan sempadan danau seluas 94,45 ha; dan (d) ruang terbuka hijau (RTH) adalah Ruang Terbuka Hijau Eksisting seluas 261,40 Ha atau 7,80 % dari luas kawasan perkotaan. Dan dalam jangka panjang ditargetkan RTH meningkat menjadi 743.97 Ha atau 30 % dari luas kawasan perkotaan.

Dalam jangka panjang Kawasan Peruntukan Lindung dikelola berbasiskan ekosistem dan kearifan lokal dengan indikasi outcomenya adalah tumbunya Kawasan TAHURA dan atau GEOPARK.

2.7.1.2.2. Kawasan Peruntukan Budi Daya

Kawasan Budi Daya Berkelanjutan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan yang berbasiskan pada Pembangunan Berkelanjutan.

Kawasan Budidaya yang selama ini sudah dikelola oleh Masyarakat dan Privat Sektor dalam jangka panjang diproyeksikan menjadi kawasan budi daya berkelanjutan yang terdiri dari;

- 1) Kawasan Hutan Produksi seluas 20.541,62 ha (Hutan produksi dan Hutan Produksi Terbatas);
- 2) Kawasan Peruntukan perkebunan rakyat seluas 3.758,54 ha;
- 3) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan 5.727,77 ha, hortikultura 54.138,41 ha, perkebunan 99.513,46 ha, peternakan besar seluas 3.609,72 ha, dan agropolitan dengan luas 8.834,74 ha; dan
- 4) Kawasan Perikanan dan Kelautan denga. Luas areal mencapai 8.518,79 ha diperuntukan pusat riset, SPBN, TPI. Dan untuk kawasan Perikanan Air Tawar, Perikanan Air Payau dan sentra pengolahan/pemasaran.

Dengan peruntukan Kawasan budi daya ini dalam jangka panjang Kabupaten Nagan Raya menjadi Kawasan Agropolitan Berbasis Ekonomi Hijau

menuju Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

2.7.1.2.3. Kawasan Pertambangan dan Energi

Sumberdaya Alam Pertambangan dan Energi yang dimiliki Nagan Raya menjadi salah satu potensi Pembangunan Ekonomi Nagan, Aceh dan Indonesia. Kawasan peruntukan pertambangan dan energi terdiri atas pertambangan mineral, pertambangan batubara, dan kawasan pertambangan minyak dan gas bumi yang samoai saat ini belum dikelola berbasiskan green ekonomi dan sebagian besarnya masih ilegal. Dalam jangka menengah dan rencana Jangka Panjang potensi tersebut dikelola secara legal dan berorientasi pada Pembangunan Ekonomi Hijau (Green Economy).

2.7.1.2.4. Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Peruntukan Industri Berkelanjutan adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berkelanjutan yang *zero emisi dan zero waste* berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang dtetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam rencana Jangka Panjang, Kabupaten Nagan Raya sudah menetapkan Kawasan peruntukan Industri berada di seluruh Kecamatan dengan katagori Industri sesuai denga potensi Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia, mulai dari Kawasan Industri Terpadu (KIT) yang terletak di Padang Turi, Kecamatan Kuala Pesisir dengan Luas areal mencapai 1000 ha, Industri Besar yang terletak di 3 Kecamatan dengan luas areal mencapai 488,07 ha, Industri Menengah yang teeletak di 4 kecamatan dengan luas areal 15 ha, dan Industri Rumah Tangga yang berada diseluruh kecamatan yang selama ini sudah berjalan dan dalam jangka panjang ditingkat kapasitas produksinya.

2.7.1.2.5. Kawasan Industri Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata telah lama diakui sebagai sektor ekonomi yang potensi besar untuk mendorong pertumbuhan dan pembangunan suatu daerah dan atau negara. Di Nagan Raya, upaya menjadikan pariwisata sebagai pilar utama ekonomi telah menjadi fokus Pemerintah dan atau Pemangku kepentingan lainnya. Namun dalam perjalanannya menuju pencapaian ini, ada sejumlah tantangan dan peluang yang harus dihadapi secara bijak, terencana secara integrative, dan synergy dengan seluruh pemangku kepentingan Industri Pariwisata. Sampai berakhirnya Pembangunan Jangka Panjang Nagan Raya belum berhasil menjadikan sektor Pariwisata sebagai sumber penerimaan daerah. Sementara object destinasi wisata cukup potensial. Dan dalam Rencana Jangka Panjang 2025 - 2045, Pemerintah Nagan Raya menjadikan sektor Industri

Pariwisata sebagai Potensi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan salah satu pilar pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan. Dalam rangka mencapai target ini, Pembangunan Jangka Panjang sektor Pariwisata yang dikelola secara industrial di fokuskan pada memperbaiki infrastruktur, termasuk infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, akses kesehatan, kebersihan dan membangun budaya industri pariwisata yang berbasis green ekonomi menuju Pembangunan Berkelanjutan.

Kawasan industri pariwisata yang dialokasikan dalam pola ruang mempunyai luas 832,36 ha yang tersebar 6 kecamatan (1) Kecamatan Beutong Ateuh Banggalan; (2)Kecamatan Darul Makmur; (3) Kecamatan Tadu Raya; (4) Kecamatan Kuala (5) Kecamatan Kuala Pesisir dan dan (6) Kecamatan Tripa Makmur. Dilihat dari katagori Industri Pariwisata, dapat dibagi dalam kategorikan pariwisata alam, pariwisata buatan, dan pariwisata budaya (religi).

2.7.1.3. Kawasan Strategis Berkelanjutan

Kawasan Strategis Berkelanjutan adalah kawasan pertumbuhan ekonomi hijau daerah yang memiliki nilai strategis dengan potensi investasi tinggi, yang dikembangkan untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kawasan strategis kabupaten Kabupaten Nagan Raya yang sesuai dengan tujuan kebijakan dan strategi Kabupaten di masa yang akan datang, antara lain:

- 1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan meliputi; Kawasan Agropolitan, Kawasan Minapolitan, Tanaman Pangan Berkelanjutan, Kawasan Cepat Tumbuh di Kuala Pesisir, Kawasan Perdagangan dan Jasa di Koridor Jalan, Kawasan Percepatan Daerah Tertinggal di Beutong Ateuh Banggalan, kawasan Pelabuhan CPO, dan Kawasan Pariwisata,
- 2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi meliputi; Kawasan PLTU 1, 2, 3, dan 4, Kawasan Industri skala besar, Kawasan Industri skala menengah, dan Kawasan Taman Konservasi Orang Hutan dan/atau Suakamargasatwa seluas 2.046,90 ha di Gampong Kuala Seumayam, Pulo Kruet, dan Sumber Bakti Kecamatan Darul Makmur Kabupaten Nagan Raya.
- 3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup kawasan rawan bencana tsunami, meliputi: Kecamatan Kuala Pesisir seluas 155,29 ha, Kecamatan Tadu Raya seluas 95,56 ha, dan Kecamatan Tripa Makmur.

Rencana detail pelaksanaan Pembangunan Jangka berbasis RTRW akan dituangkan dalam RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) berdasarkan Sturktur dan Pola Ruang yang adala dalam dokumen Revisi RTRW Nagan tahun 2015 - 2025. Secara ringkas mattrik berikut ini memberikan gambaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya berbasis Qanun RTRW.



Tabel 2.138
Target Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW

Indikasi Program Pembangunan Berkelanjutan	Tahap I 2025-2029	Tahap II 2030-2034	Tahap III 2035-2039	Tahap IV 2040-2045
I. Perwujudan Struktur Ruang	PRA	MAJU	MANDIRI	BERKELANJUTAN
II. Perwujudan Pola Ruang	PRA	MAJU	MANDIRI	BERKELANJUTAN
III. Kawasan Strategis Berkelanjutan	PRA	MAJU	MANDIRI	BERKELANJUTAN

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2025

Indikasi Program Pembangunan Berkelanjutan berbasis Kinerja Pembangunan Berdasarkan RTRW adalah mengacu pada Framework Indeks Pertumbuhan Ekonomi Hijau yang secara bertahap dicapai dalam 4 tahap dan 4 katagori;

1. Tahap I (2025 - 2029) indikasi target capaiannya adalah PRA; dimaksudkan sebagai tahap awal pencapaian pembangunan indeks pertumbuhan ekonomi hijau menuju Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
2. Tahap II (2030 - 2034) indikasi target capaiannya adalah MAJU; dimaksudkan sebagai tahap kemandirian pencapaian pembangunan indeks pertumbuhan ekonomi hijau menuju target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
3. Tahap III (2035 - 2039) indikasi target capaiannya adalah MANDIRI; dimaksudkan sebagai tahap kemandirian pembangunan pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau secara fiskal dan sumberdaya manusia menuju Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
4. Tahap IV (2040 - 2045) indikasi target capaiannya Berkelanjutan adalah pembangunan pencapaian indeks ekonomi hijau yang terwujudnya target Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Secara ringkas *frame work indeks* ekonomi hijau sebagai acuan dasar Target Kinerja Pembangunan Jangka Panjang yang berbasiskan pada pertumbuhan ekonomi hijau berisikan empat dimensi yang menjadi dasar transisi menuju Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs); (1) penggunaan sumber daya yang efisien dan berkelanjutan (*Efficient and Sustainable Resource*), (2) peningkatan perlindungan modal alam (*Natural capital protection*) (3) penciptaan peluang ekonomi hijau (*Green Economic opportunity*), dan (4) pemberdayaan inklusi sosial (*Social Inclusion*).

2.7.2. Perencanaan Sektoral

Perencanaan sektoral adalah proses perencanaan yang berfokus pada pengembangan dan pengelolaan suatu sektor atau bidang tertentu dalam kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan sektoral mengacu pada pembuatan rencana, kebijakan, dan strategi yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan spesifik dari sektor-sektor tertentu, seperti kependudukan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, ekonomi, pertanian, dan lain-lain.

2.7.2.1. GDPK Kabupaten Nagan Raya 2017-2035

Proses perencanaan pembangunan mutlak memerlukan integrasi antara variabel demografi dengan variabel pembangunan. Oleh karena itu, Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Nagan Raya disiapkan dalam rangka menyediakan kerangka pikir dan panduan untuk mengintegrasikan berbagai variabel kependudukan ke dalam berbagai proses pembangunan, harmonisasi antara dinamika kependudukan dengan dinamika kondisi sosial ekonomi lainnya dan membantu memperkuat penyusunan dan implementasi perencanaan pembangunan di Kabupaten Nagan Raya. Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) adalah arahan kebijakan umum 25 tahun di bidang pembangunan kependudukan yang dijabarkan dalam road map pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup pada 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan yaitu,

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk,
2. Peningkatan Kualitas Penduduk,
3. Pembangunan Keluarga,
4. Pengarahan Mobilitas Penduduk, dan
5. Pengembangan Data Base Kependudukan.

Lima aspek tersebut dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2035, telah mengatur pembangunan kependudukan Nagan Raya melalui 5 (lima) arah kebijakan pembangunan yang terdiri dari:

1. Pembangunan Kependudukan menggunakan pendekatan hak asasi sebagai prinsip utama untuk mencapai kaidah keadilan.
2. Pembangunan Kependudukan mengakomodasi partisipasi semua pemangku kepentingan baik ditingkat pusat, daerah maupun Masyarakat.
3. Pembangunan Kependudukan menitikberatkan penduduk sebagai pelaku bukan penikmat Pembangunan.
4. Pembangunan Kependudukan diarahkan untuk mencapai Pembangunan berkelanjutan.

5. Pembangunan Kependudukan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah dan rencana jangka panjang nasional dan daerah.

Berdasarkan arah kebijakan tersebut ditetapkan tujuan utama Pembangunan kependudukan Kab. Nagan Raya yang terdiri dari:

1. Tujuan utama pembangunan kependudukan adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa yang dikaitkan dengan isu-isu strategis di Kabupaten Nagan Raya agar mendapatkan solusi yang terintegrasi dan komprehensif sesuai dengan karakteristik yang dimiliki dan mendukung tujuan Kabupaten dan nasional.
2. Dalam hal mencapai tujuan utama tersebut, ditetapkan tujuan khusus yang akan dilakukan untuk:
 - a. Mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan.
 - b. Mewujudkan pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan.
 - c. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - d. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan.
 - e. Melaksanakan pembangunan kependudukan melalui sistem administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.

Permasalahan pokok di bidang kependudukan di Kabupaten Nagan Raya memperlihatkan bahwa masih ada kesenjangan terhadap pemerataan pembangunan baik di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya di Kabupaten Nagan Raya. Permasalahan dan tantangan kependudukan dapat dirinci dengan memperhatikan permasalahan dari kuantitas penduduk, kualitas penduduk, dan persebaran dan mobilitas penduduk. Permasalahan kependudukan Kabupaten Nagan Raya yang diidentifikasi berdasarkan pada 5 (lima) pilar yaitu:

1. Pilar Pengelolaan Kuantitas Penduduk, Permasalahan yang muncul berdasarkan pilar ini adalah masih tingginya Angka Kematian Ibu, masih tingginya Angka Kematian Bayi dan Balita/Anak, dan masih rendahnya Kepesertaan KB Aktif.

2. Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, permasalahan yang berkaitan dengan pilar Peningkatan Kualitas Penduduk, yaitu masih kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya pendidikan, sehingga mereka tidak perlu menyekolahkan anak mereka ke jenjang yang lebih tinggi (khususnya untuk anak perempuan), rendahnya penerimaan pendapatan perkapita, dan masih rendahnya tingkat Pendidikan penduduk.
3. Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk, permasalahan yang muncul adalah penyebaran Penduduk yang belum merata di setiap kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya, belum adanya penetapan penataan yang konkrit dan pemanfaatan wilayah yang masih lemah terhadap sumber daya alam dan keistimewaan produk yang dimiliki oleh setiap kecamatan dalam Kabupaten Nagan Raya, dan Pembangunan sarana dan prasarana dasar yang belum merata.
4. Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas, Permasalahan yang terdapat pada pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas adalah Indeks Pembangunan Keluarga (iBANGGA) belum mencapai tingkat yang optimum, Pemberdayaan Perempuan Dalam Pembangunan Masih Rendah, Masih Rendahnya Implementasi Karakter Islami Dalam Keluarga.
5. Pilar Penataan Data Dan Informasi Kependudukan Serta Administrasi Kependudukan, permasalahan pada pilar ini adalah Belum Optimalnya Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Sejalan dengan Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2019 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2035 yang telah mengatur pembangunan kependudukan Nagan Raya melalui 5 (lima) arah kebijakan pembangunan kependudukan, maka sinergi dan integrasi dengan GDPK Pemerintah Aceh sangat diperlukan dan menjadi hal yang mutlak. Pemerintah Aceh didalam GDPK 2023-2048 memuat Visi kependudukan Aceh yang juga telah merangkul lima pilar dalam GDPK, yaitu kuantitas penduduk, kualitas penduduk, pembangunan keluarga, mobilitas penduduk dan administrasi kependudukan.

2.7.2.1.1. Kuantitas penduduk

Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Nagan Raya mencakup waktu dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2035 dengan periode lima tahunan. Grand Design Pembangunan Kependudukan disusun untuk mengukur apakah sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk tersebut dapat dicapai, baik yang mencakup fertilitas maupun mortalitas. Secara umum konsep kependudukan membahas dua hal utama yang berkaitan dengan kuantitas penduduk yakni fertilitas, mortalitas dan migrasi, serta kualitas penduduk yang berkaitan dengan kualitas hidup dan indeks kebahagiaan. Berbagai fenomena yang berkaitan dengan kuantitas penduduk diantaranya berkaitan dengan jumlah, persebaran, kepadatan, struktur umur, komposisi,

jenis kelamin, status ekonomi, status perkawinan. Adapula fenomena yang lebih luas dan berkaitan dengan dunia masyarakat seperti ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lingkungan hidup. Pada sebuah kabupaten yang berkembang selalu menginginkan kondisi ideal bagi perkembangan penduduknya, mengingat jumlah penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan maka perlu dilakukan pengaturan pertumbuhan penduduk agar jumlah yang terbentuk tidak terlalu besar sehingga dapat mengganggu kestabilan perkembangan suatu negara atau daerah. Kuantitas penduduk pada hakikatnya adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal. Untuk mendapatkan gambaran kuantitas penduduk yang diinginkan, disini akan dilihat dari aspek pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Proyeksi penduduk bukan merupakan ramalan jumlah penduduk tetapi suatu perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran, kematian, dan perpindahan. Ketiga komponen inilah yang menentukan besarnya jumlah penduduk dan struktur umur penduduk di masa yang akan datang.

Merujuk pada estimasi Bappenas, UNFPA, dan BPS yang telah menyusun proyeksi penduduk tahun 2010-2035 di Indonesia, jumlah penduduk Indonesia selama dua puluh lima tahun mendatang terus meningkat yaitu dari 238,5 juta pada tahun 2010 menjadi 305,6 juta pada tahun 2035. Pertumbuhan rata-rata per tahun penduduk Indonesia selama periode 2010-2035 menunjukkan kecenderungan terus menurun. Dalam periode 2010-2015, dan 2030-2035 laju pertumbuhan penduduk turun dari 1,38 persen menjadi 0,62 persen per tahun. Turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Tingkat penurunan karena kelahiran lebih cepat daripada tingkat penurunan karena kematian. Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) turun dari sekitar 21,0 per 1000 penduduk pada awal proyeksi menjadi 14,0 per 1000 penduduk pada akhir periode proyeksi, sedangkan Angka Kematian Kasar (Crude Death Rate/CDR) naik dari 6,4 per 1000 penduduk menjadi 8,8 per 1000 penduduk dalam kurun waktu yang sama.

Estimasi BPS, penduduk Kabupaten Nagan Raya akan mencapai 170.098 jiwa pada tahun 2020. Sementara itu, populasi penduduk Kabupaten Nagan Raya akan mencapai 213.974 jiwa pada tahun 2030, dengan pertumbuhan penduduk sebesar 1,41 persen. Angka estimasi tersebut cenderung menurun dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 1,78 persen. Berikut adalah tren proyeksi kuantitas penduduk Kabupaten Nagan Raya tahun 2015 s/d 2030. Arah Kebijakan Kuantitas Penduduk Kabupaten Nagan Raya:

1. Pengendalian kuantitas penduduk ditetapkan melalui perkiraan angka fertilitas, mortalitas, dan mobilitas penduduk; dan

2. Pengendalian kuantitas penduduk bertujuan agar dapat mewujudkan struktur penduduk tumbuh seimbang (PTS) secara berkelanjutan.

2.7.2.1.2. Pengaturan Fertilitas

Bonus demografi umumnya didahului dengan transisi demografi, yang ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan angka kematian. Sebagai dampaknya, proporsi penduduk yang memasuki usia angkatan kerja mulai meningkat. Bonus demografi terancam tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila tingkat kelahiran belum dapat diturunkan. Sementara di sisi lain, proporsi penduduk lansia juga mulai meningkat sebagai akibat peningkatan status kesehatan masyarakat dan penurunan tingkat kematian.

Stagnasi angka fertilitas ternyata berdampak secara nyata dalam menghasilkan fase tahapan bonus demografi hingga mencapai puncaknya yang disebut *window of opportunity*. Data jumlah penduduk Indonesia hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang menyatakan kelebihan jumlah penduduk sekitar 3,5 juta jiwa dari angka proyeksi sebelumnya, serta angka kelahiran total, atau Total Fertility Rate (TFR) hasil SDKI 2012 yang cenderung konstan, ternyata merubah perkiraan durasi dari *window of opportunity* maupun besaran angka beban ketergantungan (*dependency ratio*). Semula *window of opportunity* diproyeksikan terjadi selama 10 tahun (2020-2030) dengan angka *dependency ratio* sebesar 44 per 100. Namun dengan kondisi tingkat fertilitas yang stagnan, *window of opportunity* diproyeksikan terjadi dalam durasi yang lebih singkat, yaitu 4 tahun, dari 2028 sampai 2031. Sedangkan kisaran angka *dependency ratio* lebih tinggi yaitu sebesar 47 per 100. Uraian diatas menunjukkan betapa pentingnya arti penurunan TFR bagi terjadinya durasi *window of opportunity* maupun besaran angka *dependency ratio*. Kegagalan menurunkan angka fertilitas, akan memperbesar proporsi penduduk nonproduktif dan berdampak membesarnya beban ketergantungan.

Salah satu indikator fertilitas dapat dilihat dari angka Total Fertility Rate (TFR) suatu penduduk. TFR adalah rata-rata anak yang dilahirkan seorang wanita selama masa usia suburnya (15 hingga 49 tahun). Beberapa manfaat TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukan tingkat keberhasilan Program KB, membantu para perencana pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

Angka TFR Kabupaten Nagan Raya berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 sebesar 2,489 yang berarti bahwa wanita yang berusia 15 hingga 49 tahun secara rata-rata mempunyai 2 sampai 3 anak selama masa suburnya. Angka TFR

yang tinggi merupakan cerminan rata-rata usia kawin yang rendah, tingkat pendidikan rendah terutama wanitanya dan tingkat sosial ekonomi rendah.

Angka TFR Nagan Raya hingga 2015 sebesar 2,0. Angka ini diupayakan terus menurun pada tahun 2020 menjadi 1,93 dan diperkirakan hingga tahun 2035 mencapai angka 1,91. Dengan demikian, kondisi ini cukup ideal untuk mengatur pertumbuhan penduduk Nagan Raya yang telah meningkat sebanyak 16.686 dalam 4 tahun terakhir setelah sensus penduduk 2010 yang lalu atau dengan pertumbuhan sebesar 2,40% per tahun.

2.7.2.1.3. Penurunan Mortalitas

Suatu upaya yang dilakukan untuk menekan atau meminimalkan kematian bayi, balita/anak, ibu hamil dan ibu melahirkan adalah dengan penurunan mortalitas. Indikator derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat ditandai dengan jumlah kematian ibu, jumlah kematian bayi, dan lamanya usia harapan hidup. Di Indonesia, kasus kematian bayi masih merupakan salah satu masalah prioritas bidang kesehatan ibu dan anak. Tingginya angka kematian ibu dan anak serta lambatnya penurunan angka tersebut, menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan Ibu dan Anak sangat mendesak untuk ditingkatkan baik dari segi jangkauan maupun kualitas pelayanannya. Di Kabupaten Nagan Raya angka kematian ibu dan bayi tergolong masih tinggi. Untuk mendapatkan kondisi yang diinginkan terkait dengan penurunan mortalitas di Kabupaten Nagan Raya, dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Penurunan Angka Kematian Ibu

Permasalahan Angka Kematian Ibu (AKI) atau Mother Mortality Rate (MMR) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 (enam) minggu hingga setahun setelah melahirkan.

Secara nasional, tahun 2015 terhadap AKI masih belum tercapai, sehingga dapat dikatakan target MDG's di bidang kesehatan belum lagi selesai. Penurunan kematian ibu sangat penting bagi pembangunan karena merupakan prasyarat serta indikator sebagai hasil sebuah capaian kemajuan dalam pembangunan sebuah negara. Maternal Mortality Rate (MMR) didefinisikan sebagai banyaknya perempuan yang meninggal pada waktu melahirkan per 100.000 kelahiran dalam tahun tertentu. Kematian ini disebabkan karena komplikasi pada masa kehamilan, sekitar kelahiran atau pada masa nifas. Idealnya, semakin kecil angka MMR, maka semakin baiknya pembangunan di bidang kesehatan.

Usaha mengatasi masalah kematian ibu melahirkan, Pemerintah telah mengeluarkan Program Jampersal (Jaminan Persalinan). Jampersal merupakan jaminan pembiayaan yang digunakan untuk pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB pasca persalinan dan pelayanan bayi baru lahir yang pembiayaannya dijamin oleh Pemerintah Pusat.

Selain itu, setiap ibu yang melahirkan juga harus dapat diselamatkan, karena setiap anak yang dilahirkan dari rahim yang sehat akan menghasilkan generasi yang kuat, cerdas dan memiliki gerakan yang dinamis. Keberadaan perempuan yang sehat dan berwawasan dalam pembangunan merupakan modal dasar untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan upaya penyelamatan dan mensejahterakan setiap ibu hamil atau safe motherhood. Upaya ini merupakan penyelamatan bagi perempuan agar kehamilan dan persalinannya dapat dilalui dengan sehat dan aman, serta menghasilkan bayi yang sehat. Tujuannya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu hamil, bersalin, nifas juga kematian bayi baru lahir.

Tahun 2010, jumlah kematian ibu Kabupaten Nagan Raya mencapai 8 jiwa per 100.000 kelahiran hidup, dan jumlah ini bersifat fluktuatif dalam empat tahun terakhir. Tahun 2014, jumlah Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4 kasus. Kondisi yang diinginkan untuk indikator AKI Nagan Raya pada tahun-tahun yang akan datang diupayakan terus menurun hingga tidak ada lagi ibu yang meninggal ketika hamil, melahirkan dan pasca melahirkan atau zero growth. Hal ini sangat tergantung kepada intensitas pelayanan kesehatan dan sarana pendukungnya untuk bekerja aktif dan responsif terhadap penanganan wanita hamil mulai dari persiapan kehamilan hingga melahirkan.

B. Penurunan Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi atau Infant Mortality Rate (IMR) adalah jumlah kematian bayi berumur kurang dari satu tahun per seribu kelahiran hidup. Angka kematian bayi (AKB) merupakan salah satu indikator status kesehatan masyarakat yang terkait dengan berbagai indikator kesehatan dan indikator pembangunan lainnya. AKB dipengaruhi oleh morbiditas (kesakitan) dan status gizi anak dan ibu. AKB juga berhubungan dengan angka pendapatan daerah per-kapita, pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu dan keadaan gizi keluarga.

BPS Nagan Raya mencatat pada tahun 2010 jumlah kematian bayi mencapai 41 jiwa per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi ini semakin memburuk dengan capaian menjadi 80 jiwa pada Tahun 2013, dikarenakan adanya perbaikan pada pelaporan dan pencatatan pada tahun tersebut sehingga pencatatan kasus terhadap kematian bayi terdata begitu tinggi. Dalam tahun 2014 jumlah ini mengalami penurunan, tercatat sebanyak 66 kasus kematian

bayi atau 19 per 1.000 kelahiran hidup, dan pada tahun 2015 angka kematian bayi meningkat tajam yaitu mencapai 27 per 1.000 kelahiran hidup atau sejumlah 90 kasus kematian bayi. Jumlah ini menunjukkan masih rentannya status kesehatan masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan bayi di Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memproyeksikan angka kematian bayi pada tahun 2020 menjadi 29,2 dan diperkirakan terus menurun hingga 28,8 pada Tahun 2035. Proyeksi ini terlihat lambat, namun Pemerintah Daerah akan berupaya agar penurunan AKB ini dapat terlihat cukup signifikan pada tahun-tahun berikutnya.

2.7.2.1.4. Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2008 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsure pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Meningkatnya penduduk yang semakin besar mengakibatkan terjadinya masalah kependudukan dalam hal kualitas adalah masalah kependudukan dalam hal mutu kehidupan dan kemampuan sumberdaya manusianya. Di Indonesia, masalah kualitas penduduk yang terjadi antara lain dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat pendidikan dan rendahnya taraf kesehatan penduduk yang mengarah pada rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Peningkatan kualitas penduduk harus dilakukan secara bersama oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya.

Arah Kebijakan Peningkatan Kualitas Penduduk Kabupaten Nagan Raya 2015-2035:

1. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam upaya menurunkan angka kematian bayi;
2. Meningkatkan kompetensi dan daya kompetisi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal, maupun informal;
3. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan;
4. Meningkatkan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan;
5. Mengurangi kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

A. Bidang Kesehatan

tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator untuk mencapai kualitas penduduk. Dalam hal ini, tingkat kesehatan dapat diindikasikan dari angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan, ketercukupan gizi makanan, dan usia harapan hidup. Angka kematian bayi di Kabupaten Nagan Raya masih relative tinggi, meskipun terus menurun dari tahun ke tahun. Target untuk mencapai AKI terendah pada tahun 2035 mendatang, diperlukan kualitas program yang andal untuk dapat menekan angka kematian bayi seminimal mungkin. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berupaya mensinergikan data terpadu antara Dinas Kesehatan dengan Puskesmas dan stakeholder kunci lainnya. Dengan adanya persamaan pemikiran terhadap lemahnya pelayanan masyarakat, diyakini target jangka panjang akan tercapai bahkan lebih kecil dari yang diproyeksikan.

Rendahnya Tingkat ketercukupan gizi masyarakat. Kondisi ini dapat terlihat dari jumlah kasus gizi buruk yang terdata di setiap tahun. Tahun 2010, jumlah balita gizi buruk mencapai 13 balita, dan pada tahun 2014 jumlah ini meningkat menjadi 19 balita. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada masyarakat Nagan Raya yang belum merasakan kesejahteraan. Umumnya ini terjadi pada kelompok beresiko tinggi yang tinggal di daerah-daerah terpencil atau tertinggal. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menetapkan standar ketercukupan gizi, yaitu 2.400 kalori/hari/kepala keluarga. Artinya, suatu keluarga dikatakan sejahtera jika mampu memenuhi angka ketercukupan kalori tersebut. Ekspektasi yang diharapkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah jumlah balita gizi buruk pada tahun-tahun berikutnya adalah nol atau zero growth.

Meningkatkan Usia Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata umur yang dapat dicapai oleh penduduk suatu negara. Angka harapan hidup di Kabupaten Nagan Raya terus meningkat hingga mencapai pada posisi 68,59 tahun pada tahun 2015. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memproyeksikan Usia Harapan Hidup akan mencapai angka 68,99 tahun pada tahun 2020 dan diprediksikan pada tahun 2035 Usia Harapan Hidup sebesar 70,19 tahun

B. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu indikator untuk meningkatkan kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang dicapai, maka semakin tinggi pula kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum, tingkat pendidikan penduduk Indonesia masih tergolong relative rendah. Akan tetapi, tingkat pendidikan masyarakat di daerah senantiasa diupayakan untuk selalu meningkat dari tahun ke tahun. Secara Nasional, dari sisi pendidikan target utama adalah tercapainya angka melek huruf sebesar 100 persen. Mengikuti pada RPJMD Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2017, angka melek huruf

Kabupaten Nagan Raya hingga Tahun 2017 ditargetkan sebesar 97,11 persen. Kenyataannya, angka melek huruf tahun 2014 telah berada pada angka 98,59 persen atau jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya telah terjadi peningkatan sebesar 3,47 persen. Angka ini telah melewati target RPJMD di tahun 2017.

Tingginya angka melek huruf dalam tahun 2014 didukung oleh semakin membaiknya angka partisipasi murni (APM) tingkat SD yang mencapai 99,75 persen dari 99,30 persen pada tahun 2013. Sementara APM untuk tingkat SMP mencapai 82,33 persen dari 77,84 persen tahun 2013. Sedangkan APM ditingkat SMA hanya mencapai 73,09 persen dari 71,44 persen pada tahun 2013. Untuk tahun proyeksi, diperkirakan APM tingkat SMP dan SMA sebesar 100 persen.

C. Bidang Ekonomi

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada suatu daerah yang mengakibatkan peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi berkaitan dengan tinggi rendahnya pendapatan perkapita masyarakat. Pendapatan perkapita adalah banyaknya pendapatan kotor dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk pertengahan tahun. Pendapatan perkapita mencerminkan tingkat kemakmuran suatu daerah. Pendapatan perkapita Kabupaten Nagan Raya masih tergolong rendah. Data tahun 2010 menunjukkan pendapatan perkapita Nagan Raya sebesar 4,46 miliar rupiah. Walaupun kecil, pendapatan ini terus meningkat hingga tahun 2014 mencapai 4,93 miliar rupiah. Kondisi ini menggambarkan tingkat kehidupan masyarakat Nagan Raya masih memiliki masyarakat miskin atau masyarakat prasejahtera dengan tingkat penghasilan yang relatif rendah sehingga terjadi ketimpangan antara pemenuhan pangan keluarga yang tidak berimbang dengan kebutuhan gizi dan protein anggota keluarganya.

Kemudian angka penduduk miskin Nagan Raya pada tahun 2010 sebesar 24,43 persen dengan jumlah 42.358 jiwa penduduk miskin. Tentu saja angka ini relatif tinggi, ditambah lagi jumlah ini melonjak naik hingga 44.300 jiwa (23,70 persen) pada tahun 2013 dengan inflasi tertinggi sebesar 10,99 persen. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya menurunkan angka tersebut dengan melaksanakan program dan kegiatan peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi daerah. Dana Desa yang menjadi salah satu solusi di dalam wujud kebijaksanaan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam penanggulangan kemiskinan di perdesaan adalah melalui pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya bersal dari Bagi Hasil Pajak daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Merujuk pada Peraturan Menteri Desa yang dikeluarkan oleh Kmeenterian Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa 2016. Peraturan ini menjadi salah satu

dasar hukum serta pedoman penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara umum, prioritas penggunaan Dana Desa 2016 tetap ditujukan pada dua bidang yakni pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk mendukung kedua bidang dimaksud, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya mengeluarkan 5 (lima) Peraturan Bupati Nagan Raya guna mendukung pelaksanaan dana desa sehingga pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa berlangsung maksimal, tepat sasaran dan tepat manfaat.

Mengurangi permasalahan peningkatan perekonomian menjadi faktor utama untuk menuju pembangunan manusia yang optimal, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka kebutuhan akan lapangan usaha akan tinggi, sehingga persaingan diantara pencari kerja akan semakin sengit terutama di daerah perkotaan. Untuk itu, peran dan keberadaan Dana Desa menjadi salah satu faktor pemacu terhadap gerak ekonomi lokal dan diyakini akan mampu meningkatkan pendapatan perkapita daerah setiap tahunnya dengan menitik beratkan pada pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kewirausahaan desa/gampong. Keterlibatan Dana Desa di Kabupaten Nagan Raya yang diperkirakan mencapai Rp. 1 miliar per desa pada tahun 2017, diharapkan akan mampu menciptakan kesempatan kerja dan lapangan usaha seluas-luasnya secara merata khususnya di basis perdesaan.

Berdasarkan tahun 2013, jumlah pengangguran di Kabupaten Nagan Raya mencapai 4.480 jiwa, Angka pengangguran ini cenderung menurun, meskipun bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya. Pada tahun 2015, jumlah pengangguran di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 2.592 jiwa. Dengan adanya peran Dana Desa sebagai salah satu pemacu gerak ekonomi lokal bagi kewirausahaan kecil menengah, diprediksikan jumlah pengangguran ini akan menurun hingga 2.538 jiwa pada tahun 2020, dan terus mengecil hingga 1.176 jiwa pada tahun 2035.

D. Bidang Keagamaan

Aspek Keagamaan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama sebagai landasan moral dan etika dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Pembangunan bidang agama yang terpadu dengan pembangunan bidang-bidang lain diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi serta berdisiplin. Secara garis besar, pembangunan bidang agama ditujukan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama yang dinamis baik internal maupun antar umat beragama, dan turut memajukan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pendidikan agama dan

pengembangan lembaga sosial keagamaan. Dalam rangka meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama serta pemantapan keimanan dan ketaqwaan, pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur bagi siswa dan mahasiswa, Pemerintah Daerah Kabupaten Nagan Raya telah membangun berbagai sarana ibadah yang tersebar dalam 12 kecamatan, dukunga terhadap penataran dan pelatihan bagi guru agama, penyempurnaan bahan ajar, pengadaan buku pelajaran, penyelenggaraan pesantren kilat di seluruh jenjang sekolah, dan penambahan jumlah literatur baik buku teks maupun buku bacaan. Dampak Bidang Agama sangat menjanjikan keharmonisan kehidupan antara manusia dengan manusia lainnya, kecintaan manusia kepada pencipta-Nya, dan sebagai landasan moral serta etika untuk mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya menjalankan beberapa kebijakan Pembangunan guna menunjang fungsi Bidang Agama dimaksud anatara lain Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama yang bertujuan untuk (meningkatkan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah, mendorong serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kehidupan beragama. Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan serta Pendalaman Agama dan Kerukunan Hidup Umat Beragama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi setiap individu, keluarga, masyarakat, dan penyelenggara negara, memperkuat dasar-dasar kerukunan hidupintern dan antar umat beragama, dan membangun harmoni sosial dan persatuan nasional. Peningkatan Kualitas Pemahaman Pendidikan Agama yang kaffah, Pendidikan agama di sekolah/madrasah bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama bagi siswa guna meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Pembinaan Lembaga Sosial Keagamaan dan Lembaga Pendidikan Tradisional Keagamaan yang bertujuan memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, dan memberikan pelayanan pendidikan bagi masyarakat khususnya di perdesaan yang berlatar sosial ekonomi lemah.

E. Bidang Sosial Budaya

Manusia sebagai mahluk berakal dan berbudaya selalu berupaya untuk mengadakan perubahan-perubahan. Dengan sifatnya yang kreatif dan dinamis manusia terus berevolusi meningkatkan kualitas hidup yang semakin terus maju. Singkatnya, manusia sebagai makhluk sosial dan berbudaya, akan mampu menunjukkan fungsi pendidikan budaya sebagai pengembangan potensi peserta didik untuk menjadi pribadi berperilaku baik, perbaikan kiprah pendidikan nasional yang lebih bermartabat dan penyaringan nilai-nilai budaya untuk mendapatkan karakter bangsa yang bermartabat. Saat ini dan seterusnya, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah mengembangkan nilai-nilai budaya

melalui event-event kedaerahan seperti pelaksanaan Pekan Kebudayaan Nagan Raya, perlombaan putra/putri Aceh bernuansa Islami, lomba gemar membaca dan bercerita tingkat Sekolah Dasar dan MI, dan pendalaman materi Pendidikan Budaya Islami di seluruh jenjang sekolah. Pendidikan berbaur budaya akan lebih mendidik karakter anak bangsa yang bermartabat dan berkualitas, karena di dalam budaya memiliki nilai-nilai sosial yang sejalan dengan nilai religius dan diyakini mampu menciptakan peserta didik yang berkekratifitas, mandiri dan berwawasan kebangsaan.

2.7.2.1.5. Kondisi Keluarga

Arah Kebijakan Pembangunan Keluarga Kabupaten Nagan Raya 2015-2035:

1. Revitalisasi peran keluarga dalam hal pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik;
2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat ekonomi, sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan); dan
3. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga.

Kondisi keluarga yang ideal adalah keluarga yang penuh kasih sayang, saling pengertian, dukungan, dan komunikasi yang baik antar anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat di mana setiap individu merasa diterima, dihargai, dan didukung untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya. Kepercayaan dan keterbukaan juga penting, serta adanya komitmen untuk saling mendukung dalam segala situasi, baik suka maupun duka. Selain itu, keluarga juga memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan perkembangan bersama, serta mempromosikan nilai-nilai positif seperti integritas, tanggung jawab, dan empati.

2.7.2.1.6. Penataan Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Arah Kebijakan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Nagan Raya 2015-2035:

1. Menata persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilaksanakan dengan membentuk pusat-pusat pertumbuhan sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nagan Raya;
2. Menyediakan sarana dan prasarana pembangunan hingga ke pedesaan agar tidak terjadi kesenjangan sebaran penduduk terutama di wilayah pusat kota;
3. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmoni;
4. Penyusunan sistem informasi penduduk luar domisili secara terpadu dan transparan;

5. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para pendatang dan keluarganya;
6. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan penduduk lokal dengan pendatang; dan
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

2.7.2.1.7. Pembangunan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan

Pembangunan kependudukan harus didukung dan diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang akurat, terpercaya, terintegrasi dan termanfaatkan. Roadmap Pembangunan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Nagan Raya mencakup waktu Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2035 dengan periode lima tahunan.

Arah Kebijakan Pembangunan Data dan Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Nagan Raya 2015-2035:

1. Mengembangkan data base kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support System* (DSS).
2. Penguatan kapasitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi, infrastruktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

2.7.2.2 Rencana Pengembangan Kawasan Perdesaan (RPKP)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerah melalui pendekatan “Desa Membangun” dan “Pembangunan Kawasan Perdesaan” untuk melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan di daerah. Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan mengingat perkembangan pembangunan pada sebagian wilayah tidak secepat perkembangan pembangunan pada wilayah lainnya atau suatu kawasan memiliki potensi perekonomian dan pertumbuhan yang cukup tinggi sedangkan pada sebagian wilayah lainnya memiliki potensi perekonomian dan pertumbuhan yang sangat rendah. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kawasan Perdesaan dapat dimaknai sebagai kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi (Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1). Penyusunan Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Nagan Raya, merupakan amanat dari Undang - Undang Nomor

6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terdapat dalam Pasal 83 Ayat 1 s/d 5 dan juga amanat dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, yang memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan pembangunan daerah dengan mengedepankan pembangunan pada kawasan perdesaan.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya telah menyusun dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2029, dengan mengedepankan konsep pembangunan kawasan perdesaan yang bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS), dengan mengangkat Tematik Kawasan “Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya” yang bermakna Agrikultur sebagai kawasan perdesaan yang berfokus pada kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, yang meliputi: pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, dalam menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta dengan turut memperhatikan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup.

Kawasan yang dapat ditetapkan sebagai kawasan perdesaan merupakan bagian dari suatu Kabupaten/Kota yang terdiri dari beberapa Desa yang berbatasan dalam sebuah wilayah perencanaan terpadu yang memiliki kesamaan dan/atau keterkaitan masalah ataupun potensi pengembangan pembangunan pada kawasan perdesaan, sebagaimana ketentuan dari Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Nomor 5 Tahun 2016 dalam Pasal 9, menyebutkan penetapan suatu kawasan perdesaan dilaksanakan dengan memperhatikan:

1. Kegiatan pertanian.
2. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
3. Tempat permukiman perdesaan.
4. Tempat pelayanan jasa pemerintahan, sosial dan ekonomi perdesaan.
5. Nilai strategis dan prioritas kawasan.
6. Keserasian pembangunan antar kawasan dalam wilayah Kabupaten/Kota.
7. Kearifan lokal dan eksistensi masyarakat hukum adat.
8. Keterpaduan dan keberlanjutan pembangunan.

Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya, juga dilakukan analisis terhadap potensi polarisasi spasial ruang geografis ekonomi dan alokasi sumber daya (capital investment) yang keberadaannya cukup tersedia dan belum sepenuhnya dikelola secara optimal. Keberadaan sumber daya yang cukup tersedia dapat berupa: sumber daya alam, sumber daya manusia, teknologi dan ketersediaan modal (financial), yang apabila dikelola secara komprehensif akan memberikan nilai tambah (value added) yang cukup besar terhadap kenaikan tingkat pendapatan, kesejahteraan dan kualitas kehidupan masyarakat, yang dikemudian hari dapat memberikan dampak terhadap penurunan angka kemiskinan penduduk dan stunting

ataupun gizi buruk, serta mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah/kawasan perdesaan, seiring dengan perkembangan kemajuan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah serta kawasan perdesaan yang terus meningkat kedepannya di Kabupaten Nagan Raya.

Tinjauan Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya, memuat beberapa kajian kebijakan pembangunan pada kawasan perdesaan yang dapat diimplementasi ke dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Nagan Raya pada kawasan perdesaan yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Kawasan Perdesaan Agrikultur Gampong Pertanian dan Hortikultura Nagan Raya.
2. Kawasan Perdesaan Agrikultur Gampong Perternakan Nagan Raya.
3. Kawasan Perdesaan Agrikultur Gampong Perikanan Tangkap dan Budidaya Nagan Raya.
4. Kawasan Perdesaan Agrikultur Gampong Perkebunan Nagan Raya.
5. Kawasan Perdesaan Pariwisata Gampong Wisata Nagan Raya.
6. Kawasan Perdesaan Gampong Perindustrian, Perdagangan, UMKM, Koperasi,
7. BUMDesa dan BUMDesa Bersama Nagan Raya.

Isu strategis dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agrikultur dan Pariwisata Kabupaten Nagan Raya, sebagai sebagai berikut:

1. Keberadaan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia cukup tersedia, namun belum terkelola dan berkembang secara optimal sesuai dengan konsep pembangunan yang bersifat THIS (Tematik, Holistik, Integratif, Spasial) dalam meningkatkan percepatan pembangunan kawasan perdesaan.
2. Komoditas dari produk unggulan kawasan perdesaan “Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya” belum dapat dikembangkan secara terpadu dan berkesinambungan, yang dapat memberikan nilai tambah (value added) secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat di kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya.
3. Penguatan kapasitas dan pemanfaatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat (Kelompok/Perseorangan/Koperasi/BUMDesa/BUMDesma) dalam sistem ekonomi pasar dan pemasaran hasil produksi belum berkembang secara signifikan, dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya.
4. Ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar pada kawasan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya, masih diperlukan penyediaan/fasilitas pembangunan dan perbaikan/pembenahan yang

lebih optimal dalam menunjang aktivitas perekonomian masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable) pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya;

5. Pangsa pasar dari produk unggulan kawasan “Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya” masih sangat terbatas, membuat penjualan produk hanya terbatas pada sekitar kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa branding produk unggulan kawasan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya masih sangat kurang, sehingga sulit mendapatkan konsumen dan investasi modal (capitalinvestment) yang dapat digunakan dalam meningkatkan percepatan pembangunan kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya.

Berdasarkan isu strategis dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya diperlukannya sinergisitas dalam proses pembangunan kawasan perdesaan yang dikembangkan dalam suatu sistem yang terintegrasi terhadap kegiatan usaha Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Peternakan (Agrikultur) dan Pariwisata (Wisata). Kelima sektor tersebut dalam taraf perkembangannya saat ini masih dijalankan oleh masing-masing sektor, sehingga kerjasama antara pemilik usaha, petani, nelayan dan pemangku kepentingan (stakeholder) sangat dibutuhkan, dikarenakan banyaknya keunggulan yang dapat diperoleh dari segi sumber daya manusia, produk, sarana prasarana, kelembagaan, pemasaran serta alokasi dana, yang ada dapat disinergikan antara komponen – komponen tersebut untuk dapat dimanfaatkan pada pembangunan kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya pada saat ini kiranya dapat mewujudkan potensi dan masalah antar desa dan bekerjasama dalam pengembangan komoditas secara internal dan eksternal pada kawasan perdesaan tersebut.

Berdasarkan isu strategis sebelumnya, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 20 tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat petani, nelayan pesisir, dan peternak dalam rangka menyiapkan ekosistem pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya dengan target generasi muda (milenial dan gen z) menjadi prioritas.
2. Pengelolaan pembangunan Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan harus dapat memberi manfaat sekaligus pelestarian Sumber Daya Alam (SDA) yang perlu dilakukan secara adil, bertanggung jawab dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan kelestarian lingkungan pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya.
3. Meningkatkan inovasi – inovasi pembangunan di kawasan perdesaan berbasis sosial budaya dan kearifan lokal dalam memperkuat ekonomi

kreatif sebagai sektor utama transformasi ekonomi masyarakat pada kawasan perdesaan Kabupaten Nagan Raya dimasa mendatang.

4. Ikhtiar pengelolaan kawasan perdesaan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan sebagaimana usaha Agrikultur Nagan Raya, perlu perencanaan bisnis yang matang dan berkesinambungan dengan menargetkan finansial dan pasar/ customer yang detail.
5. Pembentukan branding terhadap produk unggulan kawasan perdesaan dan penciptaan ekosistem bisnis pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya dalam suatu sistem Kelembagaan, Destinasi, Industri, Pemasaran dan pendekatan-pendekatan pembangunan dan daya dukung dari aspek lainnya yang perlu dipahami dengan baik.

Berdasarkan hasil analisis isu strategis, tujuan dan sasaran serta strategi, maka tahap selanjutnya adalah perumusan arah kebijakan kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya. Arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya, sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrikultur dan Hortikultura Gampong Pertanian Kabupaten Nagan Raya. Secara geografis Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi pertanian yang cukup besar, wilayah yang tergolong dataran rendah membuat tanah yang subur dan cocok untuk ditanamai berbagai komoditi pertanian. Kawasan pertanian di Kabupaten Nagan Raya terbagi dalam dua kawasan, yaitu: kawasan pertanian untuk lahan basah dan kawasan pertanian untuk lahan kering berupa tanaman hortikultura. Jenis komoditas tanaman pangan unggulan yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya meliputi: padi, jangung, kacang tanah, kedelai dan ubi jalar. Kabupaten Nagan Raya hingga saat ini termasuk penghasil komoditas Padi terbesar di wilayah barat-selatan Provinsi Aceh. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil pertanian dengan melakukan pembinaan kelompok tani serta penyediaan kelembagaan pendukung sektor pertanian di Kabupaten Nagan Raya.
2. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrikultur dan Hortikultura Gampong Peternakan Kabupaten Nagan Raya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam pengelolaan sumber daya peternakan memiliki alasan dasar/ prinsip yang sama dengan keterlibatan pemerintah pada sektor-sektor pembangunan ekonomi lainnya yang dijalankan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Nagan Raya memiliki potensi yang cukup besar di sektor Peternakan, terutama Ternak Sapi, Kerbau, Kambing dan Domba. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan peningkatan kuantitas dan kualitas produksi hasil peternakan dengan melakukan pembinaan kelompok peternak serta

penyediaan kelembagaan pendukung sektor peternakan di Kabupaten Nagan Raya.

3. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrikultur dan Hortikultura Gampong Perikanan Tangkap dan Budidaya Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya memiliki panjang wilayah garis pantai sekitar 74,4 km dan termasuk ke dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia – WPP 572 (Samudera Indonesia – Pantai Barat Sumatera). Pada saat ini di Kabupaten Nagan Raya terdapat 2 (dua) Tempat Pendaratan Ikan (TPI), yaitu: 1) TPI Kuala Tadu, 2) TPI Kuala Tuha, yang masih sangat diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang mampu menampung perahu dan kapal nelayan yang dapat melakukan bongkar muat dan tempat pelelangan ikan yang representatif dan lebih memadai. Sektor Perikanan Tangkap dan Budidaya di Kabupaten Nagan Raya pada saat ini, masih menjadi salah satu sektor potensi ekonomi unggulan yang memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perdesaan yang berprofesi sebagai petani nelayan dan para pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) yang bekerja disektor perikanan, baik dibidang perikanan tangkap maupun perikanan budidaya.
4. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Agrikultur dan Hortikultura Gampong Perkebunan Kabupaten Nagan Raya. Sektor perkebunan di Kabupaten Nagan Raya merupakan sektor yang memberikan pengaruh yang cukup berarti terhadap perekonomian daerah, termasuk pendapatan masyarakat. Ditinjau dari aspek sosial, sektor perkebunan telah membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi masyarakat yang dimana ikut mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Potensi pengembangan perkebunan di Kabupaten Nagan Raya masih sangat besar, areal yang diperuntukan untuk pengembangan perkebunan mencapai 77.164 Ha. Ketersediaan bibit unggul dan penanganan pasca panen masih menjadi permasalahan utama dalam pengembangan komoditi perkebunan di Kabupaten Nagan Raya. Sebagian bibit unggul harus diimpor dari daerah lain yang membuat harga relatif lebih mahal dan sulit dijangkau oleh petani. Sehingga berimpas pada tingkat produktivitas pada kawasan perkebunan rakyat jika dibandingkan dengan perkebunan besar. Penanganan pasca panen berkaitan dengan rendahnya harga komoditi perkebunan yang diterima petani. Rendahnya harga komoditi disebabkan akibat kualitas pengolahan hasil panen, sistem kelembagaan petani yang lemah dan minimnya ketersediaan unit pengolahan hasil perkebunan.
5. Arah Kebijakan Pembangunan Kawasan Perdesaan Pariwisata Gampong Wisata Kabupaten Nagan Raya. Kabupaten Nagan Raya secara geografis memiliki wilayah laut dan gunung sehingga memiliki daya tarik dan objek wisata yang beragam dan unik. Pengembangan objek wisata dan daya tarik

wisata di Kabupaten Nagan Raya belum terkelola dengan baik. Sarana dan prasarana penunjang sektor pariwisata di beberapa kawasan wisata belum memadai dan promosi wisata di Kabupaten Nagan Raya juga masih tergolong rendah. Perkembangan sektor pariwisata dapat memberikan dampak yang besar bagi pengembangan ekonomi daerah dan dapat mendorong tumbuhnya sektor-sektor jasa lainnya. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan pengembangan sektor wisata secara terpadu meliputi: wisata sungai, pantai, danau dan wisata religi. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus mengupayakan kerja lintas sektor dan juga dengan pihak swasta dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata di Kawasan Perdesaan Pariwisata Gampong Wisata Nagan Raya.

6. Arah Kebijakan Pembangunan Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), BUMDesa dan BUMDesma Kabupaten Nagan Raya. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Nagan Raya. Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis dan evaluasi terhadap pembinaan pasar dan distribusi, usaha perdagangan. Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan dan penyiapan kebijakan, perencanaan pembangunan industri, pengembangan usaha industri dan penyediaan informasi industri. Bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis, pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia, fasilitasi pembiayaan permodalan dan pengembangan produksi usaha dan pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM.

Berlandaskan tinjauan arah kebijakan, isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan kawasan perdesaan dari Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Nagan Raya, dengan mengangkat Tematik Kawasan Perdesaan “Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya”, dalam mewujudkan kemajuan pembangunan kawasan perdesaan yang ingin dicapai pada masa mendatang, adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produktifitas Agrikultur untuk kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati, meliputi: pertanian, peternakan, perikanan dan perkebunan, dalam menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri atau sumber energi serta turut memperhatikan pengelolaan kelestarian lingkungan hidup pada kawasan perdesaan Agrikultur Nagan Raya yang dapat memberikan nilai tambah (value added) secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan hidup masyarakat serta

penguatan perekonomian daerah pada kawasan perdesaan Agrikultur yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) Kabupaten Nagan Raya.

2. Menjadikan Pariwisata Nagan Raya, sebagai tempat tujuan (destinasi) utama pariwisata daerah, nasional dan internasional di wilayah barat Provinsi Aceh, yang mempunyai pengaruh penting dalam satu dan/atau lebih aspek pembangunan wilayah/ kawasan perdesaan di Kabupaten Nagan Raya, seperti:
 - a. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b. Meningkatnya investasi modal (capital investment).
 - c. Pemberdayaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
 - d. Peningkatan daya dukung pelestarian lingkungan hidup, sosial dan budaya.
 - e. Peningkatan keterbukaan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
 - f. Peningkatan pendapatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
 - g. Penurunan angka kemiskinan penduduk di Kabupaten Nagan Raya.
 - h. Penurunan ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar wilayah/kawasan
 - i. perdesaan di Kabupaten Nagan Raya.
3. Meningkatkan pembinaan dan penguatan kapasitas serta pemanfaatan kelembagaan usaha ekonomi masyarakat (kelompok/ perseorangan/ koperasi/ Badan Usaha Milik Gampong), dalam sistem ekonomi pasar dan pemasaran hasil produksi, untuk menjadi aktor utama penggerak produksi dan pemasaran hasil produksi yang lebih maju, yaitu: "Terwujudnya pengolahan hasil produksi yang berkualitas dan proses pemasaran yang komprehensif guna meningkatkan minat pasar terhadap komoditas hasil produk unggulan kawasan perdesaan Agrikultur Nagan Raya, meliputi: Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Perkebunan serta Pariwisata (Wisata) dengan komoditas produksi pendukung kawasan perdesaan meliputi: sektor Industri Manufaktur, Perdagangan, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), Koperasi, Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), dan Badan Usaha Milik Gampong Bersama (BUMG Bersama) serta kegiatan penunjang lainnya yang terkait dengan pengembangan pembangunan kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya.
4. Memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan infrastruktur perekonomian serta infrastruktur komersial pada kawasan perdesaan Agrikultur dan Pariwisata Nagan Raya yang lebih memadai dan optimal, dengan terwujudnya pembangunan kawasan yang didukung keberadaan penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung dan meningkatkan proses produksi hingga pemasaran hasil produksi serta guna mendukung kemudahan aksesibilitas, kenyamanan dan keselamatan

para wisatawan dalam melakukan kunjungan ke tujuan (destinasi) pariwisata di kawasan perdesaan Agrikultur dan Parawisata Nagan Raya.

2.7.2.3 Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata

Sektor pariwisata mempunyai arti penting bagi perekonomian daerah, pembangunan wilayah, dan pemberdayaan masyarakat lokal. Sama dengan daerah lain, Kabupaten Nagan Raya juga sedang berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pariwisata untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah (PAD), meningkatkan kesempatan kerja, dan pendapatan masyarakat melalui sektor kepariwisataan. Kabupaten Nagan Raya, Aceh yang terletak di pesisir Barat Aceh menyimpan beragam pesona daya tarik wisata baik alam, budaya, hingga objek buatan. Daya tarik wisata alam berupa danau, gunung dan pemandangan alamnya, pantai, dan sungai. Daya tarik budaya berupa situs-situs bersejarah, adat, tradisi dan religi, sedangkan daya tarik buatan berupa bendungan/irigasi, waduk, dan taman wisata, serta didukung oleh kuliner dan kerajinan. Tingginya potensi kepariwisataan Kabupaten Nagan Raya ini belum diimbangi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang optimal. Hal ini salah satunya disebabkan oleh minimnya kajian-kajian perencanaan yang lebih detail dan akurat tentang destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.

Pada sub-bab ini menjelaskan acuan/pedoman untuk perencanaan pembangunan pariwisata yang memuat 4 (empat) aspek di Kabupaten Nagan Raya, yaitu (a) aspek destinasi mencakup potensi daya tarik wisata, sarana prasarana/fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas (keterjangkauan dan moda transportasi), investasi dan pemberdayaan masyarakat; (b) aspek pemasaran pariwisata; (c) aspek industri pariwisata; dan (d) aspek kelembagaan pariwisata. Selain memuat empat aspek pembangunan pariwisata, dokumen Ripparkab merumuskan visi, misi pembangunan pariwisata, prinsip prinsip, konsep, kebijakan, perwilayahan pariwisata, strategi, dan indikasi program pembangunan pariwisata lintas sektor dan berjangka waktu sesuai dengan regulasi yang baru. Dari 4 (empat) aspek tersebut, maka perlu diatur pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam upaya memastikan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Nagan Raya berjalan dengan optimal dan komprehensif.

2.7.2.3.1 Pendekatan Proses Perencanaan Komprehensif

Penggunaan pendekatan ini dapat menghasilkan roadmap yang tidak saja berkualitas, tetapi memiliki daya dorong implementasinya di tingkat. Di samping itu menghasilkan kebijakan, strategi, dan indikasi program pengembangan pariwisata, juga mendorong Qanun tentang Ripparkab. Proses perencanaan&penyusunan yang melibatkan pemangku kepentingan pariwisata diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dan pemahaman mereka atas

berbagai isu dan solusi yang relevan melalui penyelenggaraan diskusi/FGD dan seminar. Bila pendekatan ini dilaksanakan, setidaknya-tidaknya dapat dijamin diperolehnya dokumen perencanaan yang layak dan dapat diimplementasikan. Perubahan sosial, budaya, dan politik di masyarakat menjadikan pendekatan perencanaan konvensional kehilangan relevansi dan manfaatnya. Untuk mengatasi masalah tersebut, berdasarkan pengalaman Pusat Studi Pariwisata UGM dalam penyusunan perencanaan pembangunan kepariwisataan di berbagai tingkatan (nasional, provinsi, kabupaten/kota, kawasan dan daya tarik wisata) dan daerah di Indonesia, maka pendekatan yang tepat adalah perencanaan komprehensif *Community Based Tourism Strategic Planning* (CBTSP) atau pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (Kusworo, 2000). Perencanaan komprehensif untuk Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat melibatkan proses yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, mengembangkan, dan mengelola potensi pariwisata di suatu komunitas dengan memperhatikan kebutuhan, keinginan, dan kearifan lokal.

2.7.2.3.2 Pembangunan pariwisata berkelanjutan

Pendekatan pembangunan pariwisata berkelanjutan diterapkan sebagai pendekatan fundamental dalam penyusunan Ripparkab Nagan Raya ini. Esensi pendekatan tersebut ialah bahwa setiap kegiatan pembangunan harus dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia dengan manfaat jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan merupakan sebuah konsep ideal bagi pengembangan pariwisata karena mampu menyeimbangkan antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya. Dengan demikian pemanfaatan sumber daya pariwisata dapat dilakukan secara lestari dan bertanggung jawab tanpa merusak atau mengurangi nilai sumber daya yang dimiliki. Pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah pendekatan dalam mengelola dan mengembangkan industri pariwisata dengan memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam jangka panjang. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa pertumbuhan pariwisata tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melindungi dan memperkaya aset alam, budaya, dan sosial yang menjadi dasar pariwisata itu sendiri. Pembangunan pariwisata berkelanjutan bertujuan untuk menciptakan manfaat jangka panjang bagi lingkungan, masyarakat lokal, dan industri pariwisata itu sendiri, sambil meminimalkan dampak negatifnya. Ini memerlukan komitmen dan kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.

2.7.2.3.3 Pembangunan Pariwisata Berbasis Masyarakat

Pariwisata merupakan fenomena yang kompleks, bukan sekadar kegiatan dengan objek utama industri pelayanan yang melibatkan manajemen produk dan pasar, tetapi lebih dari itu merupakan proses dialog antara wisatawan sebagai

tamu dan masyarakat sebagai tuan rumah (winisatawan). Adanya kegiatan pengembangan kawasan wisata yang dihuni beragam komunitas, karakter sosial, budaya, dan sosial ekonomi, mereka ditempatkan sebagai subjek. Begitu pula dengan kawasan dan daya tarik wisata di Nagan Raya yang dihuni oleh masyarakat lokal, pendekatan pengembangan yang dilakukan harus menempatkan masyarakat sekitar sebagai pelaku pariwisata. Pendekatan ini perlu dijalankan karena masyarakat setempat merupakan pihak yang paling tahu kondisi sosial budaya sehingga setiap kegiatan pembangunan harus memperhitungkan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di sekitar wilayah perencanaan. Oleh karena itu, setiap langkah keputusan perencanaan harus mencerminkan pemberdayaan masyarakat lokal yang secara aktif ikut terlibat di dalamnya. Pelibatan masyarakat sejak awal akan lebih menjamin kesesuaian program pengembangan dengan aspirasi masyarakat setempat, kesesuaian dengan kapasitas yang ada, serta menjamin adanya komitmen masyarakat karena adanya rasa memiliki yang kuat. Dalam konteks pengembangan destinasi pariwisata di Kabupaten Nagan Raya, pendekatan ini diharapkan akan mendorong terbukanya peluang kerja bagi masyarakat di sekitar kawasan/daya tarik wisata, terbukanya akses bagi masyarakat sekitarnya untuk dapat berusaha serta menikmati fasilitas daya tarik wisata tersebut, tanpa diskriminasi, sekaligus mendorong terlibatnya masyarakat dalam proses perencanaan kawasan/objek wisata, pemantauan dan pengendalian kegiatan.

2.7.2.3.4 Pendekatan Pengembangan Destinasi

Pendekatan pengembangan destinasi ini menggunakan konsep 6A's (Six As) sebagai kerangka penting analisis destinasi pariwisata. Enam A ini adalah atraksi (*attractions*) berupa daya tarik alam, buatan, budaya, *heritage*, *special events*; *Accessibility*, yaitu seluruh sistem transportasi yang terdiri dari rute, terminal, dan kendaraan; *Amenities*, yaitu fasilitas akomodasi dan katering, ritel/perdagangan, layanan wisata lainnya; *Available packages*, yaitu paket wisata yang tersedia; *Activities*, yaitu semua aktivitas yang tersedia di kawasan wisata dan apa yang akan dilakukan wisatawan; and *Ancillary services*, yaitu layanan yang digunakan wisatawan seperti bank, telekomunikasi, pos, dan rumah sakit). Pendekatan Pengembangan Destinasi Wisata adalah strategi yang digunakan untuk mengelola dan mengembangkan suatu lokasi atau wilayah sebagai tujuan wisata yang menarik. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan pembangunan infrastruktur pariwisata, tetapi juga memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, budaya, dan manusia secara terpadu.

2.7.2.3.5 Pendekatan pendorong dan penarik wisatawan

Keputusan seseorang untuk melakukan perjalanan wisata dipengaruhi oleh faktor faktor pendorong dan faktor-faktor penarik. Faktor yang mendorong seseorang untuk berwisata adalah ingin terlepas (meskipun hanya sejenak) dari

kehidupan yang rutin setiap hari, lingkungan yang tercemar, kecepatan lalu lintas dan hiruk pikuk kesibukan di kota (Fandeli, 1995). Adanya faktor pendorong, maka seseorang ingin melakukan perjalanan wisata. Berbagai faktor penarik yang dimiliki oleh daerah tujuan wisata akan menyebabkan orang tersebut akan memilih daerah tujuan wisata tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya.

Pendekatan pendorong dan penarik wisatawan adalah strategi yang digunakan untuk menarik dan mempertahankan minat wisatawan terhadap suatu destinasi. Pendekatan ini melibatkan identifikasi faktor-faktor yang mendorong wisatawan untuk mengunjungi destinasi tertentu, serta faktor-faktor yang membuat mereka tertarik untuk kembali atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kedua pendekatan ini:

A. Pendekatan Pendorong Wisatawan

- Daya Tarik Alam: Faktor utama yang mendorong wisatawan adalah keindahan alam dan kekayaan sumber daya alam suatu destinasi, seperti pantai, gunung, danau, hutan, serta keanekaragaman hayati.
- Warisan Budaya: Wisatawan juga tertarik untuk menjelajahi warisan budaya suatu destinasi, seperti situs bersejarah, arsitektur tradisional, festival budaya, dan kegiatan seni tradisional.
- Aktivitas Rekreasi dan Petualangan: Aktivitas petualangan dan rekreasi seperti hiking, menyelam, berkemah, bersepeda, dan olahraga air seringkali menjadi faktor pendorong bagi wisatawan yang mencari pengalaman yang menyenangkan dan berkesan.
- Kuliner Lokal: Wisatawan seringkali tertarik untuk mencoba makanan dan minuman lokal, serta mengeksplorasi pasar tradisional, restoran, dan kafe yang menawarkan hidangan khas daerah tersebut.
- Acara dan Festival: Acara khusus dan festival budaya yang diadakan di destinasi tertentu juga dapat menjadi faktor pendorong bagi wisatawan yang ingin merasakan kehidupan lokal dan tradisi budaya.

B. Pendekatan Penarik Wisatawan

- Pelayanan Berkualitas: Pengalaman positif wisatawan selama kunjungan mereka, termasuk pelayanan yang ramah, akomodasi yang nyaman, transportasi yang mudah, dan fasilitas umum yang bersih dan terawat, akan menjadi faktor penarik utama.
- Keamanan dan Kesejahteraan: Wisatawan cenderung mencari destinasi yang aman dan nyaman untuk dikunjungi, sehingga faktor keamanan dan kesejahteraan sangat penting untuk menarik wisatawan.
- Ketersediaan Informasi: Kemudahan akses terhadap informasi tentang destinasi, termasuk panduan wisata, peta, aplikasi perjalanan, dan

informasi tur, dapat membantu menarik minat wisatawan dan memandu mereka selama kunjungan.

- Harga dan Nilai: Faktor harga yang terjangkau dan nilai yang diberikan dalam bentuk paket wisata atau promosi khusus dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan yang mencari pengalaman liburan yang ekonomis dan berharga.
- Kepuasan Wisatawan: Pengalaman positif wisatawan selama kunjungan mereka, yang mencakup aspek-aspek seperti kepuasan dengan pelayanan, pengalaman wisata, dan interaksi dengan masyarakat lokal, akan mendorong mereka untuk kembali atau merekomendasikan destinasi tersebut kepada orang lain.

2.7.2.4 Sistem Inovasi Daerah

Inovasi dan daya saing merupakan bagian penting yang tidak dapat dilepaskan dari Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi menyatakan bahwa penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian tujuan Negara sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, dan menyerasikan tata kehidupan manusia beserta kelestarian fungsi lingkungan hidupnya berdasarkan Pancasila. Pasal 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 menyatakan bahwa ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Sinergi pengetahuan dan teknologi ini menghasilkan inovasi yang berguna mendorong daya saing daerah menciptakan iklim usaha yang berguna bagi masyarakat. Inovasi yang dimaksud adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pengembangan Sistem Inovasi Nasional merupakan agenda nasional sesuai dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) 2005-2025 dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam peraturan bersama Menteri Riset Dan Teknologi Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dinyatakan bahwa pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) ,yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas. Dalam penjabarannya, implementasi SIDa menyangkut tiga tindakan utama yaitu penataan pilar SIDa, pengembangan fokus prioritas, dan implementasi kerangka kerja sistem inovasi. Penguatan SIDa akan berjalan baik melalui penguatan Perekonomian Berbasis Pengetahuan yaitu dengan mengangkat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan ekonomi yang modern, menguasai teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Kabupaten Nagan Raya akan mengembangkan dan melakukan Penguatan SIDa dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan ekonomi untuk mencapai visinya mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Syariat Islam. Kabupaten Nagan Raya memiliki berbagai potensi yang mendukung daya ungkit pertumbuhan ekonomi, hanya saja saat ini segala sumber daya belum optimal diarahkan untuk menggerakkan sektor ekonomi yang memiliki daya saing dengan ilmu pengetahuan dan pemanfaatan teknologi.

Kabupaten Nagan Raya termasuk salah satu daerah belum inovatif yang ditandai belum terintegrasinya pelaksanaan riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan daerah serta masih rendahnya capaian tingkat Inovasi daerah, dimana berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 Kabupaten Nagan Raya berpredikat kurang inovatif serta belum adanya penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) termasuk pelaksanaan fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi. Pada tahun 2024 Kabupaten Nagan Raya mendapat kategori inovatif dengan skor 44,68. Predikat inovatif ini merupakan yang pertama sekali diperoleh pemerintah

Kabupaten Nagan Raya, Dalam IGA. Tahun 2024 ini Kabupaten Nagan Raya juga merupakan salah satu Kabupaten yang berhasil melakukan lompatan nilai indeks inovasi daerah secara signifikan yaitu sebesar 12,47 poin dibandingkan tahun 2023 , dimana indeks inovasi daerah tahun 2023 kabupaten nagan raya memiliki iid sebesar 32,21.

Arah kebijakan dan Strategi Penguatan Sistem Inovasi Kabupaten Nagan Raya diarahkan pada potensi yang tersedia di Kabupaten Nagan Raya dengan memperhatikan permasalahan strategis, tantangan, peluang dan kondisi yang akan dicapai sehingga mampu untuk meningkatkan daya daing daerah. Arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA diharapkan mampu dicapai dengan indikator dan target capaian yang telah ditentukan sehingga diperlukan komitmen bersama untuk dapat dilaksanakan sehingga memberikan dampak terhadap pembangunan dan kemajuan Kabupaten Nagan Raya. Fokus inovasi pembangunan Kabupaten Nagan Raya diarahkan;

1. Penciptaan Iklim atau lingkungan kondusif bagi pelaku inovasi dengan adanya peraturan penyelenggaraan SIDA di Kabupaten Nagan Raya, basis data yang kuat dan dukungan Infrastruktur;
2. Memperkuat kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA dengan membentuk Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Rekayasa Kabupaten Nagan Raya dan Penyediaan Tenaga Fungsional Peneliti sebagai Sumber Daya Iptek;
3. Memperkuat Interaksi, Koordinasi dan Kerja sama bagi Pemangku kepentingan dengan Membentuk Deks Inovasi Kabupaten Nagan Raya sebagai wahana interaksi, koordinasi dan kerjasama bagi pemangku kepentingan dalam inovasi. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan publik menjadi tolak ukur keberhasilan konsep good governance dalam kerangka memperkuat SIDA dengan membangun kerjasama agar keseimbangan antara tiga pilar, yaitu pemerintahan, dunia usaha/pelaku dan masyarakat yang saling berkesinambungan dalam usaha. Sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik maka harus melibatkan masyarakat pelaku dan dalam pengambilan keputusan dengan ujuannya agar seluruh pihak mampu mengembangkan keterampilan, kreativitas dan inovasi;
4. Meningkatkan difusi hasil-hasil inovasi dan adanya akselerasi difusi teknologi dengan Pemanfaatan kepakaran/Tenaga Ahli untuk inovasi.
5. Membangun dan memperkuat sistem informasi yang handal bagi pengembangan SIDA untuk tujuan publikasi hasil inovasi;
6. Meningkatkan jumlah para pelaku usaha yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif sebagai upaya percepatan peningkatan perekonomian daerah sekaligus dengan memberikan keleluasaan, kepada para pelaku inovasi dalam

mengusulkan ataupun mencoba ideide baru Pembinaan dan bantuan untuk pelaku UMKM dan Mendukung UMKM dalam peningkatan kualitas dan pemasaran produk dengan memperluas kerja sama dengan berbagai pihak;

7. Pembentukan kawasan/ klaster industri dengan membentuk Kawasan/Klaster Industri hasil difusi inovasi dan Terbangunnya lembaga khusus untuk mengembangkan Kawasan/ klaster industry; dan
8. Prioritas Pengembangan Potensi Unggulan Daerah dengan Produksi dan promosi Unggulan Daerah. Fokus arah inovasi pembangunan daerah diharapkan dapat mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Berikut adalah Arah Kebijakan dan Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Nagan Raya:

1. Mendorong penguatan lingkungan yang kondusif bagi SIDA, Peraturan yang mendukung pelaksanaan inovasi membentuk dan menyediakan basis data Infrastruktur yang mendukung inovasi, Peraturan Kabupaten Tentang Penyelenggaraan SIDA Adanya basis data inovasi Tersedianya Infrastruktur prasarana dan sarana yang mendukung Inovasi.
2. Memperkuat regulasi dan sistem insentif yang mendorong pengembangan SIDA; Membentuk Regulasi dan mengalokasikan insentif dalam mendorong Pengembangan SIDA di Kabupaten Nagan Raya, Alokasi anggaran untuk insentif bagi masyarakat dan pelaku usaha yang Inovator.
3. Memperkuat kelembagaan yang mendukung pengembangan SIDA , Perekrutan SDM Peneliti di Bidang penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Nagan Raya, Bimtek Tenaga Fungsional Peneliti sebagai Sumber Daya Iptek Jumlah Tenaga SDM yang memiliki Kemampuan untuk mengembangkan Inovasi Pelaksanaan Bimtek.
4. Memperkuat Interaksi, Koordinasi dan Kerja sama bagi Pemangku kepentingan bagi pemangku kepentingan dalam inovasi, Membentuk Desk Inovasi Kabupaten Nagan Raya sebagai wahana interaksi, koordinasi dan kerja sama antara kebijakan Nasional, provinsi dan Kabupaten sehingga dapat memacu inovasi Inovasi Kabupaten Nagan Raya.
5. Meningkatkan difusi hasil hasil inovasi dan adanya akselerasi difusi teknologi Meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan inovasi dan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk, proses pengolahan produk, kemasan dan sistem pemasaran serta lainnya, Adanya Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan Perguruan Tinggi (PT) dan Pelaku Usaha (PU), Jumlah Rapat Koordinasi & kerjasama kelembagaan Tingkat Nasional dan Provinsi (Aceh), Melakukan Rapat Koordinasi Sinkronisasi antara kebijakan Nasional provinsi dan Kabupaten sehingga dapat memacu inovasi, Jumlah Rapat Koordinasi dan kerjasama kelembagaan Tingkat Nasional dan Provinsi (Aceh), Membangun dan

memperkuat system informasi yang handal bagi pengembangan SIDA; Membangun sistem informasi yang handal bagi pengembangan SIDA, Adanya Publikasi hasil inovasi.

6. Meningkatkan jumlah para pelaku usaha yang semakin meningkat dari sisi kuantitas dan kualitas, yang berbasis pada industri kreatif dan inovatif sebagai upaya percepatan peningkatan perekonomian daerah sekaligus Memberikan keleluasaan, kepada para pelaku inovasi dalam mengusulkan ataupun mencoba ide-ide baru.

2.7.2.5 Kawasan Industri Terpadu

Kawasan Industri Terpadu (KIT) adalah konsep pengembangan kawasan industri yang menyediakan fasilitas dan infrastruktur yang lengkap dan terpadu untuk mendukung berbagai kegiatan industri. Di dalam KIT, berbagai jenis industri dapat berkumpul dalam satu lokasi untuk memanfaatkan berbagai keuntungan yang ditawarkan, seperti efisiensi dalam penggunaan sumber daya, aksesibilitas terhadap pasokan bahan baku, fasilitas pengolahan limbah, dan dukungan infrastruktur lainnya. Sejumlah elemen pendukung dari KIT meliputi hal-hal sebagai berikut :

- Fasilitas dan Infrastruktur Terpadu: KIT biasanya dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung berbagai kegiatan industri, seperti jalan raya, jaringan listrik, saluran air bersih, sistem pengelolaan limbah, dan fasilitas komunikasi.
- Zonasi: Biasanya, KIT memiliki zonasi yang jelas untuk berbagai jenis industri agar memfasilitasi koordinasi dan pengelolaan yang efisien.
- Keamanan: KIT sering kali dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, termasuk pemantauan keamanan, sistem pemadam kebakaran, dan fasilitas penegakan hukum yang memadai.
- Lingkungan Ramah Industri: Pembangunan KIT biasanya memperhatikan aspek lingkungan dengan mengintegrasikan teknologi dan praktik yang ramah lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan efisiensi energi.
- Kolaborasi dan Kemitraan: KIT memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan di dalamnya, memungkinkan pertukaran ide, sumber daya, dan pengembangan bersama.
- Promosi Pertumbuhan Ekonomi: KIT bertujuan untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi regional dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan investasi, dan meningkatkan daya saing industri.
- Regulasi yang Ketat: KIT umumnya tunduk pada regulasi yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap standar lingkungan, kesehatan, dan keselamatan.

Pengembangan KIT dapat menjadi strategi yang efektif dalam mempercepat pertumbuhan industri, meningkatkan efisiensi, dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Namun, perencanaan yang matang dan manajemen yang baik diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti pengelolaan lingkungan, keamanan, dan keberlanjutan.

Kawasan Industri Terpadu di Kabupaten Nagan Raya direncanakan di Kecamatan Kuala Pesisir dengan sebutan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi, Kabupaten Nagan Raya. Saat ini rencana pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi telah menyelesaikan tahapan penyusunan Master Plan dan Studi Kelayakan. Untuk kelanjutan rencana pengembangan KIT Padang Turi ditempuh strategi dan prioritas sebagai berikut :

1. Penyusunan Dokumen Kajian Dampak Lingkungan dan Dampak Lalu Lintas (AMDAL, AMDALALIN)
2. Pengorganisasian, Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan membuat regulasi yang komprehensif dan terintegrasi untuk pengembangan kawasan industri terpadu (Regulasi lahan) yang ditetapkan untuk pengembangan Kawasan Industri sehingga standar-standar yang sudah diterapkan untuk kegiatan usaha pada kawasan industri ini bisa berjalan dengan baik
3. Koordinasi dengan kementerian Perindustrian dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk membentuk BUMD Pengelolaan Kawasan KIT dan menjalin Kerjasama dengan Investor
4. Meningkatkan kualitas dan pelayanan penanaman modal melalui promosi penanaman modal sosialisasi perizinan dan fasilitasi penanaman modal
5. Mengembangkan hilirisasi komoditas unggulan dan sektor strategis berdasarkan prinsip halal dan hijau melalui Peningkatan Produksi Komoditas Unggulan secara berkelanjutan
6. Membangun Infrastruktur terintegrasi dan lingkungan yang berkelanjutan Pendukung Investasi sbb :
 - Pembangunan air bersih.
 - Peningkatan / Pelebaran Jalan ke Lokasi kawasan Peternakan Padang Turi (KIT).
 - Pembangunan Jalan Khusus dari KIT ke lokasi Pelabuhan.
 - Pembangunan jembatan.
 - Pembangunan Irigasi.
 - Pembangunan Drainase
 - Pengembangan Bandar Udara Cut Nyak Dhien.
 - Pelabuhan Multifungsi
7. Pengembangan Kawasan Peruntukan Investasi sbb :
 - Pembangunan Refinery CPO dan PKO untuk mewujudkan Hilirisasi produk kelapa sawit yang merupakan kualitas unggulan di Kabupaten Nagan Raya

- Pembangunan Industri Peternakan Terpadu
- Pembangunan Industri Minyak Goreng
- Pembangunan Industri Margarin
- Pembangunan Industri Pakan Ternak
- Pembangunan Industri sabun dan Shampo
- Pembangunan Industrin Susu dan Daging
- Pembangunan industri lainnya

8. Pengelolaan Kawasan Industri Terpadu (KIT) melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan operasional yang efisien dan berkelanjutan. Beberapa entitas yang dapat terlibat dalam pengelolaan KIT Padang Turi sbb:

- **Pememrintah Daerah:** Pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengelolaan KIT. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas perencanaan, pengaturan zonasi, perizinan, dan pengawasan umum terhadap kegiatan di dalam KIT.
- **Badan Pengembangan Wilayah:** Dalam beberapa kasus, badan pengembangan wilayah atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola pengembangan ekonomi dan infrastruktur dapat bertanggung jawab atas pengelolaan KIT.
- **Pengembang Swasta:** Pengembang swasta sering terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan KIT, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan pengelolaan fasilitas. Mereka dapat mengelola zona industri secara langsung atau bekerja sama dengan otoritas pemerintah setempat.
- **Asosiasi Industri:** Asosiasi industri lokal atau regional juga dapat berperan dalam pengelolaan KIT dengan mengkoordinasikan kegiatan industri, memberikan dukungan teknis, dan mempromosikan pertumbuhan industri di dalam KIT.
- **Lembaga Pengelola Khusus:** Di beberapa negara, lembaga pengelola khusus seperti badan pengelola kawasan industri (BPKI) atau lembaga sejenisnya dibentuk untuk mengelola operasional harian, pemasaran, dan fasilitas di dalam KIT.
- **Perusahaan dan industri :** yang beroperasi di dalam KIT juga memiliki peran dalam pengelolaan, terutama dalam mematuhi peraturan, menjaga lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan kolaboratif di dalam kawasan.

Kolaborasi antara pihak-pihak tersebut penting untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan industri, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan menjaga keberlanjutan KIT secara keseluruhan.



2.8. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan integrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Hasil KLHS menjadi dasar bagi perumusan kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Pelaksanaan KLHS wajib dilaksanakan oleh pemerintah dalam penyusunan atau evaluasi dokumen perencanaan, salah satunya adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah mengamanahkan bahwa KLHS sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJPD, di dalamnya memuat substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

2.8.1. Daya Dukung

2.8.1.1. Daya Dukung Sumber Daya Air

Kapasitas daya dukung sumber daya air merujuk pada kemampuan lingkungan atau suatu wilayah untuk memenuhi kebutuhan air bagi populasi di dalamnya, termasuk penduduk dan kegiatan pertanian, dengan mempertimbangkan ketersediaan air yang ada. Daya dukung sumber daya air di wilayah tertentu dapat diukur dengan membandingkan kebutuhan air dengan ketersediaan air yang tersedia, atau sebagai kemampuan maksimum wilayah tersebut dalam menyediakan air bagi penduduk dan kegiatan tertentu. Jika daya dukung suatu wilayah telah melebihi batasnya, maka penduduk dan kegiatan pembangunan tidak akan dapat memperoleh pasokan air yang mencukupi, yang dapat mengakibatkan krisis air atau defisit air.

Sebagai suatu daerah dataran rendah hingga sedang, daya dukung jasa penyediaan air bersih di Kabupaten Nagan Raya dinilai mencukupi. Namun, ketersediaan air bersih ini perlu dijaga agar *sustainable* dengan cara melestarikan sumber-sumber air yang ada; antara lain menjaga kelestarian hutan di daerah hulu dan daerah resapan air, dan daerah tampungan air seperti rawa dan gambung sebagai buffer cadangan air yang tersimpan pada lahan gambut.

Dari Tabel 2.137 terlihat bahwa ekoregion pegunungan lipatan memiliki daya dukung yang terbesar namun kategori sedang terhadap penyediaan air



bersih. Sebaliknya, daya dukung yang sangat rendah dominan terjadi hampir disemua ekoregion. Ekoregion dengan daya dukung sedang mendominasi dan terjadi di pegunungan lipatan, dengan luas lahannya 122.780,85 ha. Hal ini mudah dipahami karena dengan gravitasi bumi, air mengalir mencari dataran rendah, seperti dataran alluvial dan lahan gambut. Ekoregion lainnya yang berpotensi sebagai penyedia air bersih adalah dataran alluvial.

Tabel 2.139
Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Ekoregion, 2019

Nama Ekoregion	Kelas DDDTLH					Total
	1.Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Dataran Aluvial	10.324,47	68.182,34	40.036,42		30.133,23	148.676,48
Dataran Fluviomarin	38,36	0,13				38,49
Lahan Gambut (Peat Land)	11.770,50	34.595,68	351,99		2.395,23	49.113,42
Pegunungan Lipatan		5.951,56	122.780,85	2.820,46	20.262,99	151.815,87
Perbukitan Lipatan		2.541,58	1.159,44		654,78	4.355,82
Perbukitan Patahan		118,34	138,92		145,39	402,66
Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2019

Tabel 2.140
Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya menurut Tutupan Lahan, 2019

Penutupan Lahan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sedang	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Hutan Lahan Tinggi	2.990,80	1.751,88				4.742,69
Hutan Tanaman	11.306,71 3	8.316,55	121.430,34			141.053,62
Lahan Diusahakan		47.666,36			50.500,59	98.166,95
Lahan Terbuka		136,84	177,59			314,44
Permukiman		7.067,38	515,52		1.788,66	9.371,57
Pertambangan		64,82			1.302,38	1.367,20
Pertanian Lahan Kering		42.765,21	42.344,18	2.820,46		87.929,86
Tambak		412,57				412,57
Tubuh Air	7.835,82	3.207,99				11.043,81
Grand Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2019

Berdasarkan tutupan lahan/liputan lahan, tutupan lahan hutan tanaman dan lahan diusahakan menyediakan daya dukung yang sangat tinggi dan tinggi terhadap penyediaan air bersih. Daya dukung sangat rendah terjadi di lahan yang diusahakan dan pemukiman seperti yang terlihat pada Tabel 2.136. Daya dukung kategori sedang terjadi di tutupan lahan diusahakan, sedangkan daya dukung rendah tidak ditemukan dalam ekoregion di Kabupaten Nagan Raya. Ke depan perlu adanya upaya peningkatan pengelolaan sumber daya hutan (primer dan sekunder) yang lebih baik agar menjamin penyediaan air bersih di masa yang akan datang. Peran dan kapasitas lembaga adat seperti *pawang uteun* perlu ditingkatkan dan juga pengawasan serta penertiban kasus *illegal logging* dan sistem pertanian yang baik perlu dipertahankan, karena secara umum dominasi adalah ditutupan lahan yang diusahakan.

Tabel 2.141
Daya Dukung Jasa Penyediaan Air Bersih Kabupaten Nagan Raya
menurut Kecamatan, 2019

Kecamatan	Kelas DDDTLH					Total
	1. Sangat Tinggi	2. Tinggi	3. Sengah	4. Rendah	5. Sangat Rendah	
Beutong	518,74	3.644,09	81.152,68	3,05	16.412,86	101.731,43
Beutong Ateuh Banggalang		2.473,55	29.394,12	2.811,81	5.912,44	40.591,94
Darul Makmur	15.238,24	53.734,04	26.161,04	5,60	12.498,47	107.637,40
Kuala	680,38	6.014,23	1.237,06		874,06	8.805,75
Kuala Pesisir	623,03	4.597,30	741,93		1.650,29	7.612,56
Seunagan	494,12	2.100,92	1.751,41		1.326,82	5.673,28
Seunagan Timur	385,03	5.054,61	8.652,55		11.068,82	25.161,02
Suka Makmue	395,17	2.137,38	2.128,38		495,36	5.156,31
Tadu Raya	2.232,23	19.222,02	13.197,63		3.350,47	38.002,36
Tripa Makmur	1.566,37	12.411,46	50,82		1,99	14.030,65
Total	22.133,34	111.389,65	164.467,65	2.820,46	53.591,64	354.402,76

Sumber : Bappeda Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2019

Dari tabel daya dukung berdasarkan kecamatan (Tabel 2.139) terlihat bahwa sebagian besar kecamatan di Kabupaten Nagan Raya memiliki daya dukung sedang, tinggi, sangat rendah, sangat tinggi dan rendah secara beurutan dari sisi luar secara total untuk semua kategori ekoregion terhadap jasa penyediaan air bersih. Hanya beberapa kecamatan saja yang memiliki daya dukung rendah seperti beutong Atueh dan Darul makmur serta Beutong.

2.8.1.2. Daya dukung Penduduk Optimum

Penduduk optimum memiliki makna penduduk yang mampu didukung berdasarkan kondisi alami dan jasa lingkungan hidup pengatur air, penyedia air, penyedia pangan, pendukung kehati secara mandiri. Jumlah penduduk optimal dihitung dari data tutupan lahan yang telah dioptimalkan menggunakan standar ruang untuk mendukung kebutuhan dasar manusia. Data itu kemudian

dikonversi menjadi kebutuhan ruang per penduduk sehingga menghasilkan jumlah penduduk optimal. Luas lahan optimal dihitung dari pengoptimalan luas lahan eksisting dengan standar kebutuhan ruang sehingga menjadi luas lahan optimal.

Jumlah penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2022 sebanyak 173.213 jiwa, Wilayah yang terbanyak jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Darul Makmur yakni sebanyak 51.336 jiwa, dan yang terkecil jumlah penduduknya terdapat di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang yakni 2.039 jiwa. Penggunaan Lahan Eksisting Kabupaten Nagan Raya seluas 352.759,61 Ha sebesar 6,25 % dari luas Provinsi Aceh berdasarkan data dalam KLHS Kabupaten Nagan Raya. Jika Luas Lahan Eksisting yang dimiliki Kabupaten Nagan Raya dibandingkan jumlah penduduk maka setiap jiwa menampung 49,102 persen dari total lahan.

2.8.1.3. Daya dukung Penutupan Lahan Optimum

Penggunaan lahan merupakan kenampakan biofisik di permukaan bumi yang dipengaruhi oleh aktivitas manusia, sedangkan tutupan lahan merupakan kenampakan eksisting biofisik tutupan lahan di permukaan bumi. Kondisi penggunaan dan tutupan lahan tersebut sering digunakan sebagai indikator pengelolaan sekaligus sebagai dasar dalam penyusunan rencana pengelolaan yang berbasis lahan. Kelas penggunaan lahan di Kabupaten Nagan Raya terdiri atas tubuh air, hutan, perkebunan, pertanian, sawah, semak belukar, dan lahan terbuka. Berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2035, luas Kawasan lindung sebesar 276.047,01 Ha (54,74%), Kawasan budidaya sebesar 176.063,17 Ha (34,91%) dan Kawasan Laut sebesar 52.207,92 Ha (10,35%).

2.8.2. Perubahan Iklim

Kabupaten Nagan Raya terletak didaerah khatulistiwa, dimana sinar matahari hampir selalu penuh, sehingga wilayah ini termasuk dalam iklim tropis (panas). Kabupaten Nagan Raya merupakan daerah yang beriklim tropis, tergolong ke dalam tipe iklim A dan B menurut Schimidt Ferguson. Tipe Iklim A Luas 223,837.69 (Ha) atau dengan Persentase 63.09%, Tipe Iklim B Luas 130,938.21 (Ha) atau dengan Persentase 36.91%. Pembagian zona iklim ini mencerminkan kondisi dan frekuensi curah hujan yang terjadi di wilayah tersebut. Kriteria zona iklim menurut Schmidt-Ferguson digolongkan dalam 9 zona, mulai dari tipe A hingga H, dengan dasar perhitungan nilai Q. Nilai Q adalah perhitungan jumlah bulan basah dan jumlah bulan kering yang diperoleh di wilayah studi per tahunnya. Persyaratan minimal untuk menentukan tipe iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson adalah adanya data curah hujan yang terekam dalam 13 (tiga belas tahun) secara berturut-turut. Jumlah curah hujan bulanan pada tahun 2022 berkisar 141,5 – 420,4 mm, dengan tingkat curah hujan



tertinggi terjadi pada bulan Juni yang mencapai 420,4 mm, tingkat curah hujan terendah terjadi pada bulan April mencapai 141,5 mm. Kabupaten Nagan Raya memiliki suhu rata-rata , dimana pada bulan april dan bulan mei merupakan bulan terpanas dengan suhu mencapai 27,5 oC, dan bulan oktober adalah bulan dengan suhu terendah yaitu 26,2 oC. Ratarata Keadaan kelembaban udara terbasah di Kabupaten Nagan Raya 91,4 % pada bulan November dan terkering 87,4 % terjadi pada bulan februari.

2.8.3. Sumber Daya Hutan dan Keanekaragaman Hayati

Pengembangan kawasan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya bertujuan untuk menjaga kualitas daya dukung Kabupaten Nagan Raya. Adapun kawasan budidaya diperuntukkan untuk: pemukiman, pertanian tanaman pangan, tanaman tahunan/perkebunan, peternakan, perikanan dan pariwisata, pengembangan hutan rakyat, industri, lahan basah, lahan kering dan transmigrasi. Luas areal kawasan Hutan lindung dan budidaya di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini;

Tabel 2.142
Luas Kawasan Hutan Lindung dan Budidaya
Kabupaten Nagan Raya

No	Uraian	Luas Areal Kawasan Lindung (Ha)
Kawasan Hutan Lindung		
1	Kawasan Hutan Lindung	126.108,96
Kawasan Yang Memberi PerlindunganKawasan Bawahnya		
1	Kawasan Rawa gambut	11.380,71
Kawasan Perlindungan Setempat		
1	Kawasan Spamdan Pantai	497,45
2	Kawasan Spamdan Sungai	8.961,28
3	Kawasan sekitar Danau	156,71
Kawasan Hutan Produksi		
1	Hutan Produksi	16.348.253
2	Hutan Produksi Terbatas	6.637.598
3	Hutan Produksi Koversi	4.658,14
Kawasan Rawan Bencana Alam		
1	Kawasan Rawan Longsor	6.523,94
2	Kawasan Rawan Pasang dan Abrasi	15.702,08
3	Kawasan Rawan Kebakaran	1.363,60
4	Kawasan Rawan Banjir	92.352,28
Kawasan Pertanian		
1	Kawasan Lahan Basah	12.777,64
2	Kawasan Lahan Kering	64.520,71
Kawasan Perkebunan		
1	Perkebunan Besar	54.417,29
2	Perkebunan Rakyat	2.064,40
Kawasan Peternakan		
1	Peternakan Besar	113,33

Sumber: DLH Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025

BAB III **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

Saat ini Kabupaten Nagan Raya yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun sejak dimekarkan dari Kabupaten Aceh Barat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam usia yang relatif masih muda dibanding dengan kabupaten lainnya di Aceh, Pembangunan di Kabupaten Nagan Raya telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Namun demikian masih terdapat sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang harus mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam upaya mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Permasalahan kesejahteraan masyarakat yang masih dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya antara lain masih tingginya Angka Kemiskinan, pada Tahun 2021 Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 18,23% dan pada Tahun 2024 menurun menjadi 16,94%. Secara umum Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya sejak 2006 sampai dengan 2013 mengalami penurunan rata-rata sebesar 1,93%, sedangkan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2024 turunnya lebih lambat lagi yakni rata-rata 0,39%. Penurunan angka kemiskinan yang melambat mengindikasikan kinerja penanggulangan kemiskinan yang belum optimal sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.

Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Nagan Raya dalam kurun waktu Tahun 2007 – 2022 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2011 sampai dengan 2013 tingkat pengangguran terbuka berada di atas 7%, naik secara signifikan dari 3,94 % pada tahun 2010. Dan pada tahun 2014 turun secara signifikan menjadi 3,69%. Kembali naik secara perlahan pada tahun 2015 sampai 2017 menjadi 4,11%. Pada Tahun 2024 tingkat pengangguran terbuka Nagan Raya berada pada 5,22% yang mengindikasikan bahwa masih banyak tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja (menganggur). Di sisi lain, Kabupaten Nagan Raya mendapat anugerah yang sangat besar dengan Sumber Daya Alam yang cukup melimpah seperti sektor pertanian, perikanan dan pertambangan, namun anugerah kekayaan alam ini belum berkontribusi secara optimal untuk menurunkan Angka Kemiskinan dan Pengangguran. Kontribusi sektor pertanian (termasuk perkebunan, peternakan dan perikanan) Tahun 2017-2024 mencapai angka 45-50%, namun demikian kontribusi sektor industri pengolahan pada kurun waktu yang sama relatif masih rendah hanya berkisar 6-7%. Hal ini menunjukkan bahwa potensi Sumber Daya Alam yang cukup besar belum diikuti dengan proses pengolahan yang dapat memberikan nilai tambah dengan terserapnya tenaga kerja serta meningkatnya pendapatan masyarakat.

3.1 Permasalahan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai dimasa yang akan datang dengan kondisi ril saat perencanaan ini dibuat. Adapun yang menjadi permasalahan pembangunan Kabupaten Nagan Raya adalah sbb :

3.1.1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah

1. Masih rendahnya IPM berdasarkan data IPM Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 tercatat sebesar 73,10 dan menempati posisi yang relatif rendah dalam capaian IPM dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh seperti Aceh Barat dengan nilai IPM sebesar 72,34, Aceh Jaya dengan nilai IPM sebesar 70,36. Capaian IPM Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 masih lebih rendah dari rata-rata IPM Aceh sebesar 75,36 dan IPM Nasional 75,02.
2. Masih rendahnya Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, dimana pada Tahun 2024 tercatat sebesar 14,18 tahun, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,18 tahun atau hanya setara dengan Diploma II. Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya juga lebih rendah dari Angka Harapan Lama Sekolah Aceh sebesar 14,39 tahun, walaupun lebih tinggi dari Angka Harapan Lama Sekolah Nasional sebesar 13,21 tahun.
3. Masih rendahnya Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, pada Tahun 2024 tercatat sebesar 9,25 tahun. Angka ini lebih rendah dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah Aceh yang mencapai Aceh sebesar 9,64 tahun, walaupun sedikit lebih tinggi dari Angka Rata-Rata Lama Sekolah Nasional sebesar 9,22 tahun.
4. Masih rendahnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, pada Tahun 2024 tercatat sebesar 52,02 lebih rendah dari IPLM Aceh sebesar 66,23.
5. Masih tingginya Angka Kematian Bayi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), rata-rata Angka Kematian Bayi mencapai 13,08. Angka Kematian Bayi tertinggi terjadi pada Tahun 2021 yang mencapai 19,01 dan merupakan Angka Kematian Bayi tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
6. Masih tingginya Angka Kematian Neonatal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2020-2024), rata-rata Angka Kematian Neonatal mencapai 14,88. Angka Kematian Neonatal tertinggi terjadi pada Tahun 2023 yang mencapai 18,57 dan merupakan Angka Kematian Neonatal tertinggi dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir.
7. Masih tingginya Angka Kematian Ibu, pada Tahun 2020 mencapai 106,08 dan telah menurun pada Tahun 2024 mencapai 77,34.
8. Masih tingginya Prevalensi Stunting, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 Prevalensi Stunting Kabupaten Nagan Raya sebesar 32.5 persen dan pada Tahun 2023 sebesar 31.6 persen. Angka ini lebih tinggi dari Prevalensi Stunting Aceh pada Tahun 2023 sebesar 29.4 persen dan Prevalensi Stunting Nasional pada Tahun 2023 sebesar 21.5 persen.

9. Masih rendahnya jumlah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilaporkan, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir hanya tercatat rata-rata 4 kasus KDRT yang dilaporkan.
10. Masih rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Tahun 2024 yaitu 45,23 jauh lebih rendah dari IPG Aceh 61,78 dan IPG Nasional 77,62.
11. Rendahnya tingkat pendidikan penduduk usia kerja dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk usia kerja Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 masih didominasi oleh tamatan SMA umum yaitu sebanyak 50.654 orang, tamatan SD yaitu sebanyak 37.171 orang dan tamatan SMP yaitu sebanyak 30.190 orang serta rendahnya kontribusi penduduk usia kerja tamatan SMK/ pendidikan vokasional tahun 2024 hanya sejumlah 880 orang.
12. Masih tingginya beban ketergantungan penduduk yang dilihat dari beban ketergantungan penduduk Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024 yaitu sebesar 48,27 persen, yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif harus menanggung 48,27 orang penduduk usia tidak produktif. Besarnya jumlah penduduk usia tidak produktif (terutama anak-anak) di Kabupaten Nagan Raya menyebabkan beban ketergantungan yang harus ditanggung menjadi cukup besar pula.

3.1.2. Produktivitas, Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi yang Belum Optimal

1. Masih tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dilihat dari TPT Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif selama 2014-2024. Pada Tahun 2014 TPT Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 3,69 persen dan kembali meningkat menjadi 5,22 persen di Tahun 2024 dan angka ini lebih baik dari TPT Aceh yaitu sebesar 5,75 persen namun lebih tinggi dari TPT Nasional sebesar 5,97 persen pada tahun yang sama.
2. Rendahnya pertumbuhan ekonomi berdasarkan data pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nagan Raya Pada tahun 2024 yaitu sebesar 4,38 yang berada di bawah pertumbuhan ekonomi Aceh yang tumbuh sebesar 4,66 persen dan juga di bawah pertumbuhan ekonomi Nasional sebesar 5,0 persen.
3. Rendahnya pendapatan perkapita berdasarkan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 sebesar Rp.45,89 juta lebih rendah dari Pendapatan Perkapita Aceh sebesar Rp.98,2 juta dan PDB Perkapita Nasional sebesar Rp. 78,62 juta pada tahun yang sama.
4. Masih tingginya inflasi di Kabupaten Nagan Raya berdasarkan data pada tahun 2024, Inflasi Kabupaten Nagan Raya tercatat sebesar 3,29 lebih tinggi dari Inflasi Aceh sebesar 2,17 dan Inflasi Nasional sebesar 1,57.
5. Masih rendahnya jumlah koperasi yang dibina, dimana pada Tahun 2024 hanya terdapat 63 koperasi yang dibina (27,27 persen) dari total 231 koperasi.
6. Rendahnya produktivitas padi disebabkan karena luas areal panen menurun, pada Tahun 2020 luas areal panen mencapai 19,685 Ha menurun menjadi 10,731 Ha pada Tahun 2024, sementara itu luas areal

tanam pada Tahun 2020 sebesar 27,569 Ha menurun menjadi 11,751 Ha pada Tahun 2024.

7. Masih rendahnya pembinaan terhadap petani, pada Tahun 2024 tercatat sebesar hanya sebesar 82.4 persen. Belum adanya koperasi tani yang seharusnya menjadi wadah bagi petani khususnya petani padi untuk mendukung peningkatan produksi pertaniannya.
8. Masih rendahnya produksi perikanan tangkap disebabkan dari masih rendahnya capaian produksi perikanan tangkap di Kabupaten Nagan Raya, pada Tahun 2021 capaian produksi ikan hanya sebesar 50,5 persen dari target 4.032 ton dan pada Tahun 2024 meningkat sebesar 100,78 persen dari target 4,316.79 ton.
9. Usaha perikanan belum terkelola dengan baik, profesional dan berorientasi bisnis.
10. Masih rendahnya produksi perikanan budidaya disebabkan oleh sistem pengelolaan yang dilakukan masih secara tradisional.
11. Masih kurangnya sarana dan prasarana di lokasi transmigrasi seperti jalan/jembatan, sarana air bersih, sarana olah raga.
12. Rendahnya pendapatan masyarakat ditandai dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga masih berfokus pada pemenuhan kebutuhan pokok, belum mengarah pada pengeluaran untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia.

3.1.3. Permasalahan Implementasi Syariat Islam dan Kearifan Budaya

1. Penerapan Syariat Islam belum optimal, hal ini dapat dilihat dari masih sering terjadinya pelanggaran Syariat Islam, dimana pada periode Tahun 2018 sd Tahun 2024 terjadi sebanyak 21 kasus khalwat dan 70 kasus maisir serta pelaksanaan shalat secara berjamaah di Masjid belum sepenuhnya terlihat, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Shalat Fardhu secara berjamaah masih tergolong rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk, serta tidak semua mesjid melaksanakan shalat fardhu secara berjamaah.
2. Masih rendahnya standarisasi dayah, dari total 38 dayah yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya, hanya 3 dayah dengan tipe B, 6 Dayah Tipe C dan 1 dayah tipe D, selebihnya sebanyak 28 dayah merupakan dayah Non Tipe.
3. Belum optimalnya pengelolaan Zakat Infaq Sadaqah (ZIS) dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat dimana ZIS masih bersifat konsumtif yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup fakir/miskin yang mungkin hanya cukup untuk beberapa hari saja, belum ada program untuk mini kitchen produktivitas ekonomi fakir/miskin.
4. Generasi muda semakin terpengaruh budaya modern dan asing sehingga minat terhadap seni dan tradisi lokal menurun dan regenerasi pelaku seni terhambat. Keterbatasan sarana, prasarana, serta dukungan anggaran juga menjadi kendala dalam pengembangan kesenian daerah. Selain itu, potensi pariwisata berbasis budaya belum berkembang karena infrastruktur kurang memadai, promosi terbatas, dan rendahnya keterlibatan masyarakat, sehingga kearifan budaya lokal di Nagan Raya

berisiko semakin tergerus oleh arus modernisasi dan memerlukan strategi pelestarian yang lebih kuat serta terarah.

3.1.4 Angka Kemiskinan yang Masih Tinggi

1. Masih tingginya angka kemiskinan berdasarkan data pada tahun 2020 sekitar 17,70 persen. Namun sayang nya akibat pandemi covid-19 pada tahun 2021 persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya kembali mengalami peningkatan hingga mencapai 18,23 persen sebelum akhirnya mengalami penurunan kembali menjadi 16,94 persen pada tahun 2024 jauh lebih tinggi dari Angka Kemiskinan Aceh sebesar 14,23 persen dan juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9 persen pada periode yang sama.
2. Masih tingginya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan jumlah tertinggi PMKS Tahun 2024 yaitu Penyandang Disabilitas 1.818 orang, korban bencana alam 311 orang, anak dengan kecacatan 342 orang dan anak yatim, piatu, yatim piatu 2.170 orang.

3.1.5 Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

1. Masih rendahnya tingkat kemandirian desa yang ditandai dengan rendahnya status IDM maju dan mandiri dimana pada Tahun 2024 hanya terdapat 66 desa dengan status maju dan 17 desa dengan status mandiri.
2. Masih rendahnya PAD dan penerimaan pendapatan lainnya serta tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat (akibat rendahnya PAD) serta berkurangnya dana OTSUS dan berakhirnya Dana OTSUS pada Tahun 2028.
3. Masih rendahnya Indeks Reformasi Birokrasi yang merupakan salah satu Indikator pendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih disamping Opini Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Lakip/ Sakip, Nilai LPPD, Tingkat Kapabilitas Akuntabilitas Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), Indeks Pelayanan Publik, dan indeks Profesionalitas ASN. Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nagan Raya pada periode 2017-2022 sebesar 42.33/C, lebih rendah dari Indeks Reformasi birokrasi Aceh Tahun 2022 yang mencapai 64,09/B.
4. Kabupaten Nagan Raya termasuk salah satu daerah belum inovatif yang ditandai belum terintegrasinya pelaksanaan riset dan inovasi dengan perencanaan pembangunan daerah. Masih rendahnya capaian tingkat Inovasi daerah, berdasarkan hasil penilaian Inovasi Daerah Tahun 2024, Capaian Inovasi daerah masih dikategorikan Inovatif belum mencapai status Sangat Inovatif serta belum adanya penerapan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) termasuk pelaksanaan fasilitasi perangkat daerah dalam penerapan inovasi.
5. Masih terbatasnya hasil riset dan inovasi daerah yang dapat diimplementasikan dalam perencanaan pembangunan.

3.1.6 Pengelolaan Lingkungan Belum Optimal serta Rendahnya Ketahanan Kebencanaan

1. Kabupaten Nagan Raya masih termasuk wilayah yang rawan bencana. Sejumlah bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2013 - 2024 antara lain abrasi pantai dan gelombang pasang di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Darul Makmur, tanah longsor di Kecamatan Beutong dan Beutong Ateuh Banggalang, banjir luapan di Kecamatan Tripa Makmur, serta banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, termasuk benca gempa dan tsunami.
2. Masih sering terjadinya Kasus Pencemaran Air dari Limbah Perusahaan, dimana dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir mencapai 17 kasus.

3.1.7 Masih Rendahnya Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah

1. Masih rendahnya proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap, dimana pada Tahun 2024 Proporsi Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap sebesar 56,60 persen dimana jauh lebih rendah dari Proporsi Panjang Jalan Provinsi Aceh Dalam Kondisi Mantap sebesar 95,94 persen dan Proporsi Panjang Jalan Nasional Dalam Kondisi Mantap sebesar 95,22 persen.
2. Belum optimalnya penerapan RTRW yang dilihat dari masih adanya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang yang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya.
3. Masih rendahnya capaian Akses Air Minum Layak, pada Tahun 2024 capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya sebesar 82 persen lebih rendah dari capaian Akses Air Minum Layak Aceh 90,08 persen, juga lebih rendah dari capaian Akses Air Minum Layak Nasional 92,64 persen.
4. Masih rendahnya capaian Akses Sanitasi Layak, pada Tahun 2024 capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Nagan Raya sebesar 82 persen, lebih rendah dari capaian Akses Sanitasi Layak Aceh 81,10 persen, juga lebih rendah dari capaian Akses Sanitasi Layak Nasional 83,60 persen.
5. Masih rendahnya capaian Penyelesaian Kasus Tanah Negara, Tahun 2024 baru mencapai 63 persen serta tingginya potensi permasalahan Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya (kehilangan aset, konflik tanah, dll), diindikasikan dari banyaknya Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang belum bersertifikat sampai Tahun 2021 (200 persil). Masih tingginya potensi konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemegang Hak Guna Usaha, Pemerintah dengan masyarakat, Pemerintah dengan TNI/Polri dan juga antara masyarakat dengan TNI/Polri serta konflik antar masyarakat dengan Masyarakat.

6. Belum tersedianya sarana Pelabuhan laut yang memungkinkan terjadinya aktivitas perpindahan orang dan barang melalui jalur laut. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Masyarakat.
7. Pemerataan pembangunan Kabupaten Nagan Raya masih harus ditingkatkan. Kondisi hari ini pembangunan sarana dan prasarana masih berpusat pada wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah yang menjadi pusat perekonomian, sedangkan pada wilayah pinggiran dan desa terluar pembangunan masih relatif kurang.

4.1 Isu-Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu dan tantangan pembangunan nasional ke depan meliputi:

- Produktivitas rendah
- IPTEKIN dan Riset Lemah
- Deindustrial Dini
- Pariwisata dibawah Potensi
- Ekonomi Laut Belum Optimal
- Kontribusi Koperasi dan UMKM rendah
- Infrastruktur dan literasi rendah
- Pembangunan belum berkelanjutan
- Integrasi domestik terbatas
- Kualitas SDM masih rendah
- Tata kelola pemerintahan belum optimal
- Kepastian dan penegakan hukum masih lemah
- Demokratisasi belum optimal
- Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

Terdapat 11 (sebelas) isu strategis dalam upaya transformasi tata kelola, yaitu:

- Regulasi
- Kelembagaan yang efektif
- Proses bisnis yang adaptif
- Manajemen talenta
- Meritokrasi dan integritas
- Manajemen ASN Strategis
- Pelayanan publik yang berkualitas
- Pelayanan bidang strategis
- Digitalisasi
- Integritas partai politik, dan
- Relasi pemerintah dan masyarakat sipil.

Selanjutnya terdapat 18 (delapan belas) Isu Strategis Pembangunan Aceh yaitu sebagai berikut:

- Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penanggulangan Stunting
- Pemerataan Pendidikan, Perkuatan Pendidikan Vokasi dan Meningkatkan Minat Baca Masyarakat
- Penanggulangan Kemiskinan
- Peningkatan Pendapatan Perkapita dan Memaksimalkan dan Menstabilkan Pertumbuhan Ekonomi Aceh
- Optimalisasi Riset dan Inovasi Serta Teknologi Digital
- Membuka Lapangan Kerja dan Meningkatkan Produktivitas Masyarakat
- Memperkuat Industri Pengolahan dan Eksport
- Mengembangkan Produktivitas Pangan dan Ekonomi Hijau
- Memperkuat Perkotaan dan Pedesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi
- Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Berkesinambungan
- Memperkuat Otonomi Khusus
- Kemandirian Ruang Fiskal
- Memperkuat Syariat Islam dan Budaya Aceh
- Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Disabilitas, Memperkuat Gender dan Keluarga
- Pengelolaan Sumberdaya Mineral dan Batu bara serta Migas yang berwawasan lingkungan dan meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan
- Pengurangan Risiko Bencana
- Memperkuat Pembangunan Kewilayahan
- Memperkuat Sarana dan Prasarana Infrastruktur yang berkualitas

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Nagan Raya, dan dengan memperhatikan isu-isu strategis di Aceh dan Nasional, maka disusun isu-isu strategis Kabupaten Nagan Raya untuk 20 (dua puluh) tahun yang akan datang (2025-2045) sebagai berikut :

1. Penguatan Syariat Islam

Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya harus mendapat perhatian yang lebih besar saat ini dan dimasa yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh masih ditemuinya sejumlah kasus pelanggaran syariat Islam, dalam kurun waktu Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 masih terjadi sebanyak 21 kasus khalwat dan 70 orang yang terlibat kasus maisir, sedangkan untuk kasus khamar tidak tercatat. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus lebih meningkatkan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah terjadinya kasus serupa pada masa yang akan datang. Demikian juga dengan standarisasi pendidikan dayah yang masih rendah, dari total 38 dayah yang terdapat di Kabupaten Nagan Raya, hanya 3 dayah dengan tipe B, 6 Dayah Tipe C dan 1 dayah tipe D, selebihnya sebanyak 28 dayah merupakan dayah Non Tipe. Di samping itu sejumlah dayah juga belum

memiliki kemandirian baik secara manajemen, tata kelola, infrastruktur, maupun ekonomi.

Bentuk upaya penegakan syariat islam di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pengawasan dan Penegakan Hukum Syariat
 - a. Meningkatkan efektivitas WH (Wilayatul Hisbah) dalam melakukan patroli rutin dan penyelidikan terhadap potensi pelanggaran syariat.
 - b. Meningkatkan koordinasi antara WH, kepolisian, dan tokoh agama dalam proses penegakan hukum.
 - c. Membangun pos pengaduan masyarakat yang mudah diakses untuk melaporkan pelanggaran syariat.
- 2) Melakukan Edukasi dan Sosialisasi Syariat Islam secara Masif
 - a. Melaksanakan sosialisasi melalui media lokal, sekolah, dan masjid tentang pentingnya menjalankan syariat.
 - b. Mengadakan sosialisasi untuk pemuda, pelajar, dan pasangan muda guna menanamkan nilai-nilai Islam sejak dini.
- 3) Revitalisasi Peran Ulama dan Tokoh Adat
 - a. Mendorong kolaborasi antara ulama, tengku dayah, dan aparat pemerintahan dalam pembinaan masyarakat.
 - b. Mengaktifkan kembali forum-forum dakwah dan majelis taklim sebagai wadah pembinaan akhlak masyarakat.
- 4) Peningkatan Anggaran dan Fasilitas WH
 - a. Menambah jumlah personel dan memperkuat sarana prasarana Wilayatul Hisbah.
 - b. Memberikan pelatihan etika, pendekatan humanis, dan pemahaman hukum kepada aparat penegak syariat.

Bentuk upaya penguatan dan standarisasi pendidikan dayah di Kabupaten Nagan Raya adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan Standarisasi dan Akreditasi Dayah
 - a. Menyusun kriteria penilaian yang jelas untuk klasifikasi tipe dayah.
 - b. Mendorong seluruh dayah untuk mengikuti proses penilaian agar bisa ditingkatkan dari non-tipe ke tipe resmi (B, C, D).
 - c. Menyusun sistem monitoring dan evaluasi berkala untuk memantau perkembangan status akreditasi dan implementasi standar mutu.

- 2) Peningkatan Kapasitas Manajemen Dayah
 - a. Menyelenggarakan pelatihan tata kelola kelembagaan bagi pimpinan dan pengurus dayah.
 - b. Meningkatkan kualitas dan mutu tenaga didik.
- 3) Pemberdayaan Ekonomi Dayah
 - a. Menyediakan bantuan modal dan pelatihan kewirausahaan agar dayah dapat memiliki unit usaha mandiri (misalnya pertanian, peternakan, koperasi santri).
 - b. Menjalinkan kemitraan dengan pihak swasta dan BUMD dalam hal pembinaan ekonomi dayah.
- 4) Peningkatan Infrastruktur dan Sarana Prasarana
 - a. Mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan ruang belajar, asrama, dan fasilitas sanitasi di dayah.
 - b. Mengintegrasikan program bantuan pemerintah pusat dan provinsi untuk pembangunan fasilitas pendidikan keagamaan.
- 5) Penguatan Kurikulum dan Kualitas Pendidikan
 - a. Penyesuaian kurikulum dayah sesuai tuntutan zaman dengan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman.
 - b. Memberikan pelatihan bagi para guru dayah dalam metode mengajar modern dan pemanfaatan teknologi pendidikan.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas Sumber Daya Manusia salah satunya dapat diukur dengan indikator bidang kesehatan yaitu angka harapan hidup. Dalam kurun waktu tahun 2024 angka harapan hidup penduduk Kabupaten Nagan Raya berkisar antara 72,67 Tahun 2024. Tetapi angka tersebut masih berada di bawah angka harapan hidup Provinsi Aceh dan Nasional yang pada tahun 2024 masing-masing 73,2 dan 74,2. Oleh karenanya diperlukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang lebih baik serta perubahan perilaku masyarakat menuju masyarakat yang sehat dan berumur panjang. Indikator lainnya terkait dengan kualitas sumber daya manusia yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS), pada kurun waktu tahun 2024 sebesar 14,18 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2024 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,18 tahun atau setara dengan Diploma II. Untuk meningkatkan Angka Harapan Lama Sekolah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya harus menempuh kebijakan-kebijakan antara lain pemerataan kuantitas tenaga pendidik, beasiswa kurang mampu, peningkatan infrastruktur pendidikan dan peningkatan akses pendidikan secara lebih luas dan merata. Selanjutnya Kualitas Sumber Daya Manusia juga dapat ditentukan dengan indikator angka Rata-Rata Lama Sekolah. Angka

Rata-Rata Lama Sekolah di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2024 di yaitu sebesar 9,25 tahun, nilai ini lebih rendah jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah Provinsi Aceh yang telah mencapai angka sebesar 9,64 tahun, tetapi sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata lama sekolah secara Nasional, yakni 9,22 tahun.

Berikut upaya untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Nagan Raya

- 1) Bidang Kesehatan: Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH).
Meskipun AHH Kabupaten Nagan Raya (69,45 tahun) lebih baik dari beberapa kabupaten tetangga, angkanya masih di bawah provinsi dan nasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya sebagai berikut:
 - a. Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan
 - Mendirikan dan memperkuat fasilitas layanan kesehatan di pelosok desa.
 - Penambahan tenaga medis dan paramedis secara merata.
 - Meningkatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta lansia.
 - Melakukan skrining TBC secara masif di fasilitas kesehatan, sekolah, pesantren, lapas, dan komunitas berisiko tinggi
 - b. Perbaikan Gizi dan Pola Hidup
 - Edukasi masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang dan aktivitas fisik.
 - Program intervensi stunting dan gizi buruk sejak usia dini.
 - c. Promosi dan Edukasi Kesehatan
 - Sosialisasi hidup bersih dan sehat (PHBS).
 - Penyuluhan bahaya penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi dan diabetes.
 - Sosialisasi tentang gejala TBC, cara penularan, dan pentingnya menyelesaikan pengobatan.
 - Sosialisasi pentingnya deteksi dini penyakit.
- 2) Bidang Pendidikan: Meningkatkan Harapan dan Rata-Rata Lama Sekolah (HLS & RLS).
HLS Nagan Raya (14,18 tahun) setara Diploma II, dan RLS (9,25 tahun). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan HLS dan RLS di Kabupaten Nagan Raya, meliputi:
 - a. Pemerataan dan Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik
 - Penempatan guru secara merata di daerah terpencil.
 - Pelatihan berkelanjutan bagi guru agar kompetensinya meningkat.
 - Insentif bagi guru yang bertugas di daerah tertinggal.

b. Beasiswa dan Bantuan Pendidikan

- Program beasiswa untuk siswa kurang mampu dan berprestasi.
- Subsidi seragam, buku, dan biaya transportasi bagi pelajar dari keluarga miskin.

c. Peningkatan dan Pemerataan Infrastruktur Pendidikan

- Pembangunan sekolah baru dan rehabilitasi sekolah rusak.
- Penyediaan sarana belajar yang layak seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet.

d. Perluasan Akses Pendidikan

- Program pendidikan kesetaraan (PAUD, Paket A/B/C) bagi anak putus sekolah dan dewasa.
- Pemanfaatan sistem pendidikan jarak jauh (online) untuk menjangkau daerah terpencil.

3. Pengurangan Angka Pengangguran dan Perluasan Lapangan Kerja

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya berfluktuatif selama 2014 - 2024. Kendati demikian, adanya kemajuan dalam penurunan angka pengangguran di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2014, yaitu 3,69 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2024 yaitu 5,22 persen Hal ini disebabkan pada tahun tersebut masih rendah terbukanya lapangan kerja sehingga angka pengangguran meninggi di tahun 2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada kurun waktu 2014 - 2024 terus mengalami peningkatan, pada tahun 2024 angka TPT mencapai 5,84 persen hal ini disebabkan lapangan kerja sesuai dengan distribusi PDRB yang berpengaruh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkurang dan sangat berpengaruh pada angka pengangguran, lapangan kerja sektor pertanian dengan adanya teknologi sangat mempengaruhi tenaga kerja dan pengangguran. Lapangan usaha Sektor konstruksi sangat berkurang dan hampir semua lapangan usaha sektor distribusi persentase PDRB berkurang pada tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mempunyai target akan menurunkan angka pengangguran dari 5,22 % pada Tahun 2024 menjadi 3.78 % pada Tahun 2025, Pemerintah diharapkan menciptakan lapangan kerja melalui Percepatan Pembangunan Refinery CPO dan PKO pada Tahun 2025-2029, pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) padang Turi, serta menjalin kerja sama dengan pihak swasta, perekrutan tenaga kerja lokal sehingga tingkat pengangguran di Kabupaten Nagan Raya akan menurun. Selain hal tersebut sektor industri kecil dan kerajinan rumah tangga juga perlu dikembangkan untuk mendukung pembangunan sektor industri tersebut yang akan memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, meningkatkan produktivitas, serta dapat memanfaatkan sumber daya alam secara terencana sehingga akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dan memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah.

Berikut adalah upaya untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan perluasan lapangan kerja:

- 1) Pengembangan Sektor Industri Strategis
 - a. Pembangunan Refinery CPO dan PKO (2025–2029):
 - Meningkatkan nilai tambah produk kelapa sawit.
 - Menyerap tenaga kerja lokal dalam proses produksi dan distribusi.
 - b. Pengembangan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi:
 - Menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru.
 - Mendorong investasi industri padat karya untuk menciptakan banyak lapangan kerja.
- 2) Optimalisasi Sektor UMKM dan Industri Rumah Tangga
 - a. Pengembangan industri kecil dan kerajinan rumah tangga:
 - Menciptakan lapangan kerja berbasis lokal dan keterampilan tradisional.
 - Meningkatkan ekonomi rumah tangga dan mendorong kewirausahaan.
 - Memanfaatkan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan.
 - b. Pemberian pelatihan dan pendampingan usaha mikro.
 - c. Akses permodalan dan pemasaran untuk produk-produk lokal.
- 3) Revitalisasi Sektor Pertanian dan Perikanan
 - a. Modernisasi alat dan teknik pertanian untuk menyeimbangkan antara efisiensi dan serapan tenaga kerja.
 - b. Diversifikasi usaha tani seperti pertanian terpadu (padi-ternak-ikan) untuk membuka peluang kerja baru.
 - c. Pengembangan perikanan tangkap dan budidaya berbasis komunitas.
- 4) Penyesuaian dan Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja
 - a. Pelatihan vokasi dan keterampilan kerja berbasis pasar kerja:
 - Menyasar sektor potensial seperti pertambangan, pengolahan hasil bumi, digital, dan konstruksi.
 - b. Program magang dan kemitraan dengan industri.
 - c. Kurikulum pendidikan yang adaptif terhadap dunia kerja.
- 5) Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Swasta
 - a. Membangun kerja sama strategis dengan investor dan perusahaan untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal.
 - b. Insentif bagi perusahaan yang merekrut tenaga kerja lokal.
- 6) Peningkatan Infrastruktur Penunjang Ekonomi
 - a. Pembangunan dan perbaikan akses jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi ke sentra-sentra produksi.

- b. Fasilitas penunjang industri seperti pusat pelatihan kerja, pasar induk, dan gudang logistik.
- 7) Kebijakan dan Regulasi Pro-Ketenagakerjaan
 - a. Penyusunan regulasi daerah yang mendukung penciptaan usaha dan ketenagakerjaan.
 - b. Penyederhanaan perizinan untuk pelaku usaha kecil dan investor industri tenaga kerja padat.

4. Penanggulangan Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2014 mencapai 20,85% (31,9 ribu jiwa) dan mengalami penurunan pada tahun 2024 mencapai 16,94 % (29,6 ribu jiwa). Tingkat kemiskinan Kabupaten Nagan Raya lebih tinggi dari Angka Kemiskinan Aceh sebesar 14,23 juga jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Angka Kemiskinan Nasional sebesar 9,0 persen pada periode yang sama.

Berikut adalah uraian upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya:

- 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan
 - a. Program beasiswa untuk keluarga miskin, dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi.
 - b. Pelatihan keterampilan dan vokasional bagi anak putus sekolah dan masyarakat usia produktif.
 - c. Pembangunan sekolah terpadu dan layanan pendidikan inklusif di daerah terpencil.
- 2) Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Dasar
 - 1) Perluasan layanan BPJS Kesehatan bagi warga miskin.
 - 2) Program Puskesmas Keliling dan Posyandu aktif di setiap desa.
 - 3) Penanganan gizi buruk dan stunting, yang berkontribusi pada lingkaran kemiskinan antar generasi.
- 3) Penguatan Program Perlindungan Sosial
 - a. Distribusi bantuan langsung tunai (BLT) dan bantuan pangan secara tepat sasaran.
 - b. Pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk menargetkan program secara lebih akurat.
 - c. Peningkatan koordinasi dengan Kemensos dan BUMN untuk program seperti PKH, BPNT, dan program padat karya.
- 4) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
 - a. Dukungan terhadap UMKM dan ekonomi kreatif berbasis desa.
 - b. Pelatihan wirausaha dan akses permodalan melalui kerja sama dengan perbankan dan koperasi.
 - c. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk mengelola potensi ekonomi lokal.

- 5) Perluasan Lapangan Kerja dan Pembangunan Ekonomi Lokal
 - a. Pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi untuk menyerap tenaga kerja lokal.
 - b. Pemberdayaan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan yang menjadi tulang punggung masyarakat miskin.
 - c. Mendorong program padat karya infrastruktur desa untuk menyerap tenaga kerja tak terampil.
- 6) Peningkatan Infrastruktur Dasar
 - a. Pembangunan jalan desa, jembatan, dan irigasi untuk mendukung aktivitas ekonomi warga.
 - b. Akses air bersih dan sanitasi untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.
 - c. Listrik dan internet desa sebagai penunjang ekonomi dan pendidikan.
- 7) Kebijakan Anggaran Pro Rakyat Miskin
 - a. Alokasi anggaran yang berpihak kepada sektor pro-poor (pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial).
 - b. Monitoring dan evaluasi program pengentasan kemiskinan secara berkala untuk efektivitas kebijakan.

5. Peningkatan Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2024 sebesar Rp.45,89 juta lebih rendah dari Pendapatan Perkapita Aceh sebesar Rp.98,2 juta dan PDB Perkapita Nasional sebesar Rp. 78,62 juta pada tahun yang sama. Selanjutnya, kondisi ril masih ditemukan kesenjangan yang cukup tinggi antara penduduk yang berpendapatan tinggi dengan penduduk yang berpendapatan rendah.

Berikut upaya meningkatkan pendapatan perkapita di Kabupaten Nagan Raya:

- 1) Penguatan Sektor Unggulan Ekonomi Daerah
 - a. Optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal, dengan memberikan akses teknologi, bibit unggul, serta alat pertanian modern.
 - b. Pengembangan industri kelapa sawit dan batu bara agar memberikan nilai tambah lebih besar bagi masyarakat sekitar, termasuk dalam bentuk program CSR dan serapan tenaga kerja lokal.
 - c. Diversifikasi ekonomi daerah, terutama melalui pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, dan sektor jasa berbasis potensi lokal.
- 2) Peningkatan Produktivitas dan Keterampilan SDM
 - a. Pelatihan keterampilan berbasis kebutuhan pasar kerja, termasuk digital skill, manufaktur, dan kewirausahaan.

- b. Fasilitasi pelatihan kerja sama dengan BLK, perguruan tinggi, dan dunia usaha.
- c. Penguatan lembaga pendidikan vokasional untuk menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

3. Peningkatan Investasi dan Pengembangan Kawasan Industri

- a. Mendorong investasi sektor swasta melalui kemudahan perizinan dan pemberian insentif daerah.
- b. Percepatan pembangunan Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan peningkatan pendapatan masyarakat.
- c. Pengembangan UMKM berbasis lokal dan fasilitasi akses ke pembiayaan, pasar, serta digitalisasi usaha.

4. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Melalui Inovasi Desa

- a. Pengembangan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) untuk mengelola potensi ekonomi desa secara kolektif.
- b. Program dana desa berbasis produktivitas seperti usaha tani terpadu, kerajinan, dan pengolahan hasil pertanian.
- c. Pemanfaatan teknologi digital desa untuk mendukung pemasaran hasil produksi lokal.

5. Pengurangan Kesenjangan Ekonomi

- a. Distribusi program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran agar masyarakat miskin memiliki daya beli dan daya produktif.
- b. Peningkatan akses layanan dasar (pendidikan, kesehatan, air bersih, dan listrik) di wilayah tertinggal untuk mendorong pemerataan pembangunan.
- c. Kebijakan fiskal yang berpihak pada masyarakat berpendapatan rendah, termasuk subsidi, pajak progresif, dan dukungan permodalan mikro.

6. Peningkatan Kinerja BUMD dan PAD

- a. Revitalisasi BUMD yang bergerak di sektor strategis agar memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan membuka peluang kerja lokal.
- b. Transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah untuk memastikan anggaran pembangunan berdampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.

6. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal, Transparan, dan Akuntabel

Penyelenggara pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih serta bebas dari korupsi dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak maupun harta benda masyarakat. Tata pemerintahan yang baik dan

pemerintah yang bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Tahun 2017 Nilai Kapabilitas APIP Kabupaten Nagan Raya masih berada pada level 1. Kemudian Pada Tahun 2018-2022 Level Kapabilitas APIP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berada pada level 2 sehingga masih perlu ditingkatkan antara lain membuat Sistem pengendalian intern seluruh SKPK yang saat ini sedang berjalan dan sudah ada SK Tim untuk Sistem Pengendalian intern seluruh SKPK termasuk membuat Register Risiko seluruh SKPK di lingkup Pemerintah Kabupaten Nagan Raya. Untuk nilai LPPD Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Indeks reformasi birokrasi pada periode 2017-2022 sebesar 42.33/C dan diharapkan pada akhir tahun 2025 dapat mencapai target 67/B. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus fokus dalam peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik guna memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih optimal. Pelaksanaan peningkatan tersebut dapat diwujudkan dengan membangun profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dengan meningkatkan moral, kejujuran, dan ketulusan dalam bekerja. Selain itu, meningkatkan pelayanan publik atau pelayanan umum yang bersifat responsif/aktif, penguatan penyelenggaraan pemerintahan dalam melaksanakan praktik *good and clean governance* mencakup penguatan gerakan anti korupsi, transparansi, penyelenggaraan pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), penguatan audit internal, dan partisipasi masyarakat madani dalam membangun rasa memiliki dan bertanggung jawab.

Berikut adalah upaya untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang optimal, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Nagan Raya:

- 1) Penguatan Sistem Pengawasan Internal:
 - a. Meningkatkan level kapabilitas APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah), dari level 1 di tahun 2017 menjadi level 3 selama periode 2025 - 2029.
 - b. Mendorong seluruh SKPK untuk membentuk dan menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), termasuk penetapan SK Tim dan penyusunan register risiko untuk masing-masing SKPK.
- 2) Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi:
 - a. Target peningkatan indeks reformasi birokrasi dari 42,33 (kategori C) menjadi 67 (kategori B) pada tahun 2025.
 - b. Mendorong profesionalisme, kompetensi, dan integritas aparatur pemerintah daerah.
 - c. Menumbuhkan budaya kerja yang dilandasi moralitas, kejujuran, dan ketulusan dalam pelayanan publik.

- 3) Transparansi dan Akuntabilitas Pelayanan Publik:
 - a. Menyediakan pelayanan publik yang responsif dan proaktif terhadap kebutuhan masyarakat.
 - b. Memperkuat praktik good governance dan clean government, termasuk transparansi anggaran dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan publik.
- 4) Gerakan Anti-Korupsi dan Efisiensi Pemerintahan:
 - a. Penguatan gerakan anti-korupsi di seluruh tingkatan pemerintahan.
 - b. Mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna).
 - c. Penguatan audit internal dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang bersih dan bertanggung jawab.
- 5) Pelibatan Masyarakat:
 - a. Meningkatkan partisipasi masyarakat sipil (masyarakat madani) dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kebijakan publik.
 - b. Membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

7. Pengelolaan Lingkungan hidup dan Ketahanan Kebencanaan yang Berkelanjutan

Pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya masih perlu mendapat perhatian. Sejumlah isu penting pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Nagan Raya yaitu pencemaran lingkungan yang masih terjadi, dalam kurun waktu Tahun 2018 -2021 terjadi kasus Pencemaran Air dari Limbah Perusahaan sebanyak 19 kasus. Pencemaran air ini dapat berpotensi menimbulkan dampak yang luas bagi lingkungan terutama lingkungan sungai dan area yang memanfaatkan air sungai. Demikian juga dengan penanganan dan pengelolaan sampah yang tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah saja, namun peran swasta dan masyarakat harus dilibatkan, melalui peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Adapun timbunan sampah yang ditangani di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 19,56 persen dan terus meningkat menjadi 26,37 persen pada tahun 2021. Kegiatan lainnya yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan hidup yaitu pengelolaan sumber daya alam yang tidak sesuai prosedur seperti penambangan emas tanpa izin yang masih terjadi di beberapa wilayah dalam Kabupaten Nagan Raya. Wilayah Kabupaten Nagan Raya juga merupakan wilayah yang sering terjadinya bencana seperti banjir dan tanah longsor. Sejumlah bencana yang terjadi dalam kurun waktu 2013 -2022 antara lain abrasi pantai dan gelombang pasang di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur, kebakaran hutan dan lahan yang disebabkan oleh faktor alam maupun faktor manusia di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya dan Darul Makmur, tanah longsor

di Kecamatan Beutong dan Beutong Ateuh Banggalang, banjir luapan di Kecamatan Tripa Makmur, serta banjir bandang di Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang, termasuk benca gempa dan tsunami.

Berikut upaya yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan kebencanaan yang berkelanjutan :

- 1) Penanganan Pencemaran Lingkungan
 - a. Penguatan pengawasan terhadap limbah industri untuk memastikan perusahaan tidak mencemari air sungai.
 - b. Penerapan sanksi tegas terhadap pelaku pencemaran lingkungan, termasuk pencabutan izin usaha bila terbukti melanggar berulang kali.
 - c. Pengembangan sistem pengelolaan limbah cair dan padat yang terintegrasi dan ramah lingkungan di kawasan industri.
- 2) Pengelolaan Sampah Secara Partisipatif
 - a. Peningkatan edukasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola dan memilah sampah rumah tangga.
 - b. Kolaborasi dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah melalui skema kemitraan publik-swasta (Public-Private Partnership).
 - c. Penyediaan infrastruktur pengelolaan sampah modern seperti TPS3R dan bank sampah di setiap kecamatan.
- 3) Penertiban Penambangan Tanpa Izin (PETI)
 - a. Operasi terpadu bersama aparat penegak hukum untuk menutup tambang emas ilegal.
 - b. Alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat penambang melalui pelatihan dan program padat karya.
 - c. Rehabilitasi lahan bekas tambang agar tidak menjadi sumber pencemaran dan longsor.
- 4) Mitigasi dan Adaptasi Bencana
 - a. Pemetaan daerah rawan bencana (banjir, longsor, kebakaran, tsunami) secara berkala dan berbasis data.
 - b. Pembangunan infrastruktur tahan bencana, seperti tanggul, kanal banjir, dan zona evakuasi tsunami.
 - c. Penguatan sistem peringatan dini (early warning system) dan pelatihan simulasi kebencanaan di tingkat desa/kelurahan.
- 5) Penguatan Kelembagaan dan Regulasi
 - a. Penguatan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam manajemen risiko dan penanggulangan bencana.
 - b. Penyusunan regulasi daerah terkait pengelolaan lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim secara partisipatif.

- c. Peningkatan kapasitas aparaturnya dan masyarakat dalam mitigasi dan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

8. **Peningkatan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah**

Secara keseluruhan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sampai Tahun 2024 meliputi pemantapan sarana dan prasarana publik seperti jalan, jembatan, perumahan dan permukiman, serta tersedianya air bersih dan sanitasi telah cukup baik namun belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Proporsi panjang jalan kabupaten dalam kondisi mantap pada Tahun 2024 hanya sebesar 56,60 persen, jauh di bawah kondisi kemantapan jalan Aceh sebesar 95,94 persen dan Nasional sebesar 95,22 persen. Penataan Ruang juga belum optimal, masih ditemuinya kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan arahan pola ruang yang menyebabkan menurunnya tingkat kesesuaian pelaksanaan struktur dan pola ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Nagan Raya. Capaian Akses Air Minum Layak juga masih rendah pada Tahun 2024 capaian Akses Air Minum Layak Kabupaten Nagan Raya sebesar 82 persen. Demikian juga dengan capaian Akses Sanitasi Layak, pada Tahun 2024 capaian Akses Sanitasi Layak Kabupaten Nagan Raya sebesar hanya 82 persen. Belum tersedianya sarana Pelabuhan laut yang memungkinkan terjadinya aktivitas perpindahan orang dan barang melalui jalur laut. Masih terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan darat yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Pemerataan pembangunan Kabupaten Nagan Raya masih harus ditingkatkan. Kondisi hari ini pembangunan sarana dan prasarana masih berpusat pada wilayah perkotaan dan wilayah-wilayah yang menjadi pusat perekonomian, sedangkan pada wilayah pinggiran dan desa terluar pembangunan masih relatif kurang. Pada beberapa wilayah tertentu kebutuhan jembatan yang menghubungkan wilayah yang dipisah oleh sungai juga masih kurang, sehingga akses transportasi masih dilakukan dengan menggunakan rakit atau jembatan gantung.

Untuk transportasi udara, keberadaan Bandara Cut Nyak Dhien di Kabupaten Nagan Raya menjadi wakil bagi Kawasan barat selatan dalam memberikan pelayanan akses transportasi udara dengan Panjang landasan pacu yang dimiliki sepanjang 1.800 meter. Sesuai dengan kondisi geografis lokasi bandara sangat sesuai karena berada pada posisi membentang sepanjang pinggir pantai Kecamatan Kuala Pesisir. Kemudian bandara juga berada pada posisi strategis yang diapit oleh beberapa kabupaten antara lain: Aceh Jaya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Tengah, Simeulue dan Gayo Lues. Dalam rangka pengembangan Bandara Cut Nyak Dhien Nagan Raya menjadi Bandara Embarkasi Haji dan Umrah wilayah pantai Barat Selatan Aceh di masa yang akan datang, maka perlu mendapatkan pertimbangan dalam rencana pembangunan jangka Panjang (RPJP) tentang perpanjangan lanjutan seluas 150m x 800m posisi pada ujung R/W 33 dari 1.800 meter menjadi 2.600 meter agar bisa didarati jenis Boing 737 Series.

Berikut Upaya Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas Kabupaten Nagan Raya:

- 1) Peningkatan Kualitas Jalan Kabupaten
 - a. Meningkatkan proporsi jalan dalam kondisi mantap melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan di wilayah perkotaan maupun pedesaan.
 - b. Fokus pada peningkatan jalan menuju pusat produksi, pertanian, dan sentra ekonomi masyarakat.
- 2) Pembangunan dan Perbaikan Jembatan
 - a. Membangun jembatan penghubung antarwilayah yang masih menggunakan rakit atau jembatan gantung.
 - b. Prioritas di wilayah yang terpisah oleh sungai dengan akses terbatas.
- 3) Penyediaan Akses Air Bersih dan Sanitasi
 - a. Meningkatkan cakupan layanan air minum layak dan sanitasi layak terutama di pedesaan.
 - b. Mendorong pembangunan dan rehabilitasi instalasi pengolahan air bersih dan MCK komunal.
- 4) Pengembangan Transportasi Laut
 - a. Merencanakan pembangunan pelabuhan laut untuk mendukung mobilitas orang dan barang melalui jalur laut yang saat ini belum tersedia.
- 5) Pengembangan Transportasi Udara
 - a. Pengembangan Bandara Cut Nyak Dhien:
 - b. Perpanjangan landasan pacu dari 1.800 meter menjadi 2.600 meter agar dapat melayani pesawat berbadan besar seperti Boeing 737.
 - c. Menjadikan bandara ini sebagai bandara embarkasi haji dan umrah untuk kawasan Pantai Barat Selatan Aceh.
- 6) Pemerataan Pembangunan Infrastruktur
 - a. Mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan desa-desa terluar.
 - b. Mendorong pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran dan pelosok.
- 7) Optimalisasi Penataan Ruang
 - a. Menegakkan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) agar pembangunan sesuai dengan arahan struktur dan pola ruang.
 - b. Penertiban pembangunan liar yang tidak sesuai zonasi tata ruang.

BAB IV
VISI DAN MISI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2025-2045

4.1 Visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

Berdasarkan kondisi umum Kabupaten Nagan Raya saat ini dan selaras dengan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Visi Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2025-2045, ditetapkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yaitu:

“NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU, DAN BERKELANJUTAN”

Islami dimaknai sebagai kondisi kehidupan masyarakat dan aparatur di Kabupaten Nagan Raya yang religius dengan menjalankan ajaran Syariat Islam secara kafah baik dari segi Aqidah, Syariah maupun Akhlak yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan termasuk penerapan pendidikan Islami, Implementasi nilai-nilai Islam serta muamalah. Penerapan Syariat Islam di Kabupaten Nagan Raya bermaksud untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup.

Maju dimaknai sebagai kondisi masyarakat Kabupaten Nagan Raya cerdas, sehat dan sejahtera dari aspek perekonomian, memiliki keunggulan dalam berbagai sektor, mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi serta mampu bersaing pada tingkat nasional dan internasional dalam segala bidang. Kabupaten Nagan Raya yang maju juga ditandai dengan tingkat pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur yang tinggi sehingga memiliki tingkat perekonomian yang kuat dan berkembang, dengan tingkat produksi yang tinggi dan keragaman industri yang luas, tingkat pengangguran cenderung rendah, dan pendapatan per kapita penduduknya relatif tinggi. Selanjutnya juga memiliki Infrastruktur yang baik seperti jalan raya, jalur kereta api, pelabuhan, bandara, sistem telekomunikasi yang canggih, serta akses yang luas terhadap energi, air bersih, dan teknologi informasi. Kabupaten Nagan Raya yang maju juga ditandai dengan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, stabilitas politik dan keamanan yang tinggi, memiliki Inovasi dan Pengembangan Teknologi dengan mendorong penelitian dan pengembangan di berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri kreatif yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih tinggi seperti memiliki fasilitas rekreasi, lingkungan yang bersih, dan akses yang luas terhadap layanan sosial dan budaya.

Berkelanjutan dimaknai sebagai kondisi pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang terus berkembang dengan menjaga keseimbangan pengelolaan Sumber Daya Alam, Kelestarian Lingkungan Hidup untuk kebutuhan generasi saat ini serta jaminan sumber daya untuk kehidupan yang sehat dan sejahtera bagi generasi yang akan datang. Berkelanjutan dari sisi ekonomi dimaknai untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang stabil, inklusif dan berkeadilan. Ini berarti mengembangkan sistem ekonomi yang tidak hanya memperhatikan pertumbuhan pendapatan dan kekayaan, tetapi juga memperhitungkan distribusi yang adil, penggunaan sumber daya alam yang bijaksana, dan penciptaan lapangan kerja yang layak. Berkelanjutan dari sisi sosial bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup

masyarakat yang mencakup upaya untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan layanan dasar lainnya bagi semua orang, mengurangi ketimpangan sosial, perlindungan hak asasi manusia, dan mempromosikan inklusi sosial. Berkelanjutan dari sisi sosial bertujuan untuk melestarikan dan melindungi lingkungan alam, serta mengelola sumber daya alam secara bijaksana yang mencakup upaya untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi udara dan air, deforestasi, kerusakan habitat, serta perubahan iklim. Pembangunan berkelanjutan juga mengadvokasi praktik-praktik yang mendukung penggunaan energi terbarukan, daur ulang, dan pertanian yang berkelanjutan.

4.2. Misi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045

Untuk mewujudkan visi pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045, ditetapkan 8 misi sebagai berikut:

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Cerdas, Sehat, dan Sejahtera** melalui Pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang cerdas, sehat, serta sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas dan merata, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
2. **Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi** melalui Penguatan perekonomian daerah, peningkatan investasi, digitalisasi sektor perekonomian, peningkatan kualitas pengelolaan UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian serta peningkatan sistem inovasi daerah dalam berbagai sektor pelayanan publik.
3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional** dengan pelaksanaan Tata kelola pemerintahan yang regulatif, pelaksanaan prinsip-prinsip Transparansi, Partisipasi, akuntabilitas, Peningkatan kredibilitas, pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik yang responsif, keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien
4. **Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Damai dan Demokratis** melalui Penerapan Syariat Islam secara Kaffah, penguatan stabilitas dan kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, dan penguatan dukungan perdamaian Aceh serta peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
5. **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan** dengan memperkuat Ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya, tangguh terhadap bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup berkualitas dan

berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal, peningkatan regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mitigasi terhadap bencana.

- 6. **Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan** dengan peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.
- 7. **Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan Melalui** pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- 8. **Mewujudkan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan** yang berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan Rencana Pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, kondisi alam, dan perubahan mendasar lainnya yang timbul, memastikan kestinambungan dan keberlanjutan pembangunan dengan kolaborasi dan kerja sama semua pemangku kepentingan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional untuk mewujudkan Nagan Raya Unggul.

4.3. **Penyelarasan Visi dan Misi Nagan Raya, Aceh dan Nasional**

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045 yang merupakan Visi Indonesia Emas Tahun 2045 yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan**, sedangkan Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045 yaitu Aceh **Islami, Maju, dan Berkelanjutan**.

Visi, misi dan arah kebijakan kabupaten harus mengacu pada visi misi yang tertuang pada RPJP Aceh Tahun 2025-2045. Penyelarasan visi pembangunan Nasional, pembangunan Aceh, dan pembangunan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Perbandingan Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya

Visi RPJP Nasional Tahun 2025-2045	Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045	Visi RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan	Aceh Islami, Maju, dan Berkelanjutan	Nagan Raya Islami, Maju, dan Berkelanjutan

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi Kabupaten Nagan Raya adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
 - a. PDRB per kapita (Rp Juta) dari 45,89 -45,95 (2025) menjadi 125,5-126,5 (2045)
 - b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI) dari 44,5 (2025) menjadi 125,5 (2045)
 - c. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%) dari 4,69 (2025) menjadi 7,5 (2045)
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
 - a. Tingkat Kemiskinan (%) dari 16,55 – 16,65 (2025) menjadi 8,73-8,83 (2045)
 - b. Rasio Gini dari 0,157 – 0,154 (2025) menjadi 0,145- 0,142 (2045)
 - c. Kontribusi PDRB Kabupaten (%) dari 1,05 (2025) menjadi 1,15 (2045)
3. Penguatan Syariat Islam
 - a. Indeks Pembangunan Syariat dari 83,89 (2025) menjadi 89 (2045)
 - b. Persentase dayah yang mandiri dari 12 (2025) menjadi 75 (2045)
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - a. Indeks Pembangunan Manusia dari 73,10 (2025) menjadi 80,2 (2045)
5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission
 - a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari 79,56 (2025) menjadi 81,1 (2045)

Visi RPJP Aceh Tahun 2025-2045 yaitu **Aceh Islami, Maju, dan Berkelanjutan**. Sedangkan misi RPJP Aceh Tahun 2025-2045 terdiri dari 8 misi, sebagai berikut:

1. Mewujudkan Transformasi sosial
2. Mewujudkan transformasi ekonomi
3. Mewujudkan transformasi tata kelola
4. Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi subtansial, stabilitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam
5. Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis
6. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan
7. Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
8. Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Adapun yang menjadi sasaran utama dari Visi Aceh adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita
 - a. PDRB per kapita (Rp Juta) dari 44,23-44,41 (2025) menjadi 219,54-258,70 (2045)
 - b. Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI) dari 46,61 (2025) menjadi 129,64 (2045)
 - c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%) dari 5,2-5,3 (2025) menjadi 6,94-7,11 (2045)
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan
 - a. Tingkat Kemiskinan (%) dari 12,00-13,00 (2025) menjadi 0,33-0,83 (2045)

- b. Rasio gini (Indeks) dari 0,290-0,293 (2025) menjadi 0,228-0,251 (2045)
- c. Kontribusi PDRB Provinsi (%) dari 1,08 (2025) menjadi 1,03 (2045)
- 3. Penguatan Tata Kelola, Keamanan , Demokrasi Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam
 - a. Indeks Pelayanan Publik dari 4,41 (2022) menjadi 5,0 (2045)
 - b. Indeks Pembangunan Syariat dari 80,00 - 83,00 (Baseline 2025) menjadi 90,00 - 95,00
 - c. Persentase dayah yang mandiri dari 44,00 (2025) menjadi 95,00 (2045)
- 4. Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat
 - a. Indeks Modal Manusia dari 0,55 (2025) menjadi 0,74 (2045)
- 5. Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju Net Zero Emission
 - a. Penurunan intensitas emisi GRK (%) dari 36,08 (2025) menjadi 91,09 (2045)

Sedangkan Visi Indonesia emas 2045 adalah **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan** dengan sasaran utama:

- 1) Pendapatan per kapita setara negara maju antara
 - GNI Per kapita (US\$) dari 5.500 menjadi 23.00 – 30.300 US Dolar
 - Kontribusi PDB Maritim dari 7,6 menjadi 15,0
 - Kontribusi PDB Manufaktur dari 20,8 menjadi 28,0
- 2) Kemiskinan menuju nol persen dan ketimpangan berkurang
 - Rasio Gini 0,377-0382 menjadi 0,290 - 0,320
 - Kontribusi PDRB KTI (%) dari 20,6 (2022) menjadi 28,5
- 3) Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
 - Global Power Indeks (Peringkat) dari 34 (2023) menjadi 15 besar (2045)
- 4) Daya saing sumber manusia meningkat,
 - Human Capital Index (Indeks) dari 0,54 (2022) menjadi 0,73 (2024)
- 5) Intensitas emisi gas Rumah kaca (GRK) menurun menuju net zero emision
 - Penurunan Intensitas GRK dari 38,6 (Baseline 2025) menjadi 93,5 (2045)

Dengan delapan misi pembangunan dan 17 Arah Pembangunan yaitu:

A. Transformasi Indonesia

1. Transformasi Sosial

- 1) Kesehatan untuk Semua
- 2) Pendidikan Berkualitas dan merata
- 3) Perlindungan Sosial yang adaptif

2. Transformasi Ekonomi

- 4) Iptek, inovasi dan Produktivitas Ekonomi
- 5) Penerapan Ekonomi Hijau
- 6) Transformasi digital
- 7) Integrasi ekonomi domestik dan global
- 8) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

3. Transformasi Tata kelola

- 9) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

B. Landasan Transformasi

4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan kepemimpinan Indonesia
 - 10) Hukum yang berkeadilan, keamanan nasional Tangguh dan demokrasi substansial
 - 11) Stabilitas ekonomi makro
 - 12) Ketangguhan Diplomasi dan pertahanan berdaya gentar dan kawasan
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
 - 13) Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju
 - 14) Keluarga berkualitas, kesadaran gender dan masyarakat inklusi
 - 15) Lingkungan Hidup berkualitas
 - 16) Ketahanan energi, air dan kemandirian pangan
 - 17) Resilien terhadap bencana perubahan iklim
- C. Kerangka Implementasi Transformasi
 6. Pembangunan Kewilayahan yang merata dan berkeadilan
 7. Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan
 8. Kestinambungan pembangunan

Tabel 4.2
Perbandingan Sasaran Visi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya

RPJP Nasional Tahun 2025-2045				RPJPA Tahun 2025-2045			RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045				
Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045
Pendapatan per kapita setara negara maju				Peningkatan Pendapatan per Kapita			Peningkatan Pendapatan per Kapita				
a	GNI Per Kapita (US\$)	5.500	23.000 – 30.300	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	44,23-44,41	219,54-258,70	a	PDRB per kapita (Rp Juta)	45,89 - 45,95	125,5 - 126,5
b	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	46,61	129,64	b	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IEI)	44,5	125,5
c	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28	c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	5,2-5,3	6,94-7,11	c	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,69	7,5
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan			Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan				
a	Tingkat Kemiskinan (%)	6.0 - 7.0	0.5 - 0.8	a	Tingkat Kemiskinan (%)	12,00-13,00	0,33-0,83	a	Tingkat Kemiskinan (%)	16,55 – 16,65	8,73-8,83
b	Rasio Gini (indeks)	0.379 – 0.382	0.377 – 0.320	b	Rasio gini (Indeks)	0,290-0,293	0,228-0,251	b	Rasio gini (Indeks)	0,157 – 0,154	0,145-0,142
c	Kontribusi PDRB KTI (%)	21.5 (2022)	28,5	c	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,08	1,03	c	Kontribusi PDRB Kabupaten (%)	1,05	1,15

RPJP Nasional Tahun 2025-2045			RPJPA Tahun 2025-2045			RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045				
Sasaran Visi	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi		Baseline 2025	Target 2045
Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat			Penguatan Tata Kelola, Kemanan , Demokrasi Stabilitas Ekonomi dan Syariat Islam				Penguatan Syariat Islam			
Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	a	Indeks Pembangunan Syariat	80,00 - 83,00	90,00 - 95,00	a	Indeks Pembangunan Syariat	83,89	89
			b	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95	b	Persentase dayah yang mandiri	12	75
Daya saing sumber daya manusia meningkat			Daya saing sumber daya manusia meningkat				Daya saing sumber daya manusia meningkat			
Indeks Modal Manusia	0.54 (2022)	0,73	Indeks Modal Manusia		0,55	0,74	Indeks Pembangunan Manusia		73,10	80,2
Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>			Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>				Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>			
Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan intensitas emisi GRK (%)		36,08	91,09	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		79,56	81,1

Tabel 4.3
Perbandingan Misi Nasional, Aceh dan Kabupaten Nagan Raya

Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Keterangan	Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025 - 2045	Keterangan
Transformasi Sosial,	Mewujudkan Transformasi sosial	membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul	Mewujudkan Transformasi sosial menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera.	Pembangunan sumber daya manusia berkualitas yang sehat, cerdas serta sejahtera melalui pendidikan yang berkualitas dan merata, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.
Transformasi Ekonomi,	Mewujudkan transformasi ekonomi	menuju masyarakat yang menguasai Iptek, inovatif, dan produktif, ramah lingkungan, memanfaatkan digitalisasi, ekonomi berintegrasi secara domestik dan Global, dengan menjadikan kota dan pendesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.	Mewujudkan transformasi ekonomi Melalui Penguatan Iptek, Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi.	Penguatan perekonomian daerah melalui penguasaan Iptek, peningkatan inovasi, peningkatan investasi, digitalisasi sektor perekonomian, peningkatan kualitas pengelolaan UMKM dan peran serta masyarakat dalam berbagai aktivitas perekonomian.
Transformasi Tata Kelola,	Mewujudkan transformasi tata kelola	untuk tata kelola yang regulatif dan berintegritas, adaptif, profesional dan efisien.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional	Tata kelola pemerintahan yang regulatif, pelaksanaan prinsip-prinsip Transparansi, Partisipasi, akuntabilitas, Peningkatan kredibilitas, pencegahan korupsi, peningkatan kualitas layanan publik yang responsif, keterbukaan informasi dan pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien.
Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia,	Mewujudkan keamanan daerah Tangguh, demokrasi substansial, stabulitas ekonomi dan Implementasi Syariat Islam	memantapkan stabilitas ekonomi, politik, hukum dan keamanan daerah, serta memperkuat implementasi nilai-nilai dan Pendidikan Islami, perkuatan perdamaian Aceh dan otonomi khusus Aceh:	Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Damai dan Demokratis	Penerapan Syariat Islam secara Kaffah, penguatan stabilitas dan kepastian hukum, stabilitas politik dan keamanan, penguatan dukungan perdamaian Aceh, dan peningkatan partisipasi aktif masyarakat sebagai elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Keterangan	Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025 - 2045	Keterangan
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Mewujudkan masyarakat Aceh yang berketahanan sosial budaya dan ekologis	memperkuat Ketangguhan individu, keluarga. komunitas, masyarakat pembangunan karakter, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbang balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya untuk tahan menghadapi berbagai bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam.	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.	Memperkuat Ketangguhan individu, keluarga. komunitas, masyarakat , dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya, tangguh terhadap bencana, perubahan dan guncangan, serta dapat berpartisipasi dalam pembangunan dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam dengan mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal, peningkatan regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mitigasi terhadap bencana
Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkualitas	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	diwujudkan untuk meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonom\ dan tata kelola, yang dilengkapi dengan landasan transformasi supremasi hukum, stabilitas, dan Implementasi Syariat Islam dan perkuatan otonomi khusus Aceh, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Penerjemahan tersebut dilakukan sesuai karakteristik masing-masing kawasan dan Kabupaten/kota dan untuk meningkatkan	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Peningkatan pemerataan dan keadilan pembangunan yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Misi RPJPN 2025 - 2045	Misi RPJPA 2025 - 2045	Keterangan	Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025 - 2045	Keterangan
		konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah		
Sarana dan prasarana berkualitas dan Ramah Lingkungan,	Sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi	Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan, berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang serta mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.
Kesinambungan Pembangunan.	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan yang diwujudkan pada akidah pelaksanaan untuk mengawal menuju aceh yang unggul dengan menyiapkan kaidah pelaksanaan untuk memastikan kolaborasi semua pemangku kepentingan pembangunan, disertai manajemen pembangunan berbasis risiko guna menjaga konsistensi dalam satu masa dan antar periode pemerintahan, terutama dalam menghadapi perubahan-perubahan mendasar yang memerlukan perkuatan implementasi dan pembiayaan pembangunan, disiapkan kaidah pelaksanaan	Mewujudkan Kesinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan	Berorientasi pada peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan Rencana Pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, kondisi alam, dan perubahan mendasar lainnya yang timbul , memastikan kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan dengan kolaborasi dan kerja sama semua pemangku kepentingan baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional untuk mewujudkan Nagan Raya Unggul

BAB V
ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK
KABUPATEN NAGAN RAYA

Selaras dengan RPJP Nasional dan RPJP Aceh, Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 juga menitikberatkan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola berdasarkan permasalahan dan isu strategis daerah. Untuk mewujudkan Nagan Unggul Tahun 2045, maka arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya dibagi dalam empat tahap, yaitu:

5.1. Arah Kebijakan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045

Arah kebijakan pembangunan jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya selama 20 tahun difokuskan kepada (1) penguatan fondasi transformasi (2025-2029), (2) akselerasi transformasi (2030-2034); (3) Peningkatan daya saing (2035-2039); (4) Mewujudkan Nagan Raya Unggul (2040-2045). Uraian masing-masing arah kebijakan tersebut dijabarkan sebagai berikut:

5.1.1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya periode 2025-2029 diarahkan pada Penguatan Fondasi Transformasi. Arah kebijakan ini dilakukan melalui penguatan 5 (lima) fondasi utama, yaitu, (1) Transformasi Sosial (2) Transformasi Ekonomi; (3) Transformasi Tata Kelola; (4) Kehidupan Masyarakat yang Islami; (5) Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan, serta 3 (tiga) Kerangka Implementasi Transformasi yaitu (6) Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan; (7) infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dan (8) Kesenambungan dan Keberlanjutan Pembangunan.

Transformasi sosial difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM masing-masing bidang, peningkatan kualitas SDM dan penguatan regulasi daerah.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada pada mewujudkan hilirisasi sumber daya alam unggulan Kabupaten Nagan Raya melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu, peningkatan investasi regional dan nasional, penguatan riset dan inovasi daerah, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan sumber energi terbarukan, pemenuhan akses digital, menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan baru, peningkatan akses permodalan, perluasan lapangan dan kesempatan kerja, penguatan UMKM, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Transformasi Tata kelola difokuskan pada penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, penguatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan partisipasi publik dalam program pembangunan, penguatan sistem pengawasan partisipatif dalam program pembangunan, digitalisasi pelayanan

publik, Pencegahan dan pengendalian korupsi dan penguatan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.

Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat terutama Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak, penguatan regulasi terkait Syariat Islam, optimalisasi peran ulama, peningkatan kualitas pendidikan dayah, penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi kriminalitas, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan stabilitas keamanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Indeks Kebudayaan dan menjaga kearifan lokal serta melestarikan adat istiadat lokal Nagan Raya, penguatan kemandirian fiskal daerah.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan difokuskan pada peningkatan kemantapan Jalan Kabupaten/Provinsi/Nasional termasuk yang menghubungkan daerah pinggiran dengan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah/kawasan dan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam kondisi mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.

Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan difokuskan pada peningkatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya, mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal, peningkatan regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mitigasi terhadap bencana, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan yang dititikberatkan pada program pembangunan berwawasan lingkungan, keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan adat, penguatan kearifan lokal untuk pengelolaan dan pengawasan lingkungan, peningkatan regulasi bidang lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, mitigasi dan kontijensi bencana alam dan non-alam, pengelolaan sampah berkelanjutan, konservasi sumber daya alam terbarukan dan non-terbarukan, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pembangunan sanitasi, pengelolaan limbah industri, serta antisipasi krisis air untuk pertanian dan rumah tangga.

Infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan difokuskan untuk mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dengan mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD dengan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan sehingga integrasi dan keterhubungan antar

wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang lestari.

Kesinambungan pembangunan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan Rencana Pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, kondisi alam, dan perubahan mendasar lainnya, melakukan reformasi tata kelola Pemerintahan, Optimalisasi PAD, Peningkatan kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui pembiayaan Non Pemerintah seperti Dana CSR, kerja sama dengan Perguruan Tinggi, termasuk LSM dan lembaga donor lainnya.

5.1.2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya periode 2030-2034 diarahkan pada **Percepatan Transformasi**.

Transformasi sosial difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan menuju masyarakat cerdas melalui percepatan transformasi pendidikan yang meliputi Peningkatan akses pendidikan dasar, Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan pendidikan, Peningkatan peran dan fungsi perpustakaan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, percepatan pembangunan Manusia sektor kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan bidang kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes, percepatan penanganan stunting terintegrasi, optimalisasi jaminan kesehatan, peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan kesehatan, serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada percepatan terwujudnya pusat pertumbuhan baru melalui percepatan aktivitas investasi baik skala lokal maupun Nasional pada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi/lokasi lainnya maupun pusat pertumbuhan ekonomi lokal seperti Suka Makmue, Simpang Peut dan Alue Bilie termasuk penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau serta penguatan UMKM melalui penguatan kelembagaan, SDM serta permodalan, penguatan ekonomi petani dan nelayan, peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan sektor kepariwisataan, peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah penerapan Iptek dan Inovasi berkelanjutan, reduksi ketimpangan ekstrem antara pusat pemerintahan dengan wilayah penyangga.

Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional. Transformasi Tata kelola melalui kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prinsip BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kesinambungan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya, penyederhanaan regulasi, optimalisasi kerja sama antar-lembaga, perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Transformasi dari

sistem manual ke sistem digital dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan, percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi dan kolusi. Peningkatan jumlah adopsi hasil-hasil riset dan inovasi daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Percepatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami melalui meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan Syariat Islam, optimalisasi fungsi lembaga pendidikan dayah/pesantren, optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pelaksanaan kehidupan beragama, peningkatan pengawasan pelaksanaan Qanun Syariat Islam, penguatan peran ulama, dan pengaderan yang berkelanjutan. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menekan angka kriminalitas, meningkatkan ketertiban umum, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, percepatan kemandirian fiskal daerah.

Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas fisik pada wilayah pinggiran yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Kuala, serta wilayah kecamatan lainnya dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing.

Ketahanan budaya dan ekologis difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, penyediaan rencana mitigasi, kesiapsiagaan, dan kontigensi yang terintegrasi berbasis pada risiko bencana, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri. Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Penguatan sumber daya manusia melalui program literasi lingkungan di tingkat sekolah. Optimalisasi penanganan kawasan hulu dari kerusakan hutan, normalisasi sungai, dan pengelolaan sampah terpadu. ; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kerusakan lingkungan .

Percepatan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan terutama pada daerah yang terkoneksi dengan pusat pertumbuhan dalam rangka mendukung daya saing daerah serta mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Mewujudkan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan melalui peningkatan PAD dan optimalisasi pengelolaan sumber biaya pembangunan pemerintah, peningkatan Kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui CSR,

reformasi tata kelola, kemudahan izin, regulasi untuk keberlanjutan pembangunan, mengatur mekanisme kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

5.1.3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya periode 2035-2039 diarahkan pada **Peningkatan Daya Saing**.

Transformasi sosial dititikberatkan pada peningkatan dan penguatan kualitas SDM menjadi semakin produktif, inovatif dan memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat lokal maupun Nasional serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam segala sektor termasuk kemandirian ekonomi masyarakat guna mendukung kemandirian perekonomian, peningkatan penguasaan Iptek, kemandirian UMKM, kemandirian pangan, pengembangan sentra produksi olahan hasil pertanian, pengembangan sektor pariwisata halal meliputi akses, infrastruktur, sarana dan prasarana, paket wisata, dan sumber daya manusia. Pengembangan industri kreatif melalui penguatan SDM dan akses modal untuk mewujudkan produktivitas ekonomi.

Transformasi Tata kelola dititik beratkan pada terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif dan profesional, bebas dari kolusi dan korupsi melalui optimalisasi sistem meritokrasi, penerapan total sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi termasuk pada pusat pelayanan terpadu satu pintu, dan pengembangan sistem pengawasan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi dan kolusi, kemandirian masyarakat dalam berbagai sektor.

Kehidupan masyarakat yang Islami difokuskan melalui peningkatan implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terjaminnya rasa aman, penguatan perdamaian Aceh yang semakin berkualitas, perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan sipil, kesetaraan warga negara dalam semua aspek terutama hukum dan pemerintahan.

Pembangunan kewilayahan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas Jalan Kabupaten/Jalan Provinsi maupun Nasional untuk mendorong kerja sama antar kabupaten terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terkoneksi, memastikan Infrastruktur lainnya dalam kondisi baik dan berkualitas yang merata di seluruh wilayah kecamatan.

Ketahanan budaya dan ekologis difokuskan pada terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, peningkatan kerja sama dengan

unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.

Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan pada memastikan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan serta memastikan terpenuhinya infrastruktur dasar lainnya yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Kesinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi baik lokal maupun Nasional, CSR, LSM *Funding* atau sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

5.1.4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya periode 2040-2045 diarahkan pada **Terwujudnya Nagan Raya Unggul 2045**

Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Nagan Raya Unggul, sejahtera, berakhlak mulia, berbudaya maju, inovatif, dan berdaya saing baik pada tingkat Nasional dan global, memastikan setiap individu dapat hidup secara berkualitas dan mulia, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif

Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Nagan Raya sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan menjadi salah satu pusat perekonomian Aceh di Wilayah Barat Selatan Aceh, masuk dalam lima besar produsen pangan di Aceh terutama produk turunan Kelapa Sawit, turut berkontribusi mendukung kebijakan Aceh dan Nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, menjadikan produk olahan berbahan dasar kelapa sawit Nagan Raya menjadi salah produk olahan di Aceh yang menjadi produk Indonesia yang mendunia, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber pangan baru.

Transformasi Tata kelola difokuskan pada upaya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, profesional, dan akuntabel serta tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif.

Pelaksanaan Syariat Islam secara kafah melalui implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan nuansa keislaman yang tercermin dari sehari-hari kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terwujudnya kemandirian dayah, (secara ekonomi, manajemen, tata kelola, infrastruktur), berkembangnya pariwisata halal berbasis kearifan lokal, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, meningkatnya supremasi hukum, stabilitas, penegakan hukum yang terpadu

dan akuntabel berkeadilan dan berkeadilan, Nagan Raya menuju zero corruption dan terselamatkannya asset dan keuangan negara; masyarakat damai yang taat hukum dan aparat penegak hukum yang berintegritas serta semakin berkualitasnya perdamaian Aceh di Kabupaten Nagan Raya.

Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk memastikan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dan terintegrasi untuk mewujudkan aksesibilitas dan konektivitas di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Ketahanan sosial budaya dan ekologis pada tahap ini difokuskan untuk memastikan terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.

Terwujudnya Infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan pada tahap ini difokuskan untuk memastikan terwujudnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan infrastruktur yang mendukung peningkatan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.

Kesinambungan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat, terwujudnya kerja sama pembiayaan pembangunan dalam skala yang luas dengan berbagai pihak.

Pemetaan arah kebijakan untuk pencapaian Visi dan Misi berdasarkan periode pembangunan menjadi penting untuk menjadi acuan dalam menyusun RPJMD sesuai dengan periodenya. Arah Kebijakan periode pertama merupakan dasar untuk penguatan pondasi transformasi (2025-2029) yang dilanjutkan pada periode kedua untuk akselerasi transformasi (2030-2034). Sedangkan Arah Kebijakan pada periode ketiga difokuskan untuk peningkatan daya saing (2035-2039) dan Arah Kebijakan pada periode keempat untuk mewujudkan Nagan Raya Unggul (2040-2045). Uraian masing-masing Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan dapat di lihat secara rinci pada Tabel 5.1.



Tabel 5.1.
Arah Kebijakan Pembangunan Nagan Raya Berdasarkan Misi dan Periode Pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		PERIODE I (2025-2029)	PERIODE II (2030-2034)	PERIODE III (2035-2039)	PERIODE IV (2040-2045)
		Penguatan Fondasi Transformasi	Percepatan Transformasi	Peningkatan Daya Saing	Nagan Raya Unggul
NAGAN RAYA ISLAMI, MAJU DAN BERKELANJUTAN	Misi 1-Mewujudkan Transformasi Sosial menuju Masyarakat Sehat, Cerdas dan Sejahtera	Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM masing-masing bidang, peningkatan kualitas SDM dan penguatan regulasi daerah.	Peningkatan kualitas layanan bidang kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, pustu dan polindes, percepatan penanganan stunting terintegrasi, optimalisasi jaminan kesehatan, peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan kesehatan. Peningkatan akses pendidikan dasar, Penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan pendidikan, Peningkatan peran dan fungsi perpustakaan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, , serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.	Peningkatan dan penguatan kualitas SDM yang sehat dan berpendidikan menjadi lebih produktif, inovatif dan memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat lokal maupun Nasional serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.	Perwujudan manusia Nagan Raya Unggul (sehat, cerdas dan sejahtera), berakhlak mulia, berbudaya maju, inovatif, dan berdaya saing baik pada tingkat Nasional dan global, memastikan setiap individu dapat hidup secara berkualitas dan mulia, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif
	Misi 2-Mewujudkan Transformasi Ekonomi Melalui	Hilirisasi sumber daya alam unggulan Kabupaten Nagan Raya melalui pengembangan	Percepatan terwujudnya pusat pertumbuhan baru melalui percepatan aktivitas investasi	Peningkatan upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam segala sektor	Terwujudnya Nagan Raya sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian yang



	Penguatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Peningkatan Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Kawasan Industri Terpadu, peningkatan investasi regional dan nasional, penguatan riset dan inovasi daerah, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan sumber energi terbarukan, pemenuhan akses digital, menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan baru, peningkatan akses permodalan, perluasan lapangan dan kesempatan kerja, penguatan UMKM, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru.	baik skala lokal maupun Nasional pada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi/lokasi lainnya maupun pusat pertumbuhan ekonomi lokal seperti Suka Makmue, Simpang Peut dan Alue Bilie termasuk penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau serta penguatan UMKM melalui penguatan kelembagaan, SDM serta permodalan, penguatan ekonomi petani dan nelayan, peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan sektor kepariwisataan, peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah penerapan Iptek dan Inovasi berkelanjutan.	termasuk kemandirian ekonomi masyarakat guna mendukung kemandirian perekonomian, peningkatan penguasaan Iptek, kemandirian UMKM ,kemandirian pangan, pengembangan sentra produksi olahan hasil pertanian, pengembangan sektor pariwisata halal meliputi akses, infrastruktur, sarana dan prasarana, paket wisata, dan sumber daya manusia. Pengembangan industri kreatif melalui penguatan SDM dan akses modal untuk mewujudkan produktivitas ekonomi.	tinggi dan menjadi salah satu pusat perekonomian Aceh di Wilayah Barat Selatan Aceh, masuk dalam lima besar produsen pangan di Aceh terutama produk turunan Kelapa Sawit, turut berkontribusi mendukung kebijakan Aceh dan Nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, menjadikan produk olahan berbahan dasar kelapa sawit Nagan Raya menjadi salah produk olahan di Aceh yang menjadi produk Indonesia yang mendunia, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber pangan baru.
	Misi 3-Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, penguatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah,	Penguatan kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prinsip BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), optimalisasi partisipasi publik	Percepatan terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif dan profesional, bebas dari kolusi dan korupsi melalui optimalisasi sistem meritokrasi, penerapan total sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi termasuk pada pusat pelayanan terpadu satu pintu, dan pengembangan sistem pengawasan untuk	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, profesional, dan akuntabel.



		peningkatan partisipasi publik dalam program pembangunan, penguatan sistem pengawasan partisipatif dalam program pembangunan, digitalisasi pelayanan publik, Pencegahan dan pengendalian korupsi dan penguatan pemerintah kabupaten dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat.	dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kesinambungan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya, penyederhanaan regulasi, optimalisasi kerja sama antar-lembaga, perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Transformasi ke sistem digital dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan, percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi dan kolusi. Peningkatan jumlah adopsi hasil-hasil riset dan inovasi daerah dalam perencanaan pembangunan.	peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi dan kolusi, kemandirian masyarakat dalam berbagai sektor.	
	Misi 4-Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Damai dan Demokratis	Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat terutama Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak, penguatan regulasi terkait Syariat Islam, optimalisasi peran ulama, peningkatan kualitas pendidikan dayah, penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi kriminalitas, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan stabilitas	Peningkatan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan Syariat Islam, optimalisasi fungsi lembaga pendidikan dayah/pesantren, optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pelaksanaan kehidupan beragama, peningkatan pengawasan pelaksanaan Qanun Syariat Islam, penguatan peran ulama, dan pengaderan yang berkelanjutan. Peningkatan stabilitas keamanan dan	Peningkatan implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terjaminnya rasa aman, penguatan perdamaian Aceh yang semakin berkualitas, perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan sipil, kesetaraan warga negara dalam semua aspek terutama hukum dan pemerintahan.	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam secara kafah melalui implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan nuansa keislaman yang tercermin dari sehari-hari kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terwujudnya kemandirian dayah, (secara ekonomi,



		keamanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Indeks Kebudayaan dan menjaga kearifan lokal serta melestarikan adat istiadat lokal Nagan Raya, penguatan kemandirian fiskal daerah.	ketertiban masyarakat untuk menekan angka kriminalitas, meningkatkan ketertiban umum, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, percepatan kemandirian fiskal daerah.		manajemen, tata kelola, infrastruktur), berkembangnya pariwisata halal berbasis kearifan lokal, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.
	Misi 5-Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan, dan Ramah Lingkungan	Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal, mitigasi terhadap bencana, keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan adat, penguatan kearifan lokal untuk pengelolaan dan pengawasan lingkungan, peningkatan regulasi bidang lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi	penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, penyediaan rencana mitigasi, kesiapsiagaan, dan kontigensi yang terintegrasi berbasis pada risiko bencana, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri. Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Penguatan	Percepatan terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu,	Terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.



		penanganan penambangan ilegal, mitigasi dan kontijensi bencana alam dan non-alam, pengelolaan sampah berkelanjutan, konservasi sumber daya alam terbarukan dan non-terbarukan, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan, pembangunan sanitasi, pengelolaan limbah industri, serta antisipasi krisis air untuk pertanian dan rumah tangga.	sumber daya manusia melalui program literasi lingkungan di tingkat sekolah. Optimalisasi penanganan kawasan hulu dari kerusakan hutan, normalisasi sungai, dan pengelolaan sampah terpadu, akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kerusakan lingkungan .	penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.	
	Misi 6-Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	Peningkatan dan penuntasan Prasarana dan Sarana Dasar, peningkatan kemantapan Jalan Kabupaten/Provinsi /Nasional termasuk yang menghubungkan daerah pinggiran dengan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing wilayah/kawasan dan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam kondisi mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat.	Percepatan pembangunan infrastruktur dasar termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas fisik pada wilayah pinggiran yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Kuala, serta wilayah kecamatan lainnya dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing.	Peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas Jalan Kabupaten/Jalan Provinsi maupun Nasional untuk mendorong kerja sama antar kabupaten terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terkoneksi, memastikan Infrastruktur lainnya dalam kondisi baik dan berkualitas yang merata d iseluruh wilayah kecamatan.	Terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.



	Misi 7-Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD dengan membuka akses ke desa-desa terpencil, pengurangan risiko peningkatan aksesibilitas antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.	Percepatan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan terutama pada daerah yang terkoneksi dengan pusat pertumbuhan dalam rangka mendukung daya saing daerah serta mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.	Memastikan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan serta memastikan terpenuhinya infrastruktur dasar lainnya yang berkualitas dan ramah lingkungan.	Terwujudnya infrastruktur dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan serta mewujudkan infrastruktur yang mendukung peningkatan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan hidup.
	Misi 8-Mewujudkan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan	Memastikan kesinambungan pembangunan melalui Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi, melakukan reformasi tata kelola Pemerintahan, Optimalisasi PAD, Peningkatan kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui pembiayaan Non Pemerintah seperti Dana CSR, kerja sama dengan Perguruan Tinggi, termasuk LSM dan lembaga donor lainnya.	Peningkatan PAD dan optimalisasi pengelolaan sumber biaya pembangunan pemerintah, peningkatan Kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui CSR, reformasi tata kelola, kemudahan izin, regulasi untuk keberlanjutan pembangunan, mengatur mekanisme kesinambungan dan keberlanjutan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.	Peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi baik lokal maupun Nasional, CSR, LSM Funding atau sumber pembiayaan pembangunan lainnya.	Terwujudnya sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat, terwujudnya kerja sama pembiayaan pembangunan dalam skala yang luas dengan berbagai pihak untuk meamastiak terwujudnya nagan Raya Unggul Tahun 2045.

5.2. Sasaran Pokok dan Arah Pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang adalah kuantifikasi visi dan misi pada akhir periode tahun ke-20 (dua puluh). Sasaran menjelaskan target dari capaian pembangunan jangka panjang pada akhir tahun ke-20 perencanaan yaitu Tahun 2045.

Arah Pembangunan Kabupaten Nagan Raya merupakan strategi daerah yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Nagan Raya. Strategi ini juga berfungsi untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan Aceh dan Nasional. Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Nagan Raya terdiri dari 17 (tujuh belas) sasaran pokok yang dirumuskan dengan mengacu pada 17 (tujuh belas) Arah Pembangunan Nasional, serta diselaraskan dengan 17 (tujuh belas) sasaran pokok RPJP Aceh. Sasaran pokok pembangunan Kabupaten Nagan Raya terbagi ke dalam 3 (tiga) kelompok transformasi, yaitu: (1) kebijakan transformasi yang meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola; (2) landasan transformasi yang mencakup perdamaian, perkautan otonomi khusus, ketertiban dan ketentraman, stabilitas ekonomi makro, Implementasi Syariat Islam, dan ketahanan sosial dan ekologi; serta (3) kerangka implementasi transformasi yang diwujudkan melalui pembangunan kewilayahan, penyediaan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, serta kesinambungan pembangunan."

5.2.1. Arah Kebijakan Transformasi Sosial

Transformasi sosial difokuskan pada pemenuhan pelayanan dasar Bidang Kesehatan dan percepatan pembangunan manusia sektor kesehatan melalui peningkatan kualitas layanan bidang kesehatan baik di rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan polindes, percepatan penanganan stunting terintegrasi, optimalisasi jaminan kesehatan, peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan kesehatan, dan perlindungan sosial melalui pemenuhan SPM masing-masing bidang, peningkatan kualitas SDM dan penguatan regulasi daerah. Sektor pendidikan difokuskan pada percepatan pembangunan Manusia sektor Pendidikan melalui peningkatan kualitas pendidikan menuju masyarakat cerdas melalui percepatan transformasi pendidikan yang meliputi Peningkatan akses pendidikan dasar, penguatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), peningkatan pemenuhan indikator standar pelayanan minimal urusan pendidikan, peningkatan peran dan fungsi perpustakaan baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun tingkat desa, serta percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat, peningkatan dan penguatan kualitas SDM menjadi semakin produktif, inovatif dan memiliki daya saing yang tinggi baik pada tingkat lokal maupun Nasional serta peningkatan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, perwujudan manusia Nagan Raya Unggul, sejahtera, berakhlak mulia, berbudaya maju, inovatif, dan berdaya saing baik pada tingkat Nasional dan global, memastikan setiap individu dapat hidup secara berkualitas dan mulia, berdaya saing, dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif

5.2.1.1 Sasaran Pokok 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dalam konsep Kesehatan untuk Semua melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kesertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejahteraan SDM Kesehatan dengan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.2.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial Sasaran Pokok 1 :
Kesehatan untuk Semua

NO	RPJP Aceh 2025 – 2045	RPJP Nagan Raya 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang pentingnya pola hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat, melalui Memberikan informasi yang akurat dan relevan tentang pentingnya pola hidup sehat, pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan, terutama sarana rekreasi dan olah raga.	Nagan Raya	Kesehatan, Perumahan dan Permukiman, Lingkungan Hidup
2	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, perawatan kesehatan masyarakat, obat-obatan esensial, dan fasilitas kesehatan yang memadai, biaya terjangkau, meratanya fasilitas kesehatan dan berkualitas, dan berkeadilan.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal, terutama pemeriksaan kesehatan rutin, imunisasi, perawatan kesehatan masyarakat, obat-obatan esensial, dan fasilitas kesehatan yang memadai, biaya terjangkau, meratanya fasilitas kesehatan dan berkualitas, dan berkeadilan.	Nagan Raya	Kesehatan
3	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang aman dan adaptif berupa mendukung peningkatan sumber daya manusia dan sistem digital di puskesmas, posyandu, poliklinik, dan praktek dokter umum dalam hal kemampuan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis sederhana, perawatan dasar, dan manajemen penyakit kronis ringan. dan rujukan terutama berfungsinya rumah sakit regional di Meulaboh, Takengon, Bireuen, Langsa dan Tapak Tuan, serta	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan yang aman dan adaptif berupa mendukung peningkatan sumber daya manusia dan sistem digital di puskesmas, posyandu, poliklinik, dan praktek dokter umum dalam hal kemampuan promosi kesehatan, pencegahan penyakit, diagnosis sederhana, perawatan dasar, dan manajemen penyakit kronis ringan dan rujukan serta penambahan rumah sakit swasta, klinik spesialis, unit gawat	Nagan Raya	Kesehatan

NO	RPJP Aceh 2025 – 2045	RPJP Nagan Raya 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	penambahan rumah sakit swasta, klinik spesialis, unit gawat darurat, dan fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan intensif dan spesifik.	darurat, dan fasilitas kesehatan yang menyediakan perawatan intensif dan spesifik sesuai regulasi dan. kebutuhan		
4	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, terutama melakukan kampanye imunisasi dan pencegahan penyakit menular lainnya, bahasa dan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat, melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lainnya, Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal, termasuk bidan dan petugas kesehatan masyarakat, dalam menyampaikan informasi yang benar dan mendukung masyarakat dalam mendapatkan imunisasi dan perawatan kesehatan yang diperlukan.	Pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya, terutama melakukan kampanye imunisasi dan pencegahan penyakit menular lainnya, bahasa dan konteks budaya yang dipahami oleh masyarakat setempat, Melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan tokoh budaya lainnya, Melakukan pelatihan kepada tenaga kesehatan lokal, termasuk bidan dan petugas kesehatan masyarakat, dalam menyampaikan informasi yang benar dan mendukung masyarakat dalam mendapatkan imunisasi dan perawatan kesehatan yang diperlukan.	Nagan Raya	Kesehatan, Kekhususan dan Keistimewaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan dimana pelayanan yang diberikan efektif berbasis bukti; aman; sesuai pilihan, kebutuhan, dan keyakinan individu; tepat waktu; adil tanpa membedakan gender, etnis, lokasi geografis, dan status sosial-ekonomi; terintegrasi dalam koridor siklus hidup; efisien memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan menghindari pemborosan.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan dimana pelayanan yang diberikan efektif berbasis bukti; aman; sesuai pilihan, kebutuhan, dan keyakinan individu; tepat waktu; adil tanpa membedakan gender, etnis, lokasi geografis, dan status sosial-ekonomi; terintegrasi dalam koridor siklus hidup; efisien memaksimalkan sumber daya yang tersedia dan menghindari pemborosan.	Nagan Raya	Kesehatan
6	Peningkatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan; mendukung kesehatan mental dan mengurangi stigma pada tenaga kesehatan; menciptakan dan mempertahankan lingkungan dan budaya kerja yang positif; Penetapan sistem pembagian remunerasi dan insentif yang berkeadilan	Peningkatan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja tenaga kesehatan; mendukung kesehatan mental dan mengurangi stigma pada tenaga kesehatan; menciptakan dan mempertahankan lingkungan dan budaya kerja yang positif; Penetapan sistem pembagian remunerasi dan insentif yang berkeadilan	Nagan Raya	Dinkes, RSUD SIM
7	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan dengan mempertimbangkan	Nagan Raya	Kesehatan

NO	RPJP Aceh 2025 – 2045	RPJP Nagan Raya 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	kebutuhan, keanekaragaman, dan inklusifitas; meningkatkan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkelanjutan; berinvestasi dalam pengukuran kinerja, dan kajian untuk mengatasi hambatan kepatuhan atas peraturan, standar, dan kebijakan dalam pekerjaannya sehari-hari; pemanfaatan teknologi kesehatan secara efektif	kebutuhan, keanekaragaman, dan inklusifitas; meningkatkan lingkungan kerja yang mendorong pembelajaran berkelanjutan; berinvestasi dalam pengukuran kinerja, dan kajian untuk mengatasi hambatan kepatuhan atas peraturan, standar, dan kebijakan dalam pekerjaannya sehari-hari; pemanfaatan teknologi kesehatan secara efektif		
8	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP	Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di daerah pinggiran.	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Beutong Ateuh Banggalang	Kesehatan
9	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat termasuk dalam hal eliminasi penyakit menular (HIV/AIDS, Tuberkulosis, Malaria) melalui pengalokasian sumber daya yang strategis dan sesuai prioritas masalah kesehatan	Investasi pelayanan kesehatan masyarakat, eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan (terutama: tuberkulosis, HIV dan kusta).	Nagan Raya	Kesehatan
10	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah Afirmasi 3TP	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas, terutama di Daerah pinggiran	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Pemberdayaan Masyarakat, Kesehatan
11	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Percepatan penuntasan <i>stunting</i> dan pencegahan <i>stunting</i> .	Nagan Raya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
12	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat.	Nagan Raya	Kesehatan, Pangan, Kelautan dan Perikanan, Pertanian, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	RPJP Aceh 2025 – 2045	RPJP Nagan Raya 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
13	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan.	Nagan Raya	Kesehatan
14	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.	Peningkatan pelayanan kesehatan prioritas nasional seperti: Kanker, Jantung, Stroke, Uronefrologi, Diabetes melitus, Gastrohepatologi, penyakit infeksi emerging, kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, tuberculosis dan respirasi.	Nagan Raya	Kesehatan
15	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan upaya promotif, preventif, kuratif serta meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan melalui perbaikan komitmen pemerintah dan pelibatan masyarakat, mengatasi hambatan akses dan ketimpangan, surveilans penyebab kematian dan respons yang lebih baik	Menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dengan upaya promotif, preventif, kuratif serta meningkatkan kapasitas serta kualitas layanan melalui perbaikan komitmen pemerintah dan pelibatan masyarakat, mengatasi hambatan akses dan ketimpangan, surveilans penyebab kematian dan respons yang lebih baik	Nagan Raya	Kesehatan
16	Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dengan transisi kepesertaan jaminan kesehatan non-penerima bantuan iuran	Meningkatkan cakupan perlindungan kesehatan masyarakat dengan transisi kepesertaan jaminan kesehatan baik penerima bantuan iuran maupun non- penerima bantuan iuran	Nagan Raya	Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia Kesehatan	Meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan sumber daya manusia Kesehatan	Nagan Raya	Kesehatan, Pendidikan dan Pelatihan
18	Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya (Pasal 224 UUPA)	Memperkuat sistem kesehatan dimana setiap anak yatim dan fakir miskin di Kabupaten Nagan Raya berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang menyeluruh tanpa biaya (Pasal 224 UUPA)	Nagan Raya	Kesehatan
19	Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan (Pasal 224 UUPA).	Perkuatan keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam bidang kesehatan (Pasal 224 UUPA).	Nagan Raya	Kesatuan Bangsa, Kesehatan
20	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olah raga rekreasi	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga
21	Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak ke makanan bergizi seimbang, promosi praktik pemberian makanan tambahan kepada bayi dan anak, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi kelompok rentan. meningkatkan akses	Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil, bayi, dan anak-anak ke makanan bergizi seimbang, promosi praktik pemberian makanan tambahan kepada bayi dan anak, edukasi tentang pentingnya gizi seimbang, dan penyediaan suplemen gizi bagi	Nagan Raya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan,

NO	RPJP Aceh 2025 – 2045	RPJP Nagan Raya 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	masyarakat terutama ibu hamil dan anak- anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas	kelompok rentan. meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anak- anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas		Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
22	Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anak-anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas	Meningkatkan akses masyarakat terutama ibu hamil dan anak-anak ke pelayanan kesehatan maternal dan anak yang berkualitas	Nagan Raya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
23	Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil sangat penting dalam upaya menurunkan stunting	Kolaborasi antara pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, lembaga internasional, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam upaya mencegah dan menurunkan stunting	Nagan Raya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
24	Meningkatkan akses masyarakat terutama di daerah pedesaan atau terpencil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Ini melibatkan pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	Meningkatkan akses masyarakat terutama di daerah pedesaan atau terpencil terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan antenatal, imunisasi, layanan kesehatan reproduksi, dan penanganan penyakit menular dan tidak menular. Ini melibatkan pembangunan fasilitas kesehatan, penyediaan tenaga medis yang terlatih, serta penyuluhan kesehatan kepada masyarakat	Nagan Raya	Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
25	Meningkatkan akses masyarakat terutama di pedesaan ke sanitasi yang layak dan air bersih.	Meningkatkan akses masyarakat terutama di pedesaan ke sanitasi yang layak dan air bersih.	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Tabel 5.3.
Indikator Capaian Transformasi Sosial Bidang Kesehatan

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
I	TRANSFORMASI SOSIAL														
1	Tranformasi Sosial	IE1	Kesehatan untuk Semua	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,28	78,45	Kesehatan untuk Semua melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejahteraan SDM Kesehatan	Kesehatan	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	73,04 – 73,06	78,04 – 78,06	Kesehatan untuk Semua melalui promosi kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan, investasi kesehatan, pencegahan dan penuntasan stunting, penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, pelayanan kesehatan prioritas nasional, meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak, cakupan kepesertaan jaminan kesehatan, kapasitas dan kesejahteraan SDM Kesehatan	Kesehatan
				2	Kesehatan Ibu dan Anak:					2	Kesehatan Ibu dan Anak:				
					a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	122	17		Kesehatan		a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	125	20		
					b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	13,5	5		Kesehatan		b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	30	8		
				3	Penanganan Tuberkulosis:					3	Penanganan Tuberkulosis:				
					a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	91	100		Kesehatan		a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	76,07	100		

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045					
I	TRANSFORMASI SOSIAL															
											(treatment coverage) (%)					
					b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	91	100		Kesehatan		b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	64 (2024)	100		Kesehatan	
				4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5		Kesehatan	4	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	98,5	99,5		Kesehatan	



5.2.1.2 Sasaran Pokok 2 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan yang Merata

Pendidikan Berkualitas dan merata dicapai melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Desa Tertinggal/Sangat Tertinggal atau wilayah terpencil, Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah, dengan arah kebijakan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 5.4
Arah Kebijakan Transformasi Sosial
Pendidikan Berkualitas dan Merata

NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah).	Nagan Raya	Pendidikan
2	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah.	Nagan Raya	Pendidikan
3	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi.	Nagan Raya	Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan
4	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.	Nagan Raya	Pendidikan, Kebencanaan, Perhubungan
5	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.	Nagan Raya	Pendidikan
6	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).	Nagan Raya	Pendidikan
7	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis kondisi lokal, potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI).	Nagan Raya	Pendidikan



NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
8	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.	Nagan Raya	Pendidikan, Pendidikan dan pelatihan
9	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.	Nagan Raya	Pendidikan
10	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.	Nagan Raya	Pendidikan
11	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.	Nagan Raya	Pendidikan
12	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Pinggiran	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah Pinggiran	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Pendidikan
13	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Pinggiran	Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas, terutama di Daerah Pinggiran	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Pendidikan
14	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Dukungan/peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>).	Nagan Raya	Pendidikan dan Pelatihan
15	Penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Dukungan/penyelenggaraan pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global.	Nagan Raya	Pendidikan
16	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Pinggiran	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK, terutama pada Daerah Pinggiran	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Pendidikan, Komunikasi dan Informatika
17	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah pinggiran.	Penguatan sekolah terbuka dan pesantren/dayah, serta pengembangan sekolah berbasis asrama, terutama pada Daerah pinggiran.	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Beutong Ateuh Banggalang, Beutong, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Darul Makmur	Pendidikan
18	Meningkatkan Olahraga Prestasi yang menjadi Kewenangan provinsi melalui penyediaan saran dan prasarana olahraga	Meningkatkan Olahraga Prestasi yang menjadi Kewenangan kabupaten melalui penyediaan saran dan prasarana olahraga	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olah Raga



NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
19	Memberikan akses yang lebih luas dan setara terhadap pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Aceh, terutama di daerah-daerah pedalaman atau terpencil	Memberikan akses yang lebih luas dan setara terhadap pendidikan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat Kabupaten Nagan Raya.	Nagan Raya	Pendidikan
20	Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktis dan keterampilan, mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.	Meningkatkan investasi dalam pembangunan fasilitas dan infrastruktur pendidikan vokasi seperti laboratorium, workshop, dan peralatan yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran praktis dan keterampilan, mengembangkan kurikulum pendidikan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional.	Nagan Raya	Pendidikan
21	Membangun kemitraan yang erat dengan industri dan perusahaan lokal untuk memastikan bahwa program pendidikan vokasi mencerminkan kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis melalui magang dan kerja sama proyek	Membangun kemitraan yang erat dengan industri dan perusahaan lokal untuk memastikan bahwa program pendidikan vokasi mencerminkan kebutuhan industri dan memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman kerja praktis melalui magang dan kerja sama proyek	Nagan Raya	Pendidikan
22	Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang ingin mengikuti pendidikan vokasi namun menghadapi kendala finansial	Memberikan bantuan keuangan atau beasiswa bagi siswa yang ingin mengikuti pendidikan vokasi namun menghadapi kendala finansial	Nagan Raya	Pendidikan, Pendidikan dan Pelatihan, Keuangan
23	Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan vokasi sebagai jalur yang mempersiapkan individu untuk masuk ke pasar kerja	Memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya pendidikan vokasi sebagai jalur yang mempersiapkan individu untuk masuk ke pasar kerja	Nagan Raya	Pendidikan
24	Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi untuk mengevaluasi keefektifan dan relevansinya serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan vokasi tercapai dengan baik	Melakukan evaluasi rutin terhadap program pendidikan vokasi untuk mengevaluasi keefektifan dan relevansinya serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Pemantauan yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan vokasi tercapai dengan baik	Nagan Raya	Pendidikan
25	Pengembangan Promosi Literasi, peningkatan Akses terhadap Bahan Bacaan, peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Buku, Integrasi Literasi dalam Kurikulum Pendidikan,Pembangunan Keterampilan Literasi Digital, Kolaborasi dengan Pihak-pihak Terkait, pengembangan Inisiatif Inovatif dalam promosi literasi, seperti penggunaan teknologi digital untuk membantu akses terhadap bahan bacaan, pelatihan keterampilan literasi, atau	Pengembangan dan Promosi Literasidan Numerasi yang komprehensif dan Terintegrasi.	Nagan Raya	Pendidikan, Perpustakaan, Pemebrdayan Masyarakat



NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	platform berbagi cerita dan informasi. membangun budaya membaca yang kuat dan berkelanjutan melalui promosi nilai-nilai literasi di masyarakat, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ini melibatkan peran aktif orang tua, guru, dan pemimpin masyarakat dalam mempromosikan kebiasaan membaca di kalangan anak-anak dan generasi mendatang.			
26	Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik	Mendukung pemenuhan Gizi, kecukupan Gizi peserta didik	Nagan Raya	Pertanian, Kelautan Perikanan dan Pangan



Tabel 5.5.
Indikator Capaian Transformasi Sosial Bidang Pendidikan

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
I TRANSFORMASI SOSIAL															
1	Tranformasi Sosial	IE2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	5	Hasil Pembelajaran:			Pendidikan Berkualitas dan merata melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga		5	Hasil Pembelajaran:			Pendidikan Berkualitas dan merata melalui percepatan wajib belajar, perluasan dan akses pendidikan, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, pendidikan yang berkualitas, penguatan kurikulum, manajemen talenta dan prestasi, peningkatan kesejahteraan, pemerataan dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, terutama untuk guru dan tenaga kependidikan yang bertugas di Daerah pinggiran, Pemberdayaan	
					a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:						a) Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				
					i) Literasi Membaca	9,09 – 11,09	69,66 – 71,66		Pendidikan		i) Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks	Sedang (62,78%)	Tinggi (92%)		Pendidikan



NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
								kependidikan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue, Aceh Besar, Singkil), Pemberdayaan masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah,			informasional dan teks fiksi).			masyarakat lokal, peningkatan akses Pendidikan tinggi, pengembangan pendidikan jarak jauh dan penguatan sekolah terbuka dan dayah.	
					ii) Numerasi	0,00 – 2,00	69,66 – 71,66		Pendidikan		ii) Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Sedang (57,28 %)	Tinggi (87%)		Pendidikan
					b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				Pendidikan		b) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:				Pendidikan



NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
					i) Lietrasi Membaca	20,81 – 22,81	64,65 – 66,65		Pendidikan	i) Persentase peserta didik berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi).	Sedang (60,81 %)	Tinggi (91%)		Pendidikan	
					ii) Numerasi	13,01 – 15,01	58,98 – 60,98		Pendidikan	ii) Nilai rerata peserta didik berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan.	Sedang (53,75%)	Tinggi (86%)		Pendidikan	



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045			Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah				Indikator	Target Daerah				
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045			
				c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	10,20 – 10,21	12,94 – 13,06		Pendidikan	c) Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	9,30 – 9,40	11,94 – 12,04		Pendidikan	
				d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,66 – 14,68	16,24 – 16,32		Pendidikan	d) Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,22 – 14,27	16,12 – 16,17		Pendidikan	
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	13,58	13,58 – 14,80		Pendidikan	6 Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	6,92	34,5		Pendidikan	
			7	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	58,19	75,00		Pendidikan	7 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	50	85		Pendidikan	

5.2.1.3. Sasaran Pokok 3 : Meningkatnya Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), akses Rumah layak, terutama di perkotaan.

Tabel 5.6.
Arah Kebijakan Transformasi Sosial : Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

No.	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan terutama pada Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue).	Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan.	Nagan Raya	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR
2	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion pada Daerah Afirmasi 3TP.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur jalan dasn jembatan untuk meningkatkan konektivitas wilayah.	Nagan Raya	Perkim, Dishub, PUPR, Kominfo
3	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (<i>unique & high-value economy</i>), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi, guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat	Nagan Raya	Penanaman Modal, Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pertanian, Ketenagakerjaan, Pangan
4	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i> .	Nagan Raya	Tenaga Kerja, Pendidikan, Kop UKM, Sosial,Pertanian



No.	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
5	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue), yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Afirmasi 3TP (khususnya di Simeulue) melalui bertambahnya demand.	Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang, yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi di Daerah Pinggiran melalui bertambahnya demand.	Nagan Raya	PUPR, Perhubungan
6	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien	Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Pinggiran dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.	Nagan Raya	Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Aceh	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Kabupaten Nagan Raya.	Nagan Raya	Pendidikan Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Perhubungan, Kop UKM,
8	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat di Daerah Pinggiran.	Nagan Raya	Kesehatan, Sosial Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di Daerah Afirmasi 3TP.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah Pinggiran termasuk pada lokasi Transmigrasi, serta optimalisasi perekrutan tenaga kerja lokal dan penguatan perdagangan.	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
10	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi.	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No.	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
11	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.	Nagan Raya	Kesehatan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kekhususan Aceh
12	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
13	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau urban renewal pada area yang telah mengalami urban decay dalam suatu kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> pada area yang telah mengalami <i>urban decay</i> dalam suatu kawasan perkotaan.	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
14	Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata	Bantuan sosial, Pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, Pemberdayaan sosial dan partisipasi masyarakat, perbaikan tata Kelola, pembangunan infrastruktur, pengembangan sektor pariwisata	Nagan Raya	Perencanaan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Sosial, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Pertanian, PUPR, Kekhususan Aceh, Pendidikan, Inspektorat
15	Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.	Memperkuat bantuan sosial kepada PMKS dan penyandang disabilitas, termasuk pemberian santunan, pelayanan kesehatan, pendidikan inklusif, dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mengembangkan program rehabilitasi fisik, mental, dan sosial bagi penyandang disabilitas untuk membantu mereka mengembangkan potensi dan meningkatkan partisipasi dalam kehidupan masyarakat. Memperkuat aksesibilitas fisik dan sosial bagi penyandang disabilitas dengan meningkatkan akses terhadap transportasi publik, fasilitas umum, dan informasi.	Nagan Raya	Sosial

No.	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
16	Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Aceh untuk memastikan bahwa anak- anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.	Mendorong implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Nagan Raya untuk memastikan bahwa anak- anak dengan disabilitas mendapatkan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas.	Nagan Raya	Pendidikan, Sosial, Kekhususan Aceh
17	Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.	Mendorong pemberdayaan ekonomi bagi PMKS, penyandang disabilitas, dan perempuan dengan memberikan pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha, dan dukungan untuk memulai usaha mikro.	Nagan Raya	Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan, Pangan, Kelautan dan Perikanan,



Tabel 5.7.
Indikator Capaian Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang Adaptif

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
			Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah									
				Base line 2025	Sasaran 2045		Base line 2025			Sasaran 2045						
I	TRANSFORMASI SOSIAL															
1	Transformasi Sosial	IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8	Tingkat Kemiskinan (%)	10,78 -11,28	0,08-0,58	Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), akses Rumah layak, terutama di perkotaan.	Bappeda	8	Tingkat Kemiskinan (%)	16,55 - 16,65	8,73 - 8,83	Peningkatan kesejahteraan dan Perlindungan Sosial yang adaptif melalui pembangunan dan penuntasan kemiskinan, akses infrastruktur pelayanan dasar, penguatan potensi ekonomi lokal yang unik, investasi, peningkatan SDM usia produktif, meningkatkan pergerakan orang dan barang, perlindungan sosial adaptif, perluasan bantuan dan jaminan sosial, Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah, peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi, eliminasi praktik buang air besar sembarangan (BABS), akses Rumah layak, terutama di perkotaan.	Sosial	
				9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	25,86	85,16		Naker	9	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten(%)	48,68	90		Ketenagakerjaan	
				10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	22	55		Dinsos	10	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Swasta (%)	0,06	5		Sosial	

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi difokuskan pada mewujudkan hilirisasi sumber daya alam unggulan Kabupaten Nagan Raya melalui pengembangan Kawasan Industri Terpadu atau konsep lainnya, peningkatan investasi regional dan nasional, penguatan riset dan inovasi daerah, penerapan ekonomi hijau, pemanfaatan sumber energi terbarukan, pemenuhan akses digital, menumbuhkembangkan pusat pertumbuhan baru, peningkatan akses permodalan, perluasan lapangan dan kesempatan kerja, penguatan UMKM, pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Transformasi Ekonomi difokuskan pada percepatan terwujudnya pusat pertumbuhan baru melalui percepatan aktivitas investasi baik skala lokal maupun Nasional pada Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi maupun pusat pertumbuhan ekonomi lokal seperti Suka Makmue, Simpang Peut dan Alue Bilie termasuk penerapan ekonomi biru, ekonomi hijau termasuk penguatan UMKM melalui penguatan kelembagaan, SDM serta permodalan, penguatan ekonomi petani dan nelayan, peningkatan akses permodalan bagi UMKM dan masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat miskin, pengembangan sektor kepariwisataan, peningkatan produktivitas tanaman pangan, peningkatan kapasitas fiskal daerah penerapan Iptek dan Inovasi berkelanjutan, reduksi ketimpangan ekstrem antara pusat pemerintahan dengan wilayah penyangga. Transformasi Ekonomi difokuskan pada upaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dalam segala sektor termasuk kemandirian ekonomi masyarakat guna mendukung kemandirian perekonomian Aceh, peningkatan penguasaan Iptek, kemandirian UMKM ,kemandirian pangan, pengembangan sentra produksi olahan hasil pertanian, pengembangan sektor pariwisata halal meliputi akses, infrastruktur, sarana dan prasarana, paket wisata, dan sumber daya manusia. Pengembangan industri kreatif melalui penguatan SDM dan akses modal untuk mewujudkan produktivitas ekonomi. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Nagan Raya sebagai kabupaten dengan tingkat perekonomian yang tinggi dan menjadi salah satu pusat perekonomian Aceh di Wilayah Barat Selatan Aceh, masuk dalam lima besar produsen pangan di Aceh terutama produk turunan Kelapa Sawit, turut berkontribusi mendukung kebijakan Aceh dan nasional menjadi negara percontohan penerapan ekonomi hijau dan biru, menjadikan produk olahan berbahan dasar kelapa sawit Nagan Raya menjadi salah produk olahan di Aceh yang menjadi produk Indonesia yang mendunia, pemanfaatan sumber daya hayati sebagai sumber pangan baru.

5.2.2.1. Sasaran Pokok 4 : Meningkatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, jalan provinsi, perhubungan, pemerataan listrik, peningkatan produktivitas BUMA dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan IPTEK dan Inovasi, pengembangan BUMA.



Tabel 5.8.

Arah Kebijakan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
1	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian	Peningkatan produktivitas dan daya saing serta Hilirisasi produk pertanian yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan dan <i>water prosperity</i> melalui pengembangan kawasan strategis pertanian dan Kawasan Industri Terpadu (KIT).	Nagan Raya	Pertanian, Perkebunan, Perindustrian dan Perdagangan
2	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) serta mendukung percontakan sawah baru.	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya) dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi produk pertanian/ perkebunan, serta mendukung percontakan sawah baru	Nagan Raya	Pertanian
3	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Nagan Raya	Pertanian
4	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian dan Ekonomi produktif lainnya	Nagan Raya	Pertanian dan Perekonomian
5	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perdagangan, Perindustrian
6	Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , bank, dan asuransi pertanian	Nagan Raya	Pertanian, Koperasi dan UKM, Perdagangan, Perindustrian
7	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah.	Kabupaten Nagan Raya, khususnya Kecamatan : Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur, Darul Makmur	Kelautan, Perikanan dan Pangan, Perencanaan
8	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Peningkatan produktivitas, daya saing dan pemasaran produk perikanan (perikanan tangkap maupun perikanan budidaya) baik domestik maupun internasional dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian,



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
9	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Setda
10	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , <i>bank</i> , dan asuransi perikanan.	Pengembangan <i>closed loop model</i> perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan <i>market</i> , <i>bank</i> , dan asuransi perikanan, pengembangan budidaya ikan air tawar.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Setda, Kop UKM
11	Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Penyediaan infrastruktur esensial terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan,
12	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Kop UKM, Perdagangan, Perindustrian,
13	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya.	Nagan Raya, terutama di Kecamatan Beutong, Seunagan, Seunagan Timur, Suka Makmue, Kuala	Kelautan dan Perikanan,
14	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja.	Nagan Raya	Perdagangan, Perindustrian, Ketenagakerjaan, Pertanian Lingkungan Hidup, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
15	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif Banda Aceh-Sabang.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>) pada kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif .	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata, Koperasi dan UKM



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
16	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata,
17	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk penataan lokasi wisata yang estetik dan berseni.	Nagan Raya	Perhubungan, PUPR, Kepariwisata
18	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Aceh/Sumatra.	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone & maritime backbone</i> , yang menginterkoneksi antar kawasan strategis, termasuk pengembangan sistem <i>expressway</i> dan/atau sistem perkeretaapian lintas Aceh/Sumatra.	Nagan Raya	Dishub, PUPR
19	Penguatan pengelolaan jalan provinsi dan jalan lingkungan	Penguatan pengelolaan jalan kabupaten dan jalan lingkungan	Nagan Raya	PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
20	Pembangunan jalan Provinsi yang terkoneksi dengan jalan tol trans-Sumatera pada wilayah Aceh untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan jalan Provinsi dan Jalan Nasional untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik terutama ruas:	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan provinsi Ruas Kula Tuha – Lamie	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Nasional Ruas Meulaboh - Kuala Tuha	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Nasional Ruas Kuala Tuha - Simpang Peut	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Nasional Ruas Simpang Peut - Batas Kabupaten Aceh Barat Daya	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Nasional Ruas Jalan Batas Aceh Tengah- Lhokseumantok-Jeuram	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Nasional Ruas Jalan Jeuram - Simpang Peut	Nagan Raya	PUPR
		- Pembangunan dan pemeliharaan jalan kabupaten yang terkoneksi ke Jalan Provinsi dan Jalan Nasional Ruas lainnya.	Nagan Raya	PUPR



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
21	Pembangunan/ peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan khusus pariwisata, terutama di Sabang.	Pembangunan Pelabuhan dan peningkatan sarana prasarana kepalabuhanan	Nagan Raya	Perhubungan
22	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara internasional yang dapat melayani aksesibilitas /konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif dan/atau Daerah Afirmasi 3TP, terutama pada Bandar Udara Sultan Iskandar Muda.	Peningkatan sarana & prasarana dan kualitas pelayanan bandar udara yang dapat melayani aksesibilitas/konektivitas cepat ke/dari kawasan metropolitan, kawasan strategis industri, kawasan strategis pariwisata & ekonomi kreatif, terutama pada Bandar Udara Cut Nyak Dhien.	Kuala Pesisir	Perhubungan
23	Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan wilayah metropolitan, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan wilayah Lainnya baik Nasional maupun Internasional	Kuala Pesisir	Perhubungan
24	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Akselerasi pemanfaatan sumber daya energi baru dan terbarukan (termasuk mempertimbangkan pembangunan PLTN) sebagai sumber pembangkitan tenaga listrik.	Nagan Raya	Perekonomian
25	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Percepatan pengembangan jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) dan jaringan transmisi antarwilayah untuk mendukung peningkatan keandalan layanan ketenagalistrikan, kestabilan sistem, dan dekarbonisasi sumber tenaga listrik.	Nagan Raya	Perekonomian
26	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.	Nagan Raya	Perekonomian
27	Peningkatan produktivitas BUMD.	Pembentukan BUMD, peningkatan pengelolaan dan produktivitas BUMD dan Aset daerah	Nagan Raya	Perekonomian
28	Pembangunan jalan Kabupaten yang terkoneksi dengan jalan Provinsi dan Jalan Nasional untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik	Pembangunan Jalan Tol dalam Kabupaten Nagan Raya koneksi jalan tol Banda Aceh-Calang-Meulaboh-Sukamakmu-Blangpidie;	Nagan Raya	PUPR



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
29	Pembangunan Ekonomi Hijau	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia melalui proses penciptaan nilai tambah yang sebesar-besarnya.	Nagan Raya	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kekhususan Aceh
30	Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Aceh yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Identifikasi dan mendorong pengembangan sektor ekonomi unggulan Nagan Raya yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Nagan Raya	Pertanian, PUPR
31	Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah Aceh.	Investasi dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan sistem transportasi akan membuka aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Nagan Raya.	Nagan Raya	PUPR, Perhubungan
32	Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Aceh	Investasi dalam pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Aceh	Nagan Raya	Pendidikan dan Pelatihan, Ketenagakerjaan
33	Memberikan Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Aceh	Dukungan bagi UMKM dalam bentuk akses modal, pelatihan manajemen, pemasaran, dan pengembangan produk akan membantu meningkatkan kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Ketenagakerjaan
34	Meningkatkan promosi pariwisata Aceh baik di tingkat nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata juga harus diperhatikan	Meningkatkan promosi pariwisata Nagan Raya baik di tingkat Regional, nasional maupun internasional dengan menggarisbawahi potensi pariwisata alam, budaya, dan sejarahnya. Pembangunan infrastruktur pariwisata yang mendukung serta peningkatan kualitas layanan pariwisata	Nagan Raya	Kepariwisata, Kebudayaan



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
35	Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan ketertiban di wilayah Aceh. Ini melibatkan peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.	Menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan keamanan dan,peningkatan kerjasama antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas daerah.	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
36	Mendorong diversifikasi perekonomian Aceh dengan mengembangkan sektor- sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Mendorong diversifikasi perekonomian dengan mengembangkan sektor- sektor baru yang memiliki potensi pertumbuhan, serta mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu yang rentan terhadap fluktuasi pasar	Nagan Raya	Penanaman Modal, Pertanian, Perdagangan, Perindustrian, Kelautan dan Perikanan
37	Membangun budaya inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat Aceh dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Membangun inovasi dan kewirausahaan di kalangan masyarakat dengan mengadakan acara-acara, kompetisi, dan program edukasi yang mendorong kreativitas dan kolaborasi dalam menghasilkan solusi untuk tantangan lokal	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
38	Investasi dalam pembangunan infrastruktur,	Investasi dalam pembangunan infrastruktur,	Nagan Raya	Perencanaan Penanaman Modal, PUPR, Pengairan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Pangan
39	Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja	Pelatihan keterampilan, dan akses terhadap pasar yang lebih luas, meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan formal dan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualifikasi tenaga kerja	Nagan Raya	Ketenagkerjaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
40	Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal	Mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta koperasi lokal dapat membantu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat lokal serta pengembangan Koperasi Desa	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
41	Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi ke daerah tersebut. Investasi dalam sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Mengimplementasikan kebijakan dan insentif untuk menarik investasi sektor-sektor strategis seperti pariwisata, perkebunan, industri manufaktur, energi terbarukan, dan teknologi informasi dan komunikasi dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.	Nagan Raya	Penanaman Modal, Ketenagakerjaan
42	Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Mendorong kemitraan antara sektor publik dan swasta dalam pengembangan proyek-proyek ekonomi dan infrastruktur dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan investasi	Nagan Raya	Penanaman Modal, Ketenagakerjaan
43	Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.	Pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan industri terkaitnya, serta memberikan pendapatan tambahan bagi masyarakat lokal.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata
44	Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan	Pengembangan ekonomi berbasis komunitas seperti pertanian organik, kerajinan lokal, dan pariwisata berbasis masyarakat dapat membantu menciptakan lapangan kerja lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
45	Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.	Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru dan meningkatkan produktivitas sektor-sektor yang sudah ada.	Nagan Raya	Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pertanian Lingkungan Hidup, Kehutanan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
46	Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Mendukung pengembangan UMKM sebagai salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor formal dan memperluas kesempatan kerja.	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM



No	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembenagunan Kewilayahan	
47	Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat Aceh untuk lebih mandiri secara finansial.	Mendorong peningkatan pendapatan perkapita melalui kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang memungkinkan masyarakat untuk lebih mandiri secara finansial.	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
48	Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Aceh	Memberikan akses yang lebih mudah terhadap modal usaha dan teknologi bagi industri pengolahan di Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
49	Menjadikan Aceh sebagai Industri pariwisata Halal	Pengembangan Pariwisata Halal Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	Penanaman Modal, Kepariwisataaan, Kekhususan Aceh



Tabel 5.9.
Indikator Capaian Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi

No	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045						Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
			Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah										
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025	Sasaran 2045									
II	TRANSFORMASI EKONOMI																
2	Tranformasi Ekonomi	IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	11	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	5,17 – 5,19	6,94 – 7,11	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, jalan provinsi, perhubungan, pemerataan listrik, peningkatan produktivitas BUMA dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan IPTEK dan Inovasi, pengembangan BUMA	Perencanaan, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,69	24,69	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian, ekonomi biru, perikanan, perindustrian, tenaga kerja, pariwisata, jalan provinsi, perhubungan, pemerataan listrik, peningkatan produktivitas BUMA dan UMKM, koperasi, Industri Mikro, kecil dan menengah, peningkatan industri pengolahan, pengembangan pariwisata, ekonomi kreatif, kewirausahaan, usaha koperasi, membuka dan melatih tenaga peluang dan tenaga kerja, pengembangan	Perencanaan, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
				12	12	Pengembangan Pariwisata					12	Pengembangan Pariwisata					
						a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,69	2,87		Kebudayaan, Kepariwisataaan		a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*	1,69	2,87			Kebudayaan, Kepariwisataaan
						b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)*	11,73	29,33		Kebudayaan,		b) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	15	400			Kebudayaan,
				13	13	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%) Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (ie) yang sama				Kepariwisataaan	13	Persentase Usaha Sektor Ekonomi Kreatif (%)	53	85			Kepariwisataaan
				14	14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

No	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah									
					Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025			Sasaran 2045						
II	TRANSFORMASI EKONOMI																
						a) Proposi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	11,84	18,24		Koperasi dan UKM		a) Persentase UMKM yang Produktif (%)	53	85	IPTEK dan Inovasi, pengembangan BUMD	Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
						b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,67	4		Koperasi dan UKM		b) Persentase IKM (%)	4,6	44,6		Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
						c) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	1,67	4		Perindustrian dan Perdagangan		c) Persentase Industri Besar (%)	0,03	10,03		Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
						c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,33	6,8		Koperasi dan UKM		c) Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	2,1	5		Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
						d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	1,22	7,5		Koperasi dan UKM		d) Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	-	-		Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM	
						e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,92	4,82		Sekretariat Daerah		e) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	-	-		Sekretariat Daerah	
				15	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,7 – 5,5	3,5 – 4,5		Ketenagakerjaan	15	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,2 – 5,8	3,5 – 4,5		Ketenagakerjaan	
				16	16	Tingkat Partisipasi	52,8	62,7		Ketenagakerjaan	16	Tingkat Partisipasi	43	60		Ketenagakerjaan	



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

No	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045					
II	TRANSFORMASI EKONOMI															
						Angkatan Kerja Perempuan (%)						Angkatan Kerja Perempuan (%)				
				17	17	Tingkat Penguasaan IPTEK:					17	Tingkat Penguasaan IPTEK:				
						a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBA				Perencanaan		a) Presentase Dana untuk Inovasi dari APBK	0,069	2		Perencanaan
						b) Peringkat Inovasi Daerah	13	5		Perencanaan		b) Peringkat Inovasi Daerah	250	40		Perencanaan



5.2.2.2. Sasaran Pokok 5 : Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau melalui peningkatan porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, dan kebijakan ekonomi hijau lainnya dengan arah kebijakan:

Tabel 5.10.
Arah Kebijakan Penerapan Ekonomi Hijau

NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, <i>offsetting</i> , dan pajak karbon untuk pemulihan lingkungan hidup dan penurunan emisi karbon.	Nagan Raya	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Sosial, Perdagangan, Perindustrian, Tenaga Kerja, Pendidikan, ESD, Pertanian, Kelautan Perikanan dan pangan
2	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	Ekonomi hijau untuk memperkuat peningkatan produktivitas dan daya saing demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, keadilan, pemerataan, partisipasi rakyat dan efisiensi dalam pola pembangunan berkelanjutan	Nagan Raya	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Kekhususan Aceh
3	Memperkuat pengelolaan sumber daya alam Aceh yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Memperkuat pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, termasuk hutan, perairan, dan lahan pertanian, untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan dan ekonomi hijau.	Nagan Raya	Perencanaan, Lingkungan Hidup, Pertanian



Tabel 5.11.
Indikator Capaian Penerapan Ekonomi Hijau

No	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
II	TRANSFORMASI EKONOMI														
2	Tranformasi Ekonomi	I E 5	Penerapan Ekonomi Hijau	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau melalui meingkatkan porsi EBT dalam Bauran Energi Primer		18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau			Penerapan Ekonomi Hijau melalui meningkatkan porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	
					a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	63,58	87,21		Lingkungan Hidup		a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	-	-		Lingkungan Hidup
					b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	29,55	62,94		ESDM		b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)				Lingkungan Hidup, Sekretariat Daerah

5.2.2.3. Sasaran Pokok 6: Meningkatnya Transformasi Digital melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital

Tabel 5.12.
Arah Kebijakan Transformasi Digital

NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pekebun guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/ rekayasa/ teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani dan pekebun, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.	Nagan Raya	Pertanian, Komunikasi dan Informasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tenaga kerja.
2	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform.	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informasi, Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Tenaga kerja.
3	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan	Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Komunikasi dan Informasi

	berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.	berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif.		
4	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja	Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja	Nagan Raya	Perumahan dan Kawasan Permukiman, Komunikasi dan Informasi, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Perindustrian, Ketenagjerjaan, Kesehatan
5	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan akses digital (internet berkecepatan tinggi) untuk mendukung percepatan transformasi digital.	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
6	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Percepatan transformasi digital sektor prioritas (publik dan komersial).	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
7	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Peningkatan kapasitas faktor pemampu transformasi digital.	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
8	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.	Nagan Raya	Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Ketenagkerjaan, Pertanian , Komunikasi dan Informasi
9	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis, serta perluasan pasar dan jaminan pemasaran produk UMKM.	Nagan Raya	Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM, Keperiwisataan dan Kebudayaan, Ketenagkerjaan, Pertanian , Komunikasi dan Informasi
10	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital di Aceh.	Menetapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pengembangan riset dan inovasi serta teknologi digital	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
11	Meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan (R&D) melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian, universitas, dan sektor swasta.	Meningkatkan investasi, riset, pengembangan dan Inovasi Daerah melalui anggaran pemerintah, kerjasama dengan lembaga penelitian/ lembaga lainnya, universitas, dan sektor swasta.	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
12	Membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	membangun infrastruktur penelitian dan inovasi seperti laboratorium riset, pusat inovasi, dan ruang kerja bersama untuk mendorong kolaborasi antara peneliti, pelaku industri, dan masyarakat sipil dalam menghasilkan solusi inovatif.	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan

13	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, dan organisasi non-pemerintah dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, universitas, perusahaan swasta, organisasi non-pemerintah dan pihak terkait lainnya dalam mengembangkan riset dan inovasi,	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
14	Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Mendorong perkembangan ekosistem startup dan inovasi di Aceh dengan memberikan dukungan kepada perusahaan startup, ruang kerja bersama, inkubator bisnis, dan akses ke modal dan mentorship.	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
15	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam berbagai sektor ekonomi dan pelayanan publik.	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
16	penerapan e-government, e-commerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	Penerapan egovernment, ecommerce, dan pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk memecahkan masalah lokal.	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
17	Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi-institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.	Mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang riset dan teknologi melalui pelatihan, beasiswa riset, dan pertukaran ilmiah dengan institusi- institusi riset dan universitas lainnya baik di dalam maupun di luar negeri.	Nagan Raya	Perencanaan, Pendidikan dan Pelatihan
18	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan Aceh	Mendorong kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga riset dalam mengembangkan industri pengolahan	Nagan Raya	Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



Tabel 5.13.
Indikator Capaian Transformasi Digital

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045			Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	IUP RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN		
			Indikator	Target Daerah				Indikator	Target Daerah						
				Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045					
II	TRANSFORMASI EKONOMI														
3	Tranformasi Ekonomi	I E 6	Transformasi Digital	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,3	Transformasi Digital melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusi nya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital	Komunikasi, Informasi	19	Indeks Daya Saing Daerah	3,15	4,50	Transformasi Digital melalui peningkatan kapasitas dan akses informasi petani, nelayan, petambak, pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan, Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusi nya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital, industrialisasi koperasi, proses bisnis UMKM secara digital	Komunikasi, Informasi

5.2.2.4. Sasaran Pokok 7 : Meningkatnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyediaan produk pertanian yang berpotensi pasar global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik yang andal, peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistik, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata rantai global, Kerja sama global, dengan arah kebijakan:

Tabel 5.14.
Arah Kebijakan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Trnsformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Pengembangan kemitraan petani dan pekebun dan stakeholder lainnya, Peningkatan kapasitas produksi, penguatan kapasitas SDM petani/pekebun dan Pengelolaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian/ perkebunan unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.	Nagan Raya	Perrrtanian, Perkebunan
2	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkertaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, pelabuhan, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi), termasuk LRT dan MRT	Nagan Raya	PUPR, Perhubungan, Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM
3	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/peningkatan dry port untuk KA logistik), terutama pada ruas Banda Aceh- Lhokseumawe-Medan.	Pembangunan dan/atau peningkatan sarana dan prasarana kereta api (termasuk pembangunan/ peningkatan dry port untuk KA logistik)	Nagan Raya	PUPR, Perhubungan
4	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Afirmasi 3TP dengan pelabuhan-pelabuhan utama, terutama dari Simeulue.	Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah yang menghubungkan Kabupaten Nagan Raya dengan pelabuhan dan Pusat Pertumbuhan lainnya	Nagan Raya	Perencanaan, Perhubungan
5	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI yang berdaya saing di tataran global	Nagan Raya	Perencanaan



NO	RPJP ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Trnasformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
6	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha, pembangunan dan Revitalisasi Pasar (termasuk pasar tradisional) menuju pasar modern.	Nagan Raya	Perindustrian Perdagangan, Koperasi dn UKM, Komunikasi dan Informasi
7	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional seperti IMT-GT maupun kerja sama internasional lainnya.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama antar Kabupaten, kerja sama dengan Provinsi Aceh/ provinsi lainnya, nasional dan kerjasama luar negeri.	Nagan Raya	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian Kebudayaan, Pariwisata, Ketenagakerjaan
8	Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah (Pasal 9 UUPA ayat 1)	Peningkatan kerjasama dengan lembaga atau badan di dalam negeri maupun di luar negeri kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat	Nagan Raya	Perencanaan, Setda
9	Investasi dalam infrastruktur logistik seperti pelabuhan, bandara, dan jaringan transportasi darat untuk memperbaiki konektivitas dan kemudahan akses bagi industri pengolahan.	Pengembangan Bandara Cut Nyak Dhien serta Pembangunan/ Pengembangan Pelabuhan Laut/Pelabuhan Samudra/ Pelabuhan Internasional/Multi Purpose Port untuk meningkatkan konektivitas baik domestik maupun global	Nagan Raya	Perencanaan, Perhubungan, PUPR
10	Mendorong diversifikasi produk- produk industri pengolahan Aceh dan mencari pasar ekspor yang baru	Mendorong diversifikasi produk- produk industri pengolahan dan mencari pasar yang lebih luas baik dalam negeri ataupun luar negeri.	Nagan Raya	Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
11	Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan Aceh untuk memenuhi persyaratan pasar ekspor.	Meningkatkan kualitas dan standarisasi produk industri pengolahan untuk memenuhi persyaratan pasar domestik maupun global	Nagan Raya	Perencanaan, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
12	Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama	Mengembangkan kawasan industri dan pusat produksi khusus yang dilengkapi dengan infrastruktur dan fasilitas pendukung bagi industri pengolahan. Membangun jejaring dan kerjasama	Nagan Raya	Perencanaan, Penanaman Modal, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



Tabel 5.15.
Indikator Capaian Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

NO	Misi	Arah Pembanguna n		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025		Sasaran 2045					
II	TRANSFORMASI EKONOMI														
2	Tranformasi Ekonomi	I E 7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	6,17	4,33	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyedian produk pertanian yang berpotensi pasar global,	Perindustrian dan Perdagangan	20	Indeks Harga Konsumen	-	-	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global melalui penyedian produk pertanian yang berpotensi pasar	Perindustrian, Perdagangan
				21	Pembentuka n Modal Tetap Bruto (% PDRB)	31,0	30,8	global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal,	Perencanaan	21	Pembentuka n Modal Tetap Bruto (% PDRB)		30,8	global, penyediaan infrastruktur transportasi dan logistic yang andal,	Perencanaan
				22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,0	9,3	peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistic, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata ratai global, Kerjasama global	Perindustrian dan Perdagangan	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	6,0	9,3	peningkatan kualitas dan kuantitas layanan logistic, penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK, keterkaitan UMKM pada mata ratai global, Kerjasama global	Perindustrian dan Perdagangan

5.2.2.5. Sasaran Pokok 8 : Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerja sama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana kota, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.

Tabel 5.16.
Arah Kebijakan Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

No.	RPJPA ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan	Penguatan infrastruktur perkotaan/ perdesaan dan pengelolaan kawasan perkotaan/ perdesaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan/ perdesaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan, serta peningkatan sarana dan prasaran di lokasi transmigrasi.	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Perencanaan, pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi
2	Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.)	Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan/ perdesaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb.) serta pembangunan/ pengembangan kawasan perdesaan sesuai dengan karakteristik wilayah perdesaan.	Nagan Raya, khususnya Seunagan, Kuala, Darul Makmur, Suka Makmue	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Masyarakat, Perhubungan
3	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan.	Nagan Raya	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
4	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan/ perdesaan	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular</i>	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular</i>	Nagan Raya	Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No.	RPJPA ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	economy pada kawasan perkotaan.	economy pada kawasan perkotaan.		
6	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan.	Nagan Raya, khususnya Suka Makmue, Tadu Raya, Tripa Makmur, Beutong	Komunikasi dan Informasi
7	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik massal rendah emisi berbasis rel dan/atau jalan yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan.	Nagan Raya, khususnya Kuala, Suka Makmue	Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
8	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan.	Nagan Raya	Perhubungan, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
9	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan.	Nagan Raya	Pemerintahan , Perekonomian
10	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity kota</i> , sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata urban tourism, terutama pada kawasan perkotaan.	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi, Kebudayaan, Pariwisata Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
11	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam (termasuk hutan dan habitat hewan liar), wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata
12	Pembangunan jalan provinsi yang terkoneksi dengan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.	Pembangunan jalan kabupaten yang terkoneksi dengan Jalan Provinsi, Jalan Nasional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan.	Nagan Raya	PUPR
13	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.	Nagan Raya, khususnya Suka Makmue, Seunagan, Darul Makmur	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



No.	RPJPA ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
14	Peningkatan jumlah desa mandiri	Membangun Desa Inklusif dan meningkatkan jumlah desa mandiri	Nagan Raya	Pemberdayaan Masyarakat
15	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber pendapatan alternatif yang dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor ekonomi lainnya.	Nagan Raya	Kepariwisata
16	Mendorong pengembangan industri kreatif seperti seni dan kerajinan, musik, dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.	Mendorong pengembangan industri kreatif seperti seni dan kerajinan, musik, dan kuliner lokal sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional.	Nagan Raya	Kepariwisata, Perindustrian, perdagangan Koperasi dan UKM
17	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Aceh untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi	Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah Aceh untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan peluang ekonomi	Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
18	Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.	Meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun pedesaan, termasuk jaringan jalan, transportasi umum, air bersih, sanitasi, listrik, dan telekomunikasi, mendorong pengembangan kawasan ekonomi khusus di daerah perkotaan dan pedesaan yang memiliki potensi untuk pertumbuhan ekonomi yang cepat.	Nagan Raya	Penanaman Modal
19	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.	Mendukung pengembangan sektor ekonomi lokal di perkotaan dan pedesaan yang sesuai dengan potensi dan keunggulan daerah.	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
20	Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar.Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk memberikan akses mudah terhadap layanan	Memberikan dukungan kepada UMKM di perkotaan dan pedesaan melalui penyediaan akses modal, pelatihan keterampilan, bantuan teknis, dan promosi pasar.Mengembangkan pusat-pusat pelayanan dan perdagangan di perkotaan dan pedesaan untuk	Nagan Raya	Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM



No.	RPJPA ACEH 2025-2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.	memberikan akses mudah terhadap layanan kesehatan, pendidikan, perbankan, dan kebutuhan konsumen lainnya.		
21	Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa- desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.	Mendorong pengembangan pariwisata berkelanjutan di kota-kota dan desa- desa yang memiliki potensi wisata alam, budaya, dan sejarah. Pengembangan pariwisata akan menciptakan peluang ekonomi baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata
22	Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.	Memberikan dukungan teknis dan pendampingan kepada pengusaha lokal, petani, dan kelompok masyarakat lainnya di perkotaan dan pedesaan dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan produktivitas.	Nagan Raya	Pertanian
23	Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Meningkatkan penyediaan fasilitas dan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sanitasi di perkotaan dan pedesaan.	Nagan Raya	Pendidikan, Kesehatan, Perhubungan, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Tabel 5.17.
Indikator Capaian Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
			Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah								
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025			Sasaran 2045					
II															
TRANSFORMASI EKONOMI															
2	Tranformasi Ekonomi	I E 8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Menjadikan perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan		23	Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan			Menjadikan perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi melalui	
					a) Proposi kontribusi PDRB Wilayah Kota Terhadap Propinsi (%)	20.5-22.5	29.5-32.5	Ekonomi melalui penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerjasama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan	Bappeda		a) Proposi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten Terhadap Propinsi (%)	20.5-22.5	29.5-32.5	penguatan infrastruktur kota dan kawasan perkotaan, kerjasama antar wilayah, infrastruktur air baku, ketahanan bencana kota,	Bappeda
					b) Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)	73	100	bencana kota, pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet	Perkim		b) Jumlah Rumah layak Huni yang ditangani (unit)	500	3.000	pengembangan sistem pengelolaan sampah, akses internet berkecepatan tinggi, transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, penyediaan	Perkim
					c1) Persentase Desa Mandiri	6,15	26	berkecepatan tinggi,	DPMG		c) Persentase Desa Mandiri	10	37,39		DPMGP4



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
					c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,67	0,86	transportasi masal, Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, penyediaan infrastruktur energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.	DPMG		c2) Rerata Indeks Desa Membangun	0,70	0,86	infrastruktur energi rendah emisi, daya tarik wisata kota, jalan perkotaan, penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau.	DPMGP4

5.2.3 Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, Berintegritas dan Profesional

Transformasi Tata kelola difokuskan pada penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi daerah, peningkatan kualitas ASN berbasis sistem merit, peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengawasan pelaksanaan pembangunan, penguatan inovasi tata kelola pemerintahan daerah, penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, peningkatan partisipasi publik dalam program pembangunan, penguatan sistem pengawasan partisipatif dalam program pembangunan, Pencegahan dan Pengendalian Korupsi, digitalisasi pelayanan publik, dan penguatan pemerintahan kabupaten dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Transformasi Tata kelola melalui kelembagaan pemerintahan yang kolaboratif, peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan ASN, percepatan reformasi birokrasi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan prinsip BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), optimalisasi partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan kesinambungan program pembangunan Kabupaten Nagan Raya, penyederhanaan regulasi, optimalisasi kerja sama antar-lembaga, perguruan tinggi dan elemen masyarakat. Transformasi dari sistem manual ke sistem digital dalam segala aspek pelaksanaan pemerintahan, percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi dan kolusi. Peningkatan jumlah adopsi hasil-hasil riset dan inovasi daerah dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Transformasi Tata kelola dititik beratkan pada terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang adaptif, SDM ASN yang kompetitif dan profesional melalui optimalisasi sistem meritokrasi, penerapan total sistem pemerintahan berbasis teknologi informasi termasuk pada pusat pelayanan terpadu satu pintu, dan pengembangan sistem pengawasan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih bebas dari korupsi dan kolusi, kemandirian masyarakat dalam berbagai sektor. Transformasi Tata kelola difokuskan pada tercapainya regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

5.2.3.1. Sasaran Pokok 9 : Meningkatkan Reformasi Tata Kelola melalui peningkatan Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi, dengan arah kebijakan:



Tabel 5.18.
Arah Kebijakan Reformasi Tata Kelola

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Fokus Kewilayahan	
1	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di provinsi Aceh dan penguatan regulasi otonomi khusus Aceh	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Kabupaten Nagan Raya	Kabupaten Nagan Raya	Sekretariat Daerah, Sekrtariat DPRD
2	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil, terutama perempuan, anak, disabilitas, kelompok rentan dan masyarakat adat terpencil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	Kabupaten Nagan Raya	Perencanaan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Sosial, Kekhususan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Inspektorat Daerah
3	Percepatan digitalisasi pelayanan publik keterbukaan iinformasi publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan.	Percepatan digitalisasi pelayanan publik, keterbukaan informasi publik dan peningkatan respons terhadap laporan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemerintahan, terutama bidang pengadaan Barang dan Jasa terutama yang berkaitan dengan fungsionalisasi dan berbasis kebutuhan, termasuk peningkatan pengelolaan layan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pengelolaan edan pemanfaatan data kependudukan berbasis digital.	Kabupaten Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi, Kependudukan dan pencatatan Sipil Kepegawaian, Inspektorat Daerah, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Setdakab
4	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Aceh, Efisiensi dan efektifitas belanja birokrasi	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Nagan Raya, Efisiensi dan efektivitas belanja birokrasi	Kabupaten Nagan Raya	Kepegawaian, Setda, Pendidikan dan Pelatihan
5	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Aceh, menuju penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, menuju penyelenggaraan pemerintahan Nagan Raya yang profesional dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme	Kabupaten Nagan Raya	Inspektorat Daerah, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Setda
6	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE dan keamanan informasi untuk penguatan aspek pemerintahan digital	Kabupaten Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi, Penanaman Modal, Inspektorat Daerah



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Fokus Kewilayahan	
7	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.	Kabupaten Nagan Raya	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Inspektorat Daerah
8	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat, harmonisasi partai lokal dan partai nasional serta lembaga demokrasi lainnya	Kabupaten Nagan Raya	Kesbangpol, Setda
9	Penguatan tapal batas wilayah administrasi Provinsi Aceh	Penguatan tapal batas wilayah administrasi Kabupaten, Kecamatan dan Gampong	Kabupaten Nagan Raya	Setda
10	Meningkatkan peran dan fungsi budgeter, legislasi dan pengawasan DPRA serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan UUPA (Pasal 23 UUPA)	Meningkatkan peran dan fungsi budgeting, legislasi dan pengawasan DPRK serta fungsi fungsi lain yang sudah ditetapkan.	Kabupaten Nagan Raya	Sekretariat DPRD
11	Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Aceh untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan (Pasal 23 UUPA)	Meningkatkan kepatuhan kepada seluruh pihak, terutama lembaga pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjalankan amanah dari setiap dokumen perencanaan	Kabupaten Nagan Raya	Perencanaan dan Sekretariat DPRD
12	Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Aceh terutama Qanun sesuai dengan semangat otonomi Aceh (Pasal 223 UUPA)	Memperkuat sistem pembentukan peraturan pemerintahan di Kabupaten Nagan Raya terutama Qanun Kabupaten sesuai dengan semangat otonomi Aceh	Kabupaten Nagan Raya	Setda dan Sekretariat DPRD
13	Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.	Meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya publik, termasuk anggaran dan kontrak pemerintah.	Kabupaten Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi, Pengawasan
14	Memperkuat lembaga pengawasan dan pengendalian Inspektorat Aceh dan Bappeda Aceh untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.	Memperkuat lembaga perencanaan, pengawasan dan pengendalian untuk memastikan penggunaan sumber daya publik sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.	Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan
15	Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Meningkatkan pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak korupsi dan pelanggaran etika oleh pejabat pemerintah.	Kabupaten Nagan Raya	Setda
16	Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal	Melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi pegawai pemerintah dalam hal etika, integritas, dan	Kabupaten Nagan Raya	Pendidikan dan Pelatihan



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Fokus Kewilayahan	
	etika, integritas, dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.	penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik.		
17	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan dan pengelolaan pemerintahan.	Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan
18	Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Mengimplementasikan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi untuk memperbaiki efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi pemerintahan	Kabupaten Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi
19	Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Aceh untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Membangun komitmen kuat dari pemimpin pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas pemerintahan	Kabupaten Nagan Raya	Pengawasan
20	Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Penguatan sistem data terpilah dan terpadu yang terintegrasi	Kabupaten Nagan Raya	Komunikasi dan Informasi, Perencanaan



Tabel 5.19.
Indikator Capaian Reformasi Tata Kelola

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKTOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
			Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
				Baseli ne 2025	Sasaran 2045					Baseline 2025	Sasaran 2045				
III	TRANSFORMASI TATA KELOLA														
3	Tranformasi Tata Kelola	IE9	Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif	24	Indeks Reformasi Hukum	39.93	65.93	Reformasi tata Kelola dan perkuatan otonomi Aceh melalui Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi, dengan arah kebijakan	Sekretariat Daerah	24	Indeks Reformasi Hukum	66,08	90	Reformasi tata Kelola dan perkuatan otonomi Aceh melalui Regulasi dan Tata Kelola Yang Berintegritas dan Adaptif, partisipasi bermakna masyarakat sipil, digitalisasi pelayanan publik, Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur, penguatan tata Kelola, pengembangan karir ASN, penguatan demokrasi, dengan arah kebijakan	Sekretariat Daerah
				25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.76 (2022)	5		Komunikasi, Informasi dan Statistik	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2.94			Komunikasi, Informasi dan Statistik
				26	Indeks Pelayanan Publik	4.01 (2022)	5		Sekretariat Daerah	26	Indeks Pelayanan Publik	4.01	5		Sekretariat Daerah
				27	Indeks Integritas Nasional	70.2	84.56		Pengawasan	27	Indeks Integritas Nasional	70.2	84.56		Pengawasan

5.2.4 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Nagan Raya yang Islami, Aman, Damai dan Demokratis

Implementasi syariat Islam secara menyeluruh dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat terutama Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak, penguatan regulasi terkait Syariat Islam, optimalisasi peran ulama, peningkatan kualitas pendidikan dayah, penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi kriminalitas, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan stabilitas keamanan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan Indeks Kebudayaan dan menjaga kearifan lokal serta melestarikan adat istiadat lokal Nagan Raya, penguatan kemandirian fiskal daerah. Percepatan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang islami melalui meningkatkan kualitas kehidupan beragama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam bidang pelaksanaan Syariat Islam, optimalisasi fungsi lembaga pendidikan dayah/pesantren, optimalisasi peran dan fungsi masjid dalam pelaksanaan kehidupan beragama, peningkatan pengawasan pelaksanaan Qanun Syariat Islam, penguatan peran ulama, dan pengkaderan yang berkelanjutan. Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menekan angka kriminalitas, meningkatkan ketertiban umum, penguatan perdamaian Aceh, peningkatan kualitas kelembagaan pemerintah Daerah, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, percepatan kemandirian fiskal daerah.

Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang Islami melalui peningkatan implementasi syariat Islam dalam kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terjaminnya rasa aman, penguatan perdamaian Aceh yang semakin berkualitas, perlindungan Hak asasi Manusia dan kebebasan sipil, kesetaraan warga negara dalam semua aspek terutama hukum dan pemerintahan, mewujudkan kemandirian fiskal daerah

Pelaksanaan Syariat Islam secara kafah melalui implementasi nilai-nilai syariat Islam dalam seluruh sendi kehidupan masyarakat dengan nuansa keislaman yang tercermin dari sehari-hari kehidupan masyarakat sehari-hari baik dari segi akidah, syariah, maupun akhlak, penguatan karakter akhlak mulia, peradaban dan suri teladan, terwujudnya kemandirian dayah, (secara ekonomi, manajemen, tata kelola, infrastruktur), berkembangnya pariwisata halal berbasis kearifan lokal, terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat, semakin berkualitasnya perdamaian Aceh, tercapainya kemandirian fiskal daerah.

5.2.4.1. Sasaran Pokok 10 : Menguatnya Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang Tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung keamanan dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah.



Tabel 5.20.
Arah Kebijakan Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial

NO	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Kabupaten Nagan Raya	Melaksanakan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi untuk korban konflik di Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	Kesehatan, Sosial, Perdagangan, perindustrian, Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana, Kelautan dan perikanan, Pendidikan Pertanian, Pertanahan, Kesbangpol, PUPR, Pendidikan dan pelatihan, Tenaga Kerja, Kekhususan
2	Memperkuat otonomi Aceh	Dukungan Penguatan otonomi Aceh	Nagan Raya	Sekretariat DPRD, Setda, Pertanahan
3	Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olah raga internasional (Pasal 9 UUPA)	Meningkatkan partisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya (termasuk budaya tradisional), dan olah raga baik tingkat Provinsi, Nasional maupun Internasional.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
4	Peningkatan keamanan dan penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>	Peningkatan keamanan dan koordinasi penegakan hukum, serta pengawasan di wilayah perairan laut terhadap <i>illegal fishing</i>	Nagan Raya	Kelautan dan Perikanan, Setda
5	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, LSM funding dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.	Nagan Raya	Keuangan, Perencanaan, Lingkungan Hidup, Penanaman Modal, Setda
6	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH dan Pengamanan hutan	Peningkatan kuantitas dan kualitas ketertiban umum terutama peran Satpol PP dan WH termasuk Penguatan Regulasi terkait ketertiban dan Ketentraman Umum.	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Lingkungan Hidup, Kehutanan
7	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi	Peningkatan kuantitas dan kualitas Demokrasi serta pembinaan organisasi sosial kemasyarakatan.	Nagan Raya	Kesbangpol



NO	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
8	Meningkatkan peran dan fungsi KIP Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Pasal 56 dan Pasal 60 UUPA)	Meningkatkan peran dan fungsi KIP Nagan Raya dan Panitia Pengawas Pemilihan Nagan Raya	Nagan Raya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
9	Memantapkan sistem pemilihan langsung Aceh (Pasal 65 UUPA)	Memantapkan sistem pemilihan langsung Aceh/ Nagan Raya	Nagan Raya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
10	Memperkuat partai politik lokal Aceh (Pasal 75 UUPA)	Memperkuat partai politik lokal Aceh	Nagan Raya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
11	Memperkuat pelaksanaan dan implemetasi Hak Azazi Manusia (Pasal 227 UUPA)	Memperkuat pelaksanaan dan implementasi Hak Asasi Manusia	Nagan Raya	Kesbangpol dan Sekretariat DPRD
12	Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan propinsi	Memperkuat pemerintahan mukim dan gampong sesuai dengan kewenangan menuju gampong mandiri dan inklusif	Nagan Raya	Penanaman Modal, Kekhususan
13	Memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	Memperkuat implementasi hukum dan peraturan yang berkaitan dengan otonomi khusus Aceh, termasuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.	Nagan Raya	Setda dan Sekretariat DPRD
14	Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan di Aceh dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan otonomi khusus.	Meningkatkan kapasitas institusi pemerintahan dalam mengelola urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah sesuai dengan otonomi khusus.	Nagan Raya	Pendidikan dan Pelatihan
15	Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi Aceh serta memperhitungkan aspek- aspek otonomi khusus.	Mengembangkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek yang berorientasi pada kebutuhan dan potensi serta memperhitungkan aspek- aspek otonomi khusus.	Nagan Raya	Perencanaan
16	Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.	Menyusun qanun yang mendukung implementasi otonomi khusus Aceh di Kabupaten Nagan Raya dan menjaga konsistensi dengan hukum nasional.	Nagan Raya	Setda dan Sekretariat DPRD
17	Mendorong partisipasi aktif masyarakat Aceh dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan otonomi khusus.	Nagan Raya	Perencanaan



Tabel 5.21.
Indikator Capaian Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 - 2045			Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	IUP RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
			Indikator	Target Daerah				Indikator	Target Daerah					
				Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
IV	KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH													
4	Hukum Berkeadilan yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial (nomenklatur dapat disesuaikan)	IE 10	Perkuatan Otonomi Aceh, Perdamaian, Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial	Jumlah peraturan pelaksana UUPA yang sudah diterbitkan dengan yang dibutuhkan	34,78	100	Perkuatan Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung kemandirian dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah.	Sekretariat Daerah	28	Jumlah peraturan daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan UUPA yang sudah diterbitkan	2	10	Perkuatan Perdamaian dan Perkuatan Otonomi Aceh, Ketertiban dan Ketentraman yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial melalui perkuatan mitigasi konflik dan menuntaskan intervensi terhadap korban konflik, perkuatan otonomi Aceh, mendukung kemandirian dan penegakan hukum perbatasan, peningkatan kapasitas fiskal daerah.	-
				Persentase korban konflik yang mendapatkan	28,99	95		Perdamaian Aceh		Persentase korban konflik yang mendapatkan	28,99	95		Perdamaian Aceh



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 - 2045			Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	IUP RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah				Indikator	Target Daerah				
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045			
				pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial					pemberdayaan ekonomi dan rehabilitasi sosial					
				Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17 (2020)	78.55		Ketentraman, Ketertibasn Umum dan Perlindungan Masyarakat	29	Proposi Penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	61.17		78.55	Ketentraman, Ketertibasn Umum dan Perlindungan Masyarakat
				Indeks Demokrasi Indonesia	Tinggi	Tinggi		Kesatuan Bangsa dan Politik	30	Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu	Tinggi (89%)		Tinggi (95%)	Kesatuan Bangsa dan Politik



5.2.4.2. Sasaran Pokok 11 : Meningkatnya Stabilitas Ekonomi Makro melalui penguatan pengendalian inflasi, peningkatan produktivitas, peningkatan pajak daerah, stabilitas sektor keuangan daerah, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit.

Tabel 5.22.
Arah Kebijakan Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Penguatan pengendalian inflasi daerah.	Nagan Raya	Setda, Perdagangan, Perindustrian
2	Peningkatan Pajak Daerah (<i>Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster</i>)	Peningkatan Pajak Daerah (<i>Intensifikasi, ekstensifikasi, dan Fiscal Cadaster</i>) serta Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk pembentukan dan pengelolaan BUMD yang profesional dan berintegritas.	Nagan Raya	Keuangan
3	Meningkatkan kemandirian fiskal Aceh dan pendalaman keuangan	Meningkatkan kemandirian fiskal dan pendalaman keuangan	Nagan Raya	Setda, Keuangan
4	Peningkatan kredit untuk masyarakat	Peningkatan kredit dan akses permodalan lainnya untuk Masyarakat	Nagan Raya	Setda, Perindustrian Perdagangan, Kopertasi dan UKM
5	Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Aceh dan dananya tetap dikelola oleh perusahaan (Pasal 159 UUPA)	Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha pertambangan menyiapkan dana pengembangan masyarakat, paling sedikit 1% (satu persen) dari harga total produksi yang dijual setiap tahun yang dibahas bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya	Nagan Raya	Perencanaan
6		Meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha yang berkaitan dengan pengelolaan Sumber Daya Alam lainnya baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menyiapkan dana pengembangan masyarakat, dengan besaran dana yang dibahas dan disepakati bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai ketentuan perundang-undangan.	Nagan Raya	Perencanaan
7	Melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	Melakukan diversifikasi sumber pendapatan daerah di luar transfer dari pemerintah pusat	Nagan Raya	Keuangan



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
8	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam Aceh secara optimal dan berkelanjutan	Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan berkelanjutan	Nagan Raya	Keuangan
9	Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	Memperkuat pengumpulan pajak dan retribusi daerah dengan melakukan reformasi perpajakan, peningkatan administrasi pajak, dan penegakan hukum terhadap pajak yang tidak dibayar.	Nagan Raya	Keuangan
10	Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Melakukan pengelolaan keuangan yang efisien dan transparan untuk mengoptimalkan alokasi anggaran dan meminimalkan pemborosan.	Nagan Raya	Keuangan
11	Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Mendorong pengembangan sistem perekonomian daerah yang mandiri dengan meningkatkan investasi, kewirausahaan, dan daya saing sektor-sektor ekonomi lokal.	Nagan Raya	Keuangan, Perencanaan
12	Membangun kerjasama dan sinergi antara kabupaten/kota di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Membangun kerjasama dan sinergi dengan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota lainnya di Aceh untuk memperkuat kemandirian fiskal secara bersama-sama.	Nagan Raya	Setda, Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian, Kop- UKM, Kelautan dan Perikanan
14	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di Aceh dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bidang keuangan, perpajakan, dan pengelolaan sumber daya alam. Pelatihan dan pendidikan yang berkualitas akan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah dalam mengelola fiskal daerah secara efektif.	Nagan Raya	Keuangan, Pendidikan dan Pelatihan
15	Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif di Aceh	Menggalakkan promosi investasi dan pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan insentif bagi investor, mendorong kemitraan publik-swasta, serta mendukung pengembangan UMKM dan industri kreatif	Nagan Raya	Penanaman Modal, Perdagangan, Perindustrian Kop- UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan



Tabel 5.23.
Indikator Capaian Peningkatan Stabilitas Ekonomi Makro

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045					
IV	KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH															
4	Hukum Berkeadilan, keamanan nasional yang tangguh, dan Demokrasi Subtansial (nomenklatur dapat disesuaikan)	IE 11	Stabilitas Ekonomi Makro (nomenklatur dapat disesuaikan)	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2	1,4	Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan pengendalian inflasi, peningkatan pajak daerah, sabilitas sektor keuangan daerahh, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit.	Keuangan	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,2	1,4	Peningkatan stabilitas ekonomi makro melalui penguatan pengendalian inflasi, peningkatan pajak daerah, sabilitas sektor keuangan daerahh, dan mudahnya masyarakat mendapatkan akses kredit.	Keuangan	
				32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 – 3,4	0,8 – 2,7		Sekretariat Daerah	32	Tingkat Inflasi (%)	2,5 – 3,5	1,5 – 2,5		Sekretariat Daerah	
				33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
					a) Total Dana Pihak	18,9	59,2		Keuangan		a) Total Pembiayaan /PDRB (%)	18,9	59,2		Keuangan	



RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 - 2045

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
					Ketiga/P DRB (%) *										
					b) Aset Dana Pensiun/ PDRB (%)	0,43	0,86		Perencanaan	b) Total Investasi /PDRB (%)	0,43	0,86	Perencanaan		
					c) Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan *	1.251,30 b)	6.861,28 b)		Sekretariat Daerah						
					d) Total Kredit/P DRB (%)	18,1	55,9		Sekretariat Daerah	d) Total Kredit/PDRB (%)	18,1	55,9	Sekretariat Daerah		
				34	Inklusi Keuangan (%)	94,91	99,07		Sekretariat Daerah	34 Jumlah Rekening Per Jumlah Penduduk (%)	94,91	99,07	Sekretariat Daerah		

5.2.4.3. Sasaran Pokok 12 : Meningkatnya Implementasi Syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak al quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal.

Tabel 5.24.
Arah Kebijakan Peningkatan Implementasi Syariat Islam

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah di Aceh dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Aceh	Pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak Al Quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah dengan memperkuat koordinasi antar lembaga, sarana dan prasarana lembaga keuangan syariah untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten Nagan Raya, Peningkatan Kader Dakwah, Penguatan LPTQ dan Lembaga Pendidikan Islami, Organisasi Keislaman serta sarana dan prasarana peribadatan islam.	Nagan Raya	Kekhususan, Pendidikan, Setda, Koperasi dan UKM, dan Komunikasi dean Informasi
2	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah melalui peningkatan kualitas wilayahul hisbah, APH (Aparat Penegak Hukum) pembinaan dan pengawasan terhadap implementasi pelaksanaan Syariat Islam	Nagan Raya	Kekhususan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Setda
3	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan wakaf dan harta agama lainnya di Baitul Mal melalui sosialisasi dan pembangunan sistem yang terpadu dalam pengumpulan zakat, dan produksi dalam penyalurannya serta bukan hanya bertumpu kepada muzakki ASN namun juga masyarakat luas.	Nagan Raya	Kekhususan, Komunikasi dan Informasi
4	Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.	Mengarahkan ZISWAF untuk pemberdayaan ekonomi yang lebih produktif dan penanganan korban kekerasan yang dialami masyarakat miskin, stunting.	Nagan Raya	Kekhususan, Komunikasi dan Informasi



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045	Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045	Pembangunan Kewilayahan	
5	Mutu dan kemandirian dayah, peningkatan mutu dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Peningkatan Mutu dan kemandirian dayah melalui manajemen yang profesional, pemberdayaan sumber daya ekonomi dayah.	Nagan Raya	Pendidikan, Ketenagkerjaan, Perindustrian, Koperasi dan UKM, Pertanian, Kelautan dan Perikanan
6	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Pengembangan Dayah Vokasi di wilayah sentra dayah	Nagan Raya	Pendidikan, Ketenagkerjaan, Pertanian
7	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Penguatan peran dan fungsi ulama dalam kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan.	Nagan Raya	Kekhususan
8	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Penguatan pelaku usaha UMKM produk halal melalui sertifikasi yang terintegrasi/terpadu.	Nagan Raya	Kekhususan, Perindustrian, Koperasi dan UKM



Tabel 5.25.
Indikator Capaian Peningkatan Implementasi Syariat Islam

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	IUP RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
IV	KEAMANAN YANG TANGGUH, DEMOKRASI SUBTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH														
	Dinul Islam	IE12	Syariat Islam	35	Indeks Pembangu nan Syariat	80,00 - 87,00	90,00 - 95,00	Peningkatan Implementasi Syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak al quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal.	Keitimewaan Aceh	35	Indeks Pembangunan Syariat	83,89	89	Peningkatan Implementasi Syariat Islam melalui pembinaan aqidah, akhlak, penguatan peran dan fungsi masjid, pendidikan Islami dan kemandirian dayah, meleak al quran, mengoptimalkan konversi dan peran lembaga keuangan syariah, Kepatuhan, kesadaran dan penegakan terhadap peraturan hukum Syariat Islam terutama 10 (sepuluh) jarimah, Kepatuhan membayar zakat, Infaq dan sadaqah, mutu kemandirian dayah, penguatan peran dan fungsi ulama dan produk halal.	Keitimewaan Aceh
				36	Persentase dayah yang mandiri	44,00	95		Keitimewaan Aceh, Pendidikan	36	Persentase Dayah yang Mandiri	12	75		Keitimewaan Aceh, Pendidikan

5.2.5 Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

Difokuskan pada peningkatan kemantapan Jalan Kabupaten terutama sekali yang menghubungkan daerah pinggiran dengan pusat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan yang dilakukan sesuai karakteristik masing-masing kawasan dan untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur dal kondisi mantap dan baik sesuai kebutuhan wilayah dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur termasuk pengembangan dan peningkatan konektivitas fisik pada wilayah pinggiran yang berpotensi menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti di Kecamatan Kuala Pesisir, Tadu Raya, Tripa Makmur dan Kuala, serta wilayah kecamatan lainnya dengan memperhatikan karakteristik wilayah masing-masing. Pembangunan kewilayahan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan konektivitas dan peningkatan kualitas Jalan Kabupaten dengan Jalan Provinsi maupun Nasional untuk mendorong kerja sama antar kabupaten terutama pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan baru yang terkoneksi, memastikan Infrastruktur lainnya dalam kondisi baik dan berkualitas yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk memastikan terpenuhinya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Nagan Raya dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tabel 5.26.

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan

RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045			SKPK
Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045		Fokus Pembangunan Kewilayahan	
NO	KEWILAYAHAN	KET	
1	Kawasan Pertumbuhan	Suka Makmue	
		Kuala Pesisir	
		Kuala	
		Darul Makmur	
2	Kawasan Khusus	KIT Padang Turi (Kuala Pesisir)	
3	Kawasan Perkotaan	Suka Makmue	
		Kuala	
		Darul Makmur	
		Kuala Pesisir	
4	Kawasan Kemiskinan	Darul Makmur	
		Tripa Makmur	
		Tadu Raya	
		Beutong	
		Beutong Ateh Banggalang	

RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045			SKPK
Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045		Fokus Pembangunan Kewilayahan	
		Kuala	
5	Kawasan Kesehatan	Tripa Makmur	
		Darul Makmur	
		Tadu Raya	
		Kuala Pesisir	
		Beutong Ateuh Banggalang	
		Beutong	
		Seunagan Timur	
		Seunagan	
		Kuala	
		Suka Makmue	
6	Kawasan Pendidikan	Seunagan	
		Kuala Pesisir	
		Kuala	
		Suka Makmue	
		Darul Makmur	
7	Jalan Kabupaten	Tripa Makmur	
		Darul Makmur	
		Tadu Raya	
		Kuala Pesisir	
		Beutong Ateuh Banggalang	
		Beutong	
		Seunagan Timur	
		Seunagan	
		Kuala	
		Suka Makmue	
8	Pelabuhan Laut	Kuala Pesisir	
		Tripa Makmur	
		Tadu Raya	
		Darul Makmur	
9	Pelabuhan Udara	Kuala Pesisir	
10	Kawasan Perkebunan Sawit	Darul Makmur	
		Tripa Makmur	
		Tadu Raya	
		Kuala Pesisir	
		Kuala	
		Beutong	
11	Kawasan Pertanian Padi	Beutong	
		Seunagan Timur	

RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045			SKPK
Arah Kebijakan Transformasi RPJP Nagan Raya 2025-2045		Fokus Pembangunan Kewilayahan	
		Kuala	
		Seunagan	
		Tadu Raya	
12	Kawasan Peternakan	Kuala Pesisir	
		Kuala	
		Tadu Raya	
13	Kawasan Industri Kecil	Kuala	
		Kuala Pesisir	
		Seunagan	
		Beutong	
		Seunagan Timur	
		Darul Makmur	
14	Kawasan Perkebunan Kopi	Beutong Ateuh Banggalang	
		Beutong	
15	Kawasan Perikanan	Kuala Peisisir	
		Tadu Raya	
		Tripa Makmur	
		Darul Makmur	
		Beutong	
		Kuala	
16	Kawasan Nilam	Beutong	
		Seunagan Timur	
		Beutong Ateuh Banggalang	
17	SDA	Beutong Ateuh Banggalang	
		Suka Makmue	
		Beutong	
		Kuala	
		Darul Makmur	
		Seunagan	

5.2.6 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologis, Pembangunan Berkelanjutan dan Ramah Lingkungan.

Peningkatan ketangguhan individu, keluarga, komunitas, masyarakat, dan lingkungan yang mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi, serta mengoptimalkan modal sosial budaya, mewujudkan keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup berkualitas dan berkelanjutan, peningkatan kearifan lokal, peningkatan regulasi berdasarkan kebutuhan masyarakat serta mitigasi terhadap bencana, Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkelanjutan yang dititikberatkan pada program pembangunan berwawasan lingkungan, keseimbangan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kualitas lingkungan hidup, pengelolaan hutan adat, penguatan kearifan lokal untuk pengelolaan dan pengawasan lingkungan, peningkatan regulasi bidang lingkungan, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, mitigasi dan kontijensi bencana alam dan non-alam, pengelolaan sampah berkelanjutan, konservasi sumber daya alam terbarukan dan non-terbarukan, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pembangunan sanitasi, pengelolaan limbah industri, serta antisipasi krisis air untuk pertanian dan rumah tangga. mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan.

Ketahanan budaya dan ekologis difokuskan pada penguatan lingkungan pendukung yang memastikan keluarga dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya serta penyediaan akses partisipasi yang inklusif, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana, penyediaan rencana mitigasi, kesiapsiagaan, dan kontijensi yang terintegrasi berbasis pada risiko bencana, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi, Kecamatan Kuala Pesisir. Pengembangan Desa Tangguh Bencana dan Penguatan sumber daya manusia melalui program literasi lingkungan di tingkat sekolah. Optimalisasi penanganan kawasan hulu dari kerusakan hutan, normalisasi sungai, dan pengelolaan sampah terpadu. ; akuisisi teknologi berbasis riset dan inovasi untuk mendukung ketahanan pangan, air, dan energi; penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap kerusakan lingkungan .

Ketahanan budaya dan ekologis difokuskan pada terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara partisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, peningkatan kerja sama dengan unsur masyarakat adat, dunia usaha, perguruan tinggi dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup, pencegahan kerusakan hutan, koordinasi penanganan penambangan ilegal, penanganan kebakaran hutan dan lahan. Optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan

pada wilayah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi, Kecamatan Kuala Pesisir, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.

Ketahanan budaya dan ekologis pada tahap ini difokuskan untuk memastikan terwujudnya individu, keluarga dan masyarakat yang humanis yang dapat menjalankan fungsinya secara pastisipatif dan adaptif dalam dinamika pembangunan yang bergerak cepat, peningkatan ketahanan masyarakat terhadap risiko bencana dan dinamika pembangunan yang terus berubah, optimalisasi investasi ramah lingkungan dan antisipasi kerusakan lingkungan pada wilayah Kawasan Industri Terpadu (KIT) Padang Turi, Kecamatan Kuala Pesisir, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penerapan energi bersih dan ramah lingkungan.

5.2.6.1. Sasaran Pokok 13 : Meningaktnya Kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan.

Tabel 5.27.
Arah Kebijakan Beragama dan Berkebudayaan Maju

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dan Nagan Raya dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan keislaman dan Pancasila.	Nagan Raya	Kebudayaan, Kepariwisataan, Kekhususan
2	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Penguatan kerukunan antar umat beragama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan Kabupaten	Nagan Raya	Kesbangpol, Kekhususan, Pendidikan
3	Memperkuat lembaga wali nangroe dalam kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya (Pasal 95 UUPA)	Memperkuat lembaga Majelis Adat dalam kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.	Nagan Raya	Kekhususan, Kebudayaan

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
4	Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota di bidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat (Pasal 98 UUPA)	Memperkuat peran dan fungsi Lembaga adat sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dibidang keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat.	Nagan Raya	Kekhususan, Kebudayaan, Kembangpol
5	Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 221 UUPA)	Penguatan upaya perlindungan, pembinaan, pengembangan kebudayaan dan kesenian Aceh/ Nagan Raya yang berlandaskan nilai Islam dengan mengikutsertakan masyarakat dan lembaga sosial, mengakui, menghormati dan melindungi warisan budaya dan seni kelompok etnik di Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal. mengusahakan pengembalian benda-benda sejarah yang hilang atau dipindahkan dan merawatnya sebagai warisan budaya Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Nagan Raya	Kekhususan Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
6	Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Mendorong promosi dan pelestarian budaya Aceh/ Nagan Raya sebagai bagian dari identitas dan kekhasan daerah.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
7	Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya Aceh yang Islami.	Menggalakkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap budaya Aceh/ Nagan Raya yang Islami.	Nagan Raya	Kebudayaan, Pariwisata, Kekhususan Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kearsipan, Perpustakaan
8	Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Aceh. Mengakui dan melindungi hak-hak	Mengembangkan industri pariwisata berbasis syariah yang mengikuti prinsip-prinsip Islam dan mempromosikan kekayaan budaya dan alam Aceh/ Nagan Raya. Mengakui dan melindungi hak-hak	Nagan Raya	Pendidikan, Kebudayaan, Pariwisata, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Kelautan dan Perikanan

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	masyarakat Aceh untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Aceh.	masyarakat untuk menjalankan agama dan budaya mereka sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam kerangka otonomi khusus Aceh.		
9	Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pelestarian lingkungan	Nagan Raya	Sosial, Kekhususan, Lingkungan Hidup

Tabel 5.28.
Indikator Capaian Beragama dan Berkebudayaan Maju

NO	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	
			Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
				Base line 2025	Sasaran 2045				Base line 2025	Sasaran 2045					
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN														
		IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,4 - 65,57	Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Kebudayaan, Pariwisata	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,45 - 53,46	65,4 - 65,57	Peningkatan kualitas Beragama dan Berkebudayaan Maju melalui Penguatan nilai luhur kebudayaan Aceh dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila dan Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan, terutama di daerah perbatasan	Kebudayaan, Pariwisata
				38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,7 - 73,81	79,76 - 80,95		Kesatuan Bangsa dan Politik	38					

5.2.6.2. Sasaran Pokok 14 : Meningkatnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, dengan arah kebijakan :

Tabel 5.29.

Arah Kebijakan Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Promosi, pemenuhan hak, Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, kelompok rentan, dan perlindungan anak melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi diberbagai bidang pembangunan.	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
2	Penguatan pengarusutamaan gender, disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sosial, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan
3	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang mendukung penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Inklusi	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal yang mendukung penghormatan dan penghargaan terhadap perempuan, anak, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan Inklusi	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kesehatan
4	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, kesehatan reproduksi	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, kelompok rentan dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, kesehatan reproduksi pembentukan	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olahraga, Sosial Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga Kerja, Kesehatan

	pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.		Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Mahkamah Syariah
5	Meningkatkan peran dan fungsi pemuda anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Meningkatkan peran dan fungsi pemuda anak, perempuan, disabilitas, masyarakat adat, kelompok rentan dalam kehidupan sosial, kemandirian ekonomi, kreatif dan inovatif	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga, Kekhususan, Pendidikan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tenaga kerja, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kop UKM
6	Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Melakukan program pendidikan dan kesadaran gender untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender, mengatasi stereotip gender, dan mempromosikan peran aktif perempuan dalam pembangunan.	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7	Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.	Meningkatkan keterampilan parenting, dan mempromosikan hubungan yang sehat dan harmonis di dalam keluarga.	Nagan Raya	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8	Memberikan bantuan finansial dan pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan.	Memberikan bantuan finansial dan pendampingan kepada pemuda yang ingin memulai usaha atau proyek kewirausahaan.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga
9	Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Meningkatkan akses pemuda terhadap pendidikan formal maupun pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga
10	Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka tempat yang aman dan positif untuk	Membangun fasilitas publik seperti lapangan olahraga, taman, pusat pemuda, dan pusat kegiatan remaja dapat membantu memperkuat hubungan sosial di antara pemuda dan memberikan mereka	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga



	berkumpul dan beraktivitas.	tempat yang aman dan positif untuk berkumpul dan beraktivitas.		
11	Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.	Mendorong pemuda untuk terlibat dalam kegiatan sukarela dan kemanusiaan, serta mendukung program penggalangan dana untuk proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pemuda.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga
12	Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.	Mendorong partisipasi pemuda dalam proses politik lokal dan memberikan mereka kesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dapat memberikan rasa memiliki terhadap pembangunan daerah mereka.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga, Kesbangpol
13	Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program- program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.	Memfasilitasi pengembangan bakat seni dan budaya pemuda melalui program- program pelatihan, festival, dan pertunjukan dapat memperkuat identitas lokal dan meningkatkan apresiasi terhadap warisan budaya daerah.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga, Kebudayaan, Pariwisata
14	menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.	menyediakan layanan informasi dan konseling yang mudah diakses oleh pemuda terkait dengan berbagai hal, seperti pendidikan, kesehatan, kewirausahaan, dan masalah sosial lainnya.	Nagan Raya	Kepemudaan dan Olahraga

Tabel 5.30.

Indikator Capaian Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif

NO	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN														
		I E 1 4	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	3 9	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	73,19 – 73,23	78,25 – 78,54	Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	39	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	73,19 – 73,23	78,25 – 78,54	Peningkatan Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				4 0	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,47	0,24 - 0,22		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	40	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,32	97,38		Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



5.2.6.3. Sasaran Pokok 15 : Meningaktnya Lingkungan Hidup yang Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan *circular economy*, dengan arah kebijakan :

Tabel 5.31.
Arah Kebijakan Lingkungan Hidup yang Berkualitas

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, keanekaragaman hayati, konservasi, dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, keanekaragaman hayati, konservasi, dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya.	Nagan Raya	PUPR, Lingkungan Hidup
2	Peningkatan upaya perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari hutan lindung dan ekosistem alami terutama pada Kawasan Ekosistem Leuser wilayah Aceh dan penambahan kawasan lainnya (Pasal 150 UUPA)	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami lainnya sesuai kewenangan	Nagan Raya	Lingkungan Hidup
3	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i> .	Nagan Raya	Lingkungan Hidup
4	Pengelolaan sumber daya alam terutama minerba, dan migas terkait dengan industri hulu agar memperhatikan kelestarian lingkungan, dan wajib mengembangkan industri hilir di wilayah Aceh	Pengelolaan sumber daya alam (termasuk minerba) dilakukan sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh agar memperhatikan kelestarian lingkungan, dan wajib mengembangkan industri hilir.	Nagan Raya	Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup
5	Memperkuat regulasi terkait pengelolaan minerba dan migas, serta membentuk Badan Pengelolaan Minerba dan migas Aceh yang mencakup hulu dan hilir.	Dukungan penguatan regulasi terkait pengelolaan minerba dan migas yang berkeadilan, serta dukungan pembentukan Badan Pengelolaan Minerba dan Migas Aceh yang mencakup hulu dan hilir.	Nagan Raya	Sekretariat Daerah
6	Pengelolaan sumberdaya alam berbasis energi terbarukan untuk menuju kemandirian pangan dan air.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Nagan Raya	Sekretariat Daerah, PUPR Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanian,



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
				Kelautan dan Perikanan Pangan
7	Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi (Pasal 156 UUPA)	Setiap pelaku kegiatan usaha bertanggung-jawab untuk melakukan reklamasi dan rehabilitasi lahan yang dieksplorasi dan dieksploitasi.	Nagan Raya	Sekretariat Daerah, Penanaman Modal, Lingkungan Hidup
8	Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang berkelanjutan dan partisipatif dengan mengikutsertakan para pihak lainnya; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 162 UUPA)	Penguatan konservasi dan pengelolaan sumber daya alam di laut yang berkelanjutan dan partisipatif dengan mengikutsertakan masyarakat dan para pihak lainnya; perizinan budidaya; pengaturan tata ruang wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil; penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan atas wilayah laut yang menjadi kewenangannya; pemeliharaan hukum adat laut dan membantu keamanan laut; dan keikutsertaan dalam pemeliharaan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia .	Nagan Raya	Sekretariat Daerah, Kelautan Perikanan dan Pangan
9	Mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.	Mengembangkan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembangunan ekonomi dan sosial.	Nagan Raya	Lingkungan Hidup
10	Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.	Melakukan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan hidup.	Nagan Raya	Penanaman Modal, Lingkungan Hidup, ESDM
11	Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.	Melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan penggunaan energi terbarukan.	Nagan Raya	Lingkungan Hidup



NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
12	Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.	Membangun kerjasama dengan pihak eksternal seperti organisasi lingkungan, lembaga riset, dan donor internasional untuk mendukung pembangunan berorientasi lingkungan dan energi terbarukan.	Nagan Raya	Lingkungan Hidup, Perencanaan
13	Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.	Mengembangkan rencana tata ruang yang berkelanjutan untuk memastikan penggunaan lahan yang efisien dan berkelanjutan.	Nagan Raya	PUPR, Lingkungan Hidup

Tabel 5.32.
Indikator Capaian Lingkungan Hidup yang Berkualitas

No.	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
			Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah								
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025			Sasaran 2045					
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN														
		IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,592	0,656	Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Lingkungan Hidup	41	Luas Ruang Terbuka Hijau	75 Ha	30 % dari Total Luas Kabupaten Nagan Raya = 106.347 Ha	Peningkatan Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami, pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy	Lingkungan Hidup
				42	Kualitas Lingkungan Hidup					42	Kualitas Lingkungan Hidup				
					a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,56	81,1		Lingkungan Hidup		a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79.65	89.52		Lingkungan Hidup
					b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	20,00	60,00		Perumahan dan Kawasan permukiman		b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	51,27	90,00		Perumahan dan Kawasan permukiman
					c) Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan samph (%)	5.20 (2022)	89.54		Lingkungan Hidup		c) Persentase Sampah yang terkelola (%)	5%	30%		Lingkungan Hidup
					d)Proposi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah (% RT)	21.98 (2022)	100		Lingkungan Hidup		d)Persentase Pengurangan sampah (%)	19.63% (Data SIPSN)	50%		Lingkungan Hidup

5.2.6.4. Sasaran Pokok 16 : Meningkatnya Ketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan.

Tabel 5.33.

Arah Kebijakan Ketahanan Energi dan Kemandirian Pangan

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, termasuk penanganan banjir dan banjir bandang	Nagan Raya	PUPR, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
2	Memperkuat ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi; meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi; menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi; peningkatan / pembangunan proyek energi baru terbarukan: melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi; memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.	Memperkuat ketersediaan, ketahanan dan kedaulatan Energi; meningkatkan persentase pemanfaatan energi baru terbarukan terhadap total konsumsi Energi; menyediakan infrastruktur guna peningkatan ketersediaan Energi; peningkatan / pembangunan proyek energi baru terbarukan: melindungi masyarakat tidak mampu terutama masyarakat di daerah terpencil dan pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Gampong atau nama lain mandiri Energi; memfasilitasi kemitraan dengan pemerintah daerah dan dunia usaha untuk melaksanakan pembangunan sektor Energi; dan mendukung penelitian dan pengembangan Energi baru terbarukan.	Nagan Raya	Perencanaan, Sekretariat Daerah
3	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Konservasi Energi; Peningkatan dan pengembangan energi terbarukan.	Nagan Raya	PUPR, Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pertanian
4	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan	Pengembangan, pengelolaan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); peningkatan inovasi dan teknologi pertanian; dan pengembangan benih lokal.	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan

	pengembangan benih lokal.			Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,	Memberikan dukungan kepada petani dan nelayan dengan menyediakan akses terhadap teknologi pertanian yang modern,	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
6	Mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian	Mendorong penguatan sektor pertanian dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal teknologi pertanian, akses terhadap pasar, dan pengembangan infrastruktur pertanian	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
7	Meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis	Meningkatkan investasi dalam pertanian berkelanjutan dengan memberikan dukungan kepada petani dalam hal penyediaan sarana produksi, teknologi pertanian yang ramah lingkungan, dan pendidikan tentang praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan. Membangun dan meningkatkan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jaringan saluran air, jalan, dan pasar tradisional untuk meningkatkan aksesibilitas dan distribusi produk-produk pertanian. Memberikan bantuan langsung dan pembiayaan kepada petani untuk memperoleh bibit unggul, pupuk organik, pestisida alami, dan alat-alat pertanian modern yang mendukung praktik pertanian ramah lingkungan. Mendorong pengembangan pertanian organik sebagai alternatif untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan dan meminimalkan penggunaan bahan kimia sintetis	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kelautan dan Perikanan
8	Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti energi	Mendorong pengembangan energi terbarukan seperti	Nagan Raya	Perencanaan, Sekretariat Daerah

	surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri di Aceh.	energi surya, angin, dan biomassa sebagai sumber energi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk kebutuhan pertanian dan industri		
9	Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.	Melakukan program edukasi dan sosialisasi kepada petani dan masyarakat tentang pentingnya praktik pertanian berkelanjutan dan perlindungan lingkungan.	Nagan Raya	Pertanian, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
10	Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro	Mendorong investasi dalam pengembangan sumber energi terbarukan seperti energi surya, energi angin, energi biomassa, dan energi mikrohidro	Nagan Raya	Perencanaan, Penanaman Modal, Sekretariat Daerah
11	Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.	Mendorong peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pemukiman.	Nagan Raya	Perencanaan, Perindustrian, Sekretariat Daerah
12	Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.	Mendorong pengembangan transportasi berkelanjutan seperti transportasi umum, sepeda, dan transportasi berbasis jalan kaki.	Nagan Raya	Perhubungan

Tabel 5.34.
Indikator Capaian Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

No.	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
			Indikator	Target Daerah		Indikator	Target Daerah								
				Baseline 2025	Sasaran 2045		Baseline 2025			Sasaran 2045					
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN														
		IE16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan		43	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan			Peningkatan Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air, energi terbarukan, pelestarian dan pengelolaan Air ramah lingkungan, dan peningkatan pengelolaan kemandirian Pangan	
					a) Ketahanan Energi						a) Ketahanan Energi				
					Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*	700	1940		ESDM		- Jumlah Pelanggan Listrik				Sekretariat Daerah
					- Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*	149	90		ESDM						
					c) Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of	10.9	2.26		Pangan		b) Indeks Ketahanan Pangan		-		Pangan

No.	Misi	Arah Pembangunan		IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
				Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah					
					Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045				
					Undernourishment (%)										
					c) Ketahanan Air						c) Ketahanan Air				
					-Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0.19	7.53		Pengairan		-Jumlah Pelanggan PDAM	3.491	12.000		PUPR
					-Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	30.47	100		Perumahan dan Kawasan Permukiman		-Cakupan Pelayanan Air Minum Perpipaan (%)	64,94	90		Perumahan dan Kawasan Permukiman

5.2.7 Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Penyediaan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan dalam rangka mendukung potensi kewilayahan dan sektor prioritas, seperti pertanian, perkebunan, kelautan, pariwisata, dengan mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan dengan tetap mempertahankan aspek kelestarian lingkungan yang berpotensi terkait peningkatan ekonomi masyarakat dan juga peningkatan PAD dengan membuka akses ke desa-desa terpencil. Selain itu dalam rangka mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kota/Kecamatan sehingga integrasi dan keterhubungan antar wilayah dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang lestari. Percepatan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan terutama pada daerah yang terkoneksi dengan pusat pertumbuhan dalam rangka mendukung daya saing daerah serta mewujudkan aksesibilitas infrastruktur antar wilayah dengan prinsip berkelanjutan. Infrastruktur berkualitas difokuskan pada memastikan tersedianya infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mewujudkan aksesibilitas antar wilayah dengan tetap mempertahankan aspek keselamatan dan kelestarian lingkungan serta memastikan terpenuhinya infrastruktur dasar lainnya yang berkualitas dan ramah lingkungan.

5.2.7.1. Sasaran Pokok 17 : Meningkatnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca.

Tabel 5.35.
Arah Kebijakan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
1	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti tsunami, gempa bumi, dan erupsi gunung api, banjir, angin kencang, kebakaran hutan dan lahan, maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pendidikan, PUPR, Sosial, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan, Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu, Pengembangan Sistem Informasi, Diklat	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
	dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.	dan Logistik, Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana, Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana, Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana, Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.		Komunikasi dan Informasi, Sosial, Pendidikan dan pelatihan Kominsa, PUPR, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Kesehatan, Pendidikan
3	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Penurunan emisi GRK secara sistematis dan terpadu	Nagan Raya	Perencanaan, Sekeratarariat Daerah, Lingkungan Hidup, Perdagangan, Perindustrian
4	Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam (Pasal 226 UUPA)	Memperkuat keikutsertaan lembaga sosial kemasyarakatan untuk berperan dalam program perbaikan, pemulihan psikososial, dan kesehatan mental akibat konflik dan bencana alam	Nagan Raya	Kesehatan, Sosial, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
5	Membuat dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana di seluruh wilayah Aceh.	Membuat dan melaksanakan Rencana Penanggulangan Bencana yang komprehensif dan terpadu untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengurangi risiko bencana	Nagan Raya	Perencanaan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
6	Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.	Meningkatkan infrastruktur dan sistem peringatan dini untuk memantau dan memberi peringatan dini tentang ancaman bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan longsor.	Nagan Raya	Perencanaan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
7	Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan untuk menghadapi bencana.	Melakukan pelatihan dan pendidikan kepada masyarakat tentang pengurangan risiko bencana, tindakan darurat, dan persiapan untuk menghadapi bencana.	Nagan Raya	Pendidikan dan Pelatihan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
8	Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti daerah pesisir, lereng gunung, dan daerah aliran sungai	Melakukan pengendalian terhadap pemanfaatan lahan yang rawan bencana seperti daerah pesisir, lereng gunung, dan daerah aliran sungai	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
9	Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, shelter, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana.	Meningkatkan infrastruktur kedaruratan seperti rumah sakit, pos evakuasi, shelter, dan jalur evakuasi yang mampu bertahan dalam situasi bencana.	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	RPJP ACEH 2025 – 2045	RPJP NAGAN RAYA 2025 – 2045		Bidang Urusan
	Arah Kebijakan Transformasi Aceh	Arah Kebijakan Transformasi Nagan Raya	Pembangunan Kewilayahan	
10	Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan dan pedesaan.	Meningkatkan pengelolaan air dan drainase untuk mengurangi risiko banjir di daerah perkotaan dan pedesaan.	Nagan Raya	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, PUPR
11	Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana.	Meningkatkan kapasitas institusi pemerintah daerah dalam pengurangan risiko bencana, termasuk penyusunan kebijakan, perencanaan, dan implementasi program-program pengurangan risiko bencana.	Nagan Raya	Perencanaan, Sekretariat Daerah, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
12	Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.	Membangun kerjasama dan sinergi antara pemerintah daerah, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian, LSM, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam mengurangi risiko bencana.	Nagan Raya	Perencanaan, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 5.36.
Indikator Capaian Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

No.	Misi	Arah Pembangunan	IUP RPJPA 2025 – 2045				Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN	INDIKATOR SASARAN POKOK RPJP NAGAN RAYA 2025 - 2045					Sasaran Pokok	BIDANG URUSAN
			Indikator	Target Daerah		Indikator			Target Daerah						
				Baseline 2025	Sasaran 2045				Baseline 2025	Sasaran 2045					
V	KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI, PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN RAMAH LINGKUNGAN														
		IE17	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	149.1	121.51-97.95	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Kebencanaan	44	Indeks Risiko Bencana (IRB)	192,31	178,30	Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui kesiapsiagaan, penguatan kurikulum pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi, penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Kebencanaan
				45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)					45	Persentase Penurunan Emisi GRK Tahunan (%)				
					a. Kumulatif	18.54	42.17		Lingkungan Hidup		a. Kumulatif				Lingkungan Hidup
					b. Tahunan	29.56	75.38		DLH		b. Tahunan				Lingkungan Hidup

5.2.8 Mewujudkan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan

Memastikan kestinambungan pembangunan melalaui Peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi untuk memastikan setiap tahapan Rencana Pembangunan dapat dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika pertumbuhan penduduk, kondisi alam, dan perubahan perubahan mendasar lainnya, melakukan reformasi tata kelola Pemerintahan, Optimalisasi PAD, Peningkatan Kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui melalui pembiayaan Non Pemerintah seperti Dana CSR, Kerja sama dengan Perguruan Tinggi, termasuk LSM dan lembaga donor lainnya.

Kestinambungan pembangunan melalui peningkatan PAD dan optimalisasi pengelolaan sumber biaya pembangunan pemerintah, peningkatan Kerja sama Pembiayaan Pembangunan melalui CSR, reformasi tata kelola, kemudahan izin, regulasi untuk keberlanjutan pembangunan, mengatur mekanisme kestinambungan dan keberlanjutan pembangunan, peningkatan partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan.

Kestinambungan pembangunan dan keberlanjutan pada tahap ini difokuskan pada peningkatan, pemanfaatan, dan perluasan cakupan sektor yang menggunakan sumber dana non pemerintah, terutama investasi baik lokal maupun Nasional, CSR, LSM Funding atau sumber sumber pembiayaan pembangunan lainnya.

Kestinambungan pembangunan pada tahap ini difokuskan pada sinergitas pendanaan pemerintah dan non pemerintah yang semakin meningkat, terwujudnya kerja sama pembiayaan pembangunan dalam skala yang luas dengan berbagai pihak.

Tabel 5.38.
Arah Kebijakan Kestinambungan dan Keberlanjutan Pembangunan

NO	RPJP NAGAN RAYA 2025-2045			BIDANG URUSAN
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
1	Implementasi Transformasi	Penguatan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.	Nagan Raya	Sekretraiat Daerah
2		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb).	Nagan Raya	Perencasnaan, PUPR
3		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim,	Nagan Raya	Perencanaan, Sekretariat Daerah, Lingkungan Hidup, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

NO	RPJP NAGAN RAYA 2025-2045			BIDANG URUSAN
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
		terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.		
4		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan- Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas	Nagan Raya	Pertanahan
5		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan termasuk pembinaan dan pengawasan perizinan, akses ke <i>green/ low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, peningkatan penanaman modal/investasi terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian/perkebunan, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.	Nagan Raya	Ketenagakerjaan, Penanaman Modal, Perindustrian Perdagangan, Koperasi dan UKM, Pertanian, Lingkungan Hidup
6		Percepatan pelaksanaan reforma agraria.	Nagan Raya	Pertanahan
7		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri.	Nagan Raya	Perencanaan
8		Penegakan standar keandalan bangunan	Nagan Raya	Perumahan dan Kawasan Permukiman



NO	RPJP NAGAN RAYA 2025-2045			BIDANG URUSAN
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	Pembangunan Kewilayahan	
		yang berketahanan bencana dan iklim.		
9		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i> .	Nagan Raya	Perencanaan, Keuangan
10		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.	Nagan Raya	Perencanaan
11		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten dan Provinsi.	Nagan Raya	Perencanaan, PUPR
12		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.	Nagan Raya	Sekretariat Daerah
13		Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan.	Nagan Raya	Sekretariat Daerah, Sekrtariat Dewan, Perencanaan
14		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, termasuk perkuatan regulasi yang berkaitan dengan Dana Desa, peningkatan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa berbasis elektronik	Nagan Raya	Pengawasan, Pemberdayaan Masyarakat, Komunikasi dan Informasi

BAB VI
PENUTUP

Visi Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 **“Islami, Maju, dan Berkelanjutan”** merupakan tujuan pembangunan jangka panjang yang ingin dicapai untuk mewujudkan Kabupaten Nagan Raya yang Unggul Tahun 2045. Visi ini dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 yang merupakan perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya untuk jangka waktu dua puluh tahun ke depan. Perencanaan jangka panjang Kabupaten Nagan Raya ini disusun mengacu dan selaras dengan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2025-2045 dan visi misi dan arah kebijakan pembangunan Aceh yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Aceh 2025-2045.

RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 merupakan pedoman dalam penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya untuk setiap periodenya (5 tahunan) yang disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki dan sesuai dengan dinamika pembangunan Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional. Penyusunan RPJM juga merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional yang selaras dengan RPJM Aceh dan RPJMN serta terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang.

6.1. Kaidah pelaksanaan

Kabupaten Nagan Raya yang “Islami, Maju, dan Berkelanjutan” hanya dapat diwujudkan melalui peran aktif semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan tinggi/akademisi, LSM dan pihak terkait lainnya. Untuk mewujudkan visi dimaksud RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 harus dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing sebagai kaidah atau prinsip yang harus diikuti untuk memastikan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berlangsung dengan efisien, efektif, dan berkelanjutan. Kaidah pelaksanaan pembangunan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif, dan mekanisme perubahan yang merupakan instrumen penting dalam rangka memastikan terwujudnya Visi dan Misi RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025 – 2045 sesuai dengan yang direncanakan untuk mendukung terwujudnya Aceh Unggul dan Indonesia Unggul Tahun 2045.

6.2. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi perencanaan dan pendanaan merujuk pada keselarasan antara rencana pembangunan suatu daerah dengan alokasi sumber daya finansial yang tersedia untuk mendukung implementasi rencana tersebut. Ini

mengacu pada kemampuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang disusun sesuai dengan prioritas pembangunan, tujuan jangka panjang, dan kebutuhan masyarakat, serta dapat dijalankan dengan dukungan dana yang memadai. Sejumlah aspek yang harus diperhatikan dalam menjaga konsistensi perencanaan dan pendanaan antara lain kesesuaian tujuan dan prioritas, ketersediaan sumber daya, prioritas dan penilaian yang cermat terhadap berbagai program dan kegiatan serta penyesuaian anggaran sesuai dengan kebutuhan yang mendesak, fleksibilitas dan responsif, pengelolaan risiko, serta transparansi dan akuntabilitas.

Dengan memastikan adanya konsistensi antara perencanaan pembangunan dan pendanaan, pemerintah daerah dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan dampak pembangunan yang dihasilkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan visi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

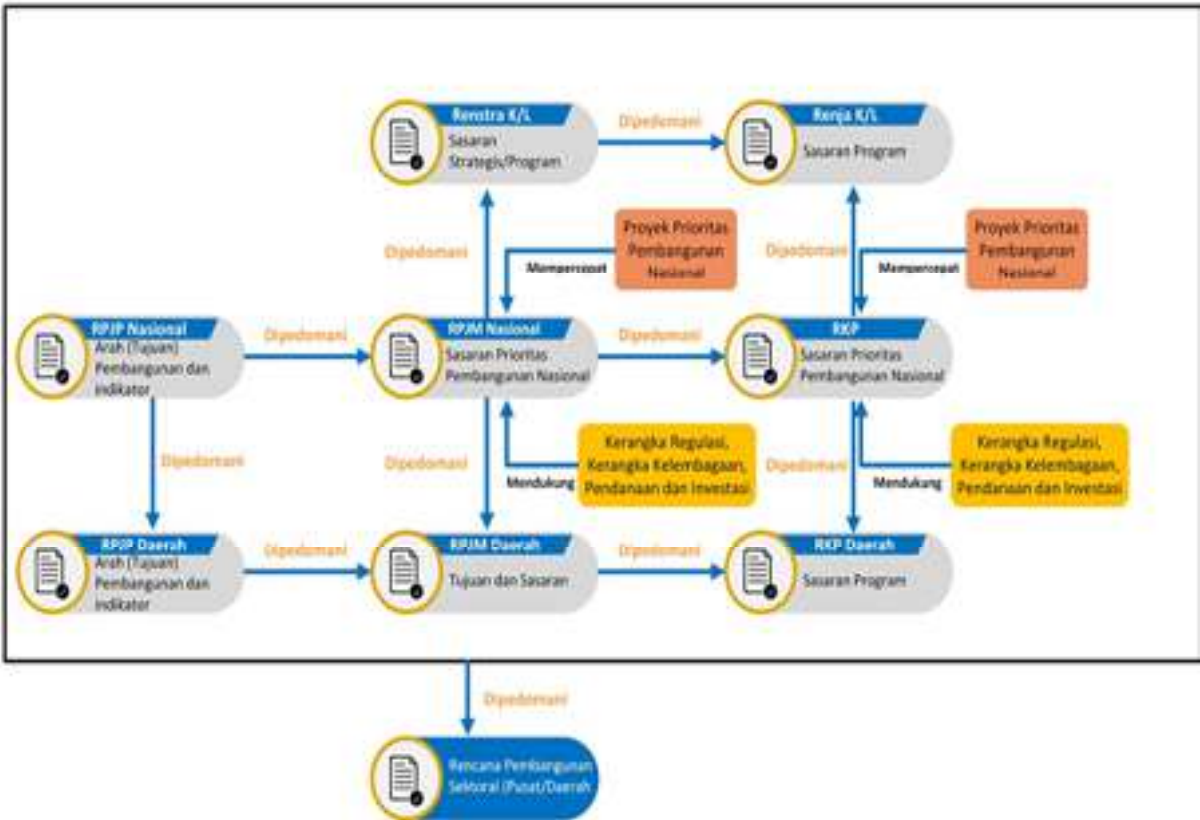
6.2.1. Konsistensi RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 dengan Perencanaannya Turunannya

Konsistensi antara RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 dengan dokumen perencanaan turunannya sebagai berikut :

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan sesuai dengan periodisasi RPJPA dan RPJPN, demikian juga dengan 8 (delapan) misi/agenda pembangunan Kabupaten Nagan Raya berikut upaya transformatif prioritas mempedomani muatan RPJPA dan RPJPN 2025-2045.
2. RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Nagan Raya Unggul 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik di tingkat pusat tidak dimuat di RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045, serta yang bersifat rencana strategis 5 tahunan semua SKPK akan dimuat ke dalam RPJM Kabupaten Nagan Raya.
3. Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nagan Raya dan indikator dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 mempedomani RPJPA dan RPJPN 2025-2045 dan menjadi pedoman dalam penentuan sasaran, arah kebijakan dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya dalam penyusunan RPJM Kabupaten Nagan Raya.
4. Tujuan, sasaran dan indikator prioritas daerah pada RPJM Kabupaten Nagan Raya menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada RKPK Nagan Raya, sasaran dan indikator strategis/program pada rencana strategis SKPK Nagan Raya (Renstra SKPK).
5. Sasaran dan indikator strategis/program Renstra SKPK Nagan Raya menjadi pedoman dalam menyusun sasaran dan indikator program pada rencana kerja SKPK (Renja SKPK).
6. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada RKPK dipedomani dalam menyusun sasaran dan indikator program Renja SKPK. Indikator prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya dilaksanakan melalui indikator Kinerja Utama (IKU) SKPK yang pada gilirannya dipergunakan sebagai penilaian akuntabilitas kinerja SKPK.

- 7. Dokumen RPJP, dokumen RPJM, dan dokumen RKP menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral seperti rencana induk/Master Plan/Grand Design, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan Kabupaten Nagan Raya.
- 8. Dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 menjadi pedoman penyusunan visi, misi, dan program bagi pasangan calon Bupati Nagan Raya dan Wakil Bupati Nagan Raya, serta anggota DPRD Kabupaten Nagan Raya.
- 9. Hal-hal menyangkut substansi yang belum dimasukkan atau belum lengkap/ belum rinci dalam dokumen RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 akan dijabarkan/didetilkan lebih lanjut dalam dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 4 tahapan (periode 2025-20455).
- 10.Pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya juga harus didukung dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, serta pendanaan dan investasi. Sebagai upaya mempercepat pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya juga ditentukan proyek prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya pada RPJM dan RKPK. Proyek prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya tersebut dilengkapi dengan ukuran keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya

Gambar 6.1
Keterkaitan Perencanaan Pembangunan Nasional dengan Perencanaan Pembangunan Daerah



Sumber: Kementerian PPN/ BAPPENAS, Tahun 2023

6.2.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Kerangka Logis (*Logical Framework Analysis*) adalah suatu metode perencanaan yang digunakan untuk merencanakan, mengimplementasikan,

memantau, dan mengevaluasi program dan kegiatan pembangunan. Prinsip-prinsip kerangka logis membentuk dasar pendekatan dan membantu dalam merumuskan rencana yang jelas dan terstruktur. Penyusunan RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 dan dokumen perencanaan turunannya juga menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan. Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik, dan Integratif sbb :

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan (kementerian/lembaga/daerah/pemangku kepentingan lainnya) serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

Kerangka Kerja Logis menggambarkan input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJP yang bersifat impact - outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan pemerintah pusat maupun daerah. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 harus menjadi bagian dari RPJM Kabupaten Nagan Raya, dan seluruh indikator RPJM Kabupaten Nagan Raya harus menjadi bagian dari Renstra SKPk Nagan Raya.

6.2.2.1. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan akan sangat menentukan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tercantum dalam RPJP Kabupaten Nagan Raya, RPJM Kabupaten Nagan Raya, dan RKPK Nagan Raya. Oleh karenanya sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan pembangunan mutlak diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program yang telah direncanakan harus mendapatkan alokasi anggaran yang sesuai untuk mewujudkan indikator kinerja yang ingin dicapai. Selain itu optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah perlu dilakukan secara lebih inovatif, integratif, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber

pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, Pemerintah kabupaten Nagan Raya juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman, hibah, dan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) untuk penganggaran pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan serta sumber-sumber pendanaan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

6.2.2.2. Kerangka Pengendalian

Pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program/kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana, mengidentifikasi dan mengatasi risiko, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengendalian merupakan proses yang penting dalam manajemen organisasi, karena membantu memastikan bahwa sumber daya digunakan secara efektif, risiko dikelola dengan baik, dan tujuan tercapai. Dengan sistem pengendalian yang efektif, organisasi dapat meningkatkan kinerja mereka dan tetap relevan dalam lingkungan yang berubah dengan cepat.

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan Aceh serta mendukung pencapaian pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Sejumlah aspek penting dari pengendalian dijelaskan sebagai berikut :

- **Perencanaan**
Perencanaan merupakan tahap awal dalam pengendalian . Organisasi menetapkan tujuan dan sasaran, merumuskan strategi untuk mencapainya, dan mengembangkan rencana tindakan yang sesuai. Perencanaan yang baik memastikan bahwa semua aktivitas berada dalam jalur yang benar dan terarah menuju pencapaian tujuan.
- **Pengorganisasian**
Pengendalian juga melibatkan pengorganisasian sumber daya organisasi. Ini termasuk alokasi tanggung jawab, pembagian kerja, dan pembentukan struktur organisasi yang efisien. Dengan mengatur sumber daya secara efektif, organisasi dapat memaksimalkan produktivitas dan efisiensi.
- **Pengarahan**
Pengarahan melibatkan komunikasi visi, tujuan, dan rencana kepada seluruh anggota organisasi. Manajemen memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan agar mereka dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif. Ini juga melibatkan motivasi dan pengembangan karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka.
- **Pengendalian**
Ini adalah tahap kunci dalam pengendalian. Manajemen memantau aktivitas organisasi, mengevaluasi kinerja, dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan. Jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian, tindakan korektif diambil untuk mengatasi

masalah tersebut. Pengendalian dapat dilakukan secara terus-menerus atau melalui siklus tertentu, seperti siklus perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, dan tindakan (*Plan-Do-Check-Act*).

- **Monitoring dan Evaluasi**
Bagian penting dari pengendalian adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Ini melibatkan pengumpulan data, analisis kinerja, dan identifikasi tren atau pola yang mungkin memerlukan tindakan korektif. Evaluasi yang baik membantu organisasi untuk memahami apa yang berfungsi dan apa yang tidak, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Pengendalian RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 mengacu pada Pengendalian RPJP Aceh 2025-2045 dan RPJP Nasional 2025-2045 yang dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Bupati. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

A. Pengendalian Perencanaan.

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan nasional dan daerah, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

- Pengendalian jangka menengah mencakup :
 - Penjabaran perencanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya 2025-2045 ke RPJM, dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya ke dokumen Rencana Strategis SKPK Nagan Raya.
 - Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional/Aceh/ Nagan Raya termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan.
 - Konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan
 - Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.
- Pengendalian jangka pendek mencakup :
 - Penjabaran perencanaan RPJM Kabupaten Nagan Raya ke dokumen RKPK Nagan Raya, dokumen RKPK ke dokumen dokumen Renja SKPK Nagan Raya.
 - Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan Nagan Raya termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan
 - Konsistensi perencanaan dan penganggaran.
 - Identifikasi risiko pembangunan dan mitigasinya.

B. Pengendalian pelaksanaan.

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup :

- Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan Nagan Raya
- Pemantauan mitigasi risiko pembangunan
- Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan Aceh
- Evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program SKPK yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya.

Agar pelaksanaan pengendalian dapat berjalan secara efektif, sistem pengendalian pembangunan harus didukung dengan tatanan regulasi yang baik. Tatanan regulasi tersebut mensinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen risiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja SKPK terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

6.2.3. Sistem Insentif

Sistem insentif dalam konteks pembangunan merujuk pada rangkaian kebijakan atau mekanisme yang dirancang untuk mendorong perilaku tertentu yang diinginkan/ pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Insentif sebagai sarana motivasi yang mendorong para pelaku pembangunan untuk bekerja dengan kemampuan optimal, tujuan pemberian insentif untuk menimbulkan semangat kerja, semangat kerja itu sendiri sangat menentukan antara pelaku pembangunan satu dengan yang lain. Untuk mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Nagan Raya, Aceh dan Nasional. Sistem insentif dapat berupa regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program-program pembangunan dengan mendorong partisipasi aktif dan motivasi dari berbagai pemangku kepentingan.

6.2.4. Mekanisme Perubahan

Mekanisme perubahan Rencana Pembangunan Daerah bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah selalu relevan dan responsif terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang, arah kebijakan, sasaran pokok dan

target capaian kinerja, RPJP Kabupaten Nagan Raya dapat dimutakhirkan melalui RPJM.

Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Mekanisme perubahan RPJP harus dilakukan melalui proses partisipatif dan transparan untuk memastikan perubahan RPJP dimaksud telah mengakomodir semua kondisi kekinian dan adaptif terhadap berbagai dinamika pembangunan yang terjadi.

6.2.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik dalam perencanaan merupakan proses penting yang melibatkan pertukaran informasi, pendapat, dan ide antara pemerintah, lembaga, komunitas, dan individu dalam rangka merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi rencana pembangunan. Tujuannya adalah untuk memastikan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, meningkatkan pemahaman tentang rencana pembangunan, dan membangun dukungan untuk implementasi rencana tersebut. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga hal pokok, yaitu: (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik RPJP Kabupaten Nagan Raya mengacu pada Komunikasi publik RPJP Nasional 2025-2045 yang berprinsip "tidak ada yang tertinggal (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan tiga pemangku kepentingan utama, yaitu Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. Komunikasi kepada Kementerian/Lembaga (K/L) dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi agar K/L dapat memberikan masukan terhadap prioritas pembangunan, sedangkan komunikasi kepada pemerintah daerah dilakukan secara berjenjang mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kabupaten, dan provinsi untuk membangun pemahaman dan partisipasi. Selanjutnya, komunikasi kepada masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil diaspora, pemuda dan kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas dan Lansia dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif.

Komunikasi publik tidak hanya penting selama proses perencanaan, tetapi juga dalam fase implementasi dan evaluasi rencana pembangunan. Masyarakat harus diberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik tentang bagaimana rencana tersebut diimplementasikan, serta untuk mengevaluasi dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

6.2.6. ANALISIS MANAJEMEN RESIKO

Analisis manajemen dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Nagan Raya merupakan bagian strategis yang bertujuan untuk menilai kesiapan kelembagaan, tata kelola pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, dan sinergi antarsektor dalam rangka mewujudkan visi transformasi daerah tahun 2045. Dalam konteks ini, pendekatan analitis yang digunakan menitikberatkan pada praktik-praktik lokal serta tantangan dan potensi khas daerah, sehingga arah kebijakan dan strategi yang disusun tidak bersifat generik, tetapi kontekstual dan dapat diimplementasikan secara efektif di lapangan.

Transformasi Nagan Raya sebagai kabupaten yang Islami, maju, dan berkelanjutan pada tahun 2045 tidak akan tercapai tanpa manajemen pembangunan yang adaptif, responsif, dan kolaboratif. Oleh karena itu, analisis manajemen dilakukan dengan menyoroti beberapa aspek utama:

1. Kelembagaan dan Tata Kelola Pemerintahan

Kekuatan manajerial pemerintah daerah menjadi pilar utama dalam memastikan program-program pembangunan berjalan sesuai arah transformasi. Kelembagaan di Nagan Raya masih menghadapi tantangan dalam hal efektivitas koordinasi lintas perangkat daerah, integrasi perencanaan, dan pelaksanaan program yang sering kali terfragmentasi. Diperlukan reformasi kelembagaan yang mendorong sinergi antarsektor serta penguatan peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penggerak utama perencanaan jangka panjang yang berbasis data dan berorientasi pada hasil.

2. Kapabilitas SDM dan Budaya Kerja

Salah satu hambatan transformasi daerah adalah rendahnya kapasitas sumber daya manusia, baik dalam aspek teknis, manajerial, maupun kepemimpinan strategis. Di tingkat birokrasi, penting dilakukan investasi pada peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan berkelanjutan, digitalisasi sistem kerja, dan pembudayaan etos kerja berbasis pelayanan publik. Dalam konteks masyarakat, pembangunan SDM yang inklusif dan berkelanjutan menjadi kunci agar transformasi tidak hanya terjadi di tingkat pemerintahan, tetapi menyentuh lapisan sosial secara luas.

3. Integrasi Program dan Sinkronisasi Anggaran

Manajemen pembangunan yang efektif membutuhkan perencanaan yang terintegrasi secara vertikal (dengan provinsi dan pusat) dan horizontal (lintas sektor di daerah). Dalam praktik di Nagan Raya, sering dijumpai tumpang tindih program atau belanja yang belum sepenuhnya mendukung prioritas jangka panjang. Diperlukan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dan didukung oleh sistem informasi terintegrasi, agar semua sumber daya diarahkan untuk mendukung pilar-pilar transformasi 2045.

4. Penguatan Sistem Monitoring, Evaluasi, dan Pengendalian

Pengendalian pembangunan daerah memerlukan sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan reflektif. Dalam konteks lokal Nagan Raya, pengawasan pembangunan belum sepenuhnya didukung oleh data yang akurat dan sistem pelaporan yang real time. Oleh karena itu, penguatan sistem monev menjadi bagian penting dalam manajemen pembangunan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam pengawasan berbasis partisipatif.

5. Komitmen dan Kepemimpinan Transformasional

Manajemen pembangunan akan berjalan efektif apabila didukung oleh komitmen politik dan kepemimpinan transformasional di seluruh tingkatan pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya perlu menunjukkan konsistensi arah kebijakan dan menjadikan RPJP ini sebagai dokumen acuan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan. Kepemimpinan daerah dituntut untuk tidak hanya menjadi administrator, tetapi juga agen perubahan yang mampu membangun kepercayaan publik dan menjembatani aspirasi masyarakat.

6.3. Pembiayaan Pembangunan

Visi pembangunan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2045 hanya dapat diwujudkan melalui kapasitas fiskal yang memadai. Sebagai daerah otonom Kabupaten Nagan Raya harus memiliki kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakannya untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Saat ini ketergantungan terhadap dana transfer dari Pemerintah masih sangat kuat, sehingga harus diupayakan untuk melakukan optimalisasi sumber-sumber PAD untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber-sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup:

- penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak
- perluasan kerja sama bilateral, multilateral dan kerja sama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber -sumber pembiayaan, terutama pembiayaan inovatif dengan syarat dan ketentuan yang paling menguntungkan, dan yang mendukung kerja sama ekonomi lainnya

- penguatan dan perluasan berbagai instrumen dalam kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha, khususnya pada aspek regulasi, tata kelola dan kelembagaan menuju model pengelolaan keuangan profesional yang mencakup sektor infrastruktur publik, utilitas dan infrastruktur sosial
- penerapan skema -skema pembiayaan yang mendukung pemberdayaan industri dalam negeri dan mendorong alih teknologi
- optimalisasi pemanfaatan aset melalui sekuritisasi, daur ulang aset, tukar guling aset hingga pemanfaatan peningkatan nilai aset yang dihasilkan dari investasi, aktivitas, dan kebijakan di suatu kawasan .

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui:

- pemanfaatan instrumen pendanaan jangka panjang (antara lain : dana pensiun, asuransi, instrumen di pasar modal, dan dana kekayaan negara lainnya.
- inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa-menyewa, jual beli, dan bagi hasil
- inovasi pembiayaan untuk merespon perubahan iklim yang mencakup berbagai jenis pembiayaan hijau, biru dan sirkular
- produk pembiayaan berbasis transaksi, seperti bursa karbon, bursa plastik ataupun bursa tematik lainnya
- serta penguatan bauran pendanaan (blended financing) melalui pemanfaatan dana yang bersifat katalitik seperti dana filantropi, dana sosial korporasi maupun dana keagamaan, termasuk jaminan, yang seluruhnya ditujukan untuk mengurangi risiko finansial bagi partisipasi sektor non publik dalam pembangunan nasional.

6.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah suatu rangkaian aturan, kebijakan, dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pelaksanaan rencana pembangunan. Untuk menjamin pelaksanaan RPJP Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 maka perlu ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045. Sedangkan untuk pelaksanaan masing-masing periode pembangunan sesuai tahapan rencana pembangunan jangka menengah (2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, 2040-2045) perlu disusun dan ditetapkan Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagan Raya sesuai dengan periode dimaksud yang menjabarkan visi dan misi kepala daerah terpilih dan regulasi pendukung lainnya yang diperlukan. Implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sinergi dan berkesinambungan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan visi dan misi rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan.

Kerangka regulasi yang kuat akan memberi dampak yang kuat pula terhadap implementasi rencana pembangunan yang telah dibuat. Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Nagan Raya Tahun 2025-2045 merupakan komitmen bersama Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan seluruh masyarakat untuk mewujudkan **Kabupaten Nagan Raya Unggul Tahun 2045** melalui perwujudan **Visi Kabupaten Nagan Raya yang Islami, Maju dan Berkelanjutan**.

A thick yellow diagonal line runs from the left edge of the page, slightly below the middle, towards the bottom right corner, separating the dark grey header area from the white footer area.

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA
2025**